KOTA BLITAR

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KOTA BLITAR TAHUN 2025

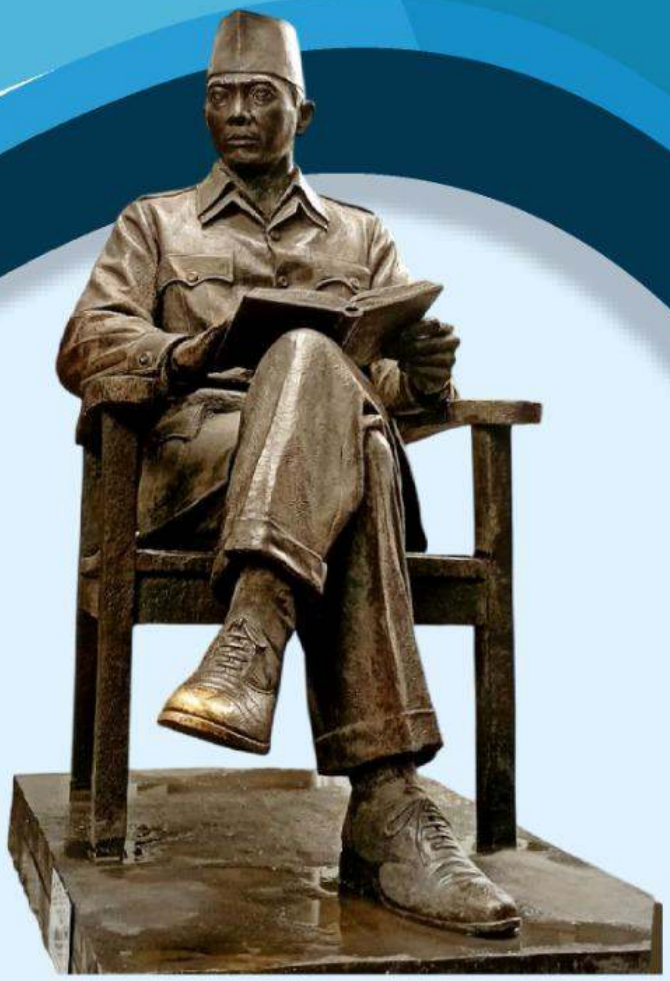

PEMERINTAH KOTA BLITAR
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Blitar Tahun 2025 ini dapat disusun dengan baik dan tepat waktu. Sebagai salah satu kewajiban pemerintah daerah untuk melaporkan pelaksanaan pemerintahannya.

Laporan ini bukan sekadar dokumen rutin tahunan, melainkan sebuah instrumen refleksi atas perjalanan pembangunan selama tahun 2025. LPPD berisi laporan kinerja urusan pemerintahan yang ditangani oleh Kota Blitar, memuat Indikator Kinerja Kunci (IKK) masing-masing urusan yang menjadi kewenangan daerah, yang dibuat dalam rangka memberikan gambaran pelaksanaan dan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Blitar selama Tahun 2025 sesuai dengat amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Secara umum penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Kota Blitar selama Tahun 2025 berjalan baik, meskipun masih ada beberapa hambatan.

Terima kasih dan penghargaan yang tinggi disampaikan kepada semua pihak atas dukungan dan partisipasinya dalam pembangunan di Kota Blitar. Kami menyadari bahwa keberhasilan yang diraih adalah hasil sinergi kolektif antara jajaran eksekutif, legislatif, pemangku kepentingan, dan seluruh elemen masyarakat. Tentu saja, masih terdapat tantangan yang memerlukan kerja keras dan inovasi berkelanjutan.

Semoga LPPD ini, semoga dapat memberikan gambaran yang transparan dan akuntabel mengenai potret pembangunan di Kota Blitar selama Tahun 2025, serta menjadi dasar evaluasi bagi penyempurnaan kebijakan di masa yang akan datang agar semakin baik.

Blitar, 22 Maret 2026
Wali Kota Blitar,

WALIKOTA BLITAR

Syauqul Muhibbin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		vii
DAFTAR GAMBAR		viii
BAB I	**PENDAHULUAN**	**I -1**
	1.1 Latar Belakang	I -2
	1.1.1 Penjelasan Umum	I -2
	1. Undang-undang pembentukan daerah	I -3
	2. Data Geografis Wilayah	I -3
	3. Jumlah Penduduk	I -5
	4. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan	I -8
	5. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daera	I -9
	6. Rincian Apartur Sipil Negara	I -10
``	7. Realisasi anggaran dan belanja daerah	I -13
	8. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja	I -23
	1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	I -35
	1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	I -54
BAB II	**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**II -1**
	2.1 Capaian Kinerja Makro	II -1
	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II -2
	2. Angka Kemiskinan	II -3
	3. Tingkat Pengangguran terbuka	II -4
	4. Pertumbuhan Ekonomi	II -5
	5. PDRB Per Kapita	II -9
	6. Ketimpangan Pendapatan	II -10
	2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	II -11
	2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Pemerintahan	II -12
	1. Pendidikan	II -12
	2. Kesehatan	II -12

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II -12
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman II -13
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat II -13
6. Sosial II -13
7. Tenaga Kerja II -14
8. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak II -14
9. Pangan II -14
10. Pertanahan II -14
11. Lingkungan Hidup II -14
12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil II -14
13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa II -15
14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana II -15
15. Perhubungan II -15
16. Komunikasi Dan Informatika II -15
17. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah II -16
18. Penanaman Modal II -16
19. Kepemudaan dan Olah Raga II -16
20. Statistik II -16
21. Persandian II -16
22. Kebudayaan II -16
23. Perpustakaan II -17
24. Kearsipan II -17
25. Kelautan dan Perikanan II -17
26. Pariwisata II -17
27. Pertanian II -17
28. Kehutanan II -17
29. Energi dan Sumber Daya Mineral II -18
30. Perdagangan II -18
31. Perindustrian II -18
32. Transmigrasi II -18

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan II -18
1. Perencanaan II -18
2. Keuangan II -18
3. Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan II -19

4. Penelitian dan Pengembangan II -19
5. Fungsi Pengawasan II -19
6. Fungsi Pengadaan II -19
7. Hubungan Dengan Perwakilan Daerah II -19
8. Pelayanan Publik II -19
2.2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah II -20
A. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja II -21
B. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Blitar Tahun 2025 Dan Target Akhir RPJMD Kota Blitar 2021 – 2026 II -27
C. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya II -29
D. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah II -33
E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai II -34
F. Analisis Program Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja II -191

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN III -1

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL IV -1
4.1 Urusan Pendidikan IV -1
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar IV -1
4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal IV -2
4.1.3 Realisasi IV -2
4.1.4 Alokasi Anggaran IV -20
4.1.5 Dukungan Personil IV -35
4.1.6 Permasalahan dan Solusi IV -37
4.2 Urusan Kesehatan IV -37
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar IV -37
4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal IV -39
4.2.3 Realisasi IV -40
4.2.4 Alokasi Anggaran IV -86
4.2.5 Dukungan Personil IV -88

4.2.6	Permasalahan dan Solusi	IV -88
4.3	Urusan Pekerjaan Umum	IV -89
4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar	IV -89
4.3.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	IV -89
4.3.3	Realisasi	IV -90
4.3.4	Alokasi Anggaran	IV -97
4.3.5	Dukungan Personil	IV -104
4.3.6	Permasalahan dan Solusi	IV -104
4.4	Urusan Perumahan Rakyat	IV -105
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar	IV -105
4.4.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	IV -105
4.4.3	Realisasi	IV -106
4.4.4	Alokasi Anggaran	IV -116
4.4.5	Dukungan Personil	IV -119
4.4.6	Permasalahan dan Solusi	IV -120
4.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV -121
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar	IV -121
4.5.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	IV -121
4.5.3	Realisasi	IV -122
4.5.4	Alokasi Anggaran	IV -163
4.5.5	Dukungan Personil	IV -175
4.5.6	Permasalahan dan Solusi	IV -175
4.6	Urusan Sosial	IV -175
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar	IV -175
4.6.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	IV -176
4.6.3	Realisasi	IV -176
4.6.4	Alokasi Anggaran	IV -207
4.6.5	Dukungan Personil	IV -210
4.6.6	Permasalahan dan Solusi	IV -212
4.7	Program dan Kegiatan	IV -213
BAB V	**PENUTUP**	V -1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kota Blitar Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2025 ..... I -5
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kota Blitar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019 – 2025 .. I -6
Tabel 1.3 Data Jumlah Kepala Keluarga Kota Blitar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025 ..... I -7
Tabel 1.4 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Blitar Tahun 2019 – 2025 ..... I -8
Tabel 1.5 Unit Organisasi Perangkat Daerah dan ASN Tahun 2025 ..... I -11
Tabel 1.6 ASN Pejabat Fungsional (Diluar Guru Dan Tenaga Kesehatan) Kota Blitar Tahun 2025 ..... I -12
Tabel 1.7 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Blitar Tahun 2025 ..... I -14
Tabel 1.8 Rincian Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2025 ..... I -15
Tabel 1.9 Rincian Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2025 ..... I -16
Tabel 1.10 Target, Realisasi dan Capaian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2025 ..... I -17
Tabel 1.11 Rincian anggaran dan realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2025 ..... I -19
Tabel 1.12 Rincian Belanja Operasi Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2025 ..... I -20
Tabel 1.13 Rincian Belanja Modal Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2025 ..... I -20
Tabel 1.14 Rincian Belanja Tak Terduga Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2025 I -21
Tabel 1.15 Rincian Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2025 ..... I -23
Tabel 1.16 Rincian Pengeluaran Pembiayaan pada Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2025 ..... I -23
Tabel 1.17 Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2025 ..... I -24
Tabel 2.1.1 Capaian Kinerja Makro Kota Blitar Tahun 2024 - 2025 ..... II -1
Tabel 2.1.2 IPM Kota Blitar Tahun 2025 ..... II -3

Tabel 2.1.3 Angka Kemiskinan Kota Blitar Tahun 2020 s.d 2025..... II -3

Tabel 2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Blitar Tahun 2019 – 2025..... II -5

Tabel 2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar Tahun 2019 – 2025..... II- 6

Tabel 2.1.6 PDRB ADHK dan ADHB Kota Blitar Kota Blitar Tahun 2020 – 2025..... II -7

Tabel 2.1.7 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dan Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rp) Tahun 2023 s.d 2025..... II -8

Tabel 2.1.8 PDRB Per Kapita Kota Blitar Tahun 2018 s.d 2025..... II -9

Tabel 2.1.9 Indeks Gini Kabupaten/Kota di Wilayah Karesidenan Kediri Tahun 2024 – 2025..... II -11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Kota Blitar Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan8 Tahun 2025 ..... I -6
Gambar 1.2 Data Jumlah Kepala Keluarga Kota Blitar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025 ... I -7
Gambar 1.3 Data Jumlah Kepala Keluarga Kota Blitar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025 ... I -8
Gambar 1.4 Peta Kecamatan Kota Blitar ..... I -9
Gambar 2.1 Garis Kemiskinan Kota Blitar Tahun 2015 s.d 2025..... II -4
Gambar 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar Tahun 2020 - 2025..... II -6
Gambar 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022-2025..... II -7
Gambar 2.4 PDRB ADHK dan ADHB Kota Blitar Tahun 2020 - 2025 ..... II -7
Gambar 2.5 PDRB Perkapita Kota Blitar Tahun 2018 - 2025 ..... II -9
Gambar 2.6 Indeks Gini Kota Blitar dibanding Dengan Indeks Gini Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2025..... II -10

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 yang merupakan salah satu tahapan penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak terlepas dari adanya perencanaan pada dokumen RKPD tahun 2025 sebagai penjabaran RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2030. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan terakhir dengan Unda ng-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 69 ayat (1) mengamanatkan kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD). Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) mencakup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir oleh bupati/ walikota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui SILPPD. Sedangkan muatan materi LPPD sebagaimana diatur dalam pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tersebut memuat :

1. capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan
3. capaian kinerja makro;
4. laporan penerapan SPM;
5. capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah;

Termasuk didalamnya guna mendukung capaian kinerja tersebut, harus dilengkapi dokumen pendukung sebagai dasar penyusunan capaian kinerja masing-masing urusan pemerintahan yang dilaksanakan.

1.1.1. Penjelasan Umum

1. Undang-undang Pembentukan Daerah

a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

c) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

d) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);

e) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

f) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

j) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);

k) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);

l) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2025;
m) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 09 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
n) Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2025;
o) Peraturan Walikota Blitar Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2025;
p) Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. Data Geografis Wilayah

Kota Blitar merupakan salah satu wilayah kota terkecil kedua di Provinsi Jawa Timur setelah Kota Mojokerto, Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 2022-100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, Kota Blitar memiliki luas wilayah 33,203 km2, yang terbagi dalam 3 (tiga) wilayah administrasi kecamatan dan 21 (dua puluh satu) kelurahan.

Dari luas wilayah tersebut, Kecamatan Sananwetan menjadi kecamatan terluas dengan luas wilayah 12,648 km2, Kecamatan Kepanjenkidul memiliki luas wilayah 10,426 km2 dan Kecamatan Sukorejo dengan luas wilayah 10.128 km2. Wilayah administrasi Kota Blitar dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Blitar dengan batas-batas sebagai berikut :

1). Sebelah Utara : Kecamatan Garum dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.
2). Sebelah Barat : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.
3). Sebelah Selatan : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.
4). Sebelah Timur : Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum Kabupaten Blitar.

Secara astronomis Kota Blitar terletak pada posisi 112°14-112°28 Bujur Timur dan 8°2-8°10 Lintang Selatan. Sedangkan secara geografis, Kota Blitar terletak di ujung selatan Provinsi Jawa Timur yang berjarak kurang lebih 160 km sebelah tenggara Kota Surabaya. Posisi Kota Blitar berada ditengah wilayah Kabupaten Blitar sehingga

satu-satunya wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Blitar adalah Kabupaten Blitar.

Kondisi topografi Kota Blitar dapat ditinjau dari kemiringan dan ketinggian lahan. Tingkat kemiringan dibagian utara 2° sampai 15°, sedangkan bagian tengah sampai selatan memiliki tingkat kemiringan 0° sampai 2°. Sedangkan rata-rata ketinggian sekitar 156 meter dpl, termasuk dalam dataran rendah. Ketinggian di bagian utara sekitar 245 m, bagian tengah 175 m dan bagian selatan 140 m dari permukaan air laut.

Secara hidrologi, Kota Blitar dilalui oleh tiga wilayah Daerah Pengaliran Sungai (DPS), yaitu:

- DPS Lahar yang melayani tangkapan air hujan di wilayah Blitar bagian Utara, Tengah, dan Barat;
- DPS Cari yang melayani tangkapan air hujan di wilayah Blitar bagian Utara dan Timur; dan

DPS Nanas yang melayani tangkapan air hujan di wilayah Blitar bagian Utara dan Barat

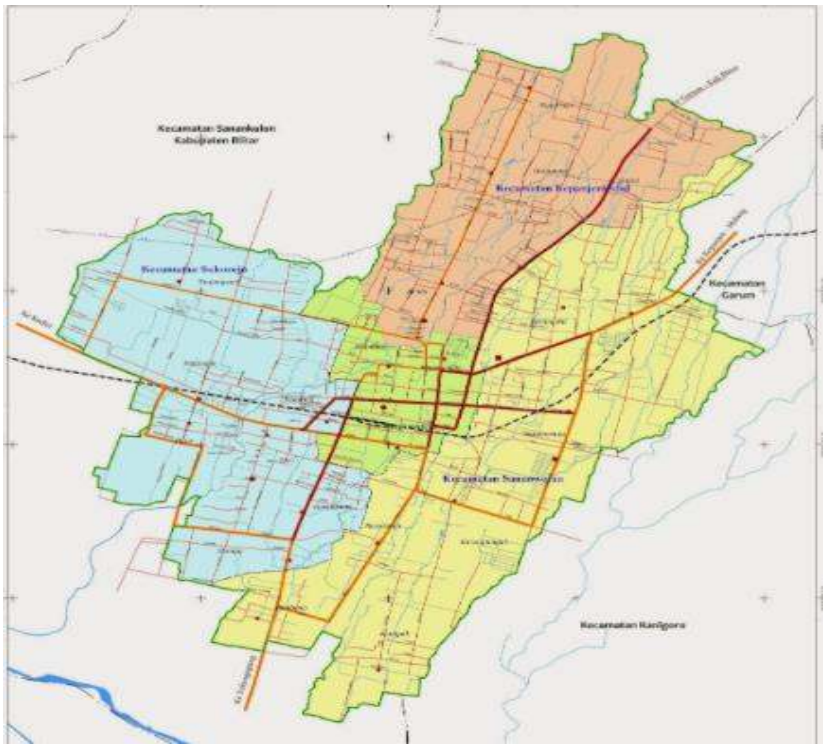

Peta Administratif Kota Blitar

- ❒ Sebelah Utara : Kecamatan Garum dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.
- ❒ Sebelah Barat : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.
- ❒ Sebelah Selatan : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.
- ❒ Sebelah Timur : Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum Kabupaten Blitar.

3. Jumlah Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Blitar sampai dengan akhir tahun 2021 mencapai 161.906 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 4.876 jiwa/km2, termasuk kategori kepadatan penduduk rendah. Berdasarkan sebaran penduduk jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kecamatan Sananwetan dengan jumlah mencapai 60.489 jiwa (37,36%), Kecamatan Sukorejo sebanyak 55.270 jiwa (34,14%), dan Kecamatan Kepanjenkidul dengan jumlah penduduk 46.147 jiwa (28,50%). Menurut jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan lebih besar daripada penduduk laki-laki, dengan persentase penduduk perempuan sebesar 50,14% sedangkan penduduk laki-laki sebesar 49,85%, data selengkapnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.1.
Jumlah Penduduk Kota Blitar Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2025

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)
Kepanjenkidul	**22.811**	**23.336**	**46.147**	**4.424**
Sukorejo	**27.756**	**27.514**	**55.270**	**5.456**
Sananwetan	**30.093**	**30.396**	**60.489**	**4.781**
JUMLAH	**80.660**	**81.246**	**161.906**	**4.876**

Sumber : DKB 202501, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

Diagram 1.1

Jumlah Penduduk Kota Blitar Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2025

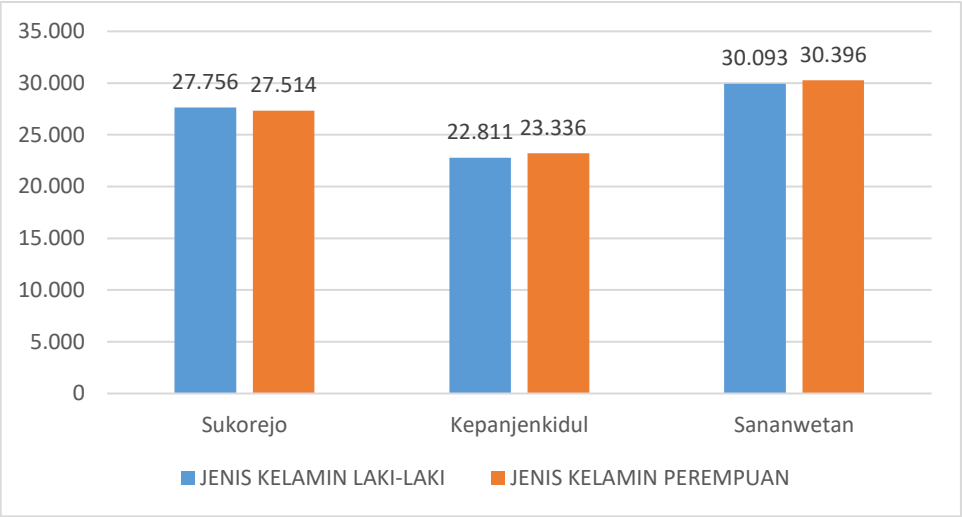

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, 2025

Tabel 1.2.
Jumlah Penduduk Kota Blitar Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2019 – 2025

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)
2025	**80.660**	**81.246**	**161.906**	**4.876**
2024	80.376	80.828	161.204	4.855
2023	79.651	80.130	159.781	4.906
2022	78.952	79.606	158.558	4.864
2021	78.820	79.424	158.244	4.859
2020	78.853	79.460	158.313	4.859
2019	78.634	79.275	157.909	4.847

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri

Jumlah Kepala Keluarga di Kota Blitar tahun 2025 sebesar 56.581 KK didominasi oleh Kepala Keluarga laki-laki sebesar 43.153 (76,27%) sedangkan Kepala Keluarga perempuan hanya 13.428 (23,73%).

Tabel 1.3

Data Jumlah Kepala Keluarga Kota Blitar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025

KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
KEPANJEN KIDUL	**12.160**	**3.944**	**16.104**
SUKOREJO	**14.827**	**4.643**	**19.470**
SANANWETAN	**16.166**	**4.841**	**21.007**
KOTA BLITAR	**43.153**	**13.428**	**56.581**

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

Diagram 1.2.

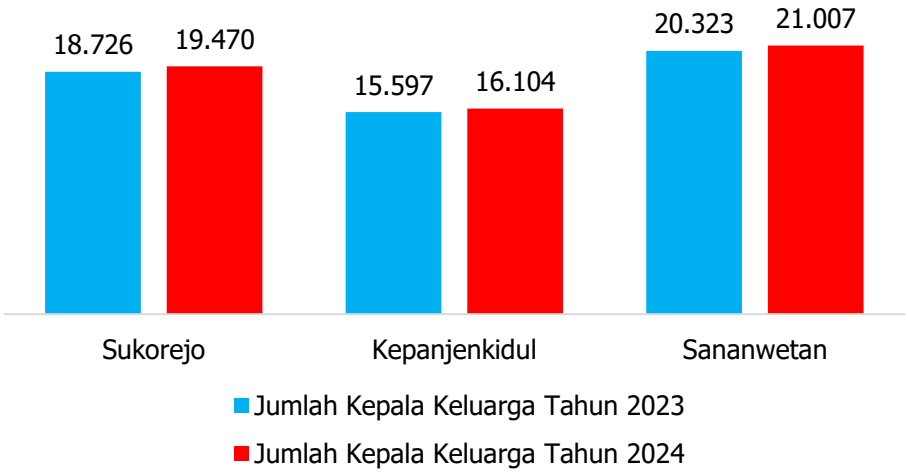

Sumber: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, 2025

b. Pertumbuhan Penduduk

Penduduk Kota Blitar terus mengalami fluktuasi sejak tahun 2019 tercatat dalam data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar sebesar 157.909 jiwa, hingga pada tahun 2025 mencapai 161.906 jiwa, atau bertambah sebanyak 3.997 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kota Blitar selama periode tahun 2019-2025, selengkapnya sebagaimana data sebagai berikut:

Tabel 1.4
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Blitar
Tahun 2019 – 2025

No.	Uraian	Tahun						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Penduduk Kota Blitar	157.909	158.313	158.244	158.558	159.781	161.204	161.906
2.	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,48%	0,26%	-0,04%	0.20%	0.77%	0.89%	0.46%

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

Diagram 1.3

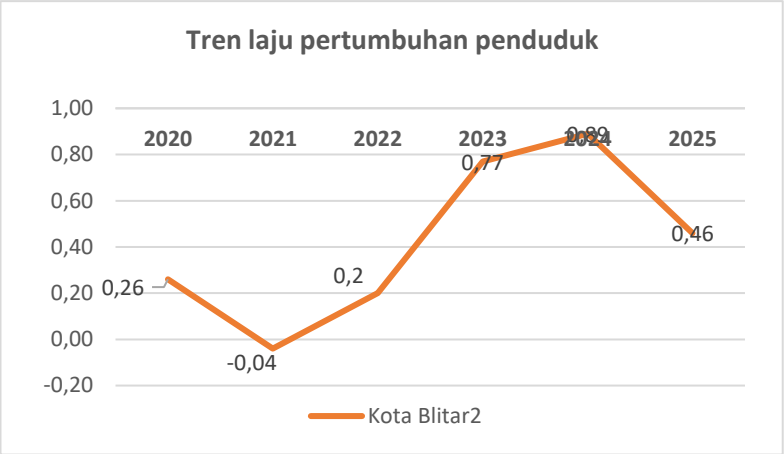

Sumber: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri

4. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan

Kota Blitar dengan luas 33,203 Km2 merupakan wilayah terkecil kedua di wilayah provinsi Jawa Timur dan keseluruhan berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Blitar, secara administrasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 2022-100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, Kota Blitar terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan dan 21 (dua puluh satu) kelurahan dengan penjelasan gambar peta dan tabel sebagai berikut:

Gambar 1.4.

Peta Kecamatan Kota Blitar

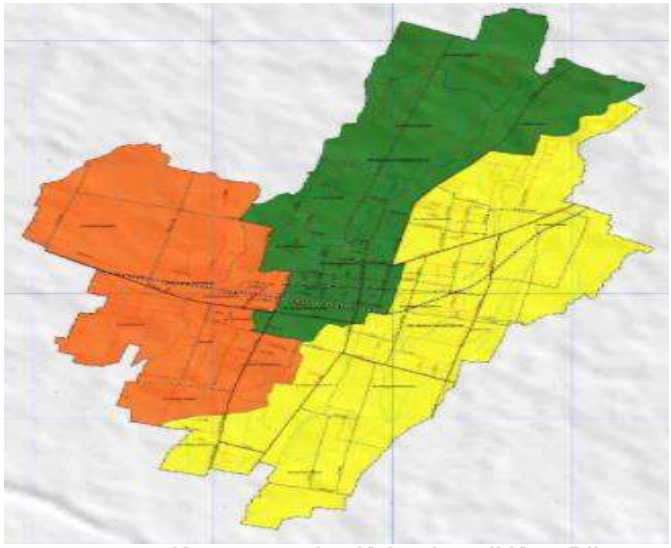

Kecamatan dan Kelurahan di Kota Blitar

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Sananwetan	Rembang
		Klampok
		Plosokerep
		Karangtengah
		Sananwetan
		Bendogerit
		Gedog
2	Kepanjenkidul	Kepanjenkidul
		Kepanjenlor
		Kauman
		Bendo
		Tanggung
		Sentul
		Ngadirejo
3	Sukorejo	Tlumpu
		Karangsari
		Turi
		Blitar
		Sukorejo
		Pakunden
		Tanjungsari

5. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Kelembagaan dan Struktur Perangkat daerah di Kota Blitar diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sedangkan

No	Unit Kerja	Dasar Hukum
1	2	3
1	Sekretariat Daerah	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
2	Sekretariat DPRD	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
7	Inspektorat Daerah	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
8	Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
9	Satuan Polisi Pamong Praja	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
10	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
11	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
13	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
14	Dinas Sosial	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
15	Dinas Kesehatan	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
16	Dinas Pendidikan	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
17	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
18	Dinas Lingkungan Hidup	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
19	Dinas Perhubungan	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
20	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
24	Kecamatan Sananwetan	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
25	Kecamatan Kepanjenkidul	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
26	Kecamatan Sukorejo	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
27	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
28	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
29	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021

6. Rincian Aparatur Sipil Negara

Pada tahun 2025, Jumlah Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Blitar sebanyak 30 unit kerja ASN sebanyak 3.357 orang yang tersebar di keseluruhan unit kerja, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 1.5
UNIT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN ASN TAHUN 2025

No	Unit Kerja	Struktural	Fungsional		Total
			JFT	JFU	
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Daerah	12	44	49	**105**
2	Sekretariat DPRD	5	6	14	**25**
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	19	10	**34**
4	Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	6	13	11	**30**
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	6	9	**21**
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB	7	8	7	**22**
7	Inspektorat Daerah	5	34	2	**41**
8	Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo	7	464	`123	**594**
9	Satuan Polisi Pamong Praja	11	24	28	**63**
10	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	5	15	8	**28**
11	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	8	14	**25**
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7	8	11	**26**
13	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	21	9	33	**63**
14	Dinas Sosial	6	9	10	**25**
15	Dinas Kesehatan	6	236	53	**295**
16	Dinas Pendidikan	13	1071	194	**1278**
17	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	9	12	22	**43**
18	Dinas Lingkungan Hidup	7	7	41	**55**
19	Dinas Perhubungan	14	6	26	**46**
20	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	8	26	12	**46**
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7	10	37	**54**
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	10	11	**26**
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	7	8	13	**28**
24	Kecamatan Sananwetan	43	2	49	**94**
25	Kecamatan Kepanjenkidul	40		57	**97**
26	Kecamatan Sukorejo	42	1	48	**91**
27	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik	6	18	8	**32**
28	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	4	3	11	**18**
29	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5	8	24	**37**
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar	5	3	7	**15**
Jumlah Keseluruhan		**327**	**2.088**	**942**	**3.357**

Sumber: BKPSDM Kota Blitar 2025

Sedangkan untuk PNS berdasarkan jabatan fungsional diluar guru dan kesehatan termasuk hasil penyetaraan jabatan sebanyak 262 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.6
ASN Pejabat Fungsional (Diluar Guru Dan Tenaga Kesehatan)
Kota Blitar Tahun 2025

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI
1	Administrator Database Kependudukan Ahli	4	
2	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli	3	
3	Analis Akuakultur Ahli	1	
4	Analis Hukum Ahli	1	
5	Analis Kebijakan Ahli	26	22
6	Analis SDM Aparatur Ahli	11	12
7	Pranata SDM Aparatur Terampil	3	3
8	Analis Ketahanan Pangan Ahli	1	
9	Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Ahli	4	
10	Analis Perdagangan Ahli	1	
11	Arsiparis Ahli	8	3
12	Arsiparis Terampil	10	1
13	Auditor Ahli	11	3
14	Auditor Terampil	4	4
15	Mediator Hubungan Industrial Ahli	1	
16	Medik Veteriner Ahli	4	
17	Pamong Budaya Ahli	2	
18	Pekerja Sosial Ahli	7	
19	Pembina Jasa Konstruksi Ahli	1	
20	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli	3	
21	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli	3	
22	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli	4	
23	Penata Penanggulangan Bencana Ahli	1	
24	Penata Ruang Ahli	2	
25	Penera Terampil	1	1
26	Pengamat Tera Terampil	2	2
27	Pengantar Kerja Ahli	2	
28	Pengawas Bibit Ternak Ahli	3	
29	Pengawas Koperasi Ahli	3	1
30	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) Ahli	13	13
31	Pengawas Perdagangan Ahli	2	
32	Pengawas Perikanan Ahli	2	
33	Pengawas Perikanan Terampil	1	
34	Pengawas Sekolah Ahli	12	
35	Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli	9	9
36	Pengembangan Teknologi Pembelajaran Ahli	2	
37	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli	3	3
38	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli	3	2
39	Penguji Kendaraan Bermotor Terampil	5	5
40	Penilik Ahli	3	
41	Penata Perijinan	3	1
42	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli	1	
43	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli	3	
44	Penyuluh Pertanian Ahli	6	2
45	Penyuluh Pertanian Terampil	1	1
46	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli	3	3

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI
47	Perencana Ahli	16	12
48	Perisalah Legislatif Ahli	2	
49	Polisi Pamong Praja Ahli	1	1
50	Polisi Pamong Praja Terampil	2	2
51	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	2	1
52	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli	4	
53	Pranata Komputer Ahli	7	3
54	Pranata Komputer Terampil	7	5
55	Pranata Pemadam Kebakaran	8	8
56	Pustakawan Ahli	7	1
57	Pustakawan Terampil	3	
58	Sandiman Ahli	2	2
59	Statistisi Ahli	1	1
60	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli	1	
JUMLAH		**262**	**127**

7. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

a. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pada tahun 2025 pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) mempengaruhi kerangka keuangan daerah. UU HKPD ini didesain untuk menyempurnakan pelaksanaan desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif. Adapun beberapa instrumen kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) pada tahun 2025 antara lain adalah pelaksanaan (i) opsen atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai upaya sinergi pemungutan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memperkuat *local taxing power*; (ii) evaluasi *earmarking* pajak daerah untuk meningkatkan akuntabilitas publik atas pengenaan pungutan

daerah; (iii) tersedianya opsi pembiayaan kreatif di daerah seperti obligasi, sukuk, dan dana abadi daerah, yang dapat dimanfaatkan oleh daerah untuk mengakselerasi pembangunan dan ekonomi daerah; (iv) penyelenggaraan *platform digital* sinergi kebijakan fiskal nasional dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Nasional; (v) sinergi bagan akun pusat dan daerah; dan (vi) *integrated monitoring* dan evaluasi pendanaan desentralisasi. Pemerintah bersama Pemerintah Daerah terus berkomitmen untuk mewujudkan kebijakan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang *impactful, innovative*, dan berintegritas untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Undang-Undang HKPD ini mengubah sejumlah aspek mengenai perimbangan keuangan dan perpajakan daerah yaitu mereklasifikasi jenis Pajak Daerah dan merasionalisasi Retribusi Daerah yang telah dilaksanakan mulai tahun 2024 juga mengamanatkan skema opsen atau pungutan tambahan atas pajak dengan persentase tertentu yang dikenakan kepada Wajib Pajak. Opsen dikenakan oleh kabupaten/kota atas pajak terutang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sehingga terdapat reklasifikasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil-Pendapatan Bagi Hasil Pajak menjadi Pajak Daerah.

Target Pendapatan dalam APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.903.346.510.854,96 dan sampai dengan akhir bulan Desember 2025 dapat tercapai (data sebelum diaudit BPK-RI) sebesar Rp.897.754.243.742,81 (99,38%) dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.7
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Blitar
Tahun 2025

Kode	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	209.894.227.510,00	192.993.335.527,10	91,95
1.2	Pendapatan Transfer Lain-Lain	681.197.771.684,94	692.655.830.321,00	101,68
1.3	Pendapatan Daerah Yang Sah	12.254.511.660,02	12.105.077.894,71	98,78
Jumlah Pendapatan Daerah		946.035.561.117,14	939.919.974.898,84	99,38

Sumber: BPKAD Kota Blitar, 2026 (data unaudited)

Secara umum realisasi pendapatan daerah Tahun anggaran 2025 sebesar 99,38% dengan komponen realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp192.993.335.527,10 atau 91,95%, Pendapatan Transfer Rp.692.655.830.321,00 atau mencapai 101,68% dari target yang direncanakan dan realisasi atas Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp12.105.077.894,71 atau mencapai 98,78%.

Adapun rincian dari masing-masing pendapatan tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari: (1) Pendapatan Pajak Daerah, (2) Pendapatan Retribusi Daerah, (3) Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Realisasi Pajak Daerah Tahun 2025 sebesar Rp.80.925.544.955,40 atau mencapai 84,98% dari target; Retribusi Daerah sebesar Rp.105.700.256.190,00 atau 97,74%; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp.1.181.168.435,64 atau 98,43%; dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp.5.186.365.946,06 atau 97,34% dari target yang telah ditetapkan. Rincian target, realisasi dan capaian PAD Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.8
Rincian Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Blitar
Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Capaian %
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	95.226.053.260,00	80.925.544.955,40	84,98
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	108.140.059.250,00	105.700.256.190,00	97,74
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.200.000.000,00	1.181.168.435,64	98,43
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.328.115.000,00	5.186.365.946,06	97,34
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		**209.894.227.510,00**	**192.993.335.527,10**	**91,95**

Sumber: BPKAD Kota Blitar, 2026 (data unaudited)

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan dan Insentif Fiskal. Sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025 sebesar Rp.692.655.830.321,00 atau mencapai 101,68% dari target yang ditetapkan. Capaian komponen Pendapatan Transfer selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.9
Rincian Penerimaan Pendapatan Transfer
Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Capaian%
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	681.197.771.684,94	692.655.830.321,00	101,68
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	608.849.424.684,94	615.766.823.471,00	101,14
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil	85.973.033.000,00	87.361.090.200,00	101,61
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	456.689.840.686,00	461.919.554.375,00	101,15
1.2.1.3	Dana Alokasi khusus – Fisik	658.260.000,00	533.052.578,00	80,98
1.2.1.4	Dana Alokasi khusus - Non Fisik	65.528.290.998,94	65.953.126.318,00	100,65
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	6.407.817.000,00	6.407.817.000,00	100,00
1.2.2.1	Insentif Fiskal	6.407.817.000,00	6.407.817.000,00	100,00
1.2.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	65.940.530.000,00	70.481.189.850,00	106,89
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil	64.375.000.000,00	68.915.659.850,00	107,05
1.2.3.2	Bantuan Keuangan	1.565.530.000,00	1.565.530.000,00	100,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		**681.197.771.684,94**	**692.655.830.321,00**	**101,68**

Sumber: BPKAD Kota Blitar, 2026 (data unaudited)

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Blitar diperoleh dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

yang terdiri atas Lain-lain Pendapatan dan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.10
Target, Realisasi dan Capaian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun 2025

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	12.254.511.660,02	12.105.077.894,71	98,78
1.3.3	Pendapatan Lainnya	12.254.511.660,02	12.105.077.894,71	98,78
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		9.338.187.768,02	9.180.873.676,42	98,32

Sumber: BPKAD Kota Blitar, 2026 (data unaudited)

4) Permasalahan dan solusi

Permasalahan utama dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah terbatasnya kapasitas fiskal daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan yang bersifat mendesak, strategis, dan terus mengalami peningkatan. Kondisi tersebut dihadapkan pada kebijakan Pemerintah Pusat terkait pengelolaan dana transfer ke daerah. Hingga saat ini tingkat ketergantungan Kota Blitar terhadap Pendapatan Transfer masih cukup tinggi yang artinya bahwa kemandirian Kota Blitar relatif masih rendah.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Blitar dituntut untuk mengelola pendapatan daerah secara cermat, terencana, dan bertanggung jawab guna menjamin keberlanjutan pembiayaan pembangunan daerah. Pemerintah Kota Blitar perlu menyusun proyeksi penerimaan daerah secara akurat dan realistis dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian nasional, regional, serta kondisi internal daerah. Selain itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui peningkatan inovasi dan optimalisasi penggalian potensi serta sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sebagai langkah strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.

b. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Kebijakan belanja diarahkan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan pencapaian isu-isu strategis daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dari visi dan misi Rancangan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar 2025 - 2029 serta belanja mandatory spending yang diamanatkan Pemerintah Pusat.

Prinsip dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan selalu berlandaskan pada: (1) prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber- sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, (2) prinsip money follow program yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada program prioritas utama pembangunan daerah dan (3) prinsip value for money yang mengarahkan bahwa pemanfaatan anggaran harus memiliki nilai ekonomi, efisien dan efektif yang berarti bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki nilai tambah/kemanfaatan bagi kesejahteraan rakyat.

Pemerintah Kota Blitar menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Kota Blitar yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Belanja untuk kebutuhan perintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Kebijakan daerah harus dilakukan secara cermat dan hati-hati dengan mengutamakan kepentingan yang lebih dekat dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga kondisi neraca anggaran keuangan Kota Blitar tetap dapat dipertahankan pada kondisi yang tetap sehat, seimbang dan proporsional dan disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja (performance budgeting) berorientasi pada pencapaian output dan outcomes serta sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2025.

Di awal tahun 2025, Presiden Prabowo mengeluarkan intruksi yang kemudian berpotensi mengubah cara negara dalam mengelola anggaran pemerintahan. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 diterbitkan sebagai langkah nyata untuk memastikan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Presiden mengamanatkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyesuaikan anggaran mereka dengan kebijakan ini, bahkan beberapa pos belanja daerah. Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mengelola

keuangan negara secara lebih efektif dan efisien. Dengan penghematan yang signifikan, diharapkan setiap pengeluaran dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran di tingkat pusat maupun daerah. Hasil efisiensi belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar selanjutnya dialihkan untuk meningkatkan kinerja program bidang Pendidikan, bidang Kesehatan, peningkatan infrastruktur dan sanitasi, optimalisasi penanganan pengendalian inflasi, stabilitas harga makanan dan minuman, penyediaan cadangan pangan dan prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

c. Target dan realisasi anggaran belanja daerah

Realisasi Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2025 sebesar Rp.889.809.768.511,62 atau terealisasi 93,00%, secara ringkas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.11
Rincian anggaran dan realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Capaian%
2.1	BELANJA OPERASI	867.308.338.851,57	813.385.925.612,62	93,78
2.1.1	Belanja Pegawai	379.387.469.534,43	356.460.445.460,00	93,96
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	447.086.559.289,14	417.914.688.774,62	93,48
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	
2.1.5	Belanja Hibah	26.544.440.028,00	24.921.441.528,00	93,89
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	14.289.870.000,00	14.089.349.850,00	98,60
2.2	BELANJA MODAL	79.378.039.144,98	73.823.741.736,00	93,00
2.2.1	Belanja Tanah	0,00	0,00	
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	23.184.251.721,65	20.593.270.804,00	88,82
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	19.754.610.530,90	18.578.868.738,00	94,05
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	34.317.414.192,43	32.735.803.302,00	95,39
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.901.762.700,00	1.699.091.944,00	89,34
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	220.000.000,00	216.706.948,00	98,50
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.110.975.986,00	2.600.101.163,00	25,72
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	10.110.975.986,00	2.600.101.163,00	25,72
JUMLAH BELANJA DAERAH		**956.797.353.982,55**	**889.809.768.511,62**	**93,00**

Sumber: BPKAD Kota Blitar, 2026 (data unaudited)

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp.867.308.338.851,57 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.813.385.925.612,62 atau 93,78%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 1.12

Rincian Belanja Operasi Pemerintah Kota Blitar
Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
2.1	BELANJA OPERASI	867.308.338.851,57	813.385.925.612,62	93,78
2.1.1	Belanja Pegawai	379.387.469.534,43	356.460.445.460,00	93,96
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	447.086.559.289,14	417.914.688.774,62	93,48
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	
2.1.5	Belanja Hibah	26.544.440.028,00	24.921.441.528,00	93,89
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	14.289.870.000,00	14.089.349.850,00	98,60
JUMLAH BELANJA OPERASI		**867.308.338.851,57**	**813.385.925.612,62**	**93,78**

Sumber: BPKAD Kota Blitar, 2026 (data unaudited)

2) Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja yang meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja Gedung dan bangunan, belanja jalan, jaringan dan irigasi dan belanja asset tetap lainnya. Belanja modal pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp.79.378.039.144,98 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.73.823.741.736,00 atau 93,00%, (data sebelum audit oleh BPK-RI). Adapun rincian Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.13

Rincian Belanja Modal Pemerintah Kota Blitar
Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
2.2	BELANJA MODAL	79.378.039.144,98	73.823.741.736,00	93,00
2.2.1	Belanja Tanah	0,00	0,00	
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	23.184.251.721,65	20.593.270.804,00	88,82
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	19.754.610.530,90	18.578.868.738,00	94,05
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	34.317.414.192,43	32.735.803.302,00	95,39
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.901.762.700,00	1.699.091.944,00	89,34
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	220.000.000,00	216.706.948,00	98,50

Kode	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
JUMLAH BELANJA MODAL		79.378.039.144,98	73.823.741.736,00	93,00

Sumber: BPKAD Kota Blitar, 2026 (data unaudited)

3) Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp.10.110.975.986,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.2.600.101.163,00 atau 25,72%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 1.14

Rincian Belanja Tak Terduga Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.110.975.986,00	2.600.101.163,00	25,72
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.110.975.986,00	2.600.101.163,00	25,72

Sumber: BPKAD Kota Blitar, 2026 (data unaudited)

4) Permasalahan dan solusi

Beberapa permasalahan yang sering muncul dalam penyerapan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, sehingga penyerapan anggaran masih rendah antara lain:

a) Dokumen perencanaan belum tersedia/tidak lengkap

Proses penyusunan dokumen perencanaan yang kurang matang (tidak lengkap dan/atau belum tersedia), baik dokumen perencanaan teknis konstruksi ataupun dokumen pendukung lainnya yang belum tersedia sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan fisik.

Dalam hal penyelesaian dan penguatan dokumen perencanaan ini, Pemerintah Kota Blitar perlu memperkuat kualitas perencanaan sejak tahap awal, khususnya pada proses penyusunan dokumen teknis dan dokumen pendukung kegiatan. Penyusunan dokumen perencanaan harus diselesaikan sebelum tahun anggaran berjalan, disertai dengan peningkatan koordinasi antar perangkat daerah terkait serta penguatan fungsi reviu internal agar seluruh dokumen telah memenuhi ketentuan dan siap dilaksanakan tepat waktu.

b) Belum taat/tertib schedule/jadwal pencairan anggaran

Masih terjadi penumpukkan pelaksanaan kegiatan dan proses pencairan di triwulan ke-3 dan ke-4, sehingga pelaksanaan pekerjaan fisik yang

dikerjakan di akhir tahun anggaran tidak berjalan lancar sehingga mengganggu kinerja penyerapan anggaran.

Untuk mengatasi ketidaktertiban jadwal pelaksanaan dan pencairan anggaran, perlu dilakukan penegakan disiplin terhadap schedule pelaksanaan kegiatan secara lebih konsisten. Perangkat daerah didorong untuk menyusun rencana pelaksanaan dan rencana penarikan dana (anggaran kas) secara realistis dan terukur sejak awal tahun anggaran, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala pada setiap triwulan. Upaya ini perlu didukung dengan pengendalian dan percepatan proses administrasi pencairan anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat tersebar secara proporsional sepanjang tahun anggaran dan tidak menumpuk pada triwulan akhir.

d. Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan mencakup:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)
b. Pencairan Dana Cadangan
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
d. Penerimaan Pinjaman Daerah
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
f. Penerimaan Piutang Daerah
g. Penerimaan Dana Bergulir
h. Penerimaan Hasil Penarikan

Adapun Penerimaan Pembiayaan pada APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Tabel 1.15

**Rincian Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kota Blitar
Tahun Anggaran 2025**

Kode	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	53.450.843.127,59	53.493.687.975,80	100,08
6.1.1	Penggunaan SILPA	53.450.843.127,59	53.450.843.127,59	100,00
6.1.10	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	42.844.848,21	0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		**53.450.843.127,59**	**53.493.687.975,80**	**100,08**

Sumber: BPKAD Kota Blitar, 2026 (data unaudited)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Dengan demikian dalam APBD Tahun Anggaran 2025, SiLPA yang dimasukkan adalah sisa realisasi di Tahun Anggaran 2024. Terlihat bahwa realisasi penerimaan pembiayaan dari SILPA 100,00% dari target yang telah direncanakan sebelumnya.

e. Pengeluaran Pembiayaan

Pemerintah Kota Blitar tidak mengalokasikan Pengeluaran Pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2025.

Tabel 1.16

**Rincian Pengeluaran Pembiayaan pada Pemerintah Kota Blitar
Tahun Anggaran 2025**

Kode	Uraian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	0,00	0,00	0,00

Sumber: BPKAD Kota Blitar, 2026 (data unaudited)

8. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

Pemerintah Kota Blitar berkomitmen dalam melaksanakan program yang telah direncanakan dan dianggarkan dalam rangka memenuhi pelayanan dasar kepada masyarakat dan program lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rincian realisasi program per urusan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.17
Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah
Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2025

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja
A	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		557.997.487.067,31	525.492.099.263,62
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan		211.771.267.445,00	195.983.013.652,00
		Dinas Pendidikan Dan UPT Satuan Pendidikan Smpn	211.771.267.445,00	195.983.013.652,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	143.998.591.275,00	136.094.498.665,00
		Program Pengelolaan Pendidikan	60.010.424.470,00	52.302.186.827,00
		Program Pengembangan Kurikulum	780.871.200,00	750.351.624,00
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	6.964.170.500,00	6.820.468.334,00
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	17.210.000,00	15.508.202,00
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		250.903.085.354,31	240.651.819.531,62
		Dinas Kesehatan, UPT Puskesmas Dan RSUD Mardi Waluyo	250.903.085.354,31	240.651.819.531,62
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	178.953.452.429,31	171.188.045.239,79
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	68.129.761.400,00	65.795.237.148,83
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	711.361.400,00	684.566.914,00
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	319.434.225,00	311.787.144,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.789.075.900,00	2.672.183.085,00
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		42.335.701.766,00	39.684.589.413,00
		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	42.335.701.766,00	39.684.589.413,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.832.734.666,03	7.069.764.225,00
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	7.820.076.567,00	7.668.135.657,00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	265.365.000,00	126.601.000,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.074.295.180,00	912.642.108,00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	4.807.271.449,52	4.683.957.400,00
		Program Penataan Bangunan Gedung	9.388.632.271,45	8.838.590.620,00
		Program Penyelenggaraan Jalan	9.493.921.532,00	9.051.999.958,00
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	612.177.100,00	449.447.483,00
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.041.228.000,00	883.450.962,00
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman		13.942.565.587,00	12.682.785.048,00
		Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	13.942.565.587,00	12.682.785.048,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.385.605.117,00	4.836.653.857,00
		Program Pengembangan Perumahan	1.810.982.315,00	1.705.194.410,00
		Program Kawasan Permukiman	3.513.381.566,07	2.966.768.142,00
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.999.672.000,00	1.959.160.652,00
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	1.232.924.588,93	1.215.007.987,00
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		17.308.848.463,00	15.672.886.492,00
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.538.116.104,00	11.411.955.711,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.184.421.989,04	7.296.598.879,00
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	4.037.098.314,96	3.820.728.303,00
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	316.595.800,00	294.628.529,00
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.770.732.359,00	4.260.930.781,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.776.254.098,73	3.445.692.703,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja
		Program Penanggulangan Bencana	994.478.260,27	815.238.078,00
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial		21.736.018.452,00	20.817.005.127,00
		DINAS SOSIAL	21.736.018.452,00	20.817.005.127,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.868.620.444,00	4.491.587.091,00
		Program Pemberdayaan Sosial	1.087.764.600,00	971.778.691,00
		Program Rehabilitasi Sosial	957.632.069,00	914.688.229,00
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	14.587.442.039,00	14.232.352.900,00
		Program Penanganan Bencana	199.514.300,00	172.394.000,00
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	35.045.000,00	34.204.216,00
B	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		123.460.186.627,00	116.502.387.493,00
1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja		2.886.316.800,00	2.607.540.131,00
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Tenaga Kerja	2.886.316.800,00	2.607.540.131,00
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.699.031.000,00	2.473.147.442,00
		Program Penempatan Tenaga Kerja	93.266.000,00	81.449.099,00
		Program Hubungan Industrial	94.019.800,00	52.943.590,00
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		5.960.675.098,00	5.754.902.976,00
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	5.960.675.098,00	5.754.902.976,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.699.278.511,00	4.581.192.603,00
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	786.109.200,00	761.209.879,00
		Program Perlindungan Perempuan	154.872.409,00	126.383.956,00
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	105.204.055,00	94.028.286,00
		Program Perlindungan Khusus Anak	215.210.923,00	192.088.252,00
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan		9.340.787.250,00	8.598.370.472,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja
		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	9.340.787.250,00	8.598.370.472,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.163.739.250,00	8.426.350.147,00
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	123.513.900,00	119.392.250,00
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	39.299.100,00	38.467.975,00
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	14.235.000,00	14.160.100,00
4	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan		284.980.000,00	265.272.775,00
		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	284.980.000,00	265.272.775,00
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	16.400.000,00	2.750.000,00
		Program Penatagunaan Tanah	268.580.000,00	262.522.775,00
5	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup		22.534.882.353,00	21.994.200.313,00
		Dinas Lingkungan Hidup	22.534.882.353,00	21.994.200.313,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.794.184.845,67	6.620.960.755,00
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	31.047.500,00	31.037.500,00
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	385.233.600,00	379.781.268,00
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	3.662.708.759,33	3.410.029.838,00
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	2.890.000,00	2.885.000,00
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	14.650.000,00	14.130.000,00
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	296.475.400,00	274.944.348,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	305.964.200,00	287.204.191,00
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	2.600.000,00	2.476.250,00
		Program Pengelolaan Persampahan	11.039.128.048,00	10.970.751.163,00
6	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		6.818.818.695,00	6.282.690.298,00
		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	6.818.818.695,00	6.282.690.298,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.138.834.916,00	5.628.659.876,00
		Program Pendaftaran Penduduk	295.889.379,00	286.882.623,00
		Program Pencatatan Sipil	146.835.600,00	142.567.920,00
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	222.210.800,00	209.619.879,00
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	15.048.000,00	14.960.000,00
7	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		22.000.000,00	21.450.000,00
		Bagian Pemerintahan	22.000.000,00	21.450.000,00
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	22.000.000,00	21.450.000,00
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		2.748.242.516,00	2.368.752.534,00
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	2.748.242.516,00	2.368.752.534,00
		Program Pengendalian Penduduk	218.275.629,00	185.194.792,00
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.296.710.800,00	1.000.569.706,00
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.233.256.087,00	1.182.988.036,00
9	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan		19.839.666.628,00	18.504.664.294,00
		Dinas Perhubungan	19.839.666.628,00	18.504.664.294,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.340.150.024,59	6.863.189.607,00
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	12.499.516.603,41	11.641.474.687,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja
10	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika		15.261.042.742,00	14.662.060.402,00
		Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	15.261.042.742,00	14.662.060.402,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.052.229.296,00	5.598.273.166,00
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	3.216.536.136,00	3.120.111.099,00
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	5.992.277.310,00	5.943.676.137,00
11	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah		7.097.276.241,00	6.716.287.808,00
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Tenaga Kerja	7.097.276.241,00	6.716.287.808,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.947.306.041,00	4.626.680.990,00
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	79.118.800,00	78.529.121,00
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	16.471.700,00	15.098.096,00
		Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	63.303.700,00	63.302.800,00
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	190.288.600,00	188.591.000,00
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	694.813.400,00	682.313.865,00
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	692.141.200,00	662.459.038,00
		Program Pengembangan Umkm	413.832.800,00	399.312.898,00
12	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal		7.279.133.232,00	7.074.789.683,00
		Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	7.279.133.232,00	7.074.789.683,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.550.630.758,00	6.386.308.145,00
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	78.852.000,00	58.933.000,00
		Program Promosi Penanaman Modal	257.396.974,00	256.788.000,00
		Program Pelayanan Penanaman Modal	297.511.000,00	282.508.388,00
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	94.742.500,00	90.252.150,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja
13	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga		14.872.423.079,00	13.620.540.726,00
		Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	14.872.423.079,00	13.620.540.726,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.165.677.057,00	4.762.914.029,00
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.502.938.200,00	1.879.573.560,00
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	6.875.156.622,00	6.649.404.938,00
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	328.651.200,00	328.648.199,00
14	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik		200.529.150,00	198.470.445,00
		Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	200.529.150,00	198.470.445,00
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	200.529.150,00	198.470.445,00
15	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian		167.765.200,00	145.387.251,00
		Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	167.765.200,00	145.387.251,00
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	167.765.200,00	145.387.251,00
16	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan		1.173.591.101,00	1.153.254.872,00
		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	1.173.591.101,00	1.153.254.872,00
		Program Pengembangan Kebudayaan	533.467.101,00	523.549.872,00
		Program Pembinaan Sejarah	610.124.000,00	601.225.000,00
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	30.000.000,00	28.480.000,00
17	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan		6.738.436.942,00	6.304.588.649,00
		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	6.738.436.942,00	6.304.588.649,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.893.968.713,00	5.490.846.249,00
		Program Pembinaan Perpustakaan	844.468.229,00	813.742.400,00
18	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan		233.619.600,00	229.163.864,00
		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	233.619.600,00	229.163.864,00
		Program Pengelolaan Arsip	233.619.600,00	229.163.864,00
C	Urusan Pemerintahan Pilihan		32.789.161.008,00	30.233.878.133,00
1	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan		393.728.756,00	385.293.413,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja
		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	393.728.756,00	385.293.413,00
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	294.117.656,00	289.493.363,00
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	99.611.100,00	95.800.050,00
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata		10.592.625.256,00	9.925.501.214,00
		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	10.592.625.256,00	9.925.501.214,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.827.025.368,00	8.208.305.004,00
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	971.673.800,00	939.200.110,00
		Program Pemasaran Pariwisata	764.659.488,00	752.316.100,00
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	29.266.600,00	25.680.000,00
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian		4.473.784.582,00	4.093.000.713,00
		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	4.473.784.582,00	4.093.000.713,00
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	489.882.800,00	476.104.120,00
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.681.168.992,00	1.414.576.155,00
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	229.588.700,00	225.186.814,00
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	17.675.000,00	16.872.000,00
		Program Perizinan Usaha Pertanian	6.352.100,00	6.071.500,00
		Program Penyuluhan Pertanian	2.049.116.990,00	1.954.190.124,00
3	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan		13.780.344.900,00	12.807.155.246,00
		Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	13.780.344.900,00	12.807.155.246,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.115.355.146,00	7.564.072.928,00
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	5.355.235.454,00	4.943.249.059,00
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	202.713.400,00	193.318.359,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	107.040.900,00	106.514.900,00
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian		3.548.677.514,00	3.022.927.547,00
		Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	3.548.677.514,00	3.022.927.547,00
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	3.548.677.514,00	3.022.927.547,00
D	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan		76.538.255.485,00	70.862.199.267,00
		SEKRETARIAT DAERAH	44.878.196.542,00	42.436.466.438,00
		BAGIAN PEMERINTAHAN	1.845.936.890,00	1.731.796.445,00
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	1.845.936.890,00	1.731.796.445,00
		BAGIAN HUKUM	709.040.840,00	672.385.233,00
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	709.040.840,00	672.385.233,00
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	9.869.187.535,00	9.447.989.870,00
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	9.251.537.905,00	8.905.800.356,00
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	617.649.630,00	542.189.514,00
		BAGIAN UMUM	31.263.546.573,00	29.461.780.775,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	31.263.546.573,00	29.461.780.775,00
		BAGIAN ORGANISASI	684.497.015,00	645.591.052,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	684.497.015,00	645.591.052,00
		BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	505.987.689,00	476.923.063,00
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	505.987.689,00	476.923.063,00
		SEKRETARIAT DPRD	31.660.058.943,00	28.425.732.829,00
		SEKRETARIAT DPRD	31.660.058.943,00	28.425.732.829,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.986.542.433,00	19.385.712.261,00
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	10.673.516.510,00	9.040.020.568,00
E	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan		54.092.193.904,24	42.354.955.703,00
1	Perencanaan		6.958.118.715,00	6.678.835.184,00
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.958.118.715,00	6.678.835.184,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.455.179.276,00	5.300.505.621,00
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	842.259.539,00	775.259.710,00
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	660.679.900,00	603.069.853,00
2	Keuangan		33.242.933.182,24	22.869.569.311,00
		Badan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah	33.242.933.182,24	22.869.569.311,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.128.582.128,80	11.283.533.531,00
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	11.712.948.766,00	4.121.920.033,00
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.867.765.212,44	5.228.442.739,00
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.533.637.075,00	2.235.673.008,00
3	Kepegawaian		10.872.950.382,00	9.970.196.856,00
		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.872.950.382,00	9.970.196.856,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.022.959.282,00	7.578.978.647,00
		Program Kepegawaian Daerah	2.849.991.100,00	2.391.218.209,00
4	Pendidikan Dan Pelatihan		2.306.465.425,00	2.128.421.479,00
		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.306.465.425,00	2.128.421.479,00
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.306.465.425,00	2.128.421.479,00
5	Penelitian Dan Pengembangan		711.726.200,00	707.932.873,00
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	711.726.200,00	707.932.873,00
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	711.726.200,00	707.932.873,00
F	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan		11.076.744.746,00	10.695.114.075,00
		Inspektorat Daerah	11.076.744.746,00	10.695.114.075,00
		Inspektorat	11.076.744.746,00	10.695.114.075,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.821.452.866,00	7.637.444.834,00
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.560.183.880,00	2.408.099.091,00
		Program Perumusan Kebijakan,	695.108.000,00	649.570.150,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja
		Pendampingan Dan Asistensi		
G	Unsur Kewilayahan		92.576.184.313,00	84.956.858.849,00
		Kecamatan	92.576.184.313,00	84.956.858.849,00
		Kecamatan Kepanjenkidul Dan Kelurahan	30.055.596.999,00	27.130.347.722,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.489.433.291,23	12.310.028.242,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	586.377.201,64	542.974.433,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	15.340.667.306,13	13.751.861.934,00
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	639.119.200,00	525.483.113,00
		Kecamatan Sukorejo Dan Kelurahan	29.552.354.865,00	27.449.642.383,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.194.757.624,00	13.851.862.414,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	311.555.704,00	295.599.200,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	13.828.899.537,00	13.103.898.524,00
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	217.142.000,00	198.282.245,00
		Kecamatan Sananwetan Dan Kelurahan	32.968.232.449,00	30.382.200.988,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.858.065.811,00	13.221.359.465,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	592.531.616,00	510.882.150,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	17.296.178.436,00	16.429.892.773,00
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	221.456.586,00	220.066.600,00
H	Unsur Pemerintahan Umum		8.267.140.832,00	7.507.161.428,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.583.773.884,00	3.999.954.736,00
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.279.184.300,00	1.178.370.602,00
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	661.920.108,00	659.545.708,00
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	28.448.240,00	26.529.200,00
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	177.003.100,00	148.600.200,00
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.536.811.200,00	1.494.160.982,00
Jumlah			**956.797.353.982,55**	**888.604.654.211,62**

1.1.2. Perencanaan Pembangunan

1. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. mengacu pada arah kebijakan RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026, telahaan kebijakan nasional dan provinsi, serta kinerja pembangunan tahun sebelumnya, maka tema pembangunan Kota Blitar Tahun 2025 adalah **"Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perdagangan yang Berbasis Digital menuju Kemandirian Ekonomi Daerah",** dengan fokus pada pemantapan perekonomian dan berbasis digital.

Tema pembangunan Kota Blitar tahun 2025 sesuai dengan tema pembangunan Provinsi Jawa Timur yaitu "Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inkulsif dan Berkelanjutan dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, mewujudkan pemerintahan yang baik, dan pemerataan infrastruktur.

Penentuan prioritas pembangunan di dasarkan pada hasil penelaahan permasalahan pembangunan dan perumusan Isu Strategis. Beberapa isu strategis yang menjadi agenda dan prioritas pembangunan Kota Blitar tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
b. Percepatan pemulihan ekonomi daerah
c. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur yang memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup
d. Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan SDM berdaya saing
e. Pemantapan Kota Blitar sebagai kota tujuan wisata sejarah yang berwawasan kebangsaan dan kebudayaan
f. Peningkatan nilai nilai religius dan social dalam kerangka lingkungan yang kondusif, dinamis dan berkelanjutan
g. Pemantapan penerapan good governance dan pelayanan prima berbasis teknologi informas

2. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi merupakan rumusan mengenai suatu kondisi yang akan dituju atau diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Visi daerah merupakan landasan utama dalam merumuskan berbagai kondisi yang lebih mikro pada level misi, tujuan, dan sasaran. Visi RPJMD Kota Blitar didasarkan pada beberapa nilai luhur yaitu Kota Blitar didasarkan pada beberapa nilai luhur yaitu nilai-nilai religius, kebudayaan, kebangsaan, dan kearifan lokal.

Kota Blitar adalah kota bersejarah yang terletak di bagian Selatan Jawa Timur, dengan gaung dan nama besar Kota Blitar terus tercatat dalam catatan emas perjuangan bangsa. Sejak Aryo Blitar mengusir tentara Tar tar kembali ke negaranya pada abad 13 M, masa perjuangan kemerdekaan, Kota Blitar juga menjadi saksi sejarah patriotisme Shoedanco Soeprijadi beserta PETA Blitar melawan kekejaman tentara Jepang. Sebuah peristiwa yang kemudian sebagai pemantik perjuangan merebut kemerdekaan dilakukan daerah-daerah lain dan meneguhkan Kota Blitar sebagai kota Patria atau Kota Pembela Tanah Air.

Predikat sebagai Kota Patria semakin menguat dengan kisah Bung Karno yang tidak dapat dipisahkan dari Kota Blitar. Di Kota Blitar inilah Bung Karno tinggal dan dibesarkan, hingga menjadi bumi tempat peristirahatan terakhir Putra Sang Fajar. Berbagai memorabilia Presiden Pertama tersebut, tersusun rapi dan lengkap di Perpustakaan Bung Karno dan Istana Gebang. Peringatan hari lahir Pancasila dan

Bulan Bung Karno pun dirayakan dengan meriah dan penuh khidmat. Menjadikan Kota Blitar layak mendapat julukan sebagai "Bumi Bung Karno" dan "Kota Proklamator". Selain dikenal dengan patriotisme dan peninggalan sejarah yang menjadi daya tarik di bidang pariwisata, Kota Blitar juga memiliki banyak potensi ekonomi termasuk perikanan, industri makanan ringan, industri kerajinan rumah tangga dan lain sebagainya. Berbagai potensi tersebut menjadi modal besar yang dimiliki Kota Blitar untuk tumbuh menjadi kota yang sejahtera di Jawa Timur.

Komitmen pemerintah daerah untuk terus membangun dengan semangat gotong-royong dan Kerukunan tetap diutamakan. Potensi - potensi tersebut yang menjadi modal besar dimiliki Kota Blitar untuk tumbuh menjadi kota yang unggul dan KEREN di Jawa Timur. Ditambah dengan semangat patriotisme yang mendarah daging sejak Aryo Blitar, Shoedanco Soeprijadi hingga Bung Karno, yang berpadu dengan nilai – nilai religius memperkokoh Blitar sebagai kota yang aman dan nyaman dalam keberagaman. Oleh karena itu, Visi RPJMD Kota Blitar 2021-2026 adalah Terwujudnya "KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT"

Penjelasan kalimat visi tersebut yaitu:

- **KOTA BLITAR KEREN**: Terwujudnya Kota Blitar yang dalam realitas **KE**beragaman tetap dalam kondisi **RE**ligius dan **N**asionalis, rukun, aman dan kondusif, masyarakatnya sejahtera jasmani dan rohani.
- **UNGGUL** : Terwujudnya Sumber Daya Manusia Kota Blitar yang berkualitas, berbudi pekerti luhur, religius, sehat, dijiwai nilai– nilai Pancasila sehingga terbentuk manusia paripurna yang dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
- **MAKMUR** : Suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan ekonomi, infrastruktur dan sosial masyarakat sehingga Kota Blitar menjadi Kota yang sejahtera, berwawasan lingkungan hidup dan nyaman untuk ditinggali.
- **BERMARTABAT** : Terwujudnya perikehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, norma dan budaya yang berlaku, serta terbukanya ruang masyarakat untuk mengoptimalkan segenap daya cipta dan kreativitas didukung tata pemerintahan yang bersih, transparan, berjiwa melayani dan profesional.

1) Misi

Berdasarkan visi "Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN: Unggul, Makmur, Bermartabat", terdapat 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan, yaitu:

Misi Pertama :

Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.

Misi pertama ini diarahkan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kota Blitar religius yang mengedepankan nilai toleransi dan berwawasan kebangsaan. Spirit perjuangan Bung Karno, Supriyadi dan Aryo Blitar merupakan potensi besar sekaligus modal untuk terus menggelorakan semangat patriotisme dan nasionalisme masyarakat Kota Blitar. Berkepribadian dalam kebudayaan diambil dari diktum Tri Sakti Bung Karno dengan harapan masyarakat Kota Blitar memiliki kecintaan terhadap budaya asli Indonesia dan mempraktekkan nilai– nilai kearifan lokal.

Misi ini juga mengarahkan Kota Blitar sebagai kota tangguh bencana sekaligus kota yang menempatkan posisi perempuan setara, sejajar, saling melengkapi dan bermitra dengan laki-laki. Dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), Misi ini juga memuat Pilar Pembangunan Sosial dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

Misi Kedua :

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter

Misi kedua ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan Misi 2 memuat Pilar Pembangunan Sosial. Keren yang dimaksud di dalam misi ini merupakan kependekan dari Keberagaman, Religius, dan Nasionalis.

Arah pembangunan sumber daya manusia ditujukan pada pembangunan manusia paripurna pada lima dimensi: pendidikan, kesehatan, religiusitas, penguatan nasionalisme, dan peningkatan daya saing. Manusia yang dihasilkan tidak hanya memiliki kemampuan intelektual yang unggul, tetapi juga sehat, religius, kreatif, dan memiliki jiwa nasionalisme. Sementara upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat diwujudkan melalui perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan kesehatan dengan dipadu dukungan kesadaran masyarakat.

Misi Ketiga :

Berdikari secara ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital.

Misi ketiga ini diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, menurunkan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka yang berorientasi pada kemandirian ekonomi daerah. Peningkatan pembangunan ekonomi daerah dilakukan dengan menggerakan seluruh sektor, potensi, dan sumber daya. Orientasi ekonomi daerah diarahkan pada pengembangan ekonomi kreatif dan ekonomi digital, optimalisasi perdagangan dan perindustrian, penguatan sektor pariwisata baik pariwisata sejarah kebangsaan, kampung tematik, maupun model pariwisata lain.

Peningkatan kemandirian ekonomi juga ditempuh melalui upaya optimalisasi ketahanan pangan dan pertanian termasuk pengembangan urban farming, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, serta memberikan berbagai kemudahan dalam penanaman modal dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Misi 3 secara keseluruhan memuat Pilar Pembangunan Ekonomi dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Misi Keempat :

Meningkatkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan

Misi keempat ini diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dengan tetap menjaga keserasian dengan tata ruang secara berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur baik bina marga, cipta karya, maupun sumber daya air diarahkan tidak semata-mata mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan, tetapi harus tetap menjaga kelestarian lingkungan. Misi ini diarahkan pada upaya menjaga kualitas dan kelestarian lingkungan hidup baik air, udara, tanah dan pengelolaan sampah. Oleh karena itu, Misi ke-4 dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan memuat Pilar Pembangunan Ekonomi dan Pilar Pembangunan Lingkungan.

Misi Kelima :

Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Misi kelima ini diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan menuju pemerintahan yang baik, bersih, profesional dengan pelayanan publik memenuhi harapan pengguna layanan. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan termuat dalam misi ini. Tata kelola pemerintahan mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan dan evaluasi kinerja diarahkan pada tata kelola yang akuntabel, transparan, partisipatif, berjiwa melayani, berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, serta adaptif terhadap perubahan.

3. **Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.**

Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah adalah sebagai berikut :

1) Program Pembauran dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan
2) Program Peningkatan Nilai-Nilai Agama dan Kebudayaan
3) Program Pendidikan Non Formal dan PAUD
4) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Semilan Tahun
5) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
6) Program Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
7) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
8) Program Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan
9) Program Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan
10) Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi
11) Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro
12) Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Koperasi dan Usaha Mikro)
13) Program Pengembangan dan Penguatan Perdagangan
14) Program Pengembangan Pasar Tradisional
15) Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Perdagangan)
16) Program Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan
17) Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (Perdagangan)
18) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
19) Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Perindustrian)
20) Program Pembinaan Industri (DBHCHT)
21) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
22) Program Pengembangan Agribisnis Pertanian

23) Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku (DBHCHT)
24) Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Pertanian)
25) Program Pengembangan Agribisnis Peternakan
26) Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Peternakan)
27) Program Pengembangan Agribisnis Perikanan
28) Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Kelautan dan Perikanan)
29) Program Peningkatan Ketahanan Pangan
30) Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
31) Pengembangan Destinasi Pariwisata
32) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
33) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
34) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah
35) Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial
36) Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Sosial)
37) Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Perlindungan Ketenagakerjaan
38) Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Tenaga Kerja)
39) Program Pemberdayaan Perempuan
40) Program Konservasi dan Komunikasi Lingkungan
41) Program Peningkatan Pengendalian Polusi
42) Program Penataan Ruang
43) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
44) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
45) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya
46) Program Standarisasi Bidang Pekerjaan Umum
47) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Keciptakaryaan
48) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
49) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
50) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
51) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
52) Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran
53) Program Peningkatan Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan
54) Program Pengendalian Penyakit
55) Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Perbaikan Gizi Masyarakat
56) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Penyehatan Lingkungan
57) Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru
58) Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Kesehatan)
59) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
60) Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

61) Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
62) Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan hidup
63) Program Pengelolaan Persampahan
64) Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
65) Program Pengembangan Perumahan
66) Program Penertiban dan Penegakan Peraturan Perundang Daerah
67) Peningkatan Kenyamanan Lingkungan
68) Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
69) Program Penanganan Konflik dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
70) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
71) Program Pengembangan Budaya Politik dan Penguatan Demokrasi
72) Program Perlindungan Perempuan dan Anak
73) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
74) Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
75) Program Dukungan Pelayanan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
76) Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
77) Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan
78) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
79) Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan
80) Program Dukungan Layanan Pengadaan Barang/Jasa
81) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
82) Program Perencanaan Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
83) Program Perencanaan Sosial Budaya dan Evaluasi Pembangunan
84) Program Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah
85) Program Penelitian dan Pengembangan
86) Program Peningkatan Kompotensi Sumber Daya Aparatur
87) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
88) Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas
89) Program Penyelenggaraan e-Governance
90) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
91) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
92) Program Pengelolaan Keamanan Informasi Milik Pemerintah atau Negara
93) Program Perencanaan Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
94) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
95) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah
96) Program Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan Keuangan Daerah
97) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah
98) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah

99) Program Peningkatan Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah
100) Program Peningkatan Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Anggaran DPRD
101) Program Pemyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah
102) Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
103) Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil
104) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
105) Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
106) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
107) Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintaham dan Pembangunan
108) Program Pelayanan Perkantoran
109) Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah
110) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan Tahun 2025 **Pendukung Kinerja Utama/Sasaran Strategis Kota Blitar** adalah sebagai berikut :

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Program	Indikator Kinerja Program
1) Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang demokratis		
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Persentase penyelesaian konflik keagamaaan
		Persentase kampung berkarakter Pancasila
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan kompetensi pembinaan sosial

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Program	Indikator Kinerja Program
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi Konflik Sosial yang terselesaikan
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan
		Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan
	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase budaya lokal yang dikembangkan
	Program Pembinaan Sejarah	Persentase kesejarahan yang dikembangkan
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dikembangkan
2) Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak		
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	**Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan**	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG
		Persentase perempuan pengambilan keputusan publik
		Persentase komposisi perempuan d sector bisnis
	Program Perlindungan Perempuan	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase peningkatan pelembagaan pemenuhan hak anak
	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih
3) Meningkatnya derajat kesehatan dan daya saing SDM		
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	**Program Pengelolaan Pendidikan**	Persentase satuan Pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SD/MI)
		Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)
		Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs
	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang dikembangkan
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah pendidik dan tenaga kependidikan
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase satuan pendidikan PAUD dan PNF yang memiliki izin operasional yang masih berlaku

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Program	Indikator Kinerja Program
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM)
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (SPM)
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (SPM)
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar (SPM)
		Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)
		Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)
		Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)
		Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)
		Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)
		Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)
		Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan Kesehatan
		Persentase kelurahan UCI (Universal Child Imunization)
		Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani
		Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan
		Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Program	Indikator Kinerja Program
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase pengelolaan fasilitas layanan kefarmasian yang sesuai standar
		Persentase tempat pengelolaan makanan minuman yang memenuhi syarat Kesehatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang aktif
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan	Persentase Kelompok Pramuka Aktif
		Persentase pemuda yg mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepe dulian, kesukarelawa nan dan kepeloporan pemuda
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan pembinaan atlet muda
		Cakupan pelatih yang tersertifikasi
		Cakupan fasilitas olahraga sesuai standar
	Program Pengendalian Penduduk	Rata-rata usia kawin pertama wanita
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)
		Persentase peserta KB aktif
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase anggota kelompok Tribina dan UPPKS yang ber KB
	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan
		Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk
Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat		
4) Angka Kemiskinan	**Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial**	Persentase penurunan Rumah Tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka konsumsi energi per kapita
		Angka ketersediaan energi perkapita/ hari
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase balita rawan pangan yang tertangani

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Program	Indikator Kinerja Program
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Tingkat keamanan pangan segar (%)
5) Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat		
Indeks Gini	**Program Rehabilitasi Sosial**	Persentase peningkatan PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP dalam kondisi baik
6) Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat		
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	**Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja**	Persentase alumni pelatihan yang telah bekerja
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan
		Persentase jumlah calon tenaga kerja yang terserap melalui bursa kerja online
	Program Hubungan Industrial	Persentase perselisihan industrial yang diselesaikan
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi		
7) Laju Pertumbuhan Ekonomi	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	Persentase peningkatan potensi investasi yg teridentifikasi
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan Izin Sesuai SOP
	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan informasi potensi investasi yang dipromosikan
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peningkatan perusahaan tertib pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana prasarana pasar dalam kondisi baik
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat UTTP bertanda tera sah
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Peningkatan IKM
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan sarpras kawasan pariwisata Makam Bung Karno
	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase destinasi pariwisata baru yang sudah dikunjungi oleh wisatawan

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Program	Indikator Kinerja Program
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku ekraf yang aktif dalam kegiatan
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase peningkatan koperasi dengan volume usaha
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang mengalami peningkatan volume usaha
		Persentase pengembangan pemasaran Usaha Mikro berbasis digital
	Program Pengembangan UMKM	Persentase WUB yang berhasil dikembangkan
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Peningkatan Kepatuhan koperasi
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Peningkatan koperasi sehat (keuangan dan manajerial)
	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase sarana pertanian yang tersedia
		Persentase peningkatan penanganan limbah ternak di tingkat peternak
		Persentase pengawasan peredaran obat hewan
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dapat berfungsi dan dalam kondisi baik
		Persentase produk RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal)
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pengendalian OPT sesuai dengan prosedur
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase usaha pertanian yang memenuhi standar rekomendasi teknis
		Persentase usaha peternakan dan produk asal hewan yang memenuhi rekomendasi persyaratan teknis
	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase rata-rata peningkatan nilai kelas kelompok tani
		Persentase kelompok tani yang menerapkan metode budidaya berorientasi agribisnis
		Persentase produk tanaman pangan dan hortikultura yang dipasarkan secara digital
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase unit usaha produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis pra Nomor Kontrol

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Program	Indikator Kinerja Program
		Persentase unit usaha olahan hasil peternakan yang memenuhi standar
		Persentase penyakit hewan ternak yang tertangani
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase kelompok perikanan budidaya yang memenuhi rekomendasi standart teknis
		Persentase pemenuhan benih ikan yang berkualitas
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Volume penjualan hasil olahan perikanan
8) Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah		
Indeks Infrastruktur Daerah	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**	Presentasi Jaringan Irigasi dalam kondisi baik
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase sistem penyediaan air minum (SPAM) dalam kondisi baik
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dalam kondisi baik
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik
	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase fasilitas umum skala kota yang dibangun
		Persentase gedung pemerintahan yang dibangun
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik
		Persentase jembatan dalam kondisi baik
	Program pengembangan jasa konstruksi	Presentase Pekerjaan konstruksi yang sesuai standart
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketersediaan Dokumen Tata Ruang
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kelengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik
		Persentase prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik
		IKM terhadap layanan uji kendaraan bermotor
		IKM layanan Angkutan Sekolah Gratis
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni/ rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh
		Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Program	Indikator Kinerja Program
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah
		Persentase tingkat hunian Rusunawa
	Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh
		Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman
		Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utiilitas Umum (PSU)	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan
		Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase kasus pertanahan yang ditindaklanjuti
	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Tanah Aset Pemerintah Kota Bersertifikat
9) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH)	**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (ton CO2eq)
		Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu
		Persentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah tertangani
		Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata)

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Program	Indikator Kinerja Program
		Jumlah Predikat pengelolaan lingkungan hidup (adipura)
		Persentase kelurahan berseri
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan
	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana Kategori Madya
		Persentase SDM Penanganan Bencana yang Terlatih
		Persentase Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pendukung Penanganan Bencana
		Persentase Kecepatan Respon Kurang dari 24 Jam Untuk Setiap Status Darurat Bencana
	Pencegahan, Penanggulanga, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani
10) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah		
- Nilai SAKIP	**Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota**	Persentase OPD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi
		Persentase OPD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Capaian Kinerja Tujuan RPJMD
		Persentase Capaian Sasaran RPJMD
	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang selaras terhadap RPJMD (Tujuan, Program, Indikator) dan RKPD (Tujuan, Program, Kegiatan, dan Indikator)
		Persentase Capaian Program Perangkat Daerah
	Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan daerah
	Program Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)
		Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Program	Indikator Kinerja Program
- Status EKPPD	**Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat**	Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti
		Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif
		Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi
		Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti
		Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti
	Program administrasi pemerintahan desa	Persentase kelurahan tertib administrasi
	Program perekonomian dan pembangunan	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti
		Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti
		Persentase pengadaan barang dan jasa melalui *E-Procurement*
11) Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah		
Opini BPK atas LKPD	**Program Pengelolaan keuangan daerah**	Persentase tertib perencanaan keuangan daerah
		Persentase Perangkat Daerah yang penyerapan anggarannya diatas 85%
		Persentase tertib perencanaan keuangan daerah
	Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1
		Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2
		Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1
		Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2
		Persentase OPD yang telah menerapkan maturitas SPIP level terdefinisi (3)
	Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase peningkatan target pendapatan pajak daerah
		Persentase peningkatan realisasi pendapatan pajak daerah
	Program pengelolaan barang milik daerah	Persentase aset daerah yang diinventarisasi sesuai regulasi
12) Meningkatnya kualitas pelayanan publik		

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Program	Indikator Kinerja Program
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	Persentase layanan kecamatan tepat waktu
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti
		Persentase RT Berdaya
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti
	Program Pendaftaran Penduduk	1. Persentase peningkatan Kepemilikan e-KTP
		2. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KIA
		3. Persentase penerbitan dokumen KK
	Program Pencatatan Sipil	1. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perkawinan
		2. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perceraian
		3. Persentase penerbitan dokumen akta kematian
		4. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan pemutakhiran jenis data kependudukan
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase ketersediaan profil kependudukan sesuai dengan standart
	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase diseminasi dan layanan informasi yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang ditetapkan
		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase penerapan sistem elektronik dalam layanan publik
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data statistik yang terpublikasi menggunakan sistem elektronik
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase implementasi persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Program	Indikator Kinerja Program
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi
		Persentase ASN yang memiliki nilai Prestasi Kinerja minimal 80
		Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi
		Persentase data kepegawaian yang valid
		Persentase pemenuhan pegawai sesuai kebutuhan
		Persentase penempatan jabatan sesuai kompetensi
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN dengan pendidikan tinggi dan menengah
	Program Pengelolaan Arsip	Nilai kepuasan pengguna layanan kearsipan

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

1. Latar belakang

Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Kebijakan pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga Negara telah ditetapkan dan selalu dilakukan monitoring secara kontinu berupa penerapan Stadar Pelayanan Minimal dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat bersinergi dengan kebijakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah yang antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-

ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

2. Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang melandasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah:

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota
l. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.

3. Arah Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas :

a. Pendidikan;
b. Kesehatan;
c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
f. Sosial.

Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan ditetapkan sebagai SPM. Pemerintah Kota Blitar berusaha untuk melaksanakan kebijakan mengenai pelayanan publik yang prima melalui penyusunan, penetapan dan penerapan SPM secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintahan daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib memperhatikan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026, prinsip-

prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Blitar bertujuan untuk mencapai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Blitar periode tahun 2021-2026. Pencapaian indikator target kinerja tujuan dan sasaran sebagai penjabaran visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah, maka strategi menjadi sarana untuk mendapatkan gambaran program prioritas Kota Blitar. Guna mendapatkan "sekumpulan" program prioritas yang terpadu di setiap strategi, dibutuhkan kebijakan umum. Program-program prioritas pada setiap strategi merupakan program pembangunan daerah terpilih untuk dapat mencapai secara langsung sasaran pembangunan daerah, adapun rumusan strategi dan arah kebijakan Standar Pelayanan Minimal Kota Blitar sebagai berikut :

a. Pendidikan

SPM urusan Pendidikan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1) Pendidikan anak usia dini
2) Pendidikan dasar
3) Pendidikan kesetaraan

Adapun penjelasan jenis pelayanan dasar untuk SPM Bidang Pendidikan sebagai berikut :

Jenis Layanan	Penerima Layanan	Indikator	Target 2025
Pendidikan Anak Usia Dini	Warga Negara usia 5 tahun s/d 6 tahun	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan usia dini	100%
Pendidikan Dasar	Warga negara usia 7 tahun s/d 15 tahun	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%
Pendidikan Kesetaraan	Warga negara usia 7 tahun s/d 18 tahun	Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%

b. Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, diatur jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

1) Pelayanan kesehatan ibu hamil
2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin
3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4) Pelayanan kesehatan Balita
5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif
7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
10) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
11) Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis
12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)

Didalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tersebut juga memuat penjelasan terkait indikator dan nilai serta batas waktu pencapaian SPM secara nasional sebagai berikut :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	PENERIMA LAYANAN DASAR	Target 2025
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Ibu hamil.	100%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Ibu bersalin.	100%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Bayi baru lahir.	100%
4	Pelayanan kesehatan balita	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	Balita.	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Anak pada usia pendidikan dasar.	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun.	100%

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	PENERIMA LAYANAN DASAR	Target 2025
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun keatas.	100%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Penderita hipertensi.	100%
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Penderita Diabetes Melitus.	100%
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat.	100%
11	Pelayanan kesehatan dengan orang terduga TBC	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Orang terduga TBC.	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)	100%

c. Pekerjaan Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, diatur secara teknis Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
2) Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik

Didalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tersebut juga memuat penjelasan terkait indikator dan nilai serta batas waktu pencapaian SPM secara nasional sebagai berikut :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR	PENERIMA LAYANAN DASAR	Target 2025
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai	Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan	100%

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR	PENERIMA LAYANAN DASAR	Target 2025
		dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	dilayani melalui sistem penyediaan air minum	
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria	Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air	100%

d. Perumahan Rakyat

Berdasarkan Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat kabupaten/kota terdiri atas:

1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Adapun penjelasan jenis pelayanan dasar untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat sebagai berikut :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR	PENERIMA LAYANAN DASAR	Target 2025
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria	100%
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria	100%

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Tramtibumlinmas daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1) Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
2) Pelayanan informasi rawan bencana
3) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
5) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Adapun penjelasan jenis pelayanan dasar untuk SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	Target 2025
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%

f. Sosial

Pelaksanaan urusan sosial, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota, diatur secara rinci jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sosia daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1) Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial
2) Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial
3) Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial
4) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial
5) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Target pelaksanaan SPM Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan pemerintah daerah

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2025
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan setelah bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disusun sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran pelaksanaan pemerintah daerah dan capaian kinerja sebagaimana termuat pada pasal 2 (dua), LPPD disebutkan memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah yang terdiri atas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan tugas pembantuan dan laporan penerapan standar pelayanan minimal. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas selanjutnya dijabarkan sebagaimana sistematika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 di bawah ini.

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro Kota Blitar meliputi Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, dan Ketimpangan Pendapatan tahun 2023 - 2025 sesuai tabel berikut:

Tabel 2.1.1
Capaian Kinerja Makro Kota Blitar Tahun 2024 - 2025

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Laju Pertumbuhan
1.	Indeks Pembangunan Manusia	81,44	82,03	0,72 %
2.	Angka Kemiskinan	6,75%	6.60%	-2,22 %
3.	Angka Pengangguran	5.11%	4.28%	-16,24 %
4.	Pertumbuhan Ekonomi	5,33%	5,31%	-0,38%
5.	Pendapatan per Kapita ADHB	59,33	63,14	6,42%
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0.353	0.34	-3,68%

Sumber: BPS Kota Blitar Tahun 2026

1. **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia. Dalam proses penghitungan IPM dibentuk oleh beberapa dimensi, yaitu: **umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak**. Angka IPM yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah dan dapat merepresentasikan kesempatan masyarakat untuk mengakses hasil dari suatu proses pembangunan di suatu daerah.

IPM Kota Blitar Tahun 2025 mencapai 82,03 meningkat 0,59 poin (0,72 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (81,44). Pembangunan manusia di Kota Blitar terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2022, status pembangunan manusia Kota Blitar sudah berada di level “sangat tinggi”. IPM Kota Blitar tahun 2025 mencapai 82,03 meningkat 0,59 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 81,44. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2020, IPM Kota Blitar rata-rata meningkat sebesar 0,63 poin, dari 78,88 pada tahun 2020 menjadi 82,03 pada tahun 2025.

Pada tahun 2025, status pembangunan manusia Jawa Timur masih berkategori “tinggi”, dengan capaian IPM 76,13. Selama 2021-2025, seluruh wilayah di Jawa Timur mengalami peningkatan status pembangunan manusia. Kabupaten Sumenep tercatat sebagai wilayah dengan peningkatan status IPM dari “sedang” ke “tinggi”. Sedangkan Kota Batu tercatat sebagai wilayah dengan peningkatan status IPAM dari “tinggi“ ke “sangat tinggi“. Wilayah dengan status pembangunan manusia “tinggi” (70 ≤ IPM < 80) sebanyak 28, berstatus “sedang” (60 ≤ IPM < 70) sebanyak 2, dan tidak ada wilayah berstatus “rendah” (IPM < 60). Sementara itu, Sidoarjo, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya, dan Kota Batu menjadi wilayah dengan status capaian pembangunan manusia yang “sangat tinggi” (IPM ≥ 80)

Tabel 2.1.2
IPM Kota Blitar Tahun 2025

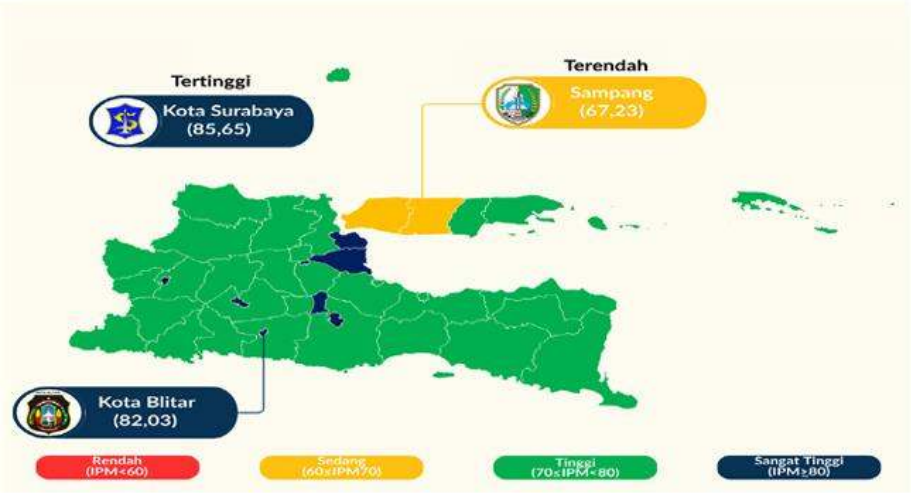

Sumber: BPS, Kota Blitar Dalam Angka, 2025

2. Angka Kemiskinan

Secara umum, dalam periode 2015-2025 tingkat kemiskinan di Kota Blitar cenderung mengalami fluktuasi, dimana pada beberapa tahun tertentu mengalami kenaikan dan penurunan persentase penduduk miskin. Persentase penduduk miskin di Kota Blitar pada tahun 2015 sebesar 7,29 persen, berkurang sebesar 0,69 poin atau menjadi 6,60 persen pada tahun 2025. Berdasarkan persentase penduduk miskin di Kota Blitar dalam rentang waktu Maret 2024 - Maret 2025, angka tersebut mengalami penurunan sebesar 0,15 persen poin, dari 6,75 persen pada Maret 2024 menjadi 6,60 persen pada Maret 2025, berbagai program intervensi kemiskinan terus dilakukan di Kota Blitar diantaranya pengendalian harga kebutuhan pokok, program pengurangan beban pengeluaran dan program peningkatan pendapatan.

Tabel. 2.1.3
Angka Kemiskinan
Kota Blitar Tahun 2020 s.d 2025

No	Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Angka kemiskinan	7,78	7,89	7,37	7,30	6,75	6,60
2.	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	11.100	11.330	10.650	10.610	9.860	9.69
3.	Garis Kemiskinan (per kapita per bulan)	465.868	481.229	517.363	568.280	596.105	625.337

Sumber: BPS, Kota Blitar Dalam Angka, 2025

Gambar 2.1
Garis Kemiskinan Kota Blitar
Tahun 2015 s.d 2025

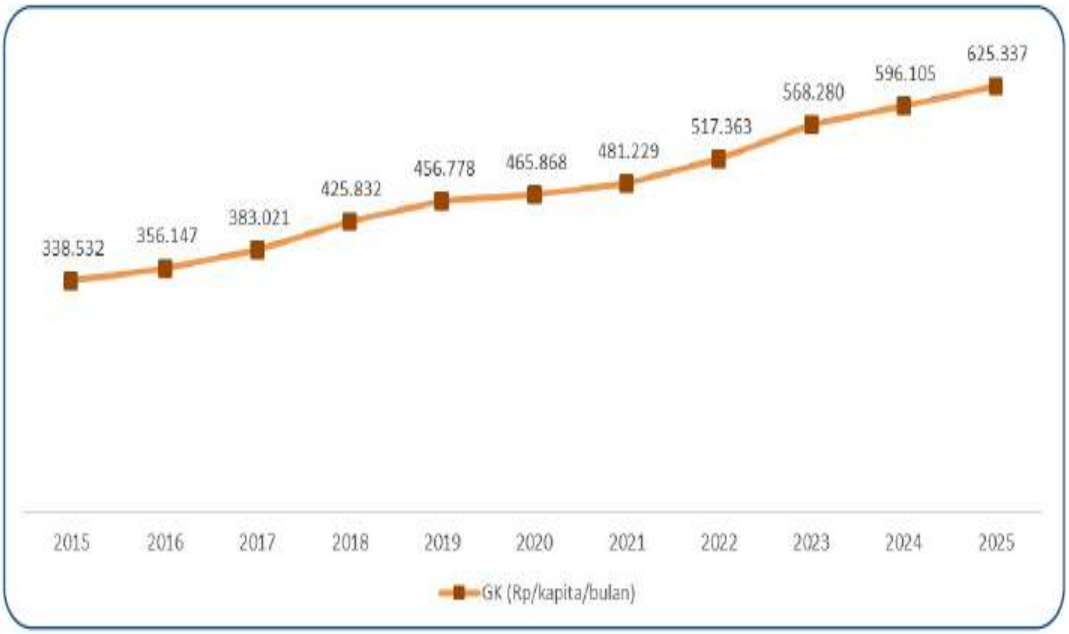

Sumber: BPS, Kota Blitar Dalam Angka, 2025

Garis Kemiskinan Kota Blitar pada Maret 2025 adalah sebesar Rp 625.337,00 per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2024, Garis Kemiskinan bertambah sebesar Rp 29.232,00 per kapita per bulan atau naik sebesar 4,90 persen. Bahkan jika diamati dalam dua dekade terakhir, GK Kota Blitar tercatat sudah meningkat hampir dua kali lipat sejak GK pada Tahun 2015 yang berada pada posisi Rp 338.532,- per kapita per bulan.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Blitar Agustus 2025 sebesar 4,28 persen atau setara dengan 4.019 orang, berkurang 375 orang dibandingkan tahun sebelumnya.

Penduduk Usia Kerja Kota Blitar berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025 sebanyak 123.667 orang, bertambah sebanyak 1.509 orang dibandingkan Agustus 2024. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yang mencapai 93.931 orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 29.736 orang.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kota Blitar mengalami peningkatan dari 70,44 persen pada Agustus 2024 menjadi 75,95 persen pada Agustus 2025 atau tersedia angkatan kerja sebanyak 93.931 orang, atau meningkat sebesar 5,51 persen poin. TPAK merupakan persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK

mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

Berdasarkan jenis kelamin pada Agustus 2025, TPAK laki-laki sebesar 84,84 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 67,37 persen. Dibandingkan pada Agustus 2024, TPAK laki-laki mengalami peningkatan sebesar 2,82 persen poin. Demikian pula TPAK perempuan mengalami kenaikan sebesar 8,14 persen poin

Tabel 2.1.4
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Blitar Tahun 2019 – 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	5,11	4,28
- Laki-laki	persen	4,82	4,97
- Perempuan	persen	5,50	3,43
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	persen	70,44	75,95
- Laki-Laki	persen	82,02	84,84
- Perempuan	persen	59,23	67,37

Sumber: BPS, Kota Blitar Dalam Angka, 2026

4. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kota Blitar Tahun 2025 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2025 mencapai 9.871,55 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 6.051,30 miliar

Ekonomi Kota Blitar tahun 2025 tumbuh sebesar 5,31 persen, melambat jika dibandingkan tahun 2024 sebesar 5,33 persen. Dari sisi produksi, kategori lapangan usaha Informasi dan Komunikasi mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,25 persen. Sementara itu dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran komsumsi LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,32 persen.

Struktur perekonomian Kota Blitar Tahun 2025 dari sisi produksi masih tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2024. Struktur perekonomian Kota Blitar didominasi oleh Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 24,78 persen, terbesar kedua adalah lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,53 pesen, terbesar ketiga adalah Industri Pengolahan sebesar 10,13 persen, selanjutnya Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 9,86 persen.

Ekonomi Kota Blitar Tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,31 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhannya lebih lambat 0,02

persen dibandingkan tahun 2024. Pertumbuhan terjadi pada 16 kategori lapangan usaha, sementara terdapat satu kategori yang mengalami kontraksi yaitu lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian. Lima lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Informasi dan Komunikasi sebesar 7,25 persen, Jasa Perusahaan sebesar 6,91 persen, Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,91 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,74 persen, dan Industri Pengolahan sebesar 6,57 persen.

Tabel 2.1.5
Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar Tahun 2019 – 2025

No	Uraian	Tahun						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Pertumbuhan EKonomi	5,84	-2,28	4,28	5,22	5,29	5,33	5,31

Sumber: BPS, Kota Blitar Dalam Angka, 2025

Gambar 2.2
Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar Tahun 2020 - 2025

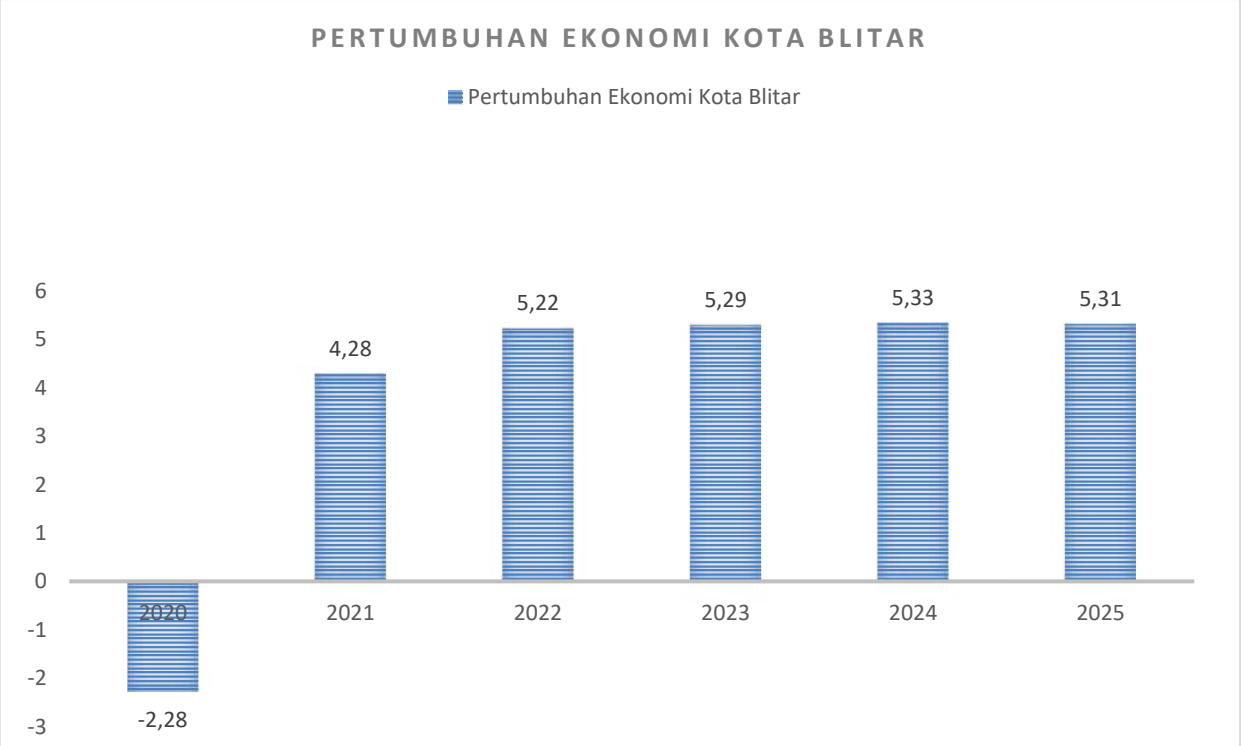

Gambar 2.3
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2022-2025

Sumber : BPS Kota Blitar 2025

Tabel 2.1.6
PDRB ADHK dan ADHB Kota Blitar Kota Blitar Tahun 2020 – 2025

No	Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	**PDRB ADHB (milyar)**	6.708,14	7.113,60	7.833,94	8.515,16	9.187,70	9.871,55
2	**PDRB ADHK (milyar)**	4722,55	4924,57	5.181,60	5.455,81	5.746,80	6.051,30

Sumber: BPS, Kota Blitar Dalam Angka, 2025

Gambar 2.4
PDRB ADHK dan ADHB Kota Blitar Tahun 2020 - 2025

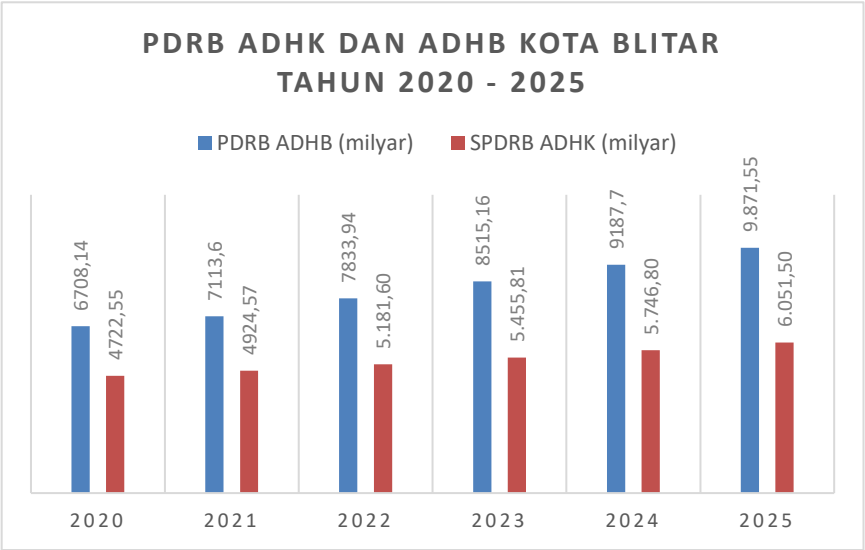

Sumber: BPS, Kota Blitar Dalam Angka, 2025

Tabel. 2.1.7
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dan Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rp) Tahun 2023 s.d 2025

Lapangan Usaha		Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
		2023	2024*	2025**	2023	2024*	2025**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	213,52	200,43	214,73	116,31	107,95	112,43
B.	Pertambangan dan Penggalian	0,33	0,26	0,06	0,21	0,17	0,04
C.	Industri Pengolahan	839,09	910,35	1.000,45	491,85	517,00	550,97
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	5,42	5,55	5,77	3,94	4,05	4,29
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,11	12,84	13,17	9,41	9,75	9,84
F.	Konstruksi	610,30	677,86	724,72	371,82	393,98	412,41
G.	Perdagangan Besar dan Ecer-an, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.130,93	2.268,88	2.446,61	1.327,99	1.395,40	1.473,87
H.	Transportasi dan Pergudangan	426,83	467,06	505,15	250,32	266,66	285,10
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	486,12	540,95	584,84	288,75	307,55	328,29
J.	Informasi dan Komunikasi	905,17	964,71	1.039,18	767,46	806,65	865,21
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	887,43	939,09	973,60	517,77	543,12	553,41
L.	Real Estat	302,38	318,95	334,63	219,47	227,74	234,95
M,N.	Jasa Perusahaan	61,48	66,11	72,17	41,83	44,42	47,49
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	492,13	562,24	583,04	299,79	320,15	323,62
P.	Jasa Pendidikan	548,35	604,21	662,36	354,12	376,86	401,10
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	174,75	179,39	197,31	116,30	119,09	126,58
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	418,83	468,83	513,76	278,48	305,88	321,71
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		**8.515,16**	**9.187,70**	**9.871,55**	**5.455,81**	**5.746,40**	**6.051,30**

Sumber: BPS, Kota Blitar Dalam Angka, 2025

Dilihat dari data PDRB ADHB Tahun 2025 Perekonomian Kota Blitar berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2025 mencapai Rp 9.871,55 triliun dan atas dasar harga konstan 2025 mencapai Rp 6,051 triliun.

5. Pendapatan PDRB Per Kapita

Semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. Selama kurun waktu tahun 2022 - 2025, pendapatan perkapita Kota Blitar terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 PDRB perkapita ADHK Kota Blitar mengalami kontraksi sebesar 2,91% dibandingkan tahun 2019, namun pada tahun 2021 kembali meningkat seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Blitar. PDRB Kota

Blitar Tahun 2021 (ADHB) mencapai sebesar 47,31 juta dengan peningkatan sebesar 0,70% dibandingkan tahun 2020. PDRB Perkapita Kota Blitar tahun 2022 mencapai 51,55 juta rupiah naik 4,24 juta rupiah dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 47,31 juta rupiah dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 55,52 juta atau naik sebesar 3,93 juta, pada tahun 2024 kembali mengalami kenaikan menjadi 59,33 juta. Sedangkan pada tahun 2025 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 63,14 juta. Untuk melihat perkembangan PDRB perkapita Kota Blitar tahun 2018 - 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.8
PDRB Per Kapita Kota Blitar Tahun 2018 s.d 2025

Uraian	Tahun							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PDRB Per Kapita, dalam ribu rupiah (ADHB)	44.82	51.60	46.98	47.31	51,55	55,52	59,33	63,14

Sumber: BPS, Kota Blitar Dalam Angka, 2025

Pertumbuhan positif PDRB per Kapita Sektor masih ditopang oleh sektor perdagangan, UMKM yang masif, serta peningkatan kualitas SDM, selain itu beberapa factor pendorong antara lain :

1. Perdagangan Besar dan Eceran yang Dominan
2. Ledakan UMKM dan Digitalisasi Ekonomi
3. Peningkatan Kualitas SDM (Indeks Pembangunan Manusia)
4. Pertumbuhan Jasa-Jasa dan Pariwisata
5. Iklim Investasi yang Kondusif
6. Peningkatan UMK (Upah Minimum Kota)

Gambar 2.5
PDRB Perkapita Kota Blitar Tahun 2018 - 2025

Sumber: BPS, Kota Blitar Dalam Angka, 2025

6. Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Semakin tinggi nilai Indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi.

Pada tahun 2025, Indeks Gini Kota Blitarsebesar 0,34 lebih rendah jika dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Jawa Timur sebesar 0,373. Angka ini mengalami penurunan 0,013 poin dari tahun 2024 yaitu sebesar 0,353.

Gambar 2.6
Indeks Gini Kota Blitar dibanding Dengan Indeks Gini Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2025

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2025

Pada periode Maret 2024-Maret 2025, perkembangan *gini ratio* kabupaten/kota di wilayah Karesidenan Kediri menunjukkan arah perubahan yang bervariasi. Beberapa daerah mengalami peningkatan ketimpangan pengeluaran, sementara daerah lainnya menunjukkan perbaikan pemerataan yaitu Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, dan Kota Blitar.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di wilayah Karesidenan Kediri, *gini ratio* Kota Blitar tahun 2025 tercatat lebih rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten

Trenggalek dan Kabupaten Blitar, serta lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, dan Kota Kediri.

Tabel 2.1.9
Indeks Gini Kabupaten/Kota di Wilayah Karesidenan Kediri
Tahun 2024 – 2025

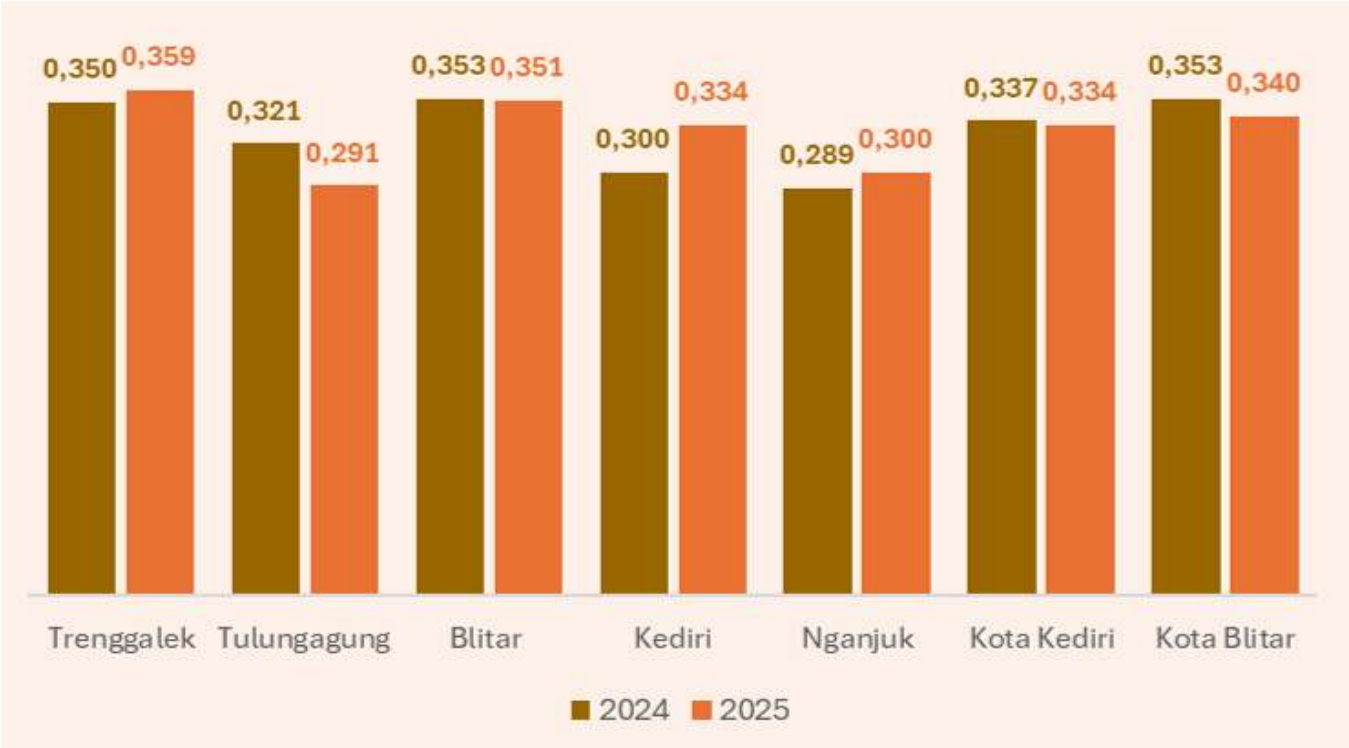

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2025

2.2. Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan adalah ukuran keberhasilan pemerintah daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota) dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepadanya, baik urusan wajib maupun pilihan, dan penunjang selama satu tahun anggaran. Sebagai alat ukur menggunakan indikator kinerja yang digunakan untuk menilai sejauh mana program-program pemerintah daerah berdampak pada perlindungan, pelayanan, pemberdayaan, dan kesejahteraan Masyarakat.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

1. Pendidikan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	100	Dinas Pendidikan
2	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100	Dinas Pendidikan
3	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	Dinas Pendidikan
4	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	46.22	Dinas Pendidikan
5.	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	44.52	Dinas Pendidikan

2. Kesehatan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase kematian ibu	0	Dinas Kesehatan
2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	6.18	Dinas Kesehatan
3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100	Dinas Kesehatan
4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100	Dinas Kesehatan
5	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100	Dinas Kesehatan
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	Dinas Kesehatan
7	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100	Dinas Kesehatan
8	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100	Dinas Kesehatan
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	Dinas Kesehatan
10	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100	Dinas Kesehatan
11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100	Dinas Kesehatan
12	Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	100	Dinas Kesehatan
13	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	100	Dinas Kesehatan
14	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	100	Dinas Kesehatan

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	100	Dinas PU PR
2	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	92.36	Dinas PU PR
3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	96.75	Dinas PU PR
4	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	98.53	Dinas PU PR
5	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	97.84	Dinas PU PR
6	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	0	Dinas PU PR

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
7	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	100	Dinas PU PR
8	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	0	Dinas PU PR
9	Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100	Dinas PU PR
10	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	100	Dinas PU PR

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
2	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	100	Satpol PP
2	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100	Satpol PP
3	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	65.00	BPBD
4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	BPBD
5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	BPBD
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	Satpol PP

6. Sosial

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	Dinas Sosial
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	Dinas Sosial
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	Dinas Sosial
4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	Dinas Sosial
5	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	100%	Dinas Sosial
6	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	100%	Dinas Sosial

7. Tenaga Kerja

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	22.35	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
3	Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	100	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

8. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
2	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb

9. Pangan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

10. Pertanahan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	87.43	Dinas PU PR
2	ersentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	98.30	Dinas PU PR
3	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	100	Dinas PU PR

11. Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	68.29	Dinas Lingkungan Hidup
2	Persentase jumlah sampah yang tertangani	100	Dinas Lingkungan Hidup

12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	99.81	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	98.99	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
3	Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	99.91	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	93.53	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	84.46	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	0	Bagian Pemerintahan
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	0	Bagian Pemerintahan
3	Persentase fasilitasi kerja sama desa	0	Bagian Pemerintahan

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	69.03	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
3	Persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	105.45	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb

15. Perhubungan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Konektivitas Kabupaten/Kota	0,7	Dinas Perhubungan
2	Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,25	Dinas Perhubungan
3	Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	87.50	Dinas Perhubungan

16. Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	97,67	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	77.39	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

17. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	18.61	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
2	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	9.94	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

18. Penanaman Modal

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	1.11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Realisasi total terhadap target investasi	100.12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

19. Kepemudaan dan Olahraga

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	5.15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	7.94	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
3	Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	8.85	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
4	Persentase jumlah atlet berprestasi	86.96	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

20. Statistik

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

21. Persandian

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	61.98	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

22. Kebudayaan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	48.02	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	-22.80	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

23. Perpustakaan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	54.47	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	15.54	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

24. Kearsipan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	89.25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

25. Kelautan dan Perikanan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	22.93	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Produksi perikanan tangkap dan budidaya	100.20	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

26. Pariwisata

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	33.54	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	42.48	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	0.38	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

27. Pertanian

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Peningkatan produksi tanaman pangan	25.12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Peningkatan produksi hortikultura	4.40	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Peningkatan produksi komoditas peternakan	4.54	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

28. Kehutanan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data

29. Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data

30. Perdagangan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	61.21	Dinas Industri dan Perdagangan

31. Perindustrian

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota	76.06	Dinas Industri dan Perdagangan
2	Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	47.06	Dinas Industri dan Perdagangan
3	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	6,71	Dinas Industri dan Perdagangan
4	Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	26.22	Dinas Industri dan Perdagangan

32. Transmigrasi

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

No	IKK Fungsi Penunjang	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	100	BAPERINDA

2. Keuangan

No	IKK Fungsi Penunjang	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	35.98	BPKAD
2	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	21.50	BPKAD

No	IKK Fungsi Penunjang	Capaian Kinerja	Sumber Data
3	Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	59.19	BPKAD
4	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	34.74	BPKAD

3. Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

No	IKK Fungsi Penunjang	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	69.48	BKPSDM

4. Penelitian dan Pengembangan

No	IKK Fungsi Penunjang	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	100	Baperinda

5. Fungsi Pengawasan

No	IKK Fungsi Penunjang	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.026	Inspektorat Daerah
2	Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	3.195	Inspektorat Daerah
3	Manajemen risiko Indeks	2.966	Inspektorat Daerah
4	ersentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	100	Inspektorat Daerah

6. Fungsi Pengadaan

No	IKK Fungsi Penunjang	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	40	Bagian Layanan Pengadaan
2	Pemanfaatan sistem pengadaan	28,64	Bagian Layanan Pengadaan
3	Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	21,92	Bagian Layanan Pengadaan

7. Hubungan Dengan Perwakilan Daerah

No	IKK Fungsi Penunjang	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	100	Sekretariat DPRD
2	Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	100	Sekretariat DPRD

8. Pelayanan Publik

No	IKK Fungsi Penunjang	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	89.82	Bagian Organisasi

2.2.3 AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Kepala Daerah. Adapun Visi Kota Blitar adalah: "KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur dan Bermartabat" yang akan dicapai dengan Misi-Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter
3. Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital
4. Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Guna mewujudkan Visi dan Misi Kota Blitar, **Kepala Daerah berkomitmen dalam mencapai target pencapaian kinerja utama dan sasaran RPJMD yang menjadi kewenangan Walikota melalui target tahunan yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Blitar** dengan dukungan anggaran program dan dilaporkan pelaksanaannya dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Blitar. Perjanjian kinerja yang dilaksanakan setiap tahun merupakan tahapan perwujudan janji politik calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah saat berkampanye dan telah ditetapkan janji politik tersebut kedalam dokumen perencanaan jangka menengah saat mereka dilantik menjadi Kepala dan Wakil Kepala Daerah. Untuk memonitoring pentahapan pencapaian janji politik yang wajib dicapai diakhir masa jabatan, maka target tersebut dibagi pencapaiannya setiap tahun. Hal ini dikandung maksud agar diketahui capaian tiap tahun, sehingga bila ada target yang kurang memenuhi akan segera diketahui permasalahan dan langkah-langkah yang harus dilaksanakan untuk mencapai ketertinggalan tersebut, begitu pula bila ada target yang telah terpenuhi akan dilakukan evaluasi terhadap perbandingan dengan dokumen perencanaan jangka panjang. Tahun 2025 ini merupakan tahun transisi menuju pelaksanaan RPJMD baru 2025-2029 sehingga perlu adanya penyesuaian di beberapa target indikator Perjanjian Kinerja Kepala Daerah. Penyesuaian ini dilakukan melalui penetapan perubahan target tahun 2025 berdasarkan RPJMD 2025-2029 pada indikator-indikator RPJMD 2021-2026 yang memang relevan dengan RPJMD 2025-2029, dengan adanya penyesuaian ini diharapkan mampu menjadi jembatan antara keberhasilan periode Walikota sebelumnya dengan

perencanaan Walikota yang baru, sebagaimana dijelaskan pada kolom keterangan perubahan perjanjian kinerja Pemerintah Kota Blitar dibawah ini.

Penjelasan perjanjian kinerja Pemerintah Kota Blitar yang menggambarkan hal dimaksud tertuang dalam informasi capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang selengkapnya sebagai berikut:

A. TARGET KINERJA DALAM PERJANJIAN KINERJA

Tabel 2.3.1
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KOTA BLITAR
TAHUN 2025

No	Kinerja Utama/ Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang demokratis	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	88,68	- Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah - Menyesuaikan target RPJMD 2025-2029
2.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	85,540	- Indikator Sasaran RPJMD yang merupakan kewenangan Walikota - Menyesuaikan realisasi 2024
3.	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,49	- Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah - Menyesuaikan target RPJMD 2025-2029
4.	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Daya Saing SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82,71	- Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah - Menyesuaikan target RPJMD 2025-2029
5.	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Indeks Pendidikan	0,822	- Indikator Sasaran RPJMD yang merupakan kewenangan Walikota - Menyesuaikan realisasi 2024
6.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	75,30	- Indikator Sasaran RPJMD yang merupakan kewenangan Walikota - Menyesuaikan target RPJMD 2025-2029
7.	Meningkatnya pengendalian penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	0,915%	- Indikator Sasaran RPJMD yang merupakan kewenangan Walikota

No	Kinerja Utama/ Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	2	3	4	5
				- Merupakan target RKPD 2025
8.	Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan	6,63%	- Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah - Menyesuaikan target RPJMD 2025-2029
		Indeks Gini	0,352	
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,97%	
9.	Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,115	- Indikator Sasaran RPJMD yang merupakan kewenangan Walikota - Merupakan target RKPD 2025
10.	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	80,81	- Indikator Sasaran RPJMD yang merupakan kewenangan Walikota - Menyesuaikan target RPJMD 2025-2029
11.	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	73,500%	- Indikator Sasaran RPJMD yang merupakan kewenangan Walikota - Menyesuaikan realisasi 2024
12.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,37%	- Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah - Menyesuaikan target RPJMD 2025-2029
13.	Meningkatnya nilai invenstasi daerah	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	1%	- Indikator Sasaran RPJMD yang merupakan kewenangan Walikota - Menyesuaikan target RPJMD 2025-2029
14.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	62,88	- Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah - Menyesuaikan realisasi 2024
15.	Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,02	- Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah - Menyesuaikan target RPJMD 2025-2029
16.	Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah terhadap Bencana (IKD)	0,620	- Indikator Sasaran RPJMD yang merupakan kewenangan Walikota - Merupakan target RKPD 2025

No	Kinerja Utama/ Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	2	3	4	5
17.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	1. Nilai SAKIP	80,11	- Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah - Menyesuaikan target RPJMD 2025-2029
		2. Status EKPPD	Tinggi (3,474)	- Indikator Sasaran RPJMD yang merupakan kewenangan Walikota - Menyesuaikan realisasi 2024
18.	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK atas LKPD	WTP	- Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah - Menyesuaikan target RPJMD 2025-2029
19.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,40	- Indikator Sasaran RPJMD yang merupakan kewenangan Walikota - Menyesuaikan target RPJMD 2025-2029

Sumber: Bapperinda Kota Blitar, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, RKPD Tahun 2025, RPJMD Kota Blitar 2025-2029, 2025 diolah

Tabel 2.3.2
Program dan Anggaran Tahun 2025
Pendukung Kinerja Utama/Sasaran Strategis Kota Blitar

No	Nama Program	Anggaran
1	2	3
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	568.176.850.129,40
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	60.010.424.470,00
3.	Program Pengembangan Kurikulum	780.871.200,00
4.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6.964.170.500,00
5.	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	17.210.000.000,00
6.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	68.129.761.400,00
7.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	711.361.400,00
8.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	319.434.225,00
9.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.789.075.900,00
10.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	7.820.076.567,00
11.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	265.365.000,00
12.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.074.295.180,00
13.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	4.807.271.449,52
14.	Program Penataan Bangunan Gedung	9.388.632.271,45
15.	Program Penyelenggaraan Jalan	9.493.921.532,00
16.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	612.177.100,00

No	Nama Program	Anggaran
1	2	3
17.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.041.228.000,00
18.	Program Pengembangan Perumahan	1.810.982.315,00
19.	Program Kawasan Permukiman	3.513.381.566,07
20.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.999.672.000,00
21.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1.232.924.588,93
22.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.037.098.314,96
23.	Program Penanggulangan Bencana	994.478.260,27
24.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	316.595.800,00
25.	Program Pemberdayaan Sosial	1.087.764.600,00
26.	Program Rehabilitasi Sosial	957.632.069,00
27.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	14.587.442.039,00
28.	Program Penanganan Bencana	199.514.300,00
29.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	35.045.000,00
30.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.699.031.000,00
31.	Program Penempatan Tenaga Kerja	93.266.000,00
32.	Program Hubungan Industrial	94.019.800,00
33.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	786.109.200,00
34.	Program Perlindungan Perempuan	154.872.409,00
35.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	105.204.055,00
36.	Program Perlindungan Khusus Anak	215.210.923,00
37.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	123.513.900,00
38.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	39.299.100,00
39.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	14.235.000,00
40.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	16.400.000,00
41.	Program Penatagunaan Tanah	268.580.000,00
42.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	31.047.500,00
43.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	385.233.600,00
44.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	3.662.708.759,33
45.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	2.890.000,00
46.	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	14.650.000,00
47.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	296.475.400,00
48.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	305.964.200,00
49.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	2.600.000,00
50.	Program Pengelolaan Persampahan	11.039.128.048,00
51.	Program Pendaftaran Penduduk	295.889.379,00
52.	Program Pencatatan Sipil	146.835.600,00
53.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	222.210.800,00
54.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	15.048.000,00
55.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	22.000.000,00
56.	Program Pengendalian Penduduk	218.275.629,00
57.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.296.710.800,00
58.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.233.256.087,00
59.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	12.499.516.603,41

No	Nama Program	Anggaran
1	2	3
60.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	3.216.536.136,00
61.	Program Aplikasi Informatika	5.99.277.310,00
62.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	79.118.800,00
63.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	16.471.700,00
64.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	63.303.700,00
65.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	190.288.600,00
66.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	694.813.400,00
67.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	692.141.200,00
68.	Program Pengembangan UMKM	413.832.800,00
69.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	78.852.000,00
70.	Program Promosi Penanaman Modal	257.396.974,00
71.	Program Pelayanan Penanaman Modal	297.511.000,00
72.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	94.742.500,00
73.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.502.938.200,00
74.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	6.875.156.622,00
75.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	328.651.200,00
76.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	200.529.150,00
77.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	167.765.200,00
78.	Program Pengembangan Kebudayaan	533.467.101,00
79.	Program Pembinaan Sejarah	610.124.000,00
80.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	30.000.000,00
81.	Program Pembinaan Perpustakaan	844.468.229,00
82.	Program Pengelolaan Arsip	233.619.600,00
83.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	294.117.656,00
84.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	99.611.100,00
85.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	971.673.800,00
86.	Program Pemasaran Pariwisata	764.659.488,00
87.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	29.266.600,00
88.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	489.882.800,00
89.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.681.168.992,00
90.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	229.588.700,00
91.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	17.675.000,00
92.	Program Perizinan Usaha Pertanian	6.352.100,00
93.	Program Penyuluhan Pertanian	2.049.116.990,00
94.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	5.355.235.454,00
95.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	202.713.400,00
96.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	107.040.900,00
97.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	3.548.677.514,00
98.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	11.806.515.635,00
99.	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.123.637.319,00
100.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	10.673.516.510,00
101.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	842.259.539,00
102.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	660.679.900,00

No	Nama Program	Anggaran
1	2	3
103.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	11.712.948.766,00
104.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.867.765.212,44
105.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.533.637.075,00
106.	Program Kepegawaian Daerah	2.849.991.100,00
107.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.306.465.425,00
108.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	711.726.200,00
109.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.560.183.880,00
110.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	695.108.000,00
111.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.490.464.521,64
112.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	46.465.745.279,13
113.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.077.717.786,00
114.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.279.184.300,00
115.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	661.920.108,00
116.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	28.448.240,00
117.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	177.003.100,00
118.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.536.811.200,00
	Jumlah	**956.797.353.982,55**

Sumber: BPKAD Kota Blitar, Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan tabel diatas (2.3.2) maka terdapat 118 program pendukung utama perjanjian kinerja Pemerintah Kota Blitar dengan total pagu Rp. **946.686.377.996,55 atau sebesar 98,94% dari total P-APBD Kota Blitar Tahun 2025 sebesar Rp. 956.797.353.982,55.** Dari 118 program tersebut, terdapat 1 (satu) Program yaitu ***Program Pengelolaan Keuangan Daerah*** dengan sebagian anggaran sebesar Rp. 10.110.975.986,00 yang tidak mendukung langsung pelaksanaan kinerja utama yaitu anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Sedangkan yang dipergunakan untuk mengevaluasi capaian kinerja tahunan, dalam pelaporan kinerja instansi pemerintah ini, yaitu program beserta anggaran yang berdampak langsung terhadap pencapaian kinerja tahunan.

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BLITAR TAHUN 2025

Tabel 2.3.3
PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BLITAR TAHUN 2025

No	Kinerja Utama/ Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang demokratis	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	88,68	89,06	100,43%
2.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	85,540	85,61*	100,08%
3.	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,49	98,03*	100,55%
4.	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Daya Saing SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82,71	82,03	99,18%
5.	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Indeks Pendidikan	0,822	0,773	94,04%
6.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	75,30	75,47	100,23%
7.	Meningkatnya pengendalian penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	0,915%	0,94%	97,27%
8.	Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan	6,63%	6,60%	100,45%
		Indeks Gini	0,352	0,340	103,41%
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,97%	4,28%	113,88%
9.	Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,115	0,15	69,57%
10.	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	80,81	69,56	86,08%
11.	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	73,50%	75,95%	103,33%
12.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,37%	5,31%	98,88%
13.	Meningkatnya nilai inventasi daerah	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	1%***	1,1%	110,00%
14.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	62,88	63,04	100,25%
15.	Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,02	67,33	100,46%
16.	Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah terhadap Bencana (IKD)	0,620	0,41	66,13%
17.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	1. Nilai SAKIP	80,11	81,19	101,35%
		2. Status EKPPD	Tinggi (3,474)	Sedang (3,3670)*	96,92%

No	Kinerja Utama/ Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)
1	2	3	4	5	6
18.	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	100,00%
19.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,40	91,22	102,04%

Sumber: Perhitungan capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan urusan tahun 2025

**) data sementara*

***) kondisi akhir RPJMD (2026) menyesuaikan Perda Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 dan telah tercapai pada tahun 2024*

****) target 2025 dan kondisi akhir 2026 menyesuaikan dengan perubahan metode penghitungan dari Instansi Pembina serta capaian 2022 dimana perubahan target ini tertuang pada Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026*

C. PENGUKURAN REALISASI KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Dalam RPJMD 2021– 2026 terdapat 9 (sembilan) tujuan dan 35 (tiga puluh lima) sasaran dimana **sebagian ditetapkan menjadi kinerja utama dan sasaran yang menjadi kewenangan Walikota** dengan perbandingan realisasi kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.3.4
PENGUKURAN REALISASI KINERJA UTAMA/SASARAN RPJMD TAHUN 2025 DIBANDINGKAN DENGAN REALISASI TAHUN 2023-2024

No	Kinerja Utama/Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
1	2	3	5	6	7
1.	**Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang demokratis**	**Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) (IKU)**	84,37	88,68	89,06
2.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	85,15	85,49	85,61*
3.	**Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak**	**Indeks Pembangunan Gender (IPG) (IKU)**	98,09	98,03	98,03* (masih menggunakan data capaian 2024)
4.	**Meningkatnya derajat kesehatan dan daya saing SDM**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (IKU)**	80,78	81,44	82,03
5.	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Indeks Pendidikan	0,764	0,772	0,773
6.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	74,97	75,20	75,47
7.	Meningkatnya pengendalian penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	1,00%	0,98%	0,94%
8.	**Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat**	**Angka Kemiskinan (IKU)**	7,30%	6,75%	6,60%
9.	Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,12	0,24	0,15

No	Kinerja Utama/Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
1	2	3	5	6	7
10.	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	79,25	80,80	69,56
11.	**Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat**	**Indeks Gini (IKU)**	0,397	0,353	0,340
12.	**Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat**	**Tingkat Pengangguran Terbuka (IKU)**	5,24%	5,11%	4,28%
13.	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	72,26%	70,44%	75,95%
14.	**Meningkatnya pertumbuhan ekonomi**	**Laju pertumbuhan ekonomi (IKU)**	5,29%	**5,33%**	**5,31%**
15.	Meningkatnya nilai investasi daerah	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	11,54%	12,38%	1,1%
16.	**Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah**	**Indeks Infrastruktur Daerah (IKU)**	61,69	**63,41**	**63,04**
17.	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKU)**	67,58	64,94	67,33
18.	Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah terhadap Bencana (IKD)	0,43	0,47	0,41
19.	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah**	**Nilai SAKIP (IKU)**	74,79 (BB)	80,06 (A)	81,19 (A)
		Status EKPPD	Tinggi (3,4243)	Tinggi (3,4243)*	Sedang (3,3670)*
20.	**Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah**	**Opini BPK atas LKPD (IKU)**	WTP	WTP	WTP
21.	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	Baik (85,60)	Sangat Baik (89,23)	Sangat Baik (91,22)

Sumber: Bapperinda Kota Blitar, Realisasi IKU/Indikator Sasaran Kota Blitar Tahun 2023-2025
**masih menggunakan data capaian tahun sebelumnya sambil menunggu release data dari Lembaga/Institusi yang berwenang*

Berdasarkan tabel diatas maka terdapat **2 (dua)** indikator kinerja utama/sasaran RPJMD yang realisasi di tahun 2025 menurun di banding tahun 2024 yaitu **Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Infrastruktur Daerah**, hal ini dilatarbelakangi karena:

1. **Laju Pertumbuhan Ekonomi**

   Perekonomian Kota Blitar pada tahun 2025 mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar 5,31 persen. Perlambatan ini terjadi karena adanya penurunan kegiatan perekonomian di Kota Blitar, ditandai dengan berkurangnya kegiatan konstruksi, administrasi pemerintah, dan jasa lainnya karena dampak efisiensi. Selain itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti penurunan laju pertumbuhan investasi, serta dinamika kondisi ekonomi regional dan nasional yang mempengaruhi aktivitas produksi, konsumsi, dan investasi di daerah.

   Oleh karena itu, kedepan diperlukan upaya penguatan sektor-sektor ekonomi yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah, peningkatan daya tarik investasi melalui peningkatan kemudahan berusaha dan promosi potensi daerah, serta optimalisasi peran sektor jasa dan industri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih mendekati target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah

2. **Indeks Infrastruktur Daerah**

   a. Penurunan kondisi sumber mata air

      Persentase sumber mata air dalam kondisi baik mengalami penurunan dari 97,33% pada tahun 2024 menjadi 89,74% pada tahun 2025. Kondisi ini dapat berpengaruh terhadap keberlanjutan ketersediaan sumber air baku.

   b. Fluktuasi kondisi jaringan drainase

      Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 88,96%, meskipun kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 92,97%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem drainase masih memerlukan peningkatan kualitas pemeliharaan dan rehabilitasi.

   c. Kualitas trotoar yang masih relatif rendah

      Persentase trotoar dalam kondisi baik hanya meningkat secara terbatas dari 61,92% pada tahun 2022 menjadi 64,24% pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa fasilitas pejalan kaki masih perlu ditingkatkan guna mendukung mobilitas yang lebih aman dan ramah bagi masyarakat.

   d. Penurunan Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air pada tahun 2025

      Indeks Infrastruktur SDA mengalami penurunan dari 98,61 pada tahun 2024 menjadi 94,37 pada tahun 2025, yang menunjukkan adanya kebutuhan peningkatan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air.

e. Kurangnya kedisiplinan juru parkir dalam melakukan penataan dan pemungutan retribusi parkir

Pada beberapa lokasi parkir masih ditemukan praktik penataan kendaraan yang kurang tertib serta pemungutan retribusi yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini berpotensi mengurangi kapasitas efektif badan jalan, mempengaruhi kelancaran arus lalu lintas, serta berdampak pada optimalisasi penerimaan retribusi parkir daerah.

f. Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas fasilitas utama serta penunjang Terminal Tipe C di Kota Blitar

Beberapa fasilitas utama maupun fasilitas penunjang terminal masih belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan, baik dari sisi kelengkapan sarana prasarana maupun tingkat pemanfaatannya oleh angkutan umum dan masyarakat, sehingga fungsi terminal sebagai simpul transportasi perkotaan belum berjalan secara optimal

Dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan infrastruktur daerah pada periode selanjutnya, beberapa langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan antara lain:

1) Penguatan pemeliharaan dan perlindungan sumber daya air

Perlu meningkatkan upaya konservasi dan perlindungan kawasan sumber air melalui rehabilitasi daerah tangkapan air, pengendalian pemanfaatan lahan, serta peningkatan sistem monitoring kondisi sumber mata air.

2) Peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan drainase

Diperlukan peningkatan kegiatan rehabilitasi, normalisasi saluran, serta pembangunan jaringan drainase baru guna mengurangi potensi genangan dan banjir di kawasan perkotaan.

3) Pengembangan infrastruktur ramah pejalan kaki

Upaya peningkatan kualitas trotoar perlu dilakukan melalui pembangunan dan rehabilitasi trotoar yang memenuhi standar keselamatan, kenyamanan, dan aksesibilitas bagi seluruh pengguna jalan.

4) Pemeliharaan berkelanjutan jaringan jalan dan jembatan

Program pemeliharaan rutin dan berkala terhadap jalan dan jembatan perlu terus ditingkatkan guna mempertahankan capaian kondisi infrastruktur yang telah baik serta menjaga kelancaran mobilitas masyarakat.

5) Penguatan manajemen lalu lintas perkotaan

Melakukan rekayasa lalu lintas dan peningkatan pengaturan simpang pada ruas jalan dengan tingkat aktivitas tinggi guna menjaga tingkat pelayanan jalan tetap berada pada kondisi yang baik.

6) Penataan dan optimalisasi pengelolaan parkir

Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, dan peningkatan pengawasan terhadap juru parkir guna meningkatkan kedisiplinan dalam penataan kendaraan serta pemungutan retribusi parkir sesuai ketentuan yang berlaku, serta pengaturan zona parkir dan peningkatan sistem pengelolaan parkir guna menjaga kelancaran lalu lintas serta meningkatkan penerimaan retribusi daerah.

7) Peningkatan kualitas pelayanan Terminal Tipe C

Melakukan perbaikan dan peningkatan fasilitas utama maupun fasilitas penunjang terminal, penataan kawasan terminal, serta peningkatan pengelolaan operasional terminal agar dapat berfungsi secara optimal sebagai simpul transportasi perkotaan.

D. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET DALAM PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Tabel 2.3.5
PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DIBANDINGKAN DENGAN TARGET RPJMD KOTA BLITAR 2021 – 2026

No	Kinerja Utama/ Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi s.d 2025	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021-2026
1	2	3	4	7	8	9
	Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang demokratis	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	88,68	89,06	84,25**	105,71%
2.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	85,540	85,61*	84,25**	101,61%
3.	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,49	98,03*	98**	100,03%
4.	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Daya Saing SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82,71	82,03	78,62**	104,34%
5.	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Indeks Pendidikan	0,822	0,773	0,74**	104,46%
6.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	75,30	75,47	74,30**	101,57%
7.	Meningkatnya pengendalian penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	0,915%	0,94%	0,65%**	55,38%
8.	Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan	6,63%	6,60%	7,06**	106,52%
		Indeks Gini	0,352	0,340	0,341	100,29%
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,97%	4,28%	7,04**	139,20%
9.	Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,115	0,15	0,21	128,57%

No	Kinerja Utama/ Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi s.d 2025	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021-2026
1	2	3	4	7	8	9
10.	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	80,81	69,56	76,18**	91,31%
11.	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	73,50%	75,95%	72%**	105,49%
12.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,37%	5,31%	5,5%	96,55%
13.	Meningkatnya nilai invenstasi daerah	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	1%***	161,84 %	133,85%***	120,91%
14.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	62,88	63,04	58,67**	107,45%
15.	Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,02	67,33	73,54	91,56%
16.	Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah terhadap Bencana (IKD)	0,620	0,41	0,65	63,08%
17.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	1. Nilai SAKIP	80,11	81,19	BB (72,35)**	112,22%
		2. Status EKPPD	Tinggi (3,474)	Sedang (3,3670)*	Sangat Tinggi (3,3538)**	100,39%
18.	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	100%
19.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,40	91,22	Baik (85,00)**	107,32%

Sumber: Perhitungan capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan urusan tahun 2025
) data sementara **) kondisi akhir RPJMD (2026) menyesuaikan Perda Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 dan telah tercapai pada tahun 2024 *) target 2025 dan kondisi akhir 2026 menyesuaikan dengan perubahan metode penghitungan dari Instansi Pembina serta capaian 2022 dimana perubahan target ini tertuang pada Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026*

E. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DIKAITKAN DENGAN HASIL (KINERJA) YANG TELAH DICAPAI

Efisiensi merupakan pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi berkaitan dengan proses yang dilakukan oleh entitas. Jika *output* yang dihasilkan entitas lebih besar dibandingkan dengan *input* yang diterima entitas, maka entitas tersebut dikatakan efisien. Makin besar *output* yang dihasilkan dibandingkan dengan *input* yang digunakan, maka semakin efisien suatu entitas.

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam **Buku Pengukuran Efisiensi di Instansi Pemerintah** karya **Tri Rakhmawati** penerbit LIPI Press tahun 2017 pada halaman 13 "*Pada dasarnya, efisiensi dapat dihitung dengan membandingkan keluaran yang dihasilkan dengan sumber*

daya masukan yang digunakan (Ramanathan 2003; Ozcan 2014). Sebuah Organisasi dikatakan efisien jika rasio keluaran dan masukan aktual sama dengan rasio keluaran dan masukan standar.

Adapun input/masukan yang diterima entitas yakni besaran anggaran yang mendukung pencapaian masing-masing kinerja utama/sasaran pemerintah daerah disandingkan dengan realisasi anggaran yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.3.6
ANGGARAN PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA UTAMA/SASARAN RPJMD TAHUN 2025 DISANDINGKAN DENGAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

Kinerja Utama/Sasaran	Program yang mendukung	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Keuangan (%)
1) Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang demokratis	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.279.184.300,00	1.178.370.602,00	
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	661.920.108,00	659.545.708,00	
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	28.448.240,00	26.529.200,00	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	177.003.100,00	148.600.200,00	
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.536.811.200,00	1.494.160.982,00	
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.037.098.314,96	3.820.728.303,00	
	Program Pengembangan Kebudayaan	533.467.101,00	523.549.872,00	
	Program Pembinaan Sejarah	610.124.000,00	601.225.000,00	
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	30.000.000,00	28.480.000,00	
	Total anggaran program yang mendukung sasaran 1	**8.894.056.363,96**	**8.481.189.867,00**	**95,36**
2) Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	786.109.200,00	761.209.879,00	
	Program Perlindungan Perempuan	154.872.409,00	126.383.956,00	

Kinerja Utama/Sasaran	Program yang mendukung	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Keuangan (%)
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	105.204.055,00	94.028.286,00	
	Program Perlindungan Khusus Anak	215.210.923,00	192.088.252,00	
	Total anggaran program yang mendukung sasaran 2	**1.261.396.587,00**	**1.173.710.373,00**	**93,05**
3) Meningkatnya derajat kesehatan dan daya saing SDM	Program Pengelolaan Pendidikan	60.010.424.470,00	53.507.301.127,00	
	Program Pengembangan Kurikulum	780.871.200,00	750.351.624,00	
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6.964.170.500,00	6.820.468.334,00	
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	17.210.000,00	15.508.202,00	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	68.129.761.400,00	65.795.237.148,83	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	711.361.400,00	684.566.914,00	
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	319.434.225,00	311.787.144,00	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.789.075.900,00	2.672.183.085,00	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.502.938.200,00	1.879.573.560,00	
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	328.651.200,00	328.648.199,00	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	6.875.156.622,00	6.649.404.938,00	
	Program Pengendalian Penduduk	218.275.629,00	185.194.792,00	
	Program Pembinaan Keluarga Berencana	1.296.710.800,00	1.000.569.706,00	
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	1.233.256.087,00	1.182.988.036,00	
	Program Pembinaan Perpustakaan	844.468.229,00	813.742.400,00	
	Total anggaran program yang mendukung sasaran 3	**153.021.765.862,00**	**142.597.525.209,83**	**93,19**
4) Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat (Angka Kemiskinan)	Program Pengelolaan Pendidikan	60.010.424.470,00	53.507.301.127,00	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	12.499.516.603,41	11.641.474.687,00	

Kinerja Utama/Sasaran	Program yang mendukung	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Keuangan (%)
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	319.434.225,00	311.787.144,00	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.789.075.900,00	2.672.183.085,00	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	68.129.761.400,00	65.795.237.148,83	
	Program Rehabilitasi Sosial	957.632.069,00	914.688.229,00	
	Program Pemberdayaan Sosial	1.087.764.600,00	971.778.691,00	
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	14.587.442.039,00	14.232.352.900,00	
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	123.513.900,00	119.392.250,00	
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	39.299.100,00	38.467.975,00	
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	14.235.000,00	14.160.100,00	
	Program Pengembangan Perumahan	1.810.982.315,00	1.705.194.410,00	
	Program Kawasan Permukiman	3.513.381.566,07	2.966.768.142,00	
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.999.672.000,00	1.959.160.652,00	
	Progam Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	7.820.076.567,00	7.668.135.657,00	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	4.807.271.449,52	4.683.957.400,00	
	Program Penataan Bangunan Gedung	9.388.632.271,45	8.838.590.620,00	
	Program Penyelenggaraan Jalan	9.493.921.532,00	9.051.999.958,00	
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	612.177.100,00	449.447.483,00	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	265.365.000,00	126.601.000,00	
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	3.548.677.514,00	3.022.927.547,00	
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	692.141.200,00	662.459.038,00	
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	786.109.200,00	761.209.879,00	
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.233.256.087,00	1.182.988.036,00	
	Program Penyuluhan Pertanian	2.049.116.990,00	1.954.190.124,00	

Kinerja Utama/Sasaran	Program yang mendukung	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Keuangan (%)
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	46.465.745.279,13	43.285.653.231,00	
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.699.031.000,00	2.473.147.442,00	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	93.266.000,00	81.449.099,00	
	Program Hubungan Industrial	94.019.800,00	52.943.590,00	
	Total anggaran program yang mendukung sasaran 4	**257.930.942.177,58**	**241.145.646.644,83**	**93,49**
5) Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat (Indeks Gini)	Program Rehabilitasi Sosial	957.632.069,00	914.688.229,00	
	Program Pemberdayaan sosial	1.087.764.600,00	971.778.691,00	
	Total anggaran program yang mendukung sasaran 5	**2.045.396.669,00**	**1.886.466.920,00**	**92,23**
6) Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat (TPT)	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.699.031.000,00	2.473.147.442,00	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	93.266.000,00	81.449.099,00	
	Program Hubungan Industrial	94.019.800,00	52.943.590,00	
	Total anggaran program yang mendukung sasaran 6	**2.886.316.800,00**	**2.607.540.131,00**	**90,34**
7) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	78.852.000,00	58.933.000,00	
	Program Promosi Penanaman Modal	257.396.974,00	256.788.000,00	
	Program Pelayananan Penanaman Modal	297.511.000,00	282.508.388,00	
	Program Pengendalian Penanaman Modal	94.742.500,00	90.252.150,00	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	971.673.800,00	939.200.110,00	
	Program Pemasaran Pariwisata	764.659.488,00	752.316.100,00	
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	29.266.600,00	25.680.000,00	
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	5.355.235.454,00	4.943.249.059,00	
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	202.713.400,00	193.318.359,00	

Kinerja Utama/Sasaran	Program yang mendukung	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Keuangan (%)
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	107.040.900,00	106.514.900,00	
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	3.548.677.514,00	3.022.927.547,00	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	294.117.656,00	289.493.363,00	
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	99.611.100,00	95.800.050,00	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	489.882.800,00	476.104.120,00	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.681.168.992,00	1.414.576.155,00	
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	229.588.700,00	225.186.814,00	
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	17.675.000,00	16.872.000,00	
	Program Perizinan Usaha Pertanian	6.352.100,00	6.071.500,00	
	Program Penyuluhan Pertanian	2.049.116.990,00	1.954.190.124,00	
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	79.118.800,00	78.529.121,00	
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	16.471.700,00	15.098.096,00	
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	63.303.700,00	63.302.800,00	
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	190.288.600,00	188.591.000,00	
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	694.813.400,00	682.313.865,00	
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	692.141.200,00	662.459.038,00	
	Program Pengembangan UMKM	413.832.800,00	399.312.898,00	
	Total anggaran program yang mendukung sasaran 7	**18.912.538.968,00**	**17.373.981.246,00**	**91,86**
8) Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Program Pengelolaan Sumber Daya air (SDA)	7.820.076.567,00	7.668.135.657,00	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	265.365.000,00	126.601.000,00	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.074.295.180,00	912.642.108,00	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	4.807.271.449,52	4.683.957.400,00	

Kinerja Utama/Sasaran	Program yang mendukung	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Keuangan (%)
	Drainase			
	Program Penataan Bangunan Gedung	9.388.632.271,45	8.838.590.620,00	
	Program Penyelenggaraan Jalan	9.493.921.532,00	9.051.999.958,00	
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	612.177.100,00	449.447.483,00	
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.041.228.000,00	883.450.962,00	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	12.499.516.603,41	11.641.474.687,00	
	Program Kawasan Permukiman	3.513.381.566,07	2.966.768.142,00	
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.999.672.000,00	1.959.160.652,00	
	Program Pengembangan Perumahan	1.810.982.315,00	1.705.194.410,00	
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	1.232.924.588,93	1.215.007.987,00	
	Program Penyelesaian Sengketa tanah Garapan	16.400.000,00	2.750.000,00	
	Program Penatagunaan Tanah	268.580.000,00	262.522.775,00	
	Total anggaran program yang mendukung sasaran 8	**55.844.424.173,38**	**52.367.703.841,00**	**93,77**
9) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan hidup	385.233.600,00	379.781.268,00	
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	2.600.000,00	2.476.250,00	
	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	14.650.000,00	14.130.000,00	
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	31.047.500,00	31.037.500,00	
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	3.662.708.759,33	3.410.029.838,00	
	Program Pengelolaan Persampahan	11.039.128.048,00	10.970.751.163,00	
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	296.475.400,00	274.944.348,00	

Kinerja Utama/Sasaran	Program yang mendukung	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Keuangan (%)
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	305.964.200,00	287.204.191,00	
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	2.890.000,00	2.885.000,00	
	Program Penanggulangan Bencana	994.478.260,27	815.238.078,00	
	Program Pencegahan, Penanggulanga, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	316.595.800,00	294.628.529,00	
	Program Penanganan Bencana	199.514.300,00	172.394.000,00	
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	35.045.000,00	34.204.216,00	
	Total anggaran program yang mendukung sasaran 9	**17.286.330.867,60**	**16.689.704.381,00**	**96,55**
10) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	568.176.850.129,40	533.839.454.492,79	
	Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	842.259.539,00	775.259.710,00	
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	660.679.900,00	603.069.853,00	
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	711.726.200,00	707.932.873,00	
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	695.108.000,00	649.570.150,00	
	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	11.806.515.635,00	11.309.982.034,00	
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	22.000.000,00	21.450.000,00	
	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.123.637.319,00	1.019.112.577,00	
	Total anggaran program yang mendukung sasaran 10	**584.038.776.722,40**	**548.925.831.689,79**	**93,99**
11) Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Program Pengelolaan keuangan daerah	1.601.972.780,00	1.521.818.870,00	
	Program penyelenggaraan	2.560.183.880,00	2.408.099.091,00	

Kinerja Utama/Sasaran	Program yang mendukung	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Keuangan (%)
	pengawasan			
	Program pengelolaan pendapatan daerah	2.533.637.075,00	2.235.673.008,00	
	Program pengelolaan barang milik daerah	5.867.765.212,44	5.228.442.739,00	
	Total anggaran program yang mendukung sasaran 11	**12.563.558.947,44**	**11.394.033.708,00**	**90,69**
12) Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.490.464.521,64	1.349.455.783,00	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	46.465.745.279,13	43.285.653.231,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.077.717.786,00	956.390.958,00	
	Program Pendaftaran Penduduk	295.889.379,00	286.882.623,00	
	Program Pencatatan Sipil	146.835.600,00	142.567.920,00	
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	222.210.800,00	209.619.879,00	
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	15.048.000,00	14.960.000,00	
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	10.673.516.510,00	9.040.020.568,00	
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	3.216.536.136,00	3.120.111.099,00	
	Program Aplikasi Informatika	5.992.277.310,00	5.943.676.137,00	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	200.529.150,00	198.470.445,00	
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	167.765.200,00	145.387.251,00	
	Program Kepegawaian Daerah	2.849.991.100,00	2.391.218.209,00	
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.306.465.425,00	2.128.421.479,00	
	Program Pengelolaan Arsip	233.619.600,00	229.163.864,00	
	Total anggaran program yang mendukung sasaran 12	**75.354.611.796,77**	**69.441.999.446,00**	**92,15**

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Blitar, 2026

Dan jika dibandingkan dengan output/keluaran yang dihasilkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, maka akan menghasilkan efisiensi sebagai berikut:

Tabel 2.3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya per Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Blitar Tahun 2025

No	Uraian Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi	Keterangan
1	2	3	4	5=3/4	6
1.	Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang demokratis	100,43%	95,36%	1,05	Efisien
2.	Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	100,55%	93,05%	1,07	Efisien
3.	Meningkatnya derajat kesehatan dan daya saing SDM	99,18%	93,19%	1,06	Efisien
4.	Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat (Angka Kemiskinan)	100,45%	93,49%	1,07	Efisien
5.	Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat (Indeks Gini)	103,41%	92,23%	1,12	Efisien
6.	Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat (TPT)	113,88%	90,34%	1,26	Efisien
7.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	98,88%	91,86%	1,08	Efisien
8.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	100,25%	93,77%	1,07	Efisien
9.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	100,46%	96,55%	1,04	Efisien
10.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	99,14%	93,99%	1,05	Efisien
11.	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	100,00%	90,69%	1,05	Efisien
12.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	102,04%	92,15%	1,11	Efisien

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025 terjadi efisiensi anggaran. Faktor yang mempengaruhi nilai efisiensi pelaksanaan anggaran tersebut adalah persentase realisasi capaian sasaran dan persentase realisasi anggaran. **Realisasi capaian sasaran yang tinggi dan realisasi anggaran yang rendah akan diperoleh pelaksanaan anggaran yang efisien.**

ANALISIS CAPAIAN KINERJA UTAMA/SASARAN PEMERINTAH KOTA BLITAR DISANDINGKAN DENGAN TINGKAT EFISIENSI

KINERJA UTAMA 1
Terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat yang Demokratis

Indikator Kinerja:
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
88,68	89,06	100,43%	84,25**	105,71%

***) kondisi akhir RPJMD (2026) menyesuaikan Perda Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 dan telah tercapai pada tahun 2024*

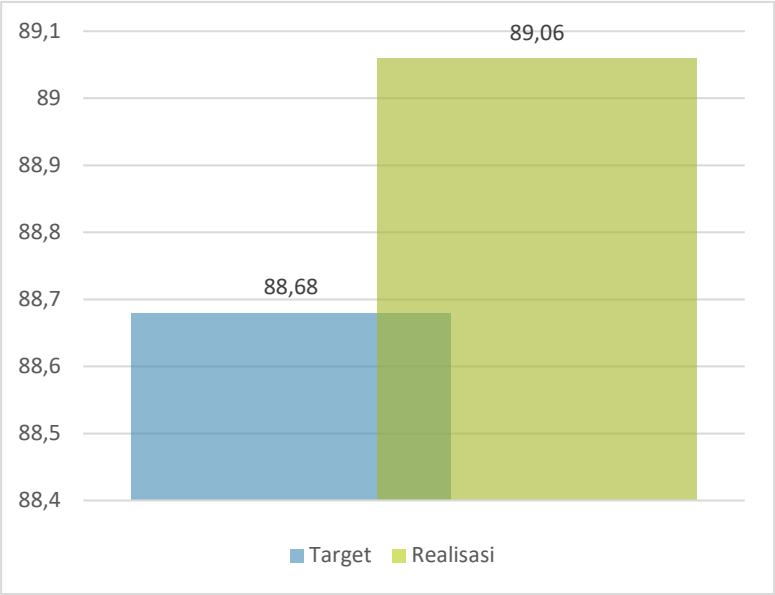

Berdasarkan tabel dan grafik Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kota Blitar, target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 yang ditetapkan sebesar **88,68** telah terealisasi sebesar **89,06**, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai **100,43%** dan berada pada kategori **baik**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Blitar tidak hanya mampu memenuhi target yang telah ditetapkan, tetapi juga melampauinya secara terukur.

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 sebesar **84,25****, realisasi tahun 2025 telah mencapai **105,71%** terhadap target RPJMD. Hal ini mengindikasikan bahwa sasaran strategis pembangunan demokrasi daerah telah tercapai melampaui target akhir periode perencanaan. Dengan demikian, kinerja pembangunan demokrasi di Kota Blitar berada pada jalur yang sangat positif serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah

Gambar 2.3.1

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar, 2025, *Laporan Akhir Indeks Demokrasi Indonesia Kota Blitar 2025*.

Pada tahun 2025, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kota Blitar tercatat sebesar **89,06**, meningkat sebesar **0,38 poin** dibandingkan tahun 2024 yang mencapai **88,68**. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar **84,37**, terjadi peningkatan signifikan sebesar **4,69 poin** dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Data pada tingkat Pemerintah Kota Blitar ini menggambarkan kondisi dan performa demokrasi di daerah, yang sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial dan politik setempat.

Capaian **Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kota Blitar Tahun 2025** merupakan hasil dari **peningkatan kinerja pada seluruh aspek pembentuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)**, yaitu **Aspek Kebebasan, Aspek Kesetaraan, dan Aspek Lembaga Demokrasi**, yang secara kumulatif memberikan kontribusi positif terhadap skor akhir Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Peningkatan kinerja pada seluruh aspek tersebut menunjukkan bahwa **pelaksanaan pembangunan demokrasi di Kota Blitar telah dilaksanakan secara efektif dan efisien**, karena mampu menghasilkan capaian kinerja yang optimal melalui pemanfaatan sumber daya yang terarah dan tepat sasaran. Kondisi ini menegaskan bahwa pembangunan demokrasi di Kota Blitar tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif, dengan memperhatikan pemenuhan hak-hak sipil, penguatan kelembagaan demokrasi, serta peningkatan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh warga masyarakat.

Gambar 2.3.2

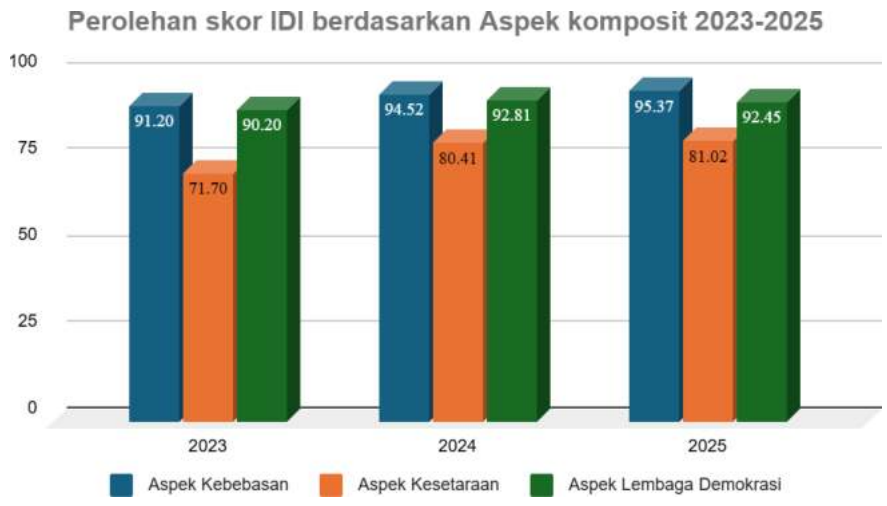

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar, 2025, *Laporan Akhir Indeks Demokrasi Indonesia Kota Blitar 2025*.

Berdasarkan perolehan skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) berdasarkan aspek komposit tahun 2023-2025, pada tahun 2025 tidak seluruh aspek mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024. **Aspek Kebebasan** mengalami peningkatan secara konsisten, dari 91,20 pada tahun 2023 menjadi 94,52 pada tahun 2024 dan kembali meningkat menjadi 95,37 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan semakin terjaminnya kebebasan sipil dalam kehidupan demokrasi di daerah. **Aspek**

Kesetaraan juga menunjukkan perbaikan signifikan, dari 71,70 pada tahun 2023 meningkat menjadi 80,41 pada tahun 2024 dan kembali naik menjadi 81,02 pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan semakin menguatnya prinsip kesetaraan dalam partisipasi dan akses terhadap proses demokrasi. Sementara itu, **Aspek Lembaga Demokrasi** mengalami peningkatan dari 90,20 pada tahun 2023 menjadi 92,81 pada tahun 2024, meskipun pada tahun 2025 sedikit menurun menjadi 92,45. Kendati demikian, skor tersebut tetap berada pada kategori baik dan menunjukkan bahwa kapasitas serta kinerja lembaga demokrasi di Kota Blitar tetap terjaga secara optimal.

Secara keseluruhan, capaian tersebut mendorong Skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kota Blitar Tahun 2025 mencapai **89,06**, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 88,68. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi di Kota Blitar tetap terjaga dan cenderung menguat, terutama ditopang oleh peningkatan pada aspek kebebasan dan kesetaraan serta stabilnya kinerja lembaga demokrasi.

Capaian ini mencerminkan konsistensi Pemerintah Kota Blitar dalam menjaga keberlanjutan pembangunan demokrasi daerah, sehingga selaras dengan misi ke-1 Pemerintah Kota Blitar, yaitu *"Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan."*

Gambar 2.3.3

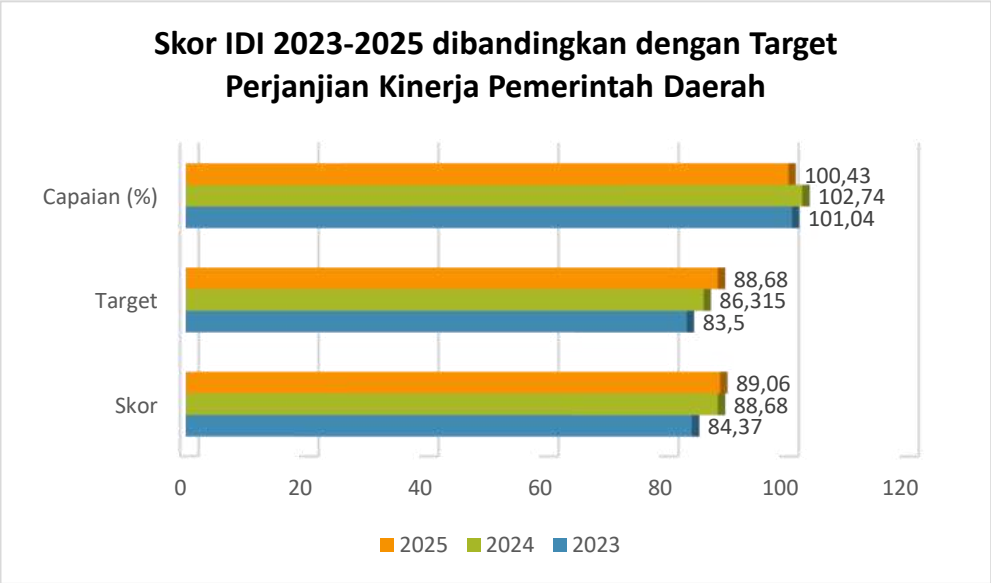

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar, 2025, *Laporan Akhir Indeks Demokrasi Indonesia Kota Blitar 2025*.

Adapun perbandingan antara perolehan skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah selama periode tahun 2023-2025 menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2023, Kota Blitar memperoleh skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar **84,37**, melampaui target yang ditetapkan sebesar **83,5**, dengan

persentase capaian sebesar **101,04%**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas demokrasi di Kota Blitar telah berada pada kondisi yang baik serta mampu melampaui target pembangunan yang direncanakan.

Pada tahun 2024, skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kota Blitar meningkat menjadi **88,68**, sementara target kinerja pada tahun tersebut ditetapkan sebesar **86,315**. Dengan demikian, persentase capaian kinerja mencapai **102,74%**. Peningkatan ini menunjukkan adanya penguatan kinerja demokrasi yang cukup signifikan, baik dalam aspek kebebasan sipil, kesetaraan, maupun kinerja lembaga demokrasi.

Selanjutnya pada tahun 2025, skor IDI Kota Blitar kembali meningkat menjadi **89,06**, melampaui target kinerja sebesar **88,68**, dengan persentase capaian sebesar **100,43%**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas demokrasi di Kota Blitar tetap terjaga dan berada pada kategori baik, sekaligus mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, perbandingan antara capaian skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dengan target perjanjian kinerja pemerintah daerah selama periode tahun 2023-2025 menunjukkan bahwa Kota Blitar tidak hanya mampu memenuhi target yang telah ditetapkan, tetapi juga secara konsisten melampauinya. Keberhasilan tersebut mencerminkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pendukung demokrasi, karena capaian kinerja dapat diraih secara optimal dengan deviasi yang terkendali antara perencanaan dan realisasi. Kondisi ini menunjukkan adanya pengelolaan sumber daya yang akuntabel, baik dari aspek perencanaan kebijakan, penguatan kelembagaan, penganggaran, maupun koordinasi lintas pemangku kepentingan.

Hasil analisis kinerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kota Blitar Tahun 2025 disusun berdasarkan **3** (tiga) aspek utama yang terdiri atas **22** (dua puluh dua) indikator pembentuk, dengan uraian sebagai berikut:

1. ASPEK KEBEBASAN

Aspek Kebebasan menggambarkan sejauh mana masyarakat di Kota Blitar memiliki ruang independensi dan otonomi dalam menjalankan hak-hak sipil dan politiknya tanpa pembatasan yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi. Aspek ini diukur melalui **tujuh indikator**, yaitu: (1) terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara; (2) terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat; (3) terjaminnya kebebasan berkeyakinan; (4) terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan; (5) terbebas dari

hambatan atau gangguan dalam penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum; (6) pemenuhan hak-hak pekerja; serta (7) pers yang bebas dalam menjalankan fungsinya.

Gambar 2.3.4

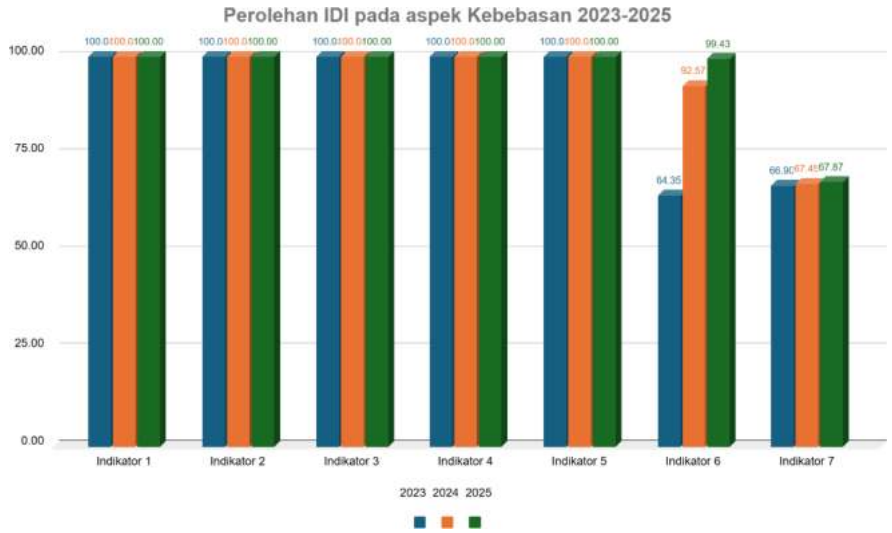

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar, 2025, *Laporan Akhir Indeks Demokrasi Indonesia Kota Blitar 2025*.

Berdasarkan hasil penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025, **Aspek Kebebasan Kota Blitar memperoleh skor 95,37**, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar **94,52**, serta melanjutkan tren positif dari tahun 2023 yang berada pada angka **91,20**. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kualitas kebebasan sipil di Kota Blitar terus mengalami penguatan secara konsisten dan menjadi salah satu fondasi utama dalam pembangunan demokrasi daerah.

Aspek kebebasan diukur melalui **tujuh indikator komposit** yang mencakup berbagai dimensi kebebasan sipil, mulai dari kebebasan mengekspresikan keyakinan personal hingga perlindungan institusional terhadap hak-hak tersebut. Secara umum, perkembangan skor pada periode 2023-2025 menunjukkan tren peningkatan yang stabil, yang mencerminkan semakin kuatnya perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara.

Indikator 1 hingga Indikator 5 menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan **skor maksimal 100 poin** secara konsisten pada tahun 2023, 2024, dan 2025. Kelima indikator tersebut meliputi jaminan kebebasan oleh aparat negara, jaminan kebebasan antar masyarakat, kebebasan berkeyakinan, perlindungan kebebasan dalam kebijakan, serta hak memilih dan dipilih. Perolehan skor maksimal ini menunjukkan tidak adanya catatan pelanggaran pada indikator-indikator tersebut serta mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjamin kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan.

Stabilitas capaian tersebut juga menunjukkan bahwa iklim sosial di Kota Blitar relatif kondusif dan dialogis. Masyarakat memiliki ruang yang aman untuk menyampaikan aspirasi maupun kritik

terhadap kebijakan publik, sementara aparat keamanan mampu menjalankan fungsi pengamanan secara profesional dan proporsional. Kondisi ini menjadi prasyarat penting dalam membangun **masyarakat sipil yang kuat (*strong civil society*)** serta memperkuat legitimasi pemerintahan daerah di mata masyarakat.

Peningkatan skor aspek kebebasan pada tahun 2025 terutama didorong oleh perbaikan signifikan pada **Indikator 6 (Pemenuhan Hak-Hak Pekerja)**. Indikator ini meningkat dari **64,35 pada tahun 2023**, menjadi **92,57 pada tahun 2024**, dan kembali meningkat hingga **99,43 pada tahun 2025**. Peningkatan tersebut mencerminkan semakin luasnya perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di Kota Blitar.

Berdasarkan **data Sakernas Agustus 2024**, sekitar **29,83 persen pekerja** di Kota Blitar telah memiliki perlindungan berupa **jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian**. Persentase ini telah mendekati **ambang ideal sebesar 30 persen** sebagaimana digunakan dalam metodologi penilaian ***Analytical Hierarchy Process* (AHP)** dalam riset IDI. Dengan demikian, apabila cakupan perlindungan pekerja terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang, indikator ini berpotensi memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan skor aspek kebebasan.

Sementara itu, **Indikator 7 (Kebebasan Pers)** menunjukkan peningkatan yang relatif terbatas. Skor indikator ini meningkat dari **66,90 pada tahun 2023**, menjadi **67,45 pada tahun 2024**, dan kembali meningkat menjadi **67,80 pada tahun 2025**. Nilai indikator ini bersumber dari **Indeks Kebebasan Pers (IKP) Provinsi Jawa Timur** yang diterbitkan oleh Dewan Pers, sehingga dinamika kebebasan pers di tingkat kota belum sepenuhnya tercermin dalam penghitungan skor IDI.

Ketergantungan pada indeks tingkat provinsi menyebabkan praktik hubungan yang konstruktif antara pemerintah daerah dan insan pers di Kota Blitar tidak sepenuhnya terakomodasi dalam penilaian indikator tersebut. Selain itu, capaian IKP Provinsi Jawa Timur yang masih berada di bawah angka 70 turut memberikan tekanan terhadap skor indikator kebebasan pers dalam penilaian aspek kebebasan.

Secara keseluruhan, capaian **Aspek Kebebasan Tahun 2025** merupakan capaian tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Pencapaian ini tidak hanya ditopang oleh stabilitas skor maksimal pada indikator-indikator fundamental, tetapi juga oleh peningkatan signifikan pada indikator pemenuhan hak-hak pekerja. Kondisi tersebut memberikan sinyal positif mengenai keberlanjutan kualitas demokrasi di Kota Blitar.

Meskipun demikian, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa capaian tersebut dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Fokus kebijakan ke depan tidak hanya pada peningkatan skor, tetapi juga pada **stabilitas dan konsistensi kinerja setiap indikator**, khususnya dalam memperluas perlindungan sosial bagi pekerja serta memperkuat ekosistem pers yang independen, profesional, dan kondusif di tingkat daerah.

Dengan demikian, capaian tahun 2025 dapat menjadi **momentum untuk memperkuat kualitas kebebasan sipil secara berkelanjutan**, melalui konsistensi kebijakan, penguatan perlindungan sosial ketenagakerjaan, serta pengembangan tata kelola komunikasi publik yang semakin terbuka dan akuntabel.

Beberapa faktor yang mendorong peningkatan capaian Aspek Kebebasan antara lain sebagai berikut:

1. **Stabilitas jaminan kebebasan sipil**

   Indikator jaminan kebebasan oleh aparat negara, jaminan kebebasan antar masyarakat, kebebasan berkeyakinan, perlindungan kebebasan dalam kebijakan, serta hak memilih dan dipilih secara konsisten memperoleh skor maksimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kepastian regulasi, profesionalisme aparat, serta terpeliharanya iklim sosial yang kondusif dalam menjamin kebebasan sipil di masyarakat.

2. **Peningkatan perlindungan sosial bagi pekerja**

   Kenaikan signifikan pada indikator pemenuhan hak-hak pekerja mencerminkan semakin luasnya cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di Kota Blitar. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak dasar pekerja.

3. **Terbangunnya ruang komunikasi publik yang kondusif**

   Hubungan yang relatif terbuka antara pemerintah daerah, masyarakat, dan media mendorong terciptanya iklim dialogis yang mendukung kebebasan berekspresi dan penyampaian aspirasi publik secara konstruktif.

Meskipun capaian aspek kebebasan menunjukkan tren positif, terdapat beberapa faktor yang berpotensi menghambat optimalisasi capaian, antara lain:

1. **Ketergantungan indikator kebebasan pers pada indeks tingkat provinsi**

   Penilaian indikator kebebasan pers masih merujuk pada Indeks Kebebasan Pers (IKP) tingkat provinsi yang diterbitkan oleh Dewan Pers, sehingga dinamika dan praktik kebebasan pers di tingkat kota belum sepenuhnya tercermin dalam skor IDI.

2. **Cakupan perlindungan pekerja yang belum sepenuhnya merata**

   Meskipun mengalami peningkatan signifikan, persentase pekerja yang memperoleh perlindungan jaminan sosial masih berada di sekitar ambang batas ideal, sehingga perluasan cakupan perlindungan, terutama bagi pekerja sektor informal, masih perlu terus didorong.

3. **Potensi stagnasi pada indikator yang telah mencapai skor maksimal**

   Indikator dengan skor maksimal berpotensi mengalami penurunan apabila tidak diikuti dengan upaya pemeliharaan kondisi sosial yang kondusif serta konsistensi implementasi kebijakan yang menjamin kebebasan sipil.

Berdasarkan faktor-faktor yang mendukung maupun yang berpotensi menghambat capaian Aspek Kebebasan tersebut, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang perlu menjadi perhatian dalam upaya menjaga keberlanjutan kualitas demokrasi di Kota Blitar.

Pertama, stabilitas pada indikator-indikator yang telah mencapai skor maksimal menunjukkan bahwa **konsistensi implementasi kebijakan yang menjamin kebebasan sipil perlu terus dipertahankan**. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa regulasi, praktik tata kelola pemerintahan, serta penegakan hukum tetap memberikan ruang yang aman bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, menjalankan keyakinan, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Upaya ini penting untuk menjaga keberlanjutan capaian indikator kebebasan yang telah berada pada kondisi optimal.

Kedua, peningkatan signifikan pada **indikator pemenuhan hak-hak pekerja** menunjukkan bahwa perluasan perlindungan sosial ketenagakerjaan memiliki kontribusi penting dalam memperkuat kualitas kebebasan sipil. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan daerah perlu terus mendorong peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja sektor informal, sehingga perlindungan terhadap hak-hak dasar pekerja dapat semakin merata dan berkelanjutan.

Ketiga, keterbatasan pada **indikator kebebasan pers** yang masih bergantung pada Indeks Kebebasan Pers tingkat provinsi menunjukkan perlunya penguatan ekosistem komunikasi publik di tingkat daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu terus mendorong peningkatan keterbukaan informasi publik, memperkuat hubungan yang konstruktif dengan insan pers, serta menciptakan iklim komunikasi yang transparan dan akuntabel.

Keempat, potensi stagnasi pada indikator yang telah mencapai skor maksimal mengindikasikan pentingnya **upaya pemeliharaan kondisi sosial yang kondusif secara berkelanjutan**. Pemerintah daerah perlu menjaga koordinasi yang baik dengan aparat keamanan, masyarakat,

serta pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa stabilitas sosial tetap terjaga dan tidak terjadi dinamika yang berpotensi menurunkan kualitas kebebasan sipil.

Dengan demikian, arah kebijakan ke depan tidak hanya difokuskan pada peningkatan nilai indeks, tetapi juga pada **penguatan kualitas tata kelola demokrasi yang berkelanjutan**, melalui konsistensi perlindungan hak-hak sipil, perluasan perlindungan sosial bagi pekerja, serta pengembangan ruang komunikasi publik yang semakin terbuka dan partisipatif.

2. ASPEK KESETARAAN

Aspek Kesetaraan menggambarkan sejauh mana seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok minoritas dan rentan, memiliki akses yang adil terhadap sumber daya, kesempatan, serta kekuasaan dalam berbagai sektor kehidupan. Aspek ini diukur melalui **tujuh** indikator, yaitu: (8) kesetaraan gender; (9) partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan; (10) anti monopoli sumber daya ekonomi; (11) akses warga miskin terhadap perlindungan dan jaminan sosial; (12) kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah; (13) akses masyarakat terhadap informasi publik; dan (14) kesetaraan dalam pelayanan dasar.

Gambar 2.3.5

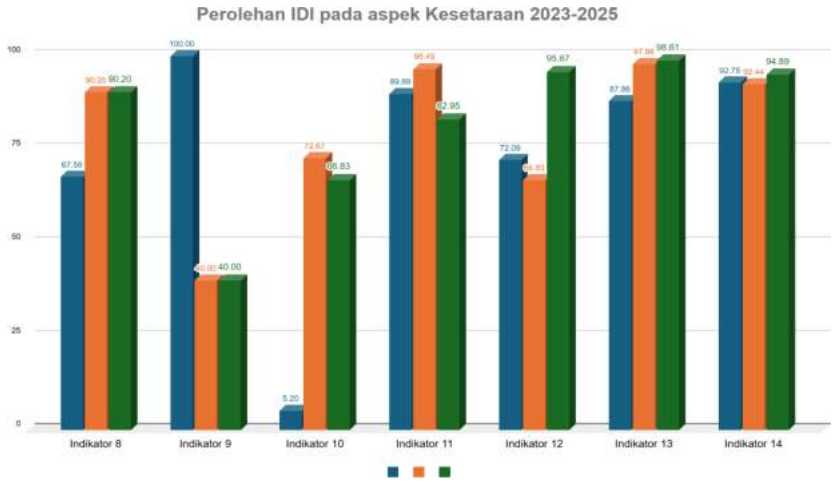

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar, 2025, *Laporan Akhir Indeks Demokrasi Indonesia Kota Blitar 2025*.

Berdasarkan hasil penghitungan **Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025**, Aspek Kesetaraan Kota Blitar memperoleh skor **81,02**, meningkat **0,61 poin** dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar **80,41**. Aspek ini diukur melalui sejumlah indikator yang mencerminkan pemerataan akses dan kesempatan bagi masyarakat, seperti kesetaraan gender, akses terhadap sumber daya ekonomi, perlindungan dan jaminan sosial, akses informasi publik, kesempatan kerja, serta pelayanan dasar.

Secara umum, capaian tersebut menunjukkan **tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir**, yaitu dari **71,70 pada tahun 2023**, meningkat menjadi **80,41 pada tahun 2024**, dan kembali meningkat menjadi **81,02 pada tahun 2025**. Perkembangan ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kota Blitar dalam memperkuat pemerataan akses terhadap hak ekonomi, sosial, dan partisipasi publik semakin menunjukkan hasil yang positif.

Dalam kerangka **Indeks Demokrasi Indonesia**, kesetaraan tidak hanya dimaknai sebagai kesamaan di hadapan hukum, tetapi juga mencerminkan sejauh mana negara melakukan **intervensi aktif untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal (*no one left behind*)**. Oleh karena itu, peningkatan capaian aspek ini menunjukkan adanya pergeseran dari sekadar pemenuhan hak formal menuju penguatan kapasitas masyarakat untuk mengakses berbagai sumber daya pembangunan secara lebih merata.

Secara rinci, **indikator kesetaraan gender (Indikator 8)** mengalami peningkatan skor menjadi **90,20**. Indikator ini diukur menggunakan **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)** yang mencerminkan sejauh mana perempuan berperan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Pada tahun 2025, penghitungan indikator ini masih menggunakan **data IDG tahun 2024 sebesar 68,4**, karena data terbaru belum dipublikasikan. Meskipun angka tersebut masih berada di bawah batas ideal IDI sebesar **75,83**, capaian skor indikator menunjukkan adanya peningkatan dalam pemberdayaan perempuan di ruang publik serta semakin kuatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.

Pada **indikator partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan (Indikator 9)**, skor mengalami penurunan dari **100,00 pada tahun 2024 menjadi 40,00 pada tahun 2025**. Penurunan ini berkaitan dengan jumlah kegiatan **hearing atau forum dengar pendapat** yang melibatkan masyarakat yang tercatat sebanyak **lima kegiatan**, jumlah yang sama dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, berdasarkan jumlah kursi DPRD Kota Blitar yang mencapai **25 kursi**, jumlah kegiatan ideal untuk mencerminkan partisipasi publik yang optimal diperkirakan sekitar **12–13 kegiatan**.

Selanjutnya, **indikator anti monopoli sumber daya ekonomi (Indikator 10)** menunjukkan capaian **66,83 pada tahun 2025**, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, secara keseluruhan indikator ini masih menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan kondisi tahun 2023. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya penguatan mekanisme persaingan usaha yang lebih sehat serta semakin terbukanya struktur pasar lokal. Dalam perspektif demokrasi, distribusi sumber daya ekonomi yang lebih merata merupakan

prasyarat penting bagi terciptanya kesetaraan politik, karena akses ekonomi yang lebih terbuka akan memperluas peluang partisipasi masyarakat dalam ruang publik.

Pada **indikator akses warga miskin terhadap perlindungan dan jaminan sosial (Indikator 11)**, skor tercatat **82,95 pada tahun 2025**, menurun dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar **96,49**. Penurunan ini tidak menunjukkan berkurangnya program bantuan sosial, melainkan dipengaruhi oleh mekanisme penghitungan indikator yang menggunakan **jumlah penduduk miskin sebagai pembagi**. Meskipun demikian, jumlah penduduk miskin di Kota Blitar justru mengalami penurunan dari **9,86 ribu jiwa (6,75%) pada tahun 2024 menjadi 9,69 ribu jiwa (6,60%) pada tahun 2025**. Berbagai program bantuan sosial seperti **PKH, BPNT/Sembako, Rastrada Non Tunai, serta bantuan YAPI** tetap dilaksanakan secara rutin untuk mendukung perlindungan bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Sementara itu, **indikator akses masyarakat terhadap informasi publik (Indikator 13)** mengalami peningkatan dari **87,86 menjadi 97,86**, yang menunjukkan semakin baiknya keterbukaan informasi serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Di sisi lain, beberapa indikator lain seperti **kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah (Indikator 12)** serta **kesetaraan dalam pelayanan dasar (Indikator 14)** menunjukkan penurunan tipis. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan kesempatan ekonomi dan kualitas pelayanan publik masih memerlukan perhatian lebih lanjut agar kesenjangan antar kelompok masyarakat dapat terus ditekan.

Secara keseluruhan, capaian **Aspek Kesetaraan Tahun 2025** menunjukkan bahwa inklusivitas sosial di Kota Blitar telah mencapai tahap yang cukup baik. Namun demikian, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan serta pemerataan kesempatan ekonomi tetap perlu menjadi fokus perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi di daerah.

Beberapa faktor yang mendorong peningkatan capaian Aspek Kesetaraan antara lain sebagai berikut:

1. **Penguatan pemberdayaan gender**

   Kenaikan signifikan pada indikator kesetaraan gender mencerminkan efektifnya pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran daerah, meningkatnya partisipasi perempuan dalam ruang publik, serta penguatan regulasi perlindungan perempuan dan anak.

2. **Perbaikan distribusi sumber daya ekonomi dan persaingan usaha**

   Indikator anti monopoli sumber daya ekonomi meningkat secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan adanya penguatan mekanisme persaingan usaha dan dukungan terhadap pelaku UMKM, sehingga struktur ekonomi lokal lebih terbuka dan adil.

3. **Perluasan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin**

   Meningkatnya akses terhadap jaminan sosial dan bantuan sosial menunjukkan keberlanjutan program perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan, yang memperkuat inklusivitas sosial dan pemerataan hak-hak dasar warga.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa faktor yang berpotensi menghambat optimalisasi capaian Aspek Kesetaraan, antara lain sebagai berikut:

1. **Partisipasi masyarakat melalui lembaga perwakilan yang masih terbatas**

   Penurunan skor indikator partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa mekanisme formal seperti hearing atau forum dengar pendapat masih belum optimal, sehingga aspirasi publik belum sepenuhnya terakomodasi.

2. **Ketimpangan kesempatan kerja antar wilayah**

   Penurunan skor indikator kesempatan kerja menunjukkan masih adanya konsentrasi peluang ekonomi di wilayah tertentu dan tantangan mobilitas tenaga kerja serta kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar.

3. **Potensi stagnasi pada indikator perlindungan sosial dan pelayanan dasar**

   Meskipun skor relatif tinggi, indikator ini rentan menurun apabila tidak diikuti penguatan integrasi data, evaluasi berkelanjutan, serta konsistensi pelaksanaan kebijakan yang menjamin pemerataan akses dan layanan publik.

Berdasarkan capaian indikator serta faktor pendorong dan penghambat pada Aspek Kesetaraan tersebut, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang perlu menjadi perhatian dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi di Kota Blitar.

Pertama, peningkatan capaian pada indikator kesetaraan gender menunjukkan bahwa **pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah perlu terus diperkuat**. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kebijakan pembangunan memberikan ruang yang setara bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik, baik melalui peningkatan kapasitas perempuan, penguatan kelembagaan yang responsif gender, maupun integrasi perspektif gender dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.

Kedua, perbaikan pada indikator distribusi sumber daya ekonomi menunjukkan pentingnya **penguatan iklim persaingan usaha yang sehat dan inklusif**. Pemerintah daerah perlu terus

mendorong kebijakan yang mendukung pengembangan pelaku usaha lokal, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memastikan akses yang lebih merata terhadap sumber daya ekonomi, perizinan usaha, dan pembiayaan. Upaya ini penting untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih terbuka dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat.

Ketiga, keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin menunjukkan bahwa **perluasan dan peningkatan kualitas sistem perlindungan sosial tetap menjadi prioritas kebijakan**. Pemerintah daerah perlu terus memperkuat integrasi dan pemutakhiran data penerima manfaat agar program bantuan sosial dapat tepat sasaran serta mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Keempat, penurunan pada indikator partisipasi masyarakat melalui lembaga perwakilan menunjukkan perlunya **penguatan mekanisme partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan**. Pemerintah daerah bersama lembaga legislatif perlu meningkatkan frekuensi dan kualitas forum dialog publik, seperti hearing, reses, maupun forum konsultasi publik, sehingga aspirasi masyarakat dapat tersalurkan secara lebih efektif dalam proses perumusan kebijakan.

Kelima, penurunan pada indikator kesempatan kerja dan pelayanan dasar menunjukkan bahwa **pemerataan akses terhadap kesempatan ekonomi dan layanan publik masih memerlukan perhatian lebih lanjut**. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan daerah perlu diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja yang lebih merata, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar agar seluruh masyarakat dapat memperoleh akses layanan publik yang setara.

Dengan demikian, arah kebijakan ke depan tidak hanya difokuskan pada peningkatan nilai indeks semata, tetapi juga pada **penguatan prinsip inklusivitas dalam pembangunan daerah**, sehingga setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya ekonomi, layanan publik, serta ruang partisipasi dalam kehidupan demokratis.

3. ASPEK KAPASITAS LEMBAGA DEMOKRASI

Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi memberikan gambaran sejauh mana lembaga-lembaga demokrasi di Kota Blitar berfungsi dan bekerja secara efektif dalam menjamin prinsip-prinsip demokrasi dalam tata kelola politik, ekonomi, dan sosial. Aspek ini diukur melalui **delapan indikator**, yaitu: (15) kinerja lembaga legislatif, (16) kinerja lembaga yudikatif, (17) netralitas penyelenggara pemilihan umum, (18) keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah, (19) jaminan pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat, (20) transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi

APBN/D oleh pemerintah, (21) kinerja birokrasi dalam pelayanan publik, dan (22) pendidikan politik pada kader partai politik.

Gambar 2.3.6

Perolehan IDI pada aspek kapasitas lembaga Demokrasi 2023-2025

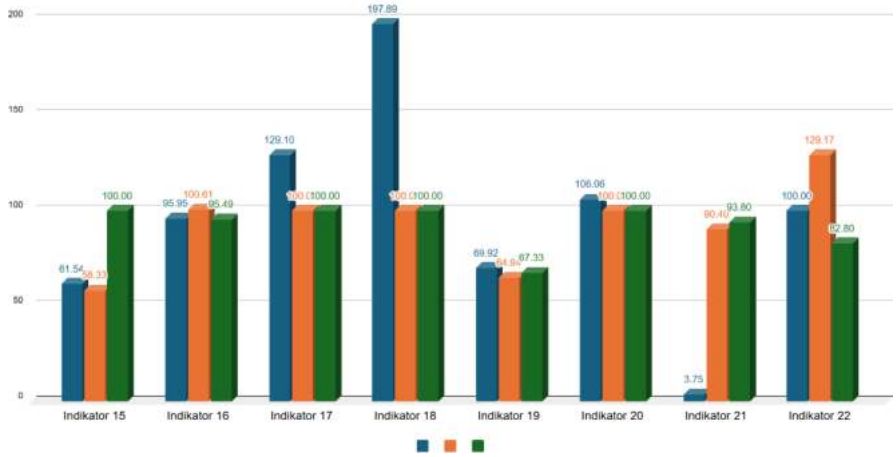

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar, 2025, *Laporan Akhir Indeks Demokrasi Indonesia Kota Blitar 2025*.

Berdasarkan hasil penghitungan **Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025**, capaian **Aspek Lembaga Demokrasi Kota Blitar** memperoleh skor **92,45**, sedikit menurun dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar **92,81**, namun masih berada pada kategori **sangat baik**. Aspek ini mencerminkan kapasitas dan kinerja lembaga-lembaga demokrasi dalam menjalankan fungsi representasi, pengawasan, serta penegakan aturan secara efektif dan akuntabel.

Secara umum, capaian aspek ini menunjukkan kondisi yang relatif stabil dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun **2023** skor Aspek Lembaga Demokrasi tercatat sebesar **90,20**, kemudian meningkat menjadi **92,81 pada tahun 2024**, dan berada pada **92,45 pada tahun 2025**. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelembagaan demokrasi di Kota Blitar secara umum telah berfungsi dengan baik dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

Dalam perspektif demokrasi, kapasitas lembaga merupakan faktor fundamental dalam menjaga stabilitas sistem politik. Demokrasi tidak hanya ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat, tetapi juga oleh sejauh mana institusi politik mampu menjalankan fungsi representasi, pengawasan, dan pelayanan publik secara efektif. Dengan demikian, capaian indikator pada aspek ini mencerminkan upaya konsolidasi kelembagaan demokrasi di tingkat daerah.

Secara rinci, **indikator kinerja lembaga legislatif** menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun **2023** skor indikator ini berada pada angka **61,54**, kemudian sedikit menurun menjadi **58,33 pada tahun 2024**, dan mengalami peningkatan tajam hingga mencapai

100,00 pada tahun 2025. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh terpenuhinya target **Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)**, di mana seluruh **10 Perda yang ditargetkan berhasil disahkan**. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya efektivitas fungsi legislasi serta kemampuan lembaga perwakilan dalam merespons kebutuhan regulasi masyarakat.

Sementara itu, **indikator kinerja lembaga peradilan** menunjukkan stabilitas yang relatif baik. Skor indikator ini berada pada **95,95 pada tahun 2023**, meningkat menjadi **100,61 pada tahun 2024**, dan sedikit terkoreksi menjadi **95,49 pada tahun 2025**. Meskipun mengalami penurunan tipis, capaian tersebut masih menunjukkan tingkat penyelesaian perkara yang tinggi. Berdasarkan data **Pengadilan Negeri Blitar**, dari total **1.441 perkara yang masuk di Kota Blitar**, sebanyak **1.376 perkara berhasil diselesaikan**, yang menunjukkan kemampuan lembaga peradilan dalam menjalankan fungsi penegakan hukum secara efektif.

Selanjutnya, **indikator netralitas penyelenggara pemilu (Indikator 17)** menunjukkan capaian yang sangat baik dengan skor **100,00 pada tahun 2024 dan 2025**. Capaian ini mencerminkan terjaganya netralitas penyelenggara pemilu serta efektifnya pengawasan oleh lembaga pengawas pemilu dalam menjaga integritas proses demokrasi.

Hal serupa juga terlihat pada **indikator kebijakan pejabat pemerintah yang dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (Indikator 18)** yang juga memperoleh skor **100,00**. Capaian ini menunjukkan bahwa selama periode pengukuran tidak terdapat kebijakan pemerintah daerah yang dinyatakan melanggar hukum oleh PTUN, sehingga mencerminkan semakin kuatnya kepatuhan terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Di sisi lain, **indikator jaminan terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat (Indikator 19)** masih menunjukkan capaian yang relatif lebih rendah dibandingkan indikator lainnya. Nilai **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** Kota Blitar tercatat sebesar **69,92 pada tahun 2023**, menurun menjadi **64,94 pada tahun 2024**, dan sedikit meningkat menjadi **67,33 pada tahun 2025**. Nilai ini menunjukkan bahwa pengintegrasian aspek lingkungan dalam kebijakan pembangunan masih memerlukan penguatan lebih lanjut.

Sementara itu, **indikator keterbukaan informasi anggaran (Indikator 20)** menunjukkan capaian yang sangat baik dengan skor **100,00** sejak tahun 2024. Pemerintah Kota Blitar secara konsisten mempublikasikan dokumen pengelolaan APBD melalui laman transparansi anggaran daerah, sehingga memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

Selain itu, **indikator pelayanan publik (Indikator 21)** menunjukkan peningkatan dari **90,40 pada tahun 2024 menjadi 93,80 pada tahun 2025**, yang mencerminkan semakin meningkatnya kualitas pelayanan birokrasi kepada masyarakat.

Pada **indikator pendidikan politik kader partai (Indikator 22)**, skor mengalami dinamika yang cukup besar. Setelah mencapai **129,17 pada tahun 2024**, skor indikator ini menurun menjadi **82,80 pada tahun 2025**. Meskipun demikian, nilai tersebut masih menunjukkan bahwa kegiatan kaderisasi partai politik tetap berlangsung secara aktif, meskipun intensitasnya tidak setinggi pada tahun politik sebelumnya.

Secara keseluruhan, capaian **Aspek Lembaga Demokrasi Kota Blitar** menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan demokrasi telah berada pada kondisi yang cukup kuat. Peningkatan kinerja legislasi, stabilitas sistem peradilan, serta penguatan transparansi dan pelayanan publik menjadi indikator penting dalam mendukung konsolidasi demokrasi di tingkat daerah. Namun demikian, penguatan kebijakan lingkungan serta keberlanjutan pendidikan politik masih perlu menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi secara berkelanjutan.

Beberapa faktor yang mendorong peningkatan capaian Aspek Lembaga Demokrasi antara lain sebagai berikut:

1. **Peningkatan efektivitas kinerja lembaga legislatif**

   Terpenuhinya target pembentukan Peraturan Daerah sesuai Propemperda menunjukkan meningkatnya efektivitas fungsi legislasi serta responsivitas lembaga perwakilan terhadap kebutuhan regulasi masyarakat.

2. **Kuatnya sistem pengawasan dan penegakan hukum**

   Stabilitas kinerja lembaga peradilan serta tidak adanya kebijakan pemerintah daerah yang dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menunjukkan semakin kuatnya kepatuhan terhadap prinsip *rule of law* dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

3. **Penguatan transparansi dan kualitas pelayanan publik**

   Konsistensi keterbukaan informasi anggaran serta meningkatnya kualitas pelayanan publik menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa faktor yang berpotensi menghambat optimalisasi capaian Aspek Lembaga Demokrasi, antara lain sebagai berikut:

1. **Kinerja lingkungan yang masih relatif rendah**

   Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang masih berada pada kategori sedang menunjukkan perlunya penguatan kebijakan pembangunan yang lebih memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.

2. **Fluktuasi aktivitas pendidikan politik partai**

   Penurunan intensitas kegiatan kaderisasi partai politik pada tahun non-pemilu menunjukkan bahwa pendidikan politik masih dipengaruhi oleh momentum politik tertentu.

3. **Ketimpangan kapasitas kelembagaan dalam menjalankan fungsi demokrasi**

   Perbedaan kapasitas antar lembaga dalam menjalankan fungsi representasi, pengawasan, dan pelayanan publik masih berpotensi memengaruhi efektivitas penyelenggaraan demokrasi di tingkat daerah.

Berdasarkan capaian indikator serta faktor pendorong dan penghambat pada Aspek Lembaga Demokrasi tersebut, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang perlu menjadi perhatian dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas kelembagaan demokrasi di Kota Blitar.

Pertama, peningkatan signifikan pada kinerja lembaga legislatif menunjukkan bahwa **penguatan fungsi legislasi perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya**. Pemerintah daerah bersama DPRD perlu memastikan bahwa penyusunan Peraturan Daerah tidak hanya memenuhi target Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), tetapi juga memperhatikan kualitas substansi regulasi serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukannya. Hal ini penting agar produk regulasi daerah mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif dan responsif.

Kedua, stabilitas kinerja lembaga peradilan serta tidak adanya kebijakan pemerintah daerah yang dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara menunjukkan bahwa **kepatuhan terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik perlu terus dipertahankan**. Pemerintah daerah perlu terus memperkuat koordinasi dengan lembaga penegak hukum serta meningkatkan kualitas proses perumusan kebijakan agar seluruh kebijakan publik yang dihasilkan tetap sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, konsistensi keterbukaan informasi anggaran daerah menunjukkan bahwa **transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah telah berjalan dengan baik**. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan data dan informasi publik agar masyarakat dapat mengakses informasi pembangunan secara lebih mudah, cepat, dan transparan.

Keempat, peningkatan kualitas pelayanan publik menunjukkan bahwa **reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik perlu terus diperkuat**. Pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kapasitas aparatur, memperluas inovasi pelayanan publik, serta memperkuat sistem evaluasi kinerja pelayanan guna memastikan bahwa seluruh masyarakat memperoleh layanan publik yang berkualitas dan responsif.

Kelima, capaian indikator kualitas lingkungan hidup yang masih berada pada kategori sedang menunjukkan bahwa **integrasi aspek keberlanjutan lingkungan dalam kebijakan pembangunan daerah perlu semakin diperkuat**. Pemerintah daerah perlu mendorong kebijakan pembangunan yang lebih berorientasi pada prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui peningkatan pengelolaan kualitas air, udara, serta perlindungan tutupan lahan di wilayah perkotaan.

Keenam, dinamika kegiatan pendidikan politik partai menunjukkan bahwa **penguatan pendidikan politik bagi masyarakat dan kader partai politik perlu terus didorong secara berkelanjutan**, tidak hanya pada momentum tahun politik. Upaya ini penting untuk meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat serta memperkuat proses kaderisasi kepemimpinan politik yang demokratis di tingkat daerah.

Dengan demikian, arah kebijakan ke depan tidak hanya difokuskan pada peningkatan nilai indeks semata, tetapi juga pada **penguatan kapasitas kelembagaan demokrasi yang berkelanjutan**, melalui peningkatan kualitas legislasi, penguatan prinsip rule of law, perluasan transparansi pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengintegrasian aspek keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan daerah.

Gambar 2.3.7
Tren IDI Kota Blitar 2023-2025

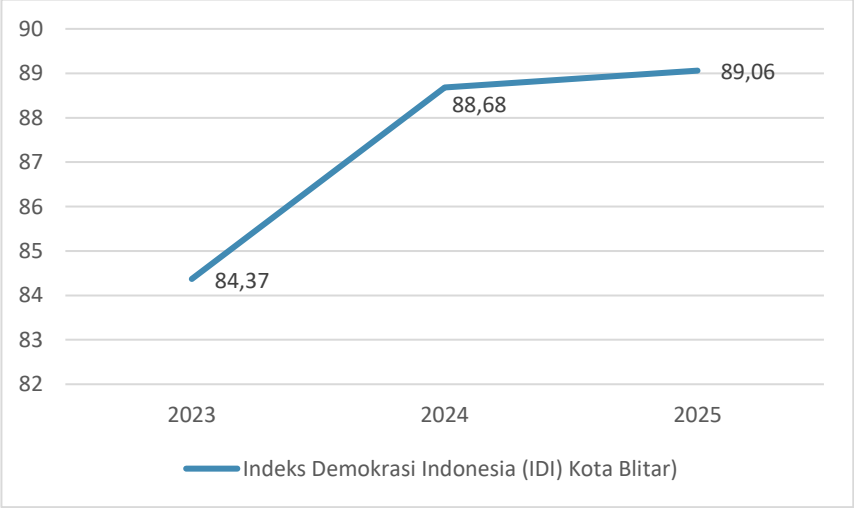

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar (2025), diolah.

Berdasarkan data tren **Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kota Blitar**, terlihat adanya peningkatan capaian secara konsisten dari tahun 2023 hingga tahun 2025. Pada tahun 2023, nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kota Blitar tercatat sebesar **80,41**, kemudian meningkat pada tahun 2024 menjadi **84,37**, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2025 menjadi **89,06**.

Secara keseluruhan, selama periode 2023-2025 terjadi kenaikan sebesar **8,65 poin**, dengan peningkatan bertahap sebesar **3,96 poin** dari tahun 2023 ke 2024 dan **4,69 poin** dari tahun 2024 ke 2025. Kenaikan yang lebih besar pada tahun 2025 menunjukkan adanya akselerasi capaian kinerja demokrasi di Kota Blitar dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tersebut merefleksikan progres positif dalam penguatan iklim dan kualitas demokrasi daerah. Tren kenaikan yang berkelanjutan ini mengindikasikan bahwa kebijakan dan program pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi masyarakat, menjamin hak-hak sipil, serta memperkuat kapasitas lembaga demokrasi mulai memberikan dampak yang nyata, terukur, dan berkesinambungan terhadap pembangunan demokrasi di Kota Blitar.

Gambar 2.3.8
Tren IDI Nasional 2021-2025

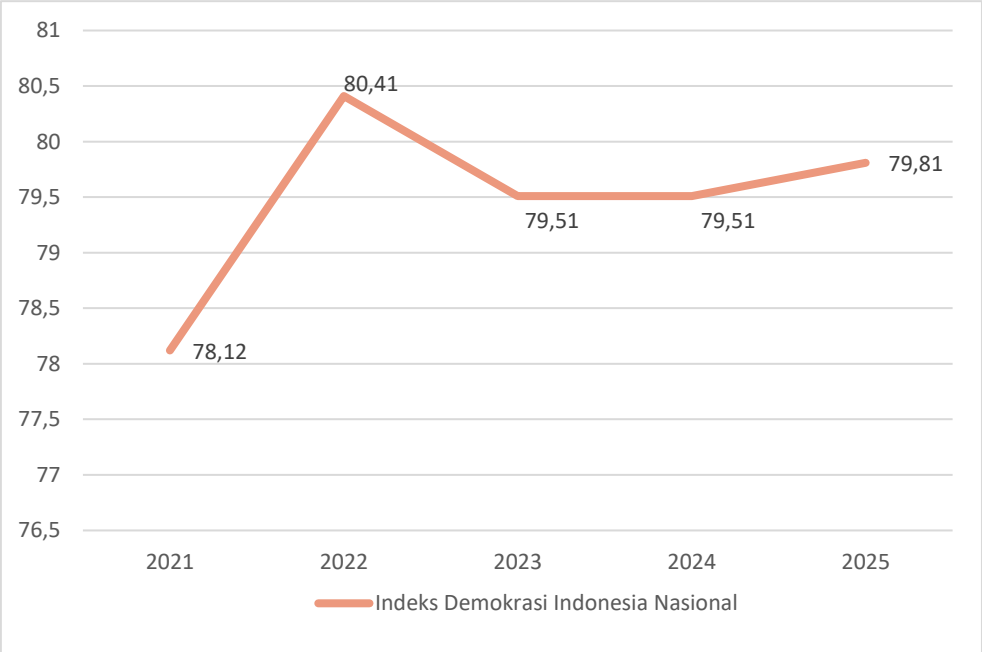

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025), diolah

Gambar 2.3.9
Tren IDI Jawa Timur 2021-2025

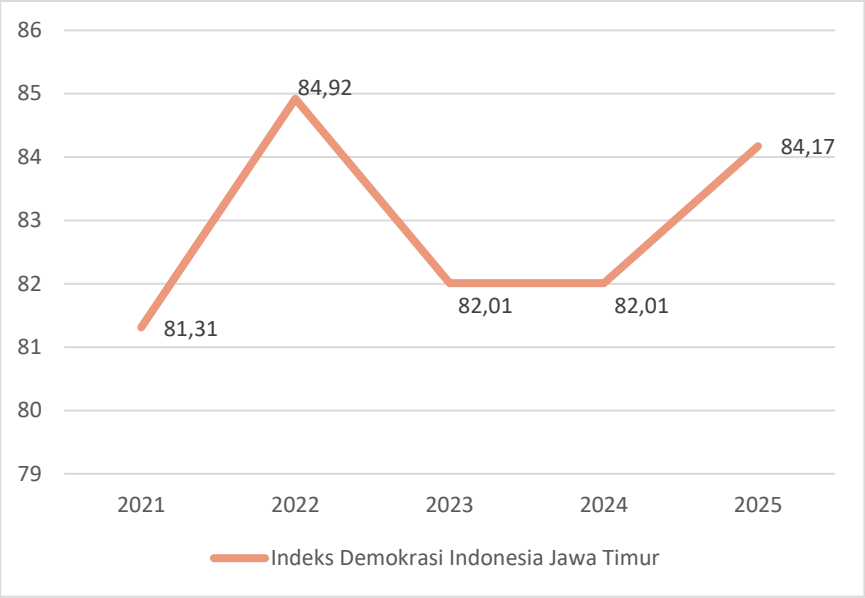

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025), diolah.

Berdasarkan data tren Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) periode tahun 2021-2025, perlu ditegaskan bahwa sejak tahun 2021 penghitungan IDI menggunakan **metode baru** yang mencakup tiga aspek, yaitu **kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi**, dengan total **22** (dua puluh dua) indikator. Perubahan metodologi ini menyebabkan sebagian indikator berbeda dengan metode sebelumnya, sehingga **angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mulai tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebelum tahun tersebut**. Oleh karena itu, analisis kinerja difokuskan pada perkembangan capaian mulai tahun 2022.

Dalam kerangka metodologi tersebut, capaian **Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) nasional** menunjukkan dinamika yang relatif stabil. Pada tahun 2022, **Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)** nasional tercatat sebesar **80,41**, kemudian pada tahun 2023 dan 2024 mengalami penuruan dan stagnasi pada angka **79,51** yang berada pada **kategori sedang**, sebelum kembali meningkat pada tahun **2025** menjadi **79,81**. Kondisi ini mencerminkan bahwa kualitas demokrasi nasional masih menghadapi tantangan, meskipun terdapat indikasi pemulihan pada tahun 2025.

Sementara itu, capaian **Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Timur** pada periode yang sama secara konsisten berada **di atas rata-rata nasional**. Pada tahun 2022,

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Timur tercatat sebesar **84,92**, kemudian mengalami penurunan dan stagnasi pada angka **82,01** pada tahun **2023-2024**, namun tetap berada pada **kategori tinggi**, sebelum kembali meningkat pada tahun **2025** menjadi **84,17**.

Sejalan dengan capaian tersebut, **Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kota Blitar Tahun 2025** menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan skor **88,68**, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024. Capaian ini menempatkan Kota Blitar **di atas rata-rata nasional dan provinsi**, serta mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga kebebasan sipil, mendorong kesetaraan, dan memperkuat kapasitas lembaga demokrasi di tingkat lokal.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) digunakan sebagai salah satu indikator kinerja utama Pemerintah Kota Blitar untuk mengukur efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, partisipatif, dan akuntabel sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mencerminkan hasil pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan lintas perangkat daerah dalam mendukung kualitas demokrasi di daerah.

Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mencakup beberapa dimensi utama, yaitu dimensi ekonomi, politik, dan tata kelola pemerintahan. Dimensi ekonomi meliputi pemenuhan hak-hak pekerja, pencegahan monopoli sumber daya ekonomi, akses masyarakat miskin terhadap perlindungan sosial, serta pemerataan kesempatan kerja. Dimensi politik mencakup kebebasan pers, kesetaraan gender, partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik, keterbukaan informasi, serta kinerja lembaga legislatif dan yudikatif. Sementara itu, dimensi tata kelola pemerintahan meliputi pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat, transparansi anggaran, pendidikan politik, serta kinerja birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan hasil pengukuran tahun 2025, capaian indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kota Blitar menunjukkan bahwa penyelenggaraan demokrasi di daerah telah berjalan dengan baik dan sejalan dengan sasaran pembangunan daerah. Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kota Blitar dalam menjaga kebebasan sipil, mendorong kesetaraan, serta memperkuat kapasitas lembaga demokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Sejalan dengan hasil evaluasi tersebut, Pemerintah Kota Blitar menetapkan arah kebijakan pembangunan demokrasi daerah yang difokuskan pada upaya mempertahankan capaian indikator yang telah berada pada **kategori sangat baik**, memperbaiki indikator yang mengalami penurunan, serta meningkatkan kualitas pengelolaan data dan pengukuran indikator sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Kebijakan dan strategi tersebut diarahkan

untuk memastikan bahwa peningkatan nilai indeks tidak hanya tercermin pada capaian angka semata, tetapi juga diikuti dengan penguatan praktik demokrasi yang partisipatif, inklusif, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kebijakan dan Strategi Pemerintah Kota Blitar dalam Mempertahankan Ketercapaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan ketercapaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kota Blitar, pemerintah daerah melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. **Memperkuat partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan**, melalui peningkatan transparansi penyerapan aspirasi masyarakat oleh lembaga perwakilan, pengembangan platform partisipasi digital (*e-participation*), serta peningkatan kualitas forum dialog publik dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) agar lebih partisipatif, inklusif, dan substantif.
2. **Mendorong pemerataan kesempatan kerja dan peningkatan kapasitas tenaga kerja**, melalui pengembangan program pelatihan vokasi yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja, perluasan kemitraan dengan dunia usaha dan industri, serta penguatan kebijakan investasi yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja di daerah.
3. **Memperkuat sistem perlindungan sosial dan jaminan sosial ketenagakerjaan**, melalui integrasi dan pemutakhiran data sosial masyarakat secara berkelanjutan, peningkatan ketepatan sasaran program bantuan sosial, serta perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja sektor informal.
4. **Meningkatkan kapasitas kelembagaan demokrasi dan kualitas tata kelola pemerintahan**, melalui penguatan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan oleh lembaga perwakilan, peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintahan, serta penguatan literasi politik masyarakat guna mendorong partisipasi publik yang lebih berkualitas.
5. **Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik**, melalui optimalisasi implementasi keterbukaan informasi publik, pengembangan sistem pelayanan publik berbasis digital, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Melalui pelaksanaan kebijakan dan langkah strategis tersebut, diharapkan kualitas demokrasi di Kota Blitar dapat terus terjaga dan berkembang secara berkelanjutan, sehingga mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang semakin demokratis, transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Selain strategi tersebut, upaya peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) juga dilakukan melalui pemeliharaan dan penguatan kerukunan umat beragama yang tercermin dalam Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Keterkaitan antara Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) tidak dapat dipisahkan, mengingat aspek kebebasan

dan kesetaraan dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) memiliki irisan langsung dengan nilai toleransi dan kesetaraan dalam Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Kebebasan dalam konteks demokrasi mencakup kebebasan berpendapat, berekspresi, serta kebebasan memeluk dan menjalankan agama dengan tetap menjunjung tinggi nilai toleransi. Demokrasi juga menjamin hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih tanpa diskriminasi, termasuk dalam kehidupan keberagaman umat beragama. Dengan demikian, keberagaman agama bukan merupakan hambatan dalam pembangunan demokrasi, melainkan menjadi kekuatan apabila dikelola berdasarkan prinsip toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Oleh karena itu, pencapaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) yang optimal secara simultan akan mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi yang harmonis, damai, dan berkelanjutan di Kota Blitar.

KINERJA SASARAN
Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama

Indikator Kinerja:
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
85,540	85,61*	100,08%	84,25**	101,61%

***) kondisi akhir RPJMD (2026) menyesuaikan Perda Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 dan telah tercapai pada tahun 2024*

Gambar 2.3.10
Capaian IKUB Kota Blitar Tahun 2025

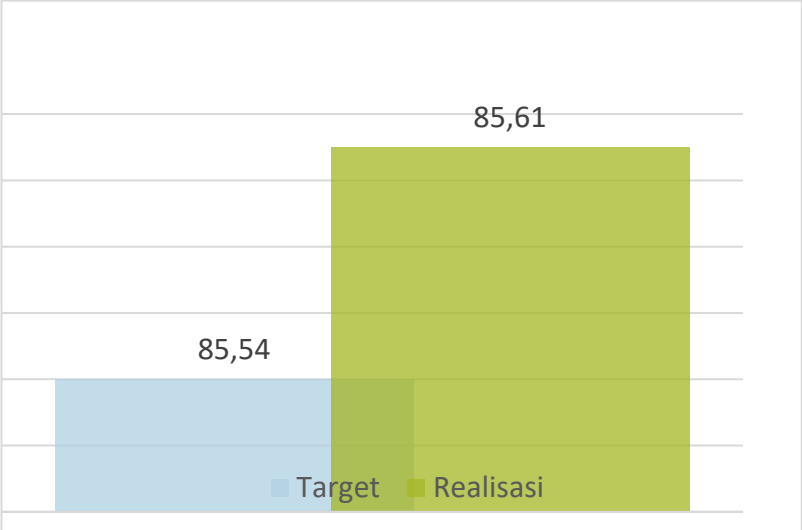

Diagram dan tabel di atas menunjukkan perbandingan antara target dan realisasi **Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kota Blitar Tahun 2025**. Pada tahun 2025, target Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ditetapkan sebesar **85,54**, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar **85,61***, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai **100,08%**. Hal ini menunjukkan bahwa target kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Tahun 2025 berhasil dilampaui.

Jika dibandingkan dengan **target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026** sebesar **84,25****, realisasi Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Tahun 2025 juga telah melampaui target tersebut dengan capaian sebesar **101,61%**. Berdasarkan kategori penilaian, capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kota Blitar berada pada **kategori sangat tinggi**, yang menggambarkan terjaganya kehidupan sosial masyarakat yang rukun, toleran, dan harmonis.

Capaian ini tidak hanya menggambarkan keutuhan sosial yang kuat, tetapi juga mencerminkan hasil sinergi antara Pemerintah Kota Blitar, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat dalam membangun lingkungan yang inklusif dan penuh perdamaian.

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Tahun 2025 diukur melalui beberapa dimensi. Terdapat enam dimensi yang dipilih untuk dapat melihat bagaimana kerukunan beragana Kota Blitar tahun 2025, yaitu 1) Toleransi; 2) Kesetaraan; 3) Kerjasama; 4) Peran Pemerintah; 5) Faktor Penguat; dan 6) Faktor Penghambat. Dimensi Peran Pemerintah, Faktor Penguat, dan Faktor Penghambat menjadi dimensi tambahan untuk mengukur Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) agar lebih komprehensif memberikan penilaian terhadap kerukunan yang ada di Kota Blitar.

Tabel 2.3.8
Skor Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) per Kecamatan

Kecamatan	Sukorejo	Kepanjenkidul	Sananwetan
Toleransi	84,24	86,32	87,39
Kesetaraan	83,95	85,37	86,41
Kerjasama	84,71	84,70	86,72
Faktor Pemerintah	84,87	84,79	88,36
Faktor Penguat	85,37	85,86	87,18
Faktor Penghambat	85,18	85,84	83,78
Skor IKUB	**84,72**	**85,48**	**86,64**

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar, *Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Blitar Tahun 2025.*

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Tahun 2025, capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di seluruh kecamatan di Kota Blitar berada pada kategori **sangat tinggi**. Kecamatan Sananwetan mencatatkan nilai tertinggi sebesar **86,64**, disusul

Kecamatan Kepanjenkidul sebesar **85,48**, dan Kecamatan Sukorejo sebesar **84,72**. Dengan demikian, rata-rata Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Blitar Tahun 2025 tercatat sebesar: (86,64 + 85,48 + 84,72) / 3 = **85,61.**

Perbedaan capaian antar kecamatan tersebut mencerminkan adanya variasi dinamika sosial, intensitas interaksi antarumat beragama, serta tingkat peran dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam menjaga dan memperkuat kerukunan di masing-masing wilayah. Meskipun demikian, secara umum seluruh wilayah menunjukkan kondisi sosial yang harmonis dan kondusif bagi kehidupan antarumat beragama.

Analisis lebih lanjut berdasarkan masing-masing dimensi Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor pembentuk kerukunan umat beragama di Kota Blitar, yang diuraikan sebagai berikut:

1. **Dimensi Toleransi**

   Dimensi toleransi menggambarkan sikap saling menghormati dan penerimaan antarumat beragama dalam kehidupan sosial masyarakat. Pada dimensi ini, Kecamatan Sananwetan mencatat nilai tertinggi sebesar **87,39**, disusul Kecamatan Kepanjenkidul sebesar **86,32**, dan Kecamatan Sukorejo sebesar **84,24**.

   Capaian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kota Blitar secara umum telah memiliki tingkat toleransi yang baik. Hal ini tercermin dari minimnya konflik bernuansa keagamaan serta tingginya sikap saling menghargai dan menghormati antarumat beragama dalam kehidupan bermasyarakat.

   Adanya perbedaan capaian antar kecamatan mengindikasikan perlunya penguatan upaya dialog dan interaksi lintas agama yang lebih merata, khususnya di wilayah dengan capaian yang relatif lebih rendah, guna menjaga konsistensi dan keberlanjutan kerukunan umat beragama di seluruh wilayah Kota Blitar.

2. **Dimensi Kesetaraan**

   Dimensi kesetaraan mencerminkan perlakuan yang adil dan setara bagi seluruh umat beragama dalam akses terhadap ruang publik, pelayanan pemerintah, dan partisipasi sosial. Nilai tertinggi pada dimensi ini juga dicapai oleh Kecamatan Sananwetan sebesar **86,41**, diikuti Kecamatan Kepanjenkidul sebesar **85,37**, dan Kecamatan Sukorejo sebesar **83,95**.

   Capaian ini menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan umat beragama di Kota Blitar telah terinternalisasi dengan baik dalam praktik sosial dan kebijakan publik. Namun demikian, masih diperlukan penguatan kebijakan afirmatif dan pengawasan pelaksanaannya agar seluruh kelompok agama merasakan perlakuan yang benar-benar setara di seluruh wilayah kecamatan.

3. **Dimensi Kerjasama**

   Dimensi kerjasama menilai tingkat partisipasi dan kolaborasi antarumat beragama dalam kegiatan sosial, kemasyarakatan, dan pembangunan. Pada dimensi ini, Kecamatan Sananwetan

kembali menunjukkan capaian tertinggi dengan nilai **86,72**, sementara Kecamatan Sukorejo dan Kepanjenkidul mencatat nilai yang relatif seimbang masing-masing sebesar **84,71** dan **84,70**.

Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan lintas agama, seperti kerja bakti, kegiatan sosial, dan partisipasi dalam peringatan hari besar nasional, telah berjalan dengan baik. Meski demikian, upaya memperluas ruang kolaborasi antarumat beragama masih perlu ditingkatkan, terutama melalui kegiatan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan.

4. Dimensi Peran Pemerintah

Dimensi peran pemerintah merupakan dimensi tambahan yang digunakan untuk menilai sejauh mana keterlibatan dan kontribusi pemerintah daerah dalam menjaga dan memfasilitasi kerukunan umat beragama. Pada dimensi ini, Kecamatan Sananwetan mencatat nilai tertinggi sebesar **88,36**, disusul Kecamatan Sukorejo sebesar **84,87**, dan Kecamatan Kepanjenkidul sebesar **84,79**.

Capaian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Blitar telah menjalankan peran yang cukup optimal dalam mendukung kerukunan umat beragama melalui fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)**,** pembinaan tokoh agama, serta penyelesaian potensi konflik secara preventif. Perbedaan nilai antar kecamatan mengindikasikan perlunya pemerataan intensitas pendampingan dan fasilitasi pemerintah di seluruh wilayah.

Pemerintah Kota Blitar memainkan peran strategis dalam menjaga dan memperkuat kerukunan umat beragama melalui berbagai kebijakan dan program, antara lain memfasilitasi dialog antarumat beragama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**,** menyelenggarakan program edukasi toleransi dan moderasi beragama di lingkungan sekolah maupun masyarakat, memberikan dukungan pendanaan bagi kegiatan sosial-keagamaan lintas umat beragama, serta bekerja sama dengan berbagai organisasi keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama (NU)**,** Muhammadiyah**,** Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)**,** Parisada Hindu Dharma Indonesia**,** Majelis Buddhayana Indonesia (MBI), dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin)**.** Selain itu, Pemerintah Kota Blitar juga menetapkan dan melaksanakan regulasi yang menjamin kebebasan beragama, melakukan penanganan terhadap potensi dan tindakan intoleransi secara tegas dan terukur, serta memberikan perlindungan bagi kelompok minoritas guna menjaga stabilitas dan keharmonisan kehidupan sosial di daerah.

5. Dimensi Faktor Pendukung

Dimensi faktor pendukung mengukur keberadaan dan efektivitas unsur-unsur yang memperkuat kerukunan umat beragama, seperti peran tokoh agama, budaya dan kearifan lokal, serta jejaring sosial masyarakat. Pada dimensi ini, Kecamatan Sananwetan kembali mencatat nilai tertinggi sebesar **87,18**, diikuti Kecamatan Kepanjenkidul sebesar **85,86**, dan Kecamatan Sukorejo sebesar **85,37**.

Capaian yang relatif tinggi di seluruh kecamatan menunjukkan bahwa modal sosial dan budaya lokal di Kota Blitar telah berfungsi secara efektif sebagai penopang utama keharmonisan kehidupan beragama. Ke depan, penguatan peran tokoh agama, tokoh masyarakat, serta komunitas interaksi antarumat beragama perlu terus didorong dan difasilitasi sebagai pilar strategis dalam menjaga keberlanjutan dan kualitas kerukunan umat beragama di Kota Blitar.

Faktor Pendukung Kerukunan Umat Beragama di Kota Blitar antara lain meliputi:

a. Pendidikan yang Mendorong Moderisasi Beragama dan Kewargaan Aktif

Pendidikan berperan penting dalam membentuk kapasitas kognitif dan afektif individu untuk menerima perbedaan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi berkontribusi pada meningkatnya literasi keberagaman, perluasan jaringan sosial lintas agama, serta penguatan sikap inklusif dan deliberatif.

Di Kota Blitar, keberadaan sekolah umum, perguruan tinggi, serta organisasi kepemudaan antarumat beragama menciptakan ruang interaksi yang intensif dan konstruktif, sehingga memperkuat *bridging social capital*. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin kuat pula modal sosial dalam menjembatani perbedaan keyakinan, sehingga potensi konflik berbasis identitas dapat dikelola secara positif melalui dialog dan musyawarah.

b. Kesejahteraan Ekonomi yang Merata

Pendapatan yang relatif stabil berperan dalam mengurangi kecemburuan sosial antar kelompok agama, meningkatkan rasa aman, serta memperkuat kepercayaan sosial (*generalized trust*). Struktur ekonomi Kota Blitar yang didominasi oleh sektor jasa, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**,** serta sektor pendidikan cenderung menghasilkan tingkat ketimpangan sosial yang lebih terkendali. Masyarakat dengan tingkat pendapatan yang cukup dan stabil cenderung lebih terbuka terhadap kerja sama lintas agama serta lebih aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, yang pada akhirnya memperkuat solidaritas sosial antarwarga tanpa memandang perbedaan keyakinan.

c. Pekerjaan yang Mendorong Interaksi Lintas Agama dan Stabilitas Sosial

Pekerjaan menciptakan ruang interaksi sosial sehari-hari. Struktur pekerjaan yang heterogen di Kota Blitar, seperti sektor pendidikan, jasa, pemerintahan, dan perdagangan, mendorong terjadinya interaksi lintas agama yang intens dan berkelanjutan. Stabilitas kerja juga meningkatkan keterikatan sosial (*social embeddedness*) serta kepatuhan terhadap norma sosial bersama. Pekerja sektor formal seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), guru, dan tenaga kesehatan cenderung memiliki komitmen lebih kuat dalam menjaga harmoni sosial karena terikat oleh norma institusional dan etika publik.

6. Dimensi Faktor Penghambat

Dimensi faktor penghambat mengidentifikasi potensi risiko dan tantangan yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama, seperti isu intoleransi, provokasi, atau kesalahpahaman antar kelompok. Pada dimensi ini, Kecamatan Kepanjenkidul mencatat nilai tertinggi sebesar **85,84**, disusul Kecamatan Sukorejo sebesar **85,18**, sementara Kecamatan Sananwetan mencatat nilai **83,78**.

Nilai yang lebih rendah pada dimensi ini tidak serta-merta menunjukkan kondisi yang buruk, namun mengindikasikan adanya tantangan yang perlu terus diantisipasi, khususnya di wilayah dengan dinamika sosial yang lebih tinggi. Oleh karena itu, upaya deteksi dini, literasi toleransi, serta penguatan komunikasi lintas agama perlu terus ditingkatkan.

Faktor Penghambat Kerukunan Umat Beragama di Kota Blitar Tahun 2025 antara lain meliputi:

a. Keterbatasan Pendidikan dan Literasi Keagamaan

Pendidikan yang rendah dapat mempersempit jaringan sosial dan memperkuat *bonding* eksklusif, sehingga individu lebih rentan terhadap tafsir keagamaan yang sempit serta paparan hoaks dan ujaran kebencian berbasis Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Segmentasi antara pendidikan umum, pendidikan keagamaan, dan pendidikan elit berpotensi menciptakan *social closure* dan polarisasi identitas berbasis kelas dan agama.

b. Ketimpangan Ekonomi

Meskipun relatif terkendali, ketimpangan ekonomi masih berpotensi melemahkan kepercayaan sosial antar kelompok masyarakat. Persepsi terhadap ketidakadilan struktural dapat memicu prasangka, meningkatkan kerentanan terhadap politisasi identitas keagamaan untuk kepentingan politik maupun ekonomi, serta memperkuat polarisasi sosial dalam masyarakat.

c. Segregasi Pekerjaan

Segregasi pekerjaan secara sosial dan keagamaan berpotensi membatasi intensitas interaksi antarumat beragama. Kelompok pekerja informal dengan pendapatan yang tidak tetap umumnya memiliki keterbatasan waktu dan kapasitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan antarumat beragama. Kondisi ini pada akhirnya dapat menurunkan tingkat partisipasi kewargaan (*civic engagement*) serta melemahkan modal sosial dalam masyarakat.

Gambar 2.3.11
Tren IKUB Kota Blitar 2021-2025

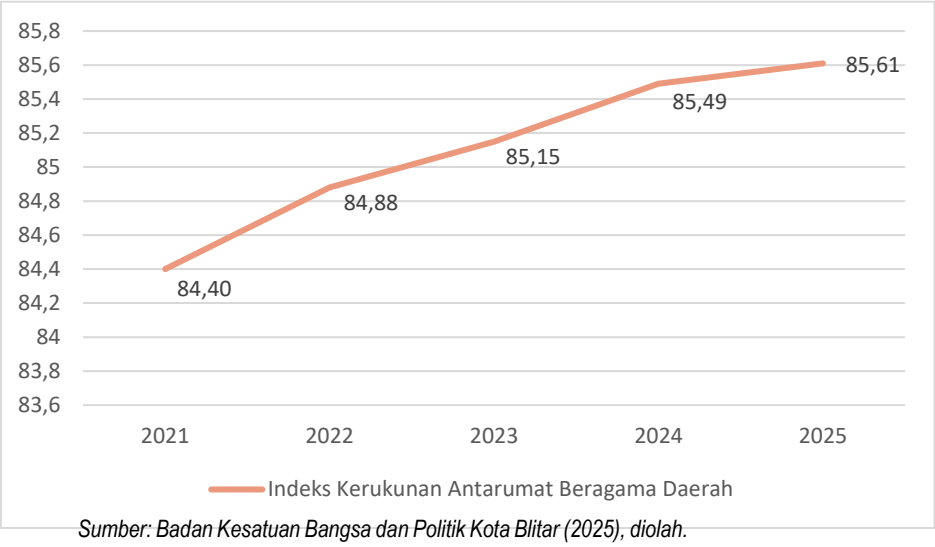

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar (2025), diolah.

Grafik di atas menunjukkan tren peningkatan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Kota Blitar selama periode tahun 2021 hingga 2025 yang berlangsung secara konsisten. Pada tahun 2021, nilai IKUB Kota Blitar tercatat sebesar **84,40** dan meningkat menjadi **84,88** pada tahun 2022.

Peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian 85,15, kemudian kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi **85,49**, dan mencapai **85,61** pada tahun 2025.

Secara kumulatif, terjadi kenaikan sebesar **1,21 poin** selama periode 2021-2025. Kenaikan yang relatif lebih tinggi pada periode 2023-2024, yaitu sebesar **0,34 poin**, menunjukkan adanya penguatan yang cukup signifikan dalam kualitas kerukunan umat beragama di Kota Blitar. Sementara itu, peningkatan sebesar **0,12 poin** pada periode 2024-2025 mengindikasikan bahwa tingkat kerukunan umat beragama tetap terjaga secara stabil pada kategori sangat tinggi.

Tren peningkatan yang berkelanjutan ini mencerminkan semakin harmonisnya hubungan antarumat beragama di Kota Blitar, yang ditandai dengan penguatan sikap saling menghormati, toleransi, serta kerja sama antar kelompok agama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa berbagai faktor pendukung kerukunan telah berjalan secara sinergis dan efektif, sehingga mampu menciptakan lingkungan sosial yang inklusif, adil, dan kondusif bagi kehidupan bermasyarakat di Kota Blitar.

Gambar 2.3.12
Tren IKUB Nasional 2021-2025

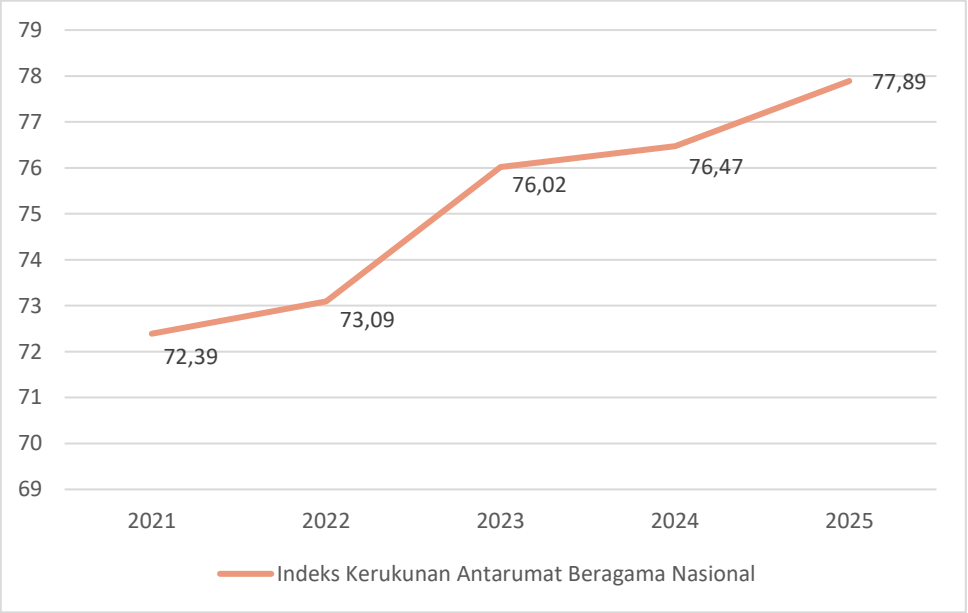

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan dan Diklat Kementerian Agama (2025), diolah.

Berdasarkan grafik tren Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Nasional periode tahun 2021-2025, terlihat adanya tren peningkatan yang positif dan konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2021, nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Nasional tercatat sebesar **72,39** dan meningkat menjadi **73,09** pada tahun 2022. Peningkatan yang relatif signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan capaian **76,02**, kemudian kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi **76,47**, dan mencapai **77,89** pada tahun 2025.

Kenaikan sebesar **0,45 poin** pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam sikap toleransi dan kualitas kerukunan umat beragama di Indonesia. Selanjutnya, peningkatan yang lebih tinggi pada tahun 2025, yaitu sebesar **1,42 poin** dibandingkan tahun sebelumnya, semakin memperkuat indikasi terjadinya penguatan harmoni sosial di tengah keberagaman agama masyarakat Indonesia. Adapun rincian skor Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Nasional tahun 2025 yaitu dimensi toleransi (74,83), kesetaraan (77,42) dan Kerjasama antar umat beragama (65,49).

Peningkatan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Nasional tersebut mencerminkan bahwa interaksi sosial masyarakat Indonesia secara umum tetap berlangsung dalam suasana yang toleran, rukun, dan harmonis. Berbagai upaya penguatan moderasi beragama melalui program, sosialisasi, serta keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan telah berkontribusi secara signifikan dalam menjaga dan memperkuat stabilitas kerukunan umat beragama secara nasional.

Apabila dibandingkan dengan capaian daerah, khususnya Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kota Blitar, keduanya sama-sama menunjukkan tren peningkatan yang positif. Namun demikian, capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kota Blitar berada secara konsisten di atas rata-rata nasional. Pada tahun 2025, Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kota Blitar tercatat sebesar **85,61**, sementara Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Nasional berada pada angka **77,89**. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kerukunan umat beragama di Kota Blitar **tergolong sangat tinggi dan lebih unggul dibandingkan capaian nasional**.

Secara umum, Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Nasional berfungsi sebagai instrumen untuk memetakan kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia sekaligus menjadi dasar dalam perumusan kebijakan keagamaan yang lebih responsif dan kontekstual. Data Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) menggambarkan dinamika kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia yang beragam dan dinamis. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan di sejumlah wilayah, seperti potensi intoleransi, ekstremisme, dan gejala ketidakrukunan, yang perlu terus diantisipasi secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, keberadaan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) diharapkan dapat menjadi landasan strategis dalam merumuskan kebijakan serta langkah-langkah solutif terhadap berbagai persoalan keagamaan di masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan antara lain memperkuat sosialisasi moderasi beragama secara berkelanjutan, meningkatkan peran serta pemangku kepentingan dan tokoh agama, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam membangun dialog dan kerja sama antarumat beragama. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kerukunan umat beragama di Indonesia dapat terus meningkat dan terjaga secara berkesinambungan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Blitar perlu menerapkan strategi dan kebijakan yang terarah dan berkelanjutan guna menjaga serta memperkuat Kerukunan Umat Beragama di Kota Blitar, yang dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Penguatan Pendidikan Moderasi Beragama sebagai Prioritas Utama**

   Pemerintah Kota Blitar perlu menempatkan pendidikan moderasi beragama dan kewargaan aktif sebagai program prioritas lintas sektor. Implementasi konkret dapat dilakukan melalui:

   a. Program *Sekolah Harmoni* di kecamatan dengan capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) relatif lebih rendah;
   b. Pelatihan guru, penyuluh agama, dan tokoh masyarakat sebagai *agent of moderation*;
   c. Pengembangan kurikulum nonformal berbasis praktik, seperti kunjungan rumah ibadah dan kerja sosial lintas iman.

2. **Kebijakan Ekonomi Inklusif untuk Menjaga Kepercayaan Sosial**

   Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak tersegregasi berdasarkan identitas keagamaan. Upaya konkret meliputi:

   a. Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), lintas komunitas keagamaan;
   b. Bantuan ekonomi dan pelatihan kewirausahaan berbasis kolaborasi antarumat beragama;
   c. Pengembangan kegiatan sosial-ekonomi bersama, seperti koperasi, bazar, dan program padat karya.

3. **Mendorong Dunia Kerja sebagai Ruang Interaksi Lintas Agama**

   Dunia kerja perlu didorong sebagai ruang strategis pembentukan kohesi sosial melalui:

   a. Program kerja sosial lintas agama (gotong royong kota, bakti sosial bersama);
   b. Pelibatan lintas agama dalam proyek pemerintah dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) lokal;
   c. Dukungan terhadap sektor jasa dan pendidikan yang memperluas interaksi sosial.

4. **Penguatan Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai *Linking Social Capital***

   Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu diperkuat tidak hanya sebagai lembaga reaktif, tetapi juga proaktif dan preventif dengan pendekatan berbasis komunitas. Implementasi yang dapat dilakukan antara lain:

   a. Penguatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) melalui keterlibatan langsung hingga tingkat kelurahan dan Rukun Warga (RW) dalam pembinaan, komunikasi, dan mediasi kerukunan umat beragama;
   b. Optimalisasi fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai lembaga preventif dan proaktif dalam menjaga kerukunan umat beragama melalui pendampingan dan fasilitasi kegiatan masyarakat di tingkat kelurahan dan Rukun Warga (RW);

c. Penyelenggaraan forum dialog tematik yang melibatkan kelompok pemuda, perempuan, dan komunitas minoritas guna memperluas partisipasi serta memperkuat inklusivitas dalam kehidupan beragama;
d. Pengembangan sistem pemetaan potensi konflik sosial keagamaan berbasis data sosial sebagai instrumen deteksi dini dan dasar perumusan kebijakan penanganan konflik yang lebih responsif dan tepat sasaran.

5. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) perlu dimanfaatkan sebagai instrumen evaluasi berkelanjutan dalam perumusan kebijakan daerah. Pemerintah Kota Blitar perlu memastikan ketersediaan data yang akurat dan mutakhir sebagai dasar pengambilan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial keagamaan.

No	Kinerja Utama/ Sasaran RPJMD/ Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian 2025	Program	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8	9=8/7*100	10=5/9
1	**Terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat yang Demokratis**								
	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	**88,68**	**89,06**	**100,43**	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.279.184.300,00	1.178.370.602,00		
					Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	661.920.108,00	659.545.708,00		
					Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	28.448.240,00	26.529.200,00		
					Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	177.003.100,00	148.600.200,00		
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.536.811.200,00	1.494.160.982,00		

No	Kinerja Utama/ Sasaran RPJMD/ Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian 2025	Program	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8	9=8/7*100	10=5/9
					Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.037.098.314,96	3.820.728.303,00		
					Program Pengembangan Kebudayaan	533.467.101,00	523.549.872,00		
					Program Pembinaan Sejarah	610.124.000,00	601.225.000,00		
					Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	30.000.000,00	28.480.000,00		
					TOTAL	**8.894.056.363,96**	**8.481.189.867,00**	**95,36**	**1,05**

Dengan capaian kinerja sebesar 100,43% dan tingkat penyerapan anggaran sebesar 95,36%, diperoleh tingkat efisiensi sebesar 1,05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa target kinerja berhasil dicapai secara optimal dengan pemanfaatan anggaran yang efisien. Meskipun demikian, peningkatan kualitas pelaksanaan program tetap perlu dilakukan agar capaian tata kehidupan masyarakat yang demokratis tidak hanya tercermin pada peningkatan angka indeks, tetapi juga semakin menguat dalam praktik kehidupan sosial masyarakat sehari-hari.

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa capaian tersebut dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Fokus kebijakan ke depan tidak hanya pada peningkatan skor, tetapi juga pada stabilitas dan konsistensi kinerja setiap indikator, khususnya dalam memperluas perlindungan sosial bagi pekerja serta memperkuat ekosistem pers yang independen, profesional, dan kondusif di tingkat daerah. Dengan demikian, capaian tahun 2025 dapat menjadi momentum untuk memperkuat kualitas kebebasan sipil secara berkelanjutan, melalui konsistensi kebijakan, penguatan perlindungan sosial ketenagakerjaan, serta pengembangan tata kelola komunikasi publik yang semakin terbuka dan akuntabel.

Dengan demikian, efisiensi anggaran yang telah tercapai perlu terus diiringi dengan peningkatan efektivitas program, sehingga dampaknya terhadap tata kehidupan masyarakat yang demokratis di Kota Blitar semakin nyata dan berkesinambungan.

KINERJA UTAMA 2

Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak

Indikator Kinerja:
Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021-2026
97,49	98,03*	100,55%	98	100,03%

**data BPS Tahun 2024*

Gambar 2.3.13
Capaian IPG Kota Blitar 2025

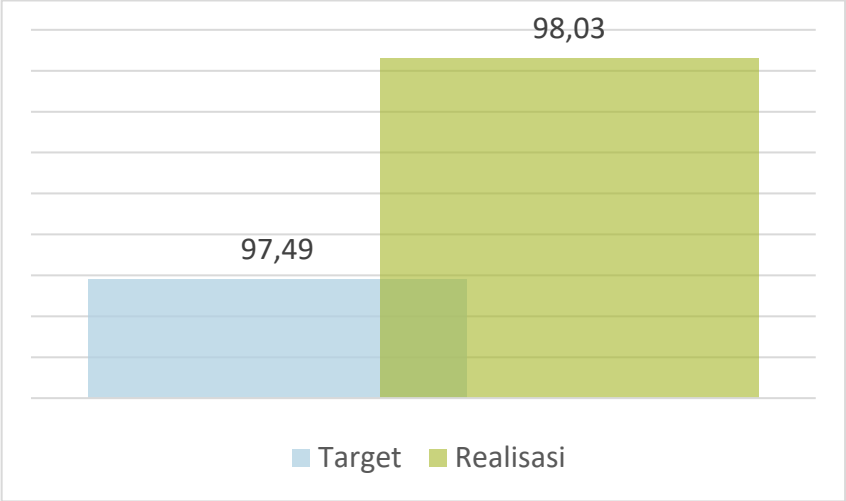

Sumber: BPS Tahun 2025

Salah satu faktor pendukung utama dalam meningkatkan daya saing dan keberhasilan pembangunan daerah adalah penguatan kesetaraan gender melalui pemenuhan hak, tanggung jawab, kapabilitas, serta peluang yang setara bagi perempuan dan laki-laki. **Indeks Pembangunan Gender (IPG)** merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesetaraan capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG berfungsi untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dalam berbagai aspek pembangunan sekaligus menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan program yang responsif gender.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Blitar pada tahun 2025 ditargetkan sebesar **97,49**. Realisasi capaian pada tahun 2025 tercatat sebesar **98,03*,** sehingga tingkat capaian kinerja mencapai **100,55%** dari target tahunan. Bahkan, capaian tersebut telah melampaui Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2026 yang ditetapkan sebesar **98**, dengan tingkat capaian terhadap target RPJMD mencapai **100,03%.**

Realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2025 masih menggunakan data tahun 2024 yang bersumber dari **Badan Pusat Statistik (BPS),** mengingat data Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2025 masih dalam proses pengumpulan dan direncanakan akan dipublikasikan pada **periode Maret-April 2026**. Dengan capaian ini, Kota Blitar menunjukkan konsistensi dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan responsif gender, serta memperkuat komitmen terhadap pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Gambar 2.3.14
Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Blitar, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2022-2024

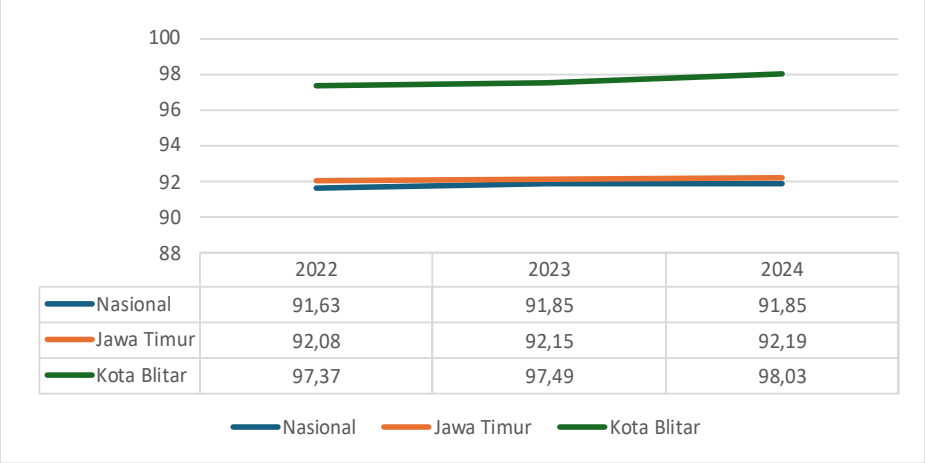

	2022	2023	2024
Nasional	91,63	91,85	91,85
Jawa Timur	92,08	92,15	92,19
Kota Blitar	97,37	97,49	98,03

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025), diolah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pembangunan gender di Kota Blitar menunjukkan **tren peningkatan dan stabilitas yang baik**. Pada **tahun 2022**, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Blitar tercatat sebesar **97,37**. Nilai ini meningkat pada tahun **2023** menjadi **97,49** atau naik sebesar **0,12 poin**. Selanjutnya, pada **tahun 2024** Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Blitar kembali meningkat menjadi **98,03**, atau naik sebesar 0,54 poin dibandingkan tahun 2023. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan di Kota Blitar semakin kecil. Hal ini tercermin dari nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang secara konsisten berada jauh di atas angka 90, bahkan mendekati angka 100, yang menandakan tingkat kesetaraan gender yang sangat tinggi.

Berdasarkan grafik dan data, pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Blitar selama **periode 2022-2024** secara konsisten berada di atas capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Pada tahun **2022**, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Blitar mencapai **97,37**, lebih tinggi dibandingkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Timur sebesar **92,08** dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Nasional sebesar **91,63**. Pada tahun 2023, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Blitar meningkat menjadi **97,49**, sementara Indeks

Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Timur tercatat sebesar **92,15** dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Nasional sebesar **91,85**.

Selanjutnya, pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Blitar kembali meningkat menjadi **98,03**, yang tetap lebih tinggi dibandingkan IPG Provinsi Jawa Timur sebesar **92,19** dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Nasional sebesar **91,85**. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa **kinerja pembangunan gender di Kota Blitar lebih unggul dibandingkan capaian rata-rata provinsi maupun nasional**. Hal ini sekaligus mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Blitar dalam **mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender melalui pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah**.

Pencapaian Pembangunan Gender di Eks Karisidenan Kediri

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya pemerataan pembangunan antardaerah. Melalui pelaksanaan otonomi daerah, pemerataan tersebut diharapkan dapat dicapai secara berkelanjutan. Namun demikian, upaya pemerataan pembangunan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain perbedaan kondisi geografis, ketersediaan sarana dan prasarana, tingkat perekonomian wilayah, serta kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang tidak merata antarwilayah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan pembangunan, termasuk dalam aspek pembangunan gender.

Pada tahun **2024**, pencapaian pembangunan gender di wilayah **Eks Karesidenan Kediri** menunjukkan variasi antarkabupaten/kota. Indeks Pembangunan Gender (IPG) tertinggi dicapai oleh **Kota Blitar** dengan nilai **98,03**, sedangkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) terendah dicapai oleh **Kabupaten Trenggalek** sebesar **92,69**. Secara umum, kesetaraan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan di wilayah Eks Karesidenan Kediri sudah tergolong baik, yang tercermin dari nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) seluruh kabupaten/kota yang telah berada **di atas angka 90** pada periode **2023-2024**. Hal ini menunjukkan bahwa **pembangunan gender di kawasan tersebut relatif merata dan berada pada kategori tinggi**, meskipun tetap diperlukan upaya berkelanjutan untuk mempersempit kesenjangan yang masih ada antarwilayah.

Secara umum, kesetaraan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan di wilayah Eks Karesidenan Kediri sudah tergolong baik, yang tercermin dari nilai IPG seluruh kabupaten/kota yang telah berada di atas angka 90 pada periode 2023-2024. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan gender di kawasan tersebut relatif merata dan berada pada kategori tinggi, meskipun tetap diperlukan upaya berkelanjutan untuk mempersempit kesenjangan yang masih ada antarwilayah.

Tabel 2.3.9
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota wilayah Eks Karesidenan Kediri Tahun 2023-2024

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender	
	2023	2024
Trenggalek	92.57	92.69
Tulungagung	95.45	95.56
Blitar	93.40	93.65
Kediri	93.25	93.41
Nganjuk	94.08	94.18
Kota Kediri	94.58	94.78
Kota Blitar	98.09	98.03

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025), diolah.

Berdasarkan tabel **Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota di wilayah Eks Karesidenan Kediri Tahun 2023–2024**, sebagian besar kabupaten/kota menunjukkan **peningkatan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023**. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya perbaikan capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan di sebagian besar wilayah.

Kabupaten Trenggalek meningkat dari 92,57 pada tahun 2023 menjadi 92,69 pada tahun 2024. Kabupaten Tulungagung meningkat dari 95,45 menjadi 95,56, Kabupaten Blitar dari 93,40 menjadi 93,65, Kabupaten Kediri dari 93,25 menjadi 93,41, serta Kabupaten Nganjuk dari 94,08 menjadi 94,18. Kota Kediri juga mengalami peningkatan dari 94,58 pada tahun 2023 menjadi 94,78 pada tahun 2024.

Sementara itu, **Kota Blitar tetap mencatatkan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) tertinggi di wilayah Eks Karesidenan Kediri**, meskipun mengalami penurunan tipis dari **98,09 pada tahun 2023 menjadi 98,03 pada tahun 2024**. Penurunan sebesar 0,06 poin tersebut tidak mengubah posisi Kota Blitar sebagai daerah dengan tingkat kesetaraan gender tertinggi di kawasan tersebut. Sebaliknya, Kabupaten Trenggalek masih berada pada posisi terendah meskipun menunjukkan tren peningkatan.

Jika dibandingkan dengan capaian yang lebih luas, **Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Blitar juga berada jauh di atas rata-rata provinsi dan nasional**. Pada tahun 2023, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Blitar sebesar 98,09 melampaui Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Timur sebesar 92,15 dan IPG Nasional sebesar 91,85. Pada tahun 2024, capaian **Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Blitar sebesar 98,03** juga tetap lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional berdasarkan data terakhir yang tersedia.

Secara keseluruhan, perkembangan **Indeks Pembangunan Gender (IPG) di wilayah Eks Karesidenan Kediri menunjukkan tren yang positif**, meskipun masih terdapat perbedaan capaian antarwilayah. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender agar pemerataan pembangunan gender dapat terwujud secara lebih optimal.

Dalam menganalisa **Indeks Pembangunan Gender (IPG),** tak lepas dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Meskipun **Secara konseptual, Indeks Pembangunan Manusia (IPM),** Indeks Pembangunan Gender (IPG)**, dan** Indeks Ketimpangan Gender (IKG) **bukan merupakan indikator yang saling menjadi komponen langsung, namun ketiganya saling melengkapi dalam menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang berperspektif gender**. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kota Blitar terus mengalami perbaikan, meskipun masih diperlukan penguatan kebijakan untuk menekan kembali tingkat ketimpangan gender.

Tabel 2.3.10
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota se Eks Karesidenan Kediri
Tahun 2021-2024

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Jenis Kelamin (menggunakan UHH hasil SP2020 LF)							
		Laki-laki				Perempuan			
		2024	2023	2022	2021	2024	2023	2022	2021
1	Trenggalek	77,08	75,90	74,79	74,79	71,84	71,33	70,64	69,90
2	Tulungagung	78,09	76,80	76,00	76,00	74,96	74,44	73,94	73,00
3	Blitar	77,18	75,98	75,52	75,52	72,63	71,90	71,31	70,49
4	Kediri	78,86	78,03	77,14	77,14	74,14	73,62	73,07	72,21
5	Nganjuk	79,07	78,00	77,09	77,09	75,05	74,48	73,69	72,69
6	Kota Kediri	84,73	83,18	82,42	82,42	81,33	80,41	79,48	78,49
7	Kota Blitar	82,72	82,13	81,42	80,45	80,64	80,07	79,28	78,33

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025), diolah.

Berdasarkan data **Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut jenis kelamin di wilayah Eks Karesidenan Kediri Tahun 2021-2024**, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan perempuan di seluruh kabupaten/kota menunjukkan tren peningkatan. Kondisi ini mencerminkan adanya perbaikan kualitas pembangunan manusia yang relatif merata antara laki-laki dan perempuan di wilayah tersebut.

Di **Kota Blitar**, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki pada tahun 2024 tercatat sebesar **82,72**, meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar **82,13**, tahun 2022 sebesar **81,42**, dan tahun 2021 sebesar **80,45**. Sementara itu, **IPM perempuan** pada tahun 2024 mencapai **80,64**, juga meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar **80,07**, tahun 2022 sebesar **79,28**, dan tahun 2021 sebesar **78,33**. Jika dibandingkan dengan wilayah Eks Karesidenan Kediri, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Blitar tergolong tinggi, berada di bawah Kota Kediri namun lebih

tinggi dibandingkan sebagian besar kabupaten lainnya. Selisih Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara laki-laki dan perempuan di Kota Blitar pada tahun 2024 sekitar **2,08 poin**, yang menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan relatif terkendali.

Namun demikian, **Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Blitar pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,198**, meningkat **0,010 poin** dibandingkan tahun 2023 sebesar **0,188**. Meskipun secara jangka panjang ketimpangan gender di Kota Blitar selama periode 2020-2024 menunjukkan tren menurun, kenaikan pada tahun 2024 menunjukkan bahwa upaya penguatan kebijakan pembangunan yang responsif gender tetap diperlukan, khususnya dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dan memperluas akses perempuan dalam pasar tenaga kerja.

Gambar 2.3.15
Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG), 2020-2024

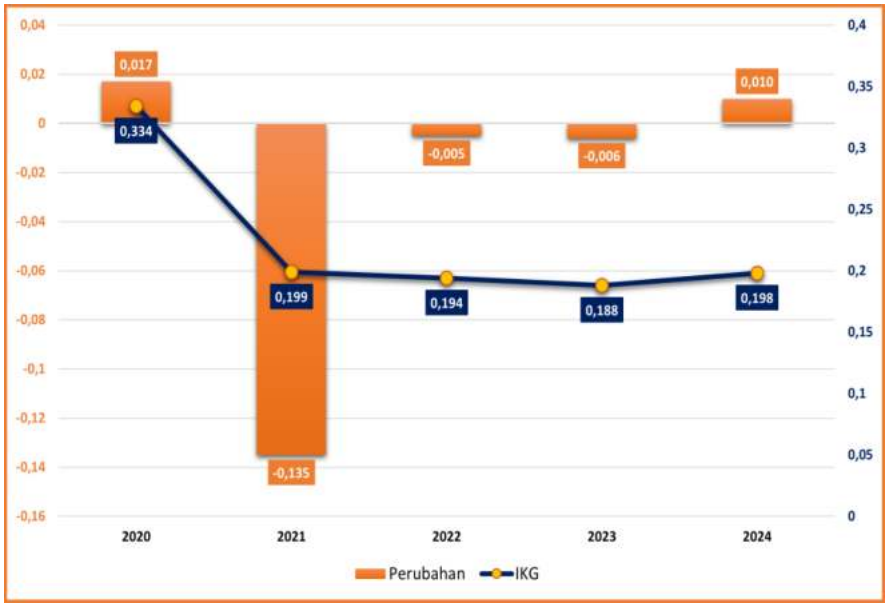

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025, *Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Blitar Tahun 2024*.

Pemerintah Kota Blitar mempunyai komitmen yang kuat untuk mendorong pemberdayaan perempuan di Kota Blitar. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 menjadi landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender di wilayah Kota Blitar.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri atas tiga dimensi utama, yaitu dimensi kesehatan reproduksi, dimensi pemberdayaan, dan dimensi pasar tenaga kerja. Dimensi kesehatan reproduksi diukur melalui indikator proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) serta proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup pertama pada usia kurang dari 20 tahun (MHPK20). Dimensi pemberdayaan diukur melalui persentase penduduk usia 25 tahun ke atas yang berpendidikan minimal SMA/sederajat serta persentase keterwakilan

perempuan di lembaga legislatif. Sementara itu, dimensi pasar tenaga kerja diukur menggunakan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Nilai Indeks Ketimpangan Gender (IKG) berada pada rentang antara 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati angka 0, tingkat ketimpangan gender di suatu wilayah semakin rendah atau semakin setara. Sebaliknya, semakin mendekati angka 1, tingkat ketimpangan gender semakin tinggi. Oleh karena itu, kenaikan nilai Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Blitar pada tahun 2024 menjadi perhatian dalam rangka penguatan kebijakan dan program pembangunan yang lebih responsif gender.

Meskipun terjadi kenaikan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) pada tahun 2024, capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Blitar tetap berada pada **kategori sangat tinggi** dan menunjukkan kesetaraan capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan yang relatif baik.

Berdasarkan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Blitar periode 2022-2024 yang berada pada kategori sangat tinggi dan melampaui capaian provinsi maupun nasional, pembangunan gender di Kota Blitar secara umum menunjukkan kinerja yang baik. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan perempuan juga menandakan adanya perbaikan kualitas pembangunan manusia. Namun demikian, kenaikan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) pada tahun 2024 mengindikasikan bahwa masih terdapat kesenjangan pada dimensi tertentu, terutama dalam aspek pemberdayaan dan partisipasi ekonomi perempuan.

Oleh karena itu, pada periode pembangunan selanjutnya diperlukan langkah strategis yang lebih terarah, yaitu:

1. **Penguatan pemberdayaan ekonomi perempuan**

   Mendorong peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan melalui pelatihan vokasi berbasis kebutuhan pasar, pengembangan kewirausahaan perempuan, akses pembiayaan UMKM perempuan, serta fasilitasi kemitraan usaha yang inklusif. Langkah ini penting untuk menekan kesenjangan pada dimensi partisipasi ekonomi yang tercermin dalam kenaikan Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

2. **Peningkatan representasi dan kepemimpinan perempuan**

   Memperluas ruang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, baik di sektor pemerintahan, politik, maupun dunia usaha, melalui penguatan kapasitas kepemimpinan, mentoring, dan afirmasi kebijakan yang mendukung keterwakilan perempuan.

3. **Penguatan pengarusutamaan gender (PUG) dalam perencanaan dan penganggaran**

   Mengintegrasikan perspektif gender secara lebih sistematis dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran responsif gender (ARG), serta evaluasi program agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara setara oleh laki-laki dan perempuan.

4. **Perlindungan perempuan dan kelompok rentan**

   Meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, memperkuat layanan terpadu, serta memastikan akses yang setara terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

5. **Penguatan sistem data dan monitoring kesenjangan gender**

   Mengembangkan sistem data terpilah menurut jenis kelamin (sex-disaggregated data) yang lebih akurat dan mutakhir sebagai dasar analisis kebijakan, sehingga intervensi pembangunan dapat lebih tepat sasaran dalam menurunkan ketimpangan gender.

6. **Kolaborasi lintas sektor dan kemitraan strategis**

   Mendorong sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi perempuan, dan masyarakat sipil dalam mempercepat pencapaian kesetaraan gender secara berkelanjutan.

No	Kinerja Utama/ Sasaran RPJMD/ Indikator	Target 2025	Realisasi 2024	% Capaian 2024	Program	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8	9=8/7*100	10=5/9
2	**Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak (IPG)**	**97,49**	**98,03***	**100,55%**					
					Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	**786.109.200**	**761.209.879**		
					Program Perlindungan Perempuan	**154.872.409**	**126.383.956**		
					Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	**105.204.055**	**94.028.286**		
					Program Perlindungan Khusus Anak	**215.210.923**	**192.088.252**		
					TOTAL	**1.261.396.587**	**1.173.710.373**	**93,05%**	**1,07**

Dengan langkah strategis tersebut, pembangunan gender Kota Blitar pada periode selanjutnya diharapkan tidak hanya mempertahankan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang sangat tinggi, tetapi juga mampu menurunkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) secara signifikan sehingga kualitas kesetaraan dan keadilan gender semakin kuat dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk evaluasi terhadap efisiensi penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja, dilakukan perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi keuangan sebagaimana tersaji pada tabel di atas.

Berdasarkan tabel tersebut, target **Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2025** sebesar **97,49** telah terealisasi sebesar **98,03**, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai **100,55%**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sasaran **Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak** telah terlaksana dengan sangat baik dan berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, **Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Blitar pada tahun 2024 tercatat sebesar 98,03**, sedikit menurun dibandingkan tahun 2023 yang sebesar **98,09**. Meskipun demikian, capaian tersebut tetap menunjukkan bahwa tingkat kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Kota Blitar berada pada kategori sangat tinggi serta masih lebih baik dibandingkan sebagian besar daerah di wilayah sekitarnya.

Pelaksanaan sasaran tersebut didukung oleh **4 (empat) program utama**, yaitu **Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**, **Program Perlindungan Perempuan**, **Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**, serta **Program Perlindungan Khusus Anak**. Total anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut sebesar **Rp1.261.396.587**, dengan realisasi anggaran sebesar **Rp1.173.710.373**, sehingga tingkat penyerapan anggaran mencapai **93,05%**.

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja sebesar **100,55%** dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar **93,05%**, diperoleh **tingkat efisiensi sebesar 1,07**. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan secara **efektif dan efisien**, karena target kinerja dapat tercapai bahkan melampaui target dengan penggunaan anggaran yang relatif optimal.

Capaian **Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Blitar** yang melampaui target dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung. Pertama, **komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG)** yang diintegrasikan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Kedua, **pelaksanaan program pemberdayaan perempuan**

serta perlindungan perempuan dan anak yang terus diperkuat melalui berbagai kegiatan peningkatan kapasitas, advokasi, dan layanan perlindungan. Ketiga, **sinergi dan koordinasi antara perangkat daerah, lembaga masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya** dalam mendukung upaya peningkatan kesetaraan gender di daerah.

Di sisi lain, dalam upaya peningkatan **Indeks Pembangunan Gender (IPG)** masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian. Tantangan tersebut antara lain **masih adanya kesenjangan partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi dan pengambilan keputusan**, serta **perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan perempuan serta anak**. Selain itu, **penguatan koordinasi lintas sektor** masih perlu terus ditingkatkan agar implementasi pengarusutamaan gender dapat berjalan lebih optimal.

KINERJA UTAMA 3

Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Daya Saing SDM

Indikator Kinerja:
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
82,71	82,03	99,18%	78,62**	104,34%

***) kondisi akhir RPJMD (2026) menyesuaikan Perda Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 dan telah tercapai pada tahun 2024*

Gambar 2.3.16
Capaian IPM Kota Blitar Tahun 2025

Sumber: BPS, 2025

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia. Dalam proses penghitungan IPM dibentuk oleh beberapa dimensi, yaitu: **umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak**. Angka IPM yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah dan dapat merepresentasikan kesempatan masyarakat untuk mengakses hasil dari suatu proses pembangunan di suatu daerah.

Gambar 2.3.17
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Blitar Tahun 2025

Sumber: BPS, 2025

IPM Kota Blitar Tahun 2025 mencapai 82,03 meningkat 0,59 poin (0,72 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (81,44). Pembangunan manusia di Kota Blitar terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2022, status pembangunan manusia Kota Blitar sudah berada di level “sangat tinggi”. IPM Kota Blitar tahun 2025 mencapai 82,03 meningkat 0,59 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 81,44. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2020, IPM Kota Blitar rata-rata meningkat sebesar 0,63 poin, dari 78,88 pada tahun 2020 menjadi 82,03 pada tahun 2025.

Gambar 2.3.18
Perbandingan IPM Kota Blitar 2020-2025

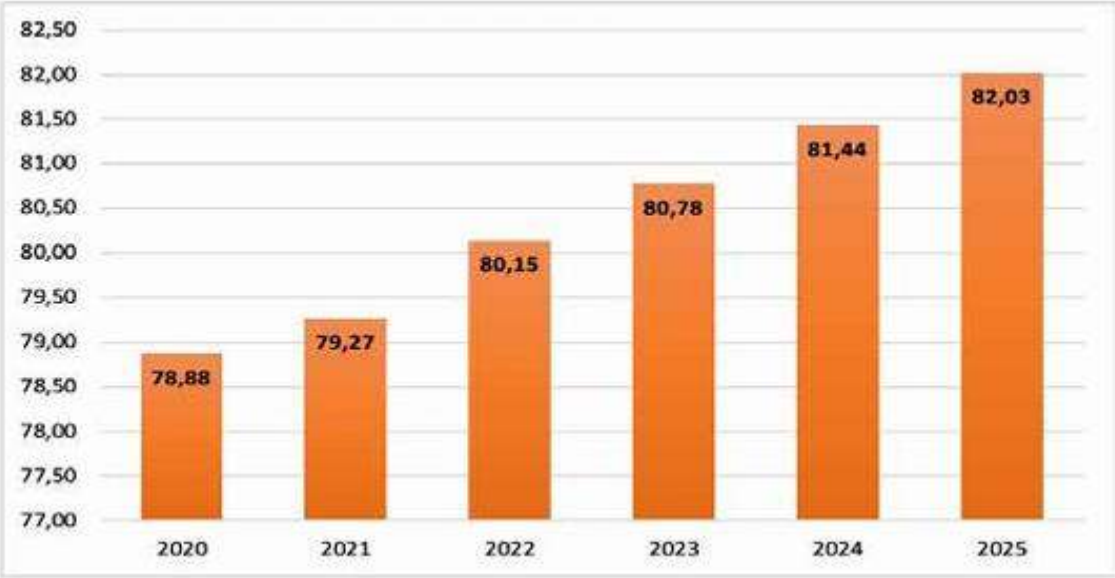

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Peningkatan IPM tahun 2025 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak dan umur panjang dan hidup sehat. Indikator yang mengalami percepatan pertumbuhan yaitu pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) sebesar 4,37 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan komponen kesehatan berupa Umur Harapan Hidup dari 0,31 persen di tahun 2024 menjadi 0,36 persen di tahun 2025. Sementara itu komponen yang mengalami perlambatan pertumbuhan yakni Indikator dimensi pengetahuan pada indikator rata-rata lama sekolah (RLS) dari tahun 2024 sebesar 0,37 persen menjadi 0,09 persen di tahun 2025 dan indikator Harapan Lama Sekolah dari 1,65 persen pada tahun 2024 menjadi 0,07 persen pada tahun 2025. Perkembangan Dimensi penyusun IPM selama tahun 2020–2025 dapat dilihat pada Tabel 2.3.10 berikut.

Tabel 2.3.11
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Blitar
Menurut Dimensi Penyusunnya, 2020–2025

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umur Panjang dan Hidup Sehat							
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	74,39	74,46	74,71	74,97	75,20	75,47
Pengetahuan							
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,32	14,33	14,56	14,57	14,81	14,82
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,11	10,35	10,65	10,78	10,82	10,83
Standar Hidup Layak							
Pengeluaran Riil per Kapita (yang dise-suaikan)	Rp 000	13.733	13.816	14.058	14.548	14.933	15.586
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		**78,88**	**79,27**	**80,15**	**80,78**	**81,44**	**82,03**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Pada tahun 2025, IPM Kota Blitar telah memiliki kategori “sangat tinggi” dan memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan IPM Jawa Timur (76,13). IPM Kota Blitar menempati urutan ke-2 dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada di wiliayah eks karesidenan Kediri. IPM tertinggi dicapai oleh Kota Kediri yaitu 82,71. Kota Blitar memiliki selisih nilai IPM sebesar 0,68 poin dibandingkan dengan Kota Kediri. Urutan IPM di wilayah eks Karesidenan Kediri pada tahun 2025 yaitu Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar dan terakhir adalah Kabupaten Trenggalek. Urutan ini mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Komponen IPM Kota Kediri memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di eks Karesidenan Kediri kecuali pada komponen standar hidup layak. Selain itu, IPM Kabupaten Blitar pada tahun 2025 memiliki pertumbuhan IPM tertinggi dibandingkan daerah lainnya yaitu meningkat 1,35 persen dibandingkan tahun 2024.

Komponen pendukung IPM lainnya yaitu komponen kesehatan yaitu umur harapan hidup. Untuk skor umur harapan hidup tertinggi se-Eks Karesidenan Kediri di Tahun 2025 yaitu Kota Kediri sebesar 76,28 tahun, dan tertinggi ke dua adalah Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Blitar yakni sama sama sebesar 75,63 tahun. Sementara itu untuk percepatan terbesar adalah Kota Kediri dan Kabupaten Kediri yakni sebesar 0,45 persen. Komponen berikutnya adalah pendidikan berupa Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Kedua komponen itu nilai tertinggi dimiliki oleh Kota Kediri dan Kota Blitar. Namun demikian, pertumbuhan tercepat pada RLS adalah Kabupaten Trenggalek (2,15 persen) dan Kabupaten Blitar (1,78 persen). Komponen terakhir berupa standar hidup layak nilai tertinggi dimiliki oleh Kota Blitar (Rp. 15,586 juta rupiah) disusul Kota Kediri (Rp. 14,284 juta rupiah). Akan tetapi, pada komponen ini percepatan tertinggi terjadi pada Kabupaten Blitar sebesar 5,10 persen dan Kabupaten Ngajuk sebesar 5,17 persen.

Pada tahun 2025, status pembangunan manusia Jawa Timur masih berkategori “tinggi”, dengan capaian IPM 76,13. Selama 2021-2025, seluruh wilayah di Jawa Timur mengalami peningkatan status pembangunan manusia. Kabupaten Sumenep tercatat sebagai wilayah dengan peningkatan status IPM dari “sedang” ke “tinggi”. Sedangkan Kota Batu tercatat sebagai wilayah dengan peningkatan status IPAM dari “tinggi“ ke “sangat tinggi“. Wilayah dengan status pembangunan manusia “tinggi” (70 ≤ IPM < 80) sebanyak 28, berstatus “sedang” (60 ≤ IPM < 70) sebanyak 2, dan tidak ada wilayah berstatus “rendah” (IPM < 60). Sementara itu, Sidoarjo, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya, dan Kota Batu menjadi wilayah dengan status capaian pembangunan manusia yang “sangat tinggi” (IPM ≥ 80).

Gambar 2.3.19
IPM Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia, 2025

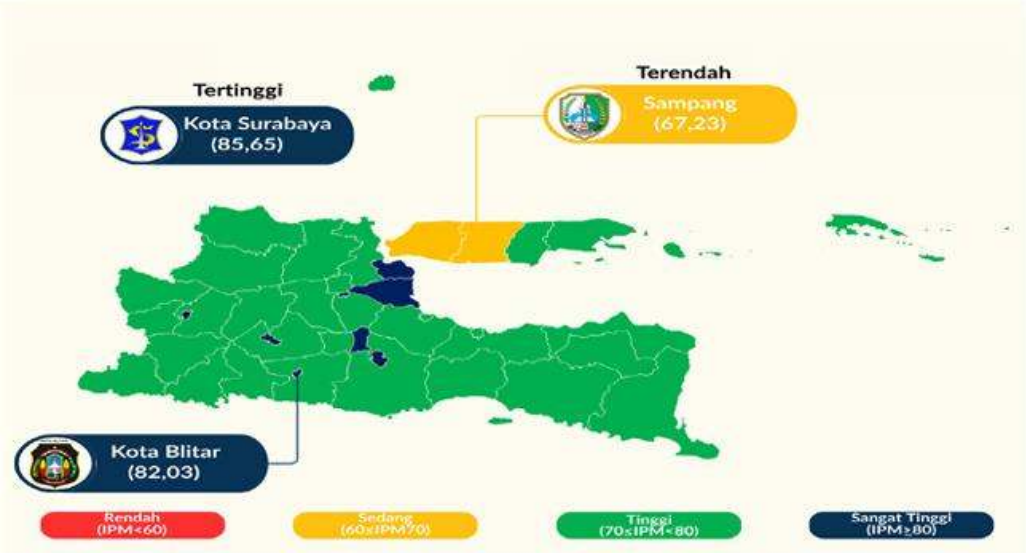

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2025

Tabel 2.3.12
IPM dan Komponen IPM Jawa Timur, 2022-2025

Provinsi	UHH		HLS		RLS		Pengeluaran Riil per Kapita (000)		IPM	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(4)	(5)	(8)	(9)	(12)	(13)	(16)	(17)	(20)	(21)
Pacitan	74.35	74.58	12.66	12.68	7.82	7.88	9,184	9,681	70.19	70.94
Ponorogo	74.81	75.07	13.76	13.77	7.77	7.78	10,199	10,658	72.59	73.18
Trenggalek	74.91	75.16	12.50	12.62	7.89	7.90	10,042	10,465	71.28	71.96
Tulungagung	74.73	74.99	13.33	13.34	8.65	8.66	11,162	11,565	74.14	74.65
Blitar	74.86	75.12	12.64	12.65	7.82	7.83	11,001	11,499	72.25	72.84
Kediri	74.58	74.85	13.61	13.62	8.23	8.24	11,565	11,952	74.20	74.68
Malang	74.88	75.14	13.38	13.48	7.68	7.75	10,326	10,791	72.23	73.00
Lumajang	74.17	74.41	12.02	12.16	6.87	7.14	9,466	9,720	68.48	69.37
Jember	73.79	74.02	13.44	13.49	6.50	6.52	9,840	10,277	69.80	70.42
Banyuwangi	73.67	73.93	13.11	13.12	7.66	7.76	12,320	12,820	73.15	73.79
Bondowoso	72.98	73.19	13.31	13.32	6.22	6.36	10,851	11,255	69.91	70.56
Situbondo	72.99	73.22	13.18	13.19	6.63	6.90	10,263	10,702	69.76	70.65
Probolinggo	73.58	73.80	12.58	12.63	6.13	6.29	11,254	11,756	69.56	70.36
Pasuruan	74.15	74.41	12.76	12.77	7.42	7.44	10,726	11,239	71.29	71.91
Sidoarjo	75.06	75.36	14.95	14.97	10.77	10.78	14,808	15,311	81.37	81.88
Mojokerto	74.48	74.74	12.96	12.97	8.97	9.11	13,051	13,467	75.61	76.23
Jombang	74.17	74.43	13.58	13.59	8.76	8.77	11,579	11,999	74.66	75.16
Nganjuk	74.17	74.43	13.07	13.17	8.12	8.24	12,349	12,821	73.95	74.70
Madiun	74.34	74.59	13.18	13.23	7.94	7.95	11,848	12,259	73.51	74.02
Magetan	74.92	75.19	14.05	14.07	8.66	8.67	12,031	12,495	75.76	76.30
Ngawi	74.76	75.01	12.84	12.85	7.59	7.78	11,563	11,897	72.62	73.28
Bojonegoro	74.48	74.72	12.84	12.92	7.43	7.45	10,323	10,776	71.15	71.80
Tuban	74.53	74.77	12.24	12.27	7.37	7.40	10,703	11,174	70.79	71.40
Lamongan	74.60	74.86	14.01	14.02	8.33	8.34	11,648	12,019	74.83	75.29
Gresik	73.96	74.24	13.96	13.97	9.75	10.01	13,384	13,870	77.62	78.44
Bangkalan	73.05	73.29	11.91	11.97	5.97	5.99	8,971	9,438	66.11	66.82
Sampang	73.24	73.49	12.39	12.54	5.06	5.07	8,944	9,363	65.44	66.19
Pamekasan	73.28	73.51	13.67	13.68	6.88	7.15	8,967	9,420	69.35	70.32
Sumenep	73.43	73.69	13.51	13.58	5.93	5.94	9,388	9,807	68.49	69.13
Kota Kediri	75.44	75.74	15.44	15.45	10.45	10.69	12,762	13,276	80.12	80.97
Kota Blitar	74.71	74.97	14.56	14.57	10.65	10.78	14,058	14,548	80.15	80.78
Kota Malang	75.06	75.32	15.76	15.77	10.69	10.94	16,897	17,222	83.38	84.00
Kota Probolinggo	73.84	74.10	13.67	13.73	9.29	9.56	12,571	12,999	76.08	76.93
Kota Pasuruan	74.38	74.64	13.64	13.66	9.67	9.78	13,803	14,250	77.71	78.30
Kota Mojokerto	75.53	75.80	14.02	14.04	10.80	11.05	14,054	14,422	80.19	80.90
Kota Madiun	75.11	75.40	14.43	14.44	11.67	11.82	16,503	17,115	83.02	83.71
Kota Surabaya	75.62	75.82	14.83	14.85	10.51	10.70	18,345	18,977	83.32	83.99
Kota Batu	74.86	75.14	14.40	14.56	9.63	9.85	13,094	13,603	78.13	79.07
Jawa Timur	74.57	74.87	13.37	13.38	8.03	8.11	11,992	12,421	74.05	74.65

Sumber: BPS, 2025

Tabel 2.3.13
IPM dan Komponen IPM Jawa Timur, 2022-2025 (Lanjutan)

Provinsi	UHH		HLS		RLS		Pengeluaran Riil per Kapita (000)		IPM	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
(1)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
Pacitan	74.74	74,98	12.69	12,70	7.90	7,91	10,099	10.756	71.49	72,26
Ponorogo	75.28	75,61	13.78	13,93	7.80	7,95	11,065	11.561	73.70	74,65
Trenggalek	75.35	75,63	12.63	12,78	7.92	8,09	10,872	11.322	72.47	73,39
Tulungagung	75.20	75,51	13.36	13,50	8.68	8,69	11,966	12.505	75.13	75,88
Blitar	75.32	75,63	12.67	12,83	7.87	8,01	12,020	12.633	73.44	74,43
Kediri	75.07	75,41	13.63	13,77	8.26	8,38	12,388	12.968	75.18	76,09
Malang	75.34	75,63	13.49	13,60	7.80	7,98	11,190	11.681	73.53	74,45
Lumajang	74.57	74,80	12.41	12,53	7.27	7,28	10,124	10.603	70.31	71,02
Jember	74.17	74,37	13.50	13,51	6.54	6,64	10,700	11.147	70.93	71,57
Banyuwangi	74.13	74,43	13.14	13,32	7.78	7,84	13,320	13.963	74.30	75,17
Bondowoso	73.31	73,47	13.33	13,34	6.53	6,54	11,689	12.192	71.22	71,72
Situbondo	73.36	73,54	13.20	13,21	6.93	7,03	11,216	11.713	71.22	71,87
Probolinggo	73.93	74,10	12.64	12,80	6.31	6,43	12,258	12.749	70.85	71,65
Pasuruan	74.61	74,81	12.78	12,91	7.46	7,47	11,617	12.117	72.36	73,02
Sidoarjo	75.63	76,08	15.22	15,23	10.91	10,94	15,710	16.366	82.67	83,35
Mojokerto	74.95	75,28	12.99	13,16	9.13	9,14	13,903	14.525	76.69	77,46
Jombang	74.64	74,97	13.61	13,62	8.78	8,88	12,454	12.976	75.67	76,37
Nganjuk	74.64	74,96	13.18	13,19	8.25	8,26	13,376	14.068	75.24	75,89
Madiun	74.79	75,11	13.27	13,28	8.20	8,21	12,668	13.325	74.81	75,47
Magetan	75.42	75,76	14.08	14,09	8.69	8,84	12,915	13.515	76.77	77,58
Ngawi	75.21	75,49	12.89	12,90	7.84	7,88	12,414	12.837	73.91	74,43
Bojonegoro	74.91	75,20	13.18	13,27	7.59	7,78	11,204	11.796	72.75	73,74
Tuban	74.95	75,23	12.54	12,77	7.53	7,54	11,579	12.117	72.31	73,15
Lamongan	75.07	75,40	14.03	14,04	8.48	8,73	12,419	12.963	75.90	76,81
Gresik	74.48	74,90	13.98	13,99	10.03	10,13	14,356	14.983	78.93	79,69
Bangkalan	73.43	73,62	11.98	12,09	6.01	6,15	9,841	10.265	67.33	68,15
Sampang	73.66	73,89	12.55	12,56	5.08	5,19	9,782	10.030	66.72	67,23
Pamekasan	73.66	73,85	13.69	13,83	7.17	7,29	9,811	10.206	70.85	71,64
Sumenep	73.86	74,09	13.59	13,60	6.10	6,24	10,156	10.631	69.78	70,54
Kota Kediri	75.94	76,28	15.71	15,72	10.92	11,09	13,670	14.284	81.88	82,71
Kota Blitar	75.20	75,47	14.81	14,82	10.82	10,83	14,933	15.586	81.44	82,03
Kota Malang	75.54	75,88	15.79	15,80	11.14	11,36	17,791	18.596	84.68	85,55
Kota Probolinggo	74.31	74,64	13.98	13,99	9.72	9,73	13,405	14.134	77.79	78,50
Kota Pasuruan	74.86	75,19	13.67	13,68	9.94	9,98	14,664	15.289	78.90	79,52
Kota Mojokerto	75.99	76,31	14.13	14,14	11.38	11,44	14,842	15.374	81.76	82,35
Kota Madiun	75.67	76,11	14.54	14,55	12.11	12,12	17,518	18.173	84.51	85,12
Kota Surabaya	76.02	76,34	14.87	14,88	10.89	11,15	19,666	20.679	84.69	85,65
Kota Batu	75.36	75,70	14.58	14,59	9.87	9,95	14,253	14.807	79.69	80,35
Jawa Timur	75.07	75,70	13.43	14,59	8.28	8,39	12,852	13.509	75.35	76,13

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2025

Memperhatikan perkembangan tren positif IPM Kota Blitar 4 tahun terakhir (2022-2025), maka akan mempengaruhi jumlah penduduk miskin yang ada di Kota Blitar. Kemiskinan dan IPM memiliki keterkaitan yang sangat erat. IPM adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup dan pembangunan manusia sedangkan kemiskinan adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas hidup dan pembangunan manusia.

Persentase penduduk miskin di Kota Blitar pada Maret 2025 sebesar 6,60 persen, turun 0,15 persen poin dibandingkan Bulan Maret 2024 sebesar 6,67 persen. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kota Blitar pada bulan Maret 2025 mencapai 9,69 ribu jiwa. Jumlah ini berkurang sebesar 0,17 ribu jiwa bila

dibandingkan dengan kondisi Maret 2024 yang sebesar 9,86 ribu jiwa. Beberapa faktor yang diduga terkait dengan penurunan kemiskinan di Kota Blitar selama periode Maret 2024-Maret 2025 antara lain adalah:

1. Dalam upaya meminimalkan kantong kemiskinan, pemerintah Kota Blitar telah menjalankan program renovasi/perbaikan kualitas rumah masyarakat kurang mampu sebanyak 116 unit dan pembangunan rumah baru sebanyak 6 unit;
2. Dalam upaya mengurangi jumlah pengeluaran keluarga kurang mampu, pemerintah kota juga telah melaksanakan beberapa program, yaitu beasiswa pendidikan tinggi dengan penerima manfaat mencapai 135 keluarga hingga Tahun 2025, penyediaan makanan gratis kepada 130 lansia terlantar, pengadaan kelengkapan anak sekolah kurang mampu sebanyak 4.750 siswa, dan pelayanan kesehatan gratis kepada keluarga, ibu hamil, ibu bersalin dan balita; dan
3. Dalam upaya meningkatkan jumlah pendapatan, Pemerintah Kota Blitar juga telah melaksanakan beberapa program diantaranya fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat kurang mampu yang menyasar 105 orang miskin ekstrim, pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, dan pengembangan kapasitas pengusaha mikro.

Dengan demikian maka peningkatan IPM dapat menurunkan angka kemiskinan, yang berdampak pada laju pertumbuhan penduduk. Peningkatan pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan permintaan barang dan jasa, yang dapat mendukung pembangunan ekonomi. Namun jika kelebihan populasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan penipisan sumber daya dan kerusakan lingkungan, yang dapat berdampak negatif jangka panjang pada pembangunan ekonomi. Untuk itu laju pertumbuhan penduduk harus dikendalikan sehingga pembangunan ekonomi tetap stabil dan meningkat. Kesejahteraan dan IPM berperan besar dalam menurunkan angka kemiskinan dan mengatur laju pertumbuhan penduduk Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang memperhitungkan faktor-faktor seperti pendapatan, kesehatan, dan pendidikan, membuat masyarakat menjadi lebih terampil dan produktif, sehingga meningkatkan prospek pekerjaan dan pendapatan pribadi. Akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan juga meningkat, sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan dan kelahiran. Dengan pendidikan yang lebih baik dan kesadaran terhadap kesehatan reproduksi, keluarga cenderung memiliki jumlah anak yang lebih sedikit lebih mampu memberikan kualitas hidup yang lebih baik untuk anak-anak mereka. Oleh karena itu, interaksi antara indeks pembangunan manusia, kesejahteraan, dan pengendalian pertumbuhan penduduk sangat penting dalam upaya pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Peningkatan IPM Kota Blitar sebesar 82,03 pada tahun 2025 didukung oleh beberapa unsur pembentuknya yakni penguatan SDM melalui program pendidikan gratis, beasiswa sarjana, dan layanan kesehatan optimal. Peningkatan ini dipicu pula oleh naiknya Angka Harapan Hidup, rata-rata pengeluaran riil per kapita, serta peningkatan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah.

Adapun penjelasan terkait dengan beberapa faktor pendukung atau strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Blitar dalam mencapai target IPM Kota Blitar tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas SDM dan Pendidikan, dengan langkah-langkah:
   - Perluasan akses pendidikan melalui program **pendidikan gratis yang merata**.
   - Pemberian beasiswa perguruan tinggi dan bimbingan belajar persiapan masuk PT.
   - Program profiling anak dari keluarga miskin untuk memastikan keberlanjutan pendidikan.
   - Peningkatan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).
2. Peningkatan Kesehatan, dengan langkah-langkah:
   - Peningkatan **Umur Harapan Hidup (UHH)** sebesar 0,27 tahun mencerminkan kualitas layanan kesehatan yang lebih baik.
   - Dukungan terhadap program strategis nasional seperti **Makan Bergizi Gratis (MBG)** dan pelaksanaan **Sekolah Rakyat**.

Memperhatikan tren pencapaian positif IPM Kota Blitar selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2025, maka kegiatan yang harus tetap dilakukan pada periode RPJMD 2025-2029 agar komponen **umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak** di Kota Blitar tetap terjaga yaitu:

1) Peningkatan kualitas kesehatan ibu melalui Kelas ibu hamil, Pendataan ibu hamil P4K, Penyuluhan ibu hamil, Monev Kescatin, dan Supervisi fasilitatif yang dilaksanakan pada periode Januari-Desember 2025, Adapun Kelas ibu hamil merupakan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang kesehatan ibu hamil, tanda-tanda kelahiran, perawatan bayi baru lahir, pemberian ASI eksklusif.
2) Pendampingan ibu hamil risiko tinggi (risti) adalah upaya untuk membantu ibu hamil yang berisiko tinggi selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Pendampingan ini dilakukan dengan memberikan edukasi dan konseling, serta memantau kesehatan ibu hamil.
3) Peningkatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dilakukan Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) adalah uji saring pada bayi baru lahir (usia 48-72 jam, maks. 14 hari) dengan mengambil 2-3 tetes darah dari tumit untuk mendeteksi dini kekurangan hormon tiroid. Pemeriksaan ini penting untuk mencegah keterbelakangan mental, retardasi pertumbuhan, dan kecacatan permanen, terutama karena sering tanpa gejala
4) Pelayanan kesehatan balita kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM upaya kesehatan bersumber daya manusia, pemantauan perkembangan gerak kasar, gerak halus, bicara, bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian, pemeriksaan daya dengar, daya lihat. Jika ada keluhan atau kecurigaan terhadap anak, maka dilakukan pemeriksaan untuk gangguan mental emosional, autisme, serta gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas.
5) Peningkatan pelayanan kesehatan melalui: (1) penguatan fasilitas pelayanan kesehatan (2) peningkatan sistem pelayanan rujukan (3) pemenuhan kualitas standar pelayanan kesehatan di rumah sakit (4) peningkatan layanan kegawatdaruratan (5) peningkatan kualitas sumber

daya kesehatan (6) pengembangan layanan home care

6) Peningkatan pencegahan penyakit menular dan tidak menular melalui: (1) optimalisasi edukasi masyarakat tentang penyakit menular dan tidak menular serta (2) peningkatan pengetahuan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
7) Peningkatan peran organisasi kepemudaan, kompetensi pemuda dan profesionalisme pemuda melalui sosialisasi bagi pemuda, pembinaan, peningkatan keimanan, pelatihan ketrampilan, pelatihan dasar kepemimpinan, dan peningkatan kapasitas kepramukaan dan pemberian dana hibah untuk Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan pramuka
8) Peningkatan peran organisasi olahraga serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarpras olahraga melalui pembinaan dan pengembangan Cabor prestasi/ rekreasi/tradisional, pelatihan Cabor/Sport Science, penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, Peningkatan Pembangunan Sarpras dan Pemeliharaan Sarpras Olahraga, pemberian dana Hibah untuk KONI dan National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) serta peningkatan promosi olahraga
9) Optimalisasi penyelenggaraan program pengendalian penduduk, Keluarga Berencana (KB) dan keluarga sejahtera melalui (1) peningkatan partisipasi peserta KB aktif (2) pendataan dan fasilitasi Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB (3) peningkatan kerjasama antar Stakeholders dalam pengendalian usia perkawinan di bawah umur (15-19 tahun) serta (4) optimalisasi peningkatan keluarga sejahtera
10) Peningkatan kegemaran membaca dan literasi melalui (1) perumusan dan implementasi regulasi daerah bidang perpustakaan (2) peningkatan fasilitas dan pelayanan perpustakaan (3) Pengembangan Taman Baca Masyarakat (TBM) (4) peningkatan layanan perpustakaan berbasis digital, serta (5) peningkatan koleksi buku perpustakaan
11) Peningkatan penghasilan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan yang berkelanjutan hingga menciptakan wirausaha baru serta memfasilitasi pemasaran produk pelatihan dengan produsen atau pembeli produk pelatihan
12) Peningkatan kesempatan kerja melalui program bursa kerja atau kerjasama dengan Pendidikan menengah yang ada di Kota Blitar sebagai peserta (selain terbuka untuk umum) dan menarik investor dengan mengoptimalkan pekerja lokal
13)

KINERJA SASARAN
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan

Indikator Kinerja: Indeks Pendidikan

Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
0,822	0,773	94,04%	0,74**	104,46%

***) kondisi akhir RPJMD (2026) menyesuaikan Perda Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 dan telah tercapai pada tahun 2025*

Gambar 2.3.20
Capaian Indeks Pendidikan Kota Blitar Tahun 2025

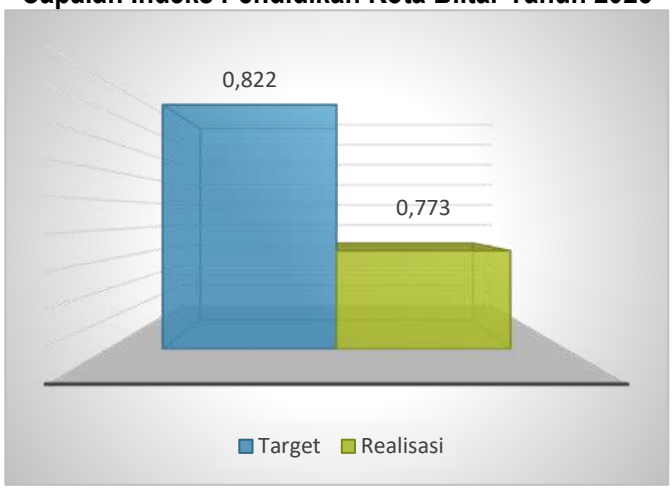

Sumber: BPS Kota Blitar, 2025

Gambar 2.3.21
Tren Indeks Pendidikan Kota Blitar dan Jawa Timur 2020-2025

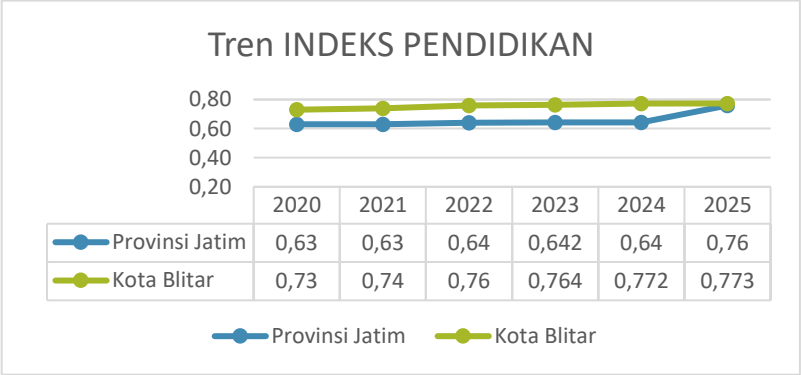

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Provinsi Jatim	0,63	0,63	0,64	0,642	0,64	0,76
Kota Blitar	0,73	0,74	0,76	0,764	0,772	0,773

Sumber: BPS Kota Blitar, 2025

Indeks Pendidikan diperoleh dari hasil rata-rata penjumlahan Indeks Angka Harapan Lama Sekolah dan Indeks Angka Rata-rata Lama Sekolah. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Blitar menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2022, HLS Kota Blitar sebesar 14,56 tahun, sedikit meningkat di tahun 2023 (14,57 tahun) dan meningkat kembali di tahun 2024 menjadi 14,81, sedangkan pada tahun 2025 mengalami kenaikan menjadi 14,82 tahun atau meningkat sebesar 0,001 tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa anak usia 7 tahun yang masuk ke jenjang pendidikan formal diharapkan akan menikmati pendidikan hingga 14,82 tahun atau setara dengan Diploma III. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Adapun pencapaian Indeks Pendidikan Kota Blitar Tahun 2025 sebesar 0,773 dibawah target yang ditentukan. Meskipun demikian jika dijelaskan dari unsur-unsur pembentuknya capaiannya melebihi capaian tahun 2024. Capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 10,83 lebih tinggi dari

tahun 2024 sebesar 10,82 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah yang telah diduduki oleh penduduk Kota Blitar ialah sampai dengan kelas XI SMA. Sedangkan kenaikan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menandakan penduduk Kota Blitar yang berusia 7 (tujuh) tahun ke atas pada tahun 2025 diharapkan bisa bersekolah hingga jenjang perguruan tinggi.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan di Kota Blitar tahun 2025 yang berfokus pada pemenuhan pelayanan dasar PAUD, pendidikan dasar, dan kesetaraan, dengan target pencapaian 100% anak usia sekolah sudah terlayani. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Blitar dalam menyukseskan program nasional. Beberapa kegiatan unggulan dalam penerapan standar Pelayanan Minimal pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pengenalan *Book Creator* dan *Canva* untuk Pembuatan Media Pembelajaran Jenjang PAUD metode pembelajaran pendidik PAUD dengan menggunakan media pembelajaran berbasis IT dan menarik bagi peserta didik PAUD
2. Dinas Pendidikan Kota Blitar bersama LPD Yayasan Pinbuk Indonesia kembali menyelenggarakan Pelatihan Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA) bagi satuan pendidikan jenjang SMP se-Kota Blitar
3. Pemberian bantuan hibah uang kepada warga belajar PKBM dengan nominal @ Rp. 500.000 yang diberikan kepada lembaga PKBM dan rutin setiap tahun dilaksanakan sosialisasi oleh Dinas Pendidikan dengan mengundang narasumber dari Bapperinda Kota Blitar.

Untuk mendukung capaian rata – rata Lama Sekolah, maka beberapa kebijakan yang dilakukan di Kota Blitar antara lain seperti Program Serenada dan kebijakan Pelaksanaan Kurikulum Muatan lokal Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF, adanya Media Pembelajaran melalui KOMIDI ELOK (Komik Digital Berbasis Kearifan Lokal), Seri Animasi Aryo dan Nada, adanya Klinik Pendidikan, Program Sekolah Gratis (Kebijakan Bantuan penunjang tugas bagi tenaga pendidik PAUD), Bantuan Kain Seragam Sekolah, keterjangkauan pembiayaan pendidikan, pengembangan model-model pembelajaran yang terus berubah, perancangan penguatan pendidikan berkarakter, penerapan dan pengembangan sekolah sebagai rumah kedua dengan terus meningkatkan daya dukungnya, dan penerapan pendidikan keluarga.

Memperhatikan pencapaian indeks pembangunan Kota Blitar selama tahun 2021-2025 mengalami tren yang positif dibandingkan daerah lain maupun target yang telah ditetapkan, maka langkah-langkah yang dapat diambil dan dimodifikasi untuk peningkatan indeks pendidikan pada periode pembangunan 2025-2029 sebagai berikut:

1) Program pendidikan gratis serta peningkatan sarana prasarana pendidikan dasar mulai dari perbaikan gedung, rehab dan pemeliharaan /revitalisasi, keterjangkauan akses, pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan. Selain itu perlu kerjasama antara Pemerintah Kota Blitar dengan Pemerintah Propinsi terkait dengan akses Pendidikan menengah bagi masyarakat Kota Blitar. Pendidikan menengah berdasarkan UU 23 Tahun 2014 merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi, namun dalam prakteknya kondisi sekolah menengah berada di kawasan

pemerintah daerah.

2) Keberlanjutan program beasiswa berprestasi jenjang pendidikan menengah dan tinggi bagi warga kurang mampu.
3) Program inovasi Mobil Aksi (Ajak Sinau) dan Pensil Pena sebagai upaya dalam mengatasi anak yang terindikasi akan putus sekolah serta pengentasan bagi anak yang putus sekolah.
4) Peningkatan literasi-numerasi, serta inisiatif "Pulang Sekolah Ayo Mengaji", mengasah jati diri.
5) Program Pendidikan non formal seperti:
   a) memberikan pelatihan ketrampilan, pelatihan *entrepreneurship* dan pelatihan teknologi bagi masyarakat
   b) membangun pusat Pendidikan dan Pelatihan Non Formal beserta galeri pemasaran hasil Pendidikan dan pelatihan non formal
   c) Pendidikan kecakapan hidup (*life skill*).

Tingkat kegemaran membaca juga sangat berpengaruh pada peningkatan kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat, dimana realisasi tahun 2025 berada pada angka 54,44 naik jika dibandingkan tahun 2024 pada angka 52,40. Dari sisi peningkatan kegemaran membaca masyarakat sebagai daya ungkit peningkatan kualitas pendidikan, maka beberapa kegiatan yang dilakukan di tahun 2025 antara lain:

1) Adanya kolaborasi dan sinergitas dengan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kegemaran membaca masyarakat Kota Blitar.
2) Penguatan kebiasaan membaca masyarakat melalui program pembiasaan membaca yang terstruktur, baik di sekolah, komunitas literasi, maupun lingkungan keluarga.
3) Layanan teknis: pengembangan, pengolahan, penyimpanan, perawatan koleksi perpustakaan serta otomasi dan kerjasama perpustakaan.
4) Layanan di tempat: layanan umum, layanan Blitar Corner (buku-buku local konten dan buku-buku karya penulis *mBlitar*), layanan referensi dan literasi ceria (ruang layanan anak).
5) Layanan ekstensi: LTPS (Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah), layanan mobil perpustakaan keliling, layanan *Bulk Loan* (paket pinjam buku) pada Pojok Baca Kelurahan/Kecamatan/OPD layanan publik dan taman baca yang dikelola oleh kelompok masyarakat.
6) Dinas Pendidikan Kota Blitar mengadakan kegiatan peningkatan kompetensi bagi 55 guru dari 11 gugus SD. Melalui workshop ini, para pendidik diajak berkreasi dan berinovasi mengembangkan pembelajaran literasi yang digital, kreatif, dan tetap berakar pada kearifan lokal.

Berbagai kegiatan tersebut diatas merupakan upaya untuk mengenalkan budaya baca sejak dini, menumbuhkan kegemaran membaca masyarakat serta meningkatkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi guna mewujudkan **BLITAR MASTER (Blitar Literasi menuju Masyarakat Cerdas dan Berkarakter). Budaya literasi masyarakat di Kota Blitar masih diperlukan penguatan terutama pada minat awal membaca (pra membaca) agar budaya membaca semakin meningkat di masa depan.**

Dari berbagai keberhasilan capaian diatas tentunya juga masih dijumpai hambatan antara lain:

a. Capaian ini menunjukkan bahwa kegemaran membaca masyarakat Kota Blitar masih berada pada kategori rendah sehingga diperlukan kebijakan strategis dan penguatan pada aspek-aspek kunci untuk mencapai tingkat kegemaran membaca yang lebih optimal.
b. Penyesuaian metodologi, dimensi, indikator serta bobot penghitungan pengukuran Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat mulai tahun 2025 sehingga capaian kinerja tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.
c. Masih kurangnya inovasi perpustakaan yang mampu menarik/meningkatkan kegemaran membaca masyarakat.
d. Belum tersedianya jumlah anggaran yang memadai yang berakibat kurang optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan perpustakaan.

Untuk mengatasi permasalahan terkait kegemaran membaca, maka langkah-langkah perbaikan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Penguatan kebiasaan membaca masyarakat melalui program pembiasaan membaca yang terstruktur, baik di sekolah, komunitas literasi, maupun lingkungan keluarga.
2) Perlu dilakukan penyesuaian target kinerja agar tetap relevan, terukur, dan selaras dengan kewenangan daerah serta kebijakan pembangunan nasional.
3) Pengembangan program literasi berbasis kolaborasi perlu diperluas melalui penyediaan ruang diskusi, bedah buku, klub membaca, dan kegiatan literasi kontekstual lainnya.
4) Optimalisasi pemanfaatan layanan perpustakaan dengan memperluas akses layanan fisik dan digital.
5) Penggalian inovasi perpustakaan yang berbasis pada peningkatan mutu layanan.
6) Kolaborasi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
7) Mengoptimalkan promosi literasi dan meningkatkan kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mempermudah akses dan penyediaan sarana prasarana membaca yang memadai di seluruh wilayah Kota Blitar.

KINERJA SASARAN

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator Kinerja: **Angka Harapan Hidup (AHH)**

Realisasi 2025	**: 75,47**
Capaian 2025	**: 100,23%**

CAPAIAN terhadap RPJMD 2021-2026	
Target 74,30**	**Capaian 101,57%**

***) kondisi akhir RPJMD (2026) menyesuaikan Perda Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 dan telah tercapai pada tahun 2025*

Gambar 2.3.22
Tren Angka Harapan Hidup Kota Blitar dan Jawa Timur 2021-2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Provinsi Jatim	74,28	74,57	74,87	75,07	75,36
Kota Blitar	74,46	74,71	74,97	75,2	75,47

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2025

Untuk Angka Harapan Hidup (AHH) di Kota Blitar tahun 2025 mencapai 75,47 melebihi pencapaian Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Timur sebesar 75,36 dan melebihi capaian tahun 2024. Angka Harapan Hidup di Kota Blitar menyentuh angka 73 tahun sejak tahun 2015. Angka ini masuk pada range Angka Harapan Hidup tertinggi di Jawa Timur.

Angka Harapan Hidup (AHH) atau Usia Harapan Hidup (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2025, UHH telah meningkat sebesar 1,08 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,22 tahun per tahun. Pada tahun 2020, UHH adalah 74,39 tahun dan pada tahun 2025 mencapai 75,47 tahun. UHH tahun 2025 meningkat 0,27 tahun (0,36 persen) dibanding tahun sebelumnya, sebagaimana gambar diatas.

Hal tersebut menjadi cerminan keberhasilan pembangunan Kota Blitar di bidang kesehatan serta menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat Kota Blitar akan kesehatan sangat tinggi, yang juga didukung dengan sarana kesehatan dan ketersediaan tenaga medis yang memadai.

Keberhasilan capaian Angka Harapan Hidup tidak lepas dari wujud komitmen Pemerintah Kota Blitar beserta gerakan sadar dari masyarakat antara lain:

1. Perilaku hidup sehat
2. Adanya kelahiran hidup
3. Peran pemerintah daerah terkait kebijakan kesehatan
4. Keaktifan kader kesehatan
5. Fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai
6. Akses pelayanan kesehatan mudah
7. Kualitas pelayanan kesehatan baik
8. Media sosial kesehatan mudah diakses
9. Fasilitasi pelayanan kesehatan bagi keluarga tidak mampu

Wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas kesehatan melalui program prioritas yang mendukung pencapaian Indeks Kesehatan yang didalamnya terdapat unsur AHH yakni antara lain:

1. Program Keluarga Sehat (Home Care, UHC)
2. Pendampingan Bumil dan Baduta
3. Konvergensi Stunting
4. Program Kota Sehat
5. Peningkatan Layanan Kesehatan Rujukan

Ketercapaian Angka Harapan Hidup (AHH) di Kota Blitar tidak terlepas dari pencapaian indikator kinerja sasaran antara lain:

1. Jumlah kematian ibu (AKI) pada tahun 2025 tidak ada kasus kematian, Penguatan kebiasaan membaca masyarakat melalui program pembiasaan membaca yang terstruktur, baik di sekolah, komunitas literasi, maupun lingkungan keluarga. Adapun kegiatan yang mendukung penurunan AKI sebagai berikut :
   - kegiatan audit kasus kematian/nearmiss yang dilakukan secara berkala oleh tim Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMP-SR) Tingkat Kota,
   - kerjasama dengan Poltekkes Kemenkes Malang-Kampus Blitar dalam upaya pendampingan ibu hamil dan ibu nifas beresiko,
   - supervisi fasilitatif dalam rangka monitoring pelayanan program KIA dan hasil pendampingan di seluruh wilayah kelurahan se-Kota Blitar,
   - pendampingan dokter spesialis wilayah dalam rangka penurunan AKI,
   - pelaksanaan drill kegawatdaruratan maternal neonatal triwulanan di PONED/IGD masing-masing UPT Puskesmas oleh tim gadar matneo.
2. Jumlah kematian bayi Kota Blitar tahun 2025 sebanyak 8 kasus dengan jumlah kelahiran hidup 2.311. Maka AKB Kota Blitar tahun 2025 sebesar 3,46 per 1.000 kelahiran hidup dari target daerah sebesar 4,77 per 1.000 kelahiran hidup, dengan tingkat capaian 127,43%, Sebagai upaya tindak lanjut untuk menurunkan angka kematian bayi Kota Blitar antara lain:
   - Melanjutkan kerjasama dengan lintas sektor Pendidikan (Poltekkes Kemenkes Malang-Kampus Blitar) dalam upaya pendampingan bayi Resti
   - Pendampingan dokter Sp.A wilayah bagi FKTP se-Kota Blitar
   - OJT Kegawatdaruratan bagi tim kegawatdaruratan FKTP ke RS
   - Melanjutkan Skrining pada bayi baru lahir (SHK, HAK, G6PD, PJB dan atresia bilier).

Untuk mempertahankan pencapaian UHH tahun 2025 maka perlu adanya peningkatan di periode 2025-2029, didukung oleh program kesehatan, gizi, perlindungan sosial, dan kesejahteraan lansia, serta beberapa program atau kegiatan yang dapat dilanjutkan seperti:

1) program BERKAT SAE (berbagi nutrisi lansia)
2) pendampingan Go Care Lansia,
3) pembentukan Karang Werda di setiap kelurahan, serta akses mudah ke faskes.
4) Peningkatan kualitas layanan kesehatan, memastikan ketercekupan secara kualitas dan kuantitas tenaga medis dan non medis yang ada di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan
5) Peningkatan akses air bersih dan sanitasi, yaitu memastikan semua lapisan masyarakat memiliki

akses air bersih dan sanitasi yang memadai, untuk mengurangi resiko terkena penyakit

6) Meningkatkan kerjasama antar lembaga formal maupun non formal yang bergerak dibidang kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat.

KINERJA SASARAN

Meningkatnya Pengendalian Penduduk

Indikator Kinerja: **Laju Pertumbuhan Penduduk**

Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
0,915%	0,94%	97,27%	0,65%	55,38%

Gambar 2.3.23
Tren Angka Harapan Hidup Kota Blitar dan Jawa Timur 2022-2025

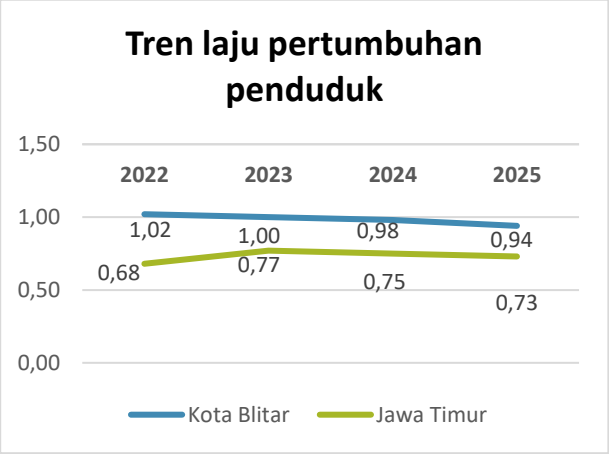

Sumber: BPS, 2025

Kondisi demografi suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, **laju pertumbuhan penduduk**, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. **Laju pertumbuhan penduduk** per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini diperoleh dari Sensus Penduduk 2020 Lanjutan yakni pendataan lanjutan dari SP2020 yang dilakukan BPS pada tahun 2022 untuk menghasilkan indikator demografi yang lebih komprehensif.

Berdasarkan data hasil **Sensus Penduduk 2020 melalui metode Proyeksi Long Form SP2020 yang dilakukan oleh BPS,** jumlah penduduk Kota Blitar tahun 2022 sebesar 151.840 jiwa. Meningkat menjadi 153.360 jiwa di tahun 2023 atau mengalami penurunan laju pertumbuhan penduduk dari 1,02% menjadi 1,00% di tahun 2023 dan menurun lagi di tahun 2024 sedikit dibawah pertumbuhan tahun 2023 menjadi 154.870 jiwa atau mengalami pertumbuhan 0,98%. Pada tahun

2025 jumlah penduduk Kota Blitar meningkat menjadi 156.330 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 0,94% atau sedikit menurun lagi pertumbuhannya dibanding tahun 2024.

Dari laju pertumbuhan penduduk dapat digambarkan bahwa rasio jenis kelamin penduduk Kota Blitar pada tahun 2025 sebesar 98,32 persen yang artinya dari setiap 98 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan. Sedangkan untuk kepadatan penduduk mencapai 4.709 penduduk per km². Ada empat faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk yaitu kelahiran, kematian, penduduk datang, dan penduduk pindah. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, selama tahun 2025 keempat faktor tersebut mengalami penurunan. Beberapa hal yang mempengaruhi, antara lain:

- Angka kematian yang tinggi: Tingkat kematian yang tinggi dapat menurunkan jumlah penduduk.
- Angka kelahiran yang rendah: Tingkat kelahiran yang rendah dapat menurunkan jumlah penduduk.
- Mutasi: mutasi datang atau keluar penduduk, meninggal dunia, dan kelahiran

Sehingga perlu diupayakan langkah–langkah untuk menekan laju migrasi penduduk melalui kerjasama lintas sektor serta pengendalian jumlah kelahiran melalui inovasi yang bisa menekan laju pertumbuhan penduduk dengan kegiatan **Promosi dan KIE** (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) pada masyarakat melalui Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana serta fasilitasi Layanan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) dan Non MKJP.

Disisi lain juga perlu diminimalisir faktor penghambat yang membuat laju pertumbuhan penduduk sulit dikendalikan yakni antara lain:

1. Tingginya migrasi penduduk ke dalam Kota Blitar karena adanya program Zonasi Sekolah
2. Kurang optimalnya KB Pasca Persalinan yang merupakan pengungkit terbesar dalam metode kontrasepsi modern
3. Masih minimnya pengetahuan, motivasi dan partisipasi Pasangan Usia Subur dalam Program Bangga Kencana
4. Belum optimalnya ketahanan keluarga sebagai pondasi pembangunan keluarga

Sehingga perlu diupayakan langkah-langkah antisipatifnya melalui program-program:

1. Peningkatan partisipasi peserta KB aktif
2. Pendataan dan fasilitasi Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB
3. Peningkatan kerjasama antar Stakeholders dalam pengendalian usia perkawinan di bawah umur (15- 19 tahun)
4. Optimalisasi peningkatan keluarga Sejahtera
5. Penyuluhan kepada remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perencanaan kehidupan berkeluarga.
6. Program inovatif Kencan SAE (sarana edukasi sekaligus fasilitasi bagi masyarakat yang ingin mempersiapkan diri menuju pernikahan)

Selain melihat capaian target indikator, maka perlu juga kita analisa tingkat efisiensi capaian indikator sasaran dengan membandingkan antara realisasi target dengan realisasi serapan anggaran. Berikut kami tampilkan tingkat efisiensi dari sasaran meningkatnya derajat Kesehatan dan daya saing SDM.

No	Sasaran RPJMD/Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8	9=8/7*100	10=5/9
3.	**Meningkatnya derajat kesehatan dan daya saing SDM**				Program Pengelolaan Pendidikan	60.010.424.470,00	53.507.301.127,00		
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	**82,71**	**82,03**	**99,18%**	Program Pengembangan Kurikulum	780.871.200,00	750.351.624,00		
					Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6.964.170.500,00	6.820.468.334,00		
					Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	17.210.000,00	15.508.202,00		
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	68.129.761.400,00	65.795.237.148,83		
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	711.361.400,00	684.566.914,00		
					Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	319.434.225,00	311.787.144,00		
					Program Pemberdayaan Masyarakat	2.789.075.900,00	2.672.183.085,00		

No	Sasaran RPJMD/Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8	9=8/7*100	10=5/9
					Bidang Kesehatan				
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.502.938.200,00	1.879.573.560,00		
					Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	328.651.200,00	328.648.199,00		
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	6.875.156.622,00	6.649.404.938,00		
					Program Pengendalian Penduduk	218.275.629,00	185.194.792,00		
					Program Pembinaan Keluarga Berencana	1.296.710.800,00	1.000.569.706,00		
					Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	1.233.256.087,00	1.182.988.036,00		
					Program Pembinaan Perpustakaan	844.468.229,00	813.742.400,00		
					TOTAL	**153.021.765.862,00**	**142.597.525.209,83**	**93,19%**	**1,06**

Dari hasil pencapaian kinerja diatas jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja keuangan menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 1,06 atau masuk kategori efisien.

KINERJA UTAMA 4
Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Indikator Kinerja: **Angka Kemiskinan**

Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021-2026
6,63	6,6	100,45%	7,06	106,52%

Gambar 2.3.24
Tren Angka Kemiskinan Kota Blitar, Jawa Timur dan Nasional 2021-2025

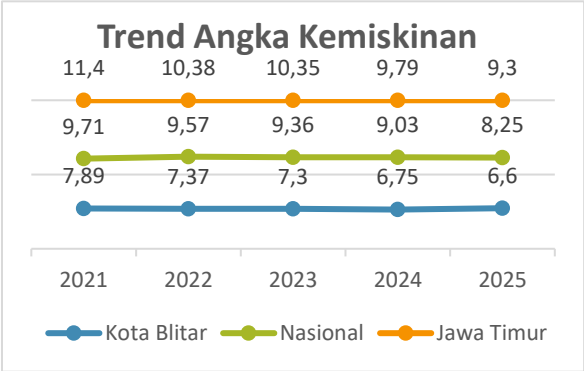

Sumber Data: BPS, 2025

Dari data dan grafik diatas diketahui bahwa angka kemiskinan Kota Blitar sebesar 6,6 atau tercapai sebesar 100.45% dari target tahun 2025 dan tercapai 106.52% dari target akhir tahun RPJMD 2021-2026 yang telah ditetapkan. Selama tahun 2021 s.d 2025, angka kemiskinan di Kota Blitar terus mengalami penurunan. Pada tahun 2021, angka kemiskinan di Kota Blitar mencapai 7,89. Pada tahun 2022 turun menjadi 7,37 atau turun sebesar 0,52 poin dari tahun 2021, turun menjadi 7,30 di tahun 2023 atau turun sebesar 0,07 poin dari tahun 2022, turun menjadi 6,75 di tahun 2024 atau turun sebesar 0,55 poin dari tahun 2023 dan terus turun menjadi 6,6 di tahun 2025 atau turun sebesar 0.15 poin dari tahun 2024.

Kondisi ini juga diikuti oleh jumlah penduduk miskin di Kota Blitar yang berkurang sebanyak 0,68 ribu jiwa, dari 11,33 ribu jiwa pada 2021 menjadi 10,65 ribu jiwa di tahun 2022 atau turun sebesar 6%, menjadi 10,61 ribu jiwa di tahun 2023 atau turun sebesar 0,38% dari tahun 2022, menjadi 9.860 jiwa di tahun 2024 atau turun sebesar 0.04% dari tahun 2023 dan terus turun menjadi 9.690 jiwa di tahun 2025 atau turun sebesar 0.58%. Berdasarkan grafik tren angka kemiskinan, dibandingkan dengan rata-rata kemiskinan Propinsi Jawa Timur dan Nasional, angka kemiskinan Kota Blitar masih dibawah rata-rata kemiskinan Propinsi Jawa Timur dan Nasional. Penurunan angka kemiskinan di Kota Blitar dari tahun 2024 ke 2025 sebesar 0,15 poin atau 0.34

lebih rendah daripada penurunan rata-rata kemiskinan Propinsi Jawa Timur yaitu sebesar 0,49 poin dan 0.63 lebih rendah daripada penurunan rata-rata kemiskinan Nasional yaitu sebesar 0,78 poin.

Sementara itu, dibandingkan dengan Pemerintah Kota di Wilayah Propinsi Jawa Timur angka kemiskinan Kota Blitar lebih tinggi 0,56 poin daripada Kota Kediri dan lebih tinggi 2,75 poin dari Kota Malang. Sedangkan Pemerintah Kota di Jawa Timur dengan angka kemiskinan terendah tahun 2025 adalah Kota Batu sebesar 2,86. Apabila dibandingkan dengan penurunan angka kemiskinan pada kurun waktu 2024 sampai dengan 2025 penurunan angka kemiskinan di Kota Blitar lebih tinggi daripada Kota Malang. Penurunan angka kemiskinan di Kota Blitar pada kurun waktu tersebut adalah 0,15 poin sedangkan penurunan angka kemiskinan pada Kota Malang sebesar 0,06 poin. Hal ini mengindikasikan adanya percepatan kinerja penanggulangan kemiskinan di Kota Blitar yang relatif lebih progresif dalam periode tahun berjalan, meskipun secara level persentase masih berada di atas beberapa kota pembanding.

Dengan kata lain, meskipun angka kemiskinan Kota Blitar (6,60%) masih lebih tinggi dibandingkan Kota Kediri dan Kota Malang, laju penurunannya dalam kurun waktu 2024–2025 menunjukkan tren yang lebih cepat dibandingkan Kota Malang. Kondisi ini mencerminkan bahwa:

1. Intervensi program penanggulangan kemiskinan mulai menunjukkan efektivitas yang lebih kuat;
2. Perbaikan indikator pendukung seperti penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka dan pertumbuhan UMKM memberikan dampak riil terhadap pengurangan kemiskinan;
3. Sinergitas program pusat dan daerah berjalan lebih optimal dibanding periode sebelumnya.

Namun demikian, bila dibandingkan dengan Kota Batu sebagai kota dengan angka kemiskinan terendah di Jawa Timur Tahun 2025 (2,86%), maka terdapat kesenjangan struktural yang menunjukkan perbedaan karakteristik ekonomi, basis sektor unggulan, serta tingkat kematangan sektor pariwisata dan jasa. Meskipun secara posisi persentase Kota Blitar masih berada di atas beberapa kota pembanding, tren penurunan yang lebih cepat menunjukkan adanya momentum positif yang perlu dijaga dan diperkuat agar dalam jangka menengah kesenjangan antar kota dapat semakin diperkecil.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan angka kemiskinan di Kota Blitar adalah:

a. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 0,83 poin atau dari 5,11 pada 2024 menjadi 4,28 di tahun 2025. Hal ini mengindikasikan meningkatnya jumlah penduduk bekerja yang berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga dan menurunnya risiko kemiskinan.
b. Upah Minimum Kota (UMK) Kota Blitar meningkat dari Rp2.330.000,00 pada Tahun 2024 menjadi Rp2.481.450,00 pada Tahun 2025, atau naik sekitar 6,5%. Kenaikan ini memiliki implikasi langsung terhadap perbaikan kesejahteraan pekerja formal, khususnya pada

kelompok pekerja berupah rendah. Secara ekonomi, kenaikan UMK berpengaruh melalui beberapa mekanisme berikut:

1) Peningkatan Daya Beli Pekerja Formal
   Tambahan pendapatan meningkatkan kemampuan rumah tangga pekerja dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan daya beli yang lebih baik, risiko rumah tangga pekerja jatuh di bawah garis kemiskinan dapat ditekan.
2) Pengurangan Kategori *Working Poor*
   Working poor adalah kondisi ketika seseorang bekerja namun pendapatannya masih berada di bawah atau sangat dekat dengan garis kemiskinan. Kenaikan UMK membantu mendorong pendapatan pekerja formal menjauh dari ambang batas garis kemiskinan, sehingga memperkecil potensi masuknya kelompok pekerja ke dalam kategori miskin.
3) Efek *Multiplier* terhadap Konsumsi Lokal
   Peningkatan pendapatan pekerja formal mendorong konsumsi rumah tangga. Konsumsi tersebut berputar di sektor perdagangan dan jasa lokal, termasuk UMKM, sehingga memberikan dampak berganda terhadap perekonomian daerah
4) Stabilisasi Sosial-Ekonomi
   Upah yang lebih layak membantu menjaga stabilitas sosial dan mengurangi tekanan ekonomi rumah tangga, terutama dalam situasi kenaikan harga kebutuhan pokok

c. Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Blitar meningkat dari 13.965 unit pada Tahun 2023 menjadi 18.738 unit pada Tahun 2025, atau bertambah 4.773 unit. Pertumbuhan yang signifikan ini menjadi salah satu faktor strategis dalam mendukung penurunan angka kemiskinan. Secara struktural, pertumbuhan UMKM berkontribusi melalui beberapa aspek berikut:

1) Penyerapan Tenaga Kerja Lokal
   UMKM memiliki karakteristik padat karya dan fleksibel dalam menyerap tenaga kerja, termasuk Pekerja dengan keterampilan menengah dan rendah, Perempuan dan kelompok rentan dan Tenaga kerja terdampak pemutusan hubungan kerja. Dengan bertambahnya jumlah unit usaha, peluang kerja informal maupun semi formal meningkat, yang berdampak langsung terhadap penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka serta peningkatan pendapatan rumah tangga
2) Peningkatan Pendapatan Sektor Informal
   Sebagian besar rumah tangga miskin dan rentan miskin berada pada sektor informal. Pertumbuhan UMKM dapat membuka peluang usaha mandiri, meningkatkan pendapatan keluarga dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan social.
3) Penguatan Ekonomi Berbasis Kerakyatan
   UMKM merupakan fondasi ekonomi daerah yang berbasis masyarakat. Pertumbuhannya dapat mendorong pemerataan pendapatan, mengurangi konsentrasi ekonomi pada sektor tertentu dan menggerakkan ekonomi hingga tingkat kelurahan.

d. Indeks Pembangunan Manusia Kota Blitar meningkat dari 81,44 pada Tahun 2024 menjadi 82,03 pada Tahun 2025, dan tetap berada dalam kategori sangat tinggi. Peningkatan IPM mencerminkan perbaikan pada tiga dimensi utama pembangunan manusia:

1) Dimensi Kesehatan
Perbaikan layanan kesehatan dan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan meningkatkan usia harapan hidup sebesar 0,27 poin dari tahun sebelumnya dan produktivitas tenaga kerja. Meningkatnya usia harapan hidup menunjukkan bahwa Tingkat Kesehatan Masyarakat Kota Blitar mengalami peningkatan atau semakin baik. Pemerintah Kota Blitar merumuskan 10 aksi untuk mewujudkannya diantaranya yaitu:
a) Perluasan Upaya promotive-prventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat
b) Pemerataan dan peningkatan akses layanan Kesehatan dan jaminan Kesehatan universal dengan penguatan dan optimalisasi fasilitas layanan kesehatan. Cakupan layanan kesehatan Masyarakat naik 4,51 poin dari tahun sebelumnya. Selain itu, UHC (Universal Health Coverage) Kota Blitar untuk capaian tahun 2025 telah mencapai status 100 persen. Dengan pencapaian UHC ini, masyarakat Kota Blitar mendapatkan kepastian layanan kesehatan gratis, khususnya bagi warga kurang mampu yang didaftarkan oleh Pemkot Blitar.
c) Pemerataan, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga kesehatan
d) Peningkatan pencegahan kematian Ibu dan anak disertai pencegahan dan pengurangan angka anak tidak sehat
e) Percepatan penurunan angka kesakitan, penurunan penyekit menular dan tidak menular
f) Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting
g) Dukungan pada Program Pemberian Makanan Bergizi
h) Dukungan pada penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis
i) Dukungan dan penuntasan kasus TBC
j) Dukungan pada Pembangunan Rumash Sakit lengkap dan berkualitas.

2) Dimensi Pendidikan
Meskipun peningkatan rata-rata lama sekolah relatif terbatas, adanya program sekolah gratis dan akses pendidikan yang baik tetap menjadi fondasi peningkatan kualitas SDM dan mobilitas sosial jangka panjang.
3) Dimensi Standar Hidup Layak
Kenaikan pendapatan dan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat berkontribusi pada peningkatan pengeluaran riil per kapita yaitu meningkat Rp653.000,00 atau 4,37% dibandingkan tahun sebelumnya.

IPM yang tinggi berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan melalui:
1) Peningkatan produktivitas tenaga kerja
2) Peluang kerja yang lebih luas
3) Peningkatan daya saing ekonomi daerah
4) Penguatan kapasitas masyarakat dalam mengakses peluang ekonomi

Dengan IPM yang terus meningkat dan berada pada kategori sangat tinggi, Kota Blitar memiliki fondasi struktural yang kuat untuk menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan.

e. Adanya program renovasi/ perbaikan kualitas rumah Masyarakat kurang mampu untuk meminimalkan kantong kemiskinan sebanyak 124 unit, Pembangunan rumah swadaya untuk MBR sebanyak 6 unit, fasilitasi jaringan Listrik untuk MBR sebanyak 10 unit. Disamping itu,

tahun 2025 terdapat Program Bedah Rumah dari BAZNAZ Kota Blitar untuk peningkatan 1 unit rumah.

f. Adanya program untuk mengurangi jumlah pengeluaran keluarga kurang mampu melalui beberapa program yaitu beasiswa Pendidikan tinggi dengan penerima manfaat sebanyak 159, penyediaan makanan gratis kepada 135 lansia terlantar, pengadaan kelengkapan anak sekolah dan pelayanan kesehatan gratis.
g. Adanya program untuk meningkatkan jumlah pendapatan, Pemerintah Kota Blitar telah melaksanakan fasilitasi pengembangan ekonomi Masyarakat kurang mampu yang menyasar 105 orang miskin ekstrim, pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja dan pengembangan kapasitas pengusaha mikro.
h. Realisasi penyaluran program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Rastrada setiap empat bulan sekali dengan total beras 40 kilogram per KPM (Keluarga Penerima Manfaat) berdampak positif pada turunnya tingkat kemiskinan.
i. Menurunnya indeks gini
   Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Semakin tinggi nilai indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai indeks Gini adalah nol maka artinya terdapat kemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna. Penurunan dari 0,353 di tahun 2024 menjadi 0,340 di tahun 2025 menunjukkan bahwa:
   1) Peningkatan pendapatan tidak terkonsentrasi pada kelompok atas artinya distribusi pendapatan di Kota Blitar menjadi lebih merata dan dapat membantu mengurangi jumlah penduduk miskin secara keseluruhan.
   2) Pertumbuhan ekonomi relatif lebih inklusif dan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu
   3) Kelompok berpendapatan rendah mulai memperoleh manfaat dari aktivitas ekonomi daerah
   4) Stabilitas sosial-ekonomi daerah lebih terjaga.

Sementara itu, beberapa faktor yang mempengaruhi angka kemiskinan di Kota Blitar tidak turun drastis yaitu disebabkan:

a. Meningkatnya garis kemiskinan dari tahun 2024 sebesar Rp596.105 menjadi Rp625.337,00 per kapita per bulan atau naik sebesar 4,90% di tahun 2025.
   Garis kemiskinan adalah Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar baik makanan maupun non makanan. Dampak dari kenaikan garis kemiskinan secara langsung akan menyebabkan peningkatan jumlah individu atau rumah tangga yang dinyatakan hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini terjadi karena sebagian individu atau rumah tangga yang sebelumnya di atas garis kemiskinan menjadi dianggap sebagai miskin setelah kenaikan garis kemiskinan tersebut. Kenaikan garis kemiskinan menandakan bahwa standar hidup minimum yang dianggap layak juga meningkat. Ini berarti individu atau rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan

perawatan kesehatan. Kenaikan garis kemiskinan dapat menyebabkan peningkatan kesulitan bagi mereka yang sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar sebelumnya.

b. Menurunnya Panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang

Terjadi penurunan panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang sebesar 6,73 km dari 232,38 km di tahun 2024 turun menjadi 225,65 km di tahun 2025. Sedangkan panjang jalan rusak sedikit menurun sebesar 0,25 km dari 18,92 km di tahun 2024 menjadi 18,67 km di tahun 2025. Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas infrastruktur jalan belum sepenuhnya stabil dan memerlukan perhatian lebih lanjut. Dampak terhadap pengentasan kemiskinan antara lain:

1) Terhambatnya Mobilitas Ekonomi

   Jalan merupakan infrastruktur dasar yang mendukung distribusi barang, jasa, dan tenaga kerja. Penurunan kualitas jalan dapat meningkatkan biaya transportasi dan memperlambat arus distribusi.

2) Peningkatan Biaya Logistis UMKM

   UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal sangat bergantung pada aksesibilitas. Infrastruktur jalan yang kurang optimal berpotensi menekan margin usaha dan daya saing produk.

3) Akses terhadap Layanan Dasar

   Jalan yang kurang memadai dapat membatasi akses masyarakat miskin terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan pasar kerja.

c. Peningkatan Pendidikan relative stagnan

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat dari 10,82 tahun 2024 menjadi 10,83 tahun 2025 atau hanya naik 0,01 tahun. Kenaikan yang sangat terbatas ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan berjalan lambat. Implikasi terhadap pembangunan jangka panjang:

1) Mobilitas Sosial Terbatas

   RLS mencerminkan kualitas SDM angkatan kerja. Stagnasi RLS berpotensi menghambat peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja.

2) Risiko Kemiskinan Antar Generasi

   Pendidikan yang tidak meningkat signifikan dapat memperlambat pemutusan rantai kemiskinan struktural.

3) Transformasi Ekonomi Kurang Optimal

   Pengembangan ekonomi kreatif dan digital membutuhkan SDM dengan kompetensi menengah dan tinggi. Tanpa peningkatan kualitas pendidikan, transformasi ekonomi akan berjalan lebih lambat.

d. Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) sebesar 68,4 menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi dan pengambilan keputusan masih memiliki ruang peningkatan. Tantangan yang dihadapi antara lain:

1) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

   Belum optimalnya keterlibatan perempuan dalam sektor produktif berdampak pada rendahnya kontribusi pendapatan rumah tangga.

2) Akses terhadap Permodalan dan Aset

Pelaku usaha perempuan, khususnya di sektor UMKM, masih menghadapi keterbatasan akses pembiayaan dan pelatihan.

3) Ketimpangan Peran Domestik dan Ekonomi
Beban ganda perempuan seringkali membatasi kesempatan untuk mengembangkan usaha atau meningkatkan kompetensi.

Penguatan pemberdayaan gender menjadi penting karena peningkatan pendapatan perempuan secara langsung berdampak pada kesejahteraan keluarga, terutama dalam aspek pendidikan dan kesehatan anak.

Angka kemiskinan tahun 2025 menurun dibanding tahun 2024, didukung oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah, stabilitas inflasi yang relatif terkendali, penguatan program perlindungan sosial, serta intervensi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dukungan UMKM dan penciptaan kesempatan kerja. Peningkatan akses terhadap layanan dasar, khususnya kesehatan dan pendidikan, turut berkontribusi dalam menjaga daya beli serta meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat rentan.

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka capaian realisasi angka kemiskinan telah melampaui target yaitu sebesar 106.52% hal ini mengindikasikan bahwa tujuan utama pembangunan untuk meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat telah tercapai. Sejalan dengan misi ketiga pembangunan yaitu berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata dan perdagangan berbasis digital.

Namun demikian, keberhasilan melampaui target tersebut tetap perlu diantisipasi dengan penguatan kebijakan yang lebih struktural dan berkelanjutan, mengingat masih terdapat tantangan pada aspek kualitas infrastruktur, peningkatan pendidikan yang relatif terbatas, serta pemberdayaan ekonomi perempuan. Upaya penurunan kemiskinan ke depan perlu difokuskan tidak hanya pada penurunan angka secara kuantitatif, tetapi juga pada pengurangan tingkat kerentanan dan pencegahan kemiskinan antar generasi.

Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan ekonomi Kota Blitar diprioritaskan pada penguatan fondasi pertumbuhan yang inklusif melalui peningkatan kerja sama dengan Kabupaten Blitar dalam pembangunan dan peningkatan kualitas jalan penghubung antar daerah menuju akses jalur regional (JLS) dan nasional (jalan tol), guna memperlancar konektivitas dan distribusi barang/jasa. Selain itu, diarahkan pula pada peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan iklim investasi untuk mendorong masuknya modal dan penciptaan lapangan kerja baru.

Pengembangan sektor unggulan daerah menjadi fokus strategis, meliputi penguatan sektor pertanian, industri, budaya, dan pariwisata, serta peningkatan dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang berbasis potensi lokal. Kebijakan ini juga didukung melalui hilirisasi

komoditas unggulan daerah, transformasi pasar tradisional agar lebih modern dan kompetitif, serta pembangunan dan peningkatan sarana prasarana perdagangan.

Melalui kebijakan tersebut, diharapkan pertumbuhan ekonomi yang tercipta tidak hanya meningkatkan angka makro pembangunan, tetapi juga memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat daya tahan ekonomi rumah tangga, sehingga penurunan kemiskinan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan merata.

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Angka kemiskinan dan Indeks Kedalaman Kemiskinan memiliki keterkaitan erat, tetapi keduanya mengukur aspek yang berbeda dari kemiskinan. Angka kemiskinan menunjukkan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Kedalaman Kemiskinan mengukur seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Semakin tinggi indeks kedalaman kemiskinan, semakin sulit bagi penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kondisi ini adalah ketahanan pangan, yang mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam memenuhi kebutuhan pangan warganya secara stabil, terjangkau dan bergizi. Ketahanan pangan yang rendah dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat miskin.

KINERJA SASARAN
Menurunnya Ketimpangan Antar Penduduk Miskin

Indikator Kinerja:
Indeks Keparahan Kemiskinan

Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021-2026
0,115	0,15	69,57%	0,21	128,57%

Program yang mendukung Sasaran	Anggaran	Realisasi	Capaian Keuangan (%)
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	14,587,442,039.00	14,232,352,900.00	97,57%

Uraian Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi	Keterangan
Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin	69.57%	97.57%	0.71	In Efisien

Gambar 2.3.25
Tren Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Blitar dan Jawa Timur 2021-2025

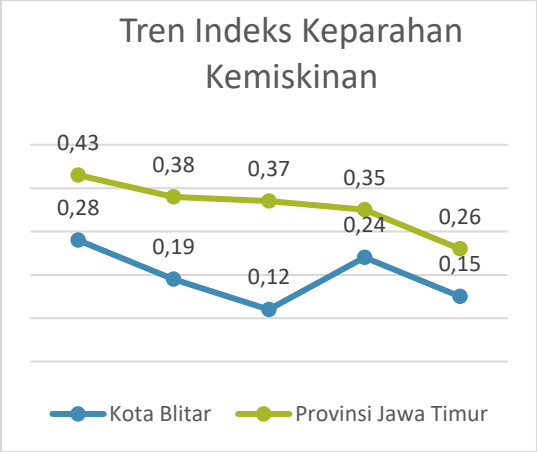

Sumber: BPS, 2025

Indeks Keparahan Kemiskinan merupakan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh jarak orang miskin dari garis kemiskinan. Jika semakin dalam atau semakin jauh dengan garis kemiskinan, semakin sulit untuk pengentasan kemiskinannya.

Berdasarkan data dan grafik di atas diketahui bahwa pada tahun 2021 indeks keparahan kemiskinan tercatat sebesar 0,28. Seiring dengan menurunnya dampak pandemi Covid-19, pada tahun 2022 indeks tersebut turun menjadi 0,19 dan kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 0,12. Penurunan ini menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin mengecil, sehingga kondisi masyarakat miskin pada periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun, pada tahun 2024 indeks keparahan kemiskinan mengalami kenaikan signifikan menjadi 0,24 atau meningkat sebesar 0,12 poin dari tahun 2023. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin kembali menjauh dari garis kemiskinan, sehingga tingkat keparahan kemiskinan meningkat. Kondisi ini tidak terlepas dari meningkatnya Garis Kemiskinan dari Rp596.105 per kapita per bulan pada tahun 2024 menjadi Rp625.337 per kapita per bulan atau naik sebesar 4,90% pada tahun 2025. Kenaikan garis kemiskinan ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan minimum akibat tekanan harga komoditas kebutuhan pokok, sehingga masyarakat miskin membutuhkan pengeluaran yang lebih tinggi untuk dapat keluar dari kategori miskin.

Pada tahun 2025, indeks keparahan kemiskinan kembali menurun menjadi 0,15. Perbaikan ini menunjukkan bahwa intervensi kebijakan mulai berdampak pada pengurangan kesenjangan

pengeluaran di antara penduduk miskin, meskipun fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir mengindikasikan bahwa kelompok miskin masih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Dari sisi ketimpangan, Indeks Gini Kota Blitar pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,340. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,013 poin dibandingkan Maret 2024, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam distribusi pengeluaran penduduk. Penurunan Indeks Gini mengindikasikan bahwa ketimpangan relatif semakin mengecil, meskipun masih berada pada kategori ketimpangan sedang. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penguatan pemerataan ekonomi mulai menunjukkan hasil, namun tetap memerlukan konsistensi kebijakan agar penurunan ketimpangan dapat berjalan seiring dengan penurunan kemiskinan.

Jika dibandingkan dengan Kota Kediri, Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Blitar lebih rendah 0,06 poin. Sedangkan jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Blitar juga lebih rendah 0,11 poin serta lebih rendah 0,04 poin dari Indeks Keparahan Kemiskinan Perkotaan di Indonesia. Hal ini menunjukkan perbedaan rata-rata tingkat pengeluaran per kapita per bulan penduduk yang berada di Garis Kemiskinan tidak sebesar Kota Kediri dan Propinsi Jawa Timur.

Faktor pendorong menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin diantaranya sebagai berikut:

1. Menurunkan beban pengeluaran masyarakat dengan cara pemberian program perlindungan sosial berupa Rastrada, Bansos, BPNT, PKH dan JKN. Program-program tersebut secara langsung membantu menjaga konsumsi minimum rumah tangga miskin, sehingga jarak pengeluaran antara kelompok miskin ekstrem dan garis kemiskinan semakin mengecil.
2. Meningkatkan pendapatan melalui peningkatan kapasitas SDM, pemberdayaan ekonomi, antara lain melalui pelatihan keterampilan, dukungan UMKM, serta fasilitasi akses permodalan. Intervensi ini mendorong kelompok miskin memperoleh tambahan sumber pendapatan dan memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga.
3. Meningkatkan akses layanan dasar, meliputi infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, penyediaan air minum layak, serta bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Peningkatan akses ini tidak hanya mengurangi beban pengeluaran non-konsumsi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat miskin dalam jangka panjang.
4. Menurunnya indeks gini dari 0.353 pada tahun 2024 menjadi 0.34 di tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan distribusi pengeluaran penduduk secara umum. Penurunan ketimpangan ini turut memperkecil jarak kesejahteraan antar kelompok pendapatan, termasuk di dalam kelompok miskin.
5. Meningkatnya Upah Minimum Kota dari Rp2.330.000,00 pada tahun 2024 menjadi Rp2.481.450,00 pada tahun 2025 juga berkontribusi dalam memperkuat daya beli pekerja formal berpenghasilan rendah. Kenaikan sebesar ±6,5% tersebut membantu menjaga

stabilitas pendapatan rumah tangga dan mengurangi risiko pekerja jatuh ke dalam kategori miskin (*working poor*).

6. Stabilitas inflasi sepanjang tahun yang relatif rendah dan terkendali, bahkan disertai beberapa bulan deflasi ringan, turut mendukung penurunan indeks keparahan kemiskinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa harga kebutuhan pokok, khususnya komoditas pangan strategis, tidak mengalami tekanan yang signifikan. Dengan terjaganya stabilitas harga, peningkatan pendapatan nominal masyarakat miskin tidak tergerus oleh kenaikan biaya hidup, sehingga daya beli tetap terjaga dan kesenjangan pengeluaran antar kelompok miskin dapat ditekan.
7. Sinergi lintas sektor, memastikan bahwa bantuan dan program pemberdayaan lebih tepat sasaran kepada kelompok miskin ekstrem.

Faktor penyebab belum optimalnya penurunan ketimpangan antar penduduk diantaranya sebagai berikut:

1. Struktur Ekonomi yang Belum Sepenuhnya Inklusif
   Meskipun angka kemiskinan menurun dan capaian RPJMD telah melampaui target 106,52%, distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya merata. Hal ini tercermin dari Indeks Gini Kota Blitar yang pada Maret 2025 masih berada pada angka 0,340. Walaupun menurun dari 0,353 pada tahun 2024, tingkat tersebut masih menunjukkan kategori ketimpangan sedang, sehingga pemerataan pendapatan belum sepenuhnya optimal
2. Perbedaan Akses terhadap Kesempatan Kerja
   Kenaikan Upah Minimum Kota dari Rp2.330.000,00 pada tahun 2024 menjadi Rp2.481.450,00 pada tahun 2025 (naik ±6,5%) memang meningkatkan daya beli pekerja formal. Namun, tidak seluruh angkatan kerja berada di sektor formal. Sebagian masyarakat masih bekerja di sektor informal dengan produktivitas dan perlindungan pendapatan yang terbatas, sehingga manfaat kenaikan upah belum dirasakan merata
3. Kualitas SDM yang Relatif Stagnan
   Rata-rata lama sekolah hanya meningkat 0,01 tahun, menunjukkan peningkatan kualitas SDM yang sangat terbatas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa mobilitas sosial dan peningkatan produktivitas tenaga kerja berjalan lambat, sehingga ketimpangan pendapatan sulit ditekan secara signifikan dalam jangka pendek
4. Kerentanan terhadap Guncangan Ekonomi
   Meskipun Indeks Keparahan Kemiskinan menurun menjadi **0,15**, fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir (0,12 pada 2023 naik menjadi 0,24 pada 2024) menunjukkan bahwa kelompok miskin masih rentan terhadap tekanan ekonomi. Ketahanan ekonomi rumah tangga berpendapatan rendah masih relatif lemah terhadap perubahan harga dan pendapatan.
5. Inefisiensi anggaran dalam pengentasan keparahan kemiskinan, yang disebabkan:
   a) Kurangnya sinergitas dalam perencanaan dan implementasi program antar Perangkat Daerah
      Program penanggulangan kemiskinan masih berjalan secara sektoral dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu kerangka kebijakan yang terpadu. Perencanaan yang belum berbasis pada peta kemiskinan yang sama berpotensi menimbulkan tumpang tindih kegiatan, duplikasi sasaran, atau bahkan adanya kelompok rentan yang belum tersentuh intervensi. Koordinasi lintas perangkat daerah masih perlu diperkuat.

b) Pendekatan penyusunan strategi kemiskinan belum secara komprehensif dan struktural
Selama ini strategi lebih menitikberatkan pada program jangka pendek seperti penurunan beban pengeluaran melalui bantuan sosial dan peningkatan daya beli. Pendekatan tersebut efektif dalam menekan angka kemiskinan secara cepat, namun belum sepenuhnya menyentuh akar penyebab kemiskinan, seperti rendahnya kualitas pendidikan, keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal, kepemilikan aset produktif, dan keterbatasan kapasitas usaha. Akibatnya, dampak terhadap penurunan keparahan dan ketahanan ekonomi jangka panjang belum optimal.

c) Ketergantungan pada bantuan langsung tunai
Pola intervensi yang dominan berupa bantuan langsung tunai cenderung bersifat konsumtif dan belum sepenuhnya mendorong peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat miskin. Tanpa diimbangi dengan program pemberdayaan yang berkelanjutan (pelatihan, akses permodalan, inkubasi usaha, dan pendampingan), masyarakat berisiko mengalami ketergantungan dan rentan kembali miskin ketika bantuan dihentikan.

d) Belum optimalnya integrasi data kemiskinan
Pemutakhiran dan pemanfaatan data kemiskinan yang belum sepenuhnya terintegrasi (by name by address) dapat mempengaruhi ketepatan sasaran program. Ketidaktepatan sasaran berdampak pada rendahnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran

e) Evaluasi berbasis outcome yang belum maksimal
Pengukuran keberhasilan program masih lebih banyak berbasis serapan anggaran dan output kegiatan, belum sepenuhnya mengukur dampak langsung terhadap penurunan kedalaman dan keparahan kemiskinan. Hal ini menyebabkan alokasi anggaran belum sepenuhnya diarahkan pada intervensi yang paling berdampak.

Dalam rangka memaksimalkan penurunan ketimpangan antar penduduk miskin, kedepan Pemerintah Kota Blitar akan mengeluarkan kebijakan teknis sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program perlindungan sosial melalui pemutakhiran dan integrasi data kesejahteraan sosial secara berkala, sehingga bantuan sosial dan program pemberdayaan benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
2. Memperkuat intervensi bantuan sosial bagi kelompok rentan, khususnya lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga miskin ekstrem, guna mengurangi kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin serta menjaga daya beli terhadap kebutuhan dasar.
3. Mengoptimalkan program bantuan pangan daerah, termasuk penguatan program beras kesejahteraan daerah (Rastrada) dan dukungan pemenuhan gizi keluarga miskin, guna memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar secara lebih merata.
4. Mendorong peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui penguatan program pemberdayaan ekonomi seperti pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, serta program pemberdayaan berbasis kelurahan yang memberikan kesempatan kerja dan usaha bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
5. Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, antara lain melalui pemberian beasiswa bagi keluarga tidak mampu, layanan kesehatan gratis, serta perluasan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.

6. Memperkuat koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, sehingga intervensi yang dilakukan menjadi lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
7. Melakukan evaluasi dan pengendalian secara berkala terhadap efektivitas program penanggulangan kemiskinan, guna memastikan bahwa setiap program memberikan dampak nyata terhadap penurunan ketimpangan antar penduduk miskin.
8. Mengembangkan program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah, khususnya pada kelurahan dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi, sehingga intervensi kebijakan dapat lebih fokus dan memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan ketimpangan.
9. Menguatkan efisiensi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, dengan cara:
   a. Meningkatkan integrasi perencanaan dan penganggaran antar perangkat daerah, sehingga program yang dilaksanakan saling mendukung dan tidak terjadi duplikasi kegiatan.
   b. Memprioritaskan alokasi anggaran pada program yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, seperti pemberdayaan ekonomi, peningkatan keterampilan kerja, dan penciptaan lapangan kerja.
   c. Meningkatkan monitoring dan evaluasi berbasis kinerja, untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran benar-benar memberikan hasil yang optimal terhadap penurunan ketimpangan.
   d. Memanfaatkan sistem informasi dan digitalisasi data kesejahteraan sosial, sehingga proses penyaluran bantuan dan pengendalian program dapat dilakukan secara lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran

KINERJA SASARAN
Meningkatnya ketahanan pangan daerah

Indikator Kinerja:
Indeks Ketahanan Pangan

Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021-2026
80,81	69,56	86,08%	76,18**	91,31%

***) kondisi akhir RPJMD (2026) menyesuaikan Perda Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 dan telah tercapai pada tahun 2024*

Program yang mendukung Sasaran	Anggaran	Realisasi	Capaian Keuangan (%)
Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	123,513,000.00	119,392,250.00	
Program Penanganan Kerawanan Pangan	39,299,100.00	38,467,975.00	
Program Pengawasan Keamanan Pangan	14,235,000.00	14,160,100.00	
TOTAL	**177,048,000.00**	**172,020,325.00**	**97,16%**

Uraian Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	86,08%	97,16%	0,89	In Efisien

Gambar 2.3.26
Tren Indeks Ketahanan Pangan Kota Blitar, Kota Kediri dan Jawa Timur 2021-2025

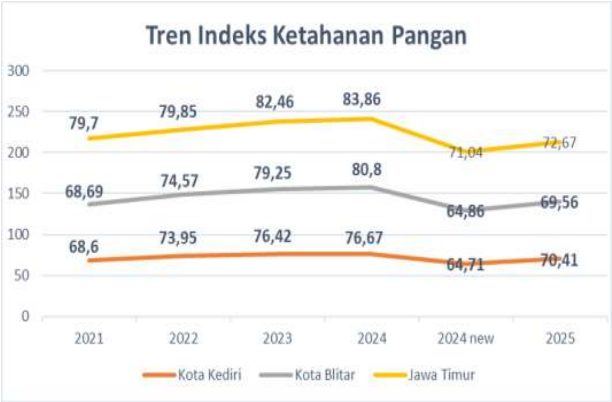

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap individu dalam suatu wilayah atau negara, baik dalam jumlah, kualitas, keamanan, maupun aksesibilitasnya, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang sehat dan produktif. Berdasarkan data dan grafik diatas diketahui bahwa realisasi Indek Ketahanan Pangan tahun 2025 sebesar 69,56% atau tercapai 86,98% dari target kinerja yang telah ditetapkan dan tercapai 91,31% dari target akhir RPJMD 2021-2026.

Dalam kurun waktu 2021 sampai dengan 2024, Indeks Ketahanan Pangan Kota Blitar menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari 68,69 pada tahun 2021, meningkat menjadi 74,57 pada tahun 2022, kemudian 79,25 pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 80,80 pada tahun 2024. Namun demikian, pada tahun 2025 terjadi perubahan metode perhitungan Indeks Ketahanan Pangan, sehingga apabila menggunakan metode baru tersebut, nilai indeks tahun 2024 menjadi 64,86. Dengan metode yang sama, nilai indeks tahun 2025 meningkat menjadi 69,56, yang menunjukkan adanya perbaikan kondisi ketahanan pangan dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, perkembangan Indeks Ketahanan Pangan Kota Blitar menunjukkan tren perbaikan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun perubahan metode pengukuran menyebabkan penyesuaian nilai indeks.

Apabila dibandingkan dengan daerah lain, Indeks Ketahanan Pangan Kota Blitar pada tahun 2025 masih berada sedikit di bawah Kota Kediri, yang tercatat sebesar 70,41, sementara Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sebesar 72,67. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi ketahanan pangan Kota Blitar relatif baik, namun masih memerlukan penguatan agar dapat mendekati capaian rata-rata provinsi. Secara nasional, Indeks Ketahanan Pangan Kota Blitar pada tahun 2025 menempati peringkat ke-322 dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Peringkat

tertinggi diraih oleh Kabupaten Badung dengan skor 80,87, sedangkan skor terendah tercatat pada Kabupaten Nduga di Provinsi Papua Pegunungan dengan nilai 19,93. Posisi tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan Kota Blitar berada pada kategori menengah, sehingga masih diperlukan upaya penguatan melalui peningkatan ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, serta pemanfaatan pangan yang lebih optimal bagi masyarakat.

Indeks Ketahanan Pangan tahun 2025 dihitung dengan mengukur aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan. Indeks Ketahanan Pangan Kota Blitar tahun 2025 tercatat 69,56, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 64,86. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya perbaikan pada aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan masyarakat, meskipun pada saat yang sama terdapat penurunan pada dimensi ketersediaan pangan. Secara komponen, perkembangan indeks tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dimensi	Tahun 2024	Tahun 2025	Perubahan
Indeks Ketersediaan	42,27	38,81	Turun
Indeks Keterjangkauan	78,78	86,24	Naik signifikan
Indeks Pemanfaatan	73,73	83,89	Naik signifikan

Data tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan Kota Blitar pada tahun 2025 terutama didukung oleh meningkatnya keterjangkauan pangan dan kualitas pemanfaatan pangan, sementara aspek ketersediaan pangan masih menjadi tantangan yang perlu diperkuat ke depan.

Faktor pendorong meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatnya Keterjangkauan Pangan Masyarakat
   Indeks keterjangkauan pangan meningkat dari 78,78 pada tahun 2024 menjadi 86,24 pada tahun 2025. Kondisi ini dipengaruhi oleh:
   a. Penurunan angka kemiskinan yang berdampak pada meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan.
   b. Stabilitas harga pangan strategis seperti beras, telur ayam ras, minyak goreng dan daging ayam yang relatif terjaga.
   c. Program perlindungan sosial seperti bantuan pangan, bantuan sosial, serta program perlindungan kesehatan yang membantu menjaga daya beli kelompok rentan.

   Dengan kondisi tersebut, akses masyarakat terhadap pangan menjadi lebih baik dan kesenjangan konsumsi pangan antar kelompok masyarakat dapat ditekan.
2. Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Kualitas Konsumsi
   Indeks pemanfaatan pangan meningkat cukup signifikan dari 73,73 pada tahun 2024 menjadi 83,89 pada tahun 2025. Peningkatan ini didorong oleh:
   a. Peningkatan akses layanan kesehatan masyarakat, termasuk program pencegahan stunting dan peningkatan gizi keluarga.
   b. Perbaikan akses air bersih dan sanitasi, yang mendukung kesehatan masyarakat serta kualitas konsumsi pangan.

c. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan bergizi, tercermin dari perbaikan skor Pola Pangan Harapan (PPH).
d. Meningkatnya tingkat pendidikan perempuan, yang berperan penting dalam pengelolaan konsumsi pangan keluarga.

Perbaikan pada dimensi pemanfaatan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya memiliki akses pangan, tetapi juga memanfaatkan pangan secara lebih sehat dan berkualitas.

3. Dukungan Program Penguatan Ketahanan Pangan Daerah

Program pemerintah daerah juga berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan pangan, antara lain:

a. Pengembangan urban farming dan pertanian perkotaan;
b. Penguatan cadangan pangan pemerintah daerah (CBPD);
c. Program diversifikasi pangan lokal;
d. Peningkatan pengawasan keamanan pangan segar dan pangan siap saji.

Program tersebut memperkuat sistem pangan daerah serta menjaga stabilitas pasokan pangan masyarakat.

Meskipun terjadi peningkatan nilai indeks secara keseluruhan, terdapat beberapa faktor yang masih menjadi tantangan dalam peningkatan ketahanan pangan Kota Blitar, yaitu:

1. Penurunan Dimensi Ketersediaan Pangan

Indeks ketersediaan pangan mengalami penurunan dari 42,27 pada tahun 2024 menjadi 38,81 pada tahun 2025. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

a. Keterbatasan lahan pertanian di wilayah perkotaan, sehingga kapasitas produksi pangan lokal relatif terbatas.
b. Ketergantungan pasokan pangan dari daerah lain, sehingga stabilitas ketersediaan pangan dipengaruhi oleh kondisi produksi regional.
c. Cadangan pangan pemerintah daerah yang masih perlu diperkuat, baik dari sisi volume maupun pengelolaannya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan Kota Blitar masih sangat bergantung pada sistem distribusi pangan antar wilayah.

2. Kerentanan terhadap Fluktuasi Harga Pangan

Meskipun inflasi relatif terkendali, beberapa komoditas pangan strategis masih mengalami fluktuasi harga musiman, yang dapat mempengaruhi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Fluktuasi harga tersebut dapat berdampak pada:

a. menurunnya akses pangan kelompok rentan
b. meningkatnya risiko kerawanan pangan pada rumah tangga miskin

3. Tantangan Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan

Meskipun indeks pemanfaatan meningkat, masih terdapat beberapa tantangan seperti:

a. konsumsi pangan masyarakat yang belum sepenuhnya beragam dan seimbang;
b. stunting pada balita yang masih memerlukan penanganan berkelanjutan;
c. kesenjangan akses air bersih dan sanitasi pada beberapa kelompok masyarakat.

4. Inefisiensi anggaran dalam peningkatan ketahanan pangan daerah, yang disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

a. Kurangnya sinergitas dalam perencanaan dan implementasi program antar Perangkat Daerah
   Program yang berkaitan dengan ketahanan pangan tersebar pada beberapa Perangkat Daerah seperti perangkat daerah yang menangani urusan pertanian, perdagangan, kesehatan, sosial, serta pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, koordinasi perencanaan dan integrasi pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal, sehingga masih terdapat potensi tumpang tindih kegiatan maupun penggunaan anggaran yang belum terfokus pada indikator utama peningkatan ketahanan pangan
b. Pendekatan program yang masih parsial
   Intervensi yang dilakukan masih cenderung berdiri sendiri dan belum sepenuhnya mengintegrasikan tiga dimensi utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Sebagian program lebih menitikberatkan pada peningkatan produksi atau bantuan pangan, namun belum secara komprehensif mengintegrasikan aspek distribusi, stabilitas harga, kualitas konsumsi pangan, serta peningkatan gizi masyarakat.
c. Fokus program masih dominan pada intervensi jangka pendek
   Sebagian besar program masih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan jangka pendek melalui bantuan sosial pangan atau subsidi, sehingga dampaknya terhadap peningkatan kapasitas produksi pangan lokal, penguatan cadangan pangan daerah, dan kemandirian pangan masyarakat belum optimal.
d. Pemanfaatan data ketahanan pangan yang belum sepenuhnya terintegrasi
   Sistem pendataan terkait kondisi kerentanan pangan, rumah tangga rentan, serta distribusi wilayah rawan pangan masih memerlukan penguatan integrasi antar sistem informasi. Kondisi ini menyebabkan penentuan sasaran program dan alokasi anggaran belum sepenuhnya berbasis data yang akurat dan mutakhir.
e. Terbatasnya dukungan terhadap penguatan sistem pangan local
   Dukungan anggaran terhadap pengembangan pertanian perkotaan, lumbung pangan masyarakat, penguatan cadangan pangan pemerintah daerah, serta pengembangan rantai pasok pangan lokal masih relatif terbatas, sehingga potensi penguatan ketahanan pangan berbasis komunitas belum dimanfaatkan secara optimal.
f. Belum optimalnya penguatan rantai distribusi dan tata niaga pangan
   Keterbatasan infrastruktur distribusi, penyimpanan pangan, serta penguatan sistem perdagangan pangan menyebabkan biaya distribusi relatif tinggi dan berpotensi mempengaruhi stabilitas harga pangan di tingkat konsumen.

Dalam rangka meningkatkan Indeks Ketahanan Pangan, kedepan Pemerintah Kota Blitar akan melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Penguatan ketersediaan pangan daerah melalui optimalisasi produksi pangan lokal, pengembangan urban farming, pemanfaatan lahan pekarangan, serta penguatan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat berbasis komunitas.
2. Peningkatan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan rumah tangga miskin, melalui stabilisasi harga pangan, penguatan distribusi pangan, serta pelaksanaan program bantuan pangan yang lebih tepat sasaran.

3. Peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan, melalui edukasi diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, peningkatan kesadaran gizi masyarakat, serta pengawasan keamanan pangan yang beredar di masyarakat.
4. Penguatan sistem distribusi dan rantai pasok pangan, dengan memperbaiki koordinasi antar perangkat daerah, optimalisasi peran pasar daerah, serta pemanfaatan sistem informasi pangan untuk memantau ketersediaan dan harga pangan secara berkala.
5. Pengembangan lumbung pangan masyarakat dan cadangan pangan berbasis komunitas, sebagai instrumen stabilisasi pasokan pangan pada tingkat kelurahan atau kelompok masyarakat, terutama dalam menghadapi potensi kerawanan pangan dan fluktuasi harga.
6. Penguatan kolaborasi lintas sektor, antara pemerintah daerah, kelompok tani, pelaku usaha, serta masyarakat dalam pengembangan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan lokal.
7. Peningkatan efisiensi penggunaan anggaran ketahanan pangan, melalui integrasi program lintas perangkat daerah, penguatan perencanaan berbasis data, serta pemanfaatan program pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kemandirian pangan.

Pada tahun 2024, Indeks Ketahanan Pangan Kota Blitar mencapai 80,8, yang berarti telah melampaui target akhir RPJMD sebesar 76,18 berdasarkan metode perhitungan lama. Namun demikian, seiring dengan adanya perubahan metode perhitungan, standar penilaian, dan indikator penilaian agar lebih menggambarkan kondisi sebenarnya, Indeks Ketahanan Pangan Kota Blitar pada tahun 2025 menunjukkan realisasi indeks sebesar 69,56. Dampaknya banyak daerah yang tahun 2024 masuk zona hijau, karena menggunakan metode baru menjadi masuk zona pink.

Apabila disandingkan dengan target RPJMD yang masih menggunakan pendekatan perhitungan lama sebesar 76,18, maka capaian tersebut secara metodologis belum sepenuhnya dapat dibandingkan secara langsung. Perbedaan pendekatan pengukuran ini menunjukkan perlunya penyesuaian interpretasi capaian kinerja serta penguatan kebijakan dan program ketahanan pangan, agar peningkatan indeks tidak hanya bersifat administratif dalam perubahan metode, tetapi benar-benar mencerminkan perbaikan kondisi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan di Kota Blitar.

No	Kinerja Utama/ Sasaran RPJMD/ Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian 2025	Program	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan	Tingkat Efisien si
1	2	3	4	5=2x 3-4/3*100	6	7	8	9=8/7*100	10=5/9
4	**Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat (Angka Kemiskinan)**	**6,63**	**6,6**	**100,45**	Pengelolaan Pendidikan	60.010.424.470,00	53.507.301.127,00		

No	Kinerja Utama/ Sasaran RPJMD/ Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian 2025	Program	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan	Tingkat Efisien si
					Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	12.499.516.603,41	11.641.474.687,00		
					Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	319.434.225,00	311.787.144,00		
					Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.789.075.900,00	2.672.183.085,00		
					Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	68.129.761.400,00	65.795.237.148,83		
					Rehabilitasi Sosial	957.632.069,00	914.688.229,00		
					Program Pemberdayaan Sosial	1.087.764.600,00	971.778.691,00		
					Perlindungan Dan Jaminan Sosial	14.587.442.039,00	14.232.352.900,00		
					Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	123.513.900,00	119.392.250,00		
					Penanganan Kerawanan Pangan	39.299.100,00	38.467.975,00		
					Pengawasan Keamanan Pangan	14.235.000,00	14.160.100,00		
					Pengembangan Perumahan	1.810.982.315,00	1.705.194.410,00		
					Kawasan Permukiman	3.513.381.566,07	2.966.768.142,00		
					Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.999.672.000,00	1.959.160.652,00		
					Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	7.820.076.567,00	7.668.135.657,00		
					Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	4.807.271.449,52	4.683.957.400,00		
					Penataan Bangunan Gedung	9.388.632.271,45	8.838.590.620,00		
					Penyelenggaraan Jalan	9.493.921.532,00	9.051.999.958,00		
					Pengembangan	612.177.100,00	449.447.483,00		

No	Kinerja Utama/ Sasaran RPJMD/ Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian 2025	Program	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan	Tingkat Efisien si
					Jasa Konstruksi				
					Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	265.365.000,00	126.601.000,00		
					Perencanaan Dan Pembangunan Industri	3.548.677.514,00	3.022.927.547,00		
					Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	692.141.200,00	662.459.038,00		
					Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	786.109.200,00	761.209.879,00		
					Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.233.256.087,00	1.182.988.036,00		
					Penyuluhan Pertanian	2.049.116.990,00	1.954.190.124,00		
					Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	46.465.745.279,13	43.285.653.231,00		
					Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.699.031.000,00	2.473.147.442,00		
					Penempatan Tenaga Kerja	93.266.000,00	81.449.099,00		
					Hubungan Industrial	94.019.800,00	52.943.590,00		
Capaian Kinerja				**100,45**	**TOTAL**	**257.930.942.177,58**	**241.145.646.644,83**	**93,49**	**1,07**

Dari hasil pencapaian kinerja diatas jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja keuangan akan menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 1,07 atau masuk kategori efisien

KINERJA UTAMA 5:
Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Indikator Kinerja: Indeks Gini

Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
0,352	0,340	103,41%	0,341	100,29%

Gambar 2.3.27
Indeks Gini Kota Blitar Tahun 2023 – 2025

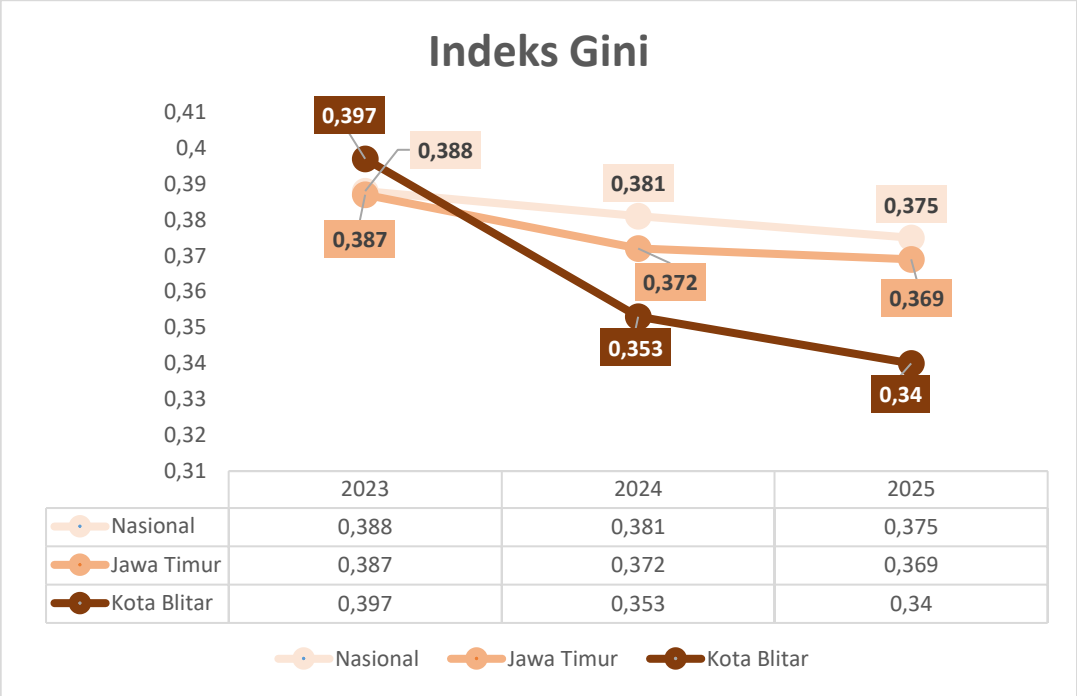

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Indeks Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Semakin tinggi nilai Indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai Indeks Gini adalah nol maka artinya terdapat kemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna.

Kota Blitar menunjukkan keberhasilan dalam menekan angka ketimpangan pendapatan selama periode 2023 hingga 2025. Pada tahun 2023, Kota Blitar mencatatkan Indeks Gini sebesar 0,397, yang merupakan angka tertinggi jika dibandingkan dengan level Nasional (0,388) dan Provinsi Jawa Timur (0,387). Angka ini mengindikasikan bahwa pada saat itu, distribusi pengeluaran atau pendapatan di Kota Blitar berada pada ambang batas ketimpangan sedang yang cukup tinggi.

Namun, dalam kurun waktu dua tahun, terjadi perbaikan yang sangat signifikan. Kota Blitar berhasil menurunkan indeksnya secara konsisten hingga menyentuh angka 0,340 pada tahun 2025. Penurunan sebesar 0,057 poin ini jauh lebih tajam dibandingkan dengan penurunan di tingkat Nasional dan Jawa Timur yang cenderung bergerak lebih lambat. Penurunan ini mengindikasikan adanya peningkatan distribusi pendapatan yang lebih merata serta keberhasilan

kebijakan program perlindungan dan jaminan sosial yang tepat sasaran dan diiringi dengan upaya pemberdayaan untuk meningkatkan pendapatan.

Gambar 2.3.28
Indeks Gini di Wilayah Karisidenan Kediri, Maret 2024-Maret 2025

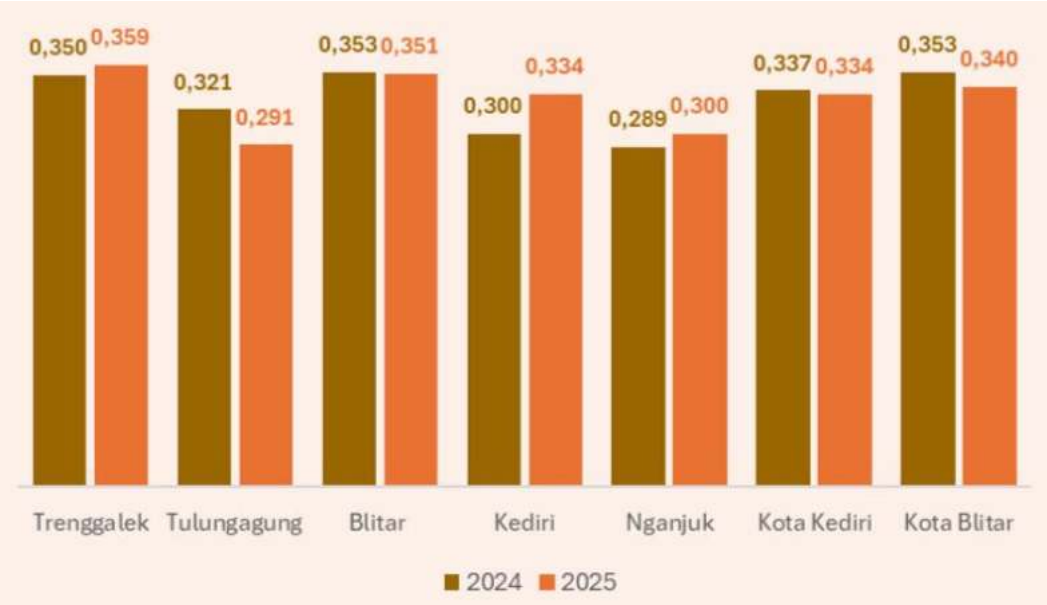

Sumber: Badan Pusat Satistik, 2025

Berdasarkan data Susenas periode Maret 2024 hingga Maret 2025, dinamika ketimpangan pendapatan di wilayah Karesidenan Kediri menunjukkan variasi capaian antar daerah. Kota Blitar mencatatkan tren perbaikan kinerja yang positif, di mana angka Rasio Gini mengalami penurunan dari 0,353 pada tahun 2024 menjadi 0,340 pada tahun 2025. Penurunan sebesar 0,013 poin ini menjadi indikator keberhasilan intervensi kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong pemerataan ekonomi, yang sekaligus menempatkan Kota Blitar sebagai salah satu daerah yang berhasil menekan tingkat ketimpangan bersama dengan Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, dan Kota Kediri.

Dalam perbandingan regional, capaian 0,340 yang diraih Kota Blitar pada tahun 2025 berada pada level moderat di antara daerah lainnya. Kota Blitar mencatat tingkat ketimpangan yang lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Trenggalek (0,359) dan Kabupaten Blitar (0,351) pada tahun yang sama. Meskipun telah menunjukkan perbaikan, angka tersebut masih berada di atas capaian Kabupaten Tulungagung (0,291) dan Nganjuk (0,300) yang merupakan wilayah dengan tingkat ketimpangan terendah dalam perbandingan ini. Dinamika ini memperlihatkan adanya tantangan struktural yang berbeda di setiap wilayah, terutama dengan adanya tren kenaikan Rasio Gini di Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Kediri, dan Nganjuk.

Meskipun nilai Indeks Gini Kota Blitar mengalami penurunan, tantangan terkait kemandirian ekonomi masyarakat penerima bantuan masih perlu diselesaikan. Tingginya

ketergantungan terhadap bantuan sosial dinilai menurunkan motivasi masyarakat untuk menjadi mandiri secara ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan program perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran, yang didukung oleh perbaikan kualitas data penerima manfaat serta peralihan menuju pemberian bantuan sosial yang bersifat produktif.

Dari hasil pencapaian kinerja diatas jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja keuangan akan menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut:

No	Kinerja Utama/ Sasaran RPJMD/ Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian 2025	Program	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=2x 3-4/3*100	6	7	8	9=8/7*100	10=5/9
5.	Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat (Indeks Gini)	0,352	0,340	103,41					
					Program Rehabilitasi sosial	957.632.069,00	914.688.229,00		
					Program Pemberdayaan sosial	1.087.764.600,00	971.778.691,00		
					TOTAL	2.045.396.669,00	1.886.466.920,00	92,23	1,12

Berdasarkan tabel di atas, terdapat efisiensi kinerja terhadap anggaran. Hal ini tak lepas dari strategi Pemerintah Kota Blitar dalam mengurangi angka kemiskinan melalui upaya pemerataan pendapatan penduduk dan pengurangan kantong kemiskinan yang dilakukan secara bersama dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

KINERJA UTAMA 6:
Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat
Indikator: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021-2026
4,97	4,28	113,88%	7,04**	139,20%

***) kondisi akhir RPJMD (2026) menyesuaikan Perda Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 dan telah tercapai pada tahun 2024*

Pengangguran merupakan salah satu indikator penting yang menggambarkan kondisi ketenagakerjaan suatu wilayah. Penduduk yang tergolong pengangguran adalah mereka yang berusia 15 tahun ke atas dan tidak bekerja, namun sedang mencari pekerjaan; mempersiapkan usaha baru; telah diterima bekerja atau siap berusaha tetapi belum mulai; serta mereka yang merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan (putus asa). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

digunakan untuk mengukur proporsi angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Indikator ini mencerminkan sejauh mana ketersediaan lapangan kerja mampu menampung tenaga kerja yang siap dan bersedia bekerja. Selain itu, TPT juga berfungsi sebagai ukuran penting dalam menilai efektivitas pembangunan ekonomi dalam menciptakan kesempatan kerja serta menilai kualitas penyerapan tenaga kerja.

Gambar 2.3.29
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Blitar, Agustus 2024-Agustus 2025

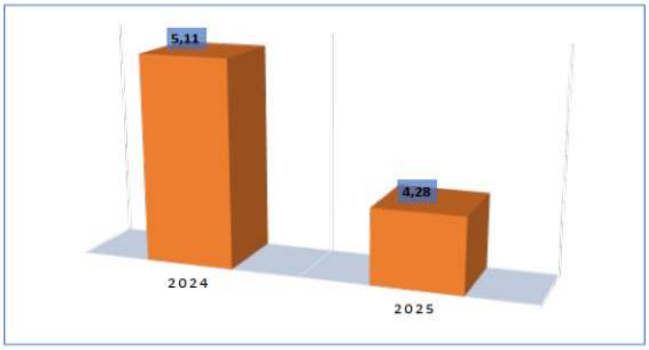

Sumber: BRS No. 16/12/3572 Th. IX, 16 Desember 2025

TPT hasil Sakernas Agustus 2025 sebesar 4,28 persen. Hal ini berarti dari 100 orang Angkatan kerja, terdapat sekitar empat orang yang menganggur. Dibanding Agustus 2024, TPT pada Agustus 2025 mengalami penurunan sebesar 0,83 persen poin.

TPT menurut Jenis Kelamin

Pada Agustus 2025, TPT laki-laki sebesar 4,97 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 3,43 persen. Dibandingkan Agustus 2024, TPT laki-laki cenderung meningkat sebesar 0,16 persen poin. Sebaliknya, TPT perempuan cenderung mengalami penurunan sebesar 2,06 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya. Perbedaan tingkat pengangguran antara laki-laki dan perempuan ini menunjukkan adanya variasi karakteristik angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan di pasar kerja, ataupun mengindikasikan kondisi yang lebih baik atau lebih buruk bagi salah satu kelompok.

Gambar 2.3.30
Persentase penduduk menganggur menurut jenis kelamin,
Agustus 2024-Agustus 2025

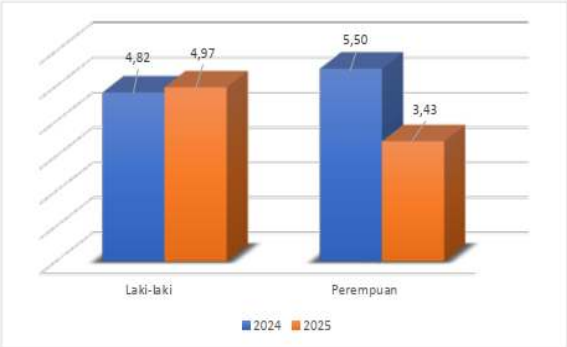

Sumber: BPS, Agustus 2025

TPT menurut Tingkat Pendidikan

Dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan pada Agustus 2025, TPT untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) menunjukkan angka paling tinggi, yaitu 6,45 persen kemudian diikuti TPT SMA Kejuruan (SMK), Diploma I/II/III dan Universitas masing-masing secara berurutan sebesar 4,62 persen, 4,09 persen dan 4,03 persen. Sementara itu, TPT tingkat pendidikan SMP dan SD kebawah memiliki nilai lebih kecil yaitu masing-masing sebesar 3,41 persen dan 2,62 persen.

Dibandingkan Agustus 2024, TPT lulusan SMP, SMA Umum dan Universitas menunjukkan penurunan masing-masing sebesar 0,04 persen poin, 0,81 persen poin dan 5,37 persen poin. Penyerapan tenaga kerja setahun terakhir banyak terjadi pada pekerja dengan tingkat pendidikan universitas. Sebaliknya TPT lulusan SD kebawah, SMK dan Diploma menunjukkan kecenderungan meningkat sebesar 0,09 poin persen, 0,15 persen poin dan 4,09 persen poin. Pekerja dengan tingkat pendidikan diploma banyak yang tidak terserap pada kondisi tahun 2025.

Gambar 2.3.31
Persentase penduduk menganggur menurut tingkat pendidikan, Agustus 2024-Agustus 2025

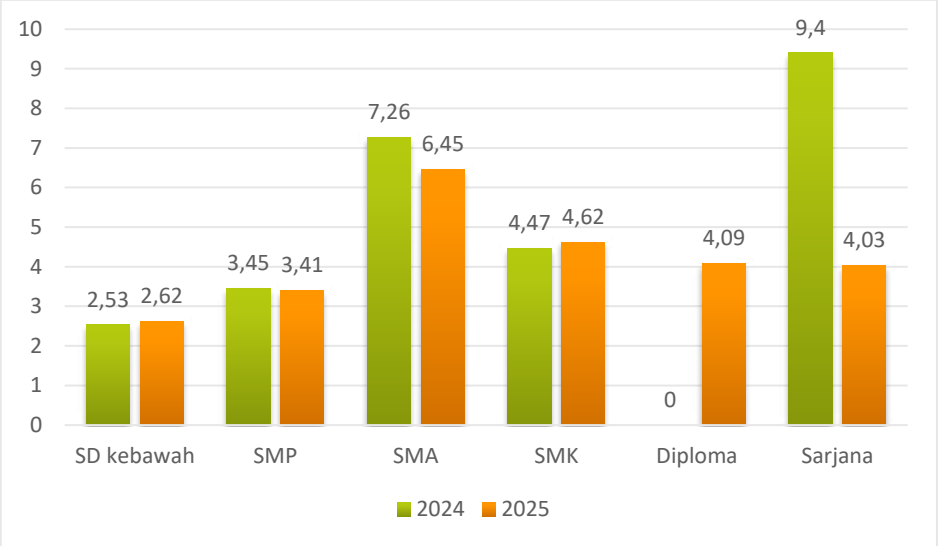

Sumber: BPS, Agustus 2025

Perbandingan TPAK dan TPT Kota Blitar dengan Provinsi Jawa Timur

Jika dibandingkan dengan rata-rata TPAK Jawa Timur yang mencapai 73,98 persen, secara persentase TPAK Kota Blitar pada Agustus 2025 lebih tinggi yaitu 75,95 persen. Hal tersebut mengindikasikan persentase angkatan kerja yang siap masuk ke pasar tenaga kerja di Kota Blitar lebih besar dibandingkan persentase angkatan kerja secara keseluruhan di Provinsi Jawa Timur. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Blitar juga cenderung mengalami penurunan setiap tahun namun masih berada diatas TPT Provinsi Jawa Timur. TPT Kota Blitar tahun 2025 sebesar 4,28 persen, masih berada di atas TPT Jawa Timur sebesar 3,88 persen. Dari tenaga kerja yang

tersedia di Kota Blitar tahun 2025, masih menyisakan angka pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur.

Gambar 2.3.32
Perbandingan TPAK dan TPT Kota Blitar dan Provinsi Jawa Timur, Agustus 2025

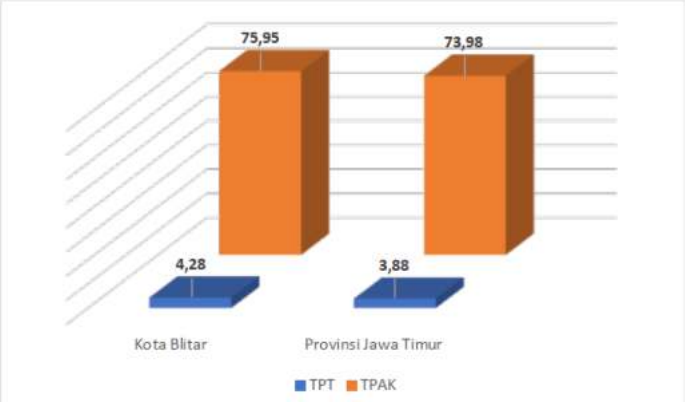

Sumber: BPS, Agustus 2025

TPT merupakan bagian dari TPAK. TPT mencerminkan dari tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja sedangkan TPAK **merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja/usia produktif 15 tahun ke atas.** Harapannya jika jumlah pengangguran berkurang maka otomatis tingkat partisipasi angkatan kerja naik. **Adapun keberhasilan penurunan TPT yakni** disebabkan oleh:

1) Sebagian lapangan kerja sudah sesuai dengan kompetensi Pencari kerja atau berdasarkan pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2) Pemerintah Kota Blitar telah berhasil memfasilitasi pencari kerja terdaftar dan sudah ditempatkan sesuai dengan kompetensinya
3) Pemerintah Kota Blitar telah memfasilitasi peningkatan penggunaan teknologi dalam pencarian penempatan kerja melalui pelatihan pencari kerja berbasis kompetensi dan vokasional
4) Penduduk bekerja di Kota Blitar tahun 2025, pekerja yang bekerja pada sektor pertanian sebesar 9,01% (8.101 orang), pada sektor manufaktur 21,39% (19.232 orang) dan pada sektor jasa 69,60% (62.579 orang) *(Sumber: BRS No. 16/12/3572 Th. IX, 16 Desember 2025)*

Sedangkan faktor penghambat/kendala yang masih dihadapi dan harus dicarikan solusi adalah:

1) Angkatan kerja yang cenderung pemilih dalam tersedianya lapangan kerja
   Mendapatkan pekerjaan layak tentunya diharapkan oleh setiap orang. Salah satu usaha untuk mendapatkan kesempatan itu adalah dengan pendidikan tinggi yang ditamatkan. Dengan semakin ketatnya tingkat persaingan di lapangan usaha serta keterbatasan ketersediaan lapangan usaha, sebagian orang berusaha dengan meningkatkan kualitas keterampilan yang dimiliki. Namun seiring dengan kondisi tersebut muncul permasalahan yaitu lulusan pendidikan tinggi (khususnya lulusan Diploma) pada tahun 2025 secara keseluruhan tidak terserap pada lapangan kerja yang ada, salah satunya disebabkan karena sebagian besar lulusan tinggi

cenderung enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Sehingga sebagian dari mereka memilih untuk menganggur sementara waktu sambil menunggu pekerjaan dengan keahlian dan penghasilan yang sesuai

2) Masyarakat yang sudah mengikuti pelatihan ketrampilan/kewirausahaan belum menindaklanjuti/belum mengimplementasikan ilmu yang didapat
3) Belum terserapnya secara optimal angkatan kerja pada program padat karya

Untuk mengatasi hambatan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu dilakukan beberapa strategi untuk menurunkan TPT di Kota Blitar. Adapun strategi yang dapat dilakukan yaitu:

1) Strategi ekonomi melalui upaya peningkatan investasi yaitu mengoptimalkan investasi dalam sektor-sektor yang memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja
2) Strategi pendidikan dan pelatihan melalui peningkatan kemampuan dan ketrampilan tenaga kerja, peningkatan pelatihan vokasional, peningkatan program magang, pemberian pembekalan ketrampilan / kewirausaan dan monitoring hasil pelatihan yang berkelanjutan
3) Strategi ketenagakerjaan melalui peningkatan pembukaan lapangan kerja, program pemberdayaan masyarakat, kerjasama dengan industri, optimalisasi publikasi kerja *online* dan *offline* serta peningkatan program padat karya
4) Melakukan pengurangan data pengangguran *by name by address by case (BNBABC)*

KINERJA SASARAN
Menurunnya Tingkat Pengangguran
Indikator: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Target 2025	**: 73,50%**
Realisasi 2025	**: 75,95%**
Capaian 2025	**: 103,33%**

RPJMD 2026	
Target: 72,00%	**Capaian: 105,49%**

TPAK merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur sejauh mana angkatan kerja berkontribusi terhadap jumlah penduduk usia lima belas tahun keatas dalam suatu wilayah. TPAK adalah indikator ketenagakerjaan yang penting dan digunakan untuk menganalisa serta mengukur capaian hasil pembangunan. Partisipasi angkatan kerja juga dapat diukur dengan TPAK yang berguna untuk mengetahui besarnya persentase penduduk usia kerja yang berpotensi untuk aktif secara ekonomi di suatu wilayah.

Nilai TPAK yang terus menurun menandakan bahwa ketersediaan penduduk usia kerja yang dapat terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi (*labour supply*) semakin sedikit sedangkan jika Nilai TPAK naik mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu daerah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) **merupakan rasio antara**

jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja/usia produktif 15 tahun ke atas. TPAK Kota Blitar pada tahun 2025 sebesar 75,95 persen atau naik sebesar 5,51 poin dibanding tahun 2024 yaitu sebesar 70,44 persen. Hal ini bisa diartikan juga bahwa pada tahun 2025 tersedia angkatan kerja sebanyak 93.931 orang atau lebih banyak 7.885 orang dibanding angkatan kerja tahun 2024 sebanyak 80.406 dan mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Selain itu indikator ini mencerminkan Pemerintah Kota Blitar telah mampu menyediakan lapangan kerja yang menampung tenaga kerja yang siap dan bersedia bekerja.

Berdasarkan jenis kelamin pada Agustus 2025, TPAK laki-laki sebesar 84,84 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 67,37 persen. Dibandingkan pada Agustus 2024, TPAK laki-laki mengalami peningkatan sebesar 2,82 persen poin. Demikian pula TPAK perempuan mengalami kenaikan sebesar 8,14 persen poin, artinya meskipun sama-sama mengalami peningkatan namun kesempatan laki-laki untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi masih lebih tinggi dibanding kesempatan perempuan. Ketimpangan TPAK laki-laki dan perempuan masih tetap terlihat. TPAK pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan karena umumnya laki-laki berperan sebagai pencari nafkah, sedangkan perempuan lebih banyak fokus mengurus rumah tangga.

Tabel 2.3.14
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2024-Agustus 2025

Keadaan Ketenagakerjaan	Satuan	Agustus 2024	Agustus 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk Usia Kerja (usia 15 tahun atau lebih)	orang	122.158	123.667
- Laki-Laki (orang)	orang	60.080	60.782
- Perempuan (orang)	orang	62.078	62.885
Angkatan Kerja (AK)	orang	86.046	93.931
- **Bekerja (orang)**	orang	81.652	89.912
- Pengangguran (orang)	orang	4.394	4.019
Bukan Angkatan Kerja (BAK)	orang	36.112	29.736
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	5,11	4,28
- Laki-laki	persen	4,82	4,97
- Perempuan	persen	5,50	3,43
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	persen	70,44	75,95
- Laki-Laki	persen	82,02	84,84
- Perempuan	persen	59,23	67,37

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Penduduk yang bekerja pada Agustus 2025 sebanyak 89.912 orang, bertambah sekitar 8.260 orang dari tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan Agustus 2024, penyerapan tenaga kerja sektor pertanian mengalami peningkatan sebesar 2,08 persen dari 6,93 persen menjadi 9,01 persen. Berbeda kondisinya di sektor jasa dan manufaktur yang terjadi penurunan penyerapan

tenaga kerja dibanding sektor pertanian. Sektor jasa terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,61 poin dari 70,21 persen menjadi 69,60 persen. Sedangkan penyerapan tenaga kerja pada sektor manufaktur menurun sebesar 1,47 poin dari 22,86 persen menjadi 21,39 persen. Penurunan tenaga kerja pada kedua sektor ini diduga beralih ke sektor pertanian sebagai pekerjaan utama.

Gambar 2.3.33
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2024-2025

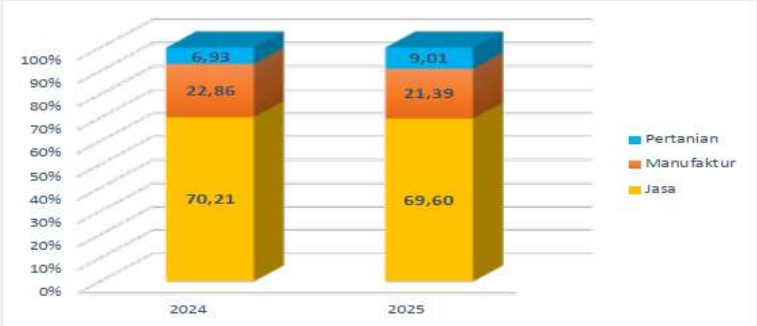

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2025

Meskipun memiliki kontribusi kecil, sektor Pertanian perlahan mulai diminati oleh penduduk Kota Blitar. Sedangkan sektor manufaktur cenderung mulai melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, keadaan sektor Jasa meskipun kontribusinya menurun namun tetap menjadi primadona karena merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kota Blitar. Hal ini didukung oleh pertumbuhan perdagangan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya yang berkembang pesat di Kota Blitar dibanding sektor lainnya.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, seluruh sektor didominasi oleh pekerja laki-laki yaitu Sektor Pertanian sebagai sektor dengan pekerja laki-laki terbesar (74,13 persen), Sektor Manufaktur (54,80 persen) dan Sektor Jasa (51,87 persen). Sementara itu, sektor dengan nilai persentase pekerja perempuan terbesar terdapat di sektor Jasa (48,13 persen), Sektor Manufaktur (45,20 persen) dan Sektor Pertanian (25,87 persen).

Gambar 2.3.34
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, Agustus 2025

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2025

Dari seluruh penduduk bekerja di Kota Blitar pada Agustus 2025, status pekerjaan utama terbanyak adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai dengan persentase sebesar 49,55 persen diikuti oleh berusaha sendiri sebesar 21,19 persen. Sementara yang paling sedikit berstatus sebagai berusaha dibantu pekerja tetap dan pekerja bebas yaitu masing-masing sebesar 4,52 persen.

Dibandingkan Agustus 2024, status pekerjaan yang mengalami peningkatan adalah buruh/karyawan/pegawai (3,47 persen poin), pekerja keluarga/tak dibayar (0,42 persen poin), berusaha dibantu pekerja tidak tetap/tidak dibayar (0,41 persen poin) dan pekerja bebas (0,23 persen poin), sementara status pekerjaan yang lain mengalami penurunan.

Peningkatan persentase jumlah bekerja yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai mengindikasikan bahwa perekonomian di Kota Blitar mulai berangsur membaik semenjak Pandemi Covid-19. Sebaliknya persentase penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri cenderung menurun.

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar).

Gambar 2.3.35
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Agustus 2025

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2025

Pada Agustus 2025, penduduk yang bekerja di kegiatan formal (berusaha dibantu pekerja tetap dan buruh/karyawan/pegawai) sebanyak 41.935 orang (46,64 persen), sedangkan yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 47.977 orang (53,36 persen). Persentase penduduk bekerja di kegiatan formal pada Agustus 2025 turun dibandingkan Agustus 2024. Sementara itu persentase penduduk yang bekerja di kegiatan informal Agustus 2025 justru meningkat sebesar 5,05 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja di Kota Blitar hingga Agustus 2025, didominasi oleh penduduk bekerja yang berpendidikan SMA Kejuruan sebanyak 24.073 orang atau 26,77 persen dari total penduduk bekerja. Sedangkan penduduk bekerja yang berpendidikan SMA Umum terdapat 16.295 orang (18,12 persen). Sementara itu tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma dan Universitas sebanyak 17.983 orang atau 20,00 persen. Walaupun demikian masih ada penduduk bekerja berpendidikan SMP ke bawah sebanyak 31.561 orang (35,10 persen).

Gambar 2.3.36
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2025

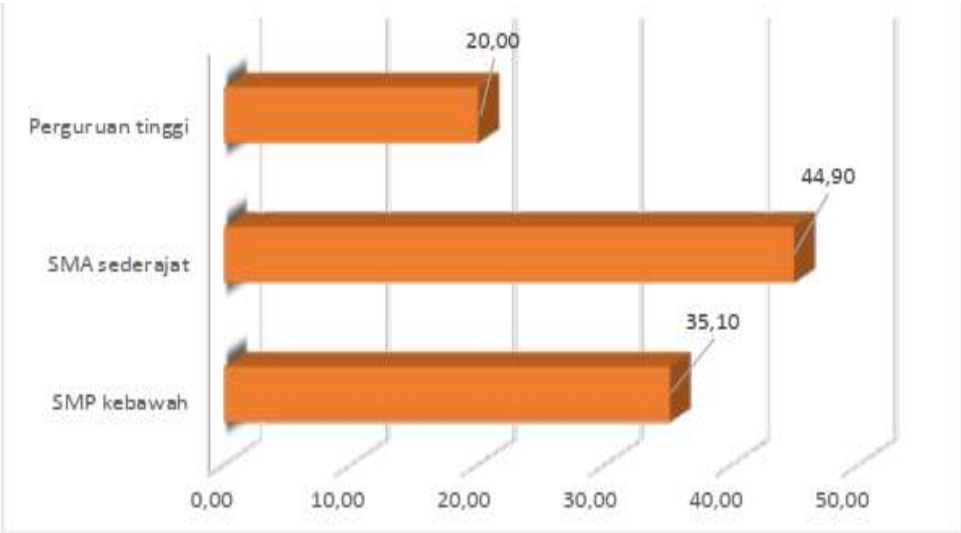

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2025

Dibandingkan dengan Agustus 2024, jumlah penduduk bekerja berpendidikan SMA Umum dan Kejuruan bertambah sebanyak 3.123 orang. Demikian pula tenaga kerja yang berpendidikan SMP ke bawah dan Diploma ke atas juga meningkat masing-masing sebanyak 2.572 orang dan 2.565 orang.

Gambar 2.3.37
Perbandingan TPAK Kota Blitar dengan Kabupaten/Kota Sekitar 2023-2025

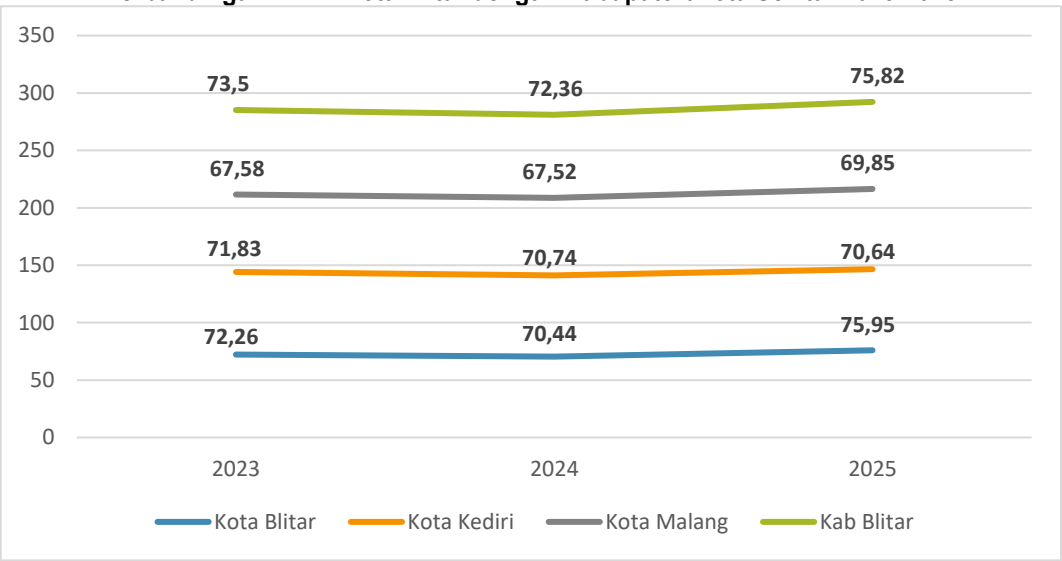

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2025

Jika dibandingkan dengan TPAK Kota Malang dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang mencapai 67,58 pada tahun 2023; 67,52 pada tahun 2024; dan 69,85 pada tahun 2025, Kota Blitar berada diatasnya yakni 72,26 pada tahun 2023; 70,44 pada tahun 2024; dan 75,95 pada tahun 2025. Namun jika dibandingkan dengan Kota Kediri pada tahun 2023 dan tahun 2025 Kota Blitar lebih tinggi 0,43 poin dan 5,31 poin. Sedangkan pada tahun 2024 Kota Blitar lebih rendah capaiannya dimana Kota Blitar berada 0,3 poin dibawah capaian Kota Kediri.

Berbeda lagi dengan daerah yang terdekat dengan Kota Blitar yakni Kabupaten Blitar dalam kurun waktu 2023-2024 capaian TPAKnya diatas capaian Kota Blitar yakni 73,5 pada tahun 2023 dan 72,36 pada tahun 2024. Sedangkan pada tahun 2025 capaian Kabupaten Blitar sedikit berada dibawah Kota Blitar yakni 75,82. Hal ini disebabkan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar aktif melaksanakan pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan pengembangan *softskill* bagi penduduk yang masuk pada Angkatan Kerja, banyaknya lowongan pekerjaan yang dipublish di papan pengumuman ataupun medsos Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar sehingga memudahkan pencaker untuk mengakses lowongan kerja tersebut serta adanya pendataan pencaker secara berkelanjutan.

No	Kinerja Utama/ Sasaran RPJMD/ Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian 2025	Program	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5 = (2*3)-4/3 *100	6	7	8	9	10 = 5/9
6.	Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat								
	TPT	4,97	4,28	113,88	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.699.031.000,00	2.473.147.442,00		
					Program Penempatan Tenaga Kerja	93.266.000,00	81.449.099,00		
					Program Hubungan Industrial	94.019.800,00	52.943.590,00		
					TOTAL	2.886.316.800,00	2.607.540.131,00	90,34	1,26

Dari hasil pencapaian kinerja diatas jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja keuangan akan menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 1,26 atau masuk kategori efisien

KINERJA UTAMA 7

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

Indikator Kinerja: Laju Pertumbuhan Ekonomi

Target s/d 2025	Realisasi s/d 2025	Capaian 2025	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
5,37 %	5,31%	98,8 %	5,5%*	96,54 %

*** target berdasarkan RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026.*

Untuk mengukur kinerja meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kota Blitar digunakan indikator laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. PDRB merupakan agregat atau total nilai tambah yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang beroperasi dalam satu kurun waktu tertentu sehingga besaran PDRB mencerminkan potensi ekonomi suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya.

Dalam periode Tahun 2022–2025, kinerja pertumbuhan ekonomi Kota Blitar menunjukkan tren yang positif, stabil, dan kompetitif dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Timur maupun nasional. Berikut Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar, Tahun 2022-2025 dibandingkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional.

Gambar 2.3.38
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar dengan Jawa Timur dan Nasional 2022-2025

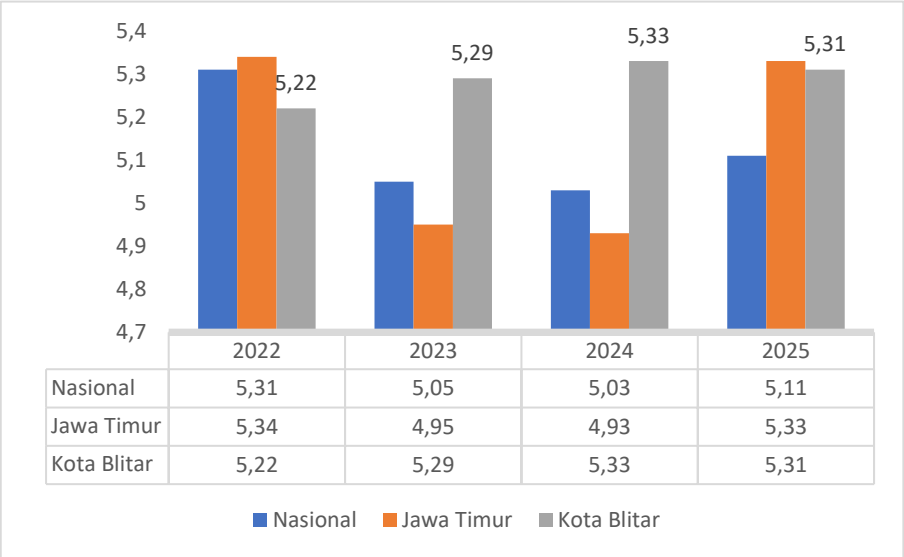

Sumber: BRS Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar Tahun 2025 diolah

Pada Tahun 2022, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,22%, menandai akselerasi pemulihan dan kembalinya aktivitas ekonomi masyarakat secara signifikan. Pada Tahun 2023 dan 2024, pertumbuhan ekonomi Kota Blitar masing-masing sebesar 5,29% dan 5,33%, berada di atas rata-rata provinsi maupun nasional. Secara substantif, periode ini menunjukkan transisi dari fase pemulihan menuju fase pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. Namun Perekonomian Kota Blitar pada tahun 2025 mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar 5,31 persen. Perlambatan ini terjadi karena adanya penurunan kegiatan perekonomian di Kota Blitar, ditandai dengan berkurangnya kegiatan konstruksi, administrasi pemerintah, dan jasa lainnya karena dampak efisiensi. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kota Blitar berada di bawah pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tumbuh cepat sebesar 5,33 persen (tahun 2024 sebesar 4,93 persen).

Tabel 2.3.15
Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2022 s.d 2024

No	Sektor / Lapangan Usaha	2022	2023	2024	2025
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	-6,97	1,54	-7,19	4,15
2	Pertambangan & Penggalian	-9,73	0,73	-20,40	-77,07
3	Industri Pengolahan	6,63	2,57	5,11	6,57
4	Pengadaan Listrik & Gas	7,47	5,36	2,75	6,11
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	4,9	5,39	3,60	0,97
6	Konstruksi	7,46	6,50	5,96	4,68
7	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi mobil & Sepeda Motor	6,87	4,69	5,08	5,62

No	Sektor / Lapangan Usaha	2022	2023	2024	2025
8	Transportasi & Pergudangan	13,24	9,94	6,53	6,91
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	9,08	8,20	6,51	6,74
10	Informasi & Komunikasi	2,39	6,45	5,11	7,25
11	Jasa Keuangan & Asuransi	3,79	3,12	4,90	1,91
12	Real Estate	3,88	3,35	3,77	3,16
13	Jasa Perusahaan	4,68	5,97	6,18	6,91
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan	2,47	0,75	6,79	1,08
15	Jasa Pendidikan	0,88	6,39	6,42	6,43
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	0,56	6,17	2,40	6,29
17	Jasa Lainnya	11,25	12,46	9,84	5,18
KOTA BLITAR		**5,22**	**5,29**	**5,33**	**5,31**

Sumber: Kota Blitar Dalam Angka Tahun 2026, diolah

Dilihat dari tren pertumbuhan ekonomi pada 17 sektor/lapangan usaha pada tahun 2022-2025 secara agregat, tidak terjadi kontraksi ekonomi dalam empat tahun terakhir. Meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa lapangan usaha, terutama sektor primer dan pertambangan, dampaknya terhadap total pertumbuhan relatif terbatas karena kontribusinya kecil dalam struktur PDRB kota. Mayoritas sektor strategis tumbuh positif setiap tahun, sehingga mampu menjaga pertumbuhan tetap berada di atas 5 persen secara berkelanjutan. Apabila fokus pada tahun 2024 ke tahun 2025, ada beberapa sektor yang mengalami perlambatan dan ada beberapa sektor yang mengalami penguatan.

Beberapa sektor mengalami perlambatan, antara lain: konstruksi melambat menjadi 4,68%; real Estate turun menjadi 3,16%; jasa Lainnya turun cukup signifikan menjadi 5,18; administrasi Pemerintahan turun menjadi 1,08%. Selain itu Pertambangan dan Penggalian mengalami kontraksi sangat dalam (-77,07%), namun mengingat kontribusi sektor ini sangat kecil dalam struktur ekonomi Kota Blitar, dampaknya terhadap total pertumbuhan relatif terbatas.

Beberapa sektor menunjukkan peningkatan pertumbuhan pada 2025, antara lain: Industri Pengolahan meningkat menjadi 6,57%; Informasi dan Komunikasi tumbuh 6,74%; Jasa Keuangan dan Asuransi naik signifikan menjadi 7,25%; Transportasi dan Pergudangan menguat menjadi 6,91%; Jasa Kesehatan kembali tumbuh 6,29%; penguatan sektor-sektor ini mencerminkan meningkatnya aktivitas produksi dan distribusi; Akselerasi digitalisasi ekonomi, Meningkatnya intermediasi keuangan, terjaganya mobilitas dan konsumsi masyarakat. Sektor-sektor tersebut menjadi penopang utama stabilitas pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sedangkan Perlambatan pada konstruksi dan administrasi pemerintahan mengindikasikan adanya normalisasi belanja dan proyek pembangunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Ditinjau dari nilai PDRB selama kurun waktu tahun 2023 – 2025, PDRB Kota Blitar terus mengalami pertumbuhan dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2025 mencapai Rp 9,87 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2025 mencapai Rp 6,05 triliun.

Tabel 2.3.16
PDRB Kota Blitar Tahun 2023 s.d 2025

Uraian	Tahun		
	2023	2024	2025
PDRB dalam juta rupiah (ADHK)	5.455.810	5.746.400	6.051.300
PDRB dalam juta rupiah (ADHB)	8.515.160	9.187.700	9.871.550

Sumber : Kota Blitar Dalam Angka Tahun 2026, diolah

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2023–2025 di Kota Blitar, baik PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) maupun atas dasar harga berlaku (ADHB) menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi daerah mengalami pertumbuhan yang positif selama periode tersebut. Jika dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil tanpa dipengaruhi perubahan harga, nilainya meningkat dari 5.455.810 juta rupiah pada tahun 2023 menjadi 5.746.400 juta rupiah pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 6.051.300 juta rupiah pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa secara riil kapasitas produksi barang dan jasa di Kota Blitar terus bertambah, yang menandakan adanya pertumbuhan aktivitas ekonomi di berbagai sektor lapangan usaha. Sementara itu, PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) yang menggambarkan nilai ekonomi berdasarkan harga yang berlaku pada masing-masing tahun juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Nilai PDRB ADHB tercatat sebesar 8.515.160 juta rupiah pada tahun 2023, meningkat menjadi 9.187.700 juta rupiah pada tahun 2024, dan kembali naik menjadi 9.871.550 juta rupiah pada tahun 2025. Peningkatan nilai ini tidak hanya mencerminkan bertambahnya volume produksi barang dan jasa, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan harga atau inflasi yang terjadi dalam perekonomian.

Sedangkan dari kontribusi sektor/lapangan usaha dalam PDRB Kota Blitar Tahun 2025, struktur perekonomian Kota Blitar menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2023-2025 seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.17
Kontribusi Sektor Lapangan Usaha dalam PDRB Tahun 2023 s.d 2025
Atas Dasar Harga Berlaku Kota Blitar

	Lapangan Usaha	2023	2024	2025
		%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	2,51	2,18	2,18
2	Pertambangan & Penggalian	0,00	0,00	0,00
3	Industri Pengolahan	9,85	9,91	10,13

	Lapangan Usaha	2023	2024	2025
		%	%	%
4	Pengadaan Listrik & Gas	0,06	0,06	0,06
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,14	0,14	0,13
6	Konstruksi	7,17	7,38	7,34
7	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi mobil & Sepeda Motor	25,03	24,69	24,78
8	Transportasi & Pergudangan	5,01	5,08	5,12
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	5,71	5,89	5,92
10	Informasi & Komunikasi	10,63	10,50	10,53
11	Jasa Keuangan & Asuransi	10,42	10,22	9,86
12	Real Estate	3,55	3,47	3,39
13	Jasa Perusahaan	0,72	0,72	0,73
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan	5,78	6,12	5,91
15	Jasa Pendidikan	6,44	6,58	6,71
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	2,05	1,96	2,00
17	Jasa Lainnya	4,92	5,10	5,20
KOTA BLITAR		**100**	**100**	**100**

Sumber: Kota Blitar Dalam Angka Tahun 2026, diolah

Berdasarkan data kontribusi sektor terhadap PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2023–2025 di Kota Blitar, struktur perekonomian daerah menunjukkan bahwa sektor perdagangan dan sektor jasa masih menjadi penopang utama aktivitas ekonomi daerah. Hal ini terlihat dari besarnya kontribusi beberapa sektor yang secara konsisten mendominasi pembentukan PDRB selama periode tersebut.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Blitar. Pada tahun 2023 sektor ini menyumbang sebesar 25,03 persen, kemudian sedikit menurun menjadi 24,69 persen pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 24,78 persen pada tahun 2025. Besarnya kontribusi sektor ini menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian daerah, terutama karena Kota Blitar berfungsi sebagai pusat perdagangan dan distribusi bagi wilayah sekitarnya. Selain itu, sektor Industri Pengolahan juga menunjukkan kontribusi yang cukup besar dan mengalami peningkatan dari 9,85 persen pada tahun 2023 menjadi 9,91 persen pada tahun 2024, dan meningkat lagi menjadi 10,13 persen pada tahun 2025. Peningkatan kontribusi ini menunjukkan bahwa aktivitas pengolahan atau industri skala kecil dan menengah semakin berkembang dan memberikan nilai tambah terhadap perekonomian daerah. Sektor lain yang juga memiliki kontribusi cukup besar adalah Informasi dan Komunikasi, yang memberikan kontribusi sekitar 10,63 persen pada tahun 2023, 10,50 persen pada tahun 2024, dan 10,53 persen pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan

teknologi informasi dan komunikasi memiliki peranan penting dalam mendukung berbagai aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat.

Di sisi lain, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi mengalami sedikit penurunan kontribusi dari 10,42 persen pada tahun 2023 menjadi 10,22 persen pada tahun 2024, dan kembali menurun menjadi 9,86 persen pada tahun 2025, yang mengindikasikan adanya perlambatan aktivitas di sektor tersebut. Beberapa sektor jasa lainnya seperti Jasa Pendidikan, Transportasi dan Pergudangan, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga menunjukkan kontribusi yang relatif stabil dan cenderung meningkat. Hal ini mencerminkan bahwa struktur perekonomian Kota Blitar semakin didominasi oleh sektor jasa. Sementara itu, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan hanya memberikan kontribusi yang relatif kecil dan cenderung menurun, yaitu dari 2,51 persen pada tahun 2023 menjadi 2,18 persen pada tahun 2024 dan 2025, yang menunjukkan bahwa peran sektor primer dalam perekonomian kota relatif terbatas.

Secara keseluruhan, komposisi kontribusi sektor terhadap PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kota Blitar didominasi oleh sektor perdagangan, industri pengolahan, informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan. Kondisi ini menggambarkan karakteristik perekonomian perkotaan yang lebih bertumpu pada sektor tersier (jasa) dan perdagangan dibandingkan sektor primer. Struktur tersebut juga menjelaskan mengapa peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan memperhatikan berbagai indikator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan nilai investasi, nilai PDRB, serta kontribusi sektor terhadap PDRB di Kota Blitar, maka Pemerintah Kota Blitar akan berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Blitar dengan memperkuat pengembangan sektor unggulan daerah, melalui:

1. Penguatan ekosistem usaha serta peningkatan kapasitas pelaku UMKM;
2. Pengembangan sentra industri kecil dan menengah, serta pemanfaatan teknologi digital dalam aktivitas perdagangan dan jasa;
3. Pengembangan sektor industri pengolahan berbasis potensi lokal, ekonomi kreatif, dan pariwisata;
4. Penguatan layanan perijinan dan pengawasan perizinan untuk mendorong peningkatan investasi daerah;
5. Penguatan promosi potensi daerah, serta pengembangan kawasan atau klaster ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif;
6. Pelatihan keterampilan kerja, serta pengembangan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri;

7. Mengoptimalkan peran belanja daerah sebagai stimulus ekonomi, terutama melalui program pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta dukungan terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah; serta
8. Peningkatan produktivitas pertanian dengan model *urban farming* dan pola tanam organik.

Dengan prioritas pembangunan tersebut, diharapkan dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk pencapaian target akhir jangka menengah daerah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar pada umumnya.

Salah satu sasaran pencapaian kinerja daerah Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, adalah Meningkatnya Nilai Investasi Daerah dengan indikator Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah. Dalam ekonomi makro, investasi merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sehingga untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi sangat dibutuhkan sumber pembiayaan guna mendorong dunia usaha, salah satunya melalui realisasi investasi.

KINERJA SASARAN

Meningkatnya Nilai Investasi Daerah

Indikator: Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah

Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Realisasi s/d 2025	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
1 %	1,1 %	110 %	161,84 %	133,85%*	120,9 %

** target berdasarkan perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dengan asumsi nilai investasi tahun 2022 sebesar Rp. 167,2 Milyar dan target tahun 2026 sebesar Rp. 391 Milyar*

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Perhitungan nilai investasi di Kota Blitar berdasarkan data pelaporan penanaman modal pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). LKPM merupakan laporan yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala oleh pelaku usaha kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berikut Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah dan Realisasi Investasi Daerah Kota Blitar Tahun 2022-2025 serta Data Realisasi PMDN dan PMA Per Bidang Usaha Kota Blitar Tahun 2022 – 2025.

Gambar 2.3.39
Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah Kota Blitar Tahun 2022-2025

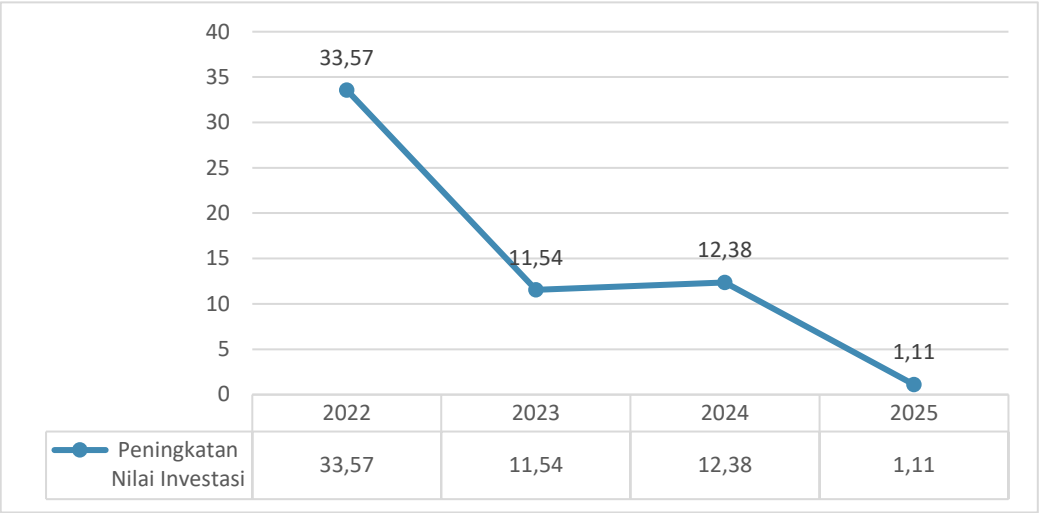

Sumber: DPMPTSP, 2026, diolah.

Gambar 2.3.40
Realisasi Jumlah Investasi Kota Blitar Tahun 2022-2025

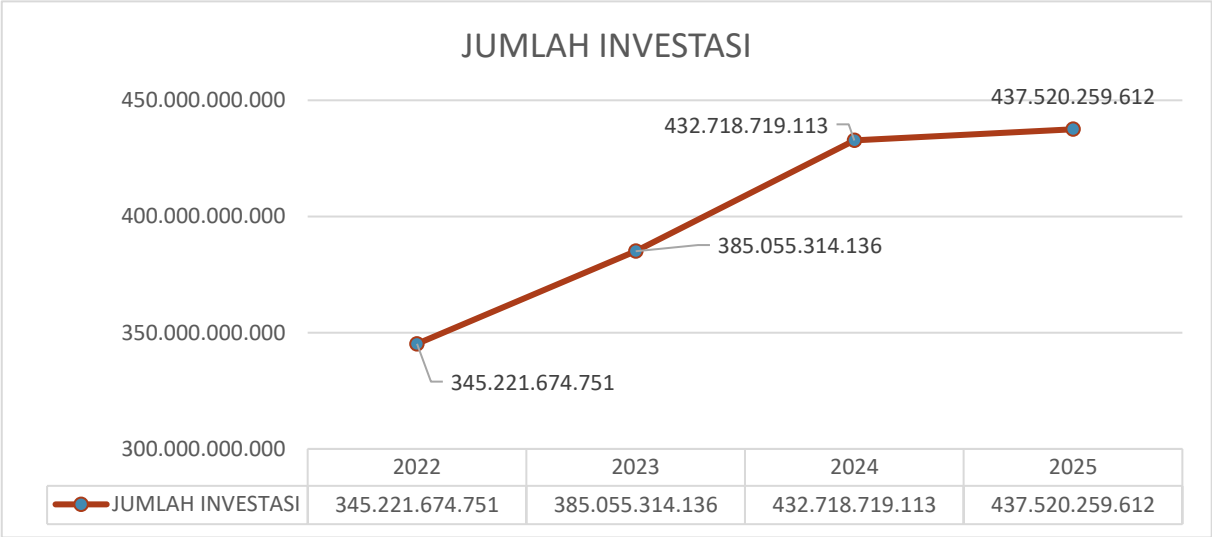

Sumber: DPMPTSP, 2026, diolah.

Tabel 2.3.18
Data Realisasi PMDN dan PMA Per Bidang Usaha Kota Blitar Tahun 2022 – 2025

No	Bidang Usaha	2022		2023		2024		2025	
		Unit Usaha	Investasi (Rp)	Unit Usaha	Investasi (Rp)	Unit Usaha	Investasi (Rp)	Unit Usaha	Investasi (Rp)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	12	155,200,000	10	75.500.000	54	32.440.000	25	6.021.470.389
2	Pertambangan dan Penggalian	19	85,500,000	0	0	0	0	0	0
3	Industri Pengolahan	222	4,682,489,711	325	11.846.977.144	548	121.719.534.227	394	25.443.916.219
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	6	359,619,239	3	50.000.000	2	100.000.000	1	80.000.000

No	Bidang Usaha	2022		2023		2024		2025	
		Unit Usaha	Investasi (Rp)	Unit Usaha	Investasi (Rp)	Unit Usaha	Investasi (Rp)	Unit Usaha	Investasi (Rp)
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	0	0	2	0	1	0	2	0
6	Konstruksi	346	33,072,722,417	411	43.908.678.367	609	20.506.968.981	608	39.206.152.129
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	577	196,033,876,172	842	226.675.715.271	1178	219.149.447.531	1011	253.978.600.431
8	Pengangkutan dan Pergudangan	46	768,759,996	46	6.145.190.087	64	731.450.000	55	467.941.000
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	37	3,668,089,440	96	5.444.613.000	148	8.436.525.858	163	24.978.493.734
10	Informasi dan Komunikasi	61	1,649,296,774	55	26.530.796.322	71	3.566.023.126	56	7.333.282.541
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	0	0	0	0	3	416.000.000	3	2.294.965.373
12	RealEstat	4	7,370,860,000	9	1.052.894.296	9	38.100.000	22	5.875.520.000
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	77	3,323,862,759	118	1.677.750.000	153	3.784.600.000	152	10.209.000.008
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	118	168,764,700	170	2.706.700.000	246	5.026.174.226	150	10.871.926.318
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pendidikan	2	60,000	79	2.641.523.373	50	3.990.378.899	33	644.122.876
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	21	93,248,216,609	39	55.700.376.276	43	44.269.826.265	43	47.571.768.594
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	1	194,166,934	6	10.000.000	23	48.000.000	15	1.333.500.000
19	Aktivitas Jasa Lainnya	43	440,190,000	51	588.600.000	55	903.250.000	37	1.209.600.000
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	**1592**	**345.221.674.751**	**2262**	**385.055.314.136**	**3257**	**432.718.719.113**	**2770**	**437.520.259.612**

Sumber: DPMPTSP, 2026, diolah

Berdasarkan data realisasi investasi menurut bidang usaha di Kota Blitar selama periode 2022–2025, terlihat bahwa nilai investasi secara total mengalami tren peningkatan, meskipun

jumlah unit usaha pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Total investasi meningkat dari Rp345,22 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp385,06 miliar pada tahun 2023, kemudian meningkat lagi menjadi Rp432,72 miliar pada tahun 2024, dan mencapai Rp437,52 miliar pada tahun 2025. Sementara itu, jumlah unit usaha meningkat dari 1.592 unit pada tahun 2022 menjadi 2.262 unit pada tahun 2023 dan 3.257 unit pada tahun 2024, namun menurun menjadi 2.770 unit pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah usaha baru sedikit menurun pada tahun terakhir, nilai investasi tetap meningkat, yang mengindikasikan adanya investasi dengan skala modal yang lebih besar.

Jika dilihat berdasarkan bidang usaha, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor dengan kontribusi investasi terbesar selama periode tersebut. Nilai investasinya mencapai Rp196,03 miliar pada tahun 2022, meningkat menjadi Rp226,67 miliar pada tahun 2023, sedikit menurun menjadi Rp219,15 miliar pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi Rp253,98 miliar pada tahun 2025. Dominasi sektor ini sejalan dengan struktur ekonomi Kota Blitar yang bertumpu pada aktivitas perdagangan dan jasa. Sektor Konstruksi juga menunjukkan kontribusi investasi yang cukup signifikan. Nilai investasi sektor ini meningkat dari Rp33,07 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp43,91 miliar pada tahun 2023, kemudian sempat menurun pada tahun 2024 menjadi Rp20,51 miliar, namun kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi Rp39,21 miliar. Fluktuasi ini kemungkinan dipengaruhi oleh dinamika proyek pembangunan yang tidak selalu berlangsung secara merata setiap tahun. Sektor Industri Pengolahan menunjukkan perkembangan yang cukup menarik, jumlah unit usaha meningkat pesat hingga 548 unit pada tahun 2024, dengan nilai investasi mencapai Rp121,72 miliar, namun pada tahun 2025 jumlah unit usaha menurun menjadi 394 unit dengan nilai investasi Rp25,44 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terjadi lonjakan investasi yang cukup besar pada sektor industri pengolahan, peningkatan investasi secara signifikan pada sektor industri pengolahan ini terjadi karena adanya investasi baru dari PT. H.M. Sampoerna yang bergerak pada bidang usaha industri sigaret kretek tangan yang mulai beroperasi mulai tahun 2024.

Secara keseluruhan, struktur investasi di Kota Blitar selama tahun 2022–2025 didominasi oleh sektor perdagangan, konstruksi, industri pengolahan, serta jasa kesehatan dan akomodasi. Sektor-sektor tersebut mencerminkan karakteristik perekonomian daerah yang berbasis pada perdagangan dan jasa. Meskipun nilai investasi terus meningkat, fluktuasi pada beberapa sektor menunjukkan bahwa dinamika investasi masih dipengaruhi oleh kondisi pasar, peluang usaha, serta keberadaan proyek investasi tertentu pada tahun-tahun tertentu. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan investasi dengan memperkuat sektor unggulan serta mendorong diversifikasi investasi ke sektor-sektor produktif lainnya.

Peningkatan realisasi investasi Kota Blitar setiap tahun, menunjukkan bahwa iklim investasi di Kota Blitar semakin kondusif, yang didukung oleh kemudahan pelayanan perizinan melalui sistem OSS-RBA, kegiatan promosi dan fasilitasi investasi, pendampingan dan konsultasi kepada pelaku usaha serta pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil memberikan sinyal positif kepada investor mengenai potensi pasar dan keuntungan usaha. Namun dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal masih ditemui beberapa permasalahan yaitu:

1. Promosi potensi dan peluang investasi daerah belum optimal sehingga minat investor untuk menanamkan modal di Kota Blitar masih terbatas. Untuk itu Pemerintah Kota Blitar terus berupaya meningkatkan ketertarikan investor melalui pemberian insentif atau kemudahan fiskal bagi investor serta lebih giat lagi dalam sosialisasi dan dialog publik secara masif terhadap rencana pembangunan/ investasi di Kota Blitar. Selain itu juga telah diterbitkan Pembaruan RTRW melalui penetapan Perda Nomor 10 Tahun 2017 yang lebih ramah investor, diantaranya aturan pembangunan gedung tinggi (maksimal 15 lantai) dikawasan tertentu)
2. Pelaku usaha belum sepenuhnya memahami persyaratan dan mekanisme perizinan, hal ini diperparah dengan adanya Perubahan regulasi dari PP Nomor 5 Tahun 2021 menjadi PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Sehingga untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha yang belum merata perlu dilakukan langkah optimalisasi layanan konsultasi dan pendampingan OSS, reviu SOP secara berkala serta penguatan pengawasan pasca izin atau memastikan izin yang terbit sesuai dengan kepatuhan operasional dilapangan
3. Keterbatasan ketersediaan lahan usaha, menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Blitar untuk menemukan solusi yang tepat dalam meningkatkan investasi diantaranya melalui upaya penyusunan IPRO (*Investment Project Ready to Offer*), mengembangkan inovasi pemanfaatan lahan terbatas, serta fokus pada investasi berbasis jasa dan teknologi
4. Belum semua pelaku usaha mempunyai Nomor Ijin Berusaha (NIB) terutama bagi pelaku usaha mikro kecil. Ketentuan kepemilikan NIB bagi pelaku usaha diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Usaha. Pemerintah Kota Blitar telah melakukan kegiatan sosialisasi dan pendampingan pendaftaran NIB secara rutin bahkan dengan melakukan jemput bola dalam program Jempol Lisa (Jemput Bola Pelayanan Perizinan Berusaha). Namun untuk meningkatkan kepemilikan NIB perlu terus dilakukan sosialisasi, pendampingan dan menambah frekuensi pelayanan Jempol Lisa.

No	Kinerja Utama/Sasaran RPJMD/Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3 *100	6	7	8	9=8/7 *100	10=5/9
7.	**Meningkatnya pertumbuhan ekonomi**				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	78.852.000,00	58.933.000,00		

No	Kinerja Utama/Sasaran RPJMD/Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3 *100	6	7	8	9=8/7 *100	10=5/9
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	**5,37 %**	**5,31%**	**98,88 %**	Program Promosi Penanaman Modal	257.396.974,00	256.788.000,00		
					Program Pelayananan Penanaman Modal	297.511.000,00	282.508.388,00		
					Program Pengendalian Penanaman Modal	94.742.500,00	90.252.150,00		
					Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	971.673.800,00	939.200.110,00		
					Program Pemasaran Pariwisata	764.659.488,00	752.316.100,00		
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	29.266.600,00	25.680.000,00		
					Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	5.355.235.454,00	4.943.249.059,00		
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	202.713.400,00	193.318.359,00		
					Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	107.040.900,00	106.514.900,00		
					Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	3.548.677.514,00	3.022.927.547,00		
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	294.117.656,00	289.493.363,00		

No	Kinerja Utama/Sasaran RPJMD/Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3 *100	6	7	8	9=8/7 *100	10=5/9
					Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	99.611.100,00	95.800.050,00		
					Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	489.882.800,00	476.104.120,00		
					Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.681.168.992,00	1.414.576.155,00		
					Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	229.588.700,00	225.186.814,00		
					Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	17.675.000,00	16.872.000,00		
					Program Perizinan Usaha Pertanian	6.352.100,00	6.071.500,00		
					Program Penyuluhan Pertanian	2.049.116.990,00	1.954.190.124,00		
					Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	79.118.800,00	78.529.121,00		
					Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	16.471.700,00	15.098.096,00		
					Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	63.303.700,00	63.302.800,00		
					Program Pendidikan dan	190.288.600,00	188.591.000,00		

No	Kinerja Utama/Sasaran RPJMD/Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3 *100	6	7	8	9=8/7 *100	10=5/9
					Latihan Perkoperasian				
					Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	694.813.400,00	682.313.865,00		
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	692.141.200,00	662.459.038,00		
					Program Pengembangan UMKM	413.832.800,00	399.312.898,00		
Rata-rata				98,88%	TOTAL	18.912.538.968,00	17.373.981.246,00	91,86%	1,08

Dari hasil pencapaian kinerja diatas didukung dengan program-program sebagai berikut dengan capaian keuangan dan menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 1,08.

KINERJA UTAMA 8
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah

Indikator Kinerja:
Indeks Infrastruktur Daerah

Target s/d 2025	Realisasi s/d 2025	Capaian 2025	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
62,88	63,04	100,25%	58,67	107,44%

Kinerja meningkatnya kualitas infrastruktur daerah di Kota Blitar diukur dengan Indeks Infrastruktur Daerah yang merupakan ultimate outcomes dari kinerja meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum yang diukur dengan indeks infrastruktur pekerjaan umum, dan meningkatnya kualitas perhubungan yang diukur dengan *Level Of Service (LOS)*. dimana LOS diukur berdasarkan rasio volume terhadap kapasitas jalan (v/c ratio), nilai v/c ratio yang semakin kecil menunjukkan tingkat pelayanan jaringan jalan yang semakin baik sedangkan Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dihitung berdasarkan kontribusi tiga sektor utama, yaitu Infrastruktur Bina Marga (jaringan jalan, jembatan dan trotoar) (50%), Infrastruktur Sumber Daya Air (jaringan irigasi dan sumber mata air) (40%), dan Infrastruktur Cipta Karya (sarana sanitasi, air minum, gedung pemerintah dan jaringan drainase) (10%).

Tabel 2.3.19
Indeks Infrastuktur Daerah Kota Blitar Tahun 2022-2025

Indikator Kinerja	2022	2023	2024	2025
1. Indeks Infrastruktur Daerah	61,10	61,69	63,41	63,03
1.1. Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	87,08	88,02	90,46	89,94
1.1.1. Indeks Infrastruktur Bina Marga	77,10	79,05	82,76	84,87
1.1.1.1. Persentase Jalan dalam Kondisi mantap dan berkeselamatan	73,66	78,42	86,23	92,5
1.1.1.2. Persentase Jembatan dalam Kondisi baik	95,71	96,43	97,86	97,86
1.1.1.3. Persentase Trotoar dalam kondisi baik	61,92	62,30	64,18	64,24
1.1.2. Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	97,00	98,42	98,61	94,37
1.1.2.1. Persentase Irigasi dalam kondisi baik	98,00	99,51	99,89	99,0
1.1.2.2. Persentase Sumber mata air dalam Kondisi baik	96,00	97,33	97,33	89,74
1.1.3. Indeks Infrastruktur Cipta Karya	97,31	91,28	96,37	97,49
1.1.3.1. Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	98,27	83,00	99,62	100
1.1.3.2. Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	98,38	88,90	100	100
1.1.3.3. Persentase gedung pemerintah sesuai standar	94,60	94,70	96,91	96,97
1.1.3.4. Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	98,00	98,50	88,96	92,97
1.2. Level Of Service	C v/c rasio 0,4778	B v/c rasio 0,2595	B v/c rasio 0,283	B v/c rasio 0,254

Sumber: Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR, 2025, diolah

Gambar 2.3.41
Indeks Infrastruktur Daerah Kota Blitar Tahun 2022 – 2025

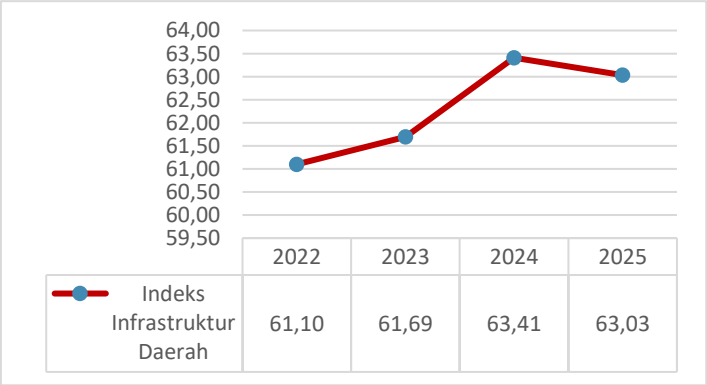

Sumber: Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR, 2025, diolah

Berdasarkan hasil pengukuran, Indeks Infrastruktur Daerah Kota Blitar menunjukkan kecenderungan meningkat dalam kurun waktu 2022–2024, yaitu dari 61,10 pada tahun 2022, meningkat menjadi 61,69 pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 63,41 pada tahun 2024. Pada tahun 2025 nilai indeks sedikit mengalami penurunan menjadi 63,03, namun secara umum masih berada pada tingkat yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah secara keseluruhan masih berjalan dengan baik.

Gambar 2.3.42
Indeks Infrastuktur Pekerjaan Umum Kota Blitar Tahun 2022-2025

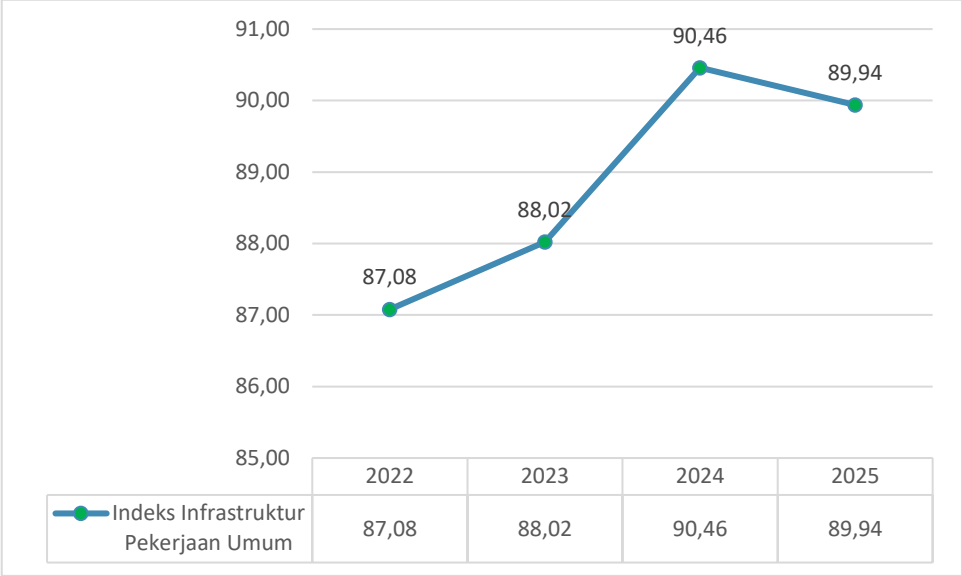

Sumber: Dinas PUPR, 2025, diolah

Nilai indeks Infrastuktur Pekerjaan Umum menunjukkan tren peningkatan dari 87,08 pada tahun 2022 menjadi 88,02 pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 90,46 pada tahun 2024. Pada tahun 2025 nilai indeks tercatat sebesar 89,94, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya namun masih berada pada kategori kinerja yang baik. Peningkatan nilai indeks ini menunjukkan bahwa program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan infrastruktur.

Gambar 2.3.43
Komponen Indeks Infra Infrastuktur Pekerjaan Umum Kota Blitar Tahun 2022-2025

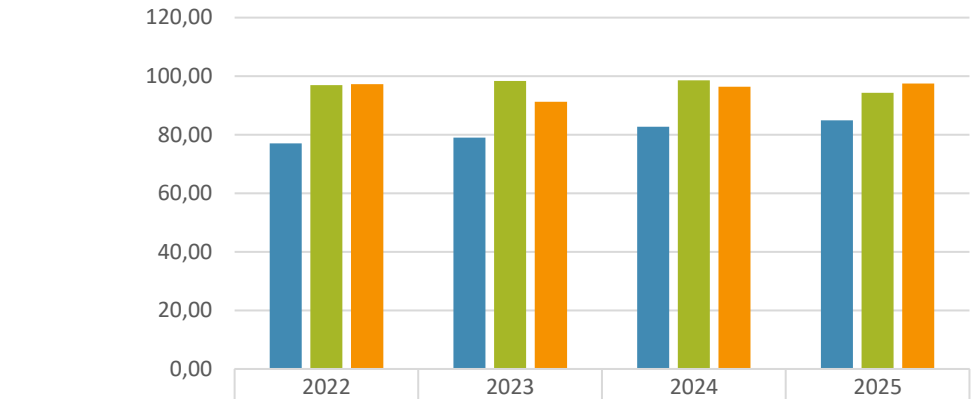

	2022	2023	2024	2025
Indeks Infrastruktur Bina Marga	77,10	79,05	82,76	84,87
Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	97,00	98,42	98,61	94,37
Indeks Infrastruktur Cipta Karya	97,31	91,28	96,37	97,49

Sumber: Dinas PUPR, 2025, diolah

Apabila dilihat lebih lanjut dari komponen-komponen pembentuk indeks Infrastuktur Pekerjaan Umum, yang terdiri dari 3 komponen, setiap tahunnya ada fluktuasi capaian dengan penjelasan sebagai berikut:

- Infrastruktur Bina Marga
  Indeks Infrastruktur Bina Marga menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan selama periode 2022-2025. Nilai indeks meningkat dari 77,10 pada tahun 2022 menjadi 79,05 pada tahun 2023, kemudian meningkat menjadi 82,76 pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 84,87 pada tahun 2025. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh membaiknya persentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan, yang meningkat dari 73,66% pada tahun 2022 menjadi 92,50% pada tahun 2025. Selain itu, persentase jembatan dalam kondisi baik juga menunjukkan stabilitas pada tingkat yang tinggi, yaitu di atas 95%. Sementara itu, kondisi trotoar dalam kondisi baik menunjukkan peningkatan secara bertahap meskipun masih memerlukan perhatian lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas fasilitas bagi pejalan kaki.
- Infrastruktur Sumber Daya Air
  Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air secara umum berada pada nilai yang sangat tinggi. Nilai indeks meningkat dari 97,00 pada tahun 2022 menjadi 98,42 pada tahun 2023, dan 98,61 pada tahun 2024. Namun demikian, pada tahun 2025 terjadi penurunan menjadi 94,37. Penurunan ini dipengaruhi oleh menurunnya persentase sumber mata air dalam kondisi baik, dari 97,33% pada tahun 2024 menjadi 89,74% pada tahun 2025. Sementara itu, persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik tetap menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian mendekati 99% setiap tahunnya.
- Infrastruktur Cipta Karya
  Indeks Infrastruktur Cipta Karya menunjukkan dinamika kinerja selama periode 2022-2025. Nilai indeks tercatat 97,31 pada tahun 2022, kemudian mengalami penurunan menjadi 91,28

pada tahun 2023, sebelum kembali meningkat menjadi 96,37 pada tahun 2024 dan 97,49 pada tahun 2025. Peningkatan ini dipengaruhi oleh capaian layanan dasar yang semakin baik, terutama pada indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan serta akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan, yang pada tahun 2025 telah mencapai 100%. Selain itu, persentase gedung pemerintah sesuai standar juga menunjukkan peningkatan secara bertahap. Meskipun demikian, kondisi jaringan drainase masih menunjukkan fluktuasi sehingga perlu terus menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kualitas infrastruktur permukiman.

Gambar 2.3.44
Level of Service Kota Blitar Tahun 2022-2025

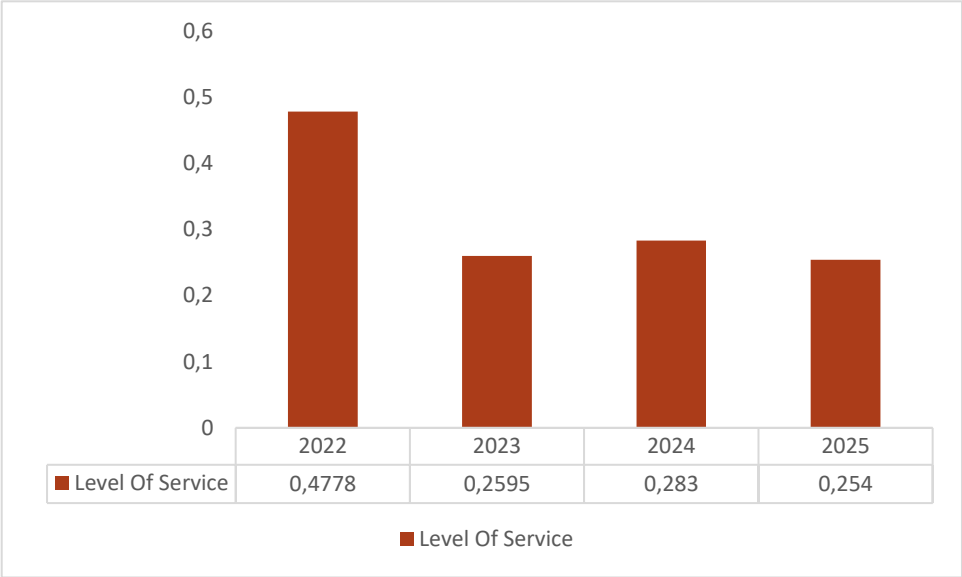

Sumber: Dinas Perhubungan, 2025, diolah

Tingkat pelayanan jalan atau Level of Service (LOS) merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan kualitas operasional suatu ruas jalan berdasarkan perbandingan antara volume lalu lintas dan kapasitas jalan (v/c ratio). Nilai v/c ratio menunjukkan tingkat kepadatan lalu lintas yang terjadi pada suatu ruas jalan. Semakin kecil nilai rasio tersebut, maka kondisi lalu lintas semakin lancar dan tingkat pelayanan jalan semakin baik. Kinerja pelayanan jaringan jalan yang diukur melalui indikator Level of Service (LOS) menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2022 tingkat pelayanan berada pada kategori C dengan nilai v/c ratio sebesar 0,4778. Selanjutnya pada tahun 2023 meningkat menjadi kategori B dengan nilai 0,2595, dan tetap berada pada kategori B pada tahun 2024 dan 2025 dengan nilai masing-masing 0,283 dan 0,254.

Tabel 2.3.20
Tingkat Pelayanan Level Of Service

Tabel Level Of Service			
Tingkat Pelayanan	Karakteristik Lalu Lintas	V/C Ratio	Kecepatan (km/jam)
A	Kondisi arus bebas dengan kecepatan tinggi, pengemudi dapat memilih kecepatan yang diinginkan tanpa hambatan	0 - 0,20	60
B	Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas. Pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk memilih kecepatan	0,21 - 0,44	55
C	Arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan	0,45 - 0,74	50
D	Arus mendekati tidak stabil, kecepatan masih dikendalikan	0,75 - 0,84	40
E	Volume lalu lintas mendekati / berada pada kapasitas, arus tidak stabil, kecepatan terkadang terhenti	0,85 - 1	30-35
F	Arus yang dipaksakan atau macet, kecepatan rendah, volume dibawah kapasitas. Antrian panjang dan terjadi hambatan-hambatan yang besar	> 1	<30

Dari tabel di atas *Level Of Service* Kota Blitar pada tahun 2025 sebesar 0,254; masuk dalam kategori tingkat pelayanan B, hal ini menunjukkan bahwa arus lalu lintas berada dalam kondisi stabil dengan kecepatan rata-rata sekitar 55 km/jam, dimana pengemudi masih memiliki fleksibilitas yang cukup dalam memilih kecepatan kendaraan meskipun mulai terdapat interaksi antar kendaraan.

Beberapa faktor yang mendorong peningkatan kinerja infrastruktur daerah selama periode 2022–2025 antara lain:

1. Peningkatan kondisi jalan mantap
   Persentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan meningkat cukup signifikan dari 73,66% pada tahun 2022 menjadi 92,50% pada tahun 2025. Peningkatan ini berkontribusi langsung terhadap kenaikan Indeks Infrastruktur Bina Marga serta mendukung peningkatan kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi barang.
2. Kondisi jembatan yang stabil dan terpelihara
   Persentase jembatan dalam kondisi baik relatif stabil pada kisaran 95–97% sepanjang periode pengamatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi jembatan berjalan dengan baik sehingga mampu menjaga keberlanjutan fungsi jaringan jalan.
3. Tingginya kualitas infrastruktur sumber daya air
   Indikator jaringan irigasi dalam kondisi baik menunjukkan capaian yang sangat tinggi dan stabil, yaitu mendekati 99% setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sistem irigasi mampu mendukung ketahanan sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya air secara optimal.

4. Peningkatan akses layanan dasar permukiman
   Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan air minum layak terus meningkat hingga mencapai 100% pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan pembangunan infrastruktur permukiman yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat
5. Perbaikan tingkat pelayanan lalu lintas

   Nilai v/c ratio menurun dari 0,4778 pada tahun 2022 menjadi 0,254 pada tahun 2025, sehingga tingkat pelayanan jalan meningkat dari LOS C menjadi LOS B. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas jaringan jalan relatif mampu mengimbangi volume lalu lintas.

Meskipun secara umum kinerja infrastruktur menunjukkan tren positif, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

1. Penurunan kondisi sumber mata air
   Persentase sumber mata air dalam kondisi baik mengalami penurunan dari 97,33% pada tahun 2024 menjadi 89,74% pada tahun 2025. Kondisi ini dapat berpengaruh terhadap keberlanjutan ketersediaan sumber air baku.
2. Fluktuasi kondisi jaringan drainase
   Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 88,96%, meskipun kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 92,97%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem drainase masih memerlukan peningkatan kualitas pemeliharaan dan rehabilitasi.
3. Kualitas trotoar yang masih relatif rendah
   Persentase trotoar dalam kondisi baik hanya meningkat secara terbatas dari 61,92% pada tahun 2022 menjadi 64,24% pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa fasilitas pejalan kaki masih perlu ditingkatkan guna mendukung mobilitas yang lebih aman dan ramah bagi masyarakat.
4. Penurunan Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air pada tahun 2025
   Indeks Infrastruktur SDA mengalami penurunan dari 98,61 pada tahun 2024 menjadi 94,37 pada tahun 2025, yang menunjukkan adanya kebutuhan peningkatan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air.
5. Kurangnya kedisiplinan juru parkir dalam melakukan penataan dan pemungutan retribusi parkir
   Pada beberapa lokasi parkir masih ditemukan praktik penataan kendaraan yang kurang tertib serta pemungutan retribusi yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini berpotensi mengurangi kapasitas efektif badan jalan, mempengaruhi kelancaran arus lalu lintas, serta berdampak pada optimalisasi penerimaan retribusi parkir daerah.
6. Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas fasilitas utama serta penunjang Terminal Tipe C di Kota Blitar
   Beberapa fasilitas utama maupun fasilitas penunjang terminal masih belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan, baik dari sisi kelengkapan sarana prasarana maupun tingkat

pemanfaatannya oleh angkutan umum dan masyarakat, sehingga fungsi terminal sebagai simpul transportasi perkotaan belum berjalan secara optimal.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan infrastruktur daerah pada periode selanjutnya, beberapa langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan antara lain:

1. Penguatan pemeliharaan dan perlindungan sumber daya air
   Perlu meningkatkan upaya konservasi dan perlindungan kawasan sumber air melalui rehabilitasi daerah tangkapan air, pengendalian pemanfaatan lahan, serta peningkatan sistem monitoring kondisi sumber mata air.
2. Peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan drainase
   Diperlukan peningkatan kegiatan rehabilitasi, normalisasi saluran, serta pembangunan jaringan drainase baru guna mengurangi potensi genangan dan banjir di kawasan perkotaan.
3. Pengembangan infrastruktur ramah pejalan kaki
   Upaya peningkatan kualitas trotoar perlu dilakukan melalui pembangunan dan rehabilitasi trotoar yang memenuhi standar keselamatan, kenyamanan, dan aksesibilitas bagi seluruh pengguna jalan.
4. Pemeliharaan berkelanjutan jaringan jalan dan jembatan
   Program pemeliharaan rutin dan berkala terhadap jalan dan jembatan perlu terus ditingkatkan guna mempertahankan capaian kondisi infrastruktur yang telah baik serta menjaga kelancaran mobilitas masyarakat.
5. Penguatan manajemen lalu lintas perkotaan
   Melakukan rekayasa lalu lintas dan peningkatan pengaturan simpang pada ruas jalan dengan tingkat aktivitas tinggi guna menjaga tingkat pelayanan jalan tetap berada pada kondisi yang baik.
6. Penataan dan optimalisasi pengelolaan parkir
   Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, dan peningkatan pengawasan terhadap juru parkir guna meningkatkan kedisiplinan dalam penataan kendaraan serta pemungutan retribusi parkir sesuai ketentuan yang berlaku, serta pengaturan zona parkir dan peningkatan sistem pengelolaan parkir guna menjaga kelancaran lalu lintas serta meningkatkan penerimaan retribusi daerah.
7. Peningkatan kualitas pelayanan Terminal Tipe C
   Melakukan perbaikan dan peningkatan fasilitas utama maupun fasilitas penunjang terminal, penataan kawasan terminal, serta peningkatan pengelolaan operasional terminal agar dapat berfungsi secara optimal sebagai simpul transportasi perkotaan.

No	Kinerja Utama/Sasaran RPJMD/Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3 *100	6	7	8	9=8/7 *100	10=5/9
8.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah								
	Indeks Infrastruktur Daerah	62,88	63,04	100,25%	Program Pengelolaan Sumber Daya air (SDA)	7.820.076.567,00	7.668.135.657,00		
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	265.365.000,00	126.601.000,00		
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.074.295.180,00	912.642.108,00		
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	4.807.271.449,52	4.683.957.400,00		
					Program Penataan Bangunan Gedung	9.388.632.271,45	8.838.590.620,00		
					Program Penyelenggaraan Jalan	9.493.921.532,00	9.051.999.958,00		
					Program Pengembangan Jasa Konstruksi	612.177.100,00	449.447.483,00		
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.041.228.000,00	883.450.962,00		
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan	12.499.516.603,41	11.641.474.687,00		

No	Kinerja Utama/Sasaran RPJMD/Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3 *100	6	7	8	9=8/7 *100	10=5/9
					Jalan (LLAJ)				
					Program Kawasan Permukiman	3.513.381.566,07	2.966.768.142,00		
					Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.999.672.000,00	1.959.160.652,00		
					Program Pengembangan Perumahan	1.810.982.315,00	1.705.194.410,00		
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	1.232.924.588,93	1.215.007.987,00		
					Program Penyelesaian Sengketa tanah Garapan	16.400.000,00	2.750.000,00		
					Program Penatagunaan Tanah	268.580.000,00	262.522.775,00		
Rata-rata				100,25%	TOTAL	55.844.424.173,38	52.367.703.841,00	93,77%	1,07

Dari hasil pencapaian kinerja diatas didukung dengan program-program sebagai berikut dengan capaian keuangan dan menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 1,07.

KINERJA UTAMA 9
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja:
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target RPJMD 2026	Capaian terhadap RPJMD 2021-2026
67,02	67,33	100,46%	73,54	91,56%

Gambar 2.3.45
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2023 – 2025

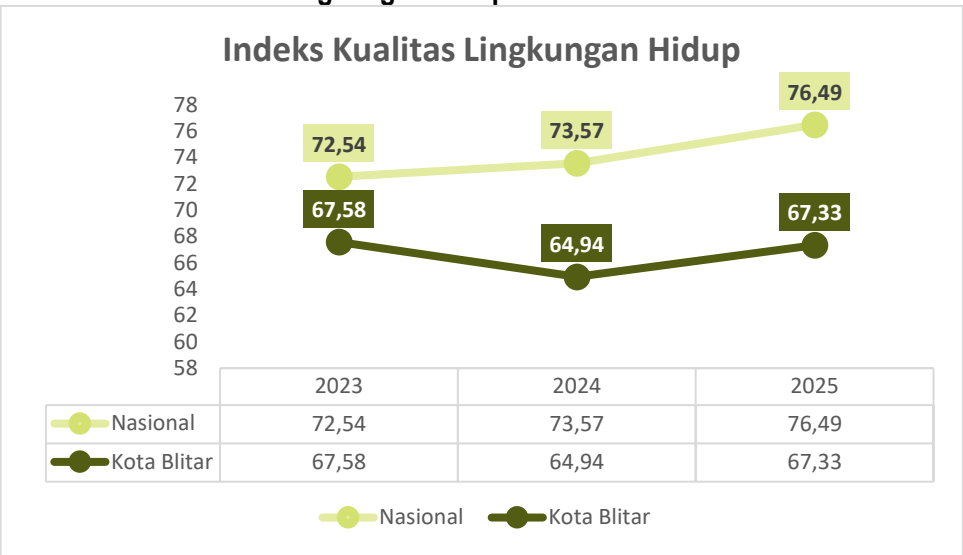

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, 2025

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Blitar selama periode 2023–2025 menunjukkan dinamika yang memerlukan perhatian serius dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2023, Kota Blitar mencatatkan nilai IKLH sebesar 67,58, yang kemudian mengalami penurunan ke angka 64,94 pada tahun 2024. Meskipun pada tahun 2025 Kota Blitar mampu melakukan pemulihan dengan meningkatkan nilai IKLH menjadi 67,33, tren fluktuatif ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga stabilitas kualitas lingkungan di tengah aktivitas pembangunan daerah.

Dalam skala nasional, nilai IKLH menunjukkan pertumbuhan yang lebih konsisten dibandingkan capaian daerah. Data menunjukkan bahwa IKLH Nasional terus mengalami peningkatan selama dua tahun terakhir. Perbandingan dengan IKLH Kota Blitar memperlihatkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara kualitas lingkungan hidup di Kota Blitar dengan standar rata-rata nasional.

Berdasarkan data diatas, nilai IKLH Kota Blitar tahun 2025 lebih rendah jika dibandingkan dengan nasional dan belum mencapai target akhir RPJMD pada tahun 2026. Adapun nilai Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Lahan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.21
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Blitar
Tahun 2023 - 2025

No	Tahun	IKU	IKA	IKL	IKLH	RATING IKLH
1.	2023	85.83	67.78	33.51	67.58	SEDANG
2.	**2024**	**89.79**	**56.11**	**34.13**	**64.94**	SEDANG
3.	**2025**	**75,10**	**70,86**	**46,90**	**67,33**	SEDANG

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, 2025

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Blitar Tahun 2025 termasuk ke dalam kategori sedang. Pencapaian indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kota Blitar didorong oleh komitmen aktif dalam melaksanakan gerakan reboisasi serta penanaman pohon secara sistematis berbasis klaster. Meskipun upaya tersebut telah dilakukan, terdapat sejumlah kendala yang menghambat akurasi dan cakupan pengendalian kualitas udara, di antaranya adalah belum adanya sistem pemantauan emisi bagi kendaraan di luar kewajiban uji KIR. Selain itu, terdapat tantangan metodologis dalam evaluasi target, di mana target tahun 2025 disusun menggunakan data empiris dari kota yang telah memiliki alat *Air Quality Monitoring System* (AQMS), sementara realisasi tahun 2025 dihitung berdasarkan data satelit wilayah kota. Guna mengatasi permasalahan tersebut, langkah yang diambil meliputi penguatan kolaborasi strategis dengan Dinas Perhubungan untuk melaksanakan uji emisi kendaraan secara rutin. Selain itu, sebagai upaya konkret dalam memperbaiki akurasi data pemantauan, akan dilakukan pengadaan alat uji emisi transportasi yang lebih memadai. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan kualitas udara dapat dilakukan secara lebih presisi, berkelanjutan, dan memberikan dampak yang nyata bagi lingkungan perkotaan.

Keberhasilan pencapaian indikator Indeks Kualitas Air (IKA) di Kota Blitar didorong oleh komitmen dalam melaksanakan uji kualitas air secara rutin serta pendampingan berkelanjutan kepada para pelaku usaha maupun kegiatan yang berpotensi menghasilkan air limbah. Meski demikian, upaya tersebut masih dihadapkan pada kendala berupa adanya pencemaran yang bersumber dari sektor industri, peternakan, serta aktivitas domestik yang berdampak pada penurunan kualitas air sungai. Menanggapi tantangan ini, langkah tindak lanjut yang akan diambil meliputi penguatan pembinaan serta pemantauan dan evaluasi secara intensif bagi pelaku usaha industri dan peternak yang terindikasi mencemari lingkungan. Selain itu, kolaborasi strategis akan terus dijalin dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) sebagai instansi yang berwenang dalam pengelolaan limbah domestik, guna memastikan pemulihan dan pemeliharaan kualitas air sungai dapat berjalan secara optimal.

Keberhasilan pencapaian indikator Indeks Kualitas Lahan (IKL) di Kota Blitar didorong oleh komitmen berkelanjutan dalam pembangunan serta pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah kendala yang dihadapi, terutama terkait adanya perubahan metode penilaian melalui metode delineasi. Di sisi lain, laju pembangunan kota yang pesat guna memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana telah memicu alih fungsi lahan yang secara langsung berdampak pada berkurangnya tutupan lahan di Kota Blitar. Menanggapi tantangan tersebut, langkah tindak lanjut yang perlu diambil berfokus pada penyesuaian metodologi evaluasi dengan mengoptimalkan penggunaan citra satelit agar perhitungan IKL menjadi lebih akurat. Selain itu, sebagai upaya nyata dalam memulihkan kualitas lahan, pemerintah daerah akan mengintensifkan program penghijauan melalui pemilihan jenis tanaman yang memiliki tajuk lebar. Langkah ini diharapkan mampu memperluas tutupan vegetasi secara efektif, sehingga keseimbangan kualitas lahan di tengah dinamika pembangunan kota dapat tetap terjaga.

Jika dikaitkan dengan ketahanan daerah, tercapainya IKLH sangat tergantung dari kemampuan suatu daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat bencana yang dilakukan secara terstruktur, terencana dan terpadu. Dengan tidak adanya banjir, longsor dan kekeringan air itu sangat terkait dengan terpenuhinya tutupan lahan di suatu wilayah.

KINERJA SASARAN
Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap Bencana

Indikator Kinerja:
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
0,62	0,41	66,13%	0,65	63,08%

Gambar 2.3.46
Indeks Ketahanan Daerah Kota Blitar Tahun 2023 – 2025

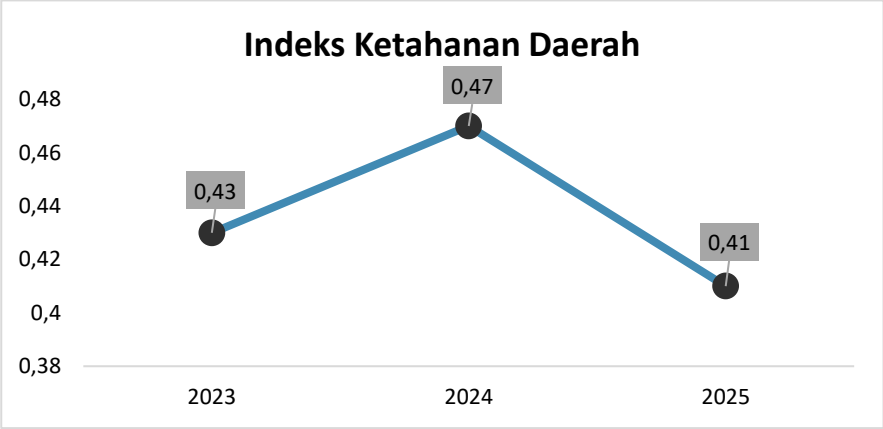

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, 2025

Gambar 2.3.47
Indeks Ketahanan Daerah Jawa Timur Tahun 2023 – 2025

Sumber:Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur, 2025

Tabel 2.3.21
Nilai IKD dan IRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Lampiran Surat
Nomor : B-44/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026
Tanggal : 30 Januari 2026

Nilai IKD 2025 dan IRB 2025 Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Timur

Kabupaten/Kota	IKD 2025	IRB 2025
Bangkalan	0,55	98,87
Banyuwangi	0,73	126,23
Blitar	0,65	130,22
Bojonegoro	0,60	97,35
Bondowoso	0,63	104,16
Gresik	0,64	119,66
Jember	0,59	161,94
Jombang	0,55	118,75
Kediri	0,69	103,85
Kota Batu	0,66	83,62
Kota Blitar	0,41	69,66
Kota Kediri	0,56	75,10
Kota Madiun	0,58	66,78
Kota Malang	0,60	67,67
Kota Mojokerto	0,29	116,30
Kota Pasuruan	0,51	90,49
Kota Probolinggo	0,52	110,56
Kota Surabaya	0,64	96,76
Lamongan	0,71	136,25
Lumajang	0,79	116,87
Madiun	0,53	114,33
Magetan	0,67	95,84
Malang	0,65	142,21
Mojokerto	0,73	97,23
Nganjuk	0,63	95,58
Ngawi	0,63	129,33
Pacitan	0,72	103,92
Pamekasan	0,72	86,50
Pasuruan	0,74	116,75
Ponorogo	0,56	111,46
Probolinggo	0,58	142,93
Sampang	0,61	89,87
Sidoarjo	0,52	91,68
Situbondo	0,70	138.43
Sumenep	0,56	112.67
Trenggalek	0,69	120.85
Tuban	0,56	104.80
Tulungagung	0,65	132.30

Deputi Bidang Sistem dan Strategi,

Raditya Jati

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap dengan menggunakan 71 indikator spesifik. Dari IKD, setiap daerah mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko. IKD dihitung untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengurangi risiko bencana, dengan menetapkan kebijakan pengurangan risiko bencana.

IKD didapatkan dari isian kuesioner/daftar pertanyaan dalam 7 parameter Indeks Ketahanan Daerah. Dalam 7 parameter IKD sendiri terdapat 7 Prioritas dan 71 Indikator. Setiap indikator diturunkan menjadi 4 pertanyaan kunci, sehingga total ada 284 pertanyaan kunci. Setiap pertanyaan kunci wajib disertakan bukti dukung (evidence). Dari 284 pertanyaan yang mewakili 71 indikator ketangguhan daerah yang dikelompokkan ke dalam 7 prioritas dengan bobot/agregat yang berbeda - beda, meliputi:

1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan (bobot: 6%)
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu (bobot: 6%)
3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik (bobot: 7,5%)
4. Penanganan tematik Kawasan rawan bencana (bobot: 10,5%)
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana (bobot: 21%)
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana (bobot: 35%)
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana (bobot: 14%)

Akumulasi dari nilai tiap-tiap prioritas akan menghasilkan nilai “Indeks Ketahanan Daerah” dengan range kelas:

- IKD < 0,4: Rendah
- 0,4 < IKD < 0,8: Sedang
- IKD > 0,8: Tinggi

Hasil pengukuran terhadap IKD Kota Blitar adalah sebagai berikut:

- Perkuatan kebijakan dan kelembagaan (bobot: 0,84%)
- Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu (bobot: 0,63%)
- Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik (bobot: 0,43%)
- Penanganan tematik Kawasan rawan bencana (bobot: 0,73%)
- Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana (bobot: 0,40%)
- Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana (bobot: 0,30%)
- Pengembangan sistem pemulihan bencana (bobot: 0,20%).

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut diperoleh capaian Indeks Kapasitas Daerah Kota Blitar tahun 2025 yaitu **0,41**. Hal ini berarti kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat bencana secara terstruktur, terencana dan terpadu dikategorikan **SEDANG**. Sedangkan untuk hasil pengukuran terhadap IKD Provinsi Jawa Timur selama tahun 2023 – 2025 mengalami fluktuasi yakni 0,65

pada tahun 2023, naik 0,03 poin menjadi 0,68 pada tahun 2024; dan kembali turun lagi 0,07 poin menjadi 0,61 pada tahun 2025, dimana capaian ini diatas capaian Kota Blitar sebesar 0,22 pada tahun 2023; 0,21 pada tahun 2024 dan 0,20 pada tahun 2025. Namun jika dibandingkan dengan capaian Kota Mojokerto yang sama-sama kategori Kota Kecil dengan karakter, luas wilayah dan jumlah penduduk yang hampir sama IKD Kota Blitar pada tahun 2025 berada diatas capaian IKD Kota Mojokerto.

Capaian ketahanan daerah saat ini tercatat belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya perubahan sistem pengukuran ketahanan daerah pada tahun 2025, yang merupakan bentuk penyempurnaan metodologi dan adaptasi implementasi di tingkat daerah. Selain itu, ditemukan kendala administratif berupa kurang lengkapnya dokumen dan bukti dukung, khususnya pada *output* variabel yang berkaitan dengan prioritas pengembangan sistem pemulihan bencana.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan meliputi penyelenggaraan rapat koordinasi secara simultan dan berkelanjutan. Melalui forum ini, seluruh *stakeholder* terkait diminta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja tahun-tahun sebelumnya guna memperbaiki kualitas dokumen dan pemenuhan bukti dukung pada setiap indikator pengukuran. Selain itu, prioritas utama kedepan adalah mengaktifkan sistem pemulihan bencana sebagai upaya untuk menutup celah perencanaan yang selama ini belum tersedia.

Di sisi lain, terdapat modalitas kuat yang menjadi faktor pendukung bagi peningkatan ketahanan daerah ke depan, di antaranya:

- **Aspek Regulasi dan Kebijakan:** Adanya peraturan daerah terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana dan komitmen nyata dari DPRD terhadap Pengurangan Risiko Bencana (PRB).
- **Aspek Kelembagaan dan Operasional:** Terbentuknya Forum PRB sebagai wadah koordinasi serta respons efektif dari Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB). Selain itu Kota Blitar juga telah memiliki peta kerentanan bencana.

Dengan mengoptimalkan faktor pendukung tersebut dan melaksanakan langkah tindak lanjut secara disiplin, diharapkan target ketahanan daerah dapat tercapai dengan lebih baik di periode mendatang, dan mampu mendukung pencapaian IKLH.

No	Sasaran RPJMD/ Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8	9=8/7*100	10=5/9
9.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup								
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,02	67,33	100,46	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan hidup	385.233.600	379.781.268		
					Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	2.600.000	2.476.250		
					Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	14.650.000	14.130.000		
					Program Perencanaan Lingkungan Hidup	31.047.500	31.037.500		
					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	3.662.708.759,33	3.410.029.838		
					Program Pengelolaan Persampahan	11.039.128.048	10.970.751.163		
					Program Peningkatan	296.475.400	274.944.348		

No	Sasaran RPJMD/ Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8	9=8/7*100	10=5/9
					Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat				
					Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	**305.964.200**	**287.204.191**		
					Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	**2.890.000**	**2.885.000**		
					Program Penanggulangan Bencana	**994.478.260,27**	**815.238.078**		
					Program Pencegahan, Penanggulanga, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	**316.595.800**	**294.628.529**		
					Program Penanganan Bencana	**199.514.300,00**	**172.394.000,00**		
					Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	**35.045.000,00**	**34.204.216,00**		

No	Sasaran RPJMD/ Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8	9=8/7*100	10=5/9
					TOTAL	17.286.330.867,60	16.689.704.381,00	96,55	1,04

Dari hasil pencapaian kinerja diatas didukung dengan capaian keuangan program-program yang mendukung dan menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 1,04 atau masuk kategori efisien.

KINERJA UTAMA 10

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

1. Indikator Kinerja: Nilai SAKIP

Target 2025	: A (80,11)
Realisasi 2025	: A (81,19)
Capaian 2025	: 101,35%

RPJMD 2026	
Target 72,35**	Capaian 112,22%

**) *kondisi akhir RPJMD (2026) menyesuaikan Perda Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 dan telah tercapai pada tahun 202*

Gambar 2.3.48
Tren Nilai SAKIP Kota Blitar dibandingkan dengan Jawa Timur Tahun 2022 – 2025

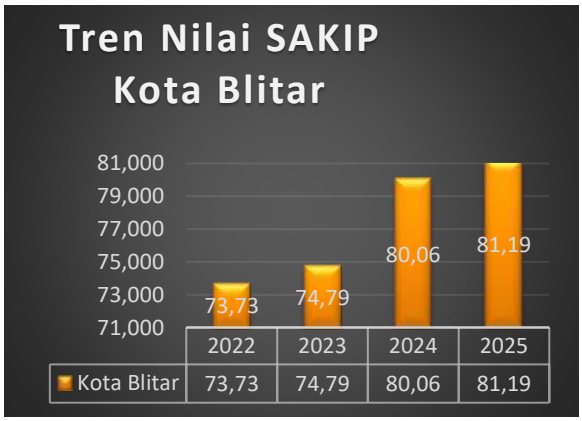

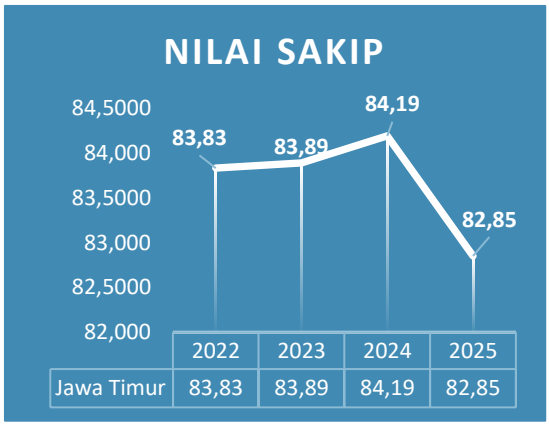

Sumber: LHE SAKIP, KemenPAN RB

Gambar 2.3.49
Capaian Nilai SAKIP Kota Blitar Tahun 2025

Sumber: LHE SAKIP, KemenPAN RB

Pencapaian Nilai SAKIP Kota Blitar diperoleh dari hasil evaluasi atas implementasi SAKIP oleh evaluator Kementerian PAN dan RB pada tahun berkenaan, dimana pada tahun 2025 tercapai 101,35% termasuk kategori Sangat Berhasil, yang berasal dari target 80,11 terealisasi sebesar 81,19. Hal ini sangat didukung adanya:

DAYA DUKUNG DARI KOMPONEN PENILAIAN SAKIP

1) Komponen Perencanaan
   - Pemerintah Kota Blitar telah mereviu kembali beberapa indikator tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029 dengan memastikan indikator tersebut telah memenuhi unsur cukup dalam mengawal kinerja yang akan diperjanjikan
   - Pemerintah Kota Blitar telah mereviu kembali penetapan target kinerja indikator tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029 dengan memperhatikan capaian tahun sebelumnya dan tidak lagi bersifat *range*
   - Pemerintah Kota Blitar telah mengimplementasikan penjenjangan kinerja yang telah disusun baik tingkat Kota maupun tingkat Perangkat Daerah, kedalam dokumen perencanaan:
     1. RPJMD Kota Blitar Tahun 2025 - 2029 pada BAB III
     2. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 pada BAB III dan IV
   - Pemerintah Kota Blitar telah mereviu kembali rumusan kinerja OPD pada Tabel 3.11 RPJMD 2025-2029 agar mampu mengawal outcome prioritas yang menjadi focus Pemerintah Daerah

2) Komponen Pengukuran
   - Pemerintah Kota Blitar telah memperbarui fitur pada aplikasi SAKIP yang mana memanfaatkan dialog kinerja hasil pengukuran kinerja berkala (Monev RKPD tribulanan) dalam proses penentuan strategi dan pengambilan keputusan yang bersifat jangka pendek sehingga target kinerja akhir tahun dapat tercapai ; dan
   - Pemerintah Kota Blitar telah menyusun manual IKU dalam RPJMD dan Renstra 2025-2029 (masing-masing pada BAB IV) sehingga seluruh indikator kinerja memiliki formulasi

dan alat ukur yang jelas disertai dengan sumber data yang akurat

3) Komponen Pelaporan
   - Pemerintah Kota Blitar telah memfasilitasi Desk LKj IP Perangkat Daerah Tahun 2024 bersama Tim Kota pada tanggal 25 - 27 Februari 2025, dengan menghimbau kepada PD untuk menyajikan informasi yang spesifik perihal hasil analisis faktor yang mempengaruhi tercapai atau tidaknya kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perencanaan, terutama kinerja yang belum tercapai sesuai target
   - Pemerintah Kota Blitar telah memanfaatkan capaian pada LKj IP dan LPPD sebagai dasar dalam penentuan strategi maupun target pada dokumen perencanaan selanjutnya. Hal ini terbukti:
     1) telah memanfaatkan capaian pada LKj IP Perangkat Daerah tahun 2024 dan isu strategis Perangkat Daerah (yang tersaji pada BAB II) sebagai inputan penentuan strategi dan target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (BAB III)
     2) telah memanfaatkan capaian pada LPPD Tahun 2024 (yang tersaji pada BAB II) sebagai inputan penentuan strategi dan target RPJMD Tahun 2025-2029 (BAB III dan IV)

4) Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
   Pemerintah Kota Blitar telah meningkatkan kualitas evaluasi AKIP internal Tahun 2025 melalui:
   - peningkatkan kapasitas APIP dengan mendatangkan narasumber dari KemenPAN RB
   - pemberian temuan dan rekomendasi yang spesifik pada LHE AKIP Internal Tahun 2025 sehingga dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh Perangkat Daerah

DAYA DUKUNG SECARA UMUM

1) Kerjasama tim lintas perangkat daerah sudah terwujud sehingga memudahkan dalam menyelesaikan tugas
2) Ketersediaan data pendukung yang komprehensif untuk proses perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal
3) Kebijakan pimpinan dalam mendukung terwujudnya AKIP di lingkungan Pemerintah Kota Blitar
4) Seluruh indikator pendukung akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dapat dijadikan satu kedalam satu aplikasi yaitu SAKIP dengan alamat www.sakip.blitarkota.go.id sehingga keseluruhan indikator AKIP bisa dipantau secara *realtime*

Namun secara pencapaian angka perlu untuk ditingkatkan lagi mengingat capaian Kota Blitar masih sedikit dibawah capaian Provinsi Jawa Timur sehingga perlu adanya perbaikan berkelanjutan yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas implementasi SAKIP. Berdasarkan LHE SAKIP Kota Blitar Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB, maka SAKIP Kota Blitar di tahun 2025 memperoleh predikat A dengan skor 81,19 atau meningkat 1,13 dibandingkan dengan Tahun 2024. Capaian ini merupakan wujud konsistensi komitmen Pimpinan tertinggi sampai level terbawah dalam mengimplementasikan SAKIP lebih

tepat sasaran dan berorientasi hasil, setelah 7 (tujuh) tahun berturut-turut berada pada kategori "BB".

Berdasarkan LHE ini maka terdapat 12 (dua belas) rekomendasi yang disampaikan oleh tim evaluator Kementerian PAN dan RB yang perlu ditindaklanjuti dan segera dilakukan perbaikan oleh tim pendamping SAKIP tingkat kota maupun perangkat daerah. Evaluasi akuntabilitas kinerja ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana evaluasi tersebut meliputi 4 (empat) komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Dari 4 (empat) komponen tersebut Kota Blitar memperoleh penilaian sebagai berikut:

Nilai Evaluasi	Tahun lalu	Tahun ini
Nilai Komponen Perencanaan Kinerja	26,98	27,34

Catatan :
1. Penetapan target kinerja yang ditetapkan masih ditemukan ada yang mengalami kenaikan yang sedikit dan terlihat tidak signifikan sehingga berpotensi menurunkan daya dorong perencanaan terhadap outcome yang lebih baik;
2. Kualitas penjenjangan kinerja yang sudah disusun masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari penjabaran kinerja di level tactical dan operasional yang belum sepenuhnya menggambarkan hubungan sebab akibat yang cukup sehingga terlihat adanya kondisi kinerja yang belum terkawal di beberapa PD;
3. Aktivitas dalam rencana aksi masih didominasi oleh daftar kegiatan rutin. Aktivitas tersebut belum secara spesifik menggambarkan intervensi strategis yang diperlukan untuk mendorong pencapaian sasaran hasil, sehingga kontribusinya terhadap perbaikan kinerja menjadi terbatas;
4. Pelaksanaan rencana aksi tidak terdistribusi secara merata sepanjang tahun. Banyak aksi menumpuk pada semester II atau mendekati akhir tahun, sehingga efektivitas pengendalian kinerja berkurang dan risiko tidak tercapainya target menjadi lebih tinggi. Pola ini menunjukkan bahwa perencanaan aksi belum mempertimbangkan kebutuhan langkah bertahap dan kesinambungan intervensi.

Rekomendasi :
1. Instansi disarankan menyesuaikan kembali tingkat ambisi target dengan memastikan adanya ruang peningkatan yang jelas dari kinerja sebelumnya. Penajaman target perlu dilakukan agar arah peningkatan kinerja lebih terukur dan bermakna.
2. Terus menggoptimalkan pohon kinerja yang ada dengan memastikan CSF yang disusun telah berdasarkan analisis data dan bukti yang menggambarkan faktor pengungkit kinerja yang paling berpengaruh terhadap pencapaian sasaran. Penyusunan CSF harus mencerminkan kondisi riil instansi, bukan

dari 6 11/02/2026, 20.4

bersifat normatif serta telah menggambarkan hubungan kausalitas jika maka. Sehingga penjabaran kinerja dari level atas hingga bawah telah berdasarkan faktor yang mempengaruhi dan menggambarkan hubungan sebab akibat yang logis;
3. PD disarankan meninjau kembali aktivitas yang telah disusun dan menyesuaikannya agar mencerminkan langkah-langkah strategis yang mendukung pencapaian outcome. Aktivitas yang terlalu administratif atau rutin perlu digeser menjadi aksi yang memiliki nilai tambah terhadap capaian kinerja.
4. PD disarankan meninjau ulang timeline rencana aksi dengan mempertimbangkan urutan logis intervensi dan kebutuhan penyelesaian bertahap. Penyesuaian ini penting agar progres kinerja dapat dipantau secara rutin dan tidak terkonsentrasi pada akhir tahun.

Nilai Komponen Pengukuran Kinerja	23,07	23,37

Catatan :
1. Ketaatan pengisian informasi capaian secara berkala atas renaksi yang dimiliki belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari belum terinfonya faktor keberhasilan dan kegagalan kinerja dan penginformasian realisasi belum disampaikan dalam laporan monev renaksi;
2. Faktor penghambat yang diidentifikasi dalam pengukuran kinerja cenderung berulang tanpa adanya rencana tindak lanjut yang jelas. Pola ini menunjukkan bahwa proses pengukuran berkala belum dimanfaatkan sebagai alat pembelajaran dan perbaikan, sehingga fungsi monitoring tidak menghasilkan perubahan yang nyata terhadap peningkatan kinerja;
3. Hasil pengukuran kinerja belum dimanfaatkan secara memadai untuk melakukan penyesuaian strategi, program, maupun intervensi. Proses monitoring cenderung berhenti pada pelaporan capaian tanpa diikuti dengan revisi arah kebijakan atau perbaikan langkah aksi, sehingga pembelajaran dari kinerja tidak diterjemahkan menjadi perubahan strategi yang diperlukan.

Rekomendasi :
1. Mendorong ketaatan pengisian capaian secara berkala di setiap jenjang dalam sistem dengan dilengkapi dengan informasi kondisi selama mencapai

dari 6 11/02/2026, 2

Rekomendasi :
1. Instansi disarankan meninjau ulang proses penyusunan laporan evaluasi agar mencakup identifikasi masalah utama, penyebab deviasi, serta rekomendasi perbaikan yang relevan dan realistis. Penguatan konten ini akan membantu memastikan bahwa laporan evaluasi benar-benar memberikan arah perbaikan kinerja;
2. Instansi disarankan memperluas cakupan evaluasi dengan menambahkan indikator atau kriteria yang mencerminkan budaya kinerja—misalnya kedisiplinan pengukuran, kualitas dialog kinerja, konsistensi tindak lanjut, dan cara unit merespons masalah. Penilaian ini akan membantu memperjelas faktor non-teknis yang memengaruhi capaian kinerja.

Nilai Total Evaluasi AKIP Final	80,06	81,19

dari 6 11/02/2026, 20.43

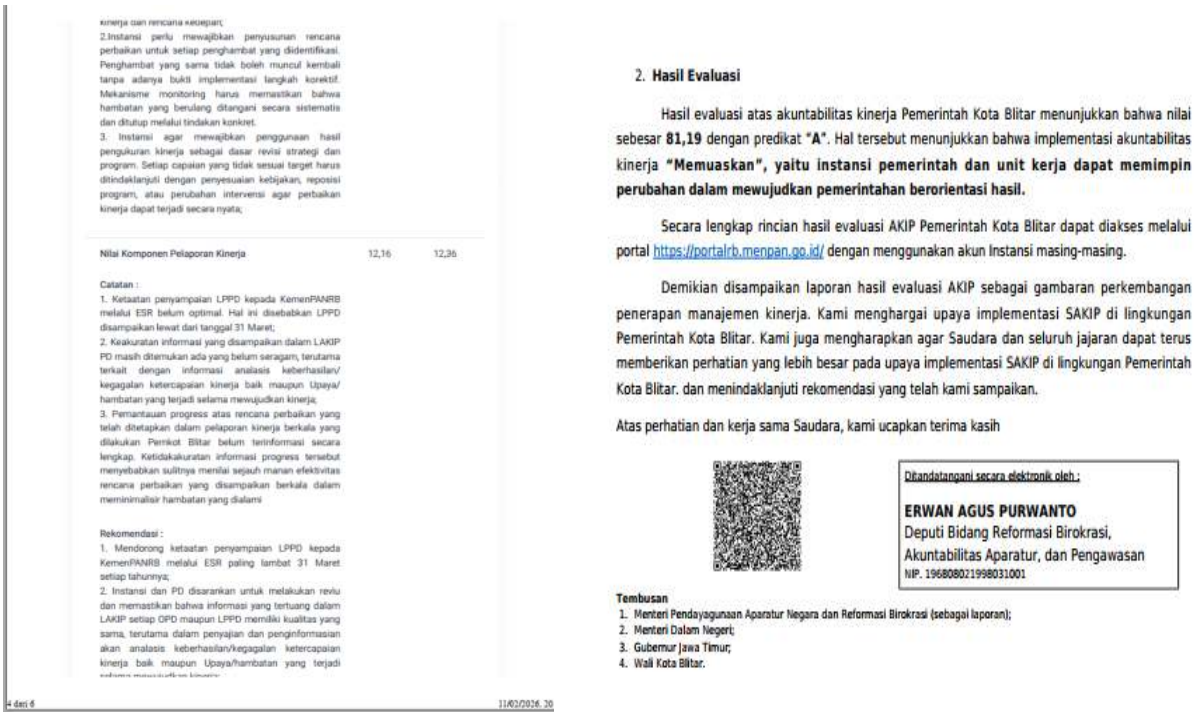

kinerja dan rencana kedepan;
2.Instansi perlu mewajibkan penyusunan rencana perbaikan untuk setiap penghambat yang diidentifikasi. Penghambat yang sama tidak boleh muncul kembali tanpa adanya bukti implementasi langkah korektif. Mekanisme monitoring harus memastikan bahwa hambatan yang berulang ditangani secara sistematis dan ditutup melalui tindakan konkret.
3. Instansi agar mewajibkan penggunaan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar revisi strategi dan program. Setiap capaian yang tidak sesuai target harus ditindaklanjuti dengan penyesuaian kebijakan, reposisi program, atau perubahan intervensi agar perbaikan kinerja dapat terjadi secara nyata;

Nilai Komponen Pelaporan Kinerja	12,16	12,36

Catatan :
1. Ketaatan penyampaian LPPD kepada KemenPANRB melalui ESR belum optimal. Hal ini disebabkan LPPD disampaikan lewat dari tanggal 31 Maret;
2. Keakuratan informasi yang disampaikan dalam LAKIP PD masih ditemukan ada yang belum seragam, terutama terkait dengan informasi analasis keberhasilan/ kegagalan ketercapaian kinerja baik maupun Upaya/ hambatan yang terjadi selama mewujudkan kinerja;
3. Pemantauan progress atas rencana perbaikan yang telah ditetapkan dalam pelaporan kinerja berkala yang dilakukan Pemkot Blitar belum terinformasi secara lengkap. Ketidakakuratan informasi progress tersebut menyebabkan sulitnya menilai sejauh manan efektivitas rencana perbaikan yang disampaikan berkala dalam meminimalisir hambatan yang dialami

Rekomendasi :
1. Mendorong ketaatan penyampaian LPPD kepada KemenPANRB melalui ESR paling lambat 31 Maret setiap tahunnya;
2. Instansi dan PD disarankan untuk melakukan reviu dan memastikan bahwa informasi yang tertuang dalam LAKIP setiap OPD maupun LPPD memiliki kualitas yang sama, terutama dalam penyajian dan penginformasian akan analasis keberhasilan/kegagalan ketercapaian kinerja baik maupun Upaya/hambatan yang terjadi

4 dari 6 11/02/2026, 20

2. **Hasil Evaluasi**

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Blitar menunjukkan bahwa nilai sebesar **81,19** dengan predikat **"A"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Memuaskan", yaitu instansi pemerintah dan unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.**

Secara lengkap rincian hasil evaluasi AKIP Pemerintah Kota Blitar dapat diakses melalui portal https://portalrb.menpan.go.id/ dengan menggunakan akun Instansi masing-masing.

Demikian disampaikan laporan hasil evaluasi AKIP sebagai gambaran perkembangan penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Kami juga mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat terus memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih

Ditandatangani secara elektronik oleh :
ERWAN AGUS PURWANTO
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
NIP. 196808021998031001

Tembusan
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Jawa Timur;
4. Wali Kota Blitar.

Sumber: LHE SAKIP Kota Blitar Tahun 2025 dari KemenPAN RB

Adapun penjelasan dan hasil evaluasi keempat komponen pendukung SAKIP untuk Pemerintah Kota Blitar dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. PERENCANAAN KINERJA

a) Penetapan target kinerja yang ditetapkan masih ditemukan ada yang mengalami kenaikan yang sedikit dan terlihat tidak signifikan sehingga berpotensi menurunkan daya dorong perencanaan terhadap outcome yang lebih baik;

b) Kualitas penjenjangan kinerja yang sudah disusun masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari penjabaran kinerja di level taktikal dan operasional yang belum sepenuhnya menggambarkan hubungan sebab akibat yang cukup sehingga terlihat adanya kondisi kinerja yang belum terkawal di beberapa PD

c) Aktivitas dalam rencana aksi masih didominasi oleh daftar kegiatan rutin. Aktivitas tersebut belum secara spesifik menggambarkan intervensi strategis yang diperlukan untuk mendorong pencapaian sasaran hasil, sehingga kontribusinya terhadap perbaikan kinerja menjadi terbatas.

d) Pelaksanaan rencana aksi tidak terdistribusi secara merata sepanjang tahun. Banyak aksi menumpuk pada semester II atau mendekati akhir tahun, sehingga efektivitas pengendalian kinerja berkurang dan risiko tidak tercapainya target menjadi lebih tinggi. Pola ini menunjukkan bahwa perencanaan aksi belum mempertimbangkan kebutuhan langkah bertahap dan kesinambungan intervensi

2. PENGUKURAN KINERJA

a) Ketaatan pengisian informasi capaian secara berkala atas renaksi yang dimiliki belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari belum terinfonya faktor keberhasilan dan kegagalan kinerja dan penginformasian realisasi belum disampaikan dalam laporan monev renaksi
b) Faktor penghambat yang diidentifikasi dalam pengukuran kinerja cenderung berulang tanpa adanya rencana tindak lanjut yang jelas. Pola ini menunjukkan bahwa proses pengukuran berkala belum dimanfaatkan sebagai alat pembelajaran dan perbaikan, sehingga fungsi monitoring tidak menghasilkan perubahan yang nyata terhadap peningkatan kinerja
c) Hasil pengukuran kinerja belum dimanfaatkan secara memadai untuk melakukan penyesuaian strategi, program, maupun intervensi. Proses monitoring cenderung berhenti pada pelaporan capaian tanpa diikuti dengan revisi arah kebijakan atau perbaikan langkah aksi, sehingga pembelajaran dari kinerja tidak diterjemahkan menjadi perubahan strategi yang diperlukan

3. PELAPORAN KINERJA

a) Ketaatan penyampaian LPPD kepada KemenPANRB melalui ESR belum optimal. Hal ini disebabkan LPPD disampaikan lewat dari tanggal 31 Maret;
b) Keakuratan informasi Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja PD masih ditemukan ada yang belum seragam, terutama terkait dengan informasi analisis keberhasilan/kegagalan ketercapaian kinerja baik maupun upaya/hambatan yang terjadi selama mewujudkan kinerja;
c) Pemanfaatan progress atas rencana perbaikan yang telah ditetapkan dalam pelaporan kinerja berkala yang dilakukan Pemkot Blitar belum terinformasi secara lengkap. Ketidakakuratan informasi progress tersebut menyebabkan sulitnya menilai sejauh mana efektivitas rencana perbaikan yang disampaikan berkala dalam meminimalisir hambatan yang dialami.

D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

a) Laporan hasil evaluasi internal masih memiliki kualitas penginformasian yang belum merata. Masih ditemukan laporan hasil evaluasi yang belum menyajikan temuan kritis yang menggambarkan akar masalah dan area kinerja yang perlu diperbaiki. Selain itu, rekomendasi perbaikan yang diberikan tidak cukup tajam maupun operasional sehingga tidak dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi;
b) LHE AKIP Internal masih menyampaikan informasi akan dokumen, angka capaian kinerja, dan ketercapaian kinerja makro. Belum sepenuhnya melihat bagaimana perilaku pegawai, pola kerja unit, maupun komitmen dan keterlibatan pimpinan dalam memberikan informasi akan keberhasilan dan kegagalan kinerja. Hal ini menyebabkan evaluasi AKIP masih belum menggambarkan OPD untuk mencapai hasil yang berkelanjutan

Terhadap kelemahan-kelemahan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka kedepan perlu dilakukan perbaikan – perbaikan melalui rencana aksi sebagai berikut:

Tabel 2.3.22
Rencana Aksi Perbaikan SAKIP Kota Blitar

No	Perangkat Daerah	Rencana Aksi
1	Bapperinda	1) Menyesuaikan target dengan memastikan adanya ruang peningkatan yang jelas dari kinerja sebelumnya. Penajaman target perlu dilakukan agar arah peningkatan kinerja lebih terukur dan bermakna 2) Terus mengoptimalkan pohon kinerja yang ada dengan memastikan CSF yang disusun telah berdasarkan analisis data dan bukti yang menggambarkan faktor pengungkit kinerja yang paling berpengaruh terhadap pencapaian sasaran. Penyusunan CSF harus mencerminkan kondisi riil instansi, bukan bersifat normatif serta telah menggambarkan hubungan kausalitas jika maka. Sehingga penjabaran kinerja dari level atas hingga bawah telah berdasarkan faktor yang mempengaruhi dan menggambarkan hubungan sebab akibat yang logis 3) Mewajibkan seluruh PD menyusun rencana perbaikan untuk setiap penghambat yang diidentifikasi. Penghambat yang sama tidak boleh muncul kembali tanpa adanya bukti implementasi langkah yang konkrit. Mekanisme monitoring harus memastikan bahwa hambatan yang berulang ditangani secara sistematis dan ditutup melalui tindakan yang konkrit
2	BKPSDM	Mendorong pemanfaatan hasil monev untuk penyesuaian rencana aksi Perangkat Daerah serta penyesuaian RHK (Rencana Hasil Kerja) setiap pegawai
4	Diskominfotik	Mendorong kepada seluruh PD dan Tim SAKIP Kota untuk memanfaatkan aplikasi SAKIP dalam proses perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal
5	Bagian Organisasi	1) Meningkatkan ketaatan penyampaian LPPD kepada KemenPAN RB melalui ESR paling lambat 31 Maret setiap tahunnya 2) Memastikan bahwa informasi yang tertuang dalam LKj IP PD dan LPPD memiliki kualitas yang sama, terutama dalam penyajian dan penginformasian akan analisis keberhasilan/kegagalan ketercapaian kinerja baik maupun upaya/hambatan yang terjadi selama mewujudkan kinerja 3) Mewajibkan kepada seluruh PD untuk mencantumkan status progress perbaikan dalam setiap laporan kinerja berkala, termasuk langkah yang telah dilaksanakan, kendala yang masih dihadapi, dan rencana tindak lanjut berikutnya
6	Inspektorat Daerah	1) Meninjau ulang proses penyusunan laporan evaluasi agar mencakup identifikasi masalah utama, penyebab deviasi, serta rekomendasi perbaikan yang relevan dan realistis. Penguatan konten ini akan membantu memastikan bahwa laporan evaluasi benar-benar memberikan arah perbaikan kinerja 2) Memperluas cakupan evaluasi dengan menambahkan indikator atau kriteria yang mencerminkan budaya kinerja-misalnya kedisiplinan pengukuran, kualitas dialog kinerja, konsistensi tindak lanjut, dan cara unit merespons masalah. Peniaian ini akan membantu memperjelas faktor non-teknis yang mempengaruhi capaian kinerja
7	Seluruh Perangkat Daerah	1. Meninjau kembali aktifitas yang telah disusun dan menyesuaikannya agar mencerminkan langkah-langkah strategis yang mendukung pencapaian outcome. Aktifitas yang terlalu administratif atau rutin perlu digeser menjadi aksi yang memiliki nilai tambah terhadap capaian kinerja

No	Perangkat Daerah	Rencana Aksi
		2. Meninjau ulang *timeline* rencana aksi dengan mempertimbangkan urutan logis intervensi dan kebutuhan penyelesaian bertahap. Penyesuaian ini penting agar proses kinerja dapat dipantau secara rutin dan tidak terkonsentrasi pada akhir tahun 3. Ketaatan pengisian capaian secara berkala atas renaksi yang dimiliki dengan dilengkapi informasi kondisi selama mencapai kinerja dan rencana kedepan 4. Memastikan bahwa informasi yang tertuang dalam LKj IP PD diserta dengan penyajian dan penginformasian akan analisis keberhasilan/ kegagalan ketercapaian kinerja baik maupun upaya/hambatan yang terjadi selama mewujudkan kinerja 5. Mencantumkan status progress perbaikan dalam setiap laporan kinerja berkala, termasuk langkah yang telah dilaksanakan, kendala yang masih dihadapi, dan rencana tindak lanjut berikutnya

2. Indikator Kinerja: Status EKPPD

Target 2025	: Tinggi (3,474)
Realisasi 2025	: Sedang (3,3670)*
Capaian 2025	: 96,92%

RPJMD 2026	
Target: Sangat Tinggi (3,3538)**	Capaian 100,39%

**) *kondisi akhir RPJMD (2026) menyesuaikan Perda Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 dan telah tercapai pada tahun 2024*

Gambar 2.3.49
Tren Status EKPPD Kota Blitar dibandingkan dengan Jawa Timur Tahun 2023 – 2025

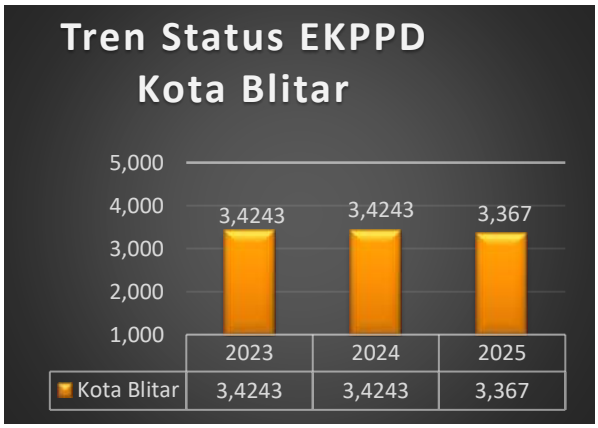

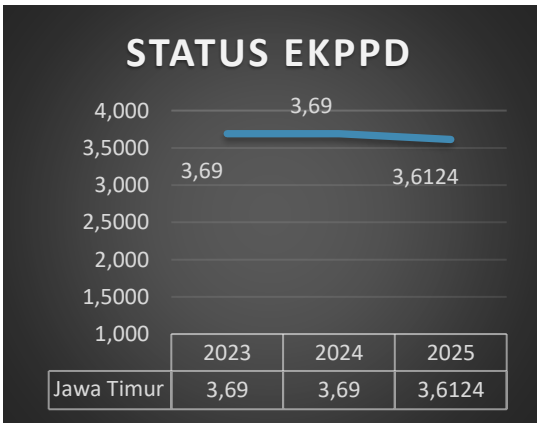

Sumber: SK Menteri Dalam Negeri tentang Hasil EPPD secara Nasional

Pencapaian Status EKPPD Kota Blitar diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan oleh Kemendagri dan/atau melalui Biro Pemerintahan dan Otoda Provinsi Jawa Timur pada tahun yang ditentukan, dimana mulai tahun 2022 terdapat perubahan kebijakan berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimana salah satunya terkait penetapan "Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" yakni dengan nilai yang lebih tinggi akan turun statusnya karena adanya kenaikan range dari kebijakan sebelumnya. Sehingga capaian Kota Blitar tahun 2024 berdasarkan LPPD Kota Blitar Tahun 2022 dari target 3,353 (kategori Sangat Tinggi berdasarkan Permendagri 73 Tahun 2009) terealisasi sebesar 3,4243 (kategori Sedang berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020).

Jika disandingkan dengan capaian Kota Blitar Tahun 2025, yang berasal dari target 3,474 (kategori Tinggi yang didasarkan Permendagri 18 Tahun 2020) terealisasi sebesar 3,3670 (kategori Sedang berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020). Capaian angka ini terdapat pada lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional tahun 2024 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023.

Secara umum jika ditinjau dari sisi internal Pemerintah Daerah, maka sejauh ini keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sangat didukung adanya:

1) Sebagian besar indikator telah terakomodir dalam dokumen perencanaan
2) Kolaborasi antar Perangkat Daerah pelaksana urusan untuk mendukung salah satu indikator
3) Dilakukan desk data pencapaian kinerja Perangkat Daerah tahun 2025 di awal tahun 2026 bersama dengan bidang yang menangani
4) kerjasama dan koordinasi yang sinergi dengan PD selaku penyedia dan penyusun data capaian kinerja
5) Aplikasi E-LPPD Kota Blitar yang membantu penginputan data capaian kinerja PD

Sedangkan faktor penghambat dalam proses penyajian pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga perlu diminimalisir yakni:

1) Kurangnya pemahaman perangkat daerah terhadap data dukung IKK LPPD sesuai Permendagri 19 tahun 2024, dikarenakan terbitnya pedoman baru terkait penyusunan LPPD tahun 2025 di tanggal 13 Februari 2026 dengan IKK yang sebagian besar berbeda dengan tahun sebelumnya
2) Waktu yang sangat terbatas, mengingat: awal tahun banyak agenda dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Seperti: Penyusunan Renja 2027, Audit Keuangan dan Pertanggungjawaban BPK, LKj IP, LKD, LKPJ, LPPD.
3) Publikasi data capaian indikator makro daerah yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat (biasanya rilis akhir Mei-Juni) sehingga capaian kinerja pemerintah daerah yang bersifat makro ebagian belum bisa terlaporkan *real time*

4) Masih lemahnya monev berjenjang di Perangkat Daerah atas penyajian data capaian kinerja yang bersifat strategis

Sehingga guna mempertahankan capaian Status EKPPD Pemerintah Kota Blitar, maka perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1) Melakukan perbaikan data kinerja dan data dukung melalui E-LPPD Kota Blitar berdasarkan Kertas Kerja Evaluasi
2) Perbaikan data kinerja dan data dukung yang dihasilkan selama proses evaluasi EPPD harus dijadikan dasar perbaikan di E-LPPD
3) Tim Penyusun LPPD Kota Blitar agar mempedomani standar kebenaran data dukung yang diatur dalam juknis/juklak EPPD agar data dukung IKK valid, handal dan dapat dipertanggung jawabkan
4) Membangun sistem pengukuran kinerja secara periodik (triwulan/semester) serta memperkuat komitmen Kepala Perangkat Daerah dalam memenuhi data pendukung
5) Mengintegrasikan IKK seluruh Perangkat Daerah pada waktu penyusunan dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek

No	Kinerja Utama/Sasaran RPJMD/Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3 *100	6	7	8	9=8/7 * 100	10=5/9
10.	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah**								
	- Nilai SAKIP	**80,11 (A)**	**81,19 (A)**	**101,35%**	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	**568.176.850.129**	**533.839.454.493**		
					Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	**842.259.539**	**775.259.710**		
					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	**660.679.900**	**603.069.853**		
					Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	**711.726.200**	**707.932.873**		
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan	**695.108.000**	**649.570.150**		

No	Kinerja Utama/Sasaran RPJMD/Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3 *100	6	7	8	9=8/7 * 100	10=5/9
					dan Asistensi				
	- Status EKPPD	Tinggi (3,474)	Sedang (3,3670)	96,92%	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	11.806.515.635	11.309.982.034		
					Program Administrasi Pemerintahan Desa	22.000.000	21.450.000		
					Program Perekonomian dan Pembangunan	1.123.637.319	1.019.112.577		
Rata-rata capaian				99,14	TOTAL	584.038.776.722	548.925.831.690	93,99	1,05

Dari hasil pencapaian kinerja diatas jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja keuangan akan menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 1,05 atau masuk kategori efisien.

KINERJA UTAMA 11
Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah

Indikator Kinerja:
Opini BPK atas LKPD

Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021-2026
WTP	WTP	100%	WTP	100%

Program yang mendukung Sasaran	Anggaran	Realisasi	Capaian Keuangan (%)
Program Pengelolaan keuangan daerah	1,601,972,780	1,521,818,870	
Program penyelenggaraan pengawasan	2,560,183,880	2,408,099,091	
Program pengelolaan pendapatan daerah	2,533,637,075	2,235,673,008	
Program pengelolaan barang milik daerah	5,867,765,212.44	5,228,442,739	
Jumlah	**12,563,558,947.44**	**11,394,033,708**	**90.69%**

Uraian Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	**100%**	**90,69%**	**1,10**	**Efisien**

Gambar 2.3.50
Tren Perolehan Opini atas LKPD di wilayah Jawa Timur Tahun 2009-2024

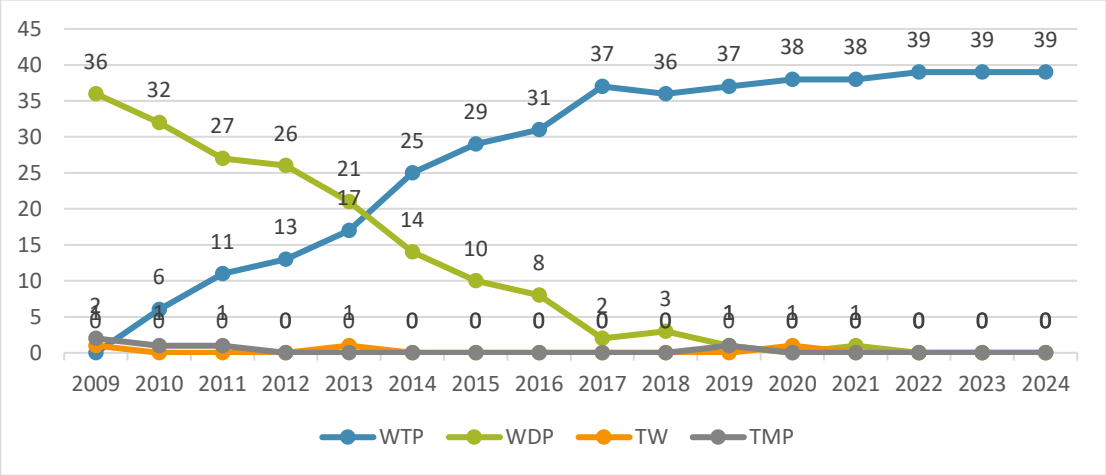

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
WDP : Wajar Dengan Pengecualian
TW : Tidak Wajar
TMP : Tidak Memberikan Pendapat
Sumber: BPK RI, 2025

WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian merupakan predikat tertinggi yang diberikan oleh auditor eksternal, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Predikat ini diberikan apabila penyajian laporan keuangan telah dilakukan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Untuk memperoleh opini tersebut tentu tidaklah mudah, karena terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Pertama, materi laporan keuangan yang disajikan kepada BPK untuk diaudit harus benar-benar diperoleh melalui proses akuntansi yang tertib, transparan, dan sesuai dengan kaidah dalam SAP. Seluruh akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, maupun laporan lainnya harus dapat diyakini kewajarannya oleh auditor serta didukung oleh bukti pendukung yang memadai, akurat, dan akuntabel.

Kedua, seluruh transaksi yang terjadi, baik yang berkaitan dengan pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah, harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, objektivitas, transparansi, serta bebas dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporannya, dengan tetap memperhatikan tingkat materialitas yang dapat ditoleransi oleh BPK.

Ketiga, seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan harus didukung oleh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang memadai, sehingga mampu menjamin keandalan

pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data dan grafik di atas diketahui bahwa Pemerintah Kota Blitar telah memperoleh Opini WTP atas LKPD sejak tahun 2010 secara berturut-turut, dan menjadi salah satu pemerintah daerah di Jawa Timur yang mampu mempertahankan predikat tersebut hingga 15 kali berturut-turut. Hal ini terbukti jika dibandingkan dengan daerah lain, Pemerintah Kota Blitar masih unggul, seperti Kota Malang memperoleh Opini WTP sebanyak 14 kali berturut-turut. Sedangkan Pemerintah Daerah lainnya di sekitar wilayah Blitar memperoleh Opini WTP sebanyak 9 (delapan) kali berturut-turut adalah Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang dan Kota Batu. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Blitar sejak tahun 2010 secara konsisten menerapkan tata kelola keuangan yang baik, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dokumen anggaran, pengawasan dan pertanggungjawabannya.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut juga terdapat efisiensi dalam pelaksanaan anggaran. Faktor yang mempengaruhi tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran antara lain adalah persentase realisasi capaian keluaran (output) kegiatan dan persentase realisasi anggaran. Apabila capaian keluaran kegiatan tinggi sementara realisasi anggaran relatif lebih rendah dari pagu yang tersedia, maka pelaksanaan anggaran dapat dinilai efisien. Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain:

a. Perencanaan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran, sehingga alokasi anggaran dapat digunakan secara optimal untuk mencapai target kinerja.
b. Peningkatan kualitas penganggaran berbasis kinerja, yang menekankan keterkaitan antara input, output, dan outcome.
c. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun teknologi informasi.
d. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mampu meminimalkan potensi pemborosan, kesalahan administrasi, dan ketidakefisienan dalam pelaksanaan kegiatan.
e. Peningkatan koordinasi dan pengawasan internal, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan tepat waktu, tepat biaya, dan tepat sasaran.
f. Pemanfaatan digitalisasi sistem keuangan dan administrasi pemerintahan, yang membantu meningkatkan akurasi data, mempercepat proses pelaporan, serta mengurangi biaya operasional.

Faktor pendukung tercapainya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Blitar selama 15 kali berturut-turut antara lain sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan daerah terhadap tata kelola keuangan yang akuntabel.
   Kepala daerah dan jajaran pimpinan perangkat daerah memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komitmen tersebut semakin diperkuat dengan ditetapkannya Kota Blitar sebagai Kota Percontohan Anti Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menjadi wujud pengakuan atas upaya pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi.

2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) secara konsisten.
   Proses pencatatan, pengukuran, hingga penyajian laporan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

3. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
   Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang memadai mampu meminimalkan risiko kesalahan pencatatan, penyimpangan dalam pengelolaan keuangan, serta meningkatkan keandalan penyajian laporan keuangan. Selain itu, implementasi SPIP juga berperan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tingkat maturitas SPIP Pemerintah Kota Blitar yang telah mencapai Level 3 (Terdefinisi) menunjukkan bahwa unsur-unsur pengendalian intern telah diterapkan secara sistematis, terdokumentasi, dan mulai terintegrasi dalam proses manajemen organisasi. Kondisi ini menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berkontribusi terhadap keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah.

4. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola keuangan.
   Aparatur pengelola keuangan daerah secara berkelanjutan mendapatkan pembinaan, pelatihan, serta pendampingan dalam bidang pengelolaan keuangan dan akuntansi pemerintahan.

5. Pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
   Penggunaan aplikasi sistem informasi keuangan daerah membantu meningkatkan akurasi pencatatan transaksi, konsistensi data, serta mempercepat proses penyusunan laporan keuangan.

6. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara konsisten.
   Pemerintah Kota Blitar secara konsisten dan proaktif menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga permasalahan yang ditemukan pada pemeriksaan sebelumnya dapat segera diperbaiki serta diminimalisir agar tidak terulang kembali pada periode pemeriksaan berikutnya. Komitmen tersebut tercermin dari capaian persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI sampai dengan Semester II Tahun 2024 yang telah mencapai 94,66%, yang menunjukkan tingginya tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi auditor serta memperkuat kualitas pengelolaan keuangan daerah.

7. Penguatan fungsi pengawasan internal oleh APIP (Inspektorat).
   Peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang akuntabel. Melalui pelaksanaan reviu atas laporan keuangan, pembinaan, konsultasi, serta pengawasan internal secara berkelanjutan, Inspektorat turut memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, kapabilitas APIP Pemerintah Kota Blitar yang telah mencapai Level 3 (Integrated) menunjukkan bahwa fungsi pengawasan intern telah berjalan secara efektif, terintegrasi dengan proses manajemen organisasi, serta mampu memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kualitas pengendalian intern dan pengelolaan keuangan daerah.

Faktor penghambat pencapaian Opini WTP atas LKPD Pemerintah Kota Blitar diantaranya sebagai berikut:

1. Pengelolaan aset daerah yang belum sepenuhnya tertib.
   Permasalahan yang masih ditemui berkaitan dengan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD), seperti pencatatan aset yang belum lengkap, ketidaksesuaian antara kondisi fisik dengan pencatatan dalam neraca, serta keterlambatan dalam proses inventarisasi, rekonsiliasi, dan penghapusan aset yang sudah rusak atau tidak dapat dimanfaatkan.
2. Kualitas administrasi dan dokumentasi keuangan yang belum sepenuhnya memadai.
   Dalam beberapa kegiatan masih ditemukan dokumen pendukung transaksi yang belum lengkap, kurang tertib dalam pengarsipan, atau belum sepenuhnya memenuhi standar administrasi yang dipersyaratkan dalam proses audit.
3. Pemahaman dan kompetensi pengelola keuangan pada sebagian perangkat daerah yang masih perlu ditingkatkan
   Perubahan regulasi di bidang pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi pemerintahan, serta penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan menuntut peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan agar pencatatan dan pelaporan keuangan dapat dilakukan secara tepat, akurat, dan sesuai ketentuan.
4. Koordinasi dan konsolidasi data keuangan antar perangkat daerah yang belum optimal
   Proses rekonsiliasi data antara pengurus barang, bendahara, dan pejabat penatausahaan keuangan pada beberapa perangkat daerah terkadang belum berjalan secara optimal sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan data pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi pemerintah daerah.
5. Kepatuhan terhadap prosedur dan pengendalian internal yang masih perlu diperkuat
   Meskipun sistem pengendalian intern telah diterapkan, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kegiatan yang belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga berpotensi menimbulkan temuan administratif dalam pemeriksaan.
6. Keterbatasan sistem informasi yang terintegrasi secara menyeluruh
   Belum seluruh proses pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, dan pelaporan kinerja terintegrasi secara optimal dalam satu sistem informasi yang terpadu sehingga masih memerlukan proses rekonsiliasi manual yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data.

7. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang memerlukan waktu penyelesaian
   Beberapa rekomendasi hasil pemeriksaan memerlukan proses administrasi, verifikasi, maupun penyelesaian lintas perangkat daerah sehingga membutuhkan waktu dalam penyelesaiannya apabila tidak didukung dengan koordinasi yang kuat.
8. Implementasi manajemen risiko yang belum sepenuhnya terinternalisasi dan terintegrasi dalam proses pengelolaan keuangan daerah
   Penerapan manajemen risiko pada sebagian perangkat daerah masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya menjadi bagian dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan. Hal ini menyebabkan potensi risiko dalam pengelolaan keuangan daerah belum teridentifikasi dan dimitigasi secara optimal sejak tahap perencanaan.

Dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Pemerintah Kota Blitar perlu terus melakukan penguatan tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan. Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Strategi penguatan yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
   Pemerintah Kota Blitar akan terus meningkatkan kualitas penerapan SPIP pada seluruh perangkat daerah agar pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan berjalan secara efektif, efisien, serta mematuhi ketentuan yang berlaku. Penguatan dilakukan melalui peningkatan maturitas SPIP, penyusunan pengendalian yang memadai, serta pengawasan berkelanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pelaporan keuangan.
2. Optimalisasi Peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
   Inspektorat akan terus meningkatkan kualitas fungsi pengawasan melalui kegiatan reviu laporan keuangan, audit internal, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta pembinaan kepada perangkat daerah. Penguatan kapabilitas APIP juga dilakukan agar mampu memberikan *early warning system* dan konsultasi pengelolaan keuangan kepada perangkat daerah.
3. Peningkatan kualitas pengelolaan dan penatausahaan aset daerah
   Upaya penertiban pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) akan terus dilakukan melalui inventarisasi berkala, rekonsiliasi data aset, pemutakhiran pencatatan dalam sistem informasi aset, serta percepatan penyelesaian permasalahan aset seperti penghapusan barang rusak berat atau penyelesaian status hukum aset.
4. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pengelola keuangan
   Pemerintah Kota Blitar akan terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan dan pengurus barang melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, serta pendampingan teknis dalam penerapan sistem akuntansi pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
5. Penguatan implementasi manajemen risiko dalam pengelolaan keuangan daerah
   Pemerintah Kota Blitar akan memperkuat penerapan Manajemen Risiko sebagai bagian integral dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Implementasi Manajemen Risiko diarahkan agar setiap perangkat daerah mampu mengidentifikasi, menganalisis,

serta mengendalikan risiko yang berpotensi mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi maupun keandalan pelaporan keuangan. Selain itu, penyusunan peta risiko dan rencana mitigasi akan diintegrasikan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan keuangan sehingga potensi kesalahan pencatatan, ketidaksesuaian prosedur, maupun penyimpangan dapat diminimalkan sejak dini.

6. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
   Pemerintah Kota Blitar akan terus mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah guna meningkatkan akurasi data, mempercepat proses rekonsiliasi, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan.
7. Peningkatan efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI
   Pemerintah Kota Blitar akan terus memperkuat mekanisme pemantauan dan percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, sehingga permasalahan yang ditemukan dapat segera diperbaiki dan tidak berulang pada pemeriksaan berikutnya.
8. Penguatan komitmen pimpinan dan budaya integritas dalam pengelolaan keuangan daerah
   Komitmen kepala daerah dan seluruh pimpinan perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi akan terus diperkuat melalui peningkatan budaya integritas, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan keuangan daerah.

No	Kinerja Utama/Sasaran RPJMD/ Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5 = 4/3 *100	6	7	8	9	10 = 5/9
11.	**Meningkatnya kualitas tata kelola kuangan dan asset daerah**				Program Pengelolaan keuangan daerah	1,601,972,780	1,521,818,870		
	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	100 %	Program penyelenggaraan pengawasan	2,560,183,880	2,408,099,091		
					Program pengelolaan pendapatan daerah	2,533,637,075	2,235,673,008		
					Program pengelolaan barang milik daerah	5,867,765,212.44	5,228,442,739		
Rata-rata capaian				**100%**	**TOTAL**	**12,563,558,947,44**	**11,394,033,708**	**90,69 %**	**1,05**

Dari hasil pencapaian kinerja diatas jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja keuangan akan menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 1,05 atau masuk kategori efisien.

KINERJA SASARAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target RPJMD 2026	Capaian terhadap RPJMD 2026
Sangat Baik (89,40)	Sangat Baik (91,22)	102,04%	Baik (85,00)	107,32%

Survey Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mendapatkan *feedback* / umpan balik atas kuliatas pelayanan publik yang diberikan Pemerintah Kota Blitar kepada para pengguna layanan. Survey Kepuasan Masyarakat juga digunakan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Dalam melaksanakan survey kepuasan masyarakat didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformaasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017. Peraturan tersebut mengamanatkan dalam pelaksanaan survey dengan menggunakan 9 (sembilan) indikator yaitu:

1. Persyaratan Pelayanan
   a) Kemudahan persyaratan yang harus dipenuhi dalam memperoleh pelayanan
   b) Apakah prosedur dan dokumen yang dibutuhkan jelas dan tidak berbelit-belit
2. Prosedur Pelayanan
   a) Kejelasan dan kepastian prosedur dalam memberikan pelayanan
   b) Apakah prosedur yang ada mudah dipahami dan dilaksanakan
3. Waktu Pelayanan
   a) Kepastian waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pelayanan
   b) Apakah layanan diberikan sesuai dengan jangka waktu yang dijanjikan
4. Biaya/ tarif
   a) Kewajaran biaya yang dikenakan kepada masyarakat dalam mendapatkan layanan
   b) Apakah biaya layanan transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku
5. Produk Layanan
   a) Kesesuaian antara produk layanan yang diberikan dengan standar yang ditetapkan
   b) Apakah hasil layanan memenuhi harapan masyarakat
6. Kompetensi/kemampuan Petugas Pelayanan
   a) Kemampuan dan keterampilan petugas dalam memberikan pelayanan
   b) Apakah petugas memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai
7. Perilaku Petugas Pelayanan
   a) Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan
   b) Apakah petugas memberikan pelayanan dengan sikap yang baik dan profesional
8. Sarana dan Prasarana
   a) Ketersediaan fasilitas yang mendukung pelayanan
   b) Apakah fasilitas mendukung kenyamanan pengguna layanan
9. Pengaduan Pelayanan

a) Respons unit pelayanan terhadap keluhan dan saran dari masyarakat
b) Apakah ada mekanisme yang jelas untuk menangani pengaduan dan masukan masyarakat

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kota Blitar diperoleh dari hasil survey pada tahun berkenaan dengan memanfaatkan aplikasi sukma-e jatim, dimana capaian pada tahun 2025 adalah 102,04% termasuk kategori Sangat Berhasil, yang berasal dari target Sangat Baik (89,40) terealisasi dengan kategori Sangat Baik (91,22) meningkat sebesar 1,99 poin dari realisasi tahun 2024 sebesar 89,23 dan meningkat 5,62 poin dari realisasi tahun 2023 sebesar 85,60.

Nilai IKM Kota Blitar Tahun 2025 sebesar 91,22 (Sangat Baik), menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang ada dimasing-masing perangkat daerah mengalami perbaikan atau peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini juga menunjukkan komitmen dari seluruh ASN untuk terus meningkatkan kualitas dan perbaikan layanan. Adapun nilai IKM Tahun 2025 dimasing-masing perangkat daerah dapat kita lihat pada tabel dibawah ini.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada tahun 2025, berikut adalah gambaran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Badan, Dinas, Kecamatan, hingga Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Pemerintah Kota Blitar:

Tabel 2.3.23
Nilai IKM Tahun 2025

I. Kelompok Dinas

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN
1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	83.67	B	Baik
2	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	87.85	B	Baik
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	90.35	A	Sangat Baik
4	Dinas Kesehatan	90.45	A	Sangat Baik
5	Dinas ketahanan Pangan dan Pertanian	87.87	B	Baik
6	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	89.77	A	Sangat Baik
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	86.97	B	Baik
8	Dinas Lingkungan Hidup	88.28	B	Baik
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	87.42	B	Baik
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	90.75	A	Sangat Baik
11	Dinas Pendidikan	88.21	B	Baik
12	Dinas Perhubungan	90.88	A	Sangat Baik
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	90.52	A	Sangat Baik
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	89.84	A	Sangat Baik
15	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	95.3	A	Sangat Baik
16	Dinas Sosial	89.02	A	Sangat Baik

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	89.23	A	Sangat Baik

II. Kelompok Sekretariat dan Unsur Penunjang

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN
1	Satpol PP	91.92	A	Sangat Baik
2	Sekretariat Daerah	93.38	A	Sangat Baik
3	Sekretariat DPRD	89.78	A	Sangat Baik

III. Kelompok Badan dan Lembaga Teknis

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN
1	Inspektorat Daerah	93.53	A	Sangat Baik
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	93.53	A	Sangat Baik
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	93.54	A	Sangat Baik
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	90.61	A	Sangat Baik
5	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	87.75	B	Baik
6	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	89.08	A	Sangat Baik

IV. Kelompok Kewilayahan (Kecamatan)

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN
1	Kecamatan Kepanjenkidul	93.64	A	Sangat Baik
2	Kecamatan Sananwetan	91.65	A	Sangat Baik
3	Kecamatan Sukorejo	94.17	A	Sangat Baik

V. Kelompok Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesehatan

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN
1	RSUD Mardi Waluyo	93.54	A	Sangat Baik
2	Puskesmas Kepanjenkidul	87.41	B	Baik
3	Puskesmas Sananwetan	90.45	A	Sangat Baik
4	Puskesmas Sukorejo	89.93	A	Sangat Baik

Sumber: Sukma E-Jatim dan Hasil Kuesioner SKM, Diolah, Tahun 2025

Dari Perangkat Daerah yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat melalui aplikasi sukma-e Jatim, pada Tahun 2025 menghasilkan nilai rata-rata **91,22** masuk kategori **Sangat Baik** dan capaian tersebut sudah melampaui target akhir RPJMD 2026 yaitu **85 (Baik)**. Keberhasilan ini didukung oleh komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui perbaikan Standar Pelayanan sesuai dengan aturan yang berlaku, adanya standarisasi penggunaan *tools* pengukuran SKM, terdapat sarana prasarana yang memadai sebagai pendukung penyusunan SKM serta saran/ rekomendasi SKM tahun lalu dipergunakan untuk perbaikan kualitas pelayanan tahun berikutnya.

Berdasarkan pelaksanaan SKM Tahun 2025, kendala (3 nilai terendah dalam survey) yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan antara lain:

1) Waktu penyelesaian layanan masih belum sesuai dengan standar pelayanan
2) Sarana dan prasarana pelayanan masih belum memadai dan menimbulkan kesulitan bagi penerima layanan
3) Produk hasil layanan belum mampu memenuhi harapan penerima layanan.

Sehingga kedepan perlu ditempuh langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

No	Indikator prioritas	Nilai	Analisis	Rekomendasi/ Harapan Pengguna Layanan	Waktu Pelaksanaan
1	Waktu	87,97	Nilai terendah menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh pada tata kelola waktu pelayanan. Perangkat Daerah berkomitmen melakukan perbaikan berkelanjutan sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi pada aspek peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil	a. Evaluasi dan penyederhanaan SOP pelayanan untuk menghilangkan tahapan yang tidak efektif	1-2 bulan
				b. Penetapan dan publikasi standar waktu pelayanan sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat	1 bulan
				c. Penataan ulang pembagian tugas dan jam pelayanan petugas, khususnya pada jam sibuk	2-3 bulan
				d. Pengembangan dan optimalisasi sistem antrian atau layanan berbasis digital guna mempercepat proses pelayanan	6-12 bulan
2	Produk Spesifikasi	89,06	Nilai ini menunjukkan bahwa kesesuaian antara produk yang diterima masyarakat dengan standar spesifikasi yang ditetapkan OPD masih perlu diperkuat. OPD berkomitmen melakukan pembenahan pada aspek penetapan, kejelasan, dan konsistensi produk spesifikasi sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi pada aspek peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil	a. Peninjauan dan pemutakhiran spesifikasi produk agar sesuai dengan ketentuan, standar mutu, dan kebutuhan masyarakat.	2 bulan
				b. Penyusunan dokumen standar spesifikasi produk yang jelas, terukur, dan mudah dipahami oleh masyarakat	2 - 3 bulan
				c. Penguatan pemahaman petugas terhadap spesifikasi produk agar produk yang dihasilkan konsisten dengan standar yang ditetapkan	1 - 2 bulan
				d. Monitoring dan evaluasi kesesuaian produk secara berkala untuk menjamin mutu dan kepastian hasil yang diterima masyarakat	3 – 6 bulan
3	Sarana Prasarana	89,15	Sarana prasarana pelayanan dinilai cukup memadai, namun memerlukan peningkatan secara bertahap dan berkelanjutan. OPD berkomitmen melakukan pembenahan fasilitas pelayanan sebagai bagian dari Reformasi	a. Inventarisasi dan pemetaan kondisi sarana prasarana sebagai dasar perencanaan perbaikan dan penganggaran	1–2 bulan
				b. Pemeliharaan rutin serta penataan ulang ruang pelayanan untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi	3–6 bulan
				c. Pengadaan dan penambahan sarana pendukung pelayanan,	6–12 bulan

No	Indikator prioritas	Nilai	Analisis	Rekomendasi/ Harapan Pengguna Layanan	Waktu Pelaksanaan
			Birokrasi pada aspek pelayanan publik serta mendukung Asta Cita peningkatan kualitas hidup dan kenyamanan masyarakat	termasuk fasilitas aksesibilitas bagi kelompok rentan	
				d. Peningkatan kebersihan, keamanan, dan estetika ruang layanan sebagai bagian dari budaya pelayanan prima	Berkelanjutan

No	Kinerja Utama/ Sasaran RPJMD/ Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5 = 4/3 *100	6	7	8	9	10 = 5/9
12	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.490.464.521,64	1.349.455.783,00		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	**Sangat Baik (89,40)**	**Sangat Baik (91,22)**	**102,04**	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	46.465.745.279,13	43.285.653.231,00		
					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.077.717.786,00	956.390.958,00		
					Program Pendaftaran Penduduk	295.889.379,00	286.882.623,00		
					Program Pencatatan Sipil	146.835.600,00	142.567.920,00		
					Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	222.210.800,00	209.619.879,00		
					Program Pengelolaan Profil Kependudukan	15.048.000,00	14.960.000,00		
					Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	10.673.516.510,00	9.040.020.568,00		
					Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	3.216.536.136,00	3.120.111.099,00		
					Program Aplikasi Informatika	5.992.277.310,00	5.943.676.137,00		
					Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	200.529.150,00	198.470.445,00		

No	Kinerja Utama/ Sasaran RPJMD/ Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5 = 4/3 *100	6	7	8	9	10 = 5/9
					Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	167.765.200,00	145.387.251,00		
					Program Kepegawaian Daerah	2.849.991.100,00	2.391.218.209,00		
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.306.465.425,00	2.128.421.479,00		
					Program Pengelolaan Arsip	233.619.600,00	229.163.864,00		
					TOTAL	**75.354.611.796,77**	**69.441.999.446,00**	**92,15**	**1,11**

Jika ditinjau dari efisiensi, yang dihasilkan dari pembandingan capaian kinerja dan pencapaian anggaran menghasilkan nilai efisiensi sebesar 1,11, yang artinya dalam menghasilkan kinerja sebesar 102,4% memerlukan realisasi anggaran sebesar 92,15%.

F. ANALISIS PROGRAM YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1) Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang demokratis														
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	**88,68**	**89,06**	**100,43%**	**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Persentase penyelesaian konflik keagamaaan	%	100	1.279.184.300,00	100	1.178.370.602,00	100	92,12	Kegiatan dialog antar umat beragama yang masih belum maksimal	Fasilitasi kegiatan dialog antar umat beragama melalui dana hibah Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Blitar
					Persentase kampung berkarakter Pancasila	%	14,3		19,08		133,43		Belum adanya pembinaan terhadap kampung Pancasila yang telah dilaunching	Pelaksanaan Seminar Wawasan Kebangsaan kepada masyarakat Kampung Pancasila
				Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	%	100	661.920.108,00	100	659.545.708,00	100	99,64	1.Pandangan minor terhadap Politik lokal oleh masyarakat. 2.Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan politik	Semakin sering menyampaikan Pendidikan politik kepada masyarakat, dengan berbagai metode/cara

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	%	89,1	28.448.240,00	89,31	26.529.200,00	100,24	93,25	Masih banyaknya ormas yang belum berbadan hukum	Edukasi kepada ormas-ormas yang sudah terdaftar di Bakesbangpol tetapi belum berbadan hukum
				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan kompetensi pembinaan sosial	%	79	177.003.100,00	92	148.600.200,00	116,5	83,95	Masih adanya konflik sosial di masyarakat	Pelaksanaan monitoring dan deteksi dini konflik sosial di masyarakat
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi Konflik Sosial yang terselesaikan	%	100	1.536.811.200,00	100	1.494.160.982,00	100%	97,22	Konflik sosial belum mendapatkan solusi penanganan secara optimal, belum tuntas, menumbuhkan konflik baru, hingga tidak jarang terkesan pembiaran dan berlarut-larut.	1. Sinergi, harmonisasi pengampu kebijakan/*Stake holder* dalam penanganan konflik; 2. Optimalisasi peran Timdu Penanganan Konflik Sosial 3. Sosialisasi, edukasi tentang pentingnya kewaspadaan dini; 4. Optimalisasi peran media massa

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	%	98,14	4.037.098.314,96	98,74	3.820.728.303,00	100,61	94,64	1. Kesadaran/ kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang masih rendah, 2. Peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum masih kurang.	1. Optimalisasi pelaksanaan sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat 2. Meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
					Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan	%	97,71		97,96		100,55		1. Pelanggaran perda dan perkada masih tinggi disebabkan kurang optimalnya beberapa Perda yang berlaku. 2. Kurangnya petugas PPNS penegak Perda. 3. Kurangnya koordinasi dengan OPD yang bersangkutan.	1. Melakukan perubahan Perda Trantibum. 2. Mengusulkan DIklat PPNS melalui BKPSDM. 3. Koordinasi yang lebih intens dengan OPD terkait.
				Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase budaya lokal yang	%	100	533.467.	100	523.549.	100	98,14		

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					dikembangkan									
				Program Pembinaan Sejarah	Persentase kesejarahan yang dikembangkan	%	90	610.124.000,00	90	601.225.000,00	100	98,54		
				Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dikembangkan	%	70	30.000.000,00	70	28.480.000,00	100	94,93		
2) Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak														
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	**97,49**	**98,03***	**100,55%**	**Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan**	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	%	100	786.109.200,00	100	761.209.879,00	100	96,83		
					Persentase perempuan pengambilan keputusan publik	%	47		47		100			
					Persentase komposisi perempuan dI sektor bisnis	%	0,33		0,33		100	-		
				Program Perlindungan Perempuan	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif	%	100	154.872.409,00	100	126.383.956,00	100	81,61	Untuk Layanan Rujukan menyesuaikan kebutuhan Klien	Mensosialisasikan keberadaan UPT PPA

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					memberikan layanan perlindungan								sesuai hasil Asismen	
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase peningkatan pelembagaan pemenuhan hak anak	%	100	105.204.055,00	100	94.028.286,00	100	89,38		
				Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	%	100	215.210.923,00	100	192.088.252,00	100	89,26		
3) Meningkatnya derajat kesehatan dan daya saing SDM														
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	**82,71**	**82,03**	**99,18%**	**Program Pengelolaan Pendidikan**	Persentase Angka Kelulusan SD/MI	%	100	60.010.424.470	100	53.507.301.127	100	89,16		
					Persentase satuan Pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SD/MI)	%	95,86		95,24		99,34		adanya 1 lembaga yaitu SD Istimewa yang tidak akan bisa mencapai target akreditasi di atas atau sama dengan B karena kekhususannya.	
					Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B	%	84,62		85		100,45			

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					(Akreditasi SMP/MTs)									
					Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs	%	100		100		100			
					Persentase satuan Pendidikan PAUD dan PNF berakreditasi minimal B	%	33,52		76,25		227,48			
					Persentase anak berkebutuhan khusus yang tertutaskan sesuai hasil assesment	%	100		100		100			
					Persentase Satuan pendidikan yang memperoleh pendidikan anti Korupsi	%	100		100		100			
				Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang dikembangkan	%	100	780.871.200,00	100	750.351.624,00	100	96,09		
					Persentase tenaga pendidik yang menerima peningkatan	%	40		49		122,50			

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					kapasitas pendidikan anti korupsi									
				Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang berkompetensi amat baik	%	31,70	6.964.170.500,00	47	6.820.468.334,00	148,26	97,94		
					Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	%	90		90		100			
				Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase satuan pendidikan PAUD dan PNF yang memiliki izin operasional yang masih berlaku	%	100	17.210.000,00	100	15.508.202,00	100	90,11		
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM)	%	100	68.129.761.400,00	100	65.795.237.148,83	100	96,57		
					Persentase ibu bersalin mendapatkan	%	100		100		100			

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					pelayanan persalinan (SPM)									
					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (SPM)	%	100		100		100			
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar (SPM)	%	100		100		100			
					Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan	%	100		100		100			
					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100		100		100			
					Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan	%	100		100		100			

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					skrining kesehatan sesuai standar (SPM)									
					Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100		100		100			
					Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100		100		100			
					Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100		100		100			
					Persentase ODGJ berat yang	%	100		100		100			

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)									
					Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)	%	100		100		100			
					Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)	%	100		100		100			
					Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan Kesehatan	%	100		100		100			
					Persentase kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	%	100		100		100			
					Persentase penduduk terdampak	%	100		100		100			

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani									
					Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan	%	70		84,62		120,89		Ada 11 indikator kesehatan lingkungan sesuai standar dari 13 indikator yang ada	
					Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina	%	77,78		43,59		56,04		Masih ada 88 penyelenggara kesehatan yang belum dibina karena keterbatasan waktu dan anggaran	
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		100		100			
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi	%	100	711.361.400,00	100	684.566.914,00	100	96,23		

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					sesuai standar									
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase pengelolaan fasilitas layanan kefarmasian yang sesuai standar	%	100	319.434.225,00	100	311.787.144,00	100	97,61		
					Persentase tempat pengelolaan makanan minuman yang memenuhi syarat Kesehatan	%	92,67		86,85		93,72		Masih ada 46 TPP dalam tahap pemenuhan rekomendasi dan 10 pengusaha IRTP yang belum mengikuti bimtek PKP dikarenakan terdaftar di Desember 2025	Akan dijadwalkan bimtek PKP di tahun 2026
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri	%	85,71	2.789.075.900,00	85,71	2.672.183.085,00	100	95,81		
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang aktif	%	87	2.502.938.200,00	86,36	1.879.573.560,00	99,3	75,09	Manajemen Organisasi yang kurang optimal	Melaksanakan program pembinaan dan pendampingan manajemen organisasi secara berkala
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Kelompok Pramuka Aktif	%	73	328.651.200,00	75	328.648.199,00	102,73	100	Keterbatasan letak geografis kota blitar sehingga ada beberapa	Mengoptimalkan kelompok pramuka yang sudah ada

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
													kelompok pramuka yang tidak ada	
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan pembinaan atlet muda	%	42	6.875.156.622,00	46,27	6.649.404.938,00	110,16	96,72	Kurangnya pengalaman bertanding atlet muda	Memfasilitasi keikutsertaan atlet muda dalam kejuaraan daerah maupun provinsi
					Cakupan pelatih yang tersertifikasi	%	70		81.59		116,55		Kurangnya jumlah pelatih yang mempunya sertifikat	Menginventarisir pelatih yang blm bersertifikat untuk diusulkan mengikuti sertifikasi
					Cakupan fasilitas olahraga sesuai standar	%	73		73,68		100,93		Keterbatasan sarana dan prasarana latihan yang memadai	peningkatan dan pemerataan sarana prasarana latihan secara bertahap
				Program Pengendalian Penduduk	Rata-rata usia kawin pertama wanita	tahun	25,14	218.275.625,00	26,7	185.194.712,00	106,21	84,84		
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	indeks	8,55	1.296.710.800,00	8,1	1.000.569.706,00	105,26	77,16		

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase peserta KB aktif	Persen	74,4		67,4		90,59			
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase anggota kelompok Tribina dan UPPKS yang ber KB	Persen	74,4	1.233.256.087,0	74,20	1.182.988.036,0	99,73	95,92		
				Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan	indeks	87	844.468.229,00	89,40	812.592.400,00	102,27	96,23		
					Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	rasio	3,5		3,5		100			
4) Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat														
Angka Kemiskinan	**6,63%**	**6,60%**	**100,45%**	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	Persentase penurunan Rumah Tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial	%	1,42	14.587.442.039,00	18,53	14.232.352.900,00	1.304,93	97,57	1. Ketergantungan pada bantuan yang bersifat konsumtif, lemahnya integrasi dan pemutakhiran data sehingga bantuan kurang tepat sasaran, kurang maksimalnya upaya	Melaksanakan penanganan kemiskinan secara terpadu dengan perlindungan sosial integratif yang didukung ketersediaan data yang akurat dan mutakhir

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
													pemberdayaan dan pendampingan KPM agar terentas dari kemiskinan 2. Data penerima manfaat yang dinamis/sering berubah baik status sosial ekonomi, perpindahan domisili dan perubahan struktur keluarga sehingga berpengaruh terhadap penetapan target kinerja maupun anggaran	
					Persentase peningkatan PMKS terlatih	%	16,3		13,22		81,10		Adanya peserta pelatihan yang mengundurkan diri karena ada pekerjaan lain yang tidak bisa ditinggalkan	Lebih selektif dalam menetapkan peserta pelatihan
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka konsumsi energi per kapita	(kkal/ kap/ hari)	2150	123.513.900,00	2.160	119.392.250,00	100,47	96,66	Masih tingginya preferensi beras sebagai sumber pangan utama, sehingga penganekaragama	Sosialisasi pola pangan B2SAH, Promosi Gemarikan pada usia anak sekolah (SD)

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Angka ketersediaan energi perkapita/ hari	(kkal/ kap/ hari)	2.200		2.554,44		116,11		n pangan masih belum optimal.	untuk meningkatkan konsumsi ikan dan Pemberian bantuan PMT untuk balita rawan stunting
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase balita rawan pangan yang tertangani	%	62	39.299.100,00	28,19	38.467.975,00	45,47	97,89	Efisiensi anggaran menyebabkan keterjangkauan penangganan rawan pangan tidak maksimal	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait (Dinkes) untuk perbaikan data sasaran berdasarkan tingkat keparahan
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Tingkat keamanan pangan segar (%)	%	100.00	14.235.000,00	100	14.160.100,00	100	99,47		
5) Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat														
Indeks Gini	**0,352**	**0,340**	**103,41%**	**Program Rehabilitasi Sosial**	Persentase peningkatan PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	%	0,88	957.632.069,00	0,88	914.688.229,00	100	95,52	Rendahnya motivasi untuk meningkatkan kemandirian ekonomi akibat ketergantungan yang berlebihan terhadap Bansos	Penguatan program perlindungan sosial yang tepat sasaran yang didukung perbaikan kualitas data penerima manfaat serta pemberian Bansos produktif

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	100	1.087.764.600,00	100	971.778.691,00	100,00	89,34	Kurang optimalnya kapasitas PSKS dalam memenuhi tuntutan pelayanan kesejahteraan sosial yang permasalahannya semakin kompleks	Meningkatkan kapasitas PSKS melalui pembinaan/Bimtek secara kontinyu dengan materi disesuaikan dengan kebutuhan/permasalahan sosial yang menonjol
6) Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat														
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	**4,97%**	**4,28%**	**113,88%**	**Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja**	Persentase alumni pelatihan yang telah bekerja	%	49	2.699.031.000,00	55	2.473.147.442,00	112,24	91,63		
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	82	93.266.000,00	87	81.449.099,00	106,10	87,33		
					Persentase jumlah calon tenaga kerja yang terserap melalui bursa kerja online	%	18		23		127,78			

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Hubungan Industrial	Persentase perselisihan industrial yang diselesaikan	%	100	94.019.800,00	100	52.943.590,00	100,00	56,31		
7) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi														
Laju Pertumbuhan Ekonomi	**5,37%**	**5,31%**	**98,88%**	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi	%	60	78.852.000,00	60,45	58.933.000,00	100,75	74,74	- Adanya tantangan fiskal akibat kebijakan pemangkasan dana transfer ke daerah membatasi kemampuan pemerintah kota dalam membiayai proyek pembangunan strategis - Penurunan daya beli rumah tangga, akibat ekonomi makro	- mempertahankan iklim investasi yang baik melalui peningkatan pelayanan publik - revitalisasi pasar rakyat - menciptakan Blitar Trade Center untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan Izin Sesuai SOP	%	99,6	297.511.000,00	100	282.508.388,00	100,4	94,96		
				Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan informasi potensi investasi yang dipromosikan	%	55	257.396.974,00	55,3	256.788.000,00	100,55	99,76		

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peningkatan perusahaan tertib pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	%	80	94.742.500,00	86,10	90.252.150,00	107,63	95,26		
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana prasarana pasar dalam kondisi baik	%	73	5.355.235.454,00	81,82	4.943.249.059,00	111,32	92,31	Batas waktu yang terlalu pendek untuk melakukan pengawasan di setiap termin sehingga tidak maksimal dalam memantau di setiap pekerjaan meskipun terselesaikan dengan baik.	Cepat cermat untuk menunjuk pihak ketiga sehingga dalam teknisnya bisa terselesaikan dengan baik dengan kualitas yang sudah tertuang dalam kesepakatan sekalipun waktu yang diberikan sangat pendek dengan kerjasama OPD dan pihak ketiga setiap saat terpantau dalam pengawasan konsultannya.
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok	Persentase hasil monitoring harga bahan pokok dan	%	100	202.713.400,00	100	193.318.359,00	100	95,37	1. Kondisi cuaca dan bencana alam mempengaruhi kualitas dan	1. Pengawasan dan pemantauan harga dan ketersediaan

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				dan Barang Penting	barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan								kuantitas komoditas hortikultura 2. Kondisi cuaca dan factor ekonomi sangat mempengaruhi tingkat inflasi berdampak signifikan terhadap kestabilan harga	stok pada bahan pokok dan bahan penting dilakukan secara berkala 2. Pengawasan pasar ditekankan pada komoditas yang mengalami kondisi labil
				Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat UTTP bertanda tera sah	%	50	107.040.900,00	62,94	106.514.900,00	125,88	99,51	1. Banyak pedagang berpindah ketimbangan elektronik 2. Banyak pedagang berjualan kemasan jadi	1. Dilakukan tera ulang secara door to door 2. Melakukan sosialisasi meterologi kepemilik UTTP
				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Peningkatan IKM	%	5	3.548.677.514,00	6,20	3.022.927.547,00	134	85,18	Minimnya minat generasi muda untuk berusaha pada sektor IKM startup lokal	Membuat program untuk menumbuhkan wirausaha muda, inkubasi bisnis, dan kompetisi kewirausahaan
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan sarpras kawasan pariwisata	%	50	971.673.800,00	50	939.200.110,00	100	96,66		

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Makam Bung Karno									
				Program Pemasaran Pariwisata	Persentase destinasi pariwisata baru yang sudah dikunjungi oleh wisatawan	%	0,08	764.659.488,00	0,08	752.316.100,00	100	98,39		
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku ekraf yang aktif dalam kegiatan	%	4,2	29.266.600,00	5,35	25.680.000,00	127,38	87,75		
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase peningkatan koperasi dengan volume usaha	%	38	694.813.400,00	32,03	682.313.86	84,29	98,20		
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang mengalami peningkatan volume usaha	%	1,95	692.141.200,00	2,28	662.459.038,00	116,92	95,71		
					Persentase pengembangan pemasaran Usaha Mikro berbasis digital	%	2,5		3,7		148,00			
				Program Pengembangan UMKM	Persentase WUB yang berhasil	%	1,9	413.832.	2,94	399.312.	154,74	96,49		

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					dikembangkan									
				Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan	%	24	79.118.800,00	0	78.529.121,00	0%	99,25		
				Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Peningkatan Kepatuhan koperasi	%	36	16.471.700,00	7,55	15.098.	20,97	91,66		
				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Peningkatan koperasi sehat (keuangan dan manajerial)	%	32	63.303.700,00	8	63.302.800,00	25,00	100,00		
				Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi	%	37,8	190.288.600,00	7,35	188.591	19,44	99,11		
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase sarana pertanian yang tersedia	%	73,1	489.882.800,00	74,37	476.104.120,00	101,74	97,19		
					Persentase peningkatan penanganan limbah ternak di tingkat peternak	%	98,25		98,25		100,00			
					Persentase pengawasan peredaran obat hewan	%	55		56,5		102,73			

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dapat berfungsi dan dalam kondisi baik	%	70,7	1.681.168.992,00	69,7	1.414.576.155,00	98,59	84,14	Curah hujan tinggi yang menyebabkan kenaikan ekstrim debit air pada saluran irigasi menyebabkab terganggunnya proses rehabilitasi JITUT	Melakukan perencanaan ulang rehabilitasi JITUT dengan memperhatikan potensi perubahan cuaca ekstrim.
					Persentase produk RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal)	%	100.00		100		100			
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pengendalian OPT sesuai dengan prosedur	%	100	17.675.000,00	100	16.872.000,00	100	95,46	Masih belum optimalnya penyediaan bantuan bahan untuk penanganan hama dan penyakit tanaman.	- Meningkatkan penyediaan bantuan bahan untuk penangganan hama dan penyakit tanaman baik kimia maupun organik. - Meningkatkan pembinaan dan pendampingan kepada petani dalam pengelolaan hama dan penyakit tanaman terpadu.

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase usaha pertanian yang memenuhi standar rekomendasi teknis	%	42,85	6.352.100,00	52,17	6.071.500,00	121,75	95,58	- Pelaku usaha skala kecil masih mengalami kesulitan dalam penggunaan sistem OSS, sehingga proses pengajuan izin menjadi lambat. - Masih adanya anggapan bahwa perizinan usaha pertanian/ peternakan rumit dan memerlukan biaya tinggi menurunkan minat pelaku usaha untuk mengurus izin.	- Penguatan Sosialisasi dan Edukasi Perizinan meliputi alur proses dan persayaratan sesuai dengan perauran yang berlaku - Pembinaan dan pengawasan penerapan perizinan usaha pertanian/ peternakan.
					Persentase usaha peternakan dan produk asal hewan yang memenuhi rekomendasi persyaratan teknis	%	49,23		50,87		103,33			
				Program Penyuluhan Pertanian	Persentase rata-rata peningkatan nilai kelas kelompok tani	%	2	2.049.116.990,00	2,03	1.954.190.124,00	101,50	95,37	Kurangnya informasi kelompok tani akan manfaat kelembagaan koperasi tani untuk peningkatan kapasitas kelembagaan petani.	Melakukan sosialisasi dan pendampingan pembentukan koperasi tani melalui kerjasama dengan instansi terkait (Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja).
					Persentase kelompok tani yang menerapkan metode budidaya berorientasi agribisnis	%	19,05		21,43		112,49			
					Persentase produk	%	41,6		100		240,38			

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					tanaman pangan dan hortikultura yang dipasarkan secara digital									
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase unit usaha produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis pra Nomor Kontrol	%	48	229.588.700,00	50	225.186.814,00	104,17	98,08	- Kurangnya Pemahaman Teknis tentang persyaratan teknis dan prosedur pengajuan Pra NKV atau NKV. - Rendahnya Kesadaran dan Kepatuhan Peternak terhadap biosekuriti dan belum melaporkan kasus penyakit secara cepat.	- Penguatan Sosialisasi dan Edukasi manfaat sertifikasi Pra NKV dan NKV kepada pelaku usaha - Penguatan Pencegahan dan Deteksi Dini melalui peningkatan koordinasi kader pelapor kelurahan dan pelayanan kesehatan ternak terpadu
					Persentase unit usaha olahan hasil peternakan yang memenuhi standar	%	65		67,85		104,38			
					Persentase penyakit hewan ternak yang tertangani	%	100		100		100%			
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase kelompok perikanan budidaya yang memenuhi rekomendasi standart teknis	%	26,31	294.117.656,00	29,95	289.493.363,00	113,84	98,43	Masih terbatasnya pengetahuan sebagian pembudidaya terkait manajemen budidaya modern, terutama efisiensi pakan menyebabkan	- Pelatihan budidaya Ikan konsumsi dan ikan hias. - Melakukan pemantauan berkala kepada pembudidaya melalui pelayanan kesehatan ikan
					Persentase pemenuhan	%	17,21		17,29		100,46			

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					benih ikan yang berkualitas								produktivitas belum optimal.	dan lingkungan dan manajemen budidaya ikan hias.
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Volume penjualan hasil olahan perikanan	juta rupiah	38018	99.611.100,00	38.055	95.800.050,00	100,10	96,17	- Harga bahan baku produk hasil perikanan masih fluktuatif sedangkan harga produk olahan belum kompetitif. - Banyaknya skala usaha perikananan kecil. - Masih kurangnya inovasi/diversifikasi produk olahan hasil perikanan.	- Mendekatkan antara penyedia bahan baku dengan produsen produk olahan yang berbahan baku produksi perikanan lokal. - Meningkatkan diversifikasi produk olahan hasil perikanan melalui inovasi produk perikanan skala usaha. - Meningkatkan pembinaan dan pengawasan peijinan produk hasil perikanan
8) Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah														
Indeks Infrastruktur Daerah	**62,88**	**63,04**	**100,25%**	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**	Presentasi Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	%	99	7.820.076.567,	99	7.668.135.657,	100	98,06		

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase sistem penyediaan air minum (SPAM) dalam kondisi baik	%	90,1	265.365.000,00	90,1	126.601.000,00	100	47,71		
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dalam kondisi baik	%	85	1.074.295.180,00	94,68	912.642.108,00	111,39	84,95		
				Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	%	99,5	4.807.271.449,52	92,62	4.683.957.400,00	93,09	97,43		
				Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase fasilitas umum skala kota yang dibangun	%	95,83	9.388.632.271,45	95,83	8.838.590.620,00	100	94,14		
					Persentase gedung pemerintahan yang dibangun	%	95,65		95,65		100			
				Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	99,8	9.493.921.532,00	99,8	9.051.999.958,00	100	95,35		
					Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	99,8		100		104,55			

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program pengembangan jasa konstruksi	Presentase Pekerjaan konstruksi yang sesuai standart	%	100	612.177.100,00	100	449.447.483,00	100	73,42%		
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketersediaan Dokumen Tata Ruang	%	94,75	1.041.228.000,	100	883.450.962,00	105,54	84,85		
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kelengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	%	99,60	12.499.516.603,41	96,58	11.641.474.687,00	96,97	93,14	Kerusakan kelengkapan jalan akibat vandalisme/ pencurian serta kurangnya kepedulian pengguna jalan dalam turut memelihara asset perlengkapan jalan	Peningkatan kesadaran pengguna jalan dalam memanfaatkan perlengkapan jalan, serta upaya penambahan ketersediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan secara berkala
					Persentase prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik	%	96,98		98,94		102,02		Belum optimalnya pengelolaan terminal tipe C, dikarenakan semakin menjamurnya angkutan online	Optimalisasi pengelolaan terminal tipe C dengan memanfaatkan lahan yang ada untuk berbagai kegiatan Pemerintah Kota Blitar dengan pemungutan

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
														retribusi sesuai ketentuan
					IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum	Indeks	83,49		85,41		102,30		Masih kurang optimalnya kinerja juru parkir dalam pemungutan retibusi parkir tepi jalan umum	Monev pengawasan dan penertiban parkir secara berkala serta pembinaan juru parkir sesuai dengan SOP Parkir
					IKM terhadap layanan uji kendaraan bermotor	Indeks	92,2		92,59		100,42		Kurangnya kesadaran pemilik KBWU akan pentingnya kendaraan berkeselamatan	Sosialisasi dan publikasi pentingnya kendaraan berkeselamatan kepada pemilik KBWU
					IKM layanan Angkutan Sekolah Gratis	Indeks	90,92		89,96		98,94		Keterbatasan armada angkutan sekolah sehingga sering terjadi overloading	Penambahan armada angkutan sekolah dengan melalui usulan pada APBD maupun melalui CSR
					Persentase penurunan pelanggaran marka dan rambu lalu lintas	%	0,30		0,59		196,67		Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalulintas serta kondisi jalan dan kelengkapanya yang kurang ideal	Sosialisasi kelalulintasan dan peningkatan perlengkapan jalan sesuai ketentuan yang ideal

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni/ rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh	%	20,11	1.999.672.000,00	23,37	1.959.160.652,00	116,21	97,97	1. Data bersifat dinamis dan cenderung bertambah 2. Kondisi sosial ekonomi calon penerima bansos RTLH sangat mempengaruhi kemampuan swadaya yang berpengaruh pada kemampuannya sebagai penerima program	1. Verifikasi data 2. Sosialisasi kepada calon penerima RTLH tentang syarat dan mekanisme pelaksanaan bansos
					Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	%	0,62		0,62		100,00			
				Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah	%	100	1.810.982.315,00	100	1.705.194.410,00	100	94,16	1. Ketersediaan data maupun persyaratan teknis belum dapat menjangkau seluruh kebutuhan data dalam setiap tahapan SPM Bidang Perumahan	1. Mengidentifikasi data yang belum tersedia 2. Pemutakhiran data pelaksanaan SPM secara berkala 3. Koordinasi dengan BPBD

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
													Rakyat sebagaimana Permen PUPR 12 / 2023	dan OPD terkait
					Persentase tingkat hunian Rusunawa	%	95		95		100			
				Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh	%	2,4	3.513.381.566,07	2,42	2.966.768.142,00	100.83	84,44	Dinamika perubahan data dan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan ketidaksiapan calon penerima RTLH melanjutkan peningkatan rumah secara swadaya	Sosialisasi terus dilaksanakan agar calon penerima sanggup/bisa melaksanakan kelanjutan pembangunan sehingga tujuan peningkatan RTLH dapat tercapai
					Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	%	85,22		91,68		107,58		Penanganan jalan lingkungan yang dilakukan DPRKP hanya pada kawasan kumuh, sementara target yang dalam Renstra adalah semua drainase di kawasan permukiman sehingga perlu adanya koordinasi dengan PD yang menanganinya	Perlu adanya koordinasi dan kolaborasi antar PD dalam penanganan jalan dan drainase lingkungan di kawasan perumahan dan permukiman
					Persentase drainase lingkungan	%	88,12		98,84		112,17		Penanganan drainase lingkungan yang	Perlu adanya koordinasi dan kolaborasi antar

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					dalam kondisi baik di kawasan permukiman								dilakukan DPRKP hanya pada kawasan kumuh, sementara target yang dalam Renstra adalah semua drainase di kawasan permukiman sehingga perlu adanya koordinasi dengan PD yang menanganinya	PD dalam penanganan jalan dan drainase lingkungan di kawasan perumahan dan permukiman
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utiilitas Umum (PSU)	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	%	88	1.232.924.589	88,38	1.215.007.987	100,43	98,55	Masih ada pengembang yang belum melakukan penyerahan aset PSU Perumahan	1. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pengembang terkait penyerahan PSU Perumahan 2. Rekomendasi siteplan disusun dengan dilakukan koordinasi bersama OPD terkait
					Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	%	95		95,79		100,83			

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase kasus pertanahan yang ditindaklanjuti	%	100	16.400.000,00	100	2.750.000,00	100%	16,77	Kurang terbukanya pengelola/pemilik tanah terhadap permasalahan yang dihadapi	Koordinasi yang baik dengan Kantor Pertanahan dan Perangkat Daerah Terkait
				Program Penatagunaan Tanah	Persentase Tanah Aset Pemerintah Kota Bersertifikat	%	99	268.580.000,00	94,05	262.522.775,00	95,00	97, 74	Dokumen adminsitrasi kelengkapan permohonan belum memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan	Koordinasi yang baik dengan Kantor Pertanahan dan Perangkat Daerah Terkait
9) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup														
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH)	**67,02**	**67,33**	**100,46%**	**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (ton CO2eq)	%	11,69	385.233.600,00	9,5	379.781.268,00	81,27	98,58	Belum tercapainya Indeks Kualitas Udara Kota Blitar Tahun 2025 (nilai IKLH didapatkan dari perhitungan IKA, IKU, dan IKL)	Melakukan penanaman pohon yang memiliki tajuk lebar di wilayah Kota Blitar untuk meningkatkan nilai indeks kualitas lahan dan Melakukan pembinaan dan monev terhadap pelaku usaha industri dan peternak yang diindikasikan menyebabkan terjadinya pencemaran air dan
					Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	%	100		100		100			
					Persentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu	%	57		85,71		150,37			

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
														Berkoordinasi dengan DPUPR sebagai OPD yang memiliki tupoksi atas pengelolaan limbah domestik
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	2.600.000,00	100	2.476.250,00	100%	95,24	Masyarakat belum memahami prosedur pengaduan	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pihak eksternal
				Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	%	65	14.650.000,00	68,29	14.130.000,00	105,06	96,45	Usaha dan/atau kegiatan belum mengetahui prosedur izin lingkungan dan izin PPLH	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	%	100	31.047.500,00	100	31.037.500,00	100	99,97	Tidak ada permasalahan, pekerjaan dilaksanakan sesuai jadwal	Melakukan perencanaan dengan lebih baik agar realisasinya lebih tepat sasaran, dan selalu melakukan monev
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota	%	16,27	3.662.708.759,33	16,27	3.410.029.838,00	100	93,10		

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah tertangani	%	83,16	11.039.128.048,00	84,75	10.970.751.163,00	101,91	99,38		
					Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R	%	14,84		11,11		74,87			
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	%	100	296.475.400,00	100	274.944.348,00	100	92,74	Pemahaman yang belum sama diantara pegiat lingkungan	Memberikan apresiasi kepada semua organisasi pegiat lingkungan
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata)	%	28,4	305.964.200,00	33,33	287.204.191,00	117,36	93,87	Pemahaman yang belum sama diantara pegiat lingkungan	Memberikan apresiasi kepada semua organisasi pegiat lingkungan
					Jumlah Predikat pengelolaan lingkungan hidup (adipura)	kali	1		0					
					Persentase kelurahan berseri	%	53,97		87,3		161,76			
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara	%	100	2.890.000,00	100	2.885.000,00	100	99,83	Terjadinya perubahan jadwal dikarenakan adanya kepentingan mendadak dari	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pelaku usaha dan/atau kegiatan

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				dan Beracun (Limbah B3)	yang taat peraturan								pelaku usaha dan/atau kegiatan	
				Program Penanggulangan Bencana	Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana Kategori Madya	Kelurahan	3	994.478.260,27	3	815.238.078,00	100	81,98		
					Persentase SDM Penanganan Bencana yang Terlatih	%	94		94,39		100,41			
					Persentase Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pendukung Penanganan Bencana	%	70		70		100			
					Persentase Kecepatan Respon Kurang dari 24 Jam Untuk Setiap Status Darurat Bencana	%	100		100		100			
				Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani	%	100	316.595.800,00	100	294.628.529,00	100	93,06	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pencegahan bahaya kebakaran	Optimalisasi pelaksanaan sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat
				Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang	%	100	199.514.	100,00	172.394.	100,00	86,41	Bencana alam dan sosial terjadi sewaktu-waktu	Melakukan perencanaan program yang

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota								dan mendadak sehingga perencanaan dan perhitungan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana kurang akurat	bersifat penyediaan anggaran, pengingkatan kapasitas dan kesiapsiagaan SDM kesejahteraan sosial dalam rangka layanan perlindungan sosial korban bencana
				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP dalam kondisi baik	%	100	35.045.000,00	100,00	34.204.216,00	100	97,60	Terbatasnya SDM pengelola TMP yang memiliki kompetensi khusus serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga dan melestarikan TMP	1. Menyusun perencanaan pemeliharaan rutin TMP termasuk kebutuhan anggarannya 2. Pelaksanaan pemeliharaan rutin dan berkala terhadap bangunan dan lingkungan TMP serta peningkatan kapasitas SDM pengelola TMP
10) Meningkatnya akuntabilitas kinerja														

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
pemerintahan daerah														
- Nilai SAKIP	**80,11**	**81,19**	**101,35%**	**Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota**	Persentase OPD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi	%	86,21	568.176.850.129	86,21	533.839.454.493	100	93,96	1. Dinamika peraturan penerapan reformasi birokrasi (transisi implementasi RB menuju grand design RB Nasional 2025-2045) 2. Perlunya re-komitmen implementasi SAKIP mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal pada seluruh jenjang jabatan 3. Dinamika peraturan kelembagaan yang belum pasti 4. Beberapa OPD belum tepat waktu dalam pelaporan tindak lanjut SKM tahun 2024	1. Menyusun renaksi dan monev renaksi RB Tahun 2025 untuk mencapai target RB General dan Tematik 2025 berdasarkan *baseline* capaian tahun 2024 2. Pemanfaatan aplikasi SAKIP secara berkesinambungan dan menjadi budaya ASN 3. Selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait perkembangan kebijakan 4. Diadakan monev pelaporan tindak lanjut

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
													5. Beberapa OPD belum maksimal memanfaatkan aplikasi sukma-e 6. Masih ada beberapa OPD yang belum melaksanakan FKP	SKM per tribulan 5. Diadakan monev pemanfaatan sukma-e dan pelaporan SKM per tribulan 6. Sosialisasi kewajiban pelaksanaan FKP
					Persentase OPD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik	%	41,38		73,73		175,76		- Sebanyak 24 OPD/unit kerja dari total 33 OPD/unit kerja lokus memiliki IKM dengan kategori sangat baik - Beberapa OPD belum tepat waktu dalam pelaporan tindak lanjut SKM tahun 2025 dan belum maksimal memanfaatkan aplikasi sukma-e - Dari 9 Indikator yang digunakan dalam melaksanakan Survei	- Mendorong 9 OPD/unit kerja lokus untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada tahun 2026 - Diadakan monev pelaporan tindak lanjut SKM per tribulan, monev pemanfaatan sukma-e dan pelaporan SKM per tribulan - Rekomendasi peningkatan pelayanan indikator

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
													Kepuasan Masyarakat terdapat beberapa indikator yang memiliki nilai IKM paling rendah, yaitu: 1) Indikator sarana prasarana (89,15) 2) Indikator produk spesifikasi (89,06) 3) Indikator waktu (87,97)	sarana prasarana: melakukan pemeliharaan, optimalisasi fasilitas yang sudah tersedia dan menambah Fasilitas yang ramah disabilitas dan lansia
					Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89,00		93,38		104,92		Dari hasil SKM melalui sukma-e jatim pada pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Blitar yang dilakukan pada Tahun 2025 dihasilkan nilai 93,38 atau masuk kategori Sangat Baik dan perlu dipertahankan pada periode berikutnya. Unsur pelayanan	1) <u>Indikator Waktu</u> Mengarahkan petugas untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar waktu pelayanan yang sudah ditetapkan

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
													yang perlu ditingkatkan yakni waktu pelayanan, sarana prasarana dan produk spesifikasi.	2)<u>Indikator Sarana Prasarana</u> - Melakukan pemeliharaan dan optimalisasi fasilitas yang sudah tersedia pada Perangkat Daerah untuk meningkatkan pelayanan - Menambah Fasilitas yang ramah disabilitas dan lansia. - Menambah Fasilitas sesuai dengan yang dibutuhkan pengguna layanan 3)<u>Indikator Produk Spesifikasi</u> -Peningkatan kualitas pelayanan yang ada di Perangkat Daerah dengan membuat inovasi baru

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
														yang lebih efektif dan efisien
				Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Capaian Kinerja Tujuan RPJMD	**%**	99	842.259.539,00	99,10	775.259.710,00	100,1	92,05	Sumber data capaian kinerja tujuan dan sasaran berasal dari gabungan antara data kinerja perangkat daerah dan data statistik resmi, sehingga pada tahun berjalan belum dapat disajikan capaian kinerja secara final karena menunggu data kinerja Perangkat Daerah yang sebagian menunggu release dari BPS/Kementrian.	Melakukan koordinasi secara intens dengan Perangkat Daerah tentang data capaian kinerjanya.
					Persentase Capaian Sasaran RPJMD	**%**	97,2		94,27		96,98			
				Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang selaras terhadap RPJMD (Tujuan, Program, Indikator) dan RKPD (Tujuan, Program,	%	100	660.679.900,00	100	603.069.853,00	100	91,28	1. Adanya indikator kinerja yang mengalami kondisi ketika target terlalu tinggi atau rendah sehingga tidak sesuai dengan kondisi riil, serta adanya perubahan	1. Melakukan reviu perencanaan agar program dan indikator kinerja lebih terukur, realistis, dan selaras dengan RPJMD,

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Kegiatan, dan Indikator)								perencanaan di tengah tahun. 2. Monitoring dan evaluasi belum dilakukan secara rutin atau tindak lanjut hasil evaluasi belum maksimal.	Renstra, serta prioritas daerah.
					Persentase Capaian Program Perangkat Daerah	%	96		96,33		100,34			
				Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan daerah	%	100	711.726.200,00	100	707.932.873,00	100%	99,47	Belum optimalnya kualitas hasil litbang/Analisa sektoral untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah/kebijakan pemerintah daerah	- Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi/Lembaga yang berkompeten pada bidang kelitbangan dalam penyusunan riset/litbang - Melakukan identifikasi riset/litbang sesuai kebutuhan dalam perencanaan pembangunan

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100,00	695.108.000,00	100,00	649.570.150,00	100	93,45	1. Kelengkapan dokumen SAKIP Perangkat Daerah yang di sampaikan ke Inspektorat Daerah Kota Blitar sebagai bahan evaluasi sering kali tidak lengkap dan tidak tepat waktu 2. Komitmen pembangunan ZI pada Perangkat Daerah belum menyeluruh pada semua pegawai di Perangkat Daerah	1. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah 2. Meningkatkan koordinasi dan pendampingan OPD ZI
					Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	PD	30		30		100			
					Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)	PD	1		4		400			
- Status EKPPD	**Tinggi (3,474)**	**Sedang (3,3670)***	**96,92%**	**Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat**	Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	%	100	1.845.936.890,00	200	1.731.796.445,00	200	93,82	(1) Kurangnya pemahaman Perangkat Daerah terhadap data dukung IKK LPPD sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 sehingga belum menjadikan prioritas pencapaian IKK oleh Perangkat Daerah (2) Masih lemahnya monev	(1) Tim Penyusun LPPD Kota Blitar agar mempedomani standar kebenaran data dukung yang diatur dalam juknis/juklak EPPD agar data dukung IKK valid, handal dan dapat dipertanggung jawabkan (2)

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
													berjenjang di Perangkat Daerah atas penyajian data capaian kinerja yang bersifat strategis	membangun sistem pelaporan penyelenggaraan pemerintahan (lppd.blitarkota.go.id) (3) serta memperkuat koordinasi dan sinergi antar Perangkat Daerah dalam memenuhi data pendukung
					Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	%	100		100		100			
					Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi	%	100	709.040.840	100	672.385.233	100	94,83	Dinamisnya peraturan perundangan yang menuntut percepatan harmonisasi produk hukum daerah	- Inventarisasi dan penjadwalan penyusunan produk hukum - Kerjasama dengan pihak ketiga terkait harmonisasi produk hukum pusat dengan produk hukum kota blitar
					Persentase rumusan kebijakan	%	100	8.959.03	116,67	8.708.67	116,67	97,21	Belum optimalnya komitmen bersama dan	- Menyusun dan memonev

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti								persamaan persepsi antar stakeholder terkait implementasi kebijakan bidang keagamaan	rumusan kebijakan bidang bina mental spiritual secara berkala - Mensosialisasikan kebijakan yang mendukung pembinaan mental spiritual masyarakat
					Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	292.500.069,00	100	197.121.512,00	100	67,38	- Belum adanya peta kebijakan kesejahteraan rakyat yang bisa mendukung langsung pencapaian tujuan kesejahteraan sosial dan masyarakaT - Perlunya komitmen bersama dan persamaan persepsi antar stakeholder terkait implementasi rumusan kebijakan bidang	- Lebih intensif melakukan koordinasi kepada instansi vertikal sebagai Pembina Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat - Meningkatkan koordinasi lintas OPD guna memfasilitasi perumusan kebijakan yang menjadi kewenangan

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
													kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	nya dan mensosialisasikan kebijakan yang mendukung kegiatan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat
				Program administrasi pemerintahan desa	Persentase kelurahan tertib administrasi	%	85,71	22.000.000,00	85,71	21.450.000,00	100	97,50	minimnya akses aplikasi pada server pusat untuk mengisi profil kelurahan	mengevaluasi kedalaman, konsistensi, dan akurasi data yang telah di-update.
				Program perekonomian dan pembangunan	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	%	100	617.649.630,00	100	542.189.514,00	100%	87,78	- Belum maksimalnya kinerja BUMD akibat kekosongan jabatan direktur - Kurang optimalnya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD serta Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	- Melakukan percepatan restrukturisasi melalui penetapan Organ BUMD dengan penguatan komitmen melalui perjanjian kinerja dan penerapan ketentuan Perda yang menjadi dasar penyelenggaraan BUMD Optimalisasi Koordinasi,

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
														Sinkronisasi, dan Monev Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD serta Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
					Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	%	100	505.987.689,00	100	476.923.063,00	100	94,26	- Koordinasi antar OPD terkait dalam perumusan kebijakan bidang pembangunan belum optimal - Sistem aplikasi e-monev belum dapat terintegrasi dengan SIPD, sehingga paket pengadaan dan penganggaran belum dapat terpantau secara optimal. - Aplikasi dari LKPP sering error (SIRUP, LPSE, Katalog dan SIKAP) sehingga menghambat proses PBJ.	- Melakukan pemeliharaan dan upgrade aplikasi e-monev. - Memberikan batas waktu bagi OPD untuk mengembalikan revisi hasil reviu UKPBJ sesuai SOP. - Melaksanakan monitoring dan evaluasi RUP, realisasi PBJ pada LPSE dan realisasi PDN secara berkala. - Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait guna
					Persentase pengadaan barang dan jasa melalui *E-Procurement*	%	76,67		76,67		100			

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
													- Pada paket pekerjaan konstruksi, perencanaan juga dilaksanakan pada tahun berjalan pembangunan sehingga pelaksanaan pembangunan berjalan lambat menunggu perencanaan selesai	perumusan kebijakan administrasi pembangunan.
11) Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah														
Opini BPK atas LKPD	**WTP**	**WTP**	**100%**	**Program Pengelolaan keuangan daerah**	Persentase penyusunan laporan keuangan daerah tepat waktu	**%**	100	1.601.972.780,00	94,12	1.521.818.870,00	94,12	95,00	Dokumen tindak lanjut belum sesuai rekomendasi	Peningkatan kepatuhan dan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan
					Persentase Perangkat Daerah yang penyerapan anggarannya diatas 85%	%	98		96,55		91,48		Kurang Optimalnya Serapan Belanja Daerah dan Belum tepat waktunya penyusunan dokumen penganggaran daerah	Melaksanakan peyusunan dokumen keuangan daerah sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan mulai dari penganggaran, penatausahaan

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
														dan laporan keuangan
					Persentase tertib perencanaan keuangan daerah	%	100		78,26		78,26			
				Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	%	82,5	2.560.183.880,00	93,01	2.408.099.091,00	112,74	94,06	Kesesuaian tindak lanjut oleh OPD atas rekomendasi TLHP BPK yang dikumpulkan oleh auditan kurang sesuai	1. Memaksimalkan Aplikasi SI-PATRIAWAS untuk menyelesaikan rekomendasi BPK 2. Memfasilitasi konsultasi melalui klinik konsultasi pengawasan baik offline maupun online.
					Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	%	82,5		93,01		112,74			
					Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	%	90		94,66		105,18			
					Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	%	90		94,66		105,18			
					Persentase OPD yang telah menerapkan maturitas	%	100		100		100			

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					SPIP level terdefinisi (3)									
				Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase peningkatan target pendapatan pajak daerah	**%**	34,45	2.533.637.075,00	45,59	2.235.673.008,00	143,95	88,24	Kurang patuhnya Masyarakat (WP) dalam membayar pajak daerah, masih adanya pembayaran PAD secara tunai	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah serta meningkatkan digitalisasi penerimaan PAD
					Persentase peningkatan realisasi pendapatan pajak daerah	%	34,45		91,96		266,94			
				Program pengelolaan barang milik daerah	Persentase aset daerah yang diinventarisasi sesuai regulasi	%	45	5.867.765.212,44	45	5.228.442.739,00	100	89,10	Belum tertibnya OPD dalam mengelola BMD yang menjadi tanggungjawabnya	Melakukan pembinaan, optimalisasi pemanfaatan Simbada, rekonsiliasi dan mengimplementasikan penilaian pengelolaan BMD pada setiap OPD.
12) Meningkatnya kualitas pelayanan publik														
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	**89,40**	**91,22**	**102,04%**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	persen	100	1.490.464.521,64	100	1.349.455.783,00	100	90,54	1. Kepuasan penerima layanan Kecamatan Kepanjenkidul berkurang,	1. Adanya aplikasi AGEMAN MAS RAHMAT, untuk

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
													karena proses pelayanan yang lama 2. Perlunya menambah kecepatan penyelesaian pelayanan (Kecamatan Sananwetan)	mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul 2. Peningkatan sistem penyelenggaraan pelayanan publik (Kecamatan Sananwetan)
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	persen	100	46.465.745.279,13	100	43.285.653.231,00	100	93,16	Kurangnya koordinasi antar lembaga di masyarakat dan antar kecamatan dengan OPD lain ataupun instansi vertikal	Peningkatan koordinasi antar lembaga di masyarakat dan antar kecamatan dengan OPD lain ataupun instansi vertikal
					Persentase RT Berdaya	persen	100		100		100			
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	persen	100	1.077.717.786,00	100	956.390.958,00	100	88,74		

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pendaftaran Penduduk	1. Persentase peningkatan Kepemilikan e-KTP	%	0,03	295.889.379,00	0,07	286.882.623,00	233	96,96		
					2. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KIA	%	2,55		0		0		Capaian kepemilikan KIA 98,99%, tidak ada kenaikan namun dalam penentuan target awal renstra adalah 95% , sudah melampaui target yang ditetapkan	Mencetak KIA dari anak yang pindah masuk
					3. Persentase penerbitan dokumen KK	%	100		100		100			
				Program Pencatatan Sipil	1. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perkawinan	%	2,19	146.835.600,00	1,35	142.567.920,00	61,64	97,09	Capaian kepemilikan 93,49%, tidak ada kenaikan namun dalam penentuan target awal renstra adalah 90% sudah melampaui target yang ditetapkan	
					2. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perceraian	%	2,60		1,97		75,77%		Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukannya	mengoptimalkan sosialisasi/publikasi kepada masyarakat baik melalui sosialisasi langsung tatap muka yang dilaksanakan di Kecamatan se-

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
														Kota Blitar serta sosialisasi melalui media cetak/elektronik/sosial media terkait akan arti pentingnya melakukan update data kependudukan serta melakukan kerjasama yang masif antara Dispendukcapil dengan Pengadilan Agama terkait dengan perceraian
					3. Persentase penerbitan dokumen akta kematian	%	100		100		100%			
					4. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran	%	0,30		0,2		66,67		Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukannya	Melaksanakan sosialisasi kepada penduduk terkait akan arti pentingnya kepemilikan akta kelahiran baik melalui media sosial, website maupun tatap muka,

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
														melakukan layanan jemput bola melalui kegiatan SIDAK (Verifikasi Data Administrasi Kependudukan)
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan pemutakhiran jenis data kependudukan	%	16	222.210.800,00	16,7	209.619.879,00	104,38	94,33		
				Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase ketersediaan profil kependudukan sesuai dengan standart	%	100	15.048.000,00	100	14.960.000,00	100	99,42		
				Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD	%	100	10.673.516.510,00	100	9.040.020.568,00	100	84,70	Dalam pencapaian target kinerja program, semua kegiatan fasilitasi dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD telah dilaksanakan seluruhnya walaupun ada sisa 15,83% yang	Semua program, kegiatan sub kegiatan, telah dilaksanakan dengan kinerja 100 %, untuk anggaran yang tersisa merupakan penyediaan untuk fasilitasi DPRD

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
													sifatnya merupakan penyediaan fasilitasi untuk anggota DPRD	
					Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi penganggaran dan pengawasan	%	100		100		100		Fasilitasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam penganggaran dan pengawasan telah dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, secara kinerja telah tercapai 100 % sedangkan untuk anggaran masih ada sisa 13,84 % yang sifatnya merupakan penyediaan fasilitasi untuk anggota DPRD	Semua program, kegiatan sub kegiatan, telah dilaksanakan dengan kinerja 100 %, untuk anggaran yang tersisa merupakan penyediaan untuk fasilitasi DPRD
				Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase diseminasi dan layanan informasi yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM)	**%**	90	3.216.536.136,00	100	3.118.311.099,00	111,1	96,95	1. Rendahnya diseminasi informasi mengenai kebijakan dan hasil pembangunan, serta tantangan dalam memastikan informasi yang	1. Adanya pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi yang jelas serta struktur kelembagaan yang

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					dan SOP yang ditetapkan								disebarkan berkualitas dan mudah dipahami 2. Adanya sikap apatis dari masyarakat, perbedaan budaya, dan persepsi yang menghambat komunikasi yang terbuka dan jujur	mendukung (seperti Diskominfo dan PPID). 2. Melibatkan warga dalam musyawarah dan forum komunikasi untuk membangun kepercayaan dan partisipasi aktif 3. Adanya dasar hukum yang kuat (seperti Permendagri) yang mengatur tata kelola PPID 4. Pelayanan yang cepat, produk informasi berkualitas, dan kepuasan publik terhadap

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
														layanan yang diberikan.
					Persentase komunitas masyarakat/ mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah	%	95		100		105,3		1. Rendahnya diseminasi informasi mengenai kebijakan dan hasil pembangunan, serta tantangan dalam memastikan informasi yang disebarkan berkualitas dan mudah dipahami 2. Adanya sikap apatis dari masyarakat, perbedaan budaya, dan persepsi yang menghambat komunikasi yang terbuka dan jujur	1. Adanya aparatur fungsional (pranata humas, prana komputer) yang memahami komunikasi publik. 2. Kerjasama yang baik antar-Dinas/Badan /Kecamatan dalam menyediakan data dan informasi. 3. Penguatan komitmen, pelatihan SDM, dan peningkatan infrastruktur digital menjadi kunci utama untuk mengatasi kendala yang ada.

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase penerapan sistem elektronik dalam layanan publik	Persen	95	5.992.277.310,00	95	5.943.676.137,00	100	99,19	1. Aplikasi seringkali tidak berjalan baik pada perangkat dengan spesifikasi rendah atau ketinggalan zaman 2. Sulitnya mengintegrasikan aplikasi baru dengan sistem lama yang sudah ada	1. Adanya Peta Rencana SPBE 2. Meningkatnya ancaman digital mendorong pengembangan aplikasi keamanan yang lebih kuat. 3. Peningkatan keterampilan komputer dan pemahaman teknologi oleh SDM menjadi krusial untuk tenaga kerja masa kini. 4. Ketersediaan perangkat keras (komputer, server), jaring jaringan internet yang cepat, dan platform komputasi awan (cloud computing) yang stabil.

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data statistik yang terpublikasi menggunakan sistem elektronik	persen	98,31	200.529.150,00	100	198.470.445,00	101,72	98,97	Pembinaan statistik sektoral oleh BPS belum dilakukan secara optimal ke seluruh instansi	1. Adanya komitmen untuk menyelenggarakan statistik secara profesional dengan sumber daya manusia yang kompeten, beretika, dan berintegritas, mengolah data secara objektif. 2. Dorongan untuk menyediakan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan mudah diakses untuk menghindari interpretasi yang salah dan memastikan konsistensi. 3. Sistem yang Terintegrasi yang Membangu

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
														n sistem informasi yang menghubungkan data antar sektor 4. Pengawasan dan evaluasi berkala perihal Satu Data Indonesia
				Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase implementasi persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	persen	62,02	167.765.200,00	64	145.387.251,00	103,19	86,66	1. Rendahnya kesadaran dan kesepahaman tentang keamanan data dan informasi di lingkungan pemerintah daerah 2. Keterlambatan pembaruan data statistik sektoral. 3. masih adanya ego sektoral yang tinggi, di mana urusan keamanan informasi sering dilimpahkan ke Dinas Kominfo saja	1. Keamanan menjadi prioritas utama, menanamkan kesadaran pada pelaksana untuk menjaga kerahasiaan informasi sensitif agar tidak bocor 2. Sistem harus memberikan manfaat maksimal dalam mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintahan, terutama pertahanan dan

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
														pelayanan publi
				Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi	%	48,74	2.849.991.100,00	43,13	2.391.218.209,00	88,49	83,90		
					Persentase ASN yang memiliki nilai Prestasi Kinerja minimal 80	%	93,06		99,79		107,23			
					Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	48,21		61,56		127,69			
					Persentase data kepegawaian yang valid	%	73		73,89		101,22			
					Persentase pemenuhan pegawai sesuai kebutuhan	%	67		75,48		112,66		Perubahan jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan ASN dari Pemerintah Pusat (Kementerian PANRB dan BKN) yang bersifat dinamis	Melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan Kementerian PANRB dan BKN untuk memperoleh informasi terkini terkait jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan ASN, serta melakukan

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
														penyesuaian perencanaan dan jadwal kegiatan internal agar tetap selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Selain itu, menyiapkan dokumen dan kebutuhan teknis sejak dini guna memastikan proses seleksi dapat dilaksanakan secara optimal meskipun terjadi perubahan jadwal.
					Persentase penempatan jabatan sesuai kompetensi	%	91,38		100		109,43	%		
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN dengan pendidikan tinggi dan menengah	%	96,8	2.306.465.425,00	100	2.128.421.479,00	103,31	92,28	1. Indeks biaya uji kompetensi jabatan fungsional yang relatif besar 2. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan	1. Akan dilakukan penerapan skema cost sharing dalam pembiayaan uji kompetensi

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
													Fungsional bergantung pada Instansi Pembina Jabatan Fungsional 3. Belum adanya dokumen HCDP sebagai dasar pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	jabatan fungsional 2. Membangun Koordinasi dengan Kementerian dan Perangkat Daerah yang memiliki tenaga fungsional agar mudah melakukan fasilitasi dan rekomendasi pelaksanaan uji kompetensi fungsional 3. Akan dilakukan penyusunan dokumen HCDP
				Program Pengelolaan Arsip	Nilai kepuasan pengguna layanan kearsipan	Indeks	90	233.619.600,00	91,01	229.163.864,00	101,13	98,09	1. Perlu adanya peningkatan atau lebih sering melakukan Bimtek/ Sosialisasi/ Pembinaan bagi Tim pelaksana kearsipan dalam hal	1. Peningkatan Kapasitas Petugas dalam memberikan pelayanan utamanya terkait kecepatan, ketepatan, kecermatan dalam

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
													waktu, persyaratan dan produk pelayanan kearsipan. 2. Dalam hal waktu, perlu dilakukan pembinaan pelayanan pengelolaan kearsipan ke OPD secara berkala. 3. Perlunya memberikan kesempatan untuk terus belajar dan mengembangkan potensi dalam bidang kearsipan bagi tenaga kearsipan Intern serta OPD. 4. Agar layanan Waktu layanan kearsipan dapat ditingkatkan lebih baik.	pelayanan Kearsipan. 2. Secara berkesinambungan dilakukan upaya-upaya Optimalisasi Peningkatan Kompetensi Petugas Layanan baik Arsiparis maupun Pejabat Fungsional yang lain, terkait Pelayanan Prima dan tema lain yang relevan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan kearsipan. 3. Koordinasi Lintas Sektoral dan Konsultasi dengan instansi pembina

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD /Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
														terkait pemenuhan SDM Kearsipan (terutama petugas layanan). Guna peningkatan kecepatan pelayanan, diperlukan menyusun rencana anggaran untuk melengkapi dan atau/menambah Sarpras Pelayanan kearsipan sesuai dinamika kebutuhan layanan dan ketersediaan anggaran

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang telah ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi.

Upaya pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang bermuara kepada kesejahteraan rakyat semakin meningkat. Penyerahan wewenang urusan pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem desentralisasi merupakan salah satu upaya untuk mempercepat proses pembangunan di daerah. Pasal 2 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Kewenangan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 19, Urusan pemerintahan konkruen yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diselenggarakan dengan cara menugasi daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan. Penugasan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian. Urusan pemerintahan konkruen yang menjadi kewenangan daerah provinsi diselenggarakan dengan cara menugasi daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan yang ditetapkan dengan peraturan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2025, maka Pemerintah Kota Blitar TIDAK MENERIMA tugas pembantuan dan penugasan, sebagaimana Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Blitar Nomor: S-7/KPN.1609/2026 tanggal 5 Januari 2026 perihal Realisasi Dana Tugas Pembantuan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Blitar di Wilayah Kerja KPPN Blitar bahwa berdasarkan hasil monitoring serta laporan realisasi anggaran pada wilayah bayar KPPN Blitar

diketahui TIDAK Terdapat Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang menerima Alokasi Dana Dekonsentrasi maupun DanaTugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat.

Kewenangan pembantuan adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah daerah dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Penyelenggaraan azas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada Kota dan/atau desa, serta dari pemerintah Kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan.

Penugasan dari pemerintah pusat dan provinsi kepada kabupaten/kota dan desa untuk melaksanakan tugas tertentu merupakan wujud nyata dari pelaksanaan tugas pembantuan ini. Sesuai dengan Prinsip Kebijakan Perimbangan Keuangan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan atas penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Juga, sebagai subsistem Keuangan Negara sebagai Konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi yang didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal, maka penyerahan wewenang pemerintahan, pelimpahan wewenang pemerintahan, dan penugasan dari Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan juga harus diikuti dengan pengaturan pendanaan dan pemanfaatan sumber daya nasional secara efisien dan efektif.

Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada daerah disertai

dengan pendanaan sesuai dengan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan, yang meliputi: bagi hasil pajak dan nonpajak antar Daerah, pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang menjadi tanggung jawab bersama sebagai konsekuensi dari kerja sama antar daerah, pinjaman dan/atau hibah antar daerah, bantuan keuangan antar daerah dan pelaksanaan dana otonomi khusus yang ditetapkan dalam undang – undang. Pengalokasian dana tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program tugas pembantuan melalui dana APBN dengan program kegiatan APBD.

Secara pendanaan, tugas pembantuan dapat dibiayai oleh APBN maupun APBD. Dimana Tugas Pembantuan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika pemberi penugasan adalah pemerintah pusat, namun jika pemberi penugasan adalah pemerintah daerah provinsi maka pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD I). Pola pertanggungjawaban dalam Tugas Pembantuan ini pada prinsipnya adalah penerima tugas pembantuan harus bertanggungjawab kepada pemberi penugasan, namun pada kondisi dimana Tugas Pembantuan berasal dari Pemerintah kepada Bupati/Wali Kota, maka selain Bupati/Wali Kota bertanggungjawab kepada pemerintah pusat melalui Kementerian / Lembaga, juga harus melaporkan kepada Gubernur selaku wakil dari pemerintah pusat di daerah. Dana tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program dan kegiatan tugas pembantuan yang didanai dari APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai APBD.

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan yang baik ini tentu saja tidak terlepas dari upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan koordinasi dan kerjasama. Pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk mendukung pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Pemerintah daerah juga telah meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas dan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Salah satunya adalah kurangnya sosialisasi dan diseminasi informasi mengenai tugas pembantuan dan penugasan kepada pemerintah daerah terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan, seperti: Kurang tersedianya anggaran, Kurang tersedianya sarana dan prasarana, Kurang tersedianya sumber daya manusia.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah upaya pemerintah daerah untuk memenuhi pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara. Penerapan SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah upaya pemerintah Kota Blitar untuk memastikan warga negara mendapatkan pelayanan dasar yang minimal sesuai dengan ketentuan.

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Capaian SPM bidang pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

a. Pendidikan Anak Usia Dini
b. Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama)
c. Pendidikan Kesetaraan

Adapun penjelasan jenis pelayanan dasar untuk SPM Bidang Pendidikan sebagai berikut :

Jenis Layanan	Penerima Layanan	Indikator
Pendidikan Anak Usia Dini	Warga Negara usia 5 tahun s/d 6 tahun	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan usia dini
Pendidikan Dasar	Warga negara usia 7 tahun s/d 15 tahun	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
Pendidikan Kesetaraan	Warga negara usia 7 tahun s/d 18 tahun	Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

4.1.2 Target Pencapaian Standard Minimal

Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar masih mengacu pada Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Target pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan pemerintah daerah, dan berdasarkan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ditetapkan target SPM Pendidikan sebagai berikut :

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2024
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau enengah yangperpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	100%

4.1.3 Realisasi Pencapaian SPM 2025

Realisasi SPM Bidang Pendidikan berdasarkan program dan kegiatan yang telah dijalankan, disajikan sebagai berikut :

1. **Pendidikan Anak Usia Dini**

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**TUNTAS PARIPURNA**			**100.00 %**
1 .	**Pendidikan Dasar Usia Dini**					**100.00 %**
			Target 100% (SPM)	**APS Tahun N-1**	**Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N**	
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (5-6 tahun) *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	86.87	85.77	**1.10**	**98.73 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**
			Jumlah Total	**Jumlah Total**	**Yang Belum**	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
			Yang Harus Dilayani	**Yang Terlayani**	**Terlayani**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	3932	3932	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00 %**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1.Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persentase	82.89	95	**-121.100**	**100.00 %**
	2.Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	Persentase	93.12	93.55	**-0.4300**	**100.00 %**

Dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Pendidikan Dasar Usia Dini (PAUD) Tahun 2025, maka Dinas Pendidikan Kota Blitar melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian SPM tersebut. Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

a. Kegiatan peningkatan untuk mencapai indikator Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B dalam bentuk :

Gambar 4.1.1. Kegiatan PelatihanTransformasi Digital PAUD
Pengenalan Book Creator dan Canva untuk Pembuatan Media Pembelajaran Jenjang PAUD dengan yang diselenggarakan pada Rabu, 30 April 2025 dan Selasa, 6 Mei 2025 bertujuan untuk meningkatkan metode pembelajaran pendidik PAUD dengan menggunakan media pembelajran berbasis IT dan menarik bagi peserta didik PAUD dengan output kegiatan tersusunnya media pembelajaran berbasis book creator dan canva. Biaya sebesar Rp. 27.916.000-

Gambar 4.1.2. Pendampingan Akreditasi bagi PAUD
Dalam rangka mendukung kesiapan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menghadapi proses Akreditasi Tahun 2025, Dinas Pendidikan Kota Blitar akan menggelar kegiatan Pendampingan Akreditasi bagi PAUD yang menjadi sasaran akreditasi tahun ini. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman, pendampingan teknis, serta asistensi dalam pengisian dokumen dan aplikasi Sispena 3.0 sesuai dengan perangkat akreditasi terbaru dari BAN PDM Provinsi Jawa Timur.Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Senin, 7 Juli 2025, bertempat di Aula Widyaloka

b. Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun

Gambar 4.1.3. Pembangunan Unit Sekolah Baru TKN Kepanjenlor
Pembangunan Unit Sekolah Baru TKN Kepanjenlor dengan nilai kontrak Rp. 959.202.400,- jangka waktu pelaksanaan 120 hari kalender

c. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD, TKN Pakunden, TKN Karangtengah, TKN Sananwetan 1 dan TKN Sananwetan 2 Kota Blitar
   1. Rehab Utilitas (penambahan gudang dari sisa lahan dan pagar) dengan nilai kontrak Rp. 67.171.000,00,

2. Rehab sedang/berat Ruang Kelas TKN Pakunden Rp. 139.910.000,-
3. Rehab sedang/berat Ruang Kelas TKN Sananwetan 1 Rp. 190.060.000,-
4. Rehab sedang/berat Ruang Guru TKN Sananwetan 2 Rp. 91.800.000,-

Dengan dokumentasi kegiatan sebagai berikut

Gambar .41.4. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD

✓ Rehab sedang/berat Ruang Kelas TKN Pakunden	✓ Rehabilitasi Utilitas UPT SP TKN Karangtengah Kota Blitar
✓ Rehab sedang/berat Ruang Kelas TKN Sananwetan 1	✓ Rehab sedang/berat Ruang Guru TKN Sananwetan 2

d. Rehab sedang/berat Sarpras dan Utilitas Paud (Pembangunan Pagar) di TKN Klampok dengan nilai kontrak Rp. 129.636.000

Gambar 4.1.5. Pembangunan Pagar 100% di TKN Klampok

e. Pengadaan mebeler berupa rak tas, dipan UKS dan Meja kursi siswa dengan realisasi keuangan Rp. 70.252.000,-

Gambar 4.1.6. Pengadaan Mebeler

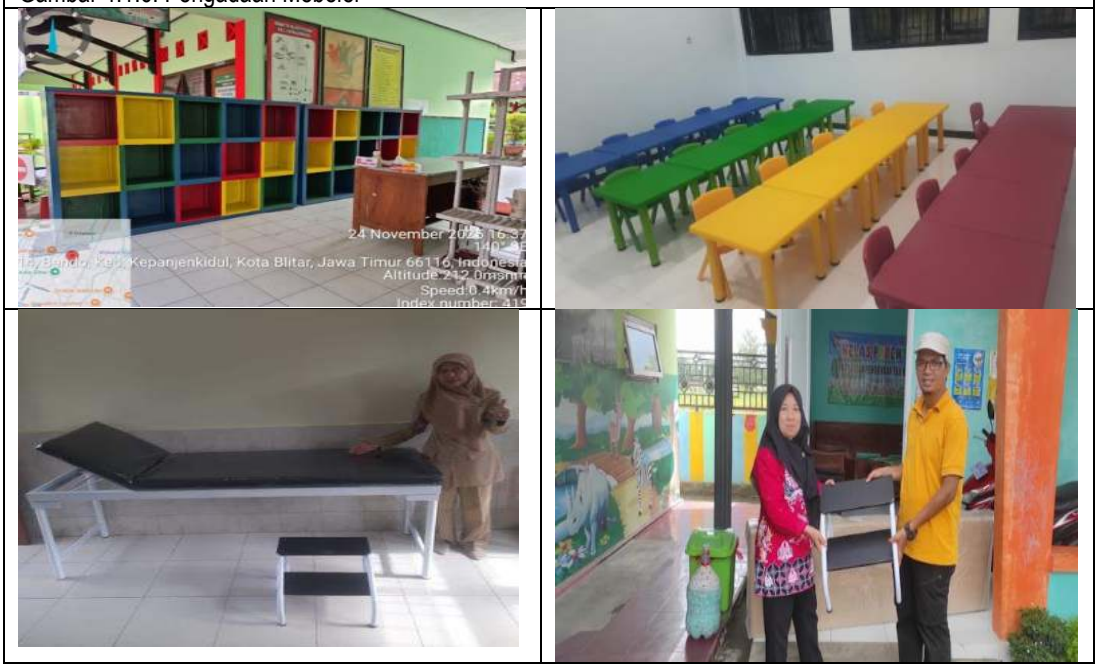

f. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Peserta Didik, TK Negeri dan TK Swasta Penerima DAK Fisik PAUD se Kota Blitar, yaitu : Pengadaan APE Rp. 226.044.000,- (DAK Fisik Paud), Perlengkapan Pembelajaran (Laptop) 7 Unit Rp. 99.456.000,- (DAK Fisik PAUD), Pengadaan APE Rp. 36.050.000,- (APBD)

g. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD, APE (DAK FISIK) Rp. 325.500.000,- dan APE TKN (APBD) Rp. 36.521.000,-

Gambar 4.1.8. Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD Bersumber dari dana DAK Fisik PAUD

Gambar 4.1.7. Pengadaan laptop Bersumber dari dana DAK Fisik PAUD

h. Pemberian bantuan keuangan untuk pengurang biaya SPP bagi peserta didik PAUD dan pengadaan perlengkapan sekolah bagi peserta didik yang bersekolah di lembaga swasta di Kota Blitar.

Gambar 4.1.9. Pemberian bantuan keuangan

Sosialisasi pengajuan hibah sekolah gratis kepada lembaga swasta

Pendampingan pembuatan laporan pertanggung jawaban

i. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik, UPT SP TK Negeri se Kota Blitar

Gambar 4.1.10. Pengadaan Tas Sekolah dan Sepatu

Gambar 4.1.11. Pengadaan Study Set dan Atribut Sekolah

Gambar 4.1.12. Pengadaan Seragam dan Pakaian Olah Raga

1. Pendidikan Dasar

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
2 .	Pendidikan Dasar					100.00 %
			Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N	
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (7-12 tahun) SD *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	100	100	0.00	100.00 %
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (13-15 tahun) SMP *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	100	100	0.00	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	20665	20665	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00 %**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	SD (2025)					100.00 %
	1 . Kemampuan literasi	Nilai	72.83	88.12	**-152.900**	**100.00 %**
	2 . Kemampuan numerasi	Nilai	61.9	84.54	**-226.400**	**100.00 %**
	3 . Indeks iklim keamanan	Nilai	82.62	82.62	**0.0000**	**100.00 %**
	4 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	81.58	81.58	**0.0000**	**100.00 %**
	5 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	65.29	65.29	**0.0000**	**100.00 %**
	SMP (2025)					100.00 %
	1 . Kemampuan literasi	Nilai	86.87	96.62	**-97.500**	**100.00 %**
	2 . Kemampuan numerasi	Nilai	72.74	91.73	**-189.900**	**100.00 %**
	3 . Indeks iklim keamanan	Nilai	78.26	78.26	**0.0000**	**100.00 %**
	4 .Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	77.68	77.68	**0.0000**	**100.00 %**
	5 .Indeks iklim inklusivitas	Nilai	68.2	68.2	**0.0000**	**100.00 %**

Dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Pendidikan Dasar Tahun 2025 terkait, maka Dinas Pendidikan Kota Blitar melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian SPM tersebut. Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

a) Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkelanjutan, antara lain;
   - Dinas Pendidikan Kota Blitar bersama LPD Yayasan Pinbuk Indonesia kembali menyelenggarakan Pelatihan Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA) bagi satuan pendidikan jenjang SMP se-Kota Blitar
     1. Kegiatan ini berlangsung pada 14–18 Juli 2025, bertempat di Aula Widyaloka Dinas Pendidikan Kota Blitar.
     2. Pembukaan dilaksanakan pada Senin, 14 Juli 2025, dan dihadiri oleh Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan serta perwakilan fasilitator KKA dari LPD Yayasan Pinbuk Indonesia.
     3. Pelatihan ini bertujuan untuk:
        - ✓ Meningkatkan pemahaman satuan pendidikan terhadap transformasi digital

- ✓ Memperkuat kesiapan teknis sekolah dalam menghadapi kurikulum berbasis teknologi informasi
- ✓ Mendukung penguatan materi Koding dan Kecerdasan Artifisial sesuai arah kebijakan nasional
- ✓

Gambar 4.1.13. Pelatihan Koding dan Kecerdasan Artifisial

- Menebar inspirasi, menguatkan kompetensi. Peningkatan Kompetensi & Inovasi Guru PAI se-Kota Blitar digelar hari ini di Dinas Pendidikan Kota Blitar. Bersama Guru PAI SD Negeri dan Swasta, SLB Negeri serta perwakilan Kemenag sebagai narasumber, kita bergerak bersama menghadirkan pembelajaran agama yang lebih kreatif, mendalam, dan bermakna.

Gambar 4.1.14. Peningkatan Kompetensi & Inovasi Guru PAI

b) Kegiatan Peningkatan Angka Partisipasi sekolah

Gambar 4.1.15. Kerja Sama Dan Deklarasi Komitmen Bersama Pencegahan Pernikahan Usia Anak

- Pengadilan Agama Blitar Kelas IA bersama Dinas Pendidikan Kota Blitar dan Kementerian Agama Kota Blitar menandatangani kerja sama dan deklarasi komitmen bersama pencegahan pernikahan usia anak pada Jumat, 19 Desember 2025.

Gambar 4.1.16. Gerakan Pengentasan ATS di Kota Blitar

1. Sosialisasi aplikasi https://ats.data.kemendikdasmen.go.id/ kepada operator kelurahan, Dinas Sosial, Bapperinda, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, DP3AP2KB untuk pelaksanaan verifikasi atas data suspect peserta didik Drop Out/Lulus Tidak Melanjutka dan Belum Pernah Bersekolah.
2. Sosialisasi kepada operator sekolah (Dapodik) untuk pembersihan data residu dan verifikasi peserta didik yang masuk dalam aplikasi ATS

Gambar 4.1.17. Pelaksanaan Survey

3. Survey data suspect peserta didik Drop Out/Lulus Tidak Melanjutka dan Belum Pernah Bersekolah dengan pagu anggaran Rp. 17.000.000
4. Kunjungan kerumah anak tidak sekolah oleh tim gabungan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan DP3P2KB

Gambar 4.1.18. Kunjungan kerumah anak tidak sekolah oleh tim gabungan

c) Kegiatan Penyediaan sarana prasarana untuk peningkatan akses dan mutu pendidikan, meliputi :
   1. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah ndengan pagu anggaran sebesar Rp . 1.730.620.000,- yang diperuntukan:
      a. Pemavingan dan Saluran Air SDN 3 Karangsari
      b. Pemavingan SDN 2 Tanjungsari
      c. Rehabilitasi Ruang Guru dan Perpustakaan SDN 3 Sentul
      d. Rehabilitasi Ruang UKS SDN 4 Karangtengah
      e. Rehabilitasi Tempat Parkir dan Saluran SDN Klampok
      f. Rehabilitasi Toilet SDN 1 Bendogerit
      g. Rehabilitasi Toilet SDN 1 Rembang
      h. Rehabilitasi Toilet SDN 2 Bendo
      i. Rehabilitasi Toilet SDN 2 Karangsari
      j. Rehabilitasi Toilet SDN 2 Karangtengah
      k. Rehabilitasi UKS dan Ruang Guru SDN 2 Bendogerit

l. Rehab Kamar Mandi SDN 2 Sukorejo
m. Rehab Paving, Pagar, dan Papan Nama SDN 1 Kepanjenlor
n. Pembangunan Lab Komputer SDN 2 Ngadirejo
o. Pembangunan Toilet SDN 1 Plosokerep

Gambar 4.1.19. Rehabilitasi toilet SDN 2 Karangtengah	
1) Hasil rehabilitasi toilet SDN 2 Karangtengah	
2) Rehabilitasi toilet 50% pada SDN 2 Sukorejo	Hasil pelaksanaan 100%

2. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah dengan total pagu Rp. 379.5077.706,- guna Rehabilitasi Pintu, Jendela dan Kusen SDN
   a. Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 1 Bendo
   b. Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 1 Bendogerit
   c. Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 1 Kepanjenkidul
   d. Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 1 Pakunden
   e. Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 1 Sukorejo
   f. Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 2 Bendogerit
   g. Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 2 Karangsari
   h. Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 2 Kepanjenlor
   i. Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 2 Sukorejo
   j. Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 3 Kepanjenlor
   k. Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 3 Sentul
   l. Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 3 Sukorejo
   m. Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Tlumpu

Gambar 4.1.19. Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah

1) Ruang kelas sebelum dilakukan pembangunan pada SDN 2 Sukorejo

100% pekerjaan selesai

2) Rehab ruang kelas SD 1 Kepanjenkidul

3. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (Rehap ruang kepala sekolah) pada UPt SP SMPN 1 dengan pagu anggaran 61.800.000
4. Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat-Pemeliharaan Kamar Mandi Siswa (16 Unit),Pemeliharaan keramik kelas- Keramik Lantai dan Dinding Kelas pada UPT SP SMPN 2 dengan pagu Rp. 291.207.800,00
5. Pengecatan ruang kelas dengan pagu anggaran Rp. 44.280.000,00 pada UPT SP SMPN 3
6. Pemeliharaan atap ruang BP pada UPt Sp SMPN 4 dengan pagu anggaran Rp17.897.000,00
7. Pemeliharaan Ruang Kelas pada UPt SP SMPN 5 dengan pagu anggaran Rp.104.000.000,00
8. Rehabilitasi Atap Ruang Kelas, Rehabilitasi Pagar Sekolah, Rehabilitasi Talang pada UPT SP SMPN 7 dengan pagu anggaran Rp. 55.532.752,-
9. Rehabilitasi Kanopi Tangga Kelas pada UPT SP SMPN 8 dengan pagu Rp 55.532.752,-
10. Pemeliharaan Ruang Kelas 8 pada UPT SP SMPN 9 dengan pagu Rp. 122.400.000

d) Kegiatan Pemerataan akses bagi peserta didik dengan dukungan kegiatan antara lain:
   1. Penyediaan biaya pengurang SPP melalui anggaran hibah bagi warga kota Blitar usia sekolah jenjang pendidikan dasar/sederajat
   2. Pemberian peralatan dan perlengkapan sekolah antara lain pemberian seragam, tas, sepatu, atribut, kaos kaki dan pakaian oleh raga bagi siswa tingkat 1, 4 , dan 7, sedangkan kelas 8 dan 9 khusus mendapat pakaian olah raga
   3. Pelaksanaan program pinjam pakai sepeda untuk peserta didik jenjang SMP

e) Kegiatan pencapaian skor kemampuan literasi dan numerasi dengan bentuk kegiatan :
   1. Dinas Pendidikan Kota Blitar mengadakan kegiatan peningkatan kompetensi bagi 55 guru dari 11 gugus SD. Melalui workshop ini, para pendidik diajak berkreasi dan berinovasi mengembangkan pembelajaran literasi yang digital, kreatif, dan tetap berakar pada kearifan lokal. Bersama, kita wujudkan guru hebat, pembelajaran bermakna, dan generasi literat Kota Blitar!Pemberian bantuan penunjang tugas bagi pegawai Non ASN pada satuan pendidikan negeri.

Gambar 4.1.20. Peningkatan kompetensi bagi 55 guru dari 11 gugus SD

   2. Pameran Hasil Praktik Baik Pelatihan Pembelajaran Mendalam Tahap 1 BOSKIN 2025. Menampilkan karya, inovasi, dan praktik inspiratif dari para pendidik hebat Kota Blitar

Gambar 4.1.21. Pameran Hasil Praktik Baik Pelatihan Pembelajaran Mendalam

3. Pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan, pelatihan calon kepala sekolah dan pemberian bantuan penunjang tugas

f) Peningkatan capaian iklim inklusivitas, iklim keamanan dan iklim kebhinekaan melalui kegiatan;

1. Kegiatan sosialisasi perundungan dan antibullying: Dinas Pendidikan Kota Blitar menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi, Anti Bullying, dan Anti Kekerasan bagi siswa-siswi jenjang SD dan SMP, sebagai upaya memperkuat karakter, membangun kesadaran hukum, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan berintegritas. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Kota Blitar dan motivator pendidikan, dengan harapan para peserta didik dapat lebih memahami pentingnya nilai kejujuran, saling menghargai, serta menolak segala bentuk kekerasan dan perundungan sejak dini.

Gambar 4.1.22. Sosialisasi perundungan dan antibullying

2. Kunjungan dan pendampingan bagi anak anka berkebutuhan khusus yang ada pada sekolah formal yang dilakukan oleh petugas dari UPt Pusat Layanan Disabilitas Kota Blitar yang berada di bawah naungan dinas Pendidikan.

Gambar 4.1.23. Kunjungan dan pendampingan bagi anak anak berkebutuhan khusus

3. Memberikan ruang bagi peserta didik Kota Blitar untuk menyalurkan bakat, minat dan kreativitasnya dan memberikan fasilitas bagi peserta didik yang akan maju ke jenjang berikutnya. seperti yang diraih oleh Zoladias Danis Santoso. Zoladias berhasil lolos hingga tahap final dalam ajang Actions for Earth - Global Youth Summit (GYS) 2025 - Climate Change di Hanoi, Vietnam, pada tanggal 2-4 Juli 2025. Perwakilan terbaik dari Kota Blitar ini menunjukkan kemampuannya di kategori junior, bersaing dengan para delegasi muda dari seluruh dunia. Acara bergengsi ini diselenggarakan oleh Hemispheres Foundation & P&PAK Co., Ltd., Vietnam, yang fokus pada isu perubahan iklim.

Gambar 4.1.24. Penyaluran bakat, minat dan kreativitas anak didik

4. Pendidikan Kesetaraan

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
3 .	Pendidikan Kesetaraan					100.00 %
			Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N	
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (7-18 tahun) KESETARAAN *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	41.06	41.06	0.00	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	800	823	**-23**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00 %**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 .Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	Persentase	46.67	46.67	**0.0000**	**100.00 %**

Dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Pendidikan Dasar Tahun 2025 terkait, maka Dinas Pendidikan Kota Blitar melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian SPM tersebut.

Kegiatan Peningkatan Partisipasi pendidikan kesetaraan didukung dengan :

a. Pemberian bantuan hibah uang kepada warga belajar PKBM dengan nominal @ Rp. 500.000 yang diberikan kepada lembaga PKBM dan rutin setiap tahun dilaksanakan sosialisasi oleh Dinas Pendidikan dengan mengundang narasumber dari Bapperinda Kota Blitar.

b. Penjaringan anak putus sekolah untuk diupayakan dapat bersekolah di lembaga PKBM dengan inovasi mobil Ajak Sinau (Aksi)
   Program AKSI (Ajak Sinau): Gerakan Kolaboratif Menjemput Hak Pendidikan Anak di Kota Blitar. Salah satu langkah progresif Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Pendidikan adalah peluncuran Program AKSI (Ajak Sinau)—sebuah gerakan terintegrasi yang bertujuan untuk mendatangi, menjemput, mengajak, dan mengantarkan anak-anak kembali bersemangat belajar.

Gambar 4.1.25. Mobil Aksi

Program ini menjadi solusi inovatif guna memastikan setiap anak di Kota Blitar mendapatkan haknya atas pendidikan, tanpa terhambat oleh faktor akses, kondisi ekonomi, maupun latar belakang sosial.

c. Fasilitasi keperansertaan PKBM dalam Pameran hari Aksara Internasional. PKBm dapat menunjukan hasil kegiatan pembelajaran life skill yang diajarkan kepada warga belajar PKBM seperti pembuatan batik sibori, makanan olahan belimbing yang menjadi ikon Kota Blitar serta praktik baik pengentasan ATS dengan melakukan kunjugan kepada warga yang tidak bersekolah.

Gambar 4.1.26. Pameran hari Aksara Internasional

d. Ajang penyaluran bakat dan kreatifitas warga belajar PKBM melalui lomba desain dan pembuatan batik guna meningkatkan life skill guna meningkatkan kemandirian dan peluang kerja pada saat dia telah lulus

Gambar 4.1.27. Lomba Desain Dan Pembuatan Batik

e. Penyediaan anggaran bimbingan belajar bagi warga belajar PKBM yang akan masuk perguruan tinggi, yang di realisasikan di tahun 2026 karena pada tahun 2025 penetapan Peraturan Walikota dilaksanakan di akhir tahun

Gambar 4.1.28. Peraturan Walikota penyediaan anggaran bimbingan belajar

WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA BIMBINGAN BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH/SEDERAJAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa peningkatan kualitas pendidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Daerah, perlu meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi pemuda Kota Blitar;

c. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi pemuda Kota Blitar, Pemerintah Daerah memberikan bantuan biaya bimbingan belajar kepada peserta didik sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/sederajat;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

INDEKS PENCAPAIAN SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (B)	PENCAPAIAN SPM (80xA) + (20xB)	INDEKS PENCAPAIAN SPM	KATEGORI IP SPM
1	Pendidikan Anak Usia Dini	100%	100%	100%	**100 %**	**TUNTAS PARIPURNA**
2	Pendidikan Dasar	100%	100%	100%		
3	Pendidikan Kesetaraan	100%	100%	100%		

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk Pencapaian Standar Minimal Bidang Pendidikan tahun 2025 agar peserta didik terlayani dan terfasilitasi dengan baik. Guna melaksanakan percepatan dan pengembangan kemajuan pendidikan di Kota Blitar serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan, Pemerintah Kota Blitar mengalokasikan anggaran dana sebagai berikut :

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA BLITAR	975,255,996,497
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	211,771,267,445
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	37,843,288,672
	APBD	36,353,758,672
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	23,353,616,409
	C. APBD DAK FISIK	532,471,000
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	12,467,671,263
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0

NO	PENDANAAN	PAGU
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	1,489,530,000

RINCIAN ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN

No	PROG	KEG	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROG	KEG	SUB KEG	(Rupiah)	(Rupiah)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
								37,843,288,672	**30,501,309,698**	**80.60 %**	
1	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**										
	1	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) K20240327112412**						**5,891,761,480**	**4,512,126,760**	**76.58 %**	
Angka Partisipasi Sekolah											
		1	**Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah**	**Ruang**	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0051	588,961,300	370,681,527	**62.94 %**	
		2	**Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD**	**Peserta didik**	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0011	2,133,787,500	1,826,900,000	**85.62 %**	
		3	**Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD**	**Orang**	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0015	0	0	**0.00 %**	
		4	**Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan**	**Dokumen**	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0025	0	0	**0.00 %**	
		5	**Pembangunan Ruang Kelas Baru**	**Ruang**	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0030	225,163,800	222,062,198	**98.62 %**	
		6	**Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)**	**Unit**	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0040	1,317,336,000	1,064,257,524	**80.79 %**	
		7	**Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik**	**Paket**	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0041	841,657,700	595,871,707	**70.80 %**	
Kekhususan PAUD											
		1	**Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana**	**Unit**	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0045	313,030,000	75,519,973	**24.13 %**	

No	PROG	KEG	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROG	KEG	SUB KEG	(Rupiah)	(Rupiah)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			dan Utilitas PAUD								
		2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Paket	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0046	399,521,080	288,641,831	**72.25 %**	
		3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0016	0	0	**0.00 %**	
		4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0017	53,474,100	51,130,500	**95.62 %**	
		5	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0023	0	0	**0.00 %**	
		6	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0024	0	0	**0.00 %**	
		7	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0026	0	0	**0.00 %**	
		8	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0029	8,500,000	6,864,000	**80.75 %**	
		9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0039	10,330,000	10,197,500	**98.72 %**	
	JUMLAH INDIKATOR							**5,891,761,480**	**4,512,126,760**	**76.58 %**	

No	PROG	KEG	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROG	KEG	SUB KEG	(Rupiah)	(Rupiah)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	2	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) K20240327110629**						**11,670,295,405**	**8,514,717,666**	**72.96 %**	
Angka Partisipasi Sekolah											
		1	**Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)**	**Unit**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0001	0	0	**0.00 %**	
		2	**Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD / Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama / Nonformal/Kesetaraan**	**Peserta didik**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0054	1,851,991,000	1,720,650,000	**92.91 %**	
		3	**Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan**	**Dokumen**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0038	0	0	**0.00 %**	
		4	**Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik**	**Paket**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0046	3,128,456,500	2,267,824,383	**72.49 %**	
		5	**Pembangunan Ruang Kelas Baru**	**Ruang**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0047	0	0	**0.00 %**	
		6	**Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah**	**Ruang**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0051	3,895,077,706	3,456,705,469	**88.75 %**	
Literasi											
		1	**Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik**	**Paket**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0055	1,030,000,000	174,973,900	**16.99 %**	
		2	**Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Orang**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0026	0	0	**0.00 %**	

No	PROG	KEG	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROG	KEG	SUB KEG	(Rupiah)	(Rupiah)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		3	**Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Orang**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0027	0	0	**0.00 %**	
		4	**Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan**	**Orang**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0035	4,025,000	2,561,000	**63.63 %**	
		5	**Pengembangan konten digital untuk pendidikan**	**Konten Digital**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0036	0	0	**0.00 %**	
		6	**Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan**	**Orang**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0037	0	0	**0.00 %**	
		7	**Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**Komunitas**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0041	8,250,000	7,012,500	**85.00 %**	
		8	**Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik**	**Buku**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0045	60,068,500	44,415,198	**73.94 %**	
		9	**Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan**	**Orang**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0049	1,331,000	1,306,800	**98.18 %**	
		10	**Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik**	**Satuan Pendidikan**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0050	192,075,200	184,563,725	**96.09 %**	

No	PROG	KEG	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROG	KEG	SUB KEG	(Rupiah)	(Rupiah)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
Numerasi											
		1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0026	0	0	**0.00 %**	
		2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0027	0	0	**0.00 %**	
		3	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0035	10,000,000	10,000,000	**100.00 %**	
		4	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0037	0	0	**0.00 %**	
		5	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0041	0	0	**0.00 %**	
		6	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0050	192,075,200	184,563,725	**96.09 %**	
		7	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0045	200,000,000	200,000,000	**100.00 %**	

No	PROG	KEG	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROG	KEG	SUB KEG	(Rupiah)	(Rupiah)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		8	**Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik**	**Paket**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0055	1,000,000,000	174,973,900	**17.50 %**	
		9	**Pengembangan konten digital untuk pendidikan**	**Konten Digital**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0036	0	0	**0.00 %**	
		10	**Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan**	**Orang**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0049	1,331,000	1,306,800	**98.18 %**	
Keamanan											
		1	**Pengembangan konten digital untuk pendidikan**	**Konten Digital**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0036	0	0	**0.00 %**	
		2	**Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan**	**Orang**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0049	1,331,000	1,306,800	**98.18 %**	
		3	**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah**	**Satuan Pendidikan**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0028	4,697,933	4,349,500	**92.58 %**	
		4	**Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi**	**Kegiatan**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0043	25,842,500	22,297,122	**86.28 %**	
Kebhinekaan											
		1	**Pengembangan konten**	**Konten**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0036	0	0	**0.00 %**	

No	PROG	KEG	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROG	KEG	SUB KEG	(Rupiah)	(Rupiah)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			digital untuk pendidikan	**Digital**							
		2	**Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan**	**Orang**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0049	1,331,000	1,306,800	**98.18 %**	
		3	**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah**	**Satuan Pendidikan**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0028	4,697,933	4,349,500	**92.58 %**	
		4	**Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi**	**Kegiatan**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0043	25,842,500	22,297,122	**86.28 %**	
Inklusifitas											
		1	**Pengembangan konten digital untuk pendidikan**	**Konten Digital**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0036	0	0	**0.00 %**	
		2	**Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan**	**Orang**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0049	1,331,000	1,306,800	**98.18 %**	
		3	**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah**	**Satuan Pendidikan**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0028	4,697,933	4,349,500	**92.58 %**	
		4	**Pemberian layanan pendampingan bagi**	**Kegiatan**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0043	25,842,500	22,297,122	**86.28 %**	

No	PROG	KEG	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROG	KEG	SUB KEG	(Rupiah)	(Rupiah)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi								
	JUMLAH INDIKATOR				**11,670,295,405**	**8,514,717,666**	**72.96 %**				
	3	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) K20240327110647**						**7,077,399,201**	**5,435,585,331**	**76.80 %**	
Angka Partisipasi Sekolah											
		1	**Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)**	**Unit**	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0001	2,125,150,000	2,101,222,188	**98.87 %**	
		2	**Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah**	**Ruang**	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0014	135,400,000	12,405,702	**9.16 %**	
		3	**Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama**	**Peserta didik**	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0032	499,700,000	471,400,000	**94.34 %**	
		4	**Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan**	**Dokumen**	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0051	0	0	**0.00 %**	
		5	**Pembangunan Ruang Kelas Baru**	**Ruang**	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0059	0	0	**0.00 %**	
		6	**Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik**	**Paket**	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0062	2,939,950,800	1,546,111,479	**52.59 %**	
Literasi											
		1	**Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik**	**Paket**	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0067	15,829,400	7,584,854	**47.92 %**	
		2	**Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidika**	**Orang**	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0039	0	0	**0.00 %**	

No	PROG	KEG	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROG	KEG	SUB KEG	(Rupiah)	(Rupiah)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			n bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								
		3	**Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Orang**	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0040	0	0	**0.00 %**	
		4	**Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan**	**Orang**	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0048	7,343,800	7,229,500	**98.44 %**	
		5	**Pengembangan konten digital untuk pendidikan**	**Konten Digital**	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0049	0	0	**0.00 %**	
		6	**Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan**	**Orang**	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0050	0	0	**0.00 %**	
		7	**Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**Komunitas**	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0054	5,225,000	4,725,000	**90.43 %**	
		8	**Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik**	**Satuan Pendidikan**	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0058	15,223,400	15,063,000	**98.95 %**	
		9	**Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan**	**Orang**	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0060	3,002,760	2,962,100	**98.65 %**	

No	PROG	KEG	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROG	KEG	SUB KEG	(Rupiah)	(Rupiah)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		10	**Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik**	**Buku**	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0061	560,853,500	536,229,555	**95.61 %**	
Numerasi											
		1	**Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama**	**Orang**	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0039	0	0	**0.00 %**	
		2	**Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama**	**Orang**	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0040	0	0	**0.00 %**	
		3	**Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan**	**Orang**	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0048	7,343,800	7,229,500	**98.44 %**	
		4	**Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**Komunitas**	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0054	5,225,000	4,725,000	**90.43 %**	
		5	**Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan**	**Orang**	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0050	0	0	**0.00 %**	
		6	**Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik**	**Satuan Pendidikan**	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0058	15,223,400	15,063,000	**98.95 %**	

No	PROG	KEG	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROG	KEG	SUB KEG	(Rupiah)	(Rupiah)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		7	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0061	560,853,500	536,229,555	**95.61 %**	
		8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0067	100,000,000	90,000,000	**90.00 %**	
		9	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0049	0	0	**0.00 %**	
		10	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0060	3,002,760	2,962,100	**98.65 %**	
Keamanan											
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0049	0	0	**0.00 %**	
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0060	3,002,760	2,962,100	**98.65 %**	
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0041	3,754,600	3,403,833	**90.66 %**	
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan,	Keluarga	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0055	19,266,667	18,448,333	**95.75 %**	

No	PROG	KEG	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROG	KEG	SUB KEG	(Rupiah)	(Rupiah)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			dan intoleransi								
Kebhinekaan											
		1	**Pengembangan konten digital untuk pendidikan**	**Konten Digital**	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0049	0	0	**0.00 %**	
		2	**Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan**	**Orang**	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0060	3,002,760	2,962,100	**98.65 %**	
		3	**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah**	**Satuan Pendidikan**	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0041	3,754,600	3,403,833	**90.66 %**	
		4	**Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi**	**Kegiatan**	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0055	19,266,667	18,448,333	**95.75 %**	
Inklusifitas											
		1	**Pengembangan konten digital untuk pendidikan**	**Konten Digital**	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0049	0	0	**0.00 %**	
		2	**Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan**	**Orang**	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0060	3,002,760	2,962,100	**98.65 %**	
		3	**Pembinaan Kelembagaan dan**	**Satuan**	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0041	3,754,600	3,403,833	**90.66 %**	

No	PROG	KEG	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROG	KEG	SUB KEG	(Rupiah)	(Rupiah)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Manajemen Sekolah	**Pendidikan**							
		4	**Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi**	**Kegiatan**	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0055	19,266,667	18,448,333	**95.75 %**	
	JUMLAH INDIKATOR							**7,077,399,201**	**5,435,585,331**	**76.80 %**	
	4	**Pendidikan Kesetaraan**						**6,964,170,500**	**6,820,468,334**	**97.94 %**	
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									
		K20250805052437									
Angka Partisipasi Sekolah											
		1	**Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Dokumen**	1.01.02	1.01.04.2.01	1.01.04.2.01.0001	6,618,366,500	6,506,070,324	**98.30 %**	
		1	**Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Laporan**	1.01.02	1.01.04.2.01	1.01.04.2.01.0002	345,804,000	314,398,010	**90.92 %**	
	JUMLAH INDIKATOR							**6,964,170,500**	**6,820,468,334**	**97.94 %**	

No	PROG	KEG	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROG	KEG	SUB KEG	(Rupiah)	(Rupiah)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	5	**Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah K20250807081842**						**0**	**0**	**0.00 %**	
Literasi											
		1	**Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota**	**Buku**	1.01.02	1.01.06.2.01	1.01.06.2.01.0005	0	0	**0.00 %**	
Numerasi											
		1	**Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota**	**Buku**	1.01.02	1.01.06.2.01	1.01.06.2.01.0005	0	0	**0.00 %**	
	JUMLAH INDIKATOR							**0**	**0**	**0.00 %**	
	JUMLAH PROGRAM							**31,603,626,586**	**25,282,898,091**	**80.00 %**	
KEGIATAN LAINNYA											
2	**PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA**							**5,249,262,586**	**4,242,245,892**	**81%**	
	1	Literasi									
		1.						484,930,000	477,003,180	**98.37 %**	
		2.						488,452,500	482,670,395	**98.82 %**	
		3.						17,017,000	16,492,140	**96.92 %**	
		4.						0	0	**0.00 %**	
	2	Numerasi									
TIDAK ADA DATA KEGIATAN NUMERASI LAINYA											
	3	Inklusifitas									
TIDAK ADA DATA KEGIATAN INKLUSIFITAS LAINYA											
	4	Kebhinekaan									
TIDAK ADA DATA KEGIATAN KEBHINEKAAN LAINYA											
	5	Keamanan									
TIDAK ADA DATA KEGIATAN KEAMANAN LAINYA											
	1.	4 2025 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 1193481						163,311,380.00	145,975,900.00	**89.39 %**	

No	PROG	KEG	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROG	KEG	SUB KEG	(Rupiah)	(Rupiah)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	2.	4 2025 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan 1193483						446,717,037.00	407,876,883.00	**91.31 %**	
	3.	4 2025 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 1193486						2,014,930,000.00	1,225,110,000.00	**60.80 %**	
	4.	4 2025 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1193487						493,530,000.00	461,153,102.00	**93.44 %**	
	5.	4 2025 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik (kesetaraan) 1193490						54,992,000.00	53,694,840.00	**97.64 %**	
	6.	4 2025 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1193492						24,725,000.00	8,913,675.00	**36.05 %**	
	7.	4 2025 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 1193493						15,891,000.00	15,194,500.00	**95.62 %**	
	8.	4 2025 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Kesetaraan) 1193495						304,546,169.00	275,466,251.00	**90.45 %**	
	9.	4 2025 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD) 1223958						1,730,620,000.00	1,648,860,741.00	**95.28 %**	

4.1.5 Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut didukung personil sebagai berikut :

No	Uraian	Pegawai Dinas Pendidikan	Pegawai pada Satuan Pendidikan PAUD, Dasar dan Kesetaraan	Pegawai UPT PLD
A.	Pegawai	85	2491	27
1.	Jenis kelamin:			
	Laki - Laki	45	801	15
	Perempuan	40	1740	12
2.	Status kepegawaian:			
	PNS	63	683	1
	CPNS	1	0	
	PPPK	1	380	
	Tenaga Jasa Lainnya/Outsorsing	18	252	26
	Tenaga Lainnya (GTT, GTY, PTT,GTY,PTY dan Honorer)	2	1176	

No	Uraian	Pegawai Dinas Pendidikan	Pegawai pada Satuan Pendidikan PAUD, Dasar dan Kesetaraan	Pegawai UPT PLD
3.	Pendidikan			
	SD/sederajat	1	13	
	SMP/sederajat	1	65	
	SMA/SMK/ sederajat	26	441	10
	D1	-	13	
	D2	-	32	1
	D3	2	17	4
	S1/D-IV	40	1828	11
	S2	15	82	1
4	Pangkat /Gol.Ruang			
	Tidak ada	22	1428	26
		0	0	
	I/a	-	1	
	I/b		1	
	I/c	-	1	
	I/ d	-	1	
	II/a	2	8	
	II/b	-	7	
	II/c	4	5	
	II/d	4	2	
	III/a	17	429	
	III/b	7	140	
	III/c	4	59	
	III/d	11	217	1
	IV/a	3	60	
	IV/b	4	90	
	IV/c	7	42	
	IV/d	-	0	
5.	Jenis PTK			
	Pendidik	-	1810	-
	Tenaga Kependidikan	-	662	-
6	Jenis Kepegawaian			
	Outsourcing, Tenaga Jasa Lainnya, Kontrak	18		26
	Struktural	12		1
	Fungsional Khusus	27	2056	
	Fungsional Umum	26	416	
	PTT	2		

4.1.6 Permasalahan

Permasalahan pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan antara lain :

No	PERMASALAHAN
	DAFTAR PERMASALAHAN
1.	Data warga negara usia sekolah yang mondok atau bersekolah di pondok pesantren tidak dapat dihitung /perlu adanya anggaran khusus atau peraturan khusus terkait kewenangan (leading sektor) untuk menghitung/mencari anak - anak yang mondok baik di wilayah kewenangan atau di luar kewenangan pemerintah.
2.	Terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak dapat terealisasi 100% dikarenakan adanya perubahan kebijakan di akhir tahun anggaran atas beberapa belanja barang dan jasa, serta adanya hasil penawaran dari penyedia yang dibawah pagu anggaran.
3.	Mohon untuk nomenklatur sub kegiatan dapatnya melihat pada lampiran buku saku kemendikdasmen pada link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BjVkV2fBh3Ra1AGj0Yaseut7EmbVgs1FxFquxaYVuE/edit?usp=sharing karena beberapa masih belum muncul
4.	Untuk pengumpulan data atas anak tidak sekolah di dasarkan pada aplikasi DO/LTM yang dalam pengalaman survey di tahun 2024 data alamat anak suspect ATS tidak diketemukan, sehingga masih perlunya penertiban data kependudukan
5.	Beberapa indikator yang terdapat dalam pencapaian tahapan perencanaan tidak dapat dihitung/dicarikan datanya karena untuk perhitungan 1.A.9 dihitung langsung oleh Kementerian pendidikan dasar dan menengah

4.2 PENCAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang diperbaharui dengan Permen Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang terbit pada Aprlil 2024.

Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
d. Pelayanan kesehatan Balita
e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
k. Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis

l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)

Didalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tersebut juga memuat penjelasan terkait indikator dan target pencapaian SPM yang diperbaharui dengan Permen Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang terbit pada Aprlil 2024.

Adapun jenis pelayanan dasar Bidang Kesehatan antara lain :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	PENERIMA LAYANAN DASAR
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Ibu hamil
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Ibu bersalin
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Bayi baru lahir
4	Pelayanan kesehatan balita	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	Balita
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Anak pada usia pendidikan dasar
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun keatas
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Penderita hipertensi
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Penderita Diabetes Melitus
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat
11	Pelayanan kesehatan dengan orang terduga TBC	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Orang terduga TBC
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)

4.2.2. Target Pencapaian SPM

SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Setiap warga negara sesuai dengan kodratnya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan memanfaatkan seluruh potensi manusiawi yang dimilikinya. Sebaliknya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin agar setiap warga negara dapat menggunakan haknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa hambatan atau halangan dari pihak manapun. SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemda untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya. Untuk itu dalam penetapan indikator SPM, Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian agar melakukan pentahapan pada jenis pelayanan, mutu pelayanan dan/atau sasaran tertentu.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2025
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%
4.	Pelayanan kesehatan balita	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100%
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	100%
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2025
11.	Pelayanan kesehatan dengan orang terduga TBC	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%

4.2.3. Realisasi Pencapaian SPM 2025

Data pencapaian dan penerapan SPM disajikan berdasarkan realisasi program kegiatan sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**TUNTAS PARIPURNA**			100.00 %
1 .	**Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	Orang	2.326	2.326	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00 %**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul/Vial	234	234	**0**	**100.00** %
	2 . Tablet tambah darah **(180 tablet x jumlah ibu hamil)**	Tablet	420.660	420.660	**0**	**100.00** %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	2.337	2.337	**0**	**100.00** %
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	2.337	2.337	**0**	**100.00** %
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	2.337	2.337	**0**	**100.00** %
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin **(proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)**	Paket	2.337	2.337	**0**	**100.00** %
	7 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	2.337	2.337	**0**	**100.00** %
	8 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	2.337	2.337	**0**	**100.00** %
	9 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	2.337	2.337	**0**	**100.00** %
	10 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	2.337	2.337	**0**	**100.00** %
	11 . Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG **(proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)**	Botol	156	156	**0**	**100.00** %
	12 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi **(angka ideal dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)**	Orang	12	12	**0**	**100.00** %
	13 . Tenaga kesehatan : Bidan **(angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)**	Orang	53	53	**0**	**100.00** %
	14 . Tenaga kesehatan : Perawat **(angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)**	Orang	57	57	**0**	**100.00** %
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	13	13	**0**	**100.00** %
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	6	6	**0**	**100.00** %
	17 . Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) **(satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)**	Orang	2.326	2.326	**0**	**100.00** %

Pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan baik yang

bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR).

Standar pelayanan antenatal adalah pelayanan yang dilakukan kepada ibu hamil dengan memenuhi kriteria 10 T yaitu :

a. Timbang berat badan dan ukur tinggi badan;
b. Ukur tekanan darah;
c. Nilai status gizi (Ukur Lingkar Lengan Atas/LILA)
d. Ukur tinggi puncak rahim (fundus uteri);
e. Tentukan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ);
f. Skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi Tetanus Toksoid (TT) bila diperlukan;
g. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan;
h. Tes laboratorium: tes kehamilan, pemeriksaan hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya), pemeriksaan protein urin (bila ada indikasi); yang pemberian pelayanannya disesuaikan dengan trimester kehamilan.
i. Tatalaksana/penanganan kasus sesuai kewenangan;
j. Temu wicara (konseling)

Jumlah sasaran ibu hamil dihitung melalui estimasi rumus:

1,10 x *Crude Bird Rate* x Jumlah penduduk (pada tahun yang sama)

Cakupan pelayanan ibu hamil diperoleh dari perhitungan persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ibu hamil *antenatal care* (ANC) minimal 4 kali sesuai dengan standar (dengan distribusi waktu 1 kali pada trimester ke-1, 1 kali pada trimester ke-2, dan 2 kali pada trimester ke-3) di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta dibagi dengan estimasi jumlah ibu hamil di suatu wilayah pada kurun waktu yang sama.

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil :

a. Supervisi fasilitatif dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan
b. Kelas ibu hamil
c. PMT pemulihan ibu KEK
d. Peningkatan kualitas kader kesehatan pendamping ibu hamil
e. Monitoring dan evaluasi

Kegiatan yang mendukung capaian SPM ini adalah Kelas ibu hamil, Pendataan ibu hamil P4K, Penyuluhan ibu hamil, Monev Kescatin, dan Supervisi fasilitatif yang dilaksanakan pada periode Januari-Desember 2025. Kelas ibu hamil merupakan

kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang kesehatan ibu hamil, tanda-tanda kelahiran, perawatan bayi baru lahir, pemberian ASI eksklusif, dll. Total Anggaran 191,498,856,- dengan kegiatan :

- Supervisi Fasilitatif
- Monev Program Penurunan AKI dan AKB
- Audit Kasus Kematian Maternal dan Perinatal
- Kelas Ibu Balita
- Kelas Ibu Hamil
- Monev Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar
- Pemantauan Ibu hamil dan Penempelan stiker P4K
- Refreshing Kader Pendamping Ibu Hamil
- Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Balita
- Penyuluhan KB Pasca Salin
- Kelas Gizi pada Ibu Balita Gizi Kurang

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut:

Gambar 4.2.1. Kegiatan kelas Ibu Hamil di UPT Puskesmas dan Dinas Kesehatan

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	Orang	2.326	2.326	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Formulir partograf	Formulir	2.326	2.326	0	100.00 %
	2 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	2.326	2.326	0	100.00 %
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	2.326	2.326	0	100.00 %
	4 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	2.326	2.326	0	100.00 %
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	12	12	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	31	31	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	28	28	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	13	13	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	6	6	0	100.00 %

Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi.

Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi Puskesmas, bidan praktek swasta, klinik pratama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, rumah sakit pemerintah maupun swasta. Standar pelayanan persalinan normal mengikuti acuan asuhan persalinan normal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual.

Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Adapun untuk persalinan dengan komplikasi mengikuti acuan dari Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Rujukan.

Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan dimulai pada kala I sampai dengan kala IV persalinan. Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi, dihitung dari persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasilitas kesehatan dibagi dengan jumlah seluruh ibu bersalin di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Standar persalinan normal adalah Acuan Persalinan Normal (APN) sesuai standar, yaitu degan:

a. Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.
b. Tenaga penolong minimal 2 orang, terdiri dari:
    1. Dokter dan bidan, atau
    2. 2 orang bidan, atau
    3. Bidan dan perawat.

Dan kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan ibu bersalin :

a. Pendampingan persalinan oleh kader kesehatan
b. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan
c. Penyuluhan KB pasca salin
d. Monitoring dan evaluasi

Kegiatan periode Januari – Desember 2025 yang mendukung capaian SPM ini adalah :

- Monev Pelaksanaan Pendampingan Bumil Risti, Bufas dan BBL
- Drill emergency kegawatdaruratan maternal neonatal bagi FKRTL se-Kota Blitar
- Rakor Pelaksanaan Pendampingan Bumil Risti, Bufas dan BBL
- Monev Pelaksanaan Pendampingan Bumil Risti, Bufas dan BBL
- Rakor Pembentukan Jejaring Skrining Layak Hamil, ANC dan Stunting
- Pemberian Stimulan Ibu Bersalin (BESTI BULIN)
- Pertemuan Verifikasi dan Analisis Data MPDN
- Diseminasi Hasil Audit Kasus Kematian Maternal dan Perinatal
- Rakor Penyusunan Instrumen Pendampingan Bumil Risti, Bufas dan BBL oleh Mahasiswa Kesehatan
- Pembinaan dr. Sp.OG Wilayah dalam rangka Penurunan AKI
- Pembinaan dr. Sp.A Wilayah dalam rangka Penurunan AKB
- Monev AKI dan AKB
- Monev P4K Poned dan KIA
- Diskusi Refleksi Kasus Ibu dan Anak.

Pendataan ibu hamil risti oleh kader dan pemasangan stiker, selanjutnya ibu hamil risti didampingi oleh kader dan tenaga kesehatan.

Pendampingan ibu hamil risiko tinggi (risti) adalah upaya untuk membantu ibu hamil yang berisiko tinggi selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Pendampingan ini dilakukan dengan memberikan edukasi dan konseling, serta memantau kesehatan ibu hamil, Total Anggaran 190,975,000,-

Adapun dokumentasi kegiatan sbb

Gambar 4.2.2. Iva dan Sadanis di Pustu Klampok.

Gambar 4.2.3. Kegiatan Pendampingan Tim Ahli.

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
3 .	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	Orang	2.167	2.167	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %

	1 . Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	2.167	2.167	**0**	**100.00** %
	2 . Vitamin K1 Injeksi	Ampul	69	69	**0**	**100.00** %
	3 . Salep/tetes mata antibiotik **(sesuai standar 12-59 bulan)**	Orang	668	668	**0**	**100.00** %
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	2.167	2.167	**0**	**100.00** %
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM) **(sesuai standar 12-59 bulan)**	Formulir	6.501	6.501	**0**	**100.00** %
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	2.326	2.326	**0**	**100.00** %
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) **(angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)**	Paket	3	3	**0**	**100.00** %
	8 . Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	11	11	**0**	**100.00** %
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	33	33	**0**	**100.00** %
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	45	45	**0**	**100.00** %
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	13	13	**0**	**100.00** %
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	3	3	**0**	**100.00** %
	13 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	6	6	**0**	**100.00** %
	14 . Kader Kesehatan	Orang	1.118	1.118	**0**	**100.00** %

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR).

Dalam memberikan paket pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 (nol sampai dua puluh delapan) hari yang

mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun

Pelayanan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Pembantu, tempat praktek tenaga kesehatan (Praktek Bidan, Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan), klinik pratama, klinik utama dan rumah sakit pemerintah maupun swasta), dan atau kunjungan rumah.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan paket pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Standar kualitas pelayanan kesehatan bayi baru lahir:

a. Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam). Perawatan neonatal esensial saat lahir meliputi:
   1. Pemotongan dan perawatan tali pusat.
   2. Inisiasi Menyusu Dini (IMD).
   3. Injeksi vitamin K1.
   4. Pemberian salep/tetes mata antibiotic.
   5. Pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0).
b. Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari). Perawatan neonatal esensial setelah lahir meliputi:
   1. Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif.
   2. Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM.
   3. Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1.
   4. Imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan.
   5. Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.

Kegiatan Tahun 2025 dalam peningkatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dilakukan Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) adalah uji saring pada bayi baru lahir (usia 48-72 jam, maks. 14 hari) dengan mengambil 2-3 tetes darah dari tumit untuk mendeteksi dini kekurangan hormon tiroid. Pemeriksaan ini penting untuk mencegah keterbelakangan mental, retardasi pertumbuhan, dan kecacatan permanen, terutama karena sering tanpa gejala. Total Anggaran: 162,964,000:

- Workshop PKAT
- Monev Pelaksanaan Pelayanan SHK
- Refreshing Manajemen PPI pada Fasilitas Kesehatan

- Refreshing Buku KIA pada Tenaga Kesehatan
- Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK)
- Pengiriman Sampel SHK
- Pelaksanaan DOFU
- Refreshing Drill Kegawatdaruratan di Poned
- Sweeping kunjungan ibu hamil K1

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut:

Gambar 4.2.4. Monev pelaksanaan SHK

4. Pelayanan Kesehatan Balita

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN BALITA	Orang	8.674	8.674	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani /	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
				Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Formulir	8.674	8.674	**0**	**100.00** %
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	8.674	8.674	**0**	**100.00** %
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	2.326	2.326	**0**	**100.00** %
	4 . Vitamin A Biru **(sesuai standar 6-11 bulan)**	Kapsul	1.104	1.104	**0**	**100.00** %
	5 . Vitamin A Merah **(sesuai standar 12-59 bulan)**	Kapsul	8.674	8.674	**0**	**100.00** %
	6 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	2.302	2.302	**0**	**100.00** %
	7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	2.288	2.288	**0**	**100.00** %
	8 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	2.288	2.288	**0**	**100.00** %
	9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - Hib	Vaksin	2.288	2.288	**0**	**100.00** %
	10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	2.303	2.303	**0**	**100.00** %
	11 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB - Hib	Vaksin	2.196	2.196	**0**	**100.00** %
	12 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	2.196	2.196	**0**	**100.00** %
	13 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	25.577	25.577	**0**	**100.00** %
	14 . Peralatan Anafilaktik	Paket	13	13	**0**	**100.00** %
	15 . Formula terapi gizi buruk	Paket	890	890	**0**	**100.00** %
	16 . Tenaga medis : Dokter	Orang	11	11	**0**	**100.00** %
	17 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	60	60	**0**	**100.00** %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	18 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	69	69	**0**	**100.00** %
	19 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	6	6	**0**	**100.00** %
	20 . Guru PAUD	Orang	520	520	**0**	**100.00** %
	21 . Kader kesehatan	Orang	1.118	1.118	**0**	**100.00** %

Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM upaya kesehatan bersumber daya manusia (posyandu)

Pelayanan kesehatan, meliputi :

1) penimbangan, minimal 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) tahun;
2) pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
3) Pemberian kapsul vitamin A 100.000 IU, 1 (satu) kali untuk bayi 6 (enam) sampai 11 (sebelas) bulan;
4) pemberian kapsul vitamin A dosisi tinggi, minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
5) pemberian imunisasi dasar lengkap; dan
6) pemberian imunisasi booster.

Balita adalah anak berumur 0 – 59 bulan. Setiap balita umur 0-59 bulan memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan setiap bulan, minimal 8 kali dalam setahun yang tercatat di kohort balita dan pra sekolah, buku KIA/KMS atau buku pencatatan dan pelaporan lainnya. Pemantauan pertumbuhan adalah pengukuran berat badan pertinggi/panjang badan (BB/TB).

Pemantauan perkembangan meliputi penilaian perkembangan gerak kasar, gerak halus, bicara, bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian, pemeriksaan daya dengar, daya lihat. Jika ada keluhan atau kecurigaan terhadap anak, maka dilakukan pemeriksaan untuk gangguan mental emosional, autisme, serta gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas.

Pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang, meliputi :

a. Pelayanan kesehatan Balita usia 0 -11 bulan:
   1) Penimbangan minimal 8 kali setahun.
   2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
   3) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun.
   4) Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun.
   5) Pemberian imunisasi dasar lengkap.
b. Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan :
   1) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
   2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
   3) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun.
   4) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.
   5) Pemberian Imunisasi Lanjutan.
c. Pelayanan kesehatan Balita usia 24-59 bulan :
   1) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
   2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
   3) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun.
   4) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.
d. Pemantauan perkembangan balita.
e. Pemberian kapsul vitamin A.
f. Pemberian imunisasi dasar lengkap.
g. Pemberian imunisasi lanjutan.
h. Pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan.
i. Edukasi dan informasi

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan balita:

a. Monitoring dan evaluasi
b. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan

Kegiatan tahun 2025 yang mendukung capaian SPM ini adalah Kegiatan posyandu balita meliputi penimbangan, pemberian imunisasi, pemberian makanan tambahan, dan penyuluhan Kesehatan dengan alokasi anggaran Rp. 78,163,600,- antara lain :

- Refreshing SDIDTK pada Guru KB/TK
- Koordinasi dan Monev Program Kesehatan Keluarga
- Kunjungan Posyandu kesehatan gigi
- Posyandu Balita
- Monev Posyandu Balita
- Refreshing Kesehatan Gigi dan Mulut Pada Kader Posyandu Balita

Adapun dokumentasi kegiatan sbb :

Gambar 4.2.5. PMBA

5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
5 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	Orang	19.973	19.973	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Form pencatatan/buku rapor kesehatanku	Form/Buku	19.973	19.973	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	(Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)					
	2 . Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan **(Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)**	Form/Buku	100	100	**0**	**100.00** %
	3 . Kuesioner skrining kesehatan **(Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)**	Dokumen	19.973	19.973	**0**	**100.00** %
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah **(Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)**	Formulir	132	132	**0**	**100.00** %
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah **(Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)**	Formulir	2	2	**0**	**100.00** %
	6 . Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah **(Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota)**	Tablet	770.068	770.068	**0**	**100.00** %
	7 . Alat pemeriksaan Hb **(Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)**	Alat	12	12	**0**	**100.00** %
	8 . Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 **(Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk**	Strip	1.960	1.960	**0**	**100.00** %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)					
	9 . Media promosi kesehatan **(Media khusus remaja sehat)**	Paket	54	54	**0**	**100.00** %
	10 . Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) **(sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)**	Vaksin	10.545	10.545	**0**	**100.00** %
	11 . Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	3	3	**0**	**100.00** %
	12 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	**3**	3	**0**	**100.00** %
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	3	3	**0**	**100.00** %
	14 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	3	3	**0**	**100.00** %
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	3	3	**0**	**100.00** %
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	3	3	**0**	**100.00** %
	17 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	132	132	**0**	**100.00** %
	18 . Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	132	132	**0**	**100.00** %

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah penjaringan kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar, minimal satu kali pada kelas 1 dan kelas 7 yang dilakukan oleh Puskesmas.

Standar pelayanan penjaringan kesehatan adalah pelayanan yang meliputi:

1) Penilaian status gizi (tinggi badan, berat badan, tanda klinis anemia);
2) Penilaian tanda vital (tekanan darah, frekuensi nadi dan napas);
3) Penilaian kesehatan gigi dan mulut;
4) Penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poster snellen;
5) Penilaian ketajaman indera pendengaran dengan garpu tala;dan
6) pemberian imunisasi anak sekolah.

Semua anak usia pendidikan dasar di wilayah kota adalah semua peserta didik kelas 1 dan kelas 7 di satuan pendidikan dasar yang berada di wilayah kota. Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan gigi dan mulut siswa SD dan setingkat melalui penjaringan kesehatan terhadap murid kelas 1 SD dan dan MI yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama guru dan dokter kecil.

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD/MI kelas 1 adalah cakupan siswa SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan dan tenaga terlatih (guru UKS/dokter kecil) melalui penjaringan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran.

Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya, meliputi:

a. Penilaian status gizi.
b. Penilaian tanda vital.
c. Penilaian kesehatan gigi dan mulut.
d. Penilaian ketajaman indera.

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar

Monitoring dan evaluasi UKS

Salah satu kegiatan yang mendukung capaian SPM ini adalah Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yaitu Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar pada anak usia pendidikan dasar di dalam dan luar satuan pendidikan dasar di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran.

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi : 1) Skrining Kesehatan dan 2) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan.

Dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah.

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2025 dalam mendukung pencapaian SPM meliputi Kegiatan pemeriksaan kesehatan anak sekolah yang meliputi :

a. Pemeriksaan kesehatan fisik

   pengukuran BB, TB, penentuan status gizi, pemeriksaan gigi, pemeriksaan ketajaman indra, pemeriksaan buta warna

b. Pemeriksaan kebersihan diri

   Pemeriksaan rambut, kulit, dan kuku

c. Pemeriksaan Hb dan pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri (untuk siswi kls 1-3 SMP/MTs)
d. Pemeriksaan kesehatan mental (untuk siswa/I SMA/SMK/MA)

Dengan Anggaran: Rp. 131,515,665,-,adapun kegiatan tersebut antara lain :

- Advokasi Penyusunan Kurikulum Kesehatan di Jenjang Sekolah Dasar
- Skrining Anemia Rematri
- Monitoring dan Evaluasi Sekretariat Tetap Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah
- Monev Aksi Bergizi di Sekolah
- Pembinaan Kesehatan Remaja pada Anak Didik LPKA
- Skrining Kesehatan Anak Sekolah
- Pelaksanaan BIAS Campak, Td dan HPV
- Pertemuan Pra Skrining dan BIAS
- Rapat Persiapan Pelaksanaan BIAS
- Pembentukan Kader Gigi UKGM
- Pembinaan Guru Tk Tentang Kesehatan Gigi Dan Mulut
- Advokasi Guru UKS
- Supfas UKS Sekolah
- Pembinaan Kader Tiwisada dan Sekolah Sehat

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :

Gambar 4.2.6. Pemeriksaan HB

Gambar 4.2.7. Pemberian Tablet Tambah Darah

Gambar 4.2.8. Skrining Kesehatan

Gambar 4.2.9. Supervisi UKS

Gambar 4.2.10. Pembinaan Kader Triwisada

6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
6 .	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	Orang	100.742	100.742	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00 %**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	9	9	**0**	**100.00** %
	2 . Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket	142	142	**0**	**100.00** %
	3 . Alat : Tensimeter	Unit	63	63	**0**	**100.00** %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	4 . Alat : Glukometer	Unit	36	36	**0**	**100.00** %
	5 . Alat : Alat pemeriksa Hb	Unit	9	9	**0**	**100.00** %
	6 . Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket	100.742	100.742	**0**	**100.00** %
	7 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	3	3	**0**	**100.00** %
	8 . Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	9.000	9.000	**0**	**100.00** %
	9 . Kit Opthalmologi komunitas	Unit	2	2	**0**	**100.00** %
	10 . Kuesioner PUMA	Dokumen	9.000	9.000	**0**	**100.00** %
	11 . Alat Pelayanan KB	Unit	41	41	**0**	**100.00** %
	a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	20	20	**0**	**100.00 %**
	b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit	20	20	**0**	**100.00 %**
	c. Vasektomi set	Unit	1	1	**0**	**100.00 %**
	12 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	3	3	**0**	**100.00** %
	13 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul/Vial	139	139	**0**	**100.00** %
	14 . Tenaga medis : Dokter	Orang	7	7	**0**	**100.00** %
	15 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	20	20	**0**	**100.00** %
	16 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	24	24	**0**	**100.00** %
	17 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	5	5	**0**	**100.00** %
	18 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	3	3	**0**	**100.00** %
	19 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	529	529	**0**	**100.00** %

Setiap warga negara Indonesia usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 15–59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun sesuai standar adalah :

a) pelayanan skrining kesehatan usia 15-59 (lima belas sampai lima puluh sembilan) tahun diberikan sesuai kewenangan oleh :
   1) Dokter;

2) Bidan;
3) Perawat;
4) Nutrisionis/Tenaga Gizi; dan
5) petugas pelaksana pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular (Posbindu PTM) terlatih.

b) Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun dilakukan di Puskesmas dan jaringannya (Posbindu PTM) serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

c) Pelayanan skrining kesehatan usia15–59 tahun minimal dilakukan satu tahun sekali.

d) Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun meliputi:
1) deteksi kemungkinan obesitas dilakukan dengan memeriksa (tinggi badan, berat badan, lingkar perut);
2) deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah sebagai pencegahan primer;
3) deteksi kemungkinan diabetes mellitus menggunakan tes cepat gula darah;
4) deteksi gangguan mental emosional dan perilaku;
5) pemeriksan ketajaman penglihatan;
6) pemeriksaan ketajaman pendengaran;
7) deteksi dini kanker dilakukan melalui:
- pemeriksaan payudara klinis dan
- pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) khusus untuk wanita usia 30-59 (tiga puluh sampai lima puluh sembilan) tahun.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan warga negara berusia usia 15–59 tahun dinilai dari persentase pengunjung usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Kegiatan yang dilaksanakan:

a. Penetapan sasaran
b. Pelayanan edukatif
c. Skrining faktor risiko penyakit tidak menular pada usia produktif:
1. Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut.
2. Pengukuran tekanan darah.
3. Pemeriksaan gula darah.
4. Anamnesa perilaku berisiko
5. Penyuluhan dan rujukan bila diperlukan

Kegiatan tahun 2025 yang mendukung capaian SPM ini adalah Kegiatan Prolanis adalah program pelayanan kesehatan untuk peserta BPJS Kesehatan yang memiliki penyakit kronis. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup peserta.

Kegiatan Prolanis meliputi: senam bersama, penyuluhan kesehatan, pemeriksaan gula darah, pengukuran tekanan darah, pengukuran berat badan, tinggi badan, suhu tubuh, dan lingkar perut, pemeriksaan penunjang laboratorium, serta konsultasi dengan dokter atau tenaga medis lain, alokasi Anggaran Rp. 171,580,860, -

Dengan judul kegiatan

- Deteksi dini PTM
- Sosialisasi Kanker Serviks
- Pelayanan Catin

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :

Gambar 4.2.11. Bimbingan Perkawinan

Gambar 4.2.12. Pemeriksaan Kesehatan di Bakesbangpol Kota Blitar

Gambar 4.2.13. Kegiatan Skrining PTM dan Penyuluhan

7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
7 .	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	Orang	22.714	22.714	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00 %**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	103	103	**0**	**100.00** %
	2 . Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	103	103	**0**	**100.00** %
	3 . Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	103	103	**0**	**100.00** %
	4 . Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	22.714	22.714	**0**	**100.00** %
	5 . Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	22.714	22.714	**0**	**100.00** %
	6 . Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	22.714	22.714	**0**	**100.00** %
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	3	3	**0**	**100.00** %
	8 . Tenaga medis : Dokter	Orang	6	6	**0**	**100.00** %
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	3	3	**0**	**100.00** %
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	3	3	**0**	**100.00** %
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	3	3	**0**	**100.00** %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	3	3	**0**	**100.00** %
	13 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	110	110	**0**	**100.00** %

Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan skrining kesehatan warga negara usia 60 tahun ke atas sesuai standar adalah:

a. pelayanan skrining kesehatan diberikan sesuai kewenangan oleh dokter, perawat, bidan, Nutrisionis/Tenaga Gizi; dan Kader Posyandu Lansia/Posbindu.
b. Pelayanan skrining kesehatan diberikan di Puskesmas dan jaringannya, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, maupun pada kelompok lansia, bekerja sama dengan pemerintah daerah
c. minimal dilakukan satu tahun sekali
d. Lingkup skrining adalah sebagai berikut :
   - Deteksi hipertensi dengan mengukur tekanan darah.
   - Deteksi diabetes melitus dengan pemeriksaan kadar gula darah.
   - Deteksi kadar kolesterol dalam darah
   - Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku, termasuk kepikunan menggunakan Mini Cog atau Mini Mental Status Examination (MMSE)/Test Mental Mini atau Abreviated Mental Test (AMT) dan Geriatric Depression Scale (GDS)

Pengunjung yang ditemukan memiliki faktor risiko wajib dilakukan intervensi secara dini dan pengunjung yang ditemukan menderita penyakit wajib ditangani atau dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan skrining kesehatan pada warga negara usia 60 tahun keatas dinilai dari persentase pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia lanjut untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi:

a. Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut
b. Pengukuran tekanan darah
c. Pemeriksaan gula darah

d. Pemeriksaan gangguan mental
e. Pemeriksaan gangguan kognitif
f. Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut
g. Anamnesa perilaku berisiko

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan usia lanjut:

a. Posyandu Lansia
b. PMT penyuluhan
c. Monitoring dan evaluasi

Kegiatan tahun 2025 yang mendukung capaian SPM ini adalah Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut yaitu Pemberian layanan Kesehatan pada warga negara usia 60 tahun ke atas sesuai standar meliputi

Kegiatan di Posyandu Lansia meliputi pemeriksaan kesehatan, penyuluhan kesehatan, dan aktivitas fisik. Pemeriksaan kesehatannya meliputi: pengukuran tekanan darah, pengukuran tinggi badan dan berat badan, pengukuran IMT, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, pemeriksaan asam urat. Untuk lansia yang tidak datang ke posyandu atau mobiltas rendah, maka dilakukan homecare/kunjungan rumah oleh tenaga Kesehatan dengan anggaran: Rp. 102,353,500. Dengan kegiatan antara lain ;

- Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Lansia di Jejaring dan Jaringan Puskesmas serta UKBM
- Rapat Koordinasi Kesehatan Keluarga
- Pertemuan Jejaring dan Jaringan Puskesmas terkait Program Kesehatan Lansia
- Pembinaan Kader Posyandu Lansia dalam Pendampingan PJP Lansia
- Posyandu Lansia
- Refreshing Kader Posyandu Lansia
- Pelayanan Home Care Lansia
- Terapi Aktivitas Kelompok Lansia

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :

Gambar 4.2.14 Homecare Lansia

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
8 .	**Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	Orang	9.876	9.876	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00 %**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) **(panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)**	Paket	6	6	**0**	**100.00** %
	2 . Obat Hipertensi	Paket	9.876	9.876	**0**	**100.00** %
	3 . Tensimeter **(mengukur tekanan darah)**	Unit	66	66	**0**	**100.00** %
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	Dokumen	3	3	**0**	**100.00** %
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) **(peningkatan pengetahuan masyarakat)**	Paket	6	6	**0**	**100.00** %
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	6	6	**0**	**100.00** %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	17	17	**0**	**100.00** %
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	19	19	**0**	**100.00** %
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	5	5	**0**	**100.00** %
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	3	3	**0**	**100.00** %
	11 . Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	8	8	**0**	**100.00** %
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	3	3	**0**	**100.00** %

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi :

a. sasaran adalah penduduk usia 15 (lima belas) tahun keatas
b. penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi:
   - memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar;
   - upaya promosi kesehatan melalui modifikasi gaya hidup;
   - di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
c. penderita hipertensi dengan komplikasi (jantung, stroke, penyakit ginjal kronis, diabetes melitus dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL) yang mempunyai kompetensi penanganan komplikasi.
d. Standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi adalah:
   - Mengikuti Panduan Praktik Klinik Bagi Dokter di FKTP.
   - Pelayanan kesehatan sesuai standar diberikan kepada penderita Hipertensi di FKTP.
   - Pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar meliputi: pemeriksaan dan monitoring tekanan darah, edukasi, pengaturan diet seimbang, aktifitas fisik, dan pengelolaan farmakologis.
   - Pelayanan kesehatan berstandar ini dilakukan untuk mempertahankan tekanan darah pada <140/90 mmHg untuk usia di bawah 60 th dan <150/90 mmHg untuk penderita 60 tahun ke atas dan untuk mencegah terjadinya komplikasi jantung, stroke, diabetes melitus dan penyakit ginjal kronis.
   - Apabila tekanan darah tidak dapat dipertahankan atau mengalami komplikasi, penderita dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL).

Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan Kesehatan sesuai standar yang meliputi:

a. Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan Kesehatan
b. Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat
c. Melakukan rujukan jika diperlukan

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan penderita hipertensi:

a. Posbindu PTM
b. Peningkatan kualitas kader kesehatan
c. Monitoring dan evaluasi

Kegiatan yang mendukung pencapaian SPM pada tahun 2025 yaitu Posbindu PTM bertujuan untuk mendeteksi dini dan memantau faktor risiko penyakit tidak menular (PTM). PTM yang dimaksudkan adalah penyakit jantung, diabetes, penyakit paru, asma, dan kanker.

Kegiatan Posbindu PTM (Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular) meliputi: wawancara untuk menggali informasi faktor risiko, pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah dan kolesterol, pemeriksaan fungsi paru sederhana, pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual Asetat), konseling dan penyuluhan, olahraga Bersama, rujukan ke fasilitas kesehatan dasar dengan Anggaran Rp. 22,226,600 dengan beberapa kegiatan : Monev Capaian PTM, Pendampingan pelaporan PTM, Skrinning PTM di sekolah atau instansi dan Monev Kader Posbindu. Dokumentasi kegiatan antara lain :

Gambar 4.2.15. Kegiatan posbindu Kel Gedog

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
9 .	**Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	Orang	4.321	4.321	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00 %**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Obat Diabetes Melitus **(melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)**	Paket	4.321	4.321	**0**	**100.00** %
	2 . Fotometer atau Glukometer	Unit	36	36	**0**	**100.00** %
	3 . BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	4.321	4.321	**0**	**100.00** %
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	3	3	**0**	**100.00** %
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Pedoman	9	9	**0**	**100.00** %
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	6	6	**0**	**100.00** %
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	17	17	**0**	**100.00** %
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	19	19	**0**	**100.00** %
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	8	8	**0**	**100.00** %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	3	3	**0**	**100.00** %
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	5	5	**0**	**100.00** %
	12 . Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	8	8	**0**	**100.00** %

Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penyandang diabetes melitus sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya.

Pelayanan Kesehatan pada Penderita DM meliputi :

a. Sasaran indikator ini adalah penyandang DM di wilayah kerja kota.
b. Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotif dan preventif di FKTP.
c. Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM dengan komplikasi perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan untuk penanganan selanjutnya.
d. Pelayanan kesehatan penyandang DM diberikan sesuai kewenangannya oleh :
e. Dokter/DLP
f. Perawat
g. Nutrisionis/Tenaga Gizi
h. Pelayanan kesehatan diberikan kepada penyandang DM di FKTP sesuai standar meliputi 4 (empat) pilar penatalaksanaan sebagai berikut:
   - Edukasi
   - Aktifitas fisik
   - Terapi nutrisi medis
   - Intervensi farmakologis
i. Setiap penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar termasuk pemeriksaan HbA1C.
j. Bagi penyandang DM yang belum menjadi peserta JKN diwajibkan menjadi peserta JKN.

Capaian kinerja Pemerintah kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penyandang DM dinilai dari persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah penyandang diabetes melitus berdasarkan angka prevalensi diabetes melitus nasional dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi :

a. Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan Kesehatan
b. Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi
c. Melakukan rujukan jika diperlukan

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus :

a. Posbindu PTM
b. Peningkatan kualitas kader kesehatan
c. Monitoring dan evaluasi

Kegiatan tahun 2025 yang mendukung pencapaian SPM adalah Skrining PTM institusi merupakan kegiatan deteksi dini dan pencegahan penyakit tidak menular (PTM) yang dilakukan di berbagai lembaga, seperti di OPD-OPD, kejaksaan, masyarakat umum dengan anggaran Rp. 86,129,400,-.

Kegiatan PTM di institusi meliputi :

- Penyuluhan faktor risiko PTM dan cara pencegahannya
- Pengukuran tinggi badan, berat badan, dan Body Mass Index (BMI)
- Pengecekan tensi dan lingkar perut
- Pemeriksaan kolesterol, GDS, dan asam urat
- Konsultasi gizi

Adapun dokumentasi kegiatan antara lain :

Gambar 4.2.16. Kegiatan Prolanis di Puskesmas Kepanjenkidul

10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
10.	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT	Orang	297	297	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00 %**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) **(minimal 1 per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)**	Buku	3	3	**0**	**100.00** %
	2 . Penyediaan Psikofarmaka **(pengobatan/medikasi)**	Paket	297	297	**0**	**100.00** %
	3 . Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi **(instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)**	Formulir	297	297	**0**	**100.00** %
	4 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan **(pencatatan dan pelaporan)**	Formulir	297	297	**0**	**100.00** %
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	9	9	**0**	**100.00** %
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	7	7	**0**	**100.00** %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa **(contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)**	Orang	16	16	**0**	**100.00** %
	8 . Tenaga profesional lainnya	Orang	3	3	**0**	**100.00** %
	9 . Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	31	31	**0**	**100.00** %

Setiap ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat adalah :

a. Pelayanan promotif preventif dan penyediaan materi konseling informasi dan edukasi (KIE) dan buku kerja sederhana yang bertujuan meningkatkan kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan.
b. Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat diberikan oleh perawat dan dokter Puskesmas di wilayah kerjanya.
c. Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi:
   - Edukasi dan evaluasi tentang: tanda dan gejala gangguan jiwa, kepatuhan minum obat dan informasi lain terkait obat, mencegah tindakan pemasungan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana, dan/atau
   - Tindakan kebersihan diri ODGJ berat
d. Dalam melakukan pelayanan promotif preventif diperlukan penyediaan materi KIE dan Buku Kerja sederhana.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan kesehatan ODGJ berat meliputi:

a. Penetapan sasaran
b. Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi:
   1) Pemeriksaan status mental
   2) Wawancara
c. Edukasi kepatuhan minum obat.
d. Melakukan rujukan jika diperlukan

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan ODGJ berat:

a. Layanan psikiater
b. Pos Kesehatan Jiwa
c. Peningkatan kualitas kader jiwa
d. Kunjungan rumah ODGJ
e. Monitoring dan evaluasi

Kegiatan tahun 2025 yang mendukung capaian SPM ini Kegiatan posyandu jiwa meliputi pemeriksaan kesehatan mental, terapi, pengobatan, dan rehabilitasi sosial. Selain itu, posyandu jiwa juga melibatkan keluarga dan masyarakat untuk mendukung kesembuhan pasien.

Kegiatan pada posyandu jiwa meliputi: pemeriksaan rutin, terapi dan pengobatan, sesi konseling, pemberdayaan pasien. Pada posyandu jiwa juga dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis jiwa dari RSJ Lawang pada minggu ketiga setiap bulan. Kegiatan ini dialokasikan anggaran Rp. 137,032,800,-.

Dengan beberapa kegiatan:

- Forum Group Discussion TPKJM
- Ngobras Bersama Sahabat Tersayang
- Pembinaan Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa Bagi Tenaga Kesehatan
- Layanan Kesehatan Jiwa oleh Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa
- Posyandu Jiwa
- PMT Posyandu Sehat Jiwa
- Pelayanan CKG
- Homecare ODGJ
- Koordinasi Askep Jiwa
- Sosialisasi Kesehatan Jiwa
- Terapi Aktivitas Kelompok
- Pemantauan Minum Obat oleh Kader Jiwa

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :

Gambar 4.2.17. Kegiatan layanan Kesehatan jiwa

Gambar 4.2.18. Kegiatan Homecare ODGJ

Gambar 4.2.19. Pelayanan Psikiater

11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
11.	**Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	Orang	2.829	2.829	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00 %**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	3	3	**0**	**100.00** %
	2 . Reagen Zn TB	Kit	27	27	**0**	**100.00** %
	3 . Masker bedah dan Masker N95	Paket	37	37	**0**	**100.00** %
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	4.000	4.000	**0**	**100.00** %
	5 . Katrid tes cepat molekuler	Tes	2.750	2.750	**0**	**100.00** %
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	4	4	**0**	**100.00** %
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	2	2	**0**	**100.00** %
	8 . Tuberkulin	Vial	80	80	**0**	**100.00** %
	9 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	5	5	**0**	**100.00** %
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	16	16	**0**	**100.00** %
	11 . Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	8	8	**0**	**100.00** %
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	3	3	**0**	**100.00** %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	13 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	10	10	**0**	**100.00** %
	14 . Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	5	5	**0**	**100.00** %
	15 . Kader Kesehatan	Orang	30	30	**0**	**100.00** %

Setiap orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan TB sebagai upaya pencegahan di wilayah kerjanya

Pelayanan Tuberkulosis Sesuai Standar adalah pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh orang terduga TBC yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan di FKTL baik pemerintah maupun swasta

Pelayanan yang diberikan sesuai Pedoman Penanggulangan TBC yang berlaku antara lain :

- Penegakan diagnosis TBC dilakukan secara bakteriologis dan klinis serta dapat didukung dengan pemeriksaan penunjang lainnya.
- Dilakukan pemeriksaan pemantauan kemajuan pengobatan pada akhir pengobatan intensif, bulan ke 5 dan akhir pengobatan.
- Pengobatan dengan menggunakan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dengan panduan OAT standar.

Gejala Utama TBC adalah batuk selama 2 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, berkeringat malam hari tanpa aktifitas fisik dan badan meriang lebih dari satu bulan.

Kegiatan Promotif dan preventif antara lain penemuan kasus secara dini, penemuan kasus secara aktif, pemberian KIE untuk pencegahan penularan dengan penerapan etika batuk, pengendalian faktor risiko dan pemberian obat pencegahan

Prinsip pelayanan TBC adalah penemuan orang dengan TBC sedini mungkin, ditatalaksana sesuai standar sekaligus pemantauan hingga sembuh atau “TOSS TB” (Temukan, Obati Sampai Sembuh).

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan orang terduga TBC dinilai dari persentase jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan kesehatan orang terduga TBC meliputi:

a. Penetapan sasaran orang terduga TBC menggunakan data orang yang kontak erat
b. Pemeriksaan klinis
c. Pemeriksaan penunjang, adalah pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis
d. Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.
e. Melakukan rujukan jika diperlukan.

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan orang terduga TBC:

a. Paguyuban MANTAB TOSS TB
b. Penguatan jejaring PPM Penanggulanagn TBC
c. Kelompok masyarakat peduli TBC
d. Peningkatan kualitas kader TBC
e. PMT pasien TBC
f. Skrining ketuk pintu TBC
g. Pendampingan pasien TBC
h. Monitoring dan evaluasi

Kegiatan 2025 yang mendukung capaian SPM ini adalah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis melalui Skrining TBC adalah pemeriksaan untuk mendeteksi keberadaan kuman TB di dalam tubuh. Skrining TBC dapat dilakukan dengan tes mantoux atau tes dahak. Tujuan skrining TBC adalah untuk menemukan kasus TBC lebih awal, mengobati TBC lebih cepat, mencegah penularan TBC, mencegah kematian akibat TBC, dan mencegah resistensi obat. Dengan alokasi anggaran Rp. 351,288,084,- melalui kegiatan :

- Monev Penanggulangan Penyakit TBC
- Workshop DPPM (Distric Publik Private Mix)
- Monev Kader TBC
- Pertemuan Jejaring Public Private Mix (PPM)
- Penyisiran Kasus TBC
- Rapat koordinasi RS Satelit Tuberkulosis Resisten Obat
- Peringatan Hari TBC Sedunia
- Rapat Koordinasi Jejaring Pemeriksaan TCM
- Monev Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan TBC

- Rapat koordinasi RS Satelit Tuberkulosis Resisten Obat
- Pertemuan Rutin Kader TBC
- Skrining dan Sosialisasi TBC di Masyarakat
- Investigasi kontak Pasien TBC
- Penemuan kasus TB Aktif
- PMT Penyakit Menular dan Kronis
- Penyuluhan TB di Masyarakat
- Pemantauan Obat Oleh Kader

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :

Gambar 4.2.20. RAD Penanggulangan TBC.

Gambar 4.2.21. Skrining TBC.

Gambar 4.2.22. Investigasi Kontak Kasus TBC.

12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV)

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
12.	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)**					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP: PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS)	Orang	3.434	3.434	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00 %**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	3	3	**0**	**100.00** %
	2 . Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Tes	3.434	3.434	**0**	**100.00** %
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	3.434	3.434	**0**	**100.00** %
	4 . Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	3.434	3.434	**0**	**100.00** %
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	10	10	**0**	**100.00** %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	10	10	**0**	**100.00** %
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10	10	**0**	**100.00** %
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	10	10	**0**	**100.00** %
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	10	10	**0**	**100.00** %
	10 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	25	25	**0**	**100.00** %

Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TBC, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya dan diberikan di FKTP (Puskesmas dan Jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta di lapas/rutan narkotika. Pelayanan Kesehatan meliputi:

a. Upaya pencegahan pada orang yang memiliki risiko terinfeksi HIV
b. Pemeriksaan HIV ditawarkan secara aktif oleh petugas kesehatan bagi orang yang berisiko dimulai dengan:
   - pemberian informasi terkait HIV-AIDS
   - pemeriksaan HIV menggunakan tes cepat HIV dengan menggunakan alat tes sesuai standar nasional yang telah ditetapkan
   - orang dengan hasil pemeriksaan HIV positif harus dirujuk ke fasilitas yang mampu menangani untuk mendapatkan pengobatan ARV dan konseling tentang HIV dan AIDS bagi orang dengan HIV (ODHA) dan pasangannya
   - orang dengan infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan dengan hasil pemeriksaan HIV negatif harus dilakukan pemeriksaan ulang minimal setelah tiga (3) bulan, enam (6) bulan dan 12 bulan dari pemeriksaan yang pertama.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pemeriksaan HIV terhadap orang berisiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase

orang berisiko terinfeksi HIV yang datang ke fasyankes dan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV meliputi:

a. Penetapan sasaran HIV berdasarkan orang yang berisiko terinfeksi HIV (penderita TBC, IMS, penjaja seks, LSL, transgender, WBP, dan ibu hamil).
b. Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan
c. Skrining dilakukan dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun.
d. Melakukan rujukan jika diperlukan.

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV:

a. Peningkatan kualitas komunitas Warga Peduli Penyakit HIV/AIDS
b. Pemberdayaan dukungan sebaya HIV/AIDS
c. Penguatan jejaring populasi kunci
d. Peningkatan kualitas Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)
e. Pelayanan Poli VCT dan VCT Mobile untuk lapas
f. Monitoring dan evaluasi

Kegiatan 2025 yang mendukung capaian SPM ini adalah Kegiatan VCT mobile adalah kegiatan konseling dan tes HIV/AIDS secara keliling yang menyasar kelompok berisiko. VCT merupakan singkatan dari Voluntary Counseling and Testing.

VCT mobile bertujuan untuk: menemukan penderita HIV/AIDS, mencegah penularan HIV/AIDS, meningkatkan kesadaran masyarakat, memberikan edukasi dan penanganan yang baik kepada penderita HIV.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.137,595,600,- meliput:

- Monev Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS
- Monev Layanan Pencegahan Penularan Ibu ke Anak/PPIA HIV
- Audiensi dan Advokasi Pimpinan Daerah untuk Penyusunan RAD HIV/AIDS
- Monev Perawatan Dukungan Pengobatan Faskes
- Peringatan HAS
- Konsultasi Publik Hasil Penyusunan Rad HIV
- Rapat Kerja POKJA KPA Kota Blitar
- Pertemuan Pemberdayaan Dukungan Sebaya HIV-AIDS
- Pertemuan Penguatan Jejaring Populasi Kunci
- Pertemuan Kolaborasi Penanggulangan TB-HIV

- Superfisi Layanan Tes HIV – IMS
- Koordinasi Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin (Catin)
- Pelacakan Kasus ODHIV
- Mobile VCT pada Populasi WBP (LPKA)
- Penyuluhan HIV
-

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :

Gambar 4.2.23. Sosialisasi HIV/AIDS di SMA 1 Kota Blitar

Gambar 4.2.24. Penyuluhan HIV/AIDS

Gambar 4.2.25. Kegiatan Mobile VCT di Lapas

Gambar 4.2.26. Kegiatan mobile VCT

INDEKS PENCAPAIAN SPM TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (B)	PENCAPAIAN SPM (80XA) + (20XB)	INDEKS PENCAPAIAN SPM	KATEGORI IP SPM
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100 %	TUNTAS PRIPURNA
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100.00 %	100.00 %	100.00 %		
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100.00 %	100.00 %	100.00 %		
4	Pelayanan kesehatan balita	100.00 %	100.00 %	100.00 %		
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100.00 %	100.00 %	100.00 %		
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100.00 %	100.00 %	100.00 %		
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100.00 %	100.00 %	100.00 %		
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100.00 %	100.00 %	100.00 %		

No	Jenis Pelayanan Dasar	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (B)	PENCAPAIAN SPM (80XA) + (20XB)	INDEKS PENCAPAIAN SPM	KATEGORI IP SPM
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100.00 %	100.00 %	100.00 %		
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100.00 %	100.00 %	100.00 %		
11	Pelayanan kesehatan dengan orang terduga TBC	100.00 %	100.00 %	100.00 %		
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100.00 %	100.00 %	100.00 %		

4.2.4. Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD atau sumber lain yang sah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM.

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA BLITAR	975,255,996,497
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	139,161,672,220
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	1,817,017,465
	APBD	1,817,017,465
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	1,271,294,025
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	210,094,600
	E. DANA BAGI HASIL	335,628,840
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

RINCIAN ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KOTA BLITAR				5,236,514,871	5,166,498,677	98.66 %
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				1,763,323,965	1,721,456,201	97.63 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota K2023237			1,763,323,965	1,721,456,201	97.63 %
	1.02.02.2.02.0001	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	191,498,856	190,726,700	99.60 %
	1.02.02.2.02.0002	2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	190,975,000	190,522,264	99.76 %
	1.02.02.2.02.0003	3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	162,964,000	158,565,845	97.30 %
	1.02.02.2.02.0004	4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	78,163,600	78,140,700	99.97 %
	1.02.02.2.02.0005	5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	131,515,665	115,613,945	87.91 %
	1.02.02.2.02.0006	6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	171,580,860	169,740,900	98.93 %
	1.02.02.2.02.0007	7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	102,353,500	93,635,086	91.48 %
	1.02.02.2.02.0008	8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	22,226,600	21,900,380	98.53 %
	1.02.02.2.02.0009	9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	86,129,400	85,934,500	99.77 %
	1.02.02.2.02.0010	10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	137,032,800	135,305,458	98.74 %
	1.02.02.2.02.0011	11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	351,288,084	347,474,713	98.91 %
	1.02.02.2.02.0012	12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang	Orang	137,595,600	133,895,710	97.31 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			dengan Risiko Terinfeksi HIV				
	JUMLAH INDIKATOR				1,763,323,965	1,721,456,201	97.63 %
	JUMLAH PROGRAM				1,763,323,965	1,721,456,201	97.63 %
KEGIATAN LAINNYA							
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
		1.	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		3,473,190,906	3,445,042,476	99.19 %

4.2.5. Dukungan Personil

Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Kota Blitar didukung oleh personil baik langsung maupun tidak langsung pada Dinas Kesehatan Kota Blitar yang terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah Pegawai	298
1.	**Jenis kelamin**	**298**
	Laki - Laki	63
	Perempuan	235
2.	**Status kepegawaian:**	**298**
	PNS	230
	CPNS	0
	PTT	6
	PPPK	62
3.	**Pendidikan**	**298**
	SD/sederajat	1
	SMP/sederajat	1
	SMA/SMK/ sederajat	22
	D1	1
	D2	0
	D3	156
	S1/D-IV	112
	S2	5

4.2.6. Permasalahan Dan Solusi

Adapun permasalahan penerapan SPM Bidang Kesehatan tahun 2025 di Kota Blitar sebagaimana Tabel berikut :

NO	PERMASALAHAN
1.	Pasien terduga TBC tidak kembali ke fasyankes untuk melakukan pemeriksaan penunjang, SITB tidak dilakukan pengisian secara realtime
2.	Tantangan dalam pelayanan ODGJ Berat yaitu penanganan pasien pasca pemulihan sehingga tidak terjadi kekambuhan dan bisa produktif kembali
3.	Pencatatan dan pelaporan di website ASIK Kemenkes masih belum optimal

4.3 Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
b. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik

Didalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tersebut juga memuat penjelasan terkait indikator dan nilai serta batas waktu pencapaian SPM secara nasional sebagai berikut :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR	PENERIMA LAYANAN DASAR
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria	Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air

4.3.2. Target Pencapaian SPM

SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Setiap warga negara sesuai dengan kodratnya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan memanfaatkan seluruh potensi manusiawi

yang dimilikinya. Sebaliknya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin agar setiap warga negara dapat menggunakan haknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa hambatan atau halangan dari pihak manapun.

SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya. Untuk itu dalam penetapan indikator SPM, Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian agar melakukan pentahapan pada jenis pelayanan, mutu pelayanan dan/atau sasaran/lokus tertentu

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2025
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%

4.3.3. Realisasi Pencapaian SPM 2025

Untuk mendukung pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum jenis layanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengelolaan limbah domestik dilakukan program dan kegiatan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.

1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					100.00 %	
1 .	**Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari**					100.00 %	
			Rekap Target (Harus Dilayani)	**Rekap Capaian (Terlayani)**	**Selisih**		
	JUMLAH PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI) ***tidak masuk dalam hitungan**	Orang	0	0	**0**	**0.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1350	1350	**0**	**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00 %**	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	JARINGAN PERPIPAAN					100.00 %	
Kuantitas SPAM							
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	450	450	**0.0000**	**100.00 %**	
Kualitas SPAM							
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga	450	450	**0.0000**	**100.00 %**	
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN					100.00 %	
Kuantitas SPAM							
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	1	1	**0.0000**	**100.00 %**	
Kualitas SPAM							
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	Rumah Tangga	1	1	**0.0000**	**100.00 %**	

Dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal Air Minum Bidang PU terkait Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari, maka Dinas PUPR Kota Blitar melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian SPM tersebut. Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 meliputi :

- Penyusunan Petunjuk Teknis SPALD Berbasis Masyarakat dengan nilai anggaran Rp. 100.000.000,-
- Kajian Pembebasan Retribusi Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Blitar dengan nilai anggaran Rp. 50.000.000,-
- Pengujian Kualitas Air Efluen IPAL Komunal dengan nilai anggaran Rp. 97.600.000,-
- Update Aplikasi Sidoti+ dengan nilai anggaran Rp. 30.000.000,-
- Pemeliharaan Bangunan IPLT dengan nilai anggaran Rp. 100.000.000,-
- Pembangunan Tangki Septik Individual Beserta Bilik Kamar Mandi di Kelurahan Gedog dengan dukungan anggaran Rp. 187.000.000,-
- Penambahan Sambungan Rumah (SR) dan Bangunan Pelengkap IPAL di Kelurahan Kauman dengan dukungan anggaran Rp. 150.000.000,-

Dokumentasi kegiatan yang gtelah dilaksanakan sebagai berikut :

Gambar 4.3.1. Kajian Pengembangan Database Jaringan Non Perpipaan Kecamatan Sananwetan Tahun 2025.

Di Kecamatan Sanannwetan Tanggal 17 September 2024 sd 15 Desember 2025
Pelaksana CV. ASTA TIGA
Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Menganalisis data spasial untuk mengidentifikasi pola sebaran sumber air, kepadatan sumber dan potensi area pelayanan yang belum terlayani atau rentan.
2. Merancang arsitektur database yang robust dan terukur termasuk skema data yang mampu menyimpan semua data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan.
3. Merumuskan kebijakan teknis untuk pengelolaan air yang berkelanjutan
4. Mengupdate hasil analisa ke aplikasi si-amald

Nilai Kontrak Rp. 74.646.000

Gambar 4.3.2. Sosialisasi Optimalisasi SPAM Berkualitas.

Pembinaan Teknis Pengelola SPAM dilakukan 1 kali dalam setahun dengan peserta rapat KPSPAM Kota Blitar dan Pemangku Wilayah Tanggal 27 Agustus 2025.

2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
2 .	**Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik**					100.00 %	
			Rekap Target (Harus Dilayani)	**Rekap Capaian (Terlayani)**	**Selisih**		
	JUMLAH PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI) ***tidak masuk dalam hitungan**	Orang	0	0	**0**	**0.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	105	105	**0**	**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00 %**	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KUANTITAS SPALD					100.00 %	
	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	10	10	**0.0000**	**100.00 %**	
	KUALITAS SPALD					100.00 %	
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)							
	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	25	25	**0.0000**	**100.00 %**	
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) *Mutu Tidak Boleh Ditutup Semua							
	1 . Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	35	35	**0.0000**	**100.00 %**	
	2 . Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	1	1	**0.0000**	**100.00 %**	

Untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal Air Limbah Domestik Bidang PU terkait Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik, maka Dinas PUPR Kota Blitar melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian SPM tersebut. Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

Gambar 4.3.3. Pembangunan Tangki Septik Individual Beserta Bilik Kamar Mandi di Kelurahan Gedog.

Kegiatan tanggal 29 Juli 2025 sd 31 Desember 2025
Untuk 10 Unit Tangki septic beserta bilik kamar mandi, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 187.000.000, dilaksanakan melalui swakelola Tipe IV KSM TUNAS NIRMALA.

Gambar 4.3.4. Penambahan Sambungan Rumah (SR) dan Bangunan Pelengkap IPAL di Kelurahan Kauman.

Kegiatan tanggal 29 Juli 2025 sd 31 Desember 2025.
Untuk 25 Sambungan Rumah, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 150.000.000 Dana APBD, dilaksanakan melalui swakelola Tipe IV KSM GUYUP RUKUN

Gambar 4.3.5. Pembinaan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota bertema Eco Talk.

Pembinaan Teknis Pengelola IPAL dilakukan 1 kali dalam setahun dengan peserta rapat KPP IPAL Kota Blitar dan Pemangku Wilayah. Bertempat di Gedung Pemerintah Kota Blitar tanggal 03 Desember 2025.

Gambar 4.3.6. Kajian Pembebasan Retribusi Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Blitar.

Kegiatan dilakukan tanggal 29 Oktober 2025 – 27 Desember 2025.
Pelaksana PT. BUMISWA SEMBADA
Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Inventarisasi regulasi dan dokumen terkait
2. Identifikasi permasalahan lapangan, keterbatasan daya beli, resiko lingkungan dan keterbatasan layanan
3. Analisis data
4. Penyusunan laporan berupa dokumen kajian kebijakan/ rekomendasi teknis

Nilai Kontrak Rp. 44.812.000

Gambar 4.3.7. Penyusunan Petunjuk Teknis SPALD Berbasis Masyarakat Kota Blitar

Kegiatan dilaksanakan tanggal 29 Oktober 2025 – 27 Desember 2025
Pelaksana CV. CIPTA PRIMA ENGINEERING
Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Penyusunan mekanisme pelaksanaan
2. Penyusunan desain prototype kegiatan SPALD
3. Penyusunan format setiap tahapan pelaksanaan

Nilai Kontrak Rp. 81.894.000

Gambar 4.3.8. Pengujian Kualitas Air Efluen IPAL Komunal Kota Blitar
Kagiatan tanggal 29 Juli 2025 – 25 November 2025.

Pelaksana PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari: 1. Pengujian Kualitas air badan air yang diuji mengacu pada PP Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran IV tentang Baku Mutu Air Nasional 2. Pengujian kualitas efluen IPAL Komunal mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no P.68 tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik Nilai Kontrak Rp. 70.200.000

INDEKS PENCAPAIAN SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (B)	PENCAPAIAN SPM (80xA) + (20xB)	INDEKS PENCAPAIAN SPM	KATEGORI IP SPM
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	100%	100%	100%	TUNTAS PARIPURNA
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	100%	100%	100%		

4.3.4. Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD atau sumber lain yang sah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA BLITAR	975,255,996,497
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	38,124,875,332
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	1,196,429,600
	APBD	873,138,600
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	873,138,600
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	323,291,000

RINCIAN ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KOTA BLITAR				1,196,429,600	1,034,083,483	86.43 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				148,235,000	126,601,000	85.41 %
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K2023638			148,235,000	126,601,000	85.41 %
	1.03.03.2.01.0001	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0002	2	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0003	3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0004	4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0005	5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0006	6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Liter/Detik	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0007	7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0008	8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0009	9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum	Penyelenggara SPAM	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0010	10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0011	11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0012	12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0013	13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0014	14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1.03.03.2.01.0015	15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0016	16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0017	17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0018	18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0019	19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0020	20	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0021	21	Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0022	22	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0023	23	Peningkatan KapasitasKelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0024	24	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0025	25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	148,235,000	126,601,000	85.41 %
	1.03.03.2.01.0026	26	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0027	27	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Desa	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0028	28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	Liter/Detik	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			(SPAM) Jaringan Perpipaan				
	1.03.03.2.01.0029	29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0030	30	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0031	31	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0032	32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0033	33	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				148,235,000	126,601,000	85.41 %
	JUMLAH PROGRAM				148,235,000	126,601,000	85.41 %
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				1,048,194,600	907,482,483	86.58 %
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota K20240327112559			1,048,194,600	907,482,483	86.58 %
	1.03.05.2.01.0001	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0002	2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0003	3	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0004	4	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0005	5	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah	Rumah Tangga	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Domestik terpusat skala permukiman				
	1.03.05.2.01.0006	6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0007	7	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0008	8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok Masyarakat	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0009	9	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0010	10	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0011	11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Dokumen	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0012	12	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0013	13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0014	14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0015	15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	M^3/Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0016	16	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	M^3/Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0017	17	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0018	18	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Unit	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1.03.05.2.01.0019	19	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Unit	124,272,000	119,785,820	96.39 %
	1.03.05.2.01.0020	20	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M³/Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0021	21	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M³/Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0022	22	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M³/Hari	174,000,000	174,000,000	100.00 %
	1.03.05.2.01.0023	23	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M³/Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0024	24	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0025	25	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M³/Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0026	26	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0027	27	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M³/Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0028	28	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M³/Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0029	29	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Unit	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1.03.05.2.01.0030	30	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M³/Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0031	31	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M³/Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0032	32	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M³/Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0033	33	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	50,784,000	44,461,150	87.55 %
	1.03.05.2.01.0034	34	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Desa	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0035	35	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Penyelenggara	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0036	36	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M³/Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0037	37	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0038	38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0039	39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga	211,000,000	211,000,000	100.00 %
	1.03.05.2.01.0040	40	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan SistemPengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	175,938,600	109,469,013	62.22 %
	1.03.05.2.01.0041	41	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	312,200,000	248,766,500	79.68 %
	JUMLAH INDIKATOR				1,048,194,600	907,482,483	86.58 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	JUMLAH PROGRAM				1,048,194,600	907,482,483	86.58 %
KEGIATAN LAINNYA							
3	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA							

4.3.5. Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut, dipenuhi dengan dukungan personil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

No	Golongan	Jumlah	Ket
1	Pembina Utama Muda Pembina Tingkat I (IV/b) Pembina (IV/a)	1 orang 1 orang 3 orang	
	Jumlah Golongan IV	**5 orang**	
2	Penata Tk. I (III/d) Penata (III/c) Penata Muda Tk. I (III/b) Penata Muda (III/a)	5 orang 2 orang 8 orang 9 orang	
	Jumlah Golongan III	**24 orang**	
3	Pengatur Tk. I (II/d) Pengatur (II/c) Pengatur Muda Tk. I (II/b) Pengatur Muda (II/a)	4 orang 4 orang 2 orang 0 orang	
	Jumlah Golongan II	**10 orang**	
	Jumlah Keseluruhan	**39 orang**	

4.3.6. Permasalahan Dan Solusi

NO	INDIKATOR	PERMASALAHAN
1	**Pengumpulan Data**	Data untuk pengukuran SPM bidang Air Minum dan Sanitasi tidak hanya berasal dari Dinas PUPR dan data dari Dinas PUPR hanya sebagian kecil/supporting sistem untuk pencapaian SPM tersebut.
2	**Perhitungan Kebutuhan**	Belum dilakukan assessment kebutuhan terhadap penerima layanan SPM secara menyeluruh
3	**Perencanaan dan Penganggaran**	Penganggaran hanya dari APBD
4	**Pelaksanaan**	a. Pengelolaan Air Limbah Domestik
		Kerusakan pada sistem IPAL dibiarkan saja / tidak diperbaiki oleh Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara IPAL (KPP) dengan alasan keterbatasan dana
		Beberapa Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara IPAL (KPP) kurang aktif sehingga menyebabkan pengelolaan IPAL yang dilakukan kurang optimal
		b. Pengelolaan Air Minum
		Masyarakat masih mengandalkan penggunaan sumber air bersih individual padahal secara teknis untuk kawasan perkotaan seharusnya memakai sistem perpipaan
		Pengelola SPAM (OMS) Non BUMD kurang optimal dalam mengelola SPAM yang telah terbangun
		Masih rendahnya sinergitas dan koordinasi dengan penyedia air bersih (PDAM Kota Blitar) untuk penyediaan air bersih dengan sistem perpipaan
5	**Pelaporan**	Pemahaman terkait isian untuk pelaporan SPM masih relatif rendah

4.4 Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat kabupaten/kota terdiri atas:

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Adapun penjelasan jenis pelayanan dasar untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat sebagai berikut :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR	PENERIMA LAYANAN DASAR
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria

4.4.2. Target Pencapaian SPM

SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kebutuhan dasar hidupnya dan Pemerintah berkewajiban menjamin agar setiap warga negara mendapat pelayanan dasar tersebut. Adapaun target capaian pelayanan SPM Bidang Perumahan Rakyat sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2025
1	Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten / kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%

4.4.3. Realisasi Pencapaian SPM 2025

Data pencapaian dan penerapan SPM disajikan berdasarkan realisasi program kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**TUNTAS PARIPURNA**			100.00 %	
1 .	**Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**					**100.00 %**	
	Bencana Meliputi :						
	a) Letusan gunung berapi;						
	b) Gempa bumi;						
	c) Tanah longsor;						
	d) Gelombang pasang;						
	e) Banjir bandang; dan/atau						
	f) Bencana lainnya.						
Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana) di Verifkasi oleh Sekber Pusat							
	Terjadi (Lampirkan SK Bencana) di Verifkasi oleh Sekber Pusat Download SK yang telah di upload Tidak Masuk Kedalam Perhitungan						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	**Orang**	**8**	**8**	**0**	**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00 %**	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					**100.00 %**	
	1 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	2	2	0	100.00 %	
	2 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0	0.00 %	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	3 . Pemukiman kembali bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0	0.00 %	
	4 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0	0.00 %	

Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

1) Pada saat masa pasca bencana;
2) Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/atau
3) Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota.

Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:

1) Rehabilitasi rumah bagi korban bencana
   Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
2) Pembangunan Kembali rumah bagi korban bencana
   Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak berat, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
3) Pembangunan Baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, berat, yang memiliki Surat Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota tentang Relokasi Korban Bencana Alam. Kualitas yang diterima adalah rumah yang layak huni dengan spesifikasi luas lantai paling sedikit 36 m^2 dan luas tanah minimal 60 m^2.
4) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana
   Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang menghuni rumah sewa. Kualitas jasa yang diberikan adalah pendampingan akses sewa rumah layak huni terjangkau dan subsidi uang sewa selama 3 bulan setelah masa tanggap darurat.

Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi struktur bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok, serta struktur atas;
b. Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi;
c. Memenuhi kecukupan luas minimal 9 m2/orang.

Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dalam upaya mendukung pencapaian SPM meliputi :

1. Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Kader Posyandu Bidang Perumahan
   Kegiatan persiapan ini adalah Rapat Koordinasi Teknis Kader Posyandu Bidang Perumahan dilaksanakan di Kamis, 20 Februari 2025 yang bertujuan untuk memberikan pengarahan untuk pemberian pembekalan atau pengarahan tugas kepada kader posyandu bidang perumahan rakyat di Kota Blitar, dengan douemntasi sebagai berikut :

Gambar 4.4.1. Rapat Koordinasi Teknis Kader Posyandu Bidang Perumahan

2. Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No.13 Tahun 2023
   Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis 13 November 2025. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada organisasi perangkat daerah dari beberapa dinas atau badan dan kecamatan kelurahan terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No.13 Tahun 2023. Peserta sejumlah ± 70 orang peserta. Anggaran dalam kegiatan ini secara global yaitu sebesar Rp. 22.883.000,adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :

Gambar 4.4.2. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No.13 Tahun 2023

3. Verifikasi dan Survey lapangan rumah terdampak bencana
   Kegiatan ini bertujuan untuk menindaklanjuti laporan kelurahan tentang terjadi kerusakan rumah akibat Angin kencang yang disertai hujan sehingga menyebabkan atap rusak terhempas angin. Dengan adanya verifikasi dan survey

lapangan dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah, adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :

Gambar 4.4.3. Verifikasi dan Survey Lapangan Rumah Terdampak Bencana

4. Kegiatan Rehabilitasi Rumah yang Terkena Bencana
   Kegiatan Rehabilitasi Rumah akibat bencana Angin kencang yang disertai hujan sehingga menyebabkan atap rusak terhempas angin pada rumah yang terdapat di kelurahan Kepanjenkidul dan rumah rusak karena terkena banjir sehingga tanah rumah depan amblas dan rusak. Kegiatan ini bertujuan untuk merehabilitasi rumah sehingga dapat dihuni kembali dengan nyaman dan aman. Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi yaitu pada bulan Agustus 2025. Anggaran Rehabilitasi Rumah akibat bencana ini yaitu Rp. 14.136.319, adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :

Gambar 4.4.4. Rehabilitasi Rumah akibat Terkena Banjir karena Hujan Deras di Kel. Rembang

Before	After

Gambar 3.4.5. Rehabilitasi Rumah akibat Hujan Deras disertai Angin di Kel. Kepanjenkidul

Before

After

5. Kegiatan Kajian Penyusunan Data Rumah (Kec. Kepanjenkidul)
   Kegiatan Kajian Penyusunan Data Rumah (Kec. Kepanjenkidul) adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mengetahui jumlah rumah yang ada di Kecamatan Kepanjenkidul. Dengan adanya data rumah Pemerintah Kota Blitar dapat mengetahui jumlah rumah serta kondisi rumah yang ada di kecamatan Kepanjenkidul. Pelaksanaan kegiatan ini yaitu pada 26 Juni 2025 sampai dengan 23 September 2025. Pagu Anggaran Kegiatan ini yaitu Rp.127.759.450 dimana merupakan anggaran untuk kajian pendataan maupun persiapan dan evaluasi. Dalam Pelaksanaan Pendataan diawali dengan melaksanakan Rapat Persiapan dengan mengundang Ketua RT dan RW untuk konfirmasi nama-nama warga yang ada di Kecamatan Kepanjenkidul. Pelaksanaan kegiatan ini yaitu pada Kamis, 17 Juli 2025 Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :

Gambar 4.4.6. Rapat Persiapan Pendataan Rumah

Gambar 4.4.7. FGD Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Akhir

6. Kegiatan Pembentukan dan Pemantaban Tugas Tim Satgas SPM Bidang Perumahan

   Kegiatan ini dilaksanakan pada Jum'at 14 November 2025. Pembentukan dan Pemantaban Tugas ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Perangkat Daerah tentang menindaklanjuti pertemuan sebelumnya yaitu Sosialisasi dan Bimbingan Teknis SPM Bidang Perumahan Rakyat Berdasarkan Peraturan Meneteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023, maka pada kesempatan ini kembali ditegaskan terkait pembentukan dan pemantaban tugas untuk Tim Satgas SPM Bidang Perumahan. Peserta sejumlah ± 40 orang peserta. Anggaran dalam kegiatan ini secara global yaitu sebesar Rp. 8.399.000, adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :

Gambar 4.4.8. Kegiatan Pembentukan dan Pemantaban Tugas Tim Satgas SPM Bidang Perumahan

7. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Posyandu Bidang Perumahan Rakyat Kota Blitar Tahun 2025

   Rapat Koordinasi ini disampaikan paparan terkait Rekapitulasi Laporan Posyandu Bidang Perumahan Kota Blitar Periode April-September 2025 serta membahas beberapa catatan evaluasi terkait penyelenggaraan Posyandu Bidang Perumahan. Adapun dokumentasinya sebagai berikut:

Gambar 4.4.9. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Posyandu Bidang Perumahan Rakyat Kota Blitar Tahun 2025

2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
2 .	**Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**					**100.00 %**	
	Relokasi Program Pemerintah Meliputi :						
	a) Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha;						
	b) Penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;						
	c) Pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman;						
	d) Pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau						
	e) Pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana)						
Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah							
	Tidak Terjadi (Dokumen Teknis Perencanaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman) di Verifkasi oleh Sekber Pusat (contoh : dokumen RP3KP, dsb.) Tidak Masuk Kedalam Perhitungan						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**	
			Jumlah	Jumlah	Yang Belum		
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	**Orang**	**0**	**0**	**0**	**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00 %**	
			Jumlah Mutu Yang Harus	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Mutu Yang Belum Terlaya		

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Dilayani / Dipenuhi	/ Terpenuhi	ni / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					**100.00 %**	
	1 . Format Tahapan		Nilai Maksimum Pada TW 4 (100%)			100.00 %	
	1.PENDATAAN					100.00 %	
	Form 4.A.4 Identifikasi Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana					100%	
	Form 4.A.5 Identifikasi Lahan Potensial Sebagai Relokasi Perumahan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana					100%	
	Form 4.A.6 Pengumpulan Data Rumah Yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana					100%	
	Form 4.A.10 Identifikasi Perumahan Di Lokasi Yang Menimbulkan Bahaya Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah					100%	
	Form 4.A.11 Identifikasi Perumahan Di Atas Lahan Bukan Fungsi Permukiman Di Kabupaten/Kota					100%	
	Form 4.A.12 Identifikasi Perumahan Di Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota (<10 Ha)					100%	
	Form 4.A.13 Pengumpulan Data Rumah Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota					100%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapai an	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	2.PERHITUNGAN					100.00 %	
	Form 4.B.3 Penghitungan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana					100%	
	Form 4.B.4 Penghitungan Kebutuhan Biaya Layanan Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Terkena Bencana Kabupaten/Kota :					100%	
	Form 4.B.7 Penghitungan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :					100%	
	Form 4.B.8 Penghitungan Kebutuhan Biaya Layanan Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota					100%	
	3.PERENCANAAN					100.00 %	
	Form 4.C.2 Rencana Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota :					100%	
	Form 4.C.4 Rencana Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota :					100%	

Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung :

a. Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau
b. Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan "tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya".

Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang dapat diberikan dalam memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:

a. Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan
   Diberikan kepada penerima pelayanan yang memiliki bukti hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan rumah dengan kualitas sesuai penilaian appraisal berdasarkan NSPK yang berlaku;
b. Subsidi Uang Sewa
   Dapat diberikan kepada penerima pelayanan yang tidak memiliki bukti hak penguasaan atas tanah dan/atau bangunan yang dihuni, dan tidak memiliki daya untuk menyewa hunian layak. Besaran bantuan subsidi sewa sebesar minimal 50 % dan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari perhitungan tarif sewa rumah layak huni yaitu nilai harga rumah layak huni dibagi 20 tahun tenor KPR maksimal;
c. Penyediaan Rumah Layak Huni
   Dapat dilaksanakan untuk relokasi program pemerintah yang berdampak cukup masif, untuk memenuhi jumlah kekurangan rumah sewa lebih dari 50 unit, dengan kualitas penyediaan dalam bentuk Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus.
   Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi ramah bencana gempa sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
   1. Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi struktur bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok, serta struktur atas;
   2. Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi;
   3. Memenuhi kecukupan luas minimum 9 m2/orang.

Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dalam upaya mendukung pencapaian SPM meliputi :

1. Penyusunan Kajian Identifikasi Lahan Potensial Sebagai Relokasi Perumahan
   Kegiatan ini merupakan penyelenggaraan Pelayanan Dasar SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah kabupaten/kota serta terkait dengan upaya mitigasi maupun penanggulangan bencana, salah satu hal yang diperlukan ialah penyediaan lahan dalam mendukung relokasi perumahan. Dalam rangka mendukung penyelenggaran Pelayanan Dasar SPM Bidang Perumahan Rakyat pada daerah kabupaten/kota, maka pada proses tahapan pendataan salah satunya diperlukan kajian Identifikasi Lahan Potensial Untuk Relokasi Perumahan di Kota Blitar. Kajian ini dilaksanakan pada 2 Mei 2025 sampai dengan 30 Juli

2025. Pagu Anggaran kegiatan ini secara global yaitu sebesar Rp. 85.000.000, adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut:

Gambar 4.4.10. FGD Kajian Identifikasi Lahan Potensial Sebagai Relokasi Perumahan

INDEKS PENCAPAIAN SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (B)	PENCAPAIAN SPM (80xA) + (20xB)	INDEKS PENCAPAIAN SPM	KATEGORI IP SPM
1.	Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	100%	100%	100%	100%	TUNTAS PARIPURNA
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	100%	100%	100%		

4.4.4. Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD atau sumber lain yang sah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM.

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA BLITAR	975,255,996,497
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	13,942,565,587
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	2,305,335,200
	APBD	2,305,335,200
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	2,305,335,200
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0

	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

RINCIAN ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KOTA BLITAR				2,305,335,200	2,191,425,771	95.06 %
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				306,525,400	232,351,619	75.80 %
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023340			219,608,500	218,215,300	99.37 %
	1.04.02.2.01.0001	1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.01.0002	2	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.01.0003	3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.01.0004	4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.01.0005	5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.01.0006	6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	127,759,450	126,456,250	98.98 %
	1.04.02.2.01.0007	7	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.01.0008	8	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	2,530,000	2,520,000	99.60 %
	1.04.02.2.01.0009	9	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.01.0010	10	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	89,319,050	89,239,050	99.91 %
	JUMLAH INDIKATOR				219,608,500	218,215,300	99.37 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023348			86,916,900	14,136,319	16.26 %
	1.04.02.2.03.0001	1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	83,916,900	14,136,319	16.85 %
	1.04.02.2.03.0002	2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0003	3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0004	4	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0005	5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0006	6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0007	7	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0008	8	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0009	9	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	3,000,000	0	0%
	1.04.02.2.03.0010	10	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0011	11	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0012	12	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				86,916,900	14,136,319	16.26 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	JUMLAH PROGRAM				306,525,400	232,351,619	75.80 %
KEGIATAN LAINNYA							
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
		1.	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Sosialisasi Standart Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat / Sukarelawan Tanggap Bencana		22,883,000	20,692,500	90.43 %
		2.	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator		8,399,000	8,333,500	99.22 %
		3.	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kab/Kota Sub Kegiatan Perbaikan RTLH untuk Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10Ha		1,967,527,800	1,930,048,152	98.10 %

4.4.5. Dukungan Personil

Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat didukung oleh personil baik langsung maupun tidak langsung sebanyak dengan rincian sebagai berikut :

No	Pangkat / Gol, Tingkat Pendidikan dan Jabatan	Jenis Kelamin (Orang)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
PANGKAT/GOL. RUANG				
1.	Pembina Tk.I (IV/b)	2	0	2
2.	Pembina (IV/a)	1	1	2
3.	Penata Tk. I (III/d)	1	4	5
4.	Penata (III/c)	1	0	1

No	Pangkat / Gol, Tingkat Pendidikan dan Jabatan	Jenis Kelamin (Orang)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
PANGKAT/GOL. RUANG				
5.	Penata Muda Tk I (III/b)	3	1	4
6.	Penata Muda (III/a)	4	3	7
7.	Pengatur Tk I (II/d)	1	1	2
11.	Pengatur Muda (II/a)	1	0	1
12.	PPPK	1	1	2
JUMLAH		**15**	**11**	**26**
TINGKAT PENDIDIKAN				
1.	Pasca Sarjana (S2)	3	0	3
2.	Sarjana (S1/DIV)	8	8	16
3.	Diploma	1	2	3
4.	SLTA	2	1	3
5.	SLTP	0	0	0
6.	SD	1	0	1
JUMLAH		**15**	**11**	**26**

4.4.6. Permasalahan Dan Solusi

No	PERMASALAHAN
1 .	**PENGUMPULAN DATA**
	Membutuhkan tenaga yang cukup banyak sehingga perlu melibatkan sumberdaya dari tingkat kelurahan dan badan penanggulangan bencana supaya data lebih akurat
	Disetiap tahun tidak selalu ada rumah rusak bencana ataupun relokasi akibat program pemerintah kota
	Kesulitan dalam pembuatan SK walikota jika rumah rusak akibat bencana kurang daer 20 KK
2 .	**PENGHITUNGAN KEBUTUHAN**
	Membutuhkan tenaga untuk memperhitungkan tingkat kerusakan rumah akibat bencana secara keseluruhan
3 .	**PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**
	Kesulitan menentukan target kegiatan karena rumah korban bencana adalah kejadian tidak terduga sehingga target yang akan ditangani berdasarkan asumsi (kejadian tahun sebelumnya)
	Anggaran penanganan korban bencana tidak sesuai dengan yang direncanakan karena disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah sehingga penanganan rumah korban bencana selain menggunakan dana dari Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar juga menggunakan anggaran dari dana tidak terduga
4.	**PELAKSANAAN**
	Permasalahan dalam Pelaksanaan membutuhkan koordinasi dengan unit terkait lintas sektoral
5.	**LAIN - LAIN**
	Dalam Pelaporan kesulitan apabila tidak terdapat fasilitasi rumah bencana atau relokasi akibat program pemerintah kota

4.5 Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Tramtibumlinmas daerah kabupaten/kota terdiri atas:

a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
b. Pelayanan informasi rawan bencana
c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
e. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Adapun penjelasan jenis pelayanan dasar untuk SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran

4.5.2. Target Pencapaian SPM

Target pelaksanaan SPM Bidang Trantibumlinmas sesuai dengan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis

Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan pemerintah daerah

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2025
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%

4.5.3. Realisasi Pencapaian SPM 2025

Data pencapaian dan penerapan SPM disajikan berdasarkan realisasi program kegiatan sebagai berikut :

1. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM			**TUNTAS PARIPURNA**			100.00 %	
1 .	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten / Kota**					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	86	86	**0**	**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				**-20%**	**20.00 %**	
			Jumlah Mutu Yang Harus	**Jumlah Mutu Yang**	**Mutu Yang Belum**		

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Dilayani / Dipenuhi	**Terlayani / Terpenuhi**	**Terlayani / Terpenuhi**		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP **(jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)**	unit	27	27	**0**	**100.00 %**	
	2 . Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 **(SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)**	dokumen	22	22	**0**	**100.00 %**	
	Data Dukung : 3572-20250417024553SOP TIBUM.pdf Status : Approved						
	Catatan : Maximal 10 Mb						
	Catatan : Bila Dokumen Lebih dari 1 Harap Digabungkan menjadi 1 File Terlebih dahulu , Kemudian Diupload.						
	3 . Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat	orang	45	45	**0**	**100.00 %**	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** **(Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)**						
	4 . Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	dokumen	1	1	**0**	**100.00 %**	
	Data Dukung : 3572-20250421100459SK Reviu Standar Pelayanan.pdf Status : Approved						
	Catatan : Maximal 10 Mb						
	Catatan : Bila Dokumen Lebih dari 1 Harap Digabungkan menjadi 1 File Terlebih dahulu , Kemudian Diupload.						
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil **(kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)**	orang	0	0	**0**	**100.00 %**	
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan **(pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)**	orang	0	0	**0**	**100.00 %**	

Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada meliputi:

a. Pelayanan kerugian materil; dan
b. Pelayanan pengobatan.

Kerugian materiil yang dimaksud terdiri atas :

a. Rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan; dan
b. Rusak sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan/atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan.

Pelayanan pengobatan yaitu berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat.

Warga negara berhak mengajukan layanan kerugian materil dan layanan pengobatan dengan menyertakan alat bukti antara lain:

a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
b. Dokumen kepemilikan aset; dan/atau
c. Saksi disekitar lokasi penegakan Perda dan Perkada

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 yaitu Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum, periode 1 Januari s.d 31 Desember 2025 antara lain :

Dengan dokumentasi kegiatan sebagai berikut :

NO.	URAIAN KEGIATAN	TEMUAN DALAM KEGIATAN	SOLUSI TINDAK LANJUT	HASIL	DOKUMENTASI KEGIATAN
1	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban reklame	Petugas menemukan reklame yang melanggar, antara lain sudah kadaluarsa, penempatan yang salah, di pagu di pohon,dan tidak berijin	Petugas mendata reklame, mendokumentasi serta menurunkan dan di bawa ke Kantor sebagai Barang Bukti Pelanggaran	Telah terlaksanany a melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban reklame dengan lancar, Tertib dan aman	
2	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban reklame	Petugas menemukan reklame yang melanggar, antara lain sudah kadaluarsa, penempatan yang salah, di pagu di pohon,dan tidak berijin	Petugas mendata reklame, mendokumentasi serta menurunkan dan di bawa ke Kantor sebagai Barang Bukti Pelanggaran	Telah terlaksanany a melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban reklame dengan lancar, Tertib dan aman	

NO.	URAIAN KEGIATAN	TEMUAN DALAM KEGIATAN	SOLUSI TINDAK LANJUT	HASIL	DOKUMENTASI KEGIATAN
3	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban reklame	Petugas menemukan reklame yang melanggar, antara lain sudah kadaluarsa, penempatan yang salah, di pagu di pohon,dan tidak berijin	Petugas mendata reklame, mendokumentasi serta menurunkan dan di bawa ke Kantor sebagai Barang Bukti Pelanggaran	Telah terlaksanany a melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban reklame dengan lancar, Tertib dan aman	
4	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban PKL	Petugas menemukan PKL yang berjualan diarea terlarang di depan Kantor Kelurahan Sentul	Petugas memberikan Sosialisasi dan teguran lisan untuk segera bergeser	Telah terlaksanany a melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban PKL dengan lancar, Tertib dan aman	
5	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban PMKS	Petugas menemukan PMKS/Penge mis yang sedang tidur dan seorang lagi melakukan aktifitas meminta minta di jalan , setelah di ketahui petugas ternyata merekan pasutri yang sudah biasa diperingatkan	Petugas mendata, mengambil dokumentasi dan memberikan kesempatan untuk segera bergeser dari lokasi	Telah terlaksanany a melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban PMKS dengan lancar, Tertib dan aman	
6	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban reklame	Petugas menemukan reklame yang melanggar, antara lain sudah kadaluarsa, penempatan yang salah, di pagu di pohon,dan tidak berijin	Petugas mendata reklame, mendokumentasi serta menurunkan dan di bawa ke Kantor sebagai Barang Bukti Pelanggaran	Telah terlaksanany a melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban reklame dengan lancar, Tertib dan aman	
7	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban reklame	Petugas menemukan reklame yang melanggar, antara lain sudah kadaluarsa, penempatan yang salah, di pagu di pohon,dan tidak	Petugas mendata reklame, mendokumentasi serta menurunkan dan di bawa ke Kantor	Telah terlaksanany a melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban reklame dengan lancar, Tertib	

NO.	URAIAN KEGIATAN	TEMUAN DALAM KEGIATAN	SOLUSI TINDAK LANJUT	HASIL	DOKUMENTASI KEGIATAN
		berijin	sebagai Barang Bukti Pelanggaran	dan aman	
8	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban PKL	Petugas menemukan PKL yang berjualan diarea terlarang tersebut	Petugas melakukan Pendataan, dokumentasi serta memberikan Sosialisasi dan teguran lisan untuk segera bergeser	Telah terlaksanany a melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban PKL dengan lancar, Tertib dan aman	
9	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban PKL	Adanya PKL yang berjualan memakai kendaraan Roda 4 di area terlarang tersebut	Petugas melakukan Pendataan, dokumentasi serta memberikan Sosialisasi dan teguran lisan untuk segera bergeser	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban PKL dengan lancar, Tertib dan aman	
10	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban reklame	Petugas menemukan Baliho yang melanggar, antara lain sudah kadaluarsa	Petugas mendata reklame, mendokument asi serta menurunkan dan di bawa ke Kantor sebagai Barang Bukti Pelanggaran	Telah terlaksanany a melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban reklame dengan lancar, Tertib dan aman	
11	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban Peredaran Minol di Café Janimani	Petugas menemukan 3 Botol Minol yang ada di Dapur Café	Petugas mendata mendokument asi serta membawa ke Kantor sebagai Barang Bukti Pelanggaran	Telah terlaksanany a melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban Peredaran Minol di Café Janimani dengan lancar	

NO.	URAIAN KEGIATAN	TEMUAN DALAM KEGIATAN	SOLUSI TINDAK LANJUT	HASIL	DOKUMENTASI KEGIATAN
12	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban reklame	Petugas menemukan reklame yang melanggar, antara lain sudah kadaluarsa, penempatan yang salah, di pagu di pohon,dan tidak berijin	Petugas mendata reklame, mendokumentasi serta menurunkan dan di bawa ke Kantor sebagai Barang Bukti Pelanggaran	Telah terlaksanany a melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban reklame dengan lancar, Tertib dan aman	
13	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban Usaha Tempat Kos	Petugas melakukan pemeriksaan di titik sasaran Usaha Tempat Kos , namun tidak menemukan target pelanggaran penghuni Kos	Petugas mendata menintrograsi penghuni kos yang ada , mendokumentasi	Telah terlaksanany a melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban Usaha Tempat Kos dengan lancar, Tertib dan aman	
14	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban reklame	Petugas menemukan reklame yang melanggar, antara lain sudah kadaluarsa, penempatan yang salah, di pagu di pohon,dan tidak berijin	Petugas mendata reklame, mendokumentasi serta menurunkan dan di bawa ke Kantor sebagai Barang Bukti Pelanggaran	Telah terlaksanany a melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban reklame dengan lancar, Tertib dan aman	
15	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban Baliho	Adanya laporan di 112 Petugas menindaklanjut i reklame yang jatuh di kabel listrik	Petugas mendata reklame, mendokumentasi serta menurunkan dan di bawa ke Kantor sebagai Barang Bukti	Telah terlaksanany a melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban Baliho dengan lancar, Tertib dan aman	
16	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban Reklame	Petugas menindaklanjut i reklame yang melanggar	Petugas mendata reklame, mendokumentasi serta menurunkan dan di bawa ke Kantor sebagai	Telah terlaksanany a melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban Baliho dengan lancar, Tertib dan aman	

NO.	URAIAN KEGIATAN	TEMUAN DALAM KEGIATAN	SOLUSI TINDAK LANJUT	HASIL	DOKUMENTASI KEGIATAN
			Barang Bukti		
17	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban PMKS	Petugas menemukan Pengamen yang melakukan aktifitasnya	Petugas mendata serta memberikan teguran lisan untuk segera bergeser	Telah terlaksanany a melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban PMKS dengan lancar, Tertib dan aman	
18	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban PMKS	Petugas menemukan Pengamen yang melakukan aktifitasnya	Petugas mendata serta memberikan teguran lisan untuk segera bergeser	Telah terlaksanany a melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban PMKS dengan lancar, Tertib dan aman	
19	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban reklame	Petugas menemukan pelanggaran Baliho/Reklam e yang sudah kadaluarsa	Petugas mendokument asikan reklame/Balih o, mencatat dan menurunkan selanjutnya di bawa ke Mko sebagai Bahan Bukti Pelanggaran	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban reklame dengan lancar, Tertib dan aman	
20	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban reklame	Petugas menemukan pelanggaran Baliho/Reklam e yang sudah kadaluarsa	Petugas mendokument asikan reklame/Balih o, mencatat dan menurunkan selanjutnya di bawa ke Mko sebagai Bahan Bukti Pelanggaran	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban reklame dengan lancar, Tertib dan aman	
	Melakukan	Petugas menemukan	Petugas mendokument asikan, memberikan	Telah terlaksanany a Tindakan Non	

NO.	URAIAN KEGIATAN	TEMUAN DALAM KEGIATAN	SOLUSI TINDAK LANJUT	HASIL	DOKUMENTASI KEGIATAN
21	Tindakan Non Yustisi Penertiban PKL	pelanggaran PKL di area terlarang	Sosialisasi, Pendataan dan Teguran Lisan untuk berpindah tempat	Yustisi Penertiban PKL dengan lancar, Tertib dan aman	
22	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban reklame	Petugas menemukan pelanggaran Baliho/Reklam e yang sudah kadaluarsa	Petugas mendokument asikan reklame/Balih o, mencatat dan menurunkan selanjutnya di bawa ke Mko sebagai Bahan Bukti Pelanggaran	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban reklame dengan lancar, Tertib dan aman	
23	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban Tempat Usaha Kos	Saat Petugas melakukan kegiatan ada 2 Titik yang tidak ada penghuni Kos nya - Total penghuni yang melanggar bukan suami istri ada 6 pasang	- Petugas mmeminta informasi dari Penjaga serta melakukan pengeekan perijinan - Membawa pelanggar penghuni Kos ke Kantor Satpol PP untu dilakukan pembinaan	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban Tempat Usaha Kos dengan lancar, Tertib dan aman	
24	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban PMKS/Pengam en	Petugas menemukan pelanggaran PMKS/Penga men yang sedang melakukan aktifitasnya	Petugas mendata, mendokument asikan serta memberikan peringatan lisan dan menyuruh untuk segera bergeser	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban PMKS dengan lancar, Tertib dan aman	
25	Melakukan Tindakan Non Yustisi Pengembalian Barang Bukti Kartu Identitas KTP hasil dari Penertiban Tempat Usaha Kos	Petugas melakukan pengecekan ulang pada dokumen yang d bawa pelanggar	Petugas membuat Berita Acara Serah Terima Kartu Identitas KTP hasil dari Penertiban Tempat Usaha Kos	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Pengembalia n Barang Bukti Kartu Identitas KTP hasil dari Penertiban Tempat Usaha Kos dengan lancar, Tertib dan aman	

NO.	URAIAN KEGIATAN	TEMUAN DALAM KEGIATAN	SOLUSI TINDAK LANJUT	HASIL	DOKUMENTASI KEGIATAN
26	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban PMKS	Petugas menemukan pelanggaran PMKS/Penga men yang sedang melakukan aktifitasnya	Petugas mendata, mendokument asikan serta memberikan peringatan lisan dan menyuruh untuk segera bergeser	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban PMKS dengan lancar, Tertib dan aman	
27	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban PMKS/Pengemi s	Petugas menemukan pelanggaran PMKS/Penge mis yang sedang melakukan aktifitasnya di peremptatan Kelurahan Tlumpu dengan memakai Pakaian Boneka	Petugas mendata, mendokument asikan serta memberikan Peringatan lisan dan menyuruh untuk segera bergeser	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban PMKS/ Pengemis dengan lancar, Tertib dan aman	
28	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban Reklame	Petugas menemukan pelanggaran reklame yang sudah kadaluarsa, salah tempat dan tidak ada ijin	Petugas mendata, mendokument asikan serta menurunkan dan membawa ke Mako Satpol PP sebagai Barang Bukti	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban reklame dengan lancar, Tertib dan aman	
29	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban PMKS/Pengemi s	Petugas menemukan pelanggaran PMKS/Penge mis yang sedang melakukan aktifitasnya	Petugas mendata, mendokument asikan serta memberikan Peringatan lisan dan menyuruh untuk segera bergeser	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban PMKS/ Pengemis dengan lancar, Tertib dan aman	
30	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban Reklame	Petugas menemukan pelanggaran reklame yang sudah kadaluarsa, salah tempat dan tidak ada ijin	Petugas mendata, mendokument asikan serta menurunkan dan membawa ke Mako Satpol PP sebagai Barang Bukti	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban reklame dengan lancar, Tertib dan aman	
		Petugas			

NO.	URAIAN KEGIATAN	TEMUAN DALAM KEGIATAN	SOLUSI TINDAK LANJUT	HASIL	DOKUMENTASI KEGIATAN
31	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban PKL	menemukan pelanggaran PKL Depan Museum PETA Kota Blitar akan adanya kegiatan Pelaksanaan Drama Kolosal Cinta Tanah Air	Petugas mendokumentasikan, serta membantu mengeser lapak para PK	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban PKL dengan lancar, Tertib dan aman	
32	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban reklame	Petugas menemukan pelanggaran Baliho/Reklam e yang sudah kadaluarsa	Petugas mendokumentasikan reklame/Baliho, mencatat dan menurunkan selanjutnya di bawa ke Mko sebagai Bahan Bukti Pelanggaran	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban reklame dengan lancar, Tertib dan aman	
33	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban PKL	Petugas menemukan pelanggaran PKL Depan Museum PETA Kota Blitar	Petugas mendokumentasikan, serta membantu mengeser lapak para PKL	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban PKL dengan lancar, Tertib dan aman	
34	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban PKL	Petugas menemukan pelanggaran PKL yang masih belum merubah posisi lapak yang menggunakan bahu jalan	Petugas mendokumentasikan, serta memberikan pemahaman dan teguran lisan	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban PKL dengan lancar, Tertib dan aman	
35	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban PMKS	Petugas menemukan Pengamen dan pengenmis yang sedang melakukan aktifitas	Petugas mendokumentasikan, serta memberikan pemahaman dan teguran lisan	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban PMKS dengan lancar, Tertib dan aman	
36	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban PMKS	Petugas menemukan Pengamen, pengemis dan anak punk yang sedang melakukan aktifitas	Petugas mendokumentasikan, serta memberikan pemahaman dan teguran lisan	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban PMKS dengan lancar, Tertib dan aman	

NO.	URAIAN KEGIATAN	TEMUAN DALAM KEGIATAN	SOLUSI TINDAK LANJUT	HASIL	DOKUMENTASI KEGIATAN
37	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban PMKS	Petugas menemukan pengemis yang mengenakan pakain boneka sedang melakukan aktifitas di perempatan kejaksaan	Petugas mendokument asikan, mendata dan serta memberikan pemahaman dan teguran lisan	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban PMKS dengan lancar, Tertib dan aman	
38	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban Usaha Tempat Kos dalam rangka Cipta kondisi persiapan Bulan Ramadhan Tahun 2025	Petugas menemukan	Petugas mendokument asikan, mendata dan serta memberikan sanksi administrasi penahanan KTP	Telah terlaksanany a melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban Usaha Tempat Kos dalam rangka Cipta kondisi persiapan Bulan Ramadhan Tahun 2025dengan lancar, Tertib dan aman	
39	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban reklame	Petugas menemukan pelanggaran Reklame yang sudah kadaluarsa	Petugas mendokument asikan reklame, mencatat dan menurunkan selanjutnya di bawa ke Mko sebagai Bahan Bukti Pelanggaran	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban reklame dengan lancar, Tertib dan aman	
40	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban PMKS	Petugas menemukan pengamen sedang melakukan aktifitas di perempatan dan titik titik rawan	Petugas mendokument asikan, mendata dan serta memberikan pemahaman dan teguran lisan	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban PMKS dengan lancar, Tertib dan aman	
41	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban reklame	Petugas menemukan pelanggaran Reklame yang sudah kadaluarsa	Petugas menemukan pelanggaran Reklame yang sudah kadaluarsa	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban reklame dengan lancar, Tertib dan aman	
42	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban PMKS/Pengemi s	Petugas menemukan pelanggaran PMKS/Penge mis yang sedang melakukan	Petugas mendata, mendokument asikan serta memberikan peringatan lisan dan	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban PMKS	

NO.	URAIAN KEGIATAN	TEMUAN DALAM KEGIATAN	SOLUSI TINDAK LANJUT	HASIL	DOKUMENTASI KEGIATAN
		aktifitasnya	menyuruh untuk segera bergeser	dengan lancar, Tertib dan aman	
43	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban reklame	Petugas menemukan pelanggaran Baliho/Reklam e yang sudah kadaluarsa	Petugas mendokument asikan reklame/Balih o, mencatat dan menurunkan selanjutnya di bawa ke Mko sebagai Bahan Bukti Pelanggaran	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban reklame dengan lancar, Tertib dan aman	
44	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban PMKS/Pengemi s	Petugas menemukan pelanggaran PMKS/Penge mis yang sedang melakukan aktifitasnya	Petugas mendata, mendokument asikan serta memberikan peringatan lisan dan menyuruh untuk segera bergeser	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban PMKS dengan lancar, Tertib dan aman	
45	Melakukan Tindakan Non Yustisi Berita Acara pengambilan Barang Bukti Identitas kependudukan oleh pelanggar hasil Penegakan Perda/Perkada Penertiban Usaha Tempat Rumah Kos	Pelanggar telah membawa persyaratan / Surat Pengantar dari Kelurahan/ Desa Domisili	Petugas membuat Berita Acara pengambilan Barang Bukti Identitas kependuduka n oleh pelanggar hasil Penegakan Perda/Perkad a Penertiban Usaha tempat Rumah Kos	Telah terlaksanany a melakukan Tindakan Non Yustisi Berita Acara pengambilan Barang Bukti Identitas kependuduka n oleh pelanggar hasil Penegakan Perda/Perkad a Penertiban Usaha tempat Rumah Kosdengan lancar, Tertib dan aman	
46	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban reklame	Petugas menemukan pelanggaran Baliho/Reklam e yang melintang	Petugas mendokument asikan reklame/Balih o, mencatat dan menurunkan selanjutnya di bawa ke Mko	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban reklame dengan lancar, Tertib	

NO.	URAIAN KEGIATAN	TEMUAN DALAM KEGIATAN	SOLUSI TINDAK LANJUT	HASIL	DOKUMENTASI KEGIATAN
			sebagai Bahan Bukti Pelanggaran	dan aman	
47	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban reklame	Petugas menemukan pelanggaran Baliho/Reklam e yang sudah kadaluarsa	Petugas mendokument asikan reklame/Balih o, mencatat dan menurunkan selanjutnya di bawa ke Mko sebagai Bahan Bukti Pelanggaran	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban reklame dengan lancar, Tertib dan aman	
48	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban PKL	Adanya PKL yang mangkal	Petugas mendata, mendokument asikan serta memberikan peringatan lisan dan menyuruh untuk segera bergeser	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban PKL dengan lancar, Tertib dan aman	
49	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban PKL	Adanya Pelanggaran PKL di Jalan Kalibrantas	Petugas memberikan Sosialisasi dan Teguran lisan pada PKL serta Surat Pernyataan untuk berpindah dengan batas waktu maksimal 7 hari	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban PKL dengan lancar, aman dan terkendali	
50	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban PKL	Adanya Pelanggaran PKL di Jalan Diponegoro	Petugas memberikan Sosialisasi dan Teguran lisan pada PKL serta Surat Pernyataan untuk berpindah dengan batas waktu maksimal 7 hari	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban PKL dengan lancar, aman dan terkendali	
51	Melakukan Tindakan Non	Adanya Pelanggaran Reklame yang	Petugas mendokument asikan, menurunkan dan	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban	

NO.	URAIAN KEGIATAN	TEMUAN DALAM KEGIATAN	SOLUSI TINDAK LANJUT	HASIL	DOKUMENTASI KEGIATAN
	Yustisi Penertiban Reklame	salah tempat, tanpa ijin maupun kadaluarsa	menyimpan reklame yang melanggar sebagai Barang Bukti	Reklame dengan lancar, aman dan terkendali	
52	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban Reklame	Adanya Pelanggaran Reklame yang salah tempat, tanpa ijin maupun kadaluarsa	Petugas mendokumentasikan, menurunkan dan menyimpan reklame yang melanggar sebagai Barang Bukti	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban Reklame dengan lancar, aman dan terkendali	
53	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban PMKS	Adanya Pelanggaran PMKS yang sedang beraktifitas meminta	Petugas memberikan Teguran lisan pada PMKS untuk segera bergeser	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban PMKS dengan lancar, aman dan terkendali	
54	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban PKL	Adanya PKL yang berjualan di zona dilarang	Petugas memberikan arahan untuk berpindah mencari lokasi yang diperbolehkan	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban PKL dengan lancar, aman dan terkendali	
55	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban Reklame	Adanya Pelanggaran Reklame yang salah tempat, tanpa ijin maupun kadaluarsa	Petugas mendokumentasikan, menurunkan dan menyimpan reklame yang melanggar sebagai Barang Bukti	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban Reklame dengan lancar, aman dan terkendali	

NO.	URAIAN KEGIATAN	TEMUAN DALAM KEGIATAN	SOLUSI TINDAK LANJUT	HASIL	DOKUMENTASI KEGIATAN
56	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban Reklame	Adanya Pelanggaran Reklame yang salah tempat, tanpa ijin maupun kadaluarsa	Petugas mendokument asikan, menurunkan dan menyimpan reklame yang melanggar sebagai Barang Bukti	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban Reklame dengan lancar, aman dan terkendali	
57	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban PMKS	Adanya Pelanggaran PMKS yang sedang beraktifitas meminta	Petugas mendata dan memberikan Teguran lisan pada PMKS untuk segera bergeser	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban PMKS dengan lancar, aman dan terkendali	
58	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban Reklame	Adanya Pelanggaran Reklame yang salah tempat, tanpa ijin maupun kadaluarsa	Petugas mendokument asikan, menurunkan dan menyimpan reklame yang melanggar sebagai Barang Bukti	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban Reklame dengan lancar, aman dan terkendali	
59	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban PMKS	Adanya Pelanggaran PMKS yang sedang beraktifitas meminta	Petugas mendata dan memberikan Teguran lisan pada PMKS untuk segera bergeser	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban PMKS dengan lancar, aman dan terkendali	
60	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban Reklame	Adanya Pelanggaran Reklame yang salah tempat, tanpa ijin maupun kadaluarsa	Petugas mendokument asikan, menurunkan dan menyimpan reklame yang melanggar sebagai Barang Bukti	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban Reklame dengan lancar, aman dan terkendali	
61	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban	Adanya Pelanggaran PMKS yang sedang beraktifitas mengamen,	Petugas mendata dan memberikan Teguran lisan pada	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban Pengamen	

NO.	URAIAN KEGIATAN	TEMUAN DALAM KEGIATAN	SOLUSI TINDAK LANJUT	HASIL	DOKUMENTASI KEGIATAN
	Pengamen	Manusi Badut, manusia Silver	Pengamen untuk segera bergeser	dengan lancar, aman dan terkendali	
62	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban Pengamen	Adanya Pelanggaran PMKS yang sedang beraktifitas mengamen	Petugas mendata dan memberikan Teguran lisan pada Pengamen untuk segera bergeser	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban Pengamen dengan lancar, aman dan terkendali	
63	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban Pengamen	Adanya Pelanggaran PMKS yang sedang beraktifitas mengamen	Petugas mendata dan memberikan Teguran lisan pada Pengamen untuk segera bergeser	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban Pengamen dengan lancar, aman dan terkendali	
64	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penyegelan Papan Baliho tidak berijin	Adanya Pelanggaran Pembangunan/ Pemasangan papan reklame yang tidak mempunyai izin	Satpol PP bersama DPMPTSP melakukan Penertiban Papan Baliho dengan memasangan Segel "Dilarang memasang iklan" selama proses perijinan belum selesai	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penyegelan Papan Baliho tanpa ijin dengan lancar, aman dan terkendali	
65	Melakukan Tindakan Non Yustisi Gabungan Penertiban reklame	Masih banyaknya reklame yang belum beriji, salah tempat dan ijin sudah kadaluarsa	Petugas mendokument asikan, mendata, menurunkan dan membawa ke Kantor sebagai Brang Bukti	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Gabungan Penertiban reklame dengan lancar, aman dan terkendali	
66			Petugas mendokument asikan, mendata , pembinaan	Telah terlaksanany a	

NO.	URAIAN KEGIATAN	TEMUAN DALAM KEGIATAN	SOLUSI TINDAK LANJUT	HASIL	DOKUMENTASI KEGIATAN
	Melakukan Tindakan Non Yustisi Gabungan Penertiban Usaha Tempat Kos dan Penghuni Kos	Disinyalir banyaknya Usaha Tempat Kos yang belum berijin dan Penghuni Kos yang bukan suami istri	serta menahan Barang Bukti Karti Identitas (KTP/SIM) dan dapat diambil dengan membawa Surat Keterangan dari Desa/Kelurah an sesuai di Kartu Identitas	Tindakan Non Yustisi Gabungan Penertiban Usaha Tempat Kos dan Penghuni Kos dengan lancar, aman dan terkendali	
67	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban Pengamen	Adanya Pelanggaran Pengamen yang sedang beraktifitas mengamen	Petugas mendata dan memberikan Teguran lisan pada Pengamen untuk segera bergeser	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban Pengamen dengan lancar, aman dan terkendali	
68	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban Reklame	Adanya Pelanggaran Reklame yang salah tempat, tanpa ijin maupun kadaluarsa	Petugas mendokument asikan, menurunkan dan menyimpan reklame yang melanggar sebagai Barang Bukti	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban Reklame dengan lancar, aman dan terkendali	
69	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban Pengamen	Adanya Pelanggaran Pengamen yang sedang beraktifitas mengamen	Petugas mendata dan memberikan Teguran lisan pada Pengamen untuk segera bergeser	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban Pengamen dengan lancar, aman dan terkendali	
70	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban Reklame	Adanya Pelanggaran Reklame yang salah tempat, tanpa ijin maupun kadaluarsa	Petugas mendokument asikan, menurunkan dan menyimpan reklame yang melanggar sebagai Barang Bukti	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban Reklame dengan lancar, aman dan terkendali	
71	Melakukan	Adanya Pelanggaran	Petugas mendokument asikan, menurunkan	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi	

NO.	URAIAN KEGIATAN	TEMUAN DALAM KEGIATAN	SOLUSI TINDAK LANJUT	HASIL	DOKUMENTASI KEGIATAN
	Tindakan Non Yustisi Penertiban Reklame	Reklame yang salah tempat, tanpa ijin maupun kadaluarsa	dan menyimpan reklame yang melanggar sebagai Barang Bukti	Penertiban Reklame dengan lancar, aman dan terkendali	
72	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban PKL	Adanya PKL yang berjualan di depan trotoar Kanto Satpol PP	Petugas meminta pedagang untukbergeser dengan membantu memindahkan lapak/ rombon g	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban PKL dengan lancar, aman dan terkendali	
73	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban Pengamen	Adanya Pengamen yang melakukan aktifitas	Petugas meminta untuk segera bergeser dan memberikan edukasi ketaatan hukum	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban Pengamen dengan lancar, aman dan terkendali	
74	Melakukan Tindakan Non Yustisi Pemberian Surat Peringatan kepada PT. Eka Mas Republik Pemilik Kabel Jaringan Fiber Optik My Republik yang belum berijin	Adanya pelanggaran yang dilakukan PT. Eka Mas Republik berdasarkan hasil rakor Tim Teknis Kota Blita	PPNS memberikan Surat Peringatan yang terjadwalmulai SP I, SP II, SP III hingga penyegelan	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Pemberian Surat Peringatan kepada PT. Eka Mas Republik Pemilik Kabel Jaringan Fiber Optik My Republik yang belum berijin dengan lancar, aman dan terkendali	
75	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penyegelan kepada PT. Eka Mas Republik Pemilik Kabel Jaringan Fiber Optik My Republik yang belum berijin	Adanya pelanggaran yang dilakukan PT. Eka Mas Republik berdasarkan hasil rakor Tim Teknis Kota Blitar	Penyegelan di lakukan dengan simbolis dari Walikota Blitar di Wilayah Kecamatan Kepanjenkidul di Jalan Wahidin (utara Mal Pelayanan Publik)	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penyegelan kepada PT. Eka Mas Republik Pemilik Kabel Jaringan Fiber Optik My Republik yang belum berijin	

NO.	URAIAN KEGIATAN	TEMUAN DALAM KEGIATAN	SOLUSI TINDAK LANJUT	HASIL	DOKUMENTASI KEGIATAN
				dengan lancar, aman dan terkendal	
76	Melakukan Tindakan Non Yustisi Operasi Barang Kena Cukai Ilegal	Adanya Target yang sudah di datangi 2x Petugas belum bisa menemukan Barang Bukti	Petugas meminta kepada pemilik untuk berterus terang dan di berkan resiko sanksi akhirnya mau menunjukan tempat penyimpanan	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Operasi Barang Kena Cukai Ilegal dengan jumlah 6. 164 Batang dari 4 TKP dengan lancar, aman dan terkendali	
77	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban Perijinan Usaha Kos/Penginapan /Hotel	Pemilik Usaha banyak yang belum berijin dan saat petugas di TKP penjaga tidak bisa menunjukkan dokumen perijinannya	Petugas meminta no HP Pemilik untuk konfirmasi selanjutnya	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban Perijinan Usaha Kos/Pengina pan/Hotel dengan lancar, aman dan terkendali	
78	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban Peredaran Miniman Berakohol	Petugas menemukan Minuman jenis arak total 357 Botol aqua (600ml)	Petugas melakukan Penahanan Barang Bukti dan di limpahkan ke Polresta Blitar Kota	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban Tindakan Non Yustisi Penertiban Minuman Berakohol dengan lancar, aman dan terkendali Polresta Blitar Kota	
79	Melakukan Tindakan Non Yustisi Operasi	TKP 1 : Jalan Kampar Gang 2 Kel. Tanjungsari Red blu isi 20 = 4 pak dan Red New isi 20 = 20 Pak	1. PPNS Satpol PP menyerahkan Barang Bukti Temuan kepada Petugas Bea cukai Blitar 2. Petugas gabungan memberikan Sosialisasi Sanksi dari Pelanggaran	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Operasi Barang Kena Cukai Ilegal	

NO.	URAIAN KEGIATAN	TEMUAN DALAM KEGIATAN	SOLUSI TINDAK LANJUT	HASIL	DOKUMENTASI KEGIATAN
	Barang Kena Cukai Ilegal	TKP 2 : Jalan Brigjen Katamso Kel. Gedog Alphard isi 20 = 1 Pak	peredaran Rokok ilegal 3. Petugas dari Bea cukai menempelkan stiker himbauan larangan peredaran rokok ilegal 4. Pelanggar yang masih pertama terkena operasi di berikan Surat Pernyataan tidak berjualan lagi dan Peringatan	dengan lancar, aman dan terkendali	
80	Melakukan Tindakan Non Yustisi Operasi Barang Kena Cukai Ilegal	TKP 1 : Jalan Halir Kelurahan Bendogerit Anggur 4 Botol (620 ml) dan Arak Karangasem 2 Botol (600 ml) TKP 2 : Jalan Selayar Kel. Karangtengah = Nihil	1. PPNS Satpol PP menyerahkan Barang Bukti Temuan kepada Petugas Bea cukai Blitar 2. Petugas gabungan memberikan Sosialisasi Sanksi dari Pelanggara n peredaran Rokok ilegal 3. Petugas dari Bea cukai menempelkan stiker himbauan larangan peredaran rokok ilegal 4. Pelangg ar yang masih pertama terkena operasi di berikan Surat Pernyataan tidak berjualan lagi dan Peringatan	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Operasi Barang Kena Cukai Ilegal dengan lancar, aman dan terkendali	
	Melakukan	Adanya reklame yang sudah	Petugas mendata, menurunkan dan	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi	

NO.	URAIAN KEGIATAN	TEMUAN DALAM KEGIATAN	SOLUSI TINDAK LANJUT	HASIL	DOKUMENTASI KEGIATAN
81	Tindakan Non Yustisi Penertiban Reklame	kadaluarsa, Salah tempat maupun belum berijin	mendokumen t asi serta membawa ke Kantor sebagai Barang Bukti pelanggaran	Penertiban reklame dengan lancar, aman dan terkendali	
82	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban PKL	Adanya pengaduan masyarakat Pedagang Buah yang menggunakan Fasum Trotoar untuk berjualan dengan menggunakan meja dan Tenda	Petugas memberikan Sosialisasi tata tertib berjualan dan menyarankan untuk segera memindah dengan batas dalam trotoar	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban PKL dengan lancar, aman dan terkendali	
83	Tindakan Non Yustisi Cipta Kondisi Masyarakat Terkait Pelanggaran Perda dan Perkada	Dari 9 Ttitik target mendapatkan 1 pasangan bukan suami istri di rumah kontrak jalan Kedondong dan Pemilik kontrakan menyimpan arak tutup merh sebanyak 120 Botol aqua ukuran 620 ml	Petugas melakukan Penindakan dengan menahan Identitas KTP dan KK pasangan bukan pasutri tersebut dan dapat diambil dengan memnbawa Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurah an sesuai Identitas	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Cipta Kondisi Masyarakat Terkait Pelanggaran Perda dan Perkada dengan lancar, aman dan terkendali	
84	Tindakan Non Yustisi Penertiban PMKS	Adanya temuan PMKS yang melakukan aktifitas di jalan dan tidak jelas dalam aktifitasnya	Petugas mendata, mendokumen t asi dan menghimbau untuk segera bergeser dan tidak melakukan aksi meminta di jalan	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi penertiban PMKS dengan lancar, aman dan terkendali	
				Telah terlaksanany a	

NO.	URAIAN KEGIATAN	TEMUAN DALAM KEGIATAN	SOLUSI TINDAK LANJUT	HASIL	DOKUMENTASI KEGIATAN
85	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban PKL dalam rangka persiapan Pelaksanaan CFD	Masih banyakanya PKL yang belum persiapan menutup lapaknya	Petugas menghimbau untuk segera berkemas barang daganganya	Tindakan Non Yustisi Penertiban PKL dalam rangka persiapan Pelaksanaan CFD dengan lancar, aman dan terkendali	
86	Melakukan Tindakan Non Yustisi Penertiban Reklame	Adanya reklame yang sudah kadaluarsa, Salah tempat maupun belum berijin	Petugas mendata, menurunkan dan mendokumen t asi serta membawa ke Kantor sebagai Barang Bukti pelanggaran	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi Penertiban reklame dengan lancar, aman dan terkendali	
86.	Tindakan Non Yustisi Penertiban ODGJ	Adanya temuan ODGJ yang beraad di jalan area taman pecut	Petugas mendokumen t asi berkoordinasi bersama Dinsos dan mengantarkan ke Shelter	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi penertiban ODGJ dengan lancar, aman dan terkendali	
87.	Tindakan Non Yustisi Penertiban Pengamen	Adanya temuan pengamen yang melakukan aktifitas di jalan	Petugas mendata, mendokumen t asi dan menghimbau untuk segera bergeser dan tidak melakukan aksi meminta di jalan	Telah terlaksanany a Tindakan Non Yustisi penertiban Pengamen dengan lancar, aman dan terkendali	

2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN			TUNTAS PARIPURNA			100.00 %	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
1 .	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana**					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	950	950	**0**	**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				**-20%**	**20.00 %**	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Penyusunan Kajian Risiko Bencana		0	0	**0**	**100.00 %**	
	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1	1	**0**	**100.00 %**	
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	dokumen	2	2	**0**	**100.00 %**	
	c. Tersedianya Berita Acara Asistensi yang ditandatangani BNPB (minimal 3)	orang	0.1	0.1	**0**	**100.00 %**	
	d. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusunan KRB (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	4	**-2**	**100.00 %**	
	e. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	**0**	**100.00 %**	
	2 . Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana		0	0	**0**	**100.00 %**	
	1) . Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana ***Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu**					**100.00 %**	
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk	eksemplar	35	35	**0**	**100.00 %**	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)						
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa	13	13	**0**	**100.00 %**	
	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	orang	4	4	**0**	**100.00 %**	
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	**0**	**100.00 %**	
	2) . Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia ***Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu**					**100.00 %**	
	a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	media	5	5	**0**	**100.00 %**	
	b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	buah	90	92	**-2**	**100.00 %**	
	c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	unit	8	8	**0**	**100.00 %**	
	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3	3	**0**	**100.00 %**	
	e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3	3	**0**	**100.00 %**	
	3) . Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik ***Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu**					**100.00 %**	
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	buah	308	308	**0**	**100.00 %**	
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	buah	0.1	0.1	**0**	**100.00 %**	
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0.1	0.1	**0**	**100.00 %**	
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0.1	0.1	**0**	**100.00 %**	
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya	orang	0.1	0.1	**0**	**100.00 %**	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	(sesuai dengan kebutuhan)						

Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Cakupan kawasan rawan bencana adalah wilayah kabupaten/kota.

Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Pelayanan informasi rawan bencana dibagi per jenis ancaman bencana, terutama bencana alam dan non alam.

Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Sosialisasi Kesiapsiagaan dalam Bencana di Ruang Rapat BPBD. Pelaksanaan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) oleh BPBD bersama dengan unsur terkait kebencanaan.
   Adapun Dokumentasi kegiatan sebagai berikut:

Gambar 4.5.1. Sosialisasi dan Simulasi Gempa Dalam Rangka Hari Pramuka di SMAN 3 Blitar

2. Rapat Koordinasi Pengurangan Risiko Bencana Hidrometeorologi di Masing-Masing Wilayah Keltana dan FPRB.

   Adapun Dokumentasi kegiatan sebagai berikut:

Gambar 4.5.2. Rapat Koordinasi Pengurangan Risiko Bencana Hidrometeorologi di Masing-Masing Wilayah Keltana dan FPRB bertempat di Aula Polkesma

Pembinaan, Pendampinganm Monitoring dan Evaluasi Keltana (Kelurahan Tangguh Bencana).

Adapun Dokumentasi kegiatan sebagai berikut:

Gambar 4.5.3. Pembinaan, Pendampinganm Monitoring dan Evaluasi Keltana (Kelurahan Tangguh Bencana) Pakunden

Gambar 4.5.4. Musyawarah Masyarakat Kelurahan Karangsari Kota Blitar

Gambar 4.5.5. Musyawarah Masyarakat Kelurahan Tlumpu Kota Blitar

Gambar 4.5.6. Pembinaan, Pendampingan Monitoring dan Evaluasi Keltana (Kelurahan Tangguh Bencana) Bendogerit

Gambar 4.5.7. Pembinaan, Pendampingan Monitoring dan Evaluasi Keltana (Kelurahan Tangguh Bencana) Sukorejo

3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
2 .	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	950	950	**0**	**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				**-20%**	**20.00 %**	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana		0	0	**0**	**100.00 %**	
	a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkada	dokumen	1	1	**0**	**100.00 %**	
	b. Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada	dokumen	1	1	**0**	**100.00 %**	
	2 . Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)		0	0	**0**	**100.00 %**	
	3 . Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi		0	0	**0**	**100.00 %**	
	1) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur ***Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu**					**100.00 %**	
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	**0**	**100.00 %**	
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	**0**	**100.00 %**	
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	1	1	**0**	**100.00 %**	
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang	paket	1	1	**0**	**100.00 %**	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)						
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	**0**	**100.00 %**	
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	**0**	**100.00 %**	
	2) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara ***Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu**					**100.00 %**	
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0.1	0.1	**0**	**100.00 %**	
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	**0**	**100.00 %**	
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	0.1	0.1	**0**	**100.00 %**	
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	2	**0**	**100.00 %**	
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	**0**	**100.00 %**	
	4 . Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	**0**	**100.00 %**	
	1) . Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise) ***Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu**					**100.00 %**	
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	**0**	**100.00 %**	
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	**0**	**100.00 %**	
	c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	**0**	**100.00 %**	
	2) . Gladi Lapang ***Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu**					**100.00 %**	
	a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	**0**	**100.00 %**	
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	**0**	**100.00 %**	
	c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	**0**	**100.00 %**	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	5 . Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaaan terhadap Bencana		0	0	**0**	**100.00 %**	
	1) . Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana ***Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu**					**100.00 %**	
	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	hari	365	365	**0**	**100.00 %**	
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	pertemuan	4	4	**0**	**100.00 %**	
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	orang	1	1	**0**	**100.00 %**	
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	**0**	**100.00 %**	
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	12	12	**0**	**100.00 %**	
	2) . Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana ***Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu**					**100.00 %**	
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	**0**	**100.00 %**	
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	**0**	**100.00 %**	
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	unit	0.1	0.1	**0**	**100.00 %**	
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	**0**	**100.00 %**	
	3) . Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast ***Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu**					**100.00 %**	
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	**0**	**100.00 %**	
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	**0**	**100.00 %**	
	4) . Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat ***Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu**					**100.00 %**	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	paket	20	20	**0**	**100.00 %**	
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	**0**	**100.00 %**	
	6 . Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	**0**	**100.00 %**	
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	9	9	**0**	**100.00 %**	
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	paket	40	40	**0**	**100.00 %**	
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0.1	0.1	**0**	**100.00 %**	
	e. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	unit	25	25	**0**	**100.00 %**	

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan Warga Negara dalam menghadapi bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis ancaman bencana yang dirincikan antara lain: Erupsi Gunung, Gempa bumi, Banjir Lahar, Cuaca Ekstrim (Hidrometeorologi), Kebakaran Pemukiman dan Epidemi/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas yaitu PMK. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah serangkaian kegiatan pra-bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Pelayanan di bidang ini tetap dibagi atau disesuaikan dengan jenis bencana yang ada.

Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah sebagai berikut :

Gambar 4.5.8. Pelatihan Penanganan Dasar Bencana di Kelurahan di wilayah Kota Blitar

Gambar 4.5.9. Gladi Kesiapsiagaan Hidrometeorologi

4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
3 .	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**					100.00 %	
Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)							
Download SK Yang Telah Di Upload **3572-202509121109562. keputusan walikota blitar nomor 234 tahun 2025 September.pdf**							
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**		

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	50	351	**-301**	**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				**-20%**	**20.00 %**	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Respon Cepat Darurat Bencana		0	0	**0**	**100.00 %**	
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen	1	1	**0**	**100.00 %**	
	b. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	orang	27	27	**0**	**100.00 %**	
	2 . Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana		0	0	**0**	**100.00 %**	
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	**0**	**100.00 %**	
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	25	25	**0**	**100.00 %**	
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	20	20	**0**	**100.00 %**	
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	**0**	**100.00 %**	
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban	dokumen	1	1	**0**	**100.00 %**	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	(sesuai dengan kebutuhan)						
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	13	13	**0**	**100.00 %**	
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	**0**	**100.00 %**	
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	orang	12	12	**0**	**100.00 %**	

Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah sebagai berikut :

Penanganan Bencana di Wilayah Kota Blitar pada tahun 2024. Penanganan Bencana meliputi:

1. Angin Kencang
2. Banjir
3. Kebakaran
4. Kekeringan
5. Talud Ambrol
6. Pohon Tumbang : Kel Bendogerit, Kel Sananwetan, Kel Karangtengah, Kec Sananwetan
7. Dahan Patah : Kel Bendogerit, Kel Sananwetan, Kec Sananwetan, Pasar Hewan Dimoro
8. Tanah Ambles
9. Saluran Irigasi Ambrol : Kel Karangtengah Kec Sananwetan
10. Kebakaran Rumah Huni
11. Laka Sumur
12. Kebakaran Gudang Engine Diesel Air
13. Kebakaran Pabrik Bubut

Adapun Dokumentasi kegiatan sebagai berikut :

Gambar 4.5.10. Penanganan kekeringan

Gambar 4.5.11. Penanganan Bencana Angin

Gambar 4.5.12. Kebakaran Gedung dan Permukiman

Gambar 4.5.13. Cuaca Ekstrim

Gambar 4.5.14. Gempa Bumi

5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Hasil capaian SPM DAMKAR sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR			**TUNTAS PARIPURNA**			100.00 %	
1 .	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)**					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	20	20	**0**	**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				**-20%**	**20.00 %**	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	layanan	20	20	**0**	**100.00 %**	
	2 . Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	dokumen	7	7	**0**	**100.00 %**	
	Data Dukung : 3572-20250421100721SOP DAMKAR.pdf Status : Approved						
	Catatan : Maximal 10 Mb						
	Catatan : Bila Dokumen Lebih dari 1 Harap Digabungkan menjadi 1 File Terlebih dahulu , Kemudian Diupload.						
	3 . Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	unit	11	11	**0**	**100.00 %**	
	4 . Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	Orang	12	12	**0**	**100.00 %**	
	5 . Pemenuhan pelayanan	Orang	20	20	**0**	**100.00 %**	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran						
	6 . Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Orang	20	20	**0**	**100.00 %**	

Capaian Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Dinas / Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah adalah 100% (seratus persen) hadir memberikan layanan pada setiap kejadian kebakaran bagi seluruh warga negara.

Secara operasional, waktu tanggap pemenuhan layanan pemadaman serta penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran merupakan nilai rata-rata capaian waktu tanggap sejak mulai diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap melakukan operasional pemadaman yang dilakukan oleh Unit Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ataupun oleh relawan kebakaran atau komunitas masyarakat lainnya yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Pemerintah Daerah secara formal.

Pembentukan dan/atau pembinaan relawan kebakaran merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat oleh perangkat daerah pengampu Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan sub urusan kebakaran.

Pemberdayaan masyarakat ini penting mengingat kondisi geografis dan persebaran permukiman dan penduduk pada daerah-daerah di Indonesia serta sebagai salah satu upaya menutup keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan sub urusan kebakaran.

Perencanaan dan penganggaran guna pemenuhan pelayanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (pencapaian target SPM Sub Urusan Kebakaran) wajib dimuat dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah, dokumen

perencanaan perangkat daerah, dan dokumen anggaran pemerintah daerah setiap tahunnya.

Adapun kegiatan yang mendukung pemenuhan indicator in dilakukan kegiatan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran periode 1 Januari -31 Desember 2025 sebagai berikut :

NO	NAMA KORBAN KEBAKARAN	ALAMAT	TANGGAL KEJADIAN	JENIS KEJADIAN	DOKUMENTASI
1	SOEYONO	Jl. Kenari No : 77 KEL.Plosokerep KEC Sananwetan KOTA BLITAR	5 Februari 2025	Kebakaran Gudang Rumah di atas lantai dua	
2	Siswo Hadi Murdoko	jalan flores no. 18 rt.002 rw. 008 kel. klampok kec. sananwetan kota blitar	senin, 17 februari 2025	kebakaran rumah	
3	Muhamad Reza Anggara	jalan kelud kampung maduran No. 14 RT.003 RW. 003 kel. Kepanjen lor kec. Kepanjen kidul kota blitar	Selasa, 25 Februari 2025	kebakaran rumah	
4	Bapak Guruh	Lampu PJU, Jl. Panglima Sudirman	Selasa, 4 Maret 2025	Kebakaran Lampu PJU	
5	Mamik Kristiani	Jl. Imam Bonjol Kel. Sananwetan kec. Sananwetan	Rabu, 9 April 2025	Pemadaman Kebakaran Mobil	
6	Bapak Deva	Jl. Kerantil No. 29, Kel. Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kota Blitar	Kamis, 15 Mei 2025	Kebakaran Meteran Listrik	
7	RINI SULISTYIANINGSIH	jl Gunojoyo Timur no. 55 RT.02 RW.08 Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.	Senin, 19 Mei 2025	Ruang keluarga	

NO	NAMA KORBAN KEBAKARAN	ALAMAT	TANGGAL KEJADIAN	JENIS KEJADIAN	DOKUMENTASI
8	Sulih Kariyanto	Jl. Kedondong No. 08, gang 1N Rt 001 Rw 001 Kel. Karangsari,	Minggu , 22-06-2025	Kebakaran Rumah	
9	Soehendro	Jl. Trowulan Rt 03 Rw 06 Kel.Sentul Kec.Kepanjenkidul, Kota Blitar.	Minggu , 29-06-2025	Dapur Rumah	
10	CRISTINE RUSTANTY	PERUM GKR Blok S no. 8 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.	Senin tanggal 16 Juli 2025	Kebakaran Mobil	
11	Bapak Petrus	Makam Tionghoa "Mbamban", Jalan Mangga, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar.	Senin, 21 Juli 2025	Pohon Beringin	
12	IBU DIAN	JL KALI PORONG KEL PAKUNDEN kec SUKORJO KOTA BLITAR	Sabtu , 2 Agustus 2025	KEBAKARAN LAHAN BAMBU	
13	Kartika	Jl. Jawa no 46-48 Rt: 2 Rw:14 Kel.Sanan Wetan Kec Sanan Wetan Kota Blitar (2,2 km)	senin , 20-10-2025	Kebakaran kamar kost	
14	Achmad Ramadhan	Jl Bungur Gg 3 no 23 kel Sukorejo kec Sukorejo Kota Blitar	Rabu , 5 November2025	Kebakaran Kios dan exs Pabrik Oepet OngkWijoyo	
15	Reiyarsa	Kios Jln Kaca piring no72 Rt 1 Rw 3 Kel Kepajen Kidul Kec Kepajen kidul	Selasa, 18 November 2025	Kebakaraan k ompor di dapur	
16	ibu ninik	Jl.Dieng no : 19 kota Blitar	Sabtu, 29 November 2025	Konsleting listrik	

NO	NAMA KORBAN KEBAKARAN	ALAMAT	TANGGAL KEJADIAN	JENIS KEJADIAN	DOKUMENTASI
17	AKBAR	Depan Perum Green View, Jalan Cemara, Kelurahan Tlumpu, Kecamatan	Selasa, 2 Desember 2025	Kabel Listrik	
18	Bapak Helmi Akbar Darmawan	Toko HALIM MONTOR Jln veteran no138 Kel Plosokerep	Senin 15 Desember 2025	Kebakaran To ko	
19	Bu Bertha	jl Mastrip No 7 Rt 01,Rw 04 kel kepanjen kidul kota Blitar	Jumat 19 Desember 2025	kebakaran kompor	
20	Bu Agustina	jl DR .Wahidin no 14 Kel Kepanjen lor Kec Kepanjen Kidul Kota Blitar	Minggu, 28 Desember 2025	Kebakar an konsletin g kabel ditiang listrik	

INDEKS PENCAPAIAN SPM 2025

No	KATEGORI SPM	Jenis Pelayanan Dasar	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (B)	PENCAPAIAN SPM (80xA) + (20xB)	INDEKS PENCAPAIAN SPM	KATEGORI IP SPM
1.	TRANTIBUM	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100 %	**TUNTAS PARIPURNA**
2.	KEBENCANAAN	Pelayanan informasi rawan bencana	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100 %	**TUNTAS PARIPURNA**
3.		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100.00 %	100.00 %	100.00 %		
4.		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100.00 %	100.00 %	100.00 %		
5.	DAMKAR	Pelayanan Penyelamatan	97.00 %	85.00 %	97.00 %	97.00 %	**TUNTAS UTAMA**

No	KATEGORI SPM	Jenis Pelayanan Dasar	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (B)	PENCAPAIAN SPM (80xA) + (20xB)	INDEKS PENCAPAIAN SPM	KATEGORI IP SPM
		dan evakuasi korban kebakaran					

4.5.4. Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD atau sumber lain yang sah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM. Untuk mendukung pencapaian SPM ditetapkan program kegiatan sebagai berikut :

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA BLITAR	975,255,996,497
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	17,482,444,263
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	4,872,071,014
	APBD	4,872,071,014
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	4,122,071,014
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	750,000,000
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

RINCIAN ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KOTA BLITAR				4,929,737,270	4,585,275,649	93.01 %
1	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)**				**4,037,098,314**	**3,822,303,299**	**94.68 %**
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota K2023444			3,056,940,580	3,009,769,184	98.46 %
	1.05.02.2.01.0003	1	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	21,258,900	21,231,900	99.87 %
	1.05.02.2.01.0004	2	Pemberdayaan perlindungan	Dokumen	159,765,000	156,915,186	98.22 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum				
	1.05.02.2.01.0005	3	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	63,705,500	59,654,000	93.64 %
	1.05.02.2.01.0006	4	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0007	5	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Unit	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0008	6	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Dokumen	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0009	7	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0010	8	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Orang	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0011	9	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0012	10	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji	Orang	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan				
	1.05.02.2.01.0013	11	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Orang	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0014	12	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0015	13	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0015	14	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	2,787,744,080	2,748,320,598	98.59 %
	1.05.02.2.01.0016	15	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	24,467,100	23,647,500	96.65 %
	1.05.02.2.01.0016	16	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui	Kasus	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa				
	1.05.02.2.01.0017	17	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0018	18	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unit	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				3,056,940,580	3,009,769,184	98.46 %
	2	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota K2023455**			**974,940,934**	**807,557,315**	**82.83 %**
	1.05.02.2.02.0001	1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0002	2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0003	3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0004	4	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0005	5	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan PeraturanKepala Daerah	Dokumen	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0006	6	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang	Unit	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)				
	1.05.02.2.02.0007	7	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0008	8	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0009	9	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0010	10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	359,140,900	325,809,600	90.72 %
	1.05.02.2.02.0011	11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Laporan	603,336,234	469,503,115	77.82 %
	1.05.02.2.02.0012	12	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	12,463,800	12,244,600	98.24 %
	JUMLAH INDIKATOR				974,940,934	807,557,315	82.83 %
	3	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota K2023457**			**5,216,800**	**4,976,800**	**95.40 %**
	1.05.02.2.03.0002	1	Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	0	0	0%
	1.05.02.2.03.0003	2	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	0	0	0%
	1.05.02.2.03.0004	3	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.03.0005	4	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1.05.02.2.03.0006	5	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	5,216,800	4,976,800	95.40 %
	JUMLAH INDIKATOR				5,216,800	4,976,800	95.40 %
	JUMLAH PROGRAM				4,037,098,314	3,822,303,299	94.68 %
2	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)**				**576,043,156**	**468,343,821**	**81.30 %**
	4	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota K2023456**			**288,641,000**	**221,851,752**	**76.86 %**
	1.05.03.2.01.0003	1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	150,000,000	98,955,000	65.97 %
	1.05.03.2.01.0004	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	138,641,000	122,896,752	88.64 %
	JUMLAH INDIKATOR				288,641,000	221,851,752	76.86 %
	5	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana K20240401115443**			**195,337,956**	**172,513,814**	**88.32 %**
	1.05.03.2.02.0001	1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0002	2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0003	3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0004	4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0005	5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Kawasan	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0006	6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1.05.03.2.02.0007	7	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	-	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0008	8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0009	9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0010	10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0011	11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0012	12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0013	13	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0014	14	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0015	15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Unit	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0016	16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kawasan	31,458,900	25,005,908	79.49 %
	1.05.03.2.02.0017	17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	163,879,056	147,507,906	90.01 %
	JUMLAH INDIKATOR				195,337,956	172,513,814	88.32 %
	6	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana K2023445**			**92,064,200**	**73,978,255**	**80.36 %**
	1.05.03.2.03.0001	1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan	0	0	0%
	1.05.03.2.03.0002	2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1.05.03.2.03.0003	3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	57,288,200	45,396,750	79.24 %
	1.05.03.2.03.0007	4	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.03.0008	5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
	1.05.03.2.03.0009	6	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	34,776,000	28,581,505	82.19 %
	1.05.03.2.03.0010	7	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.03.0011	8	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				92,064,200	73,978,255	80.36 %
	7	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana K2023446**			**0**	**0**	**0.00 %**
	1.05.03.2.04.0001	1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0002	2	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0003	3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0004	4	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0005	5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan	Laporan	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			penanggulangan bencana				
	1.05.03.2.04.0006	6	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0007	7	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0008	8	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0009	9	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0010	10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0011	11	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usahadalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Lembaga	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0012	12	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0013	13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00 %
	JUMLAH PROGRAM				576,043,156	468,343,821	81.30 %
3	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)**				**316,595,800**	**294,628,529**	**93.06 %**
	8	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan**			**180,789,658**	**163,313,779**	**90.33 %**

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
		Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota K2023449					
	1.05.04.2.01.0001	1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	43,895,500	32,876,500	74.90 %
	1.05.04.2.01.0002	2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	7,072,500	6,267,500	88.62 %
	1.05.04.2.01.0003	3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	8,541,258	8,466,000	99.12 %
	1.05.04.2.01.0004	4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0005	5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0007	6	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen	89,580,968	84,688,350	94.54 %
	1.05.04.2.01.0008	7	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0011	8	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangann Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0012	9	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Laporan	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0013	10	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1.05.04.2.01.0014	11	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0015	12	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0016	13	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0017	14	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	31,699,432	31,015,429	97.84 %
	1.05.04.2.01.0018	15	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0019	16	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				180,789,658	163,313,779	90.33 %
	9	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran K2023450**			**83,659,442**	**83,022,200**	**99.24 %**
	1.05.04.2.02.0001	1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	74,603,742	74,426,900	99.76 %
	1.05.04.2.02.0002	2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	9,055,700	8,595,300	94.92 %
	JUMLAH INDIKATOR				83,659,442	83,022,200	99.24 %
	10	**Investigasi Kejadian Kebakaran K2023451**			**0**	**0**	**0.00 %**
	1.05.04.2.03.0001	1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00 %
	11	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran K2023459**			**52,146,700**	**48,292,550**	**92.61 %**
	1.05.04.2.04.0001	1	Pemberdayaan masyarakat dalam	Orang	20,522,100	18,235,500	88.86 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat				
	1.05.04.2.04.0002	2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa	31,624,600	30,057,050	95.04 %
	1.05.04.2.04.0003	3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				52,146,700	48,292,550	92.61 %
	12	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia K2023458**			**0**	**0**	**0.00 %**
	1.05.04.2.05.0001	1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan	0	0	0%
	1.05.04.2.05.0002	2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	0	0	0%
	1.05.04.2.05.0004	3	Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan	0	0	0%
	1.05.04.2.05.0005	4	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00 %
	JUMLAH PROGRAM				316,595,800	294,628,529	93.06 %
KEGIATAN LAINNYA							

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
4	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
	TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA						

4.5.5. Dukungan Personil

Dukungan personil untuk pelaksanaan SPM digambarkan dengan tabel sebagai berikut

No	Uraian	Jumlah
	Pegawai	56
1.	Jenis kelamin:	
	Laki - Laki	52
	Perempuan	4
2.	Status kepegawaian:	
	PNS	41
	CPNS	-
	PPPK	5
	PTT Pemerintah Kota Blitar	10
3.	Pendidikan	
	SD/sederajat	-
	SMP/sederajat	1
	SMA/SMK/ sederajat	38
	D1	-
	D2	-
	D3	2
	S1/D-IV	14
	S2	1

4.5.6. Permasalahan Dan Solusi

No	PERMASALAHAN
1.	Keterbatasan SDM dalam mengumpulkan data Warga Negara
2.	Personil pengumpulan data yang kurang kompeten
3.	Warga masyarakat yang belum memahami dan menolak untuk ditertibkan
4.	Ketersediaan anggaran yang belum mencukupi untuk pengadaan sarana prasarana
5.	Ketidakseragaman dalam melakukan pelaporan
6.	Personil yang masih belum sepenuhnya memahami proses pelaporan data
7.	Ketersediaan anggaran yang belum mencukupi untuk pengadaan sarana prasarana, Sarana Prasarana Kendaraan yang sudah tua
8.	Petugas belum memahami rumus penghitungan kebutuhan

4.6 Pencapaian SPM Bidang Sosial

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sosia daerah kabupaten/kota terdiri atas:

a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial

b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial
d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial
e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

4.6.2. Target Pencapaian SPM

Target pelaksanaan SPM Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan pemerintah daerah

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2025
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan setelah bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%

4.6.3. Realisasi Pencapaian SPM 2025

Data pencapaian dan penerapan SPM disajikan berdasarkan realisasi program kegiatan sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %	
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti					100.00 %	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**		
	A. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	**Orang**	**297**	**297**	**0**	**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00 %**	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					**100.00 %**	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	52	52	0.00	100.00 %	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	6	6	0.00	100.00 %	
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	4	4	0.00	100.00 %	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	10	10	0.00	100.00 %	
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	14	14	0.00	100.00 %	
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	42	42	0.00	100.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	265	265	0.00	100.00 %	
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	75	75	0.00	100.00 %	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	3	3	0.00	100.00 %	
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	10	10	0.00	100.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	7	7	0.00	100.00 %	
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	7	7	0.00	100.00 %	
	13 . Layanan rujukan	Orang	11	11	0.00	100.00 %	

Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial dengan kriteria:

a. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
b. Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

Rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Tujuan akhirnya untuk mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan penyandang disabilitas secara maksimal sehingga terpenuhi akses atas pekerjaannya. Jenis layanan diberikan berdasarkan hasil assessment sehingga diberikan sesuai kebutuhan masing-masing penerima layanan.

Kegiatan yang mendukung SPM

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti
   Jenis layanan diberikan berdasarkan hasil assessment sehingga diberikan sesuai kebutuhan masing-masing penerima layanan. Sebanyak 297 penyandang disabilitas terlantar telah diberikan layanan sesuai kebutuhan diantaranya :
   a. Layanan data dan pengaduan.
      Layanan ini ditujukan untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa keluhan, pengaduan atau pertanyaan serta mendata/memfasilitasi penyandang disabilitas terlantar untuk diusulkan dalam DTKS dan sebanyak

52 orang telah diberikan layanan sesuai kebutuhannya. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 21.081.250,00, adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut:

Gambar 4.6.1. Kegiatan layanan data dan pengaduan bagi penyandang disabilitas

b. Penyediaan sandang.
Kegiatan ini berupa pemberian pakaian sesuai kebutuhan klien dan sebanyak 10 orang telah menerima bantuan pakaian. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 3.780.327,00

c. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial.
Kegiatan ini dilakukan secara bertahap melalui kegiatan pendampingan perseorangan maupun klasikal dengan jumlah penerima layanan sebanyak 265 orang. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 166.805.655,00, adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut:

Gambar 4.6.2. Kegiatan terapi okupasi bagi penyandang disabilitas

d. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar. Kegiatan ini dilakukan secara klasikal, bertujuan memberikan pemahanan dan motivasi tentang pentingnya peran keluarga dalam pendampingan terhadap penyandang disabilitas di keluarganya, diikuti sebanyak 75 orang. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp.10.517.500,adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :

Gambar 4.6.3. Bimbingan sosial bagi keluarga penyandang disabilitas

e. Fasilitasi Pembuatan Dokumen Administrasi Kependudukan
Bagi penyandang disabilitas terlantar yang belum mempunyai dokumen administrasi kependudukan maka difasilitasi pembuatannya guna mewujudkan tertib Adminduk secara nasional dan terpadu, serta tersedianya data penduduk sebagai rujukan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial. Sebanyak 3 orang telah difasilitasi mendapatkan dokumen adminduk dengan dukungan anggaran Rp. 1.420.000,00, adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut

Gambar 4.6.4. Fasilitasi Pembuatan Dokumen Administrasi Kependudukan bagi penyandang disabilitas

f. Akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar
Layanan ini diberikan saat seorang penyandang disabilitas terlantar sakit dan/atau penyandang disabilitas yang memerlukan akses layanan kesehatan. Sebanyak 10 orang telah mendapatkan akses layanan kesehatan

dasar. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 8.493.000, dengan dolumentasi kegiatan sebagai berikut :

Gambar 4.6.5. Kegiatan akses layanan Kesehatan dasar bagi penyandang disabilitas

g. Layanan penelusuran keluarga

Merupakan layanan yang diberikan untuk menelusuri keberadaan keluarga penyandang disabilitas terlantar, dilakukan melalui koordinasi dan sinergi dengan jejaring pelaku kesejahteraan sosial dan sebanyak 7 orang telah mendapatkan layanan penelusuran keluarga, dengan dolumentasi kegiatan sebagai berikut :

Gambar 4.6.6. Kegiatan penelusuran keluarga penyandang disabilitas

h. Layanan reunifikasi keluarga

Apabila keluarga klien PPKS diketahui keberadaannnya maka pengasuhan yang bersangkutan dikembalikan kepada keluarganya dan sebanyak 7 orang telah direunifikasi dengan keluarganya, adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :

Gambar 4.6.7. Kegiatan reunifikasi keluarga penyandang disabilitas

i. Layanan rujukan

Apabila penyandang disabilitas terlantar memerlukan layanan rehabilitasi sosial lanjutan maka akan difasilitasi rujukan ke RSJ/UPT/LKS/lembaga Rehabsos lainnya dan sebanyak 11 orang telah menerima layanan rujukan. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 8.146.800,00,a dapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut.

Gambar 4.6.8. Kegiatan layanan rujukan bagi penyandang disabilitas

j. Penyediaan Alat Bantu

Dalam upaya rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar Dinas Sosial Kota Blitar telah memberikan bantuan alat bantu kepada 14 orang dengan dukungan anggaran Rp 20.007.750, dengan dokumentasi kegiatan sebagai beikut.

Gambar 4.6.9. Kegiatan penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas

k. Penyediaan Layanan Kedaruratan/Layanan Reaksi Cepat

Merupakan layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat. Telah diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar sebanyak 6 orang dengan dukungan anggaran Rp. 500.000,00, dengan dokumentasi kegiatan sebagai beikut.

Gambar 4.6.10. Kegiatan layanan kedaruratan bagi penyandang disabilitas

l. Penyediaan Permakanan

Penyediaan permakanan bagi penyandang disabilitas terlantar di shelter pada tahun 2025 telah diberikan sebanyak 4 orang dengan dukungan anggaran Rp. 2.955.000,00.

m. Penyediaan Perbekalan Kesehatan

Bantuan perbekalan kesehatan yang diberikan berupa bahan makanan, bahan kebersihan dan tambahan nutrisi. Sebanyak 42 penyandang disabilitas terlantar telah diberikan perbekalan Kesehatan, dengan dokumentasi kegiatan sebagai beikut.

Gambar 4.6.11. Kegiatan penyediaan perbekalan kesehatan

2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
2 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti**					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**		
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	112	112	**0**	**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00 %**	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1 . Layanan data dan pengaduan	orang	2	2	**0.00**	**100.00 %**	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	5	5	**0.00**	**100.00 %**	
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	2	2	**0.00**	**100.00 %**	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	5	5	**0.00**	**100.00 %**	
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan di luar Panti	Orang	1	1	**0.00**	**100.00 %**	
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	70	70	**0.00**	**100.00 %**	
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	63	63	**0.00**	**100.00 %**	
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	2	2	**0.00**	**100.00 %**	
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	5	5	**0.00**	**100.00 %**	
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	1	1	**0.00**	**100.00 %**	
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	**0.00**	**100.00 %**	
	12 . Layanan rujukan	Orang	5	5	**0.00**	**100.00 %**	

Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial dengan kriteria:

a. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
b. Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

Kegiatan Kesejahteraan Sosial Anak dalam bentuk pelayanan sosial dan bantuan kesejahteraan sosial anak, yang menjangkau seluruh anak yang mengalami masalah sosial sehingga mereka dapat menikmati kehidupan dan berada dalam

lingkungan pengasuhan yang memungkinkannya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensinya.

Pemberian layanan diberikan kepada 112 anak berdasarkan hasil assessment sehingga sesuai dengan yang dibutuhkan masing-masing anak, antara lain :

a. Layanan Data dan Pengaduan
   Layanan ini ditujukan untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa keluhan, pengaduan atau pertanyaan serta mendata/memfasilitasi anak terlantar pada DTKS dan sebanyak 2 orang telah mendapatkan layanan data dan pengaduan. Adapun dokuemtasi kegiatan sebagai berikut :

Gambar 4.6.12. Kegiatan layanan data dan pengaduan

b. Penyediaan Layanan Kedaruratan/layanan Reaksi Cepat
   Merupakan layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat. Telah diberikan kepada anak terlantar sebanyak 5 orang dengan dukungan anggaran Rp. 250.000,00, Adapun dokuemtasi kegiatan sebagai berikut :

Gambar 4.6.13. Kegiatan layanan kedaruratan anak terlantar

c. Penyediaan Sandang
   Kegiatan ini berupa pemberian pakaian sesuai kebutuhan klien anak terlantar dan sebanyak 5 orang telah menerima bantuan pakaian. Dukungan anggaran

untuk layanan ini sebesar Rp. 1.890.164, Adapun dokuemtasi kegiatan sebagai berikut :

d. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial sebanyak 70 orang. Kegiatan ini dilaksanakan secara klasikal maupun pendekatan perseorangan. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 77.237.430,
Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut

Gambar 4.6.14. Kegiatan Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial anak terlantar

e. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar sebanyak 63 orang. Dukungan keluarga merupakan motivasi terbesar anak untuk hidup wajar baik sebagai individu maupun makhluk sosial karena pengasuhan keluarga merupakan hal terpenting dalam proses perkembangan mental anak. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 7.950.000,00, Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut:

Gambar 4.6.15. Kegiatan bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar

f. Akses layanan pendidikan dan kesehatan diberikan agar anak memperoleh kesempatan mendapatkan pendidikan formal dan akses layanan kesehatan dasar yang seharusnya diterima. Dalam tahun 2025 telah dilaksanakan fasilitasi akses layanan pendidikan sebanyak 5 orang. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 2.100.000,00, Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut

Gambar 4.6.16. Kegiatan akses layanan pendidikan anak terlantar

g. Layanan penelusuran keluarga tahun 2025 sebanyak 1 orang. Layanan ini diberikan agar anak bisa dipertemukan dengan keluargnya, Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :

Gambar 4.6.17. Kegiatan layanan penelusuran keluarga

h. Layanan reunifikasi keluarga sebanyak 1 orang. Setelah diketemukan keluarganya maka anak terlantar tersebut pengasuhannya dikembalikan lagi kepada keluarga karena pengasuhan keluarga merupakan pengasuhan terbaik bagi seorang anak, Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :

Gambar 4.6.18. Kegiatan reunifikasi keluarga anak terlantar

i. Layanan rujukan

Layanan ini diberikan apabila klien memerlukan layanan rehabilitasi social lanjutan. Sebanyak 5 orang telah dirujuk ke UPT/Balai rehabilitasi sosial/LKSA/lembaga sejenis untuk mendapatkan pendampingan sosial sehingga ada perubahan perilaku dan bisa melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 3.000.000,00 Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :

Gambar 4.6.19. Kegiatan layanan rujukan anak terlantar

j. Fasilitasi pembuatan NIK (Nomor Induk Kependudukan)

Fasilitasi pembuatan NIK pada tahun 2025 diberikan kepada 2 orang dengan dukungan anggaran Rp. 400.000,00, Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :

Gambar 4.6.20. Kegiatan layanan fasilitasi pembuatan NIK

k. Penyediaan permakanan
Dalam tahun 2025, penyediaan makanan diberikan kepada 2 orang anak terlantar dengan dukungan anggaran Rp. 1.450.000,00.

3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
3 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti**					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**		
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	135	135	**0**	**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00 %**	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	2	2	**0.00**	**100.00 %**	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	5	5	**0.00**	**100.00 %**	
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	135	135	**0.00**	**100.00 %**	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	22	22	**0.00**	**100.00 %**	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	2	2	**0.00**	**100.00 %**	
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	22	22	**0.00**	**100.00 %**	
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	22	22	**0.00**	**100.00 %**	
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	63	63	**0.00**	**100.00 %**	
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	2	2	**0.00**	**100.00 %**	
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	10	10	**0.00**	**100.00 %**	
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	2	2	**0.00**	**100.00 %**	
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2	2	**0.00**	**100.00 %**	
	13 . Layanan rujukan	Orang	5	5	**0.00**	**100.00 %**	

Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial dengan kriteria:

a. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
b. Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia diberikan kepada lanjut usia terlantar (berusia 60 tahun keatas), yang karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Layanan ini bertujuan agar para Lansia terlantar tersebut terpenuhi kebutuhan dasarnya, diberikan spesifik sesuai kebutuhan masing-masing berdasarkan hasil assessment pekerja sosial. Penerima layanana pada tahun 2024 sebanyak 135 orang. Jenis layanan rehabilitasi sosial dasar yang telah dilaksanakan selama tahun 2025 diantaranya :

a. Layanan data dan pengaduan, sebanyak 2 orang telah mendapatkan layanan data dan pengaduan dengan dukungan anggaran Rp. 3.166.250,00

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut:

Gambar 4.6.21. Kegiatan pemberian layanan data dan pengaduan bagi Lansia terlantar

b. Penyediaan permakanan

Guna pemenuhan gizi bagi Lansia terlantar maka diberikan makanan sehat siap konsumsi untuk 3 kali makan bagi 135 orang yang diberikan setiap hari Jum'at. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 378.615.000,00

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut:

Gambar 4.6.22. Kegiatan pemberian makanan sehat siap konsumsi bagi Lansia terlantar

c. Layanan sandang berupa penyediaan paket sandang dan kelengkapannya, diberikan sesuai kebutuhan dan telah diberikan kepada 22 orang. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 3.630.000, Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :

Gambar 4.6.23. Kegiatan pemberian bantuan sandang dan kelengkapananya bagi Lansia terlantar

d. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Lanjut Usia Terlantar
Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahanan dan motivasi tentang pentingnya peran keluarga dalam pendampingan terhadap Lansia di keluarganya, diikuti sebanyak 63 orang dengan dukungan anggaran Rp. 8.200.000,00.
Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :

Gambar 4.6.24. Kegiatan Bimbingan Sosial bagi Keluarga Lansia

e. Pemberian perbekalan kesehatan berupa bahan kebersihan diri dan tambahan nutrisi. Sedangkan vitamin dan obat-obatan ringan diberikan melalui program sinergitas dengan Dinas Kesehatan/UPT Puskesmas setempat. Pemberian perbekalan kesehatan dilakukan bersamaan dengan kegiatan sosial home care Lansia terlantar kepada 22 orang.
Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :

Gambar43.6.25. Kegiatan pemberian perbekalan Kesehatan bagi Lansia

f. Fasilitasi pembuatan NIK (Nomor Induk Kependudukan)
   Agar bisa mengakses layanan kesejahteraan sosial maka diperlukan kepemilikan NIK. Untuk itu Dinas Sosial Kota Blitar pada tahun 2025 melakukan fasilitasi pembuatan NIK kepada Lansia terlantar sebanyak 2 orang dengan dukungan anggaran Rp. 400.000,00
g. Layanan penelusuran keluarga
   Layanan penelusuran keluarga bertujuan untuk mengetahui keberadaan keluarga dan pada tahun 2025 telah diberikan layanan kepada 2 orang Lansia terlantar.
h. Layanan Reunifikasi keluarga
   Reunifikasi keluarga adalah proses penyatuan kembali ke lingkungan keluarga untuk pengasuhan yang aman, layak, dan mendukung keberfungsian sosialnya. Pada tahun 2025 telah diberikan layanan reunifikasi keluarga sebanyak 2 orang. Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :

Gambar 4.6.26. Kegiatan layanan reunifikasi bagi Lansia

i. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan fungsi sosial agar dapat hidup wajar di masyarakat. Kegiatan ini berupa pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, TKSK, PSM, tokoh masyarakat, keluarga/lingkungan serta tokoh agama/petugas dari Kementerian Agama Kota Blitar. Pada tahun 2025 telah dilakukan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial melalui kegiatan Go care Lansia kepada 22 orang. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 110.255.284,00
   Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :

Gambar 4.6.27. Kegiatan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi Lansia

j. Akses Layanan Kesehatan Dasar
Layanan ini diberikan saat memerlukan akses layanan kesehatan, telah diberikan kepada 10 orang berupa fasilitasi akses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 12.875.000,00, Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :

Gambar 4.6.28. Kegiatan akses layanan kesehatan Lansia terlantar

k. Layanan rujukan bertujuan agar Lansia terlantar lebih terjamin hidupnya dan sebanyak 5 Lansia telah dirujuk ke panti sosial/LKS/lembaga rehabilitasi sosial Lansia lainnya. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 7.104.000,00. Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :

Gambar 4.6.29. Kegiatan rujukan bagi Lansia telantar

l. Penyediaan Layanan kedaruratan /Layanan Reaksi Cepat
Merupakan layanan yang diberikan kepada Lansia terlantar yang membutuhkan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat. Telah diberikan kepada Lansia terlantar sebanyak 5 orang dengan dukungan anggaran Rp. 350.000,00. Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :

Gambar 4.6.30. Kegiatan layanan kedaruratan bagi Lansia telantar

m. Penyediaan alat bantu
Penyediaan alat bantu diberikan kepada Lansia terlantar sebanyak 2 orang dengan dukungan anggaran dari Badan Amil Zakat Kota Blitar.

4. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial

capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
4 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti**					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**		
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	28	28	**0**	**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00 %**	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	2	2	**0.00**	**100.00 %**	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	5	5	**0.00**	**100.00 %**	
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	4	4	**0.00**	**100.00 %**	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	15	15	**0.00**	**100.00 %**	
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	28	28	**0.00**	**100.00 %**	
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	28	28	**0.00**	**100.00 %**	
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga	Orang	28	28	**0.00**	**100.00 %**	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	gelandangan dan pengemis						
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	2	2	**0.00**	**100.00 %**	
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	10	10	**0.00**	**100.00 %**	
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	7	7	**0.00**	**100.00 %**	
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	6	6	**0.00**	**100.00 %**	
	12 . Layanan rujukan	Orang	9	9	**0.00**	**100.00 %**	

Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial dengan kriteria:

a. Perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
b. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
c. Tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
d. Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.

Keberadaan Gepeng disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks antara lain biaya hidup yang terus meningkat, kedisabilitasan, malas berusaha, minimnya lapangan kerja hingga latar belakang keluarga yang berantakan sehingga populasinya selalu berubah-ubah karena mobilitas mereka yang tinggi. Keberadaan gepeng merupakan masalah sosial terjadi terutama di wilayah perkotaan. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah melalui rehabilitasi sosial yang tujuan untuk mengembalikan dan mengembangkan fungsi sosial sehingga mereka dapat hidup wajar di masyarakat. Jenis layanan rehabilitasi sosial yang diberikan

kepada Gepeng disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing setelah diassessment oleh pekerja sosial.

Jumlah yang telah dilayani pada tahun 2025 sejumlah 28 orang. Dalam tahun 2025 ini beberapa jenis layanan rehabilitasi sosial dasar bagi Gepeng diantaranya:

a. Layanan Data dan Pengaduan
   Layanan ini ditujukan untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa keluhan, pengaduan atau pertanyaan serta mendata/memfasilitasi tuna sosial di luar panti pada DTKS dan sebanyak 2 orang telah diberikan layanan data dan pengaduan dengan dukungan anggaran Rp. 2.164.250,00.

Gambar 4.6.31. Kegiatan layanan data dan pengaduan

b. Penyediaan Layanan Kedaruratan/Layanan Reaksi Cepat
   Merupakan layanan yang diberikan bagi tuna social/Gepeng di luar panti yang membutuhkan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat. Telah diberikan kepada Gepeng sebanyak 5 orang dengan dukungan anggaran Rp. 350.000,00.

Gambar 4.6.32. Kegiatan fasilitasi layanan kedaruratan bagi Gepeng

c. Penyediaan Permakanan
   Penyediaan permakanan, yaitu pemberian makan bagi Gepeng yang ditampung sementara di shelter sebanyak 4 orang dengan dukungan anggaran Rp. 2.955.000,00.

Gambar 4.6.33. Kegiatan penyediaan permakanan bagi Gepeng

d. Penyediaan sandang berupa pemberian pakaian dan kelengkapannya diberikan kepda 15 orang. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 5.670.491,00

Gambar 4.6.34. Kegiatan penyediaan sandang bagi Gepeng

e. Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial diberikan kepada 28 orang. Bimbingan ini diberikan oleh pekerja sosial bekerja sama dengan TKSK/PSM setempat dengan dukungan anggaran Rp. 12.692.295,00

Gambar 4.6.35. Kegiatan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi Gepeng

f. Bimbingan sosial kepada keluarga Gepeng diberikan kepada 28 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan motivasi perubahan perilaku, agar keluarga tidak kembali ke jalan.

Gambar 4.6.36. Kegiatan bimbingan sosial bagi keluarga Gepeng

g. Penyediaan Perbekalan Kesehatan
Pembekalan kesehatan bagi tuna sosial/gelandangan dan pengemis di luar panti tahun 2025 telah diberikan kepada 28 orang.
Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :

Gambar 4.6.37. Kegiatan penyediaan perbekalan kesehatan bagi Gepeng

h. Fasilitasi layanan administrasi kependudukan diberikan kepada 2 orang dengan dukungan anggaran Rp. 100.000,00.
Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :

Gambar 4.6.38. Kegiatan fasilitasi layanan admistrasi kependudukan bagi Gepeng

i. Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
Akses layanan kesehatan diberikan jika dijumpai adanya Gepeng yang sakit dan memerlukan layanan kesehatan dan pada tahun 2025 diberikan kepada 10 orang. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. Rp. 7.442.000,00
Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :

Gambar 4.6.39. Kegiatan akses layanan Kesehatan Gepeng

j. Layanan penelusuran keluarga dilakukan untuk mengetahui keberadaan keluarga inti/keluarga laiannya, dilakukan melalui koordinasi dengan jaring-jaring kesejahteraan sosial dan pada tahun 2025 ini diberikan layanan penelusuran keluarga kepada 7 orang.
k. Layanan reunifikasi keluarga merupakan layanan untuk menyerahkan kembali Gepeng kepada pihak keluarga karena prinsip rehabilitasi sosial diutamakan tetap dalam lingkungan keluarga. Pada tahun 2025 sebanyak 6 orang telah memperoleh layanan reunifikasi keluarga.

Gambar 4.6.40. Kegiatan layanan reunifikasi keluarga bagi Gepeng

l. Layanan rujukan merupakan layanan rehabilitasi sosial lanjutan yang ditujukan pada UPT/Balai Rehabilitasi Sosial PPKS, LKS/yayasan/lembaga sosial lainnya maupun pada kerabatnya. Pada tahun 2025 diberikan layanan rujukan kepada 9 orang dengan dukungan anggaran Rp. 6.962.500,00

Gambar 4.6.41. Kegiatan layanan rujukan bagi gepeng

5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
5 .	**Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat**					100.00 %	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota						
						Ya Terjadi Bencana	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**	
			Jumlah Total	**Jumlah Total**	**Yang Belum**		
			Yang Harus Dilayani	**Yang Terlayani**	**Terlayani**		
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (Tidak Terjadi Bencana (100% dengan catatan melakukan 3 tahapan)) :	Orang	17	17	**0**	**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00 %**	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	17	17	**0.00**	**100.00 %**	
	2 . Penyediaan sandang	Orang	1	1	**0.00**	**100.00 %**	
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Orang	1	1	**0.00**	**100.00 %**	
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	70	70	**0.00**	**100.00 %**	
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	17	17	**0.00**	**100.00 %**	

Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat bagi Korban Bencana daerah kabupaten/ kota persatu kali kejadian bencana dengan kriteria:

a. jumlah pengungsi / penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
b. dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah kabupaten/ kota; dan/atau
c. adanya surat penetapan bencana dari bupati/wali kota

Meskipun Kota Blitar tidak termasuk daerah yang rawan bencana namun secara geografis berdekatan dengan gunung Kelud yang merupakan gunung aktif sehingga perlu dilakukan antisipasi terhadap dampaknya yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Disamping itu bencana alam berupa gempa bumi, banjir, angin topan, tanah longsor juga merupakan ancaman yang sewaktu-waktu bisa terjadi, disamping ancaman bencana sosial berupa konflik sosial, kebakaran, wabah/pandemi, kebakaran dll. Oleh karena itu upaya perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana perlu dipersiapkan baik SDM, sarana prasarana maupun dukungan anggarannya. Dinas Sosial Kota Blitar sebagai pengampu SPM bidang sosial mempersiapkan dukungan SDM, sarana prasarana dan penyediaan anggaran yang bersifat penjagaan. Penyediaan anggaran berupa penyediaan bahan makanan bagi korban bencana dan kelompok rentan dalam hal ini warga miskin yang sakit/mendapat musibah lainnya serta anggaran untuk kesiapan SDM dan sarana prasarana digunakan untuk peningkatan kapasitas SDM Tagana dan pemeliharaan mobil Dapur Umum Lapangan. Sedangkan dukungan dana lainnya dianggarkan melalui anggaran BTT pada BPKAD Kota Blitar. Tahun 2025 penerima layanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota sejumlah 17 orang berupa :

a. Bantuan bahan makanan bagi korban bencana bencana alam sebanyak 11 orang dan korban bencana sosial/non alam sebanyak 6 orang. Bantuan ini dimaksudkan untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan korban bencana pada saat tanggap darurat bencana. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 21.181.850,
   Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :

Gambar 4.6.42. Kegiatan pemberian bantuan bahan makanan bagi korban bencana

b. Penanganan khusus kelompok rentan berupa bantuan bahan makanan bagi warga miskin yang sakit/mendapat musibah lainnya kepada 70 orang. Selama seseorang sakit dimungkinkan mereka akan kehilangan pendapatan sementara, sehingga perlu dibantu untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya khususnya kebutuhan pangan. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp38.195.700,00

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :

Gambar 4.6.43. Kegiatan penanganan khusus kelompok rentan

c. Layanan dukungan psikososial

Ketika terjadi bencana maka orang yang terkena dampak akan mengalami guncangan/trauma sehingga perlu segera dipulihkan secara psikis dan sosial agar tetap berfungsi optimal pada saat mengalami krisis. Oleh karena itu layanan

dukungan psikososial menjadi sangat penting untuk menghilangkan trauma dan segera bersemangat kembali. Saat ini layanan ini diberikan bersamaan pada saat pemberian bantuan bagi korban bencana dan dilakukan oleh pekerja sosial bekerja sama dengan Tagana. Pada tahun 2025 sebanyak 17 orang korban bencana telah menerima layanan dukungan psikososial.

INDEKS PENCAPAIAN SPM 2025

Dari tabel dan uraian diatass, dapat disimpulkan bahwa indeks pencapaian SPM Bidang Sosial Kota Blitar pada tahun 2025 sebagai berkut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (B)	PENCAPAIAN SPM (80xA) + (20xB)	INDEKS PENCAPAIAN SPM	KATEGORI IP SPM
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	100%	100%	100%	100%	**TUNTAS PARIPURNA**
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	100%	100%	100%		
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	100%	100%	100%		
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100%	100%	100%		
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan setelah bencana bagi korban bencana kab/kota	100%	100%	100%		

4.6.4. Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD atau sumber lain yang sah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM. Untuk mendukung pencapaian SPM ditetapkan program kegiatan sebagai berikut:

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA BLITAR	975,255,996,497
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	21,333,427,962
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	1,258,846,369
	APBD	1,258,846,369
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	1,258,846,369
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

RINCIAN ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KOTA BLITAR				1,258,846,369	1,207,132,229	95.89 %
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				1,025,977,869	974,415,779	94.97 %
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			957,632,069	915,038,229	95.55 %
	1.06.04.2.01.0001	1	Penyediaan permakanan	Orang	412,975,400	390,247,000	0%
	1.06.04.2.01.0002	2	Penyediaan sandang	Orang	15,275,700	14,970,981	0%
	1.06.04.2.01.0003	3	Penyediaan alat bantu	Orang	20,037,400	20,007,750	0%
	1.06.04.2.01.0004	4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0%
	1.06.04.2.01.0005	5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	376,464,369	370,273,698	0%
	1.06.04.2.01.0006	6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas	Orang	27,284,200	27,017,500	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat				
	1.06.04.2.01.0007	7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	3,475,000	2,320,000	0%
	1.06.04.2.01.0008	8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	35,733,000	30,910,000	0%
	1.06.04.2.01.0009	9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	32,074,900	29,578,000	0%
	1.06.04.2.01.0010	10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	6,000,000	2,350,000	0%
	1.06.04.2.01.0011	11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	0	0	0%
	1.06.04.2.01.0012	12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	28,312,100	27,363,300	0%
	JUMLAH INDIKATOR				957,632,069	915,038,229	95.55 %
	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K2023153			68,345,800	59,377,550	86.88 %
	1.06.06.2.01.0001	1	Penyediaan makanan	Orang	29,878,500	21,181,850	70.89 %
	1.06.06.2.01.0002	2	Penyediaan sandang	Orang	0	0	0%
	1.06.06.2.01.0003	3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	0	0	0%
	1.06.06.2.01.0004	4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	38,467,300	38,195,700	99.29 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1.06.06.2.01.0005	5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				68,345,800	59,377,550	86.88 %
	JUMLAH PROGRAM				1,025,977,869	974,415,779	94.97 %
KEGIATAN LAINNYA							
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
		1.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		131,168,500	131,016,450	99.88 %
		2.	Bantuan permakanan untuk klien yang dititipkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial dari anggaran BTT di BPKAD		101,700,000	101,700,000	100.00 %

4.6.5. Dukungan Personil

Dalam melaksanakan layanan SPM bidang sosial, Dinas Sosial Kota Blitar didukung Sumber Daya Manusia sebanyak 24 orang terdiri dari 22 PNS dan 2 PPPK. Komposisi pegawai Dinas Sosial Kota Blitar berdasarkan golongan/kepangkatan, pendidikan dan jenis jabatan diuraikan pada tabel berikut :

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

No.	Pangkat/Golongan Ruang	L	P	Jml
1	Pembina Utama Muda, IV/c	1	-	1
2	Pembina Tk. I, IV/b	-	1	1
3	Pembina, IV/a	1	1	2

No.	Pangkat/Golongan Ruang	L	P	Jml
4	Penata Tk. I, III/d	2	5	7
5	Penata, III/c	-	-	-
6	Penata Muda Tk. I, III/b	-	-	-
7	Penata Muda, III/a	3	4	7
8	Pengatur Tk. I, II/d	1	-	1
9	Pengatur, II/c	2	-	2
10	Pengatur Muda Tk. I, II/b	1	-	1
11	Pengatur Muda, II/a	-	-	-
12	PPPK	1	1	2
	JUMLAH	12	12	24

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal

No.	Tingkat Pendidikan	L	P	Jml
1	S2 (Pasca Sarjana)	2	-	2
2	S1 (Sarjana)	4	8	12
3	Diploma IV	-	2	2
4	Diploma III	-	2	2
5	Diploma II	-	-	-
6	SLTA	6	-	6
7	SLTP	-	-	-
	Jumlah	12	12	24

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan

No.	Tingkat Pendidikan	L	P	Jml
A. 1.	Jabatan Struktural Eselon II b	1	-	1
2.	Eselon III a	-	1	1
3.	Eselon III b	2	1	3
4.	Eselon IV a	-	1	1
B. 1.	Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Tertentu	1	7	8
2.	Pelaksana	8	2	10

No.	Tingkat Pendidikan	L	P	Jml
	Jumlah	12	12	24

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kepegawaian

No.	Tingkat Pendidikan	L	P	Jml
1	PNS	11	11	22
2	CPNS	-	-	-
3	PPPK	1	1	2
	Jumlah	12	12	24

Dalam pelayanan SPM bidang sosial, disamping dukungan personil dari Aparatur Sipil Negara juga di dukung oleh Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial sebagai ujung tombak pelayanan kesejahteraan sosial pada tahap paling awal. PSKS dimaksud terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 3 orang, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebanyak 44 orang, Tagana 27 orang dan Lembaga Kesejahteraan Sosial sebanyak 10 lembaga.

4.6.6. Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Adapun permasalahan penerapan SPM bidang sosial tahun 2024 di Kota Blitar sebagaimana Tabel berikut :

NO	TAHAPAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	**Pengumpulan Data**	Kurangnya kompetensi petugas pengumpul, pengolah dan penyaji data.	Memberikan pembekalan/Bimtek kepada petugas sebelum pelaksanaan pendataan.
		Bencana alam dan sosial terjadinya sewaktu-waktu.	Pengumpulan data beriringan dengan kejadian bencana yang terjadi.
		PMKS merupakan data dinamis sehingga datanya sering berubah-ubah.	Menggunakan data tahun sebelumnya dan tetap mengakomodir munculnya PMKS baru.
2.	**Penghitungan Kebutuhan**	Data PMKS bersifat fluktuatif, mudah terpengaruh oleh perubahan lingkungan yang kurang mendukung sehingga	Perhitungannya menggunakan data tahun sebelumnya namun tetap menyediakan anggaran untuk permasalahan yang muncul kemudian.

		sulit untuk menentukan rencana kebutuhan .	
3.	**Perencanaan dan Penganggaran**	Data PMKS merupakan data dinamis yang dapat berubah sewaktu-waktu sehingga sulit untuk menetukan target kinerja dan anggaran.	Perencanaan anggaran menggunakan data tahun sebelumnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
		Bencana alam dan sosial tidak bisa diprediksi dan bisa terjadi sewaktu-waktu.	Tetap direncanakan program dan kegiatan yang bersifat penyediaan anggaran dan support anggaran BTT dari BPKAD.
4.	**Pelaksanaan**	Belum tersedia tempat penampungan sementara yang representatif bagi PMKS/PPKS yang mengalami permasalahan sosial akut ketika menunggu antrian dirujuk ke unit rehabilitasi sosial milik provinsi/kementerian	Untuk sementara PMKS/PPKS dititipkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Blitar dan sekitarnya
5	**Pelaporan**	Dari sisi penganggaran belum ada pemilahan kebutuhan dan realisasi anggaran per jenis penerima layanan SPM	Melakukan identifikasi dan perhitungan kembali terkait PAGU dan realisasi anggaran berdasarkan dokumen pertanggungjawaban keuangan kegiatan layanan SPM
6	Lain - Lain	-	-

4.7 Pogram Dan Kegiatan

Program dan Kegiatan dijalankan segaris dengan Visi, Misi, Kebijakan Umum dan Arah Kebijakan Pemerintah Kota Blitar sebagai perwujudan pembangunan pemerintah daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program dan Kegiatan dilakukan dalam rangka mengemban amanat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah maupun yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Adapun progam kegiatan per Bidang Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain

1. BIDANG PENDIDIKAN

Program prioritas urusan wajib Bidang Pendidikan untuk melaksanakan program kegiatan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan terdiri atas

A. **Program pengelolaan pendidikan,** dengan indikator kinerja

- Persentase satuan Pendidikan PAUD dan PNF berakreditasi minimal B
- Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SD/MI)
- Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)
- Persentase Angka Kelulusan SD/MI
- Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs
- Persentase anak berkebutuhan khusus yang tertuntaskan sesuai hasil assessment
- Persentase satuan pendidikan yang memperoleh pendidikan anti korupsi

B. **Program Pengembangan Kurikulum,** dengan indikator kinerja

- Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang dikembangkan
- Persentase tenaga pendidik yang menerima peningkatan kapasitas pendidikan anti korupsi

C. **Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan,** dengan indikator kinerja

- Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah pendidik dan tenaga kependidikan

D. **Program pengendalian dan perizinan pendidikan,** dengan indikator kinerja

- Persentase satuan pendidikan PAUD dan PNF yang memiliki izin operasional yang masih berlaku

2. BIDANG KESEHATAN

Program prioritas urusan wajib Bidang Kesehatan untuk melaksanakan program kegiatan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri atas:

A. **Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat,** dengan indikator kinerja

- Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (SPM)
- Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai tandar (SPM)
- Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (SPM)
- Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar
- Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan
- Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)
- Presentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)
- Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)

- Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)
- Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)
- Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
- Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)
- Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)
- Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan
- Persentase kelurahan UCI (Universal Child Imunization)
- Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang Tertangani
- Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan
- Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina
- Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar

B. **Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat,** dengan indikator kinerja

- Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS

C. **Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan,** dengan indikator kinerja

- Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar

D. **Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman,** dengan indikator kinerja

- Persentase pengelolaan fasilitas layanan kefarmasian yang sesuai standar
- Persentase tempat pengelolaan makanan minuman yang memenuhi syarat kesehata

E. **Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan,** dengan indikator kinerja

- Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri

3. BIDANG PEKERJAAN UMUM

Program prioritas urusan wajib Bidang Pekerjaan Umum untuk melaksanakan program kegiatan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri atas :

A. **Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA),** dengan indikator kinerja

- Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik

B. **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum,** dengan indikator kinerja

- Persentase Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam kondisi baik

C. **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah,** dengan indikator kinerja

- Persentase Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dalam kondisi baik

D. **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase,** dengan indikator kinerja

- Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik

E. **Program Penataan Bangunan Gedung,** dengan indikator kinerja

- Persentase gedung Ruang pemerintahan yang dibangun
- Persentase fasilitas umum skala kota yang dibangun

F. **Program Penyelenggaraan Jalan,** dengan indikator kinerja

- Persentase jalan dalam kondisi baik
- Persentase jembatan dalam kondisi baik

G. **Program Pengembangan Jasa Konstruksi,** dengan indikator kinerja

- Persentase pekerjaan konstruksi yang sesuai standar

H. **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang,** dengan indikator kinerja

- Persentase ketersediaan dokumen tata ruang

4. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

Program prioritas urusan wajib Bidang Perumahan Rakyat untuk melaksanakan program kegiatan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri atas :

A. **Program Pengembangan Perumahan,** dengan indikator kinerja

- Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah
- Persentase tingkat hunian Rusunawa

B. **Program Kawasan Permukiman,** dengan indikator kinerja

- Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman
- Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman
- Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh

C. **Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh,** dengan indikator kinerja
   - Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh
   - Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

D. **Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utiilitas Umum (PSU),** dengan indikator kinerja
   - Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik dikawasan perumahan
   - Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan

5. BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Program prioritas urusan wajib Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat untuk melaksanakan program kegiatan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri atas :

A. **Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum,** dengan indikator kinerja
   - Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan
   - Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan

B. **Program Penanggulangan bencana,** dengan indikator kinerja
   - Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penanganan bencana
   - Persentase SDM penanganan bencana yang terlatih
   - Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana Kategori Madya
   - Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana

C. **Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran,** dengan indikator kinerja
   - Persentase kejadian kebakaran yang tertangan

6. BIDANG SOSIAL

Program prioritas urusan wajib Bidang Sosial untuk melaksanakan program kegiatan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri atas:

A. **Program Pemberdayaan sosial,** dengan indikator kinerja
   - Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

B. **Program Rehabilitasi sosial,** dengan indikator kinerja

- Persentase peningkatan PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial

C. **Program Perlindungan dan jaminan sosial,** dengan indikator kinerja

- Persentase peningkatan PMKS terlatih
- Persentase penurunan Rumah Tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial

D. **Program Penanganan bencana,** dengan indikator kinerja

- Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM)

E. **Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP),** dengan indikator kinerja

- Persentase TMP dalam kondisi baik

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Blitar Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat, sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan di masa yang akan datang.

LPPD Kota Blitar Tahun 2025 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, telah memuat Laporan atas pelaksanaan program kerja Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan (desentralisasi), maupun Tugas Pembantuan. Selain itu LPPD Kota Blitar Tahun 2025 ini juga menyajikan capaian kinerja makro, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, dan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kota Blitar.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Kota Blitar selama Tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan menunjukkan capaian yang positif di berbagai sektor pembangunan. Hal ini tercermin dari apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bentuk penghargaan prestasi. Adapun beberapa penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kota Blitar pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Blitar berhasil menduduki peringkat 4 dari 546 Kab/Kota/Provinsi se-Indonesia Pencapaian Monitoring Center ForPrevention (MCP) KPK sebesar 97,98% tanggal 20 Februari 2025.
2. Pemerintah Kota Blitar berhasil meraih nilai Indeks SPI sebesar 77,10 peringkat ketiga dari 38 Kab/Kota se-Jawa Timur tanggal 27 Januari 2025.
3. Pemerintah Kota Blitar berhasil meraih kenaikan Indeks RB menjadi 90,84 dengan predikat A- tanggal 24 April 2025.
4. Pemerintah Kota Blitar menerima Penghargaan Program Pengendalian Gratifikasi menduduki peringkat 7 Kategori Pemerintah Kota se-Indonesia dengan nilai 80,3 tanggal 19 Januari 2025.
5. Pemerintah Kota Blitar kembali meraih prestasi dengan Penghargaan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-15 kali berturut-turut tanggal 2 Mei 2025.
6. Pemerintah Kota Blitar mendapatkan penghargaan Persentase Alokasi Anggaran Peningkatan Kompetensi Tertinggi di Jawa Timur dalam DPA tahun 2024, tanggal 23 Mei 2025.
7. Pemerintah Kota Blitar kembali menerima Penghargaan Kota Layak Anak Peringkat NINDYA, tanggal 8 Agustus 2025.

8. Pemerintah Kota Blitar menerima Penghargaan Kepala Daerah dengan Dukungan dan Komitmen Penuh Pemerintah Kota Blitar dalam Upaya Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Umat, tanggal 10 Oktober 2025.
9. Pemerintah Kota Blitar kembali meraih prestasi Mandaya Award 2025 menjadi 5 kota terbaik Aspek Pemberdayaan Masyarakat kategori kota, tanggal 16 Oktober 2025.
10. Pemerintah Kota Blitar menerima Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, tanggal 1 November 2025.
11. Pemerintah Kota Blitar menerima Penghargaan Trophy Proklim Lestari dan Sertifikat Proklim Utama dari Kementerian Lingkungan Hidup, tanggal 27 November 2025.
12. Pemerintah Kota Blitar menerima Penghargaan Implementasi Digitalisasi PAD Terbaik pada Anugerah Digdaya Mataraman Peringkat Pertama dari Bank Indonesia, tanggal 8 Desember 2025.
13. Pemerintah Kota Blitar kembali meraih Penghargaan Percepatan Penurunan Stunting Top 5 Nasional dengan Predikat Istimewa.
14. Pemerintah Kota Blitar kembali meraih Penghargaan Wahana Program Internship Dokter Terbaik ketiga.
15. Pemerintah Kota Blitar kembali meraih prestasi dengan Penghargaan Pelaksanaan Program Imunisasi Capaian Tertinggi Imunisasi Dasar Lengkap.
16. Pemerintah Kota Blitar raih Penghargaan Pencapaian Target Non-Folio AFP (NPAFP).
17. Pemerintah Kota Blitar raih Penghargaan Posyandu Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Timur.
18. Pemerintah Kota Blitar raih Penghargaan Lembaga Layanan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) dengan Predikat PRATAMA, Lembaga PISA memenuhi Standart Aman dan Ramah Anak.
19. Pemerintah Kota Blitar berhasil memperoleh penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi, Sekolah Adiwiyata Mandiri, Sekolah Adiwiyata Nasional yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup tanggal 10 Desember 2025.
20. Pemerintah Kota Blitar berhasil meraih Penghargaan Pencapaian Memenuhi Kelengkapan Atribut pada Sembilan Variabel (9/9) untuk mencapai Kematangan UKPBJ Level 3 (Proaktif), tanggal 15 Agustus 2025.
21. Pemerintah Kota Blitar berhasil meraih Penghargaan Piagam Apresiasi atas Pencapaian Memenuhi Keterisian Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) di atas 60%, 26 Agustus 2025.
22. Pemerintah Kota Blitar berhasil meraih Penghargaan Lomba Gotong Royong Juara II diterima oleh Kelurahan Pakunden, tanggal 13 Agustus 2025.
23. Pemerintah Kota Blitar meraih penghargaan Program Desa/Kelurahan Cinta Statistik.
24. Pemerintah Kota Blitar kembali menerima penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 5 diterima Kelurahan Gedog.

25. Pemerintah Kota Blitar kembali menerima penghargaan Anugerah Patriot Jawi Wetan II Kategori Sinergitas Antar Lembaga.
26. Pemerintah Kota Blitar berhasil menerima Penghargaan Inotek Award 2025, Batik Puspa Dahana.
27. Pemerintah Kota Blitar menerima penghargaan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024 meraih peringkat XI Nasional dan peringkat ke-5 se-Jawa Timur dengan Indeks Kearsipan 91,59 kategori AA.
28. Pemerintah Kota Blitar kembali menerima penghargaan Kelurahan Pangan Aman Nasional 2025 peringkat III Regional Barat.
29. Pemerintah Kota Blitar meraih penghargaan Investment Award 2025 Provinsi Jawa Timur, Harapan I Kategori sebagai Kabupaten/Kota.
30. Pemerintah Kota Blitar kembali menerima penghargaan, Kota dengan Kinerja Pengendalian PMK Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Timur dan Apresiasi Kabupaten/Kota dengan Kontribusi PAD melalui Penggunaan SKKH.

Secara kumulatif, cukup banyak penghargaan yang diberikan kepada Kota Blitar, namun demikian masih ada beberapa indikator kinerja di organisasi perangkat daerah yang pencapaiannya belum maksimal sesuai dengan yang diharapkan, karena adanya berbagai kendala, hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Demikian LPPD Kota Blitar Tahun 2025 disusun dan disampaikan kepada pemerintah pusat untuk mendapatan evaluasi dan masukan. Semoga LPPD ini dapat memberikan informasi yang komprehensif, bermanfaat dan dapat dijadikan bahan pengambilan kebijakan daerah pada tahun berikutnya, dan semoga Allah Subhanahuwata'ala senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan ridho-Nya kepada kita semua untuk membawa Kota Blitar dari KEREN (Keberagaman-Religius-Nasionalis), unggul, Makmur dan bermartabat menuju Kota Blitar yang SAE (Santun, Amanah dan Excellent), agar tercipta Kota yang Maju, Sehat, dan Sejahtera menuju Kota Masa Depan.

WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR: 100.3.3.3/12/HK/410.020.3/2026

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN PEREVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penyusun dan Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

a. Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran I; dan
b. Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Blitar Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. menyiapkan data-data sebagai bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Blitar Tahun 2025;
b. melaksanakan koordinasi teknis dengan Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Kecamatan/Kelurahan dan Perangkat Daerah lain di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
c. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan (LKPJ) Walikota Blitar Tahun Anggaran 2025 untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.

KETIGA : Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEEMPAT : Tim Pereviu sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA melaksanakan reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 yang telah disusun oleh Tim Penyusun.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 22 Januari 2026
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NINA INDRAYANTI, S.H.
NIP. 198101302006042007

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR: 100.3.3.3/12/HK/410.020.3/2026
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN PEREVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	URAIAN
			BAB/SUB BAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengarah	Walikota Blitar.	-	
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kota Blitar.	-	
3.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Blitar.	-	
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar.	-	
5.	Wakil Sekretaris	Analis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat Daerah Kota Blitar (HARTATO, S.STP.).	-	
6.	Anggota	a. Penata Kelola Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar (NANANG SULAIMAN, S.E.);	BAB I Pendahuluan 1.1 Penjelasan Umum	1) Undang-Undang Pembentukan Daerah; 2) Data Geografis Wilayah; 3) Jumlah Penduduk; 4) Jumlah Kecamatan dan Kelurahan; 5) Jumlah Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah;

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS BAB/SUB BAB	URAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				6) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 7) Pengumpul dan Pengolah Data.
		b. Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Blitar (RIRIN WISMA SAPUTRI, S.Pd.);	BAB I Pendahuluan 1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	1) Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah; 2) Visi dan Misi Kepala Daerah; 3) Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah; dan 4) Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.
			BAB I Pendahuluan 1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	1) Dasar pertimbangan penerapan Standar Pelayanan Minimal; 2) Dasar penerapan Standar Pelayanan Minimal; 3) Kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan 4) Gambaran orientasi komitmen yang ditetapkan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS BAB/SUB BAB	URAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran.
		c. Analis Kebijakan Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Blitar (YUNITA RAHMAWATI, S.T.);	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.1 Capaian Kinerja Makro	Indikator Kinerja Makro sebagai berikut: 1) Indeks Pembangunan Manusia; 2) Angka Kemiskinan; 3) Angka Pengangguran; 4) Pertumbuhan Ekonomi; 5) Pendapatan per Kapita; dan 6) Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio).
			BAB III Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	Tugas Pembantuan.
		d. Perencana Ahli Muda Dinas Pendidikan Kota Blitar (DESY WIDYANINGRUM, S.Pd.);	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Urusan Wajib Pendidikan, Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.
		e. Administrator Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan Kota Blitar (RIZKI ANASTASIA WIDHIANINGRUM, S.KM.);	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Urusan Wajib Kesehatan, Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS BAB/SUB BAB	URAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Urusan Konkuren	
		f. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar;	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Urusan Konkuren	Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum.
		g. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar;	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Urusan Konkuren	Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS BAB/SUB BAB	URAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		h. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar;	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Urusan Konkuren	Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
		i. Perencana Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar (YULIANI INDARYANTI, S.Pd.);	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Urusan Konkuren	Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
		j. Perencana Ahli Muda Dinas Sosial Kota Blitar (SRI WAHYUNI A.Md.); k. Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Sosial Kota Blitar (BETY ANGGRIANNI, S.M.);	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan	Urusan Wajib Sosial, Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sosial.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS BAB/SUB BAB	URAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Penyelenggaraan Urusan Konkuren	
		l. Perencana Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar (MILADIYAH ROHMAWATI, S.Kom.)	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Urusan Konkuren	Urusan Wajib Penanaman Modal.
		m. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar;	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Urusan Konkuren	1) Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan 2) Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
		n. Perencana Ahli Muda Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar (CRISTINA RATNAWATI, S.P., M.P.);	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1) Urusan Wajib Pangan; dan 2) Urusan Pilihan Pertanian dan Perikanan.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS BAB/SUB BAB	URAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Urusan Konkuren	
		o. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar;	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Urusan Konkuren	Urusan Wajib Lingkungan Hidup.
		p. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar;	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Urusan Konkuren	Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS BAB/SUB BAB	URAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		q. Analis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat Daerah Kota Blitar (SITI SULISTIANI, S.Sos.);	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Urusan Konkuren	Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat.
		r. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Blitar;	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Urusan Konkuren	Urusan Wajib Perhubungan.
		s. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Blitar;	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan	Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS BAB/SUB BAB	URAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Penyelenggaraan Urusan Konkuren	
		t. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kota Blitar;	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Urusan Konkuren	Urusan Wajib Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Mikro.
		u. Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Blitar (MUHAMAD AGUNG SUTOPO, S.E.);	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Urusan Konkuren	Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga.
		v. Perencana Ahli Pertama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar (ICI NINA PUSPITA, S.Pd.);	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Urusan Wajib Kebudayaan dan Urusan Pilihan Pariwisata.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS BAB/SUB BAB	URAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Urusan Konkuren	
		w. Perencana Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (ERY MINTARSIH, S.E.);	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Urusan Konkuren	Urusan Wajib Perpustakaan dan Kearsipan.
		x. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar;	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Urusan Konkuren	Urusan Pilihan Perdagangan dan Perindustrian.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS BAB/SUB BAB	URAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		y. Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Blitar (PUGUH ARISUDHANA S.E.);	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan, Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan.
		z. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar; aa. Perencana Ahli Muda Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar (OKKI MARHENDRA PUTRA, S.Ak.);	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Keuangan Daerah.
		bb. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar;	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS BAB/SUB BAB	URAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		cc. Perencana Ahli Pertama Inspektorat Daerah (ALEXSIUS RIYANTO, S.Pd.);	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah.
		dd. Analis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat Daerah Kota Blitar (NIKEN NIULANSARI, S.AP);	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fungsi Kesekretariatan Daerah.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS BAB/SUB BAB	URAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1) Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja; 2) Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja; 3) Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya; 4) Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya; 5) Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah; 6) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai; dan 7) Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS BAB/SUB BAB	URAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		ee. Perencana Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar (YUYUN INDAH DWIRAHAYU, S.E., M.M.);	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kesatuan Bangsa dan Politik.
		ff. Analis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat Daerah Kota Blitar (HARTATO, S.STP);	BAB IV Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja, Pengukuran Capaian Kinerja, Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.
		gg. Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Blitar (PUGUH ARISUDHANA, S.E.);	BAB III Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	Tugas Pembantuan.
		hh. Analis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat Daerah Kota Blitar (WAHYUDIANTO, S.Sos., M.A.P.);	-	Pengumpul dan Pengolah Data.
		ii. Fasilitator Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar	-	Pengumpul dan Pengolah Data.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	URAIAN
			BAB/SUB BAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(MOCHAMAD RIFANSYAH MEI QIZA, S.Tr.I.P.);		
		jj. Pengadministrasi Perkantoran Sekretariat Daerah Kota Blitar (ASRI WINAYU);	-	Pengumpul dan Pengolah Data.
		kk. Pengadministrasi Perkantoran Sekretariat Daerah Kota Blitar (SITI ROFIAH); dan	-	Pengumpul dan Pengolah Data.
		ll. Arsiparis Terampil Sekretariat Daerah Kota Blitar (NAFI SEPTI MEKAR SARI, S.Pd., M.M.).	-	Pengumpul dan Pengolah Data.

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NINA INDRAYANTI, S.H.
NIP. 198101302006042007

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR: 100.3.3.3/12/HK/410.020.3/2026
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN PEREVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BLITAR TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	URAIAN
			BAB/SUB BAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengarah	Walikota Blitar.	-	
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kota Blitar.	-	
3.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Blitar.	-	
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar.	-	
5.	Wakil Sekretaris	Analis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat Daerah (WAHYUDIANTO, S.Sos., M.A.P.).	-	
6.	Anggota	a. Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Blitar (NURMILAH, S.T.)	BAB I Pendahuluan	1) Dasar Hukum; 2) Visi dan Misi Kepala Daerah; dan 3) Data Umum Daerah (Data Geografis Wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk).

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS BAB/SUB BAB	URAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		b. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar;	BAB I Pendahuluan	Data Umum Daerah (Jumlah PNS).
			BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.5. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kepegawaian dan Pendidikan serta Pelatihan.
		c. Perencana Ahli Muda Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar (OKKI MARHENDRA PUTRA, S.Ak.);	BAB I Pendahuluan	Data Umum Daerah (Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan, realisasi belanja menurut jenis belanja, realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan).
			BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.5. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Keuangan Daerah.
		d. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Badan Pendapatan	BAB II	Menjelaskan perubahan terhadap kegiatan dan alokasi yang terkait dengan pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS BAB/SUB BAB	URAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar;	Perubahan Penjabaran Aanggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	rangka pencapaian target yang disepakati dalam dokumen anggaran.
		e. Analis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat Daerah Kota Blitar (NIKEN NIULANSARI, S.AP.);	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.1. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.
			BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.5. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fungsi Kesekretariatan Daerah.
		f. Perencana Ahli Muda Dinas Pendidikan Kota Blitar (DESY WIDYANINGRUM, S.Pd.);	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.2. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Pendidikan.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS BAB/SUB BAB	URAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		g. Administrator Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan Kota Blitar (RIZKI ANASTASIA WIDHIANINGRUM, S.KM.);	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.2. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Kesehatan.
		h. Administrator Kesehatan Ahli Muda Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar (ELLY NUR ISNAINIYAH, S.E.);	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.2. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Kesehatan
		i. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar;	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.2. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Pertanahan.
		j. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar;	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah	Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS BAB/SUB BAB	URAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			3.2. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	
		k. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar;	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.2. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
		l. Perencana Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar (YULIANI INDARYANTI, S.Pd.);	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.2. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
		m. Perencana Ahli Muda Dinas Sosial Kota Blitar (SRI WAHYUNI, A.Md.); n. Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Sosial Kota Blitar (BETY ANGGRIANNI, S.M.);	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.2. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Sosial.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS BAB/SUB BAB	URAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		o. Perencana Ahli Muda Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar (MILADIYAH ROHMAWATI, S.Kom.);	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.3. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
		p. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar;	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.3. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1) Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan 2) Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
		q. Perencana Ahli Muda Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar (CRISTINA RATNAWATI, S.P., M.P.);	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.3. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1) Urusan Wajib Pangan; dan 2) Urusan Pilihan Pertanian dan Perikanan.
		r. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar;	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Urusan Wajib Lingkungan Hidup.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS BAB/SUB BAB	URAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			3.3. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	
		s. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar;	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.3. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
		t. Analis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat Daerah Kota Blitar (SITI SULISTIANI, S. Sos);	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.3. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat.
		u. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Blitar;	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.3. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Perhubungan.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS BAB/SUB BAB	URAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		v. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Blitar;	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.3. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
		w. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kota Blitar;	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.3. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Mikro.
		x. Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Blitar (MUHAMAD AGUNG SUTOPO, S.E.);	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.3. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga.
		y. Perencana Ahli Pertama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar (ICI NINA PUSPITA, S.Pd.);	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Urusan Wajib Kebudayaan dan Urusan Pilihan Pariwisata.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS BAB/SUB BAB	URAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			3.3. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	
		z. Perencana Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar (ERY MINTARSIH, S.E.);	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.3. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Perpustakaan dan Kearsipan.
		aa. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar;	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.4. Pelaksana Urusan Pilihan	Urusan Pilihan Perdagangan dan Perindustrian.
		bb. Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Blitar (PUGUH ARISUDHANA S.E.);	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.5. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS BAB/SUB BAB	URAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.7. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	Kebijakan Strategis Kepala Daerah Dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
			BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.8. Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran Sebelumnya	Menyesuaikan dengan tindak lanjut rekomendasi DPRD yang ditujukan kepada Masing-masing Perangkat Derah.
		cc. Perencana Ahli Pertama Inspektorat Daerah Kota Blitar (ALEXSIUS RIYANTO, S.Pd.);	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.5. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fungsi Pengawasan.
		dd. Perisalah Legislatif Ahli Muda Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar (SOLECHAH, S.H.);	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fungsi Kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS BAB/SUB BAB	URAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		ee. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar;	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Wilayah Kecamatan Kepanjenkidul.
		ff. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Kecamatan Sukorejo Kota Blitar;	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Wilayah Kecamatan Sukorejo.
		gg. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Wilayah Kecamatan Sananwetan.
		hh. Perencana Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar (YUYUN INDAH DWIRAHAYU, S.E., M.M.);	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.6. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kesatuan Bangsa dan Politik.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS BAB/SUB BAB	URAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		ii. Penelaah Teknis Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Blitar (RISCHI WIJAYANTI, S.T.)	BAB IV Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dan Penugasan	Tugas Pembantuan
		jj. Analis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat Daerah Kota Blitar (HARTATO, S.STP.);	-	Pengumpul dan Pengolah Data.
		kk. Fasilitator Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar (MOCHAMAD RIFANSYAH MEI QIZA, S.Tr.I.P.);	-	Pengumpul dan Pengolah Data.
		ll. Penata Kelola Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar (NANANG SULAIMAN, S.E.);	-	Pengumpul dan Pengolah Data.
		mm. Pengadministrasi Perkantoran Sekretariat Daerah Kota Blitar (ASRI WINAYU);	-	Pengumpul dan Pengolah Data.
		nn. Pengadministrasi Perkantoran Sekretariat Daerah Kota Blitar (SITI ROFIAH); dan	-	Pengumpul dan Pengolah Data.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	URAIAN
			BAB/SUB BAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		oo. Arsiparis Terampil Sekretariat Daerah Kota Blitar (NAFI SEPTI MEKAR SARI, S.Pd., M.M.);	-	Pengumpul dan Pengolah Data.

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NINA INDRAYANTI, S.H.
NIP. 198101302006042007

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR: 100.3.3.3/12/HK/410.020.3/2026
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN PEREVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEREVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	URAIAN
1.	Penanggung Jawab	Inspektur Daerah Kota Blitar.	Melegalisasi Laporan Hasil Reviu.
2.	Wakil Penanggung Jawab	Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Blitar.	Meneliti dan memastikan kebenaran laporan hasil reviu.
3.	Pengendali Teknis	Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah Kota Blitar (TAUFIQ RACHMAN HAKIM, S.Sos., M.M.).	Mengarahkan, mengendalikan pelaksanaan tugas Reviu.
4.	Ketua	Pengawas Pemerintahan Madya/Ahli Madya Inspektorat Daerah Kota Blitar (Drs. SINGGIH SISWANTO)	Mengoordinasi Anggota dan menyusun laporan hasil reviu.
5.	Anggota	a. Pengawas Pemerintahan Muda/Ahli Muda Inspektorat Daerah Kota Blitar (AINUR ROFIQOH, S.STP., M.Si.);	Melakukan penelaahan, mencermati dan mengoreksi bukti dukung pada Aplikasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
		b. Auditor Ahli Muda Inspektorat Daerah Kota Blitar (AYU DYAH WULANDARI, S.AB.); dan	
		c. Auditor Ahli Pertama Inspektorat Daerah Kota Blitar (FRIDA KARTIKA PUTRI DEFINA, S.E.).	

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NINA INDRAYANTI, S.H.
NIP. 198101302006042007